



PERATURAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2025



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- d. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) RPJMD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.

Pasal 6

- (1) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan RPJMD yang tidak mengubah target indikator kinerja sasaran akhir periode dan nomenklatur program prioritas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang RKPD.
- (3) Perubahan RPJMD yang mengubah target akhir atau nomenklatur program prioritas dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPJMD kepada DPRD setiap tahun melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
- (5) Pencapaian target RPJMD dibahas dalam forum koordinasi Gubernur dengan Bupati/Wali Kota setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

DPRD melakukan pembahasan dan penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah setiap tahun sebagai bentuk evaluasi terhadap pencapaian kemajuan pelaksanaan RPJMD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHI ALFADRI, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (2-96/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya yang sistematis dan terencana, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis dalam rangkaian proses serta tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis ini dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan yang kemudian dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah disusun sebagai pijakan menuju *Indonesia Emas Tahun 2045*, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Agar pembangunan di Provinsi Lampung selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan, maka disusun pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Penjabaran pelaksanaan RPJPD tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap pertama, yakni Tahap Penguatan Fondasi Transformasi.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan visi nasional, dengan menekankan penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan. Visi nasional, yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*, sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Lampung, yakni *"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"*.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025–2045 tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sekaligus daya saing daerah. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita tersebut, daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan daerah, guna mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan nasional di tingkat daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, serta arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah untuk jangka menengah lima tahunan. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJMD Tahun 2025–2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pelaku aktif, yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 563

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

	Daftar Isi.....	Hal. i
	Daftar Tabel.....	iii
	Daftar Gambar.....	v
BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Dasar Hukum.....	I-5
	1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	I-9
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-11
	1.5 Sistematika Penulisan.....	I-13
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH.....	II-1
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-98
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-154
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-198
	2.1.5 Standar Pelayanan Minimal.....	II-213
	2.1.6 Kerjasama Daerah.	II-215
	2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Provinsi di Kabupaten/Kota.....	II-219
	2.1.8 BUMD yang mendukung kinerja Pelayanan Pemda... ..	II-247
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah.....	II-255
	2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024.....	II-255
	2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025- 2029.....	II-273
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-295
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-295
	2.3.2 Isu Strategis Daerah.....	II-316
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1
	3.1 Tinjauan Kebijakan RPJMN 2025-2029.....	III-3
	3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-6
	3.2.1 Visi dan Misi.....	III-6
	3.2.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025- 2029.....	III-12
	3.3 Keselarasan Kebijakan Pembangunan RPJMD 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.....	III-21
	3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-32
	3.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan	III-32
	3.4.2 Program-program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III- 109
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	IV-1
	4.1 Program Perangkat Daerah.....	IV-1
	4.1.1 Daftar Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.....	IV-1
	4.1.2 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional.....	IV-1



4.1.3	Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan daftar Kegiatan Prioritas Utama (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.....	IV-16
4.1.4	Program perangkat daerah mendukung Tematik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029.....	IV-26
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-33
4.2.1	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-34
4.2.2	Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).....	IV-36
BAB V	PENUTUP.....	V-1
5.1	Kaidah Pelaksanaan.....	V-3
5.2	Tata Kelola Data Pembangunan.....	V-9
5.3	Kerangka Regulasi Untuk Mendukung RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029.....	V-10
5.4	Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.....	V-12
Lampiran I	Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	
Lampiran II	Penjenjangan Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau di Provinsi Lampung..... II-2

Tabel 2. 2 Kawasan Hutan di Provinsi Lampung..... II-6

Tabel 2. 3 Sebaran Luas Potensi Keanekaragaman Hayati Darat II-7

Tabel 2. 4 Luasan Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut II-8

Tabel 2. 5 Kondisi Pertambangan Provinsi Lampung II-9

Tabel 2. 6 Luas Kawasan Pertanian Provinsi Lampung..... II-12

Tabel 2. 7 Luas Kawasan Pertanian terdampak Bencana Banjir II-13

Tabel 2. 8 Luas Lahan Baku Sawah Terdampak Banjir II-14

Tabel 2. 9 Luas Kawasan Perikanan Provinsi Lampung II-14

Tabel 2. 10 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung..... II-15

Tabel 2. 11 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung..... II-17

Tabel 2. 12 Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung..... II-18

Tabel 2. 13 Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2022-2024 II-26

Tabel 2. 14 Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Lampung..... II-27

Tabel 2. 15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024 II-30

Tabel 2. 16 Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Lampung..... II-40

Tabel 2. 17 Kerugian Bencana Provinsi Lampung Tahun 2000-2024 II-41

Tabel 2. 18 Tingkat Risiko Banjir di Provinsi Lampung..... II-46

Tabel 2. 19 Tingkat Risiko Banjir Bandang di Provinsi Lampung..... II-47

Tabel 2. 20 Tingkat Risiko Cuaca Ekstrem di Provinsi Lampung II-48

Tabel 2. 21 Tingkat Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit II-49

Tabel 2. 22 Tingkat Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi..... II-52

Tabel 2. 23 Tingkat Risiko Gempabumi di Provinsi Lampung II-53

Tabel 2. 24 Tingkat Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan..... II-55

Tabel 2. 25 Tingkat Risiko Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung..... II-57

Tabel 2. 26 Tingkat Risiko Kekeringan di Provinsi Lampung..... II-58

Tabel 2. 27 Tingkat Risiko Letusan Gunungapi di Provinsi Lampung II-59

Tabel 2. 28 Tingkat Risiko Likuefaksi di Provinsi Lampung II-60

Tabel 2. 29 Tingkat Risiko Tanah Longsor di Provinsi Lampung II-62

Tabel 2. 30 Tingkat Risiko Tsunami di Provinsi Lampung..... II-63

Tabel 2. 31 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten / Kota..... II-65

Tabel 2. 32 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (km²) II-73

Tabel 2. 33 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung II-74

Tabel 2. 34 Proyeksi Jumlah Penduduk kabupaten/kota II-76

Tabel 2. 35 Jumlah Penduduk di Sepuluh Provinsi Terbanyak 2020 II-77

Tabel 2. 36 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung II-78

Tabel 2. 37 Proyeksi Jumlah Penduduk kabupaten/kota	II-80
Tabel 2. 38 Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Lampung	II-88
Tabel 2. 39 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Lampung.....	II-89
Tabel 2. 40 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung.....	II-91
Tabel 2. 41 Proyeksi Timbunan Sampah Provinsi Lampung.....	II-93
Tabel 2. 42 Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah	II-94
Tabel 2. 43 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	II-95
Tabel 2. 44 Proyeksi Akses Sanitasi Layak 2025 - 2029	II-96
Tabel 2. 45 Jumlah Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2029.....	II-97
Tabel 2. 46 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung	II-102
Tabel 2. 47 Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja	II-113
Tabel 2. 48 Tenaga Kerja Tersertifikasi Tahun 2023-2024	II-114
Tabel 2. 49 Hasil Assesmen Nasional terkait kompetensi minimum.....	II-138
Tabel 2. 50 PPKS Tertangani di Provinsi Lampung	II-143
Tabel 2. 51 Pencapaian Dimensi Pembentuk IKK	II-151
Tabel 2. 52 Pertumbuhan PDRB Lampung	II-161
Tabel 2. 53 Jumlah Koperasi di Provinsi Lampung 2020 - 2024	II-164
Tabel 2. 54 Jumlah Data UKM Menurut Kabupaten/Kota.....	II-166
Tabel 2. 55 Potensi Panas Bumi di Provinsi Lampung	II-177
Tabel 2. 56 Potensi PLTS Pada Bendungan di Provinsi Lampung.....	II-179
Tabel 2. 57 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Komoditi.....	II-184
Tabel 2. 58 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota	II-211
Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah	II-212
Tabel 2. 60 Capaian SPM Per Urusan Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-214
Tabel 2. 61 Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Pada RPJMN.....	II-221
Tabel 2. 62 Arah Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan.....	II-233
Tabel 2. 63 Laporan Keuangan Lampung Jasa Utama.....	II-249
Tabel 2. 64 Laporan Keuangan PT Lampung Jasa Utama.....	II-251
Tabel 2. 65 Laporan Keuangan PT Wahana Raharja	II-252
Tabel 2. 66 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	II-259
Tabel 2. 67 Realisasi Pendapatan Daerah.....	II-263
Tabel 2. 68 Realisasii Belanja Daerah.....	II-268
Tabel 2. 69 Realisasi Pembiayaan Provinsi Lampung.....	II-271
Tabel 2. 70 Necara Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	II-272
Tabel 2. 71 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030	II-275
Tabel 2. 72 Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.....	II-285
Tabel 2. 73 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Lampung.....	II-316
Tabel 3. 1 Keselarasan Visi RPJMD Prov. Lampung 2025-2029 dengan RPJMN	III-7

Tabel 3. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2030 ..	III-13
Tabel 3. 3 Keselarasan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung dengan PN.....	III-24
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.....	III-34
Tabel 3. 5 Penahapan Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Lampung	III-36
Tabel 3. 6 MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, OUTCOME DAN INDIKATOR	III-80
Tabel 3. 7 Keselarasan Strategi dan arah kebijakan	III-116
Tabel 3. 8 Matriks Dukungan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD.....	III-205
Tabel 3. 9 Program Unggulan Daerah.....	III-218
Tabel 4. 2 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program PN	IV-1
Tabel 4. 3 Dukungan Program pada Kegiatan Prioritas Utama	IV-18
Tabel 4. 4 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029.....	IV-26
Tabel 4. 5 Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD IKU.....	IV-34
Tabel 4. 6 Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025-2030	IV-37
Tabel 4. 7 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui IKK	IV-38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ringkasan Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD I-3

Gambar 1. 2 Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya I-9

Gambar 1. 3 Sinkronsasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.....I-10

Gambar 1. 4 Sistematika Dokumen RPJMDI-13

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Lampung..... II-2

Gambar 2. 2 Luasan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung II-5

Gambar 2. 3 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Lampung..... II-5

Gambar 2. 4 Keanekaragaman Hayati Darat dan Homerange Satwa..... II-8

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut II-9

Gambar 2. 6 Peta Rawan Banjir di Kawasan Pertanian di Provinsi Lampung..... II-13

Gambar 2. 7 Peta Rawan Banjir di Kawasan Lahan Baku Sawah II-14

Gambar 2. 8 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung..... II-16

Gambar 2. 9 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) II-18

Gambar 2. 10 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung II-19

Gambar 2. 11 Peta Sebaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP)..... II-20

Gambar 2. 12 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota Tahun 2024 II-20

Gambar 2. 13 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2024 II-21

Gambar 2. 14 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Tahun 2019-2024..... II-22

Gambar 2. 15 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Tahun 2023 dan 2024 II-23

Gambar 2. 16 Produksi Daging Sapi (ton) Provinsi Lampung dan Nasional..... II-23

Gambar 2. 17 Produksi Daging Sapi (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera ... II-24

Gambar 2. 18 Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (ton) II-24

Gambar 2. 19 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020 – 2024 II-25

Gambar 2. 20 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2024 II-26

Gambar 2. 21 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung II-27

Gambar 2. 22 Perubahan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 II-31

Gambar 2. 23 Status kepemilikan Rumah tangga di Provinsi Lampung..... II-33

Gambar 2. 24 Persentase Capaian Air Minum Layak Provinsi Lampung..... II-34

Gambar 2. 25 Persentase Capaian Akses Sanitasi Layak Provinsi Lampung..... II-35

Gambar 2. 26 Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung 2025 II-36

Gambar 2. 27 Jumlah RTLH Tahun 2025 di Provinsi Lampung..... II-38

Gambar 2. 28 Capaian Penurunan Intensitas GRK Tahun 2021 -2024..... II-44

Gambar 2. 29 Nilai Indeks Risiko Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 II-45

Gambar 2. 30 Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Lampung..... II-46

Gambar 2. 31 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Provinsi Lampung II-47

Gambar 2. 32 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Lampung..... II-49

Gambar 2. 33 Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung.....	II-50
Gambar 2. 34 Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Lampung..	II-52
Gambar 2. 35 Peta Risiko Gempa Bumi di Provinsi Lampung.....	II-54
Gambar 2. 36 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung.....	II-56
Gambar 2. 37 Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung	II-57
Gambar 2. 38 Peta Risiko Kekeringan di Provinsi Lampung.....	II-59
Gambar 2. 39 Peta Risiko Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung.....	II-60
Gambar 2. 40 Peta Risiko Likuefaksi di Provinsi Lampung	II-61
Gambar 2. 41 Peta Risiko Tanah Longsor di Provinsi Lampung	II-62
Gambar 2. 42 Peta Risiko Tsunami di Provinsi Lampung	II-64
Gambar 2. 43 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk	II-66
Gambar 2. 44 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak	II-67
Gambar 2. 45 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	II-68
Gambar 2. 46 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	II-69
Gambar 2. 47 Keragaman Pemeluk Agama Tahun 2024 dan Keragaman Suku	II-71
Gambar 2. 48 Rasio Jenis Kelamin dan Piramida Penduduk Tahun 2020	II-72
Gambar 2. 49 Persentase Penduduk Lampung Menurut Generasi, Tahun 2020 ...	II-73
Gambar 2. 50 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2030.....	II-75
Gambar 2. 51 Komposisi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020	II-77
Gambar 2. 52 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2030.....	II-80
Gambar 2. 53 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi.....	II-82
Gambar 2. 54 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi	II-89
Gambar 2. 55 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera	II-98
Gambar 2. 56 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung	II-99
Gambar 2. 57 Peta Persebaran Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi	II-100
Gambar 2. 58 Capaian Angka Kemiskinan Lampung dan Nasional	II-101
Gambar 2. 59 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota	II-103
Gambar 2. 60 Pola Spasial Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota.	II-103
Gambar 2. 61 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)	II-104
Gambar 2. 62 Realisasi Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Lampung..	II-105
Gambar 2. 63 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung.....	II-106
Gambar 2. 64 Keparahan Kemiskinan Kab/Kota.....	II-107
Gambar 2. 65 Tingkat Kemiskinan Ekstrim.....	II-108
Gambar 2. 66 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung	II-109
Gambar 2. 67 PDRB Perkapita Regional Sumatera	II-109
Gambar 2. 68 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota	II-110
Gambar 2. 69 Capaian TPT Provinsi Lampung dan Nasional	II-111
Gambar 2. 70 Capaian TPT Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II-111

Gambar 2. 71 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	II-112
Gambar 2. 72 Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tinggi.....	II-113
Gambar 2. 73 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 ..	II-115
Gambar 2. 74 Posisi Ketimpangan Pendapatan	II-116
Gambar 2. 75 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024 (SP 2020)	II-116
Gambar 2. 76 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sumatera.....	II-117
Gambar 2. 77 Komponen IPM Provinsi Lampung dan Nasional	II-118
Gambar 2. 78 Indeks Modal Manusia Tahun 2021-2023.....	II-119
Gambar 2. 79 Usia Harapan Hidup Laki-Laki dan Perempuan	II-120
Gambar 2. 80 Trend Capaian Indeks Keluarga Sehat	II-121
Gambar 2. 81 Persentase Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2024	II-121
Gambar 2. 82 Distribusi Capaian Indeks Keluarga Sehat per Kabupaten/Kota ...	II-122
Gambar 2. 83 Distribusi indeks keluarga sehat per provinsi tahun 2024	II-123
Gambar 2. 84 Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Provinsi Lampung	II-124
Gambar 2. 85 Cakupan Penemuan Kasus TBC (CDR) Tahun 2020-2024	II-125
Gambar 2. 86 Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru (<i>success rate</i>)	II-125
Gambar 2. 87 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.....	II-128
Gambar 2. 88 Trend Persentase Penduduk yang Menjadi Peserta JKN	II-128
Gambar 2. 89 Prevalensi Stunting Provinsi Lampung dan Nasional 2013-2024 ...	II-130
Gambar 2. 90 Trend Prevalensi Stunting Kab/Kota Tahun 2024	II-132
Gambar 2. 91 Capaian RLS Provinsi Lampung	II-133
Gambar 2. 92 Capaian RLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 ..	II-133
Gambar 2. 93 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah	II-134
Gambar 2. 94 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Menengah	II-135
Gambar 2. 95 Angka Partisipasi Sekolah Usia 4-18 Tahun	II-136
Gambar 2. 96 Angka Anak Tidak Sekolah Provinsi Lampung,	II-137
Gambar 2. 97 Lulusan Sekolah Menengah Kejurusan (SMK)	II-139
Gambar 2. 98 Trend Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-140
Gambar 2. 99 Persentase Pengunjung Perpustakaan	II-141
Gambar 2. 100 Jumlah Peserta Aktif Jaminan Sosial Tenaga kerja 2021-2024 ...	II-142
Gambar 2. 101 Jumlah Peserta Aktif Jaminan Sosial Tenaga kerja	II-142
Gambar 2. 102 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-145
Gambar 2. 103 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung	II-147
Gambar 2. 104 Dimensi Ekspresi Budaya Provinsi Lampung dan Nasional	II-148
Gambar 2. 105 Capaian IPA Provinsi Lampung terhadap target daerah.....	II-149
Gambar 2. 106 Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	II-150
Gambar 2. 107 Trend Indeks Kualitas Keluarga (IKK).....	II-151
Gambar 2. 108 Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota Tahun 2024	II-152

Gambar 2. 109 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024	II-153
Gambar 2. 110 Indeks Pembangunan Pemuda	II-154
Gambar 2. 111 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung....	II-155
Gambar 2. 112 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk	II-156
Gambar 2. 113 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024	II-157
Gambar 2. 114 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan.....	II-157
Gambar 2. 115 PDRB LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Indonesia..	II-158
Gambar 2. 116 PDRB LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	II-159
Gambar 2. 117 Rasio PDRB Sektor Pertanian Tahun 2019-2024.....	II-160
Gambar 2. 118 Laju Perumbuhan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2019-2024	II-160
Gambar 2. 119 PDB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku 2018-2022	II-162
Gambar 2. 120 Jumlah UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023	II-165
Gambar 2. 121 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2019-2024 ...	II-167
Gambar 2. 122 Status Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	II-168
Gambar 2. 123 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas.....	II-169
Gambar 2. 124 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas.....	II-170
Gambar 2. 125 Capaian Indikator Kinerja IID	II-172
Gambar 2. 126 Hasil perhitungan Indeks Ekonomi Hijau.....	II-175
Gambar 2. 127 Potensi EBT Porsi EBT	II-179
Gambar 2. 128 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	II-180
Gambar 2. 129 Perkembangan <i>Share</i> dan Laju Pertumbuhan PMTB	II-182
Gambar 2. 130 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR	II-182
Gambar 2. 131 Kinerja Perdagangan Luar Negeri Tahun 2016-2024	II-183
Gambar 2. 132 Kondisi Ruas Jalan kewenangan.....	II-185
Gambar 2. 133 Komposisi jalan di Provinsi Lampung Tahun 2024	II-186
Gambar 2. 134 Panjang Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2024 ...	II-186
Gambar 2. 135 Indeks Desa Membangun Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 ..	II-193
Gambar 2. 136 Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Lampung	II-194
Gambar 2. 137 Perkembangan Inflasi Gabungan	II-195
Gambar 2. 138 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	II-195
Gambar 2. 139 Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2006-2024.....	II-198
Gambar 2. 140 Indeks Reformasi Birokrasi	II-199
Gambar 2. 141 Capaian Indeks SPBE Provinsi Lampung, 2020-2024	II-202
Gambar 2. 142 Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	II-203
Gambar 2. 143 Survei Penilaian Integritas Provinsi Lampung, 2021-2024.....	II-204
Gambar 2. 144 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung	II-206
Gambar 2. 145 Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	II-210
Gambar 2. 146 Realisasi Capaian SPM Prov. Lampung Tahun 2024	II-213

Gambar 2. 147 Capaian SPM per Urusan Kab/Kota Tahun 2024II-214

Gambar 2. 148 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung.....II-221

Gambar 2. 149 Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah III-232

Gambar 2. 150 Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah IIII-232

Gambar 2. 151 Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah IIIII-233

Gambar 2. 152 Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)II-257

Gambar 2. 153 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan DaerahII-265

Gambar 2. 154 Proporsi Realisasi Komponen Belanja DaerahII-269

Gambar 3. 1 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD III-22

Gambar 3. 2 Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN..... III-23

Gambar 3. 3 Keselarasan Rencana Pembangunan Pada RPJMN-RPJMD III-214



PERDA

**RPJMD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025-2029**

BAB I PENDAHULUAN



**BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tongkat estafet untuk kesinambungan pembangunan nasional dan daerah terus berlanjut. Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 telah ditetapkan, demikian pula penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Semangat pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan diawali dengan pelaksanaan Tahap pertama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi secara menyeluruh dengan berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mendorong kemajuan. Selaras dengan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2025-2029 yang bertajuk “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”; Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengukuhkan **Visi Pembangunan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” sebagai cita-cita dan tujuan pembangunan Tahun 2025-2029.**

Sejarah telah membuktikan bahwa Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Lampung tidak menyurutkan semangat untuk terus bekerja untuk mewujudkan tujuan bernegara. Beragam dinamika selama mengisi kemerdekaan tersebut telah menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan



pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 telah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Bapak Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Jihan Nurlela dengan masa Jabatan 2025 - 2030 di Istana Negara Jakarta bersamaan dengan pelantikan para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota seluruh Indonesia. Untuk itulah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari rangkaian dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip: 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; serta 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan sumber daya, dan memperhatikan durasi perencanaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dijelaskan bahwa tahapan penyusunan dokumen RPJMD meliputi: 1) Persiapan penyusunan RPJMD, 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, 3) Penyusunan Rancangan RPJMD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, 5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan 6) Penetapan RPJMD.

Gambar 1. 1 Ringkasan Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung

Dalam rangka penyusunan RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa tahapan sebagaimana dimaksud, antara lain :

- 1) Pada Tahap Persiapan, telah didahului dengan penyusunan jadwal kerja dan kegiatan orientasi teknis kepada personil Tim Penyusun pada tanggal 11 Februari 2025 serta pembentukan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/172/VI.01/ HK/2025 tanggal 5 Maret 2025.
- 2) Guna memperoleh saran dan masukan terhadap rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, pada tanggal 21 Maret 2025 yang lalu telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang



melibatkan Bappeda kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, DPRD Provinsi Lampung, Kementerian/Lembaga di Provinsi Lampung dan *stakeholder* dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, perbankan, organisasi profesi dan ormas, serta pemangku kepentingan yang terkait.

- 3) Dengan memperhatikan saran dan masukan serta Berita Acara Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada poin 2), Tim Penyusun RPJMD Provinsi Lampung telah melaksanakan penyempurnaan substansi/materi dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.
- 4) Selanjutnya, memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah disampaikan surat Gubernur Lampung Nomor 000.7.2.2/1416/VI.01/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 kepada DPRD Provinsi Lampung; guna pembahasan dan memperoleh kesepakatan bersama.

Selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029, penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 diarahkan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dengan senantiasa memperhatikan aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan. Dengan mengusung Visi Lampung 2025-2029 “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” yang ditransmisikan melalui 3 (tiga) Misi pembangunan, yaitu: (1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif; (2) Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif; (3) Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas; seluruh substansi yang ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung 5 (lima) tahun ke depan tersebut akan mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 
- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2018);

- 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (Rippar Prov);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;
 39. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; secara paralel mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD dan RTRW Provinsi Lampung serta Visi-Misi dan Program Kerja Gubernur/Wakil Gubernur, dengan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD (KLHS-RPJMD) Provinsi Lampung, serta Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

Gambar 1. 2 Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2025

1.3.1 Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 merupakan periode I dari rangkaian periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.

Dengan demikian maka substansi penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 akan mempedomani dokumen RPJPD 2025-2045. Lebih lanjut, penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 juga akan memedomani dan mendukung pencapaian ASTA CITA pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan yang menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Gambar 1. 3 Sinkronsasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2025

1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen RPJMD ini selanjutnya juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah, dimana penetapan sasaran, indikator sasaran dan target haruslah mengacu pada sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah. Sedangkan sasaran dan indikator sasaran dan target pada dokumen Renstra PD akan menjadi indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang akan dijabarkan pada Program, *Outcome* Program, Kegiatan dan *Output* Kegiatan beserta targetnya. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra PD wajib dilakukan proses *cascading* dari tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan indikator indikator sasaran pada dokumen RPJMD ke dalam tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Disisi yang lain, guna

mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang pemerintahan, maka RPJMD Provinsi Lampung juga menjadi salah satu bahan acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaannya pada periode tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.3 Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 memperhatikan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.4 Hubungan RPJMD Provinsi Lampung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Lampung

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Guna kesinambungan perencanaan pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pemerintah Provinsi Lampung mulai melaksanakan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Substansi dalam dokumen RPJMD ini memuat gambaran umum kondisi daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah dan kerangka pendanaan untuk jangka waktu periode 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung. Seluruh uraian substansi dalam RPJMD tersebut dimaksudkan untuk:

1. Mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah dan cita-cita nasional, serta memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.
2. Menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
3. Menjadi pedoman pembangunan daerah selama 5 tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.
4. Menjamin keterpaduan perencanaan antar sektor dan wilayah, serta sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

Adapun, tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang dijabarkan melalui tahapan pembangunan secara tahunan.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar jenjang pemerintahan.

- 3. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 4. Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- 6. Menyediakan bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, muatan substansi dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Gambar 1. 4 Sistematika Dokumen RPJMD

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Daerah
BAB III	Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV	Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V	Penutup

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2025

• Bab I : PENDAHULUAN

Memuat pembahasan mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian dokumen RPJMD.

• Bab II : GAMBARAN UMUM DAERAH



Menguraikan substansi yang berkenaan dengan kondisi gambaran umum kondisi daerah pada tinjauan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum; gambaran umum keuangan daerah; serta uraian tentang permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

- **Bab III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Menyajikan substansi tentang visi, misi, tujuan, sasaran beserta indikator dan target pembangunan 5 (lima) tahun ke depan; yang diikuti dengan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- **Bab IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Menguraikan daftar indikasi program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai pengampu urusan pemerintah daerah, yang dilengkapi dengan pagu indikatif, indikator program dan target kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan.

- **Bab V : PENUTUP**

Memuat pokok-pokok simpulan penting dari substansi RPJMD beserta kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



PERDA

**RPJMD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025-2029**

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH



**BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara astronomis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40' - 105°50' Bujur Timur dan 6°45' - 3°45' Lintang Selatan.

Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung mempunyai posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, cakupan wilayah Lampung meliputi 13 kabupaten dan 2 (dua) kota, dengan 172 pulau dan panjang garis pantai mencapai 1.345,20 km, luas keseluruhan mencapai 4.997.290 ha, terdiri dari luas daratan 3.357.026,40 ha dan wilayah perairan pesisir mencakup wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut provinsi yang berdekatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Lampung memiliki 30 segmen batas wilayah antar kabupaten dan provinsi yang terdiri dari 21 segmen batas antar kabupaten/kota serta 8 (delapan) segmen batas antar Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) segmen batas antar Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yaitu sebesar 13,58 persen dari luas Provinsi Lampung, sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Metro dengan proporsi luasan

hanya sebesar 0,21 persen dari total luas wilayah Lampung. Berikut Provinsi Lampung yang dibagi dalam 15 Kabupaten/Kota, yaitu:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Pulau
1	Lampung Tengah	4.559,57	Gunung Sugih	-
2	Lampung Timur	3.860,92	Sukadana	5
3	Way Kanan	3.522,11	Blambangan Umpu	-
4	Tulang Bawang	3.116,06	Menggala	-
5	Tanggamus	2.947,59	Kota Agung	76
6	Pesisir Barat	2.939,60	Krui	3
7	Lampung Utara	2.669,30	Kotabumi	-
8	Lampung Selatan	2.227,38	Kalianda	50
9	Mesuji	2.200,41	Wiralaga Mulya	-
10	Lampung Barat	2.107,99	Liwa	-
11	Pesawaran	1.288,08	Gedong Tataan	36
12	Tulang Bawang Barat	1.257,09	Panaragan	-
13	Pringsewu	617,19	Pringsewu	-
14	Kota Bandar Lampung	183,75	Bandar Lampung	2
15	Kota Metro	73,21	Metro	-
Provinsi Lampung		33.570,26		172

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Lampung



Sumber : Perda RTRW Provinsi Lampung No. 14 Tahun 2023

Topografi memiliki peran penting dalam memahami dan mengelola risiko kebencanaan, karena bentuk dan karakteristik permukaan bumi sangat memengaruhi dampak bencana seperti banjir dan tanah longsor di suatu wilayah. Berdasarkan kondisi topografi Provinsi Lampung, dataran tinggi berupa daerah berbukit hingga bergunung dengan lereng curam di atas 25% dan ketinggian rata-rata 300 meter dpl, mencakup Pesisir Barat, Lampung Barat dan Tanggamus yang sangat rawan terhadap longsor dan pergerakan tanah



akibat curah hujan tinggi serta gempa bumi. Sedangkan dataran rendah berupa daerah berombak sampai bergelombang, dataran aluvial, dataran rawa pasang surut dan daerah aliran sungai dengan kemiringan 0%–15% dan ketinggian 0,5–500 meter dpl, meliputi wilayah seperti Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tulang Bawang yang berpotensi mengalami erosi dan banjir lokal.

Secara geologi, wilayah Provinsi Lampung terletak pada struktur tektonik Sesar Besar Sumatera (SBS), atau Sesar Semangko, yang membentang dari Provinsi Lampung hingga Aceh dengan arah barat laut–tenggara sejajar Pulau Sumatera. Sesar ini menjadi pemicu utama tingginya aktivitas seismik di Lampung. Selain itu, subduksi lempeng menghasilkan magma yang naik ke permukaan, membentuk deretan Gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, termasuk di Lampung. Kombinasi antara sesar aktif dan aktivitas vulkanik menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap bencana geologi seperti Gempa, Letusan Gunung berapi, Likuifaksi dan Tsunami. Dengan mengetahui kondisi geologi Provinsi Lampung yang rawan bencana, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana geologi. Upaya mitigasi risiko, edukasi kebencanaan, serta pemantauan aktivitas seismik dan vulkanik secara berkala sangat diperlukan guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan serta melindungi keselamatan masyarakat di wilayah Provinsi Lampung.

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung yang terbesar yaitu DAS Tulang Bawang dengan luas 946.428,81 ha, DAS Seputih seluas 752.388,09 ha, DAS Sekampung seluas 482.198,31 ha dan DAS Mesuji seluas 277.370,52 ha. Terdapat 9 (sembilan) Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Lampung dengan luas total 3.357.463,5 ha meliputi CAT Bandar Lampung, CAT Baturaja, CAT Gedung Meneng, CAT Kalianda, CAT Kota Agung, CAT Metro-Kotabumi, CAT Ranau, dan CAT Talang Padang. CAT Metro-Kotabumi merupakan CAT paling besar dengan luas 2.043.098,1 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung merupakan daerah beriklim tropis yang ditandai dengan suhu udara yang cukup panas dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Musim kemarau berlangsung antara bulan



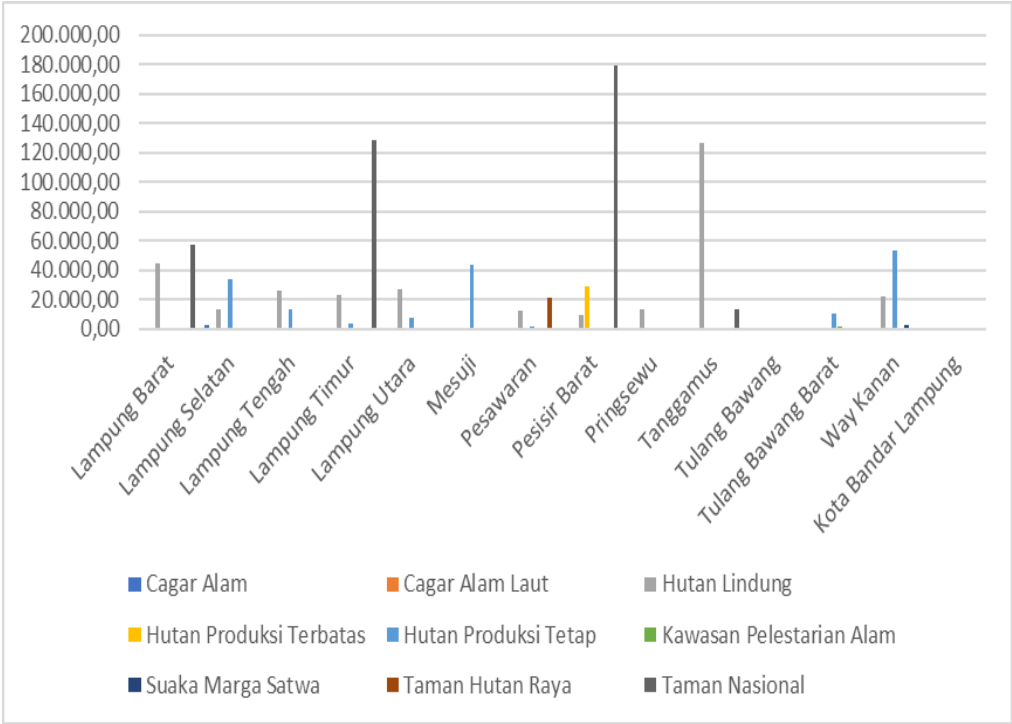
Mei hingga September, sementara musim hujan terjadi antara November hingga Mei, dengan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.000 – 3.000 mm. Bahkan, di wilayah barat Lampung seperti lereng Bukit Barisan, curah hujan bisa mencapai 3.000 – 4.000 mm per tahun, sedangkan di bagian timur, seperti Lampung Selatan, lebih rendah yaitu antara 1.000 – 2.000 mm per tahun. Pada daerah dengan ketinggian 30 – 60 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata berkisar antara 26°C – 28°C, dengan suhu maksimum mencapai 33°C dan minimum 22°C. Kelembaban udara rata-rata berada pada kisaran 80% – 88%, dan meningkat di daerah yang lebih tinggi. Kondisi iklim ini membawa dampak yang cukup signifikan, antara lain meningkatnya potensi banjir di daerah dataran rendah selama musim hujan, risiko longsor di wilayah perbukitan dengan curah hujan tinggi, serta kekeringan di musim kemarau yang dapat berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, terutama di wilayah timur yang curah hujannya lebih rendah. Kelembaban tinggi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat dengan meningkatnya risiko penyakit tropis seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik iklim ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, dan perlindungan lingkungan di Provinsi Lampung.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

1. Kawasan Hutan

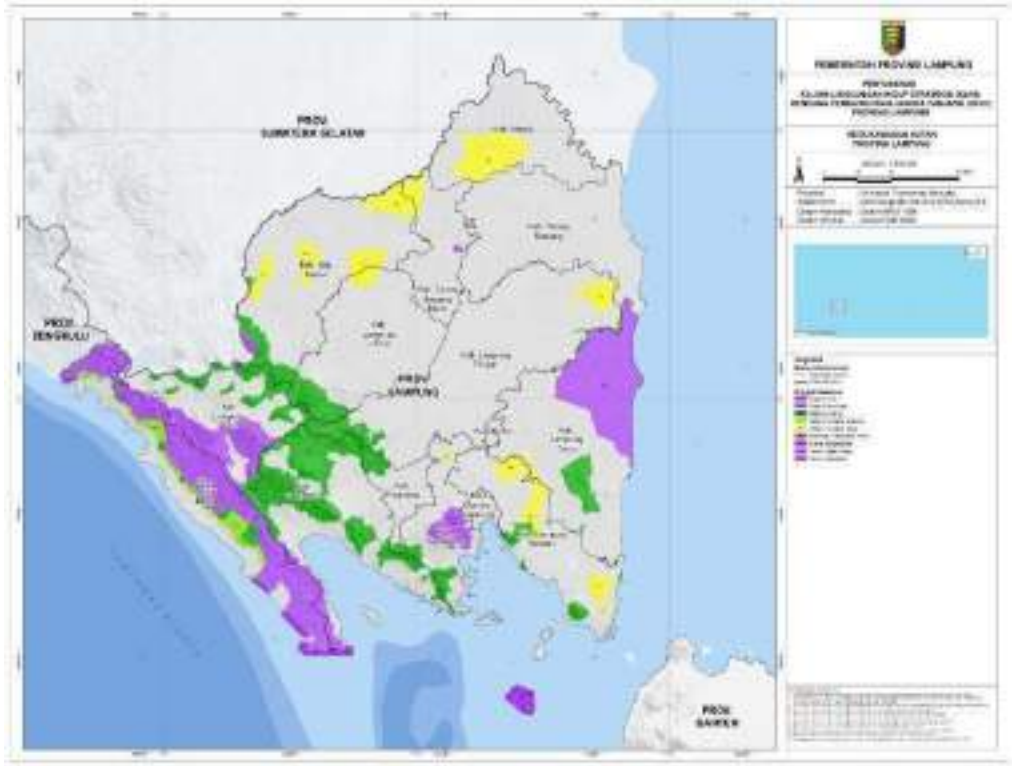
Kawasan hutan di Provinsi Lampung terdiri dari Cagar Alam, Cagar Alam Laut, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Nasional namun didominasi oleh Taman Nasional seluas 378.623,2 ha, sedangkan Hutan Produksi Terbatas hanya seluas 28.938,1 ha yang tersebar di Pesawaran dan Lampung Barat. Adapun Cagar Alam hanya berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 2.533,3 ha.

Gambar 2. 2 Luasan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov. Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2. 3 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Lampung



Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Tabel 2. 2 Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Cagar Alam	Cagar Alam Laut	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Kawasan Pelestarian Alam	Suaka Margasatwa	Taman Hutan Raya	Taman Nasional	Jumlah
Kab. Lampung Barat			44.850,10	86,9			882,2		57.530,00	103.349,10
Kab. Lampung Selatan	2.533,30	46,3	13.383,00		34.160,70					50.123,30
Kab. Lampung Tengah			26.079,40		13.783,20				9,7	39.872,30
Kab. Lampung Timur			23.184,80		3.852,90				128.312,50	155.350,20
Kab. Lampung Utara			27.178,80		7.628,70					34.807,40
Kab. Mesuji					43.990,50					43.990,50
Kab. Pesawaran			12.300,30		1.351,20			21.419,90		35.071,30
Kab. Pesisir Barat		63,1	10.070,50	28.851,20					179.729,80	218.714,60
Kab. Pringsewu			13.039,30							13.039,30
Kab. Tanggamus		85,5	126.648,90						13.041,10	139.775,50
Kab. Tulang Bawang					2,5					2,5
Kab. Tulang Bawang Barat					10.404,60	1.374,60				11.779,30
Kab. Way Kanan			22.502,20		53.523,50		3.260,90			79.286,60
Kota Bandar Lampung			149,6					296,7		446,3
Jumlah	2.533,30	194,9	319.386,70	28.938,10	168.697,70	1.374,60	4.143,10	21.716,60	378.623,20	925.608,10

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Pemanfaatan Kawasan Hutan didalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) di Provinsi Lampung terdapat enam arahan spasial, yang meliputi: (1) Kawasan untuk Konservasi; (2) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut; (3) Kawasan untuk Rehabilitasi; (4) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar; (5) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil; dan (6) Kawasan untuk Non Kehutanan. Kawasan Pengusahaan Skala Kecil (Masyarakat) merupakan rencana pemanfaatan kawasa hutan yang paling mendominasi di Provinsi Lampung dengan Luas sebesar 181.424,20 Ha. Kawasan Pengusahaan Skala Kecil (Masyarakat) memiliki arahan pemanfaatan sebagai kawasan hutan yang tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan berbagai skema perhutanan sosial (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka. Kawasan ini memiliki kriteria yaitu Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7.500 hektar dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman.

2. Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati sangat melimpah di Provinsi Lampung, dikarenakan Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan yang dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Terdapat juga tanaman khas Provinsi Lampung yaitu, Bunga Bangkai, Rafflesia Arnoldi, Kopi Robusta, dan Bunga Ashar. Keanekaragaman hayati tidak hanya flora saja, fauna/satwa liar termasuk kedalamnya.

Provinsi Lampung juga memiliki keanekaragaman fauna yang tersebar di wilayah: Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Hutan Lindung (HL) di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus, Hutan Pantai, dan Hutan Rawa di perairan laut. Taman Nasional di Provinsi Lampung memiliki luas 378.623,2 ha, kemudian Taman

Hutan Raya seluas 21.716,6 ha. Ini dapat menjadi potensi keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Sebaran Luas Potensi Keanekaragaman Hayati Darat di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Cagar Alam	Kawasan Pelestarian Alam	Suaka Margasatwa	Taman Hutan Raya	Taman Nasional	Luas (ha)
1	Kabupaten Lampung Barat			882,2		57.530,0	58.412,1
2	Kabupaten Lampung Selatan	2.533,3					2.533,3
3	Kabupaten Lampung Tengah					9,7	9,7
4	Kabupaten Lampung Timur					128.312,5	128.312,5
5	Kabupaten Pesawaran				21.419,9		21.419,9
6	Kabupaten Pesisir Barat					179.729,8	179.729,8
7	Kabupaten Tanggamus					13.041,1	13.041,1
8	Kabupaten Tulang Bawang Barat		1.374,6				1.374,6
9	Kabupaten Way Kanan			3.260,9			3.260,9
10	Kota Bandar Lampung				296,7		296,7
Jumlah		2.533,3	1.374,6	4.143,1	21.716,6	378.623,2	408.390,8

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023

Keanekaragaman hayati tidak hanya ada di darat saja tetapi di wilayah laut juga terdapat keanekaragaman hayati. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem khas di laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun, ekosistem ini bernama Padang Lamun. Padang Lamun berfungsi sebagai habitat penting untuk berbagai jenis hewan laut, seperti ikan-ikan kecil, Moluska, Krustasea, Ekinodermata, dan Penyu. Padang Lamun dapat juga sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi. Padang Lamun yang terdapat di kawasan Pesisir Lampung banyak terdapat di Pesisir Teluk Lampung terutama menyebar di pulau-pulau, Teluk Lampung, Pesisir Teluk Semaka dan sedikit di Pesisir Barat Lampung. Padang Lamun di Teluk Lampung tersebar hampir di sepanjang pantai dan di seluruh pulau-pulau di dalamnya antara lain terdapat di Pulau Tangkil, Pulau Pahawang, Pulau Tegal, Pulau Mahitam, Pulau Sebuksu, Pulau Sebesi, Pulau Tegal, dan Pulau Legundi.

Tabel 2. 4 Luasan Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut di Provinsi Lampung

No.	Keanekaragaman Hayati Laut	Luas (ha)
1	Kawasan Ekosistem Mangrove	6.652,68
2	Cagar Alam Laut	20.023,11
3	Kawasan Konservasi	136.677,19
4	Alur Biota Laut	70.535,97
Jumlah		233.888,95

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023

Provinsi Lampung memiliki luasan kawasan keanekaragaman hayati laut yaitu Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 6.652,68 ha, Cagar Alam Laut seluas 20.023,11 ha serta kawasan konservasi dengan luas terbesar yaitu 136.677,19ha.

Gambar 2. 4 Keanekaragaman Hayati Darat dan Homerange Satwa



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Keanekaragaman Hayati Laut



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov. Lampung 2025-2029

Penutupan Lahan

Penutupan Lahan di Provinsi Lampung terdiri dari 20 jenis tutupan lahan yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung, adapun luasan tutupan lahan yang mendominasi yaitu berasal dari tutupan lahan Tutupan Lahan di dominasi Pertanian Lahan Kering Campur seluas 1.265.828,1 ha.

Gambar 2. 6 Diagram Persentase Tutupan Lahan Provinsi Lampung

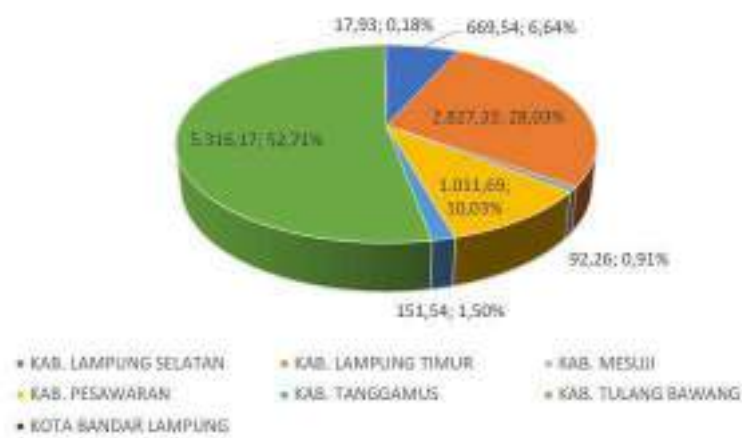


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sebaran Mangrove

Hutan mangrove adalah hutan yang berkembang di daerah pantai yang berair tenang dan terlindung dari hempasan ombak, serta eksistensinya bergantung kepada adanya aliran air laut dan aliran sungai (Pramudji, 2000). Provinsi Lampung memiliki luas tutupan mangrove secara keseluruhan yaitu 10.086,47 Ha. Kabupaten/Kota yang memiliki tutupan mangrove sebanyak 7 dari 15 di Provinsi Lampung. yang memiliki tutupan mangrove paling luas yaitu Kabupaten Tulang Bawang seluas 5.316,17 Ha (52,71%). Sedangkan yang memiliki tutupan mangrove yang paling kecil yaitu Kota Bandar Lampung seluas 17,93 Ha (0,18 %). Data luas dan persentase tutupan mangrove di Provinsi Lampung

Gambar 2. 7 Luas dan Persentase Tutupan Mangrove di Provinsi Lampung



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

FOLU Net-Sink 2030 Provinsi Lampung

Perubahan iklim menjadi ancaman yang sangat besar bagi tatanan kehidupan global yang akan memberikan dampak terhadap kenaikan suhu bumi yang mampu mempengaruhi perubahan lingkungan dan kehidupan manusia. Permasalahan perubahan iklim telah menjadi salah satu aksi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon dan berkeadilan. Strategi pengendalian perubahan iklim untuk mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui Forest and Other Land Use (FOLU) memiliki urgensi yang tinggi baik dapat tataran global maupun nasional sebagai upaya strategis dan taktis peningkatan cadangan karbon untuk dapat menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK).

Gambar 2. 8 Logical Framework Keterkaitan Forest and Other Land Use (FOLU) dan Implikasinya pada Pengendalian Perubahan Iklim



Sumber: Renja FOLUNET SINK 2030 Provinsi Lampung

Areal aksi mitigasi Provinsi Lampung berdasarkan fungsi Kawasan dikelompokkan dalam 6 kategori dimana untuk Provinsi Lampung yang terbesar adalah hutan produksi tetap (96.226 ha), hutan lindung (68.68.713), areal penggunaan lain (22.691 ha), suaka marga satwa (4.097), hutan produksi terbatas (2.424 ha), dan taman nasional (16 ha). Sedangkan berdasarkan aksi mitigasi [Rencana Operasional/RO], terdapat delapan RO dimana yang terbesar adalah RO-8 (91.868 ha), disusul oleh RO-11 (55.284 ha), RO-10 (35.901 ha), RO 5 (7.379), RO-112 (3.141), RO-1 (509 ha), RO-7 (83 ha) dan RO-6 (1,7 ha).

3. Kawasan Pertambangan

Provinsi Lampung memiliki keanekaragaman sumber daya yang diinventarisir merupakan bahan-bahan tambang yang meliputi Galian Industri, Mineral Logam, Galian Kontruksi dan Bahan Galian Energi. Untuk jenis dari sumber daya itu sendiri antara lain Andesit, Basalt, Batu Andesit, Batu Gamping, Batu Kapur, Batuan, Batuan (Andesit), Batu Bara, Bijih Besi, Emas, Feldspar, Gamping, Gamping/Kapur, Mangan, Marmer, Marmer dan Kapur, Pasir, Pasir (Batuan), Pasir Kuarsa, Pasir Laut, Pasir Pasang, Silika, Sirtu, Trass, Zeolit, dan Pertambangan Lain.

Tabel 2. 5 Kondisi Pertambangan Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota

No	Komoditas	Luas (ha)	No	Komoditas	Luas (Ha)
1	Bandar Lampung	108,58	11	Pesisir Barat	660,50
	Andesit	72,96		Andesit	141,04
	Batuan	35,63		Batu Andesit	143,88
2	Bandar Lampung/ Lampung Selatan	102,36		Batuan Andesit	186,85
	Andesit	102,36		Pertambangan Lain	183,33
3	Lampung Selatan	2.939,62		Sirtu	5,40
	Andesit	833,70	12	Pringsewu	1.878,01
	Basalt	29,71		Andesit	46,59
	Batu Andesit	221,88		Batu Andesit	5,07
	Batu Kapur	9,94		Batuan	6,17
	Batuan (Andesit)	4,93		Mangan	837,73
	Batuan Andesit	30,03		Pertambangan Lain	211,32
	Bijih Besi	508,06		Silika	771,13
	Pasir Laut	994,47	13	Tanggamus	3.088,14

No	Komoditas	Luas (ha)	No	Komoditas	Luas (Ha)
	Pertambangan Lain	286,02		Andesit	419,65
	Zeolit	20,88		Batu Gamping	13,51
	Panas Bumi	2 Titik		Emas	1.221,97
4	Lampung Tengah	2.256,16		Gamping/Kapur	5,07
	Andesit	311,19		Pasir	7,41
	Batubara	942,55		Pasir (Batuan)	25,61
	Feldspar	92,32		Pasir Kuarsa	368,80
	Pasir Kuarsa	546,21		Pasir Pasang	576,16
	Pertambangan Lain	350,73		Pertambangan Lain	449,98
	Silica	13,17		Panas Bumi	2 TITIK
5	Lampung Timur	2.147,58	14	Tanggamus-Pringsewu	65,58
	Andesit	8,43		Andesit	65,58
	Pasir Laut	990,70	15	Tulang Bawang	7.819,13
	Pertambangan Lain	1.148,46		Batubara	4.967,78
6	Lampung Timur-Tulang Bawang	185,57		Pasir	355,65
	Pasir	185,57		Pasir Kuarsa	389,27
7	Lampung Utara	449,10		Pasir Laut	1.984,74
	Andesit	298,41		Pertambangan Lain	121,69
	Batu Andesit	135,55	16	Tulang Bawang-Lampung Timur	197,50
	Batuan Andesit	15,14		Pasir	197,50
8	Lampung Utara/Way Kanan	57,09	17	Pesawaran	2.917,59
	Andesit	57,09		Andesit	281,00
9	Way Kanan	3.990,78		Batu Gamping	180,19
	Andesit	128,40		Bijih Besi	59,65
	Emas	3.623,99		Emas	1.970,45
	Marmer	1,33		Gamping	50,19
	Pertambangan Lain	205,15		Marmer Dan Kapur	190,71
	Trass	31,91		Pasir	2,16
	Panas Bumi	2 Titik		Pertambangan Lain	183,24
10	Lampung Barat	5 Titik		Panas Bumi	2 TITIK
	Panas Bumi	5 Titik	18	Mesuji	8.233,03
				Batubara	4.772,89
				Pasir	133,74
				Pertambangan Lain	3.326,40

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2024

Seluruh komoditas pertambangan tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan jumlah yang cukup banyak disetiap daerahnya kecuali hanya dua yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro yang tidak memiliki kawasan pertambangan, selain itu juga ada beberapa kawasan pertambangan yang berada di dalam dua wilayah administrasi seperti contoh



Kawasan Pertambangan Andesit yang berada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan Pertambangan Andesit yang berada di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan juga Tanggamus-Pringsewu, dan yang terakhir Kawasan Pertambangan Pasir yang berada pada Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Timur.

Kabupaten Lampung Timur, disekitar Pulau Segama dan Pulau Batang terdapat eksploitasi minyak bumi yang dilakukan kontraktor asing, yaitu China National Oil Offshore Company SES (CNOOC SES). Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan sebagai kabupaten Penghasil Minyak Bumi dengan SK Menteri ESDM Nomor 357.K/80/MEM/2001 tanggal 9 April 2001. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur bahwa realisasi lifting minyak bumi tahun 2011 sebesar 2.706,98 ribu barel dan tahun 2012 sebanyak 2.724,22 ribu barrel.

Selain itu juga terdapat penemuan ilmiah baru rencana pengembangan eksplorasi minyak dan gas yang berdampak pada berubahnya alokasi ruang dalam RZWP-3-K atau RZR. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT0291/SKKMI2000/2020/S0 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penyesuaian Tata Ruang Laut PT. Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES) di Wilayah Kerja Southeast Sumatera Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung. Penetapan lokasi keseluruhan PT. OSES hasil penetapan Nomor B-55 MEN-KPII2021.

4. Kawasan Pertanian

Potensi kawasan pertanian di Provinsi Lampung terdiri dari hortikultura, perkebunan, tanaman pangan dan peternakan yang tersebar di setiap kabupaten/kota seluas 880.758,21 ha atau 26,24%. Luas potensi hortikultura seluas 72.820,47 ha, perkebunan seluas 446.346,52 ha, tanaman pangan seluas 361.407,17 ha dan peternakan seluas 184,05 ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 6 Luas Kawasan Pertanian Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Kawasan Hortikultura	Kawasan Perkebunan	Kawasan Peternakan	Kawasan Tanaman Pangan	Grand Total (ha)
Bandar Lampung	0,18	0,12	-	602,62	602,93
Lampung Barat	7.117,16	63.833,24	-	10.276,56	81.226,97
Lampung Selatan	164,85	13.050,17	-	39.082,55	52.297,57
Lampung Tengah	21.832,20	111.793,29	181,46	79.566,71	213.373,65
Lampung Timur	-	-	-	58.275,68	58.275,68
Lampung Utara	-	0,03	-	15.094,48	15.094,51
Mesuji	-	56.920,45	-	29.653,76	86.574,21
Metro	45,69	-	2,59	2.945,62	2.993,90
Pesawaran	13.193,57	43.813,14		13.134,45	70.141,17
Pesisir Barat	-	-	-	8.583,44	8.583,44
Pringsewu	8.229,78	4.422,31	-	13.886,39	26.538,48
Tanggamus	0,39	24,46	-	17.123,52	17.148,34
Tulang Bawang	-	503,61	-	52.108,49	52.612,10
Tulang Bawang Barat	1.584,50	69.259,16	-	6.918,72	77.762,38
Way Kanan	20.652,16	82.726,54	-	14.154,17	117.532,88
Grand Total	72.820,47	446.346,52	184,05	361.407,17	880.758,21

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

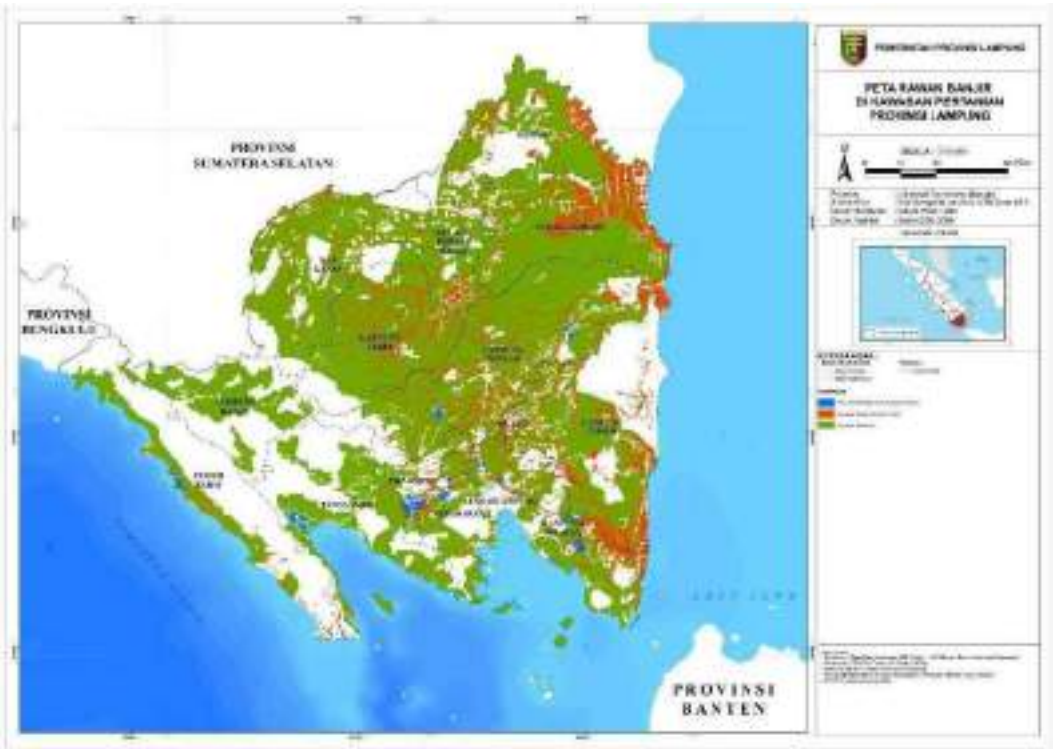
Berdasarkan luas kawasan pertanian yang terdampak banjir di Provinsi Lampung mencapai 306.366 ha, seluruhnya berada dalam klasifikasi risiko banjir tinggi. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (56.595 ha), diikuti Tulang Bawang (55.488 ha) dan Lampung Timur (48.303 ha). Sementara dampak terkecil tercatat di Kota Bandar lampung (124 ha) dan Kota Metro (1.523 ha). Tingginya risiko banjir pada kawasan pertanian ini menunjukkan urgensi penanganan terpadu untuk melindungi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2. 7 Luas Kawasan Pertanian terdampak Bencana Banjir
Provinsi Lampung

KABUPATEN	LUASAN KAWASAN PERTANIAN TERDAMPAK (Ha)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	259
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	27,585
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	56,595
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	48,303
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	36,429
KABUPATEN MESUJI	26,766
KABUPATEN PESAWARAN	8,031
KABUPATEN PESISIR BARAT	4,930
KABUPATEN PRINGSEWU	4,952
KABUPATEN TANGGAMUS	2,451
KABUPATEN TULANG BAWANG	55,488
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	13,299
KABUPATEN WAY KANAN	19,632
KOTA BANDARLAMPUNG	124
KOTA METRO	1,523
TOTAL KAWASAN PERTANIAN TERDAMPAK BANJIR	306,366

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2. 9 Peta Rawan Banjir di Kawasan Pertanian di Provinsi Lampung



Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data luasan Lahan Baku Sawah (LBS) terdampak banjir di Provinsi Lampung, total area yang terpapar mencapai 141.842 ha. Kabupaten dengan dampak terbesar adalah Tulang Bawang (30.539 ha), disusul Lampung Timur (26.733 ha) dan Lampung Tengah (22.390 ha). Sebaliknya, dampak terendah tercatat di Kota Bandar lampung (264 ha) dan Kota Metro (1.246 ha). Seluruh wilayah yang terdampak dikategorikan dalam klasifikasi risiko banjir tinggi, menandakan perlunya prioritas mitigasi dan perlindungan kawasan pertanian dari bencana banjir.

Tabel 2. 8 Luas Lahan Baku Sawah Terdampak Banjir di Provinsi Lampung

KABUPATEN	LUAS LBS TERDAMPAK (Ha)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	140
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	17,866
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	22,390
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	26,733
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	4,876
KABUPATEN MESUJI	15,411
KABUPATEN PESAWARAN	5,240
KABUPATEN PESISIR BARAT	2,521
KABUPATEN PRINGSEWU	5,809
KABUPATEN TANGGAMUS	1,241
KABUPATEN TULANG BAWANG	30,539
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	3,641
KABUPATEN WAY KANAN	3,922
KOTA BANDARLAMPUNG	264
KOTA METRO	1,246
TOTAL LBS TERDAMPAK BENCANA BANJIR	141,842

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2. 10 Peta Rawan Banjir di Kawasan Lahan Baku Sawah di Provinsi Lampung



Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2025

5. Kawasan Perikanan

Sebaran potensi kawasan perikanan di Provinsi Lampung seluas 63.491,11 ha atau 1,89%, dimana luas kawasan perikanan terbesar terdapat di Kabupaten Tulang Bawang seluas 37.936,39 ha atau 59,75% dan Kabupaten Lampung Timur seluas 7.343,27 ha atau 11,57%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 9 Luas Kawasan Perikanan Provinsi Lampung

Sebaran Kawasan Perikanan	Luas (ha)	Presentase (%)
Lampung Barat	28,07	0,04
Lampung Selatan	3.259,01	5,13
Lampung Tengah	205,20	0,32
Lampung Timur	7.343,27	11,57

Sebaran Kawasan Perikanan	Luas (ha)	Presentase (%)
Mesuji	878,16	1,38
Pesawaran	703,16	1,11
Pesisir Barat	2.547,53	4,01
Pringsewu	376,05	0,59
Tanggamus	1.641,14	2,58
Tulang Bawang	37.936,39	59,75
Tulang Bawang Barat	2.942,57	4,63
Way Kanan	5.630,56	8,87
Grand Total	63.491,11	100,00

Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Lampung, 2024

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dimodelkan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih.

2. Daya Dukung Air

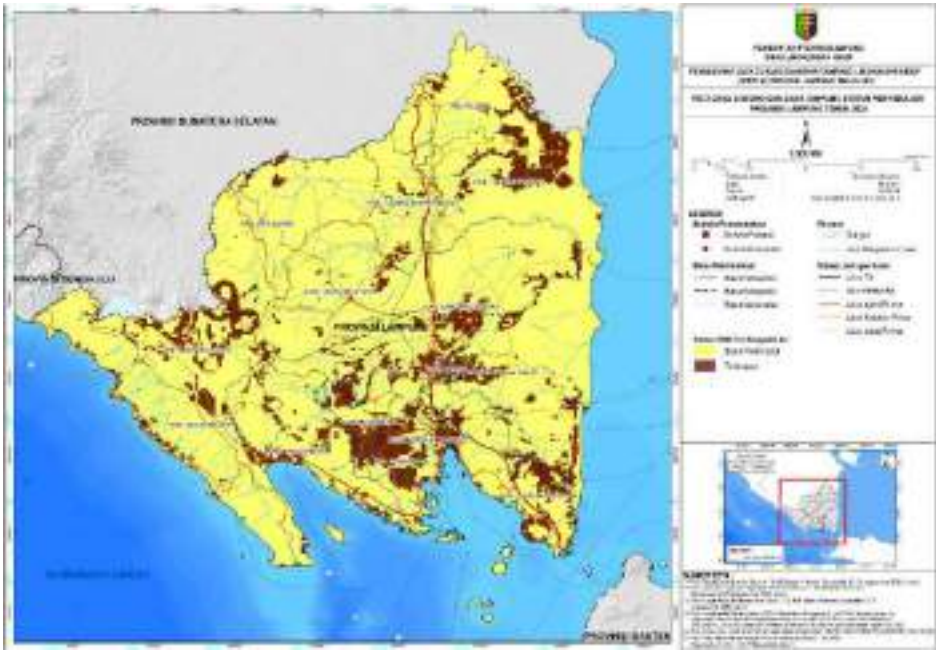
Dilihat dari jumlah kebutuhan total air sebesar 19.017.149.319,12 m³/tahun, sedangkan jumlah ketersediaan sumber daya air sebesar 32.633.644.484,59 m³/tahun, dengan selisih 13.616.495.165,47 m³/tahun. Yang artinya kondisi DDDTLH air di Provinsi Lampung Belum Terlampaui dimana ketersediaan sumber daya air lebih besar dibandingkan kebutuhan.

Tabel 2. 10 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Total	Selisih	Ambang Batas Populasi	Status DDDTLH (ha)		Jumlah (ha)
	m³/tahun						Belum Terlam pau	Terlamp au	
Lampung Barat	1.688.261.049,91	1.096.660.447,62	26.205.984,00	1.122.866.431,62	565.394.618,29	1.010.052,00	163.043,78	59.492,72	222.536,50
Lampung Selatan	2.258.380.893,57	1.433.232.792,97	93.406.953,60	1.526.639.746,57	731.741.147,01	1.995.780,00	189.612,71	44.987,59	234.600,30
Lampung Tengah	4.830.387.824,76	2.941.122.668,70	129.569.328,00	3.070.691.996,70	1.759.695.828,06	3.699.286,00	404.964,99	79.768,87	484.733,86
Lampung Timur	4.063.609.142,29	1.550.869.906,43	97.457.212,80	1.648.327.119,23	2.415.282.023,06	4.146.899,00	328.983,73	44.708,47	373.692,20
Lampung Utara	2.740.374.962,04	1.394.289.334,25	54.920.332,80	1.449.209.667,05	1.291.165.294,99	2.249.547,00	257.754,48	9.958,02	267.712,50
Mesuji	2.378.087.576,33	1.651.434.036,26	20.089.209,60	1.671.523.245,86	706.564.330,46	1.115.567,00	189.405,82	37.060,94	226.466,76
Pesawaran	938.842.172,27	766.741.408,82	42.081.984,00	808.823.392,82	130.018.779,45	649.539,00	80.922,67	48.915,68	129.838,35
Pesisir Barat	3.021.179.194,52	736.838.776,81	14.250.643,20	751.089.420,01	2.270.089.774,52	3.002.479,00	280.500,92	13.575,96	294.076,88
Pringsewu	493.888.547,71	485.713.639,65	35.291.980,80	521.005.620,45	-27.117.072,75	374.584,00	31.982,12	27.634,89	59.617,00
Tanggamus	1.952.080.869,39	1.487.492.796,26	56.361.225,60	1.543.854.021,86	408.226.847,53	1.162.602,00	233.836,07	42.727,30	276.563,37
Tulang Bawang	3.289.986.638,95	1.948.398.975,20	37.247.472,00	1.985.646.447,20	1.304.340.191,74	2.061.515,00	251.886,30	51.962,68	303.848,98
Tulang Bawang Barat	1.329.211.060,12	684.836.248,07	25.017.379,20	709.853.627,27	619.357.432,86	1.063.721,00	112.630,38	6.984,70	119.615,08
Way Kanan	3.506.608.072,12	1.977.364.710,11	41.484.787,20	2.018.849.497,31	1.487.758.574,82	2.339.983,00	319.849,17	20.335,69	340.184,86
Kota Bandar Lampung	96.779.292,99	25.335.393,98	104.538.988,80	129.874.382,78	-33.095.089,79	1.168.575,00	3.762,19	10.711,20	14.473,39
Kota Metro	45.967.187,61	44.105.614,39	14.789.088,00	58.894.702,39	-12.927.514,79	155.011,00	1.530,46	2.980,60	4.511,06
Jumlah	32.633.644.484,59	18.224.436.749,52	792.712.569,60	19.017.149.319,12	13.616.495.165,47	26.195.140,00	2.850.665,78	501.805,30	3.352.471,08

Sumber: SK.146/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional

Gambar 2. 11 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung



Sumber: SK.146/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional

3. Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan di Provinsi Lampung berada pada status Belum terlampaui. Ambang batas penduduk untuk pangan yang tersedia dapat memenuhi 25.728.639 jiwa sementara itu jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 9.176.546 jiwa. Sehingga ketersediaan pangan di Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan.

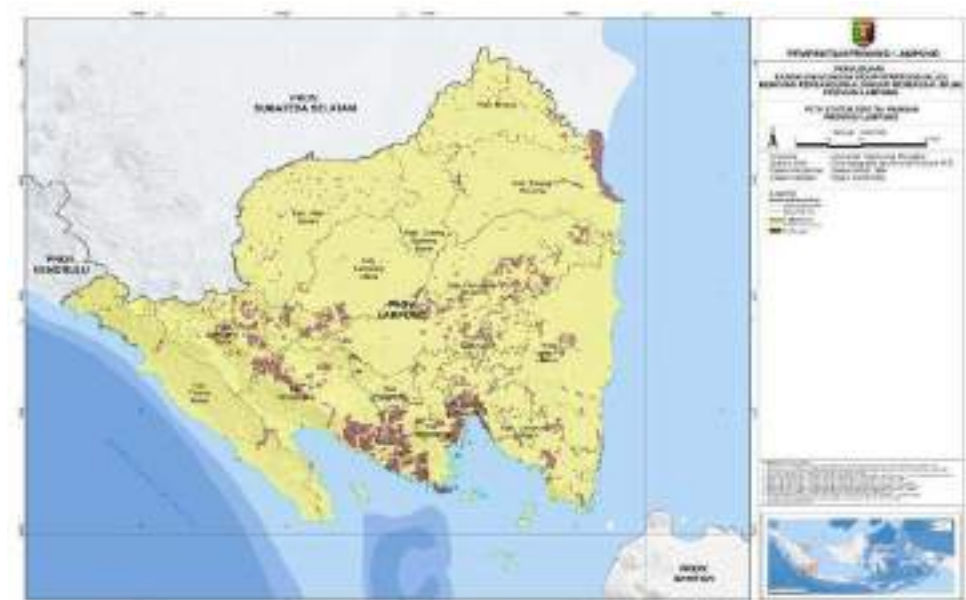
Tabel 2. 11 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung

Kabupaten /Kota	kkal/tahun		Ambang Batas (jiwa)	Seslsh (kkal/tahun)	Status (ha)		Jumlah (ha)
	Ketersediaan	Kebutuhan			Belum Terlampaui	Terlampaui	
Lampung Barat	592.073.081.943,3	238.090.795.750,0	754.473,5	353.982.286.193,0	190.077,5	26.527,4	216.605,0
Lampung Selatan	1.505.806.707.045,9	848.404.996.249,6	1.918.836,2	657.401.710.797,5	197.702,2	33.389,9	231.092,1
Lampung Tengah	3.440.883.774.482,0	1.177.142.264.500,9	4.384.687,8	2.263.741.509.979,6	390.339,0	53.298,0	443.637,0
Lampung Timur	3.213.863.366.975,1	885.155.623.500,1	4.095.397,7	2.328.707.743.474,8	358.258,0	26.131,4	384.389,4
Lampung Utara	1.923.146.483.087,5	498.417.482.750,1	2.450.648,6	1.424.729.000.338,7	258.957,0	20.898,0	279.855,0
Mesuji	1.258.417.564.830,5	182.599.553.750,2	1.603.590,4	1.075.818.011.080,8	204.319,8	9.621,9	213.941,7
Pesawaran	500.481.992.055,3	382.293.316.750,1	637.759,8	118.188.675.305,4	95.834,6	29.601,1	125.435,6
Pesisir Barat	776.839.545.016,5	129.339.356.000,0	989.919,8	647.500.189.016,8	275.340,4	7.302,5	282.642,9
Pringsewu	379.361.990.517,3	320.503.671.250,2	483.417,6	58.858.319.267,0	53.622,0	18.387,0	72.009,0
Tanggamus	689.418.949.173,5	512.361.705.501,3	878.520,5	177.057.243.672,4	240.531,5	58.746,2	299.277,7
Tulang Bawang	2.181.527.280.857,4	338.390.477.999,5	2.779.901,0	1.843.136.802.856,7	278.399,3	23.891,2	302.290,5
Tulang Bawang Barat	996.035.860.764,9	227.279.295.000,1	1.269.239,7	768.756.565.764,6	122.448,3	2.364,2	124.812,5
Way Kanan	2.533.321.000.172,5	377.493.001.000,2	3.228.188,6	2.155.827.999.171,8	336.324,1	12.186,5	348.510,6
Kota Bandar Lampung	113.138.242.079,8	949.498.060.750,8	144.171,1	- 836.359.818.671,1	6.406,2	15.785,4	22.191,7
Kota Metro	86.233.280.997,6	134.324.872.749,9	109.886,3	- 48.091.591.752,2	8.181,0	2.592,0	10.773,0
Jumlah	20.190.549.119.999,0	7.201.294.473.502,9	25.728.638,6	12.989.254.646.495,9	3.016.740,8	340.722,7	3.357.463,5

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Daya Dukung Pangan yang berada pada status Terlampaui hanya di Kota Bandar Lampung karena nilai kebutuhan lebih besar dari pada ketersediaan yang ada, sehingga dihasilkan selisih sebesar - 836.359.818.671 kkal/tahun. Daya dukung pangan berdasarkan luasan berada pada Daya Dukung Pangan Belum Terlampaui seluas 3.016.741 ha dan Terlampaui seluas 340.723 ha.

Gambar 2. 12 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

5. Daya Dukung Lahan

Provinsi Lampung berada pada daya dukung lahan potensial, kendala dan limit dimana berada pada lahan potensial dengan luas 2.101.957,0 ha, sedangkan daya dukung lahan limit sebesar 739.623,2 ha, lahan limitasi (lindung) merupakan lahan yang memiliki keterbatasan atau pembatasan dalam penggunaannya atau kawasan yang mutlak tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman. Lahan potensial terbesar berada di Lampung Tengah seluas 396.644,7 ha. Daya dukung lahan dengan kategori kendala hanya tersebar di beberapa wilayah dengan luas 515.883,3 ha, lahan kendala merupakan area yang memiliki pembatasan dalam penggunaannya untuk kegiatan tertentu atau memiliki kemampuan lahan sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

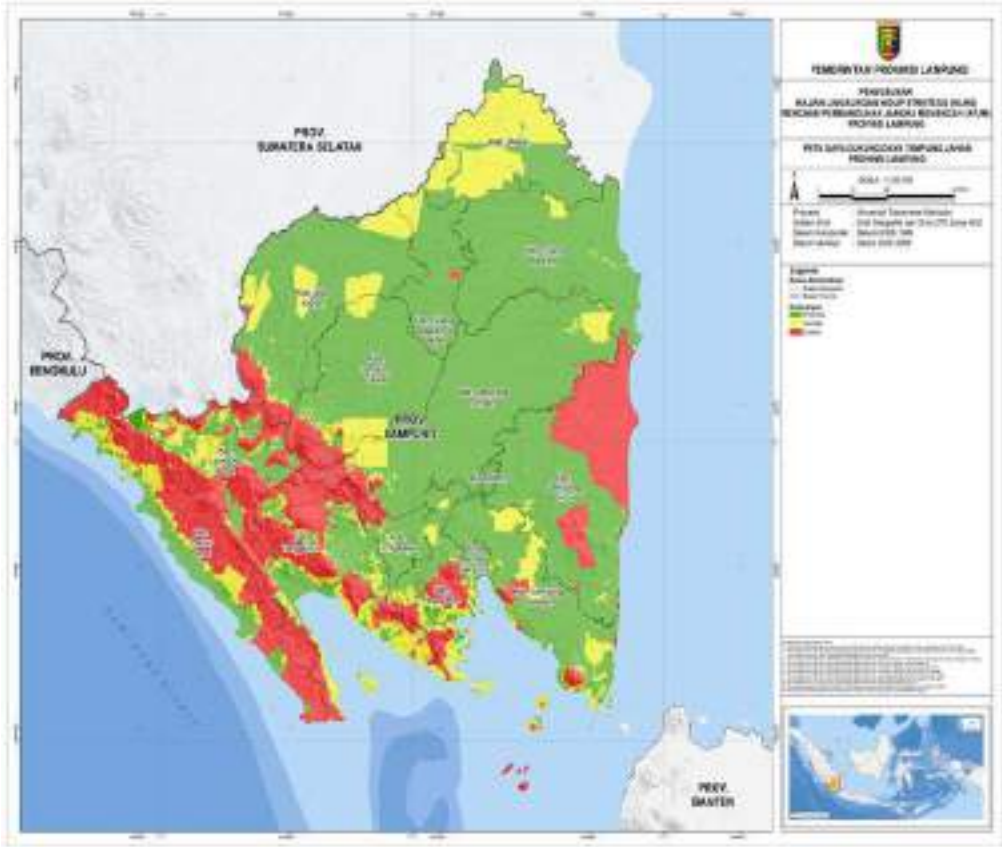
Tabel 2. 12 Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (ha)			Jumlah (ha)
		Limit	Kendala	Potensial	
1	Lampung Barat	106.927,20	36.644,00	67.228,10	210.799,30
2	Lampung Selatan	16.891,30	45.895,90	159.945,80	222.733,00
3	Lampung Tengah	26.088,60	33.223,70	396.644,70	455.957,00
4	Lampung Timur	152.324,10	5.475,30	228.577,50	386.376,90
5	Lampung Utara	28.008,70	30.496,00	208.425,70	266.930,40
6	Mesuji		130.440,10	89.601,30	220.041,40
7	Pesawaran	34.341,60	35.032,20	59.437,80	128.811,70
8	Pesisir Barat	192.064,50	44.655,20	57.304,20	294.023,90
9	Pringsewu	13.039,30	5.301,80	43.378,20	61.719,20

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (ha)			Jumlah (ha)
		Limit	Kendala	Potensial	
10	Tanggamus	142.295,40	65.295,40	87.253,70	294.844,60
11	Tulang Bawang		5.754,70	305.855,00	311.609,60
12	Tulang Bawang Barat	1.374,60	10.431,40	113.902,80	125.708,80
13	Way Kanan	25.779,30	64.264,60	262.167,40	352.211,40
14	Kota Bandar Lampung	488,5	2.973,00	14.913,40	18.374,90
15	Kota Metro			7.321,40	7.321,40
	Jumlah	739.623,20	515.883,30	2.101.957,00	3.357.463,50

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2. 13 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, 2024

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Pangan

Ketahanan Pangan Daerah Lampung Kuat dan Mantap dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung yang sangat baik dan masuk dalam kategori “sangat tahan” dengan nilai capaian 82,58 pada tahun 2024.

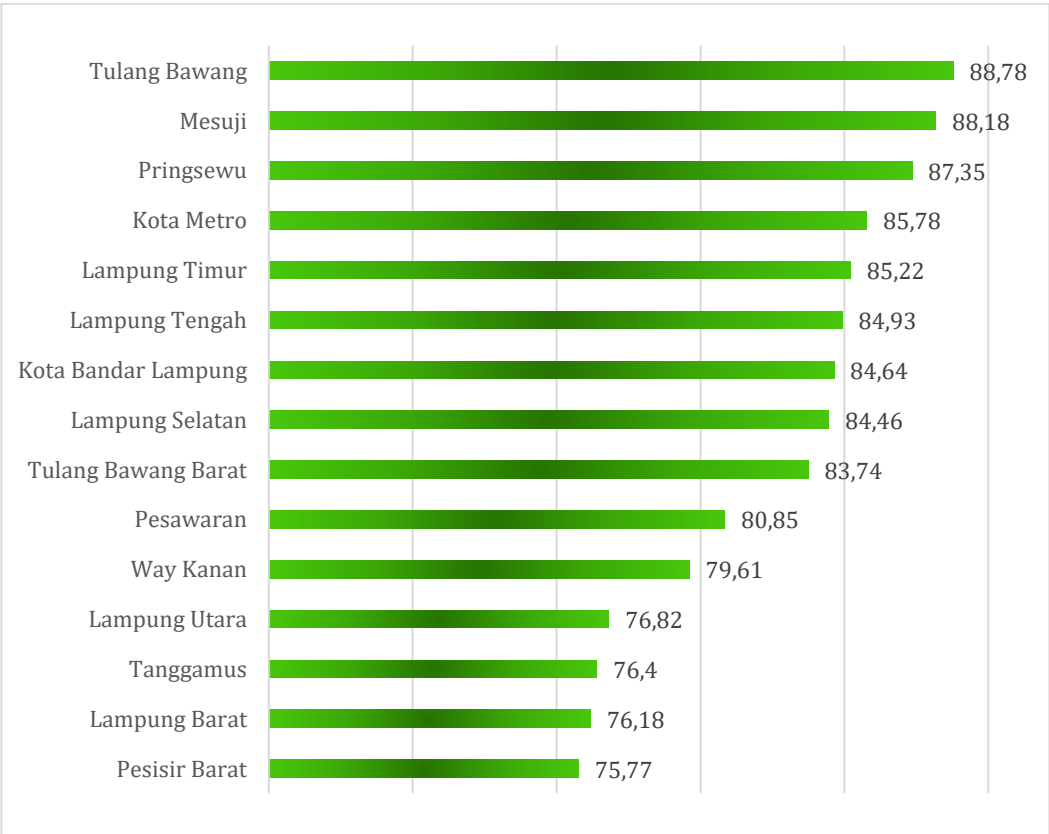
Gambar 2. 14 Peta Sebaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Seluruh Provinsi di Indonesia 2024



Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 oleh Badan Pangan Nasional

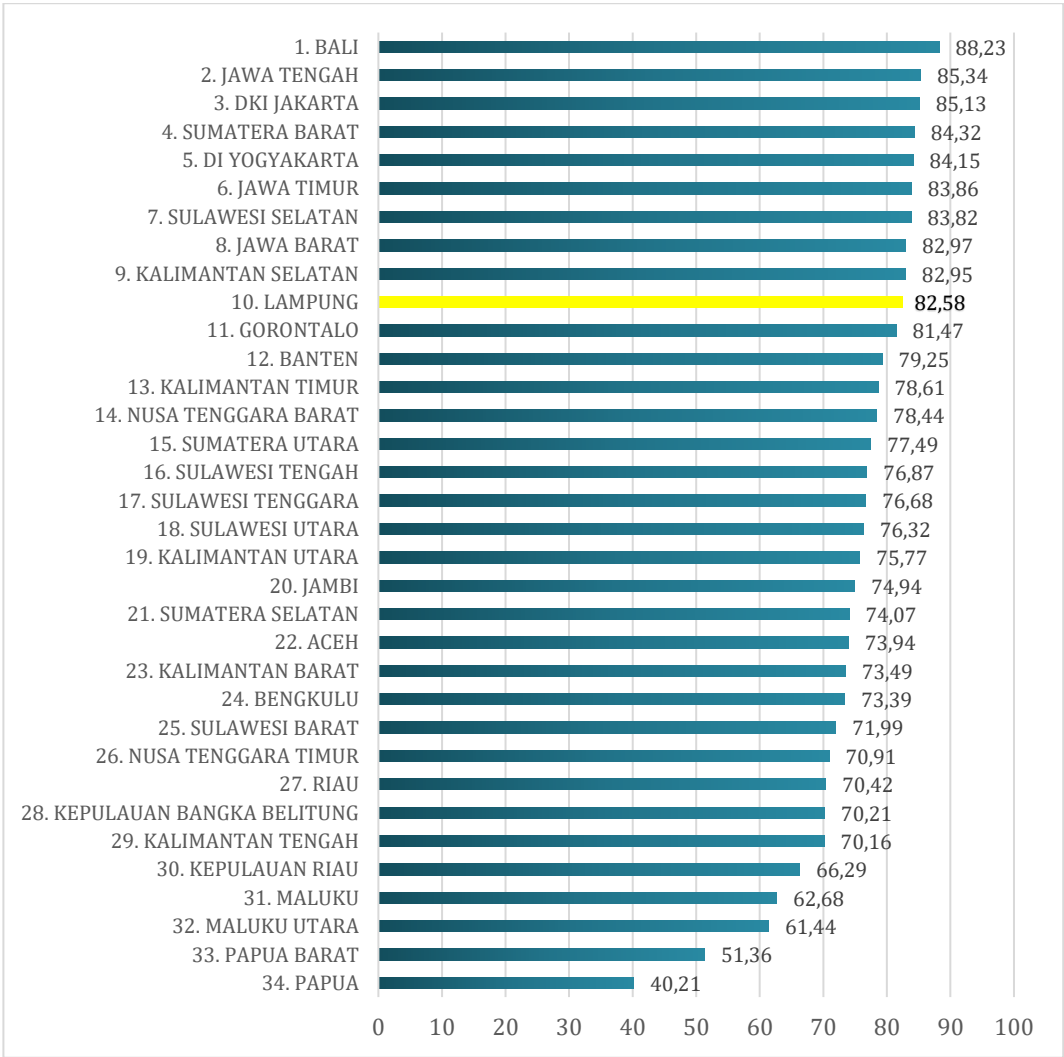
Berdasarkan data IKP Tahun 2024, terdapat 13 kabupaten dan 2 (dua) kota di Provinsi Lampung yang masuk dalam kategori ”sangat tahan” dengan IKP lebih dari 74,40.

Gambar 2. 15 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: Satu Data Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2. 16 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2024



Sumber: Satu Data Badan Pangan Nasional, 2025

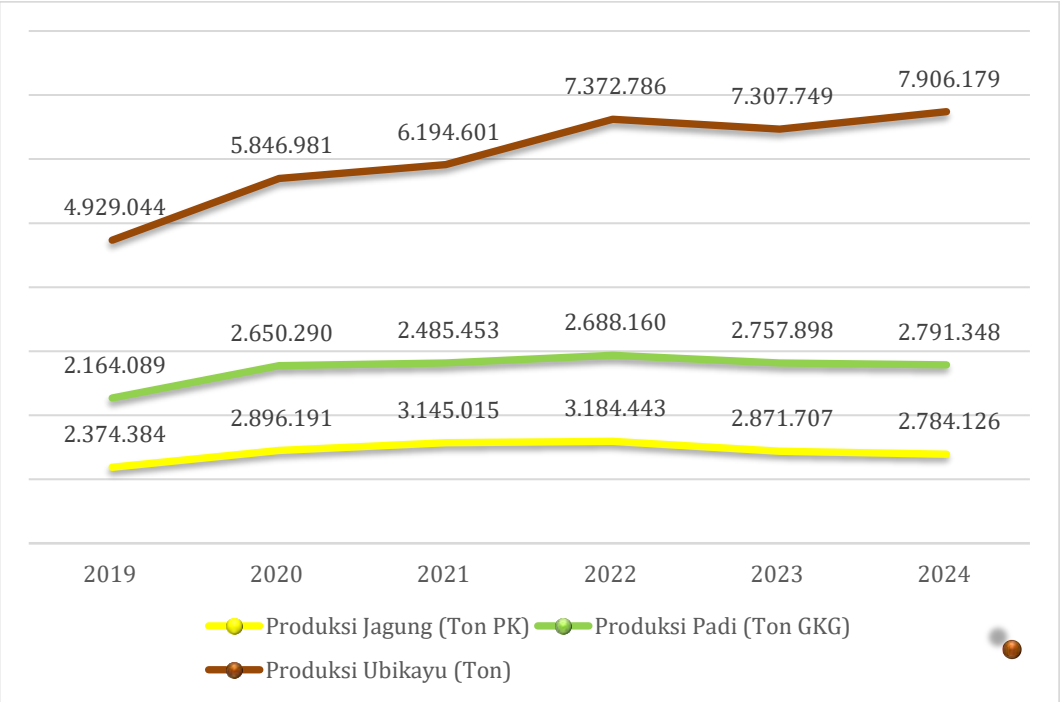
Komoditas unggulan untuk tanaman pangan di Provinsi Lampung terdiri dari 3 (tiga) komoditas yaitu Padi, Jagung, dan Ubikayu. Produksi Ubikayu dan Padi selama kurun waktu 2019 sampai 2024 mengalami peningkatan namun produksi Jagung menurun sebesar 87,581 ton di tahun 2024.

Peningkatan produksi Ubikayu tertinggi terdapat di tahun 2022 yakni mencapai 1.178.185 ton. Tahun 2020 produksi meningkat karena harga ubi kayu membaik dan Gubernur Lampung melakukan kesepakatan terkait kepastian harga ubi kayu. Hasil kesepakatan bersama harga ubi kayu dengan Asosiasi Pengusaha Tapioka sebesar Rp. 900,00/kg. Pada Tahun 2021 harga jual ubi kayu ditingkat petani semakin membaik yaitu berkisar antara Rp. 1.100,00 – Rp. 1.200,00/Kg. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab peningkatan produksi ubi kayu pada tahun 2021. Tahun 2022 dan 2023, peningkatan produksi terjadi karena peningkatan luas tanam dan panen disertai dengan peningkatan produktivitas. Tahun 2024,

banyak petani mengeluhkan anjloknya harga jual dan tersendatnya distribusi panen ke industri karena tekanan dari produk impor. Penurunan harga ubikayu ini menyebabkan petani menahan panen dan penjualan.

Produksi Padi di tahun 2024 mencapai 2,7 juta ton, dengan peningkatan sebesar 33.450 ton. Produksi Jagung Tahun 2024, terjadi peningkatan produksi selain itu harga yang stabil juga berpengaruh positif pada animo masyarakat untuk berbudidaya jagung. Harga pabrik dan pengumpul berkisar antara Rp. 5.200,00 - 5.800,00 untuk jagung pipilan kering.

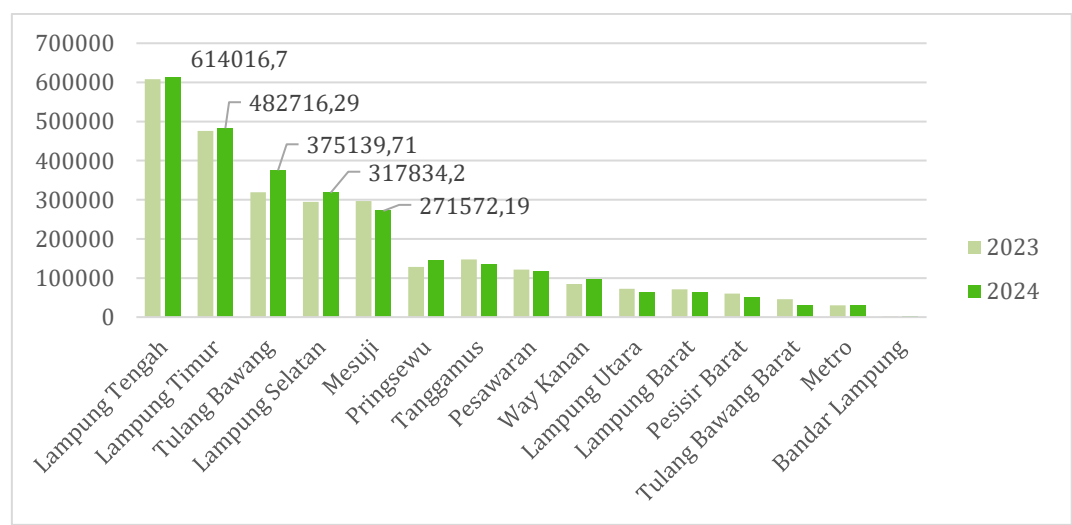
Gambar 2. 17 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, 2025

Produksi komoditas tanaman pangan di Provinsi Lampung pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana ditahun 2023 Produk padi mencapai 2,757 juta ton naik menjadi 2,791 juta ton. Kenaikan produksi padi ada di tiga kabupaten dengan kontribusi produksi padi terbanyak di Provinsi Lampung.

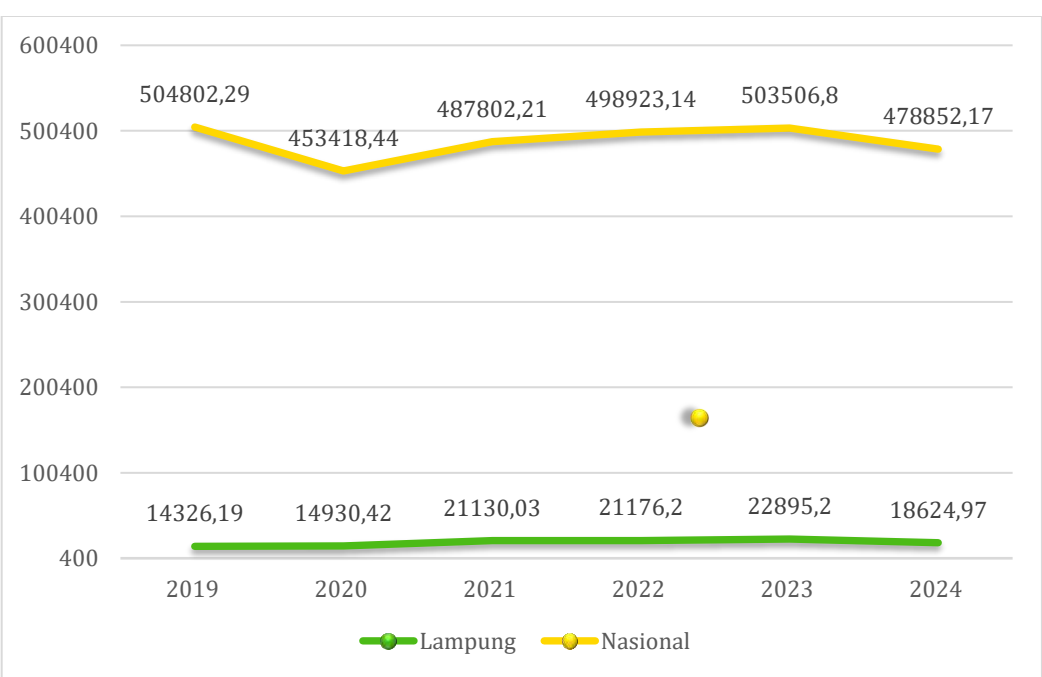
Gambar 2. 18 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Produksi daging sapi di Provinsi Lampung di tahun 2024 mencapai 18.624,97 ton menurun dibandingkan tahun 2023. Dalam periode lima tahun produksi daging sapi meningkat sebesar 3.694 ton. Kontribusi produksi daging sapi Provinsi Lampung sebesar 3,89 persen terhadap produksi daging sapi Nasional. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kontribusi daging sapi Lampung terhadap nasional di tahun 2023 yang sebesar 4,54 persen.

Gambar 2. 19 Produksi Daging Sapi (ton) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024

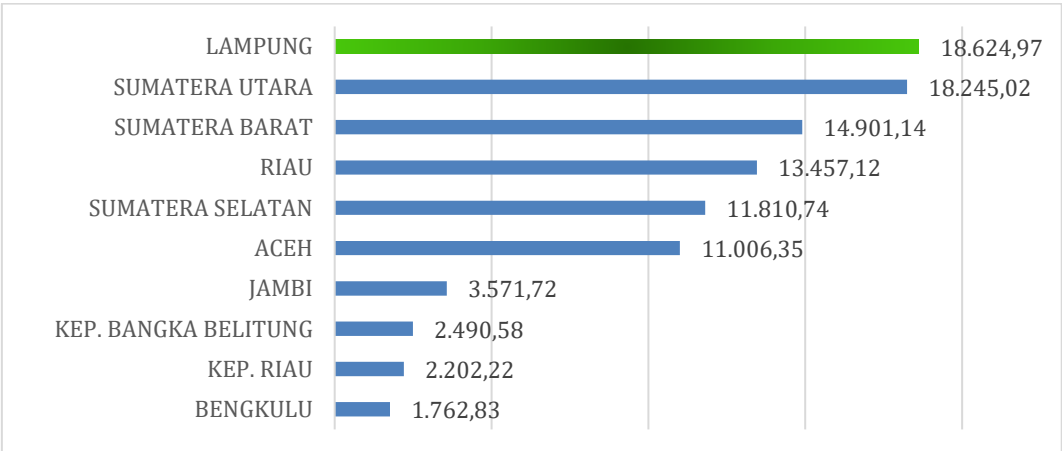


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Secara regional Sumatera produksi daging sapi Provinsi Lampung di tahun 2024 berada pada peringkat pertama dengan capaian produksi daging sapi sebesar 18.624,97 ton. Capaian pada peringkat pertama ini terbaik dari tahun 2019 sampai dengan 2023

yang selalu di urutan kedua, hal ini terjadi karena penurunan produksi daging sapi di Provinsi Sumatera Barat.

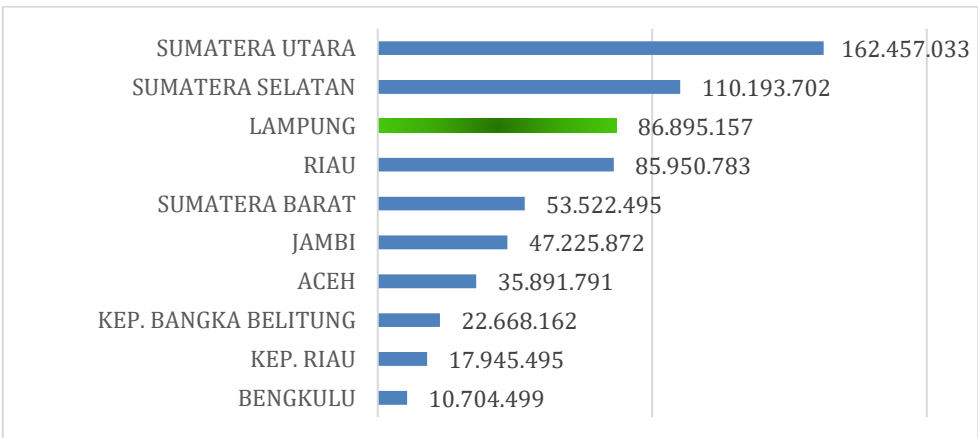
Gambar 2. 20 Produksi Daging Sapi (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Dalam hal produksi daging ayam ras pedaging, Provinsi Lampung merupakan produsen pada urutan ke 3 (tiga) di wilayah regional Sumatera dan konsisten dari sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Produksi daging ayam ras pedaging ini terus meningkat hingga mencapai 86,895,157 ton di tahun 2024, atau meningkat sebesar 3.133.078 ton selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Gambar 2. 21 Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan

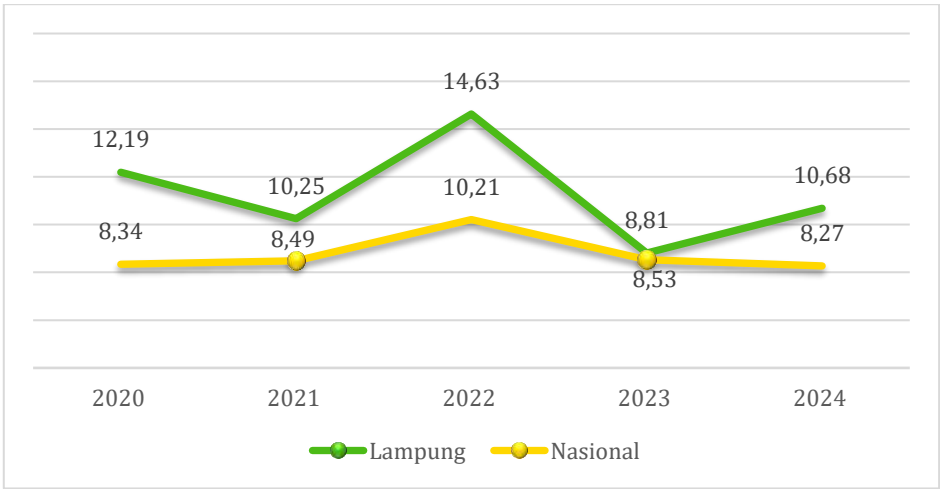
a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment (PoU)* dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Penghitungan PoU ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional/ *National Food Agency (NFA)* dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif, yang dapat diartikan bahwa upaya Provinsi Lampung untuk memenuhi kecukupan pangan mengalami pertumbuhan yang tumbuh positif dan berada di atas rata-rata capaian nasional. Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2022 sebesar 14,63 persen kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 8,81 persen yang disebabkan oleh meningkatnya produktivitas di sektor pertanian yang mampu mencukupi konsumsi pangan daerah, namun peningkatan kembali terjadi pada tahun 2024 menjadi 10,68 persen.

Gambar 2. 22 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

b. Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Lampung (Skor PPH)

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Ptovinsi Lampung yang diukur melalui skor PPH menunjukkan tren yang semakin naik dari tahun ke tahun. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh menurunnya konsumsi akibat pandemi covid-19 namun kemudian kembali menunjukkan tren kenaikan ditahun-tahun berikutnya.

Gambar 2. 23 Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

3. Konsumsi Listrik Per Kapita

Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi listrik Provinsi Lampung pada Tahun 2024 mencapai sekitar 5.991,85 GWh. Pembangunan sektor energi Provinsi Lampung dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2024 sebesar 99,99 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 96,32 persen, namun demikian pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung pun cukup besar dengan rata-rata sekitar 9,58 % per tahun.

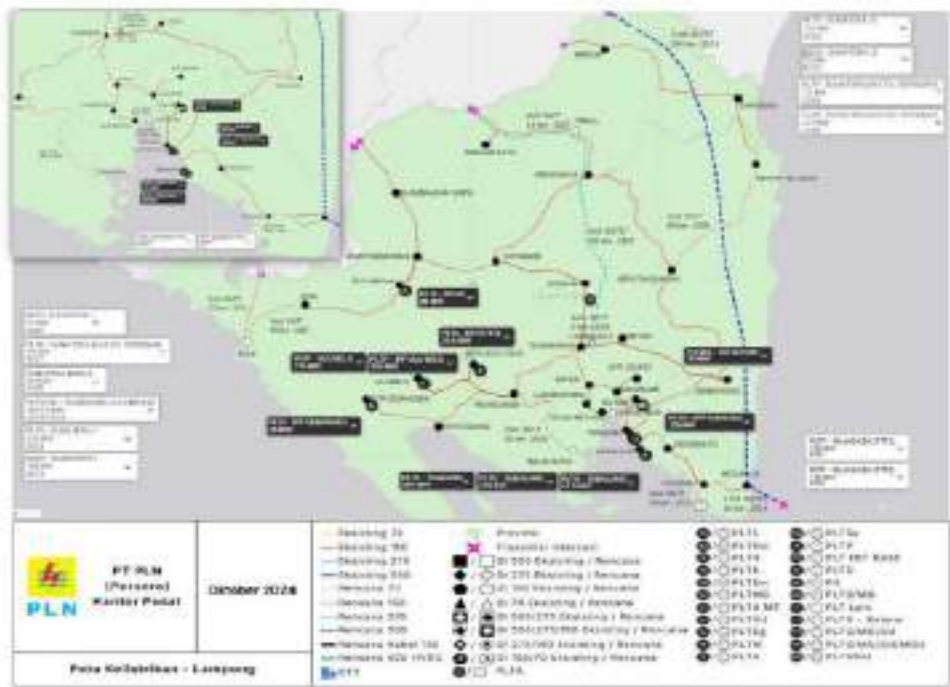
Tabel 2. 13 Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Konsumsi Listrik (kWh)	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
2022	9,176,546	5,382,475,878	586.55
2023	9,313,990	5,730,040,000	615.21
2024	9,419,580	5,991,850,000	636.11

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025

Pada Oktober–November 2024, beban puncak kelistrikan di Provinsi Lampung tercatat mencapai sekitar 1.350 MW. Sementara itu, daya mampu sistem kelistrikan Lampung mencapai 1.479 MW, yang terdiri dari pasokan pembangkit lokal dengan total kapasitas terpasang sekitar 893,5 MW, namun daya mampu netto (available) yang tercatat pada awal tahun 2024 adalah sebesar 762,3 MW. Kekurangannya disuplai melalui transfer interkoneksi dari Sistem Sumatera melalui jaringan P3BS (Pengatur Penyaluran Beban Sumatera). Hal ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Lampung memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari sistem interkoneksi ini.

Gambar 2. 24 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung



Sumber: RUPTL 2025-2034

Gambaran kapasitas terpasang dan daya mampu pembangkit di Provinsi Lampung Sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 2. 14 Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Lampung

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumatera	4	400,0	320,0	320,0
PLTA	Sumatera	4	118,6	117,6	117,6
PLTD	Sumatera	8	61,1	26,9	26,9
PLTG	Sumatera	1	21,5	14,8	14,8
PLTP	Sumatera	2	110,0	103,8	100,0
PLTD	Pulau Sebesi	5	0,5	0,4	0,4
Jumlah PLN		24	717,7	583,5	579,7
IPP (swasta)					
PLTA	Sumatera	2	55,0	55,0	55,0
PLTP	Sumatera	2	98,8	98,8	98,8
PLTG	Sumatera	1	28,1	25,0	25,0
Jumlah IPP		5	181,8	178,8	178,8
Jumlah		29	893,5	762,3	758,5

Sumber : RUPTL 2025-2034

4. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Akses air bersih yang layak bagi masyarakat juga masih menjadi tantangan besar bagi Provinsi Lampung, terlihat dari capaian Indeks Kualitas Air yang berada pada kategori “cukup” (62,97). Pertambahan



penduduk yang cukup pesat dan mengalami pengembangan/pembangunan perekonomian berdampak terhadap penurunan kualitas air. Masalah utama dalam penyediaan akses air bersih di Provinsi Lampung antara lain:

1. Masih banyak daerah, terutama di pedesaan, yang belum memiliki infrastruktur air bersih dan sanitasi yang layak serta pengelolaan sumber daya air yang tidak memadai
2. Ketersediaan air bersih cenderung menurun akibat kerusakan alam dan pencemaran
3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya air bersih yang mengakibatkan pengelolaan air yang tidak tepat.
4. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan SPAM. Pengembangan dan pengelolaan SPAM di tingkat regional dan kabupaten/kota masih belum mencapai standar yang diharapkan. Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung yang merupakan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan dengan mekanisme KPBU, sampai saat ini belum dapat berjalan sebagaimana target, yang mempengaruhi kebijakan dalam pengembangan SPAM di tingkat Regional.
5. Rendahnya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Provinsi Lampung masih rendah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung menargetkan 31,568% akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan, namun pencapaian saat ini masih jauh dari target.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks



Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, *Total Fosfat*, *Fecal Coli*, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Data IKLH Tahun 2024 merupakan kompilasi hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>). Namun pelaksanaannya terdapat permasalahan pada data yang disampaikan oleh kabupaten/kota yang tidak semuanya (memenuhi) standar sesuai dengan ketentuan. Selain itu, tidak lengkapnya data dalam pengulangan sampel menyebabkan kurangnya varian data. Dari data IKLH yang ada, terlihat bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup perlu diselaraskan dan disinkronisasikan serta terus ditingkatkan agar nilai IKLH mengalami peningkatan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel beriku.

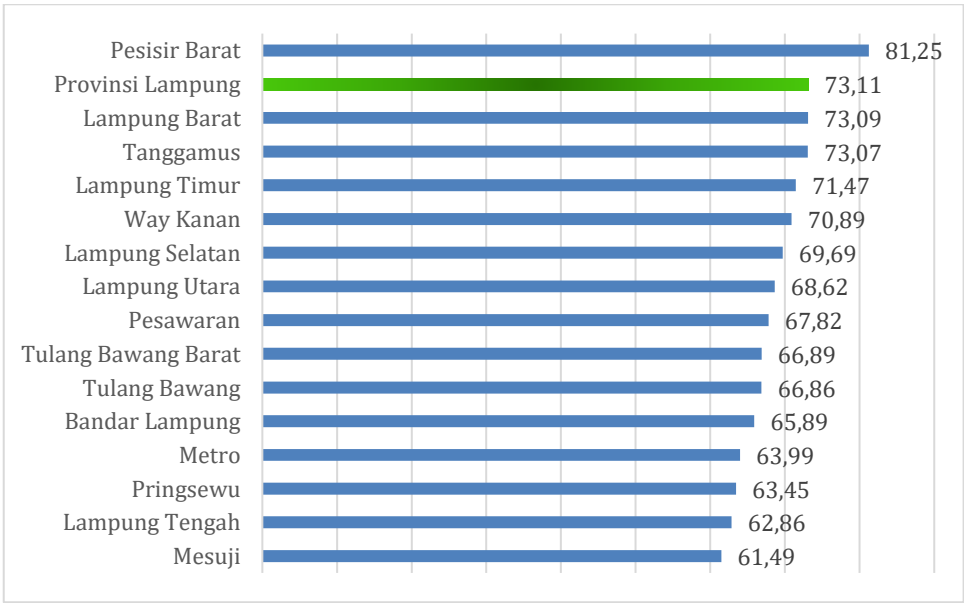
Tabel 2. 15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota	Capaian IKA				Capaian IKU				Capaian IKL				Capaian IKAL				Capaian IKLH				Target IKLH (S No.4 RPJMD)				Status IKLH 2024
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Kabupaten Lampung Barat	60,00	63,08	66,06	69,00	84,73	88,03	90,52	93,52	41,63	40,81	41,33	42,32	-	-	-		65,99	68,31	70,55	73,09	64,74	65,36	65,99	66,61	Baik
Kabupaten Lampung Selatan	60,00	55,00	50,51	67,04	87,37	87,89	84,7	91,71	26,13	26,10	33,12	33,52	-	-	-		63,67	61,99	60,55	69,69	60,89	61,41	61,93	62,45	Sedang
Kabupaten Lampung Tengah	56,67	50,00	53,33	58,89	83,46	82,55	84,09	86,24	24,48	24,64	26,75	26,43	-	-	-		60,47	57,63	59,97	62,86	61,83	62,41	63,00	63,58	Sedang
Kabupaten Lampung Timur	53,53	49,46	50,54	62,94	86,15	87,73	87,74	92,54	45,75	45,79	48,80	47,17	-	-	-		65,04	64,16	65,22	71,47	62,97	63,38	63,79	64,19	Baik
Kabupaten Lampung Utara	57,50	55,93		63,33	86,75	88,2	86,98	91,95	25,7	25,7	29,72	34,57	-	-	-		62,38	62,38	41,73	68,62	63,19	63,88	64,58	65,27	Sedang
Kabupaten Mesuji	58,57	61,43	59,00	51,90	87,05	88,46	89,5	88,19	28,13	28,14	28,54	28,56	-	-	-		63,44	65,09	64,68	61,49	61,20	61,72	62,24	62,76	Sedang
Kabupaten Pesawaran	60,00	57,78	63,33	60,00	91,83	91,00	89,37	89,51	25,73	25,71	38,59	41,16	-	-	-		65,39	64,21	68,46	67,82	61,83	62,48	63,13	63,77	Sedang
Kabupaten Pesisir Barat	52,86	50,00	50,00	70,00	87,63	89,06	89,9	93,12	73,93	73,93	78,67	78,60	-	-	-		71,56	71,06	72,44	81,25	73,21	73,54	73,87	74,20	Baik
Kabupaten Pringsewu	63,33	50,65	52,22	52,22	86,03	86,76	88,98	89,59	23,63	23,5	35,00	34,52	-	-	-		63,83	59,33	63,34	63,48	62,16	62,71	63,26	63,80	Sedang
Kabupaten Tanggamus	57,92	51,54	53,75	68,75	84,22	86,78	86,97	92,7	34,42	34,42	42,57	44,19	-	-	-		63,42	62,06	64,75	73,07	64,27	64,92	65,57	66,21	Baik
Kabupaten Tulang Bawang	56,67	50,00	50,00	62,50	90,15	92,74	92,03	93,54	24,09	24,11	24,79	25,00	-	-	-		63,09	61,64	61,5	66,86	62,01	62,64	61,12	61,73	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang Barat	60,00	52,22	50,00	64,29	85,18	88,49	88,15	91,95	23,61	23,61	26,51	25,03	-	-	-		62,23	60,64	60,31	66,89	63,27	63,87	64,48	65,09	Sedang
Kabupaten Way Kanan	50,00	67,33	63,33	70,00	80,39	84,75	91,94	92,13	23,47	39,19	28,10	33,12	-	-	-		56,5	68,22	67,2	70,89	67,22	67,83	68,43	69,04	Baik
Kota Bandar Lampung	63,75	50,95	50,00	62,63	82,31	83,73	82,54	86,86	25,89	26,43	28,08	32,69	-	-	-		62,98	58,86	58,38	65,89	60,94	61,39	61,84	62,28	Sedang
Kota Metro	50,00	50,69	50,00	51,33	78,69	83,62	87,2	90,56	22,59	22,59	36,71	36,58	-	-	-		55,62	57,87	62,15	63,99	60,45	60,65	60,84	61,04	Sedang
Provinsi Lampung	57,77	54,72	55,36	62,97	85,46	87,32	88,04	90,94	33,54	34,29	38,42	38,49	79,56	86,48	83,87	77,35	68,56	69,1	69,91	73,11	68,23	68,66	69,09	69,52	Baik
Nasional	55,20	55,30	54,55	54,76	87,36	88,05	88,65	90,17	62,5	63,5	61,75	62,25	59,00	59,50	78,58	81,61	71,45	72,42	72,48	73,57	68,96	69,22	69,48	69,74	Baik

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Dari Tabel diatas terlihat bahwa IKLH Provinsi Lampung tahun 2024 telah mencapai target dan berada pada status “baik” yaitu 73,11. IKLH kabupaten/kota tahun 2024 didominasi kriteria “sedang” sebanyak 10 Kabupaten/kota (Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro) dan 5 kabupaten yang memiliki kriteria “baik” yaitu Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan capaian indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung Tahun 2024 terdapat 15 kabupaten/kota sudah melampaui target.

Gambar 2. 25 Perubahan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2025

Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 8 (delapan) parameter kualitas air yang di analisis parameter COD, DO, BOD, dan Total Fosfat sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari batas ambang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK dan kualitas air mengalami penurunan yang disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri.

Untuk kualitas udara yang mengalami penurunan (Lampung Selatan) dan belum mencapai target (Lampung Tengah) hal ini



disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara disebabkan peningkatan polutan SO₂ dan NO₂ sehingga terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Selain itu, pada parameter IKU data yang ada belum dapat mencerminkan kualitas udara yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan pola kecenderungan kualitas udara seharusnya. Lokasi perkotaan kualitas udaranya kurang bila dibandingkan dengan kabupaten yang kepadatannya masih rendah, begitu juga untuk kawasan transportasi dan industri seharusnya kualitas udaranya lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perkantoran.

Indeks kualitas lahan Provinsi Lampung masih dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa ada alih fungsi lahan dari hutan menjadi penggunaan lain. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (agroforestri) yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik.

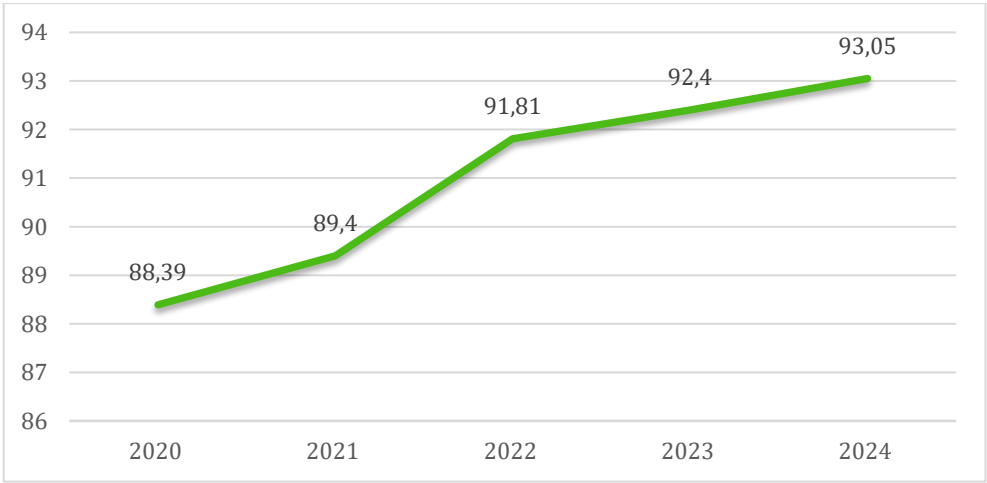
Karena keterbatasan data tutupan lahan yang ada dalam perhitungan ini menggunakan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui metode interpretasi citra sehingga data tutupan hutan dengan luasan yang kecil tidak terhitung serta tanaman yang masih muda hasil dari rehabilitasi tutupan lahan tidak terdeteksi sebagai tutupan hutan sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung yang sebenarnya.

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Catatan statistik bidang Perumahan (sumber: BPS-Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2025), memberi gambaran capaian dan kondisi akses sanitasi rumah tangga sebagai berikut:

- Di tahun 2024 sebanyak 95,73% rumah tangga telah memiliki fasilitas MCK secara mandiri; 4,1% menggunakan fasilitas MCK Umum; 0,02% tidak menggunakan MCK; dan masih terdapat 1,04% rumah tangga belum memiliki fasilitas MCK.
- Hingga Tahun 2024, sebanyak 93,94% rumah tangga menggunakan Gas LPG untuk memasak; 5,34% dengan Kayu Bakar; 0,59% dengan listrik; 0% dengan minyak tanah; dan 0,07% tidak memasak dirumah.
- Disisi kepemilikan rumah, data tahun 2024 menjelaskan bahwa sebanyak 93,05% rumah berstatus milik sendiri; 1,98% mendiami rumah dengan status kontrak/sewa; sisanya 4,83% dengan status bebas sewa; 0,14 dengan status dinas lainnya.
- Di tahun 2024 sebanyak 85,44% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Kondisi tersebut membaik bila dibanding tahun 2020 yang tercatat 78,81%.
- Catatan tahun 2024 juga menunjukkan bahwa sebanyak 84,51% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Kondisi tersebut meningkat signifikan bila dibanding tahun 2020 yang sebesar 74,97%.

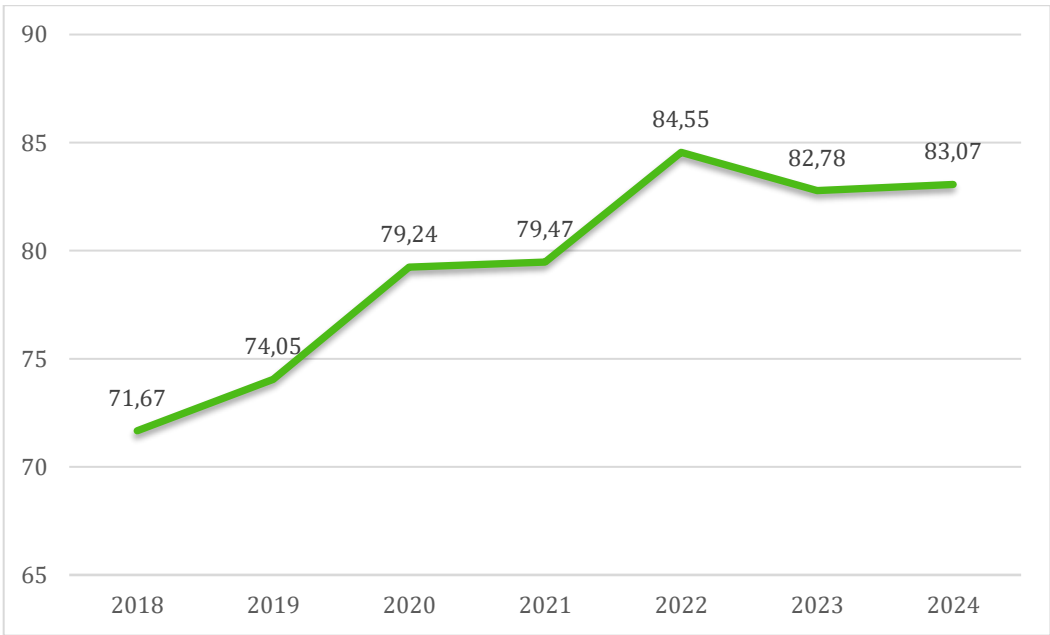
Gambar 2. 26 Status kepemilikan Rumah tangga di Provinsi Lampung



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Capaian air bersih/air minum layak di Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022. Namun, capaian sedikit menurun pada 2023 dan meningkat kembali pada tahun 2024. Pada tahun 2024 capaian air minum layak mencapai 83,07%, namun nilai tersebut belum mencukupi target pada tahun 2024 yaitu sebesar 87,19% terdapat gap target dan realisasi sebesar -4,12%. Berikut merupakan persentase capaian Air Minum Layak di Provinsi Lampung tahun 2018-2024.

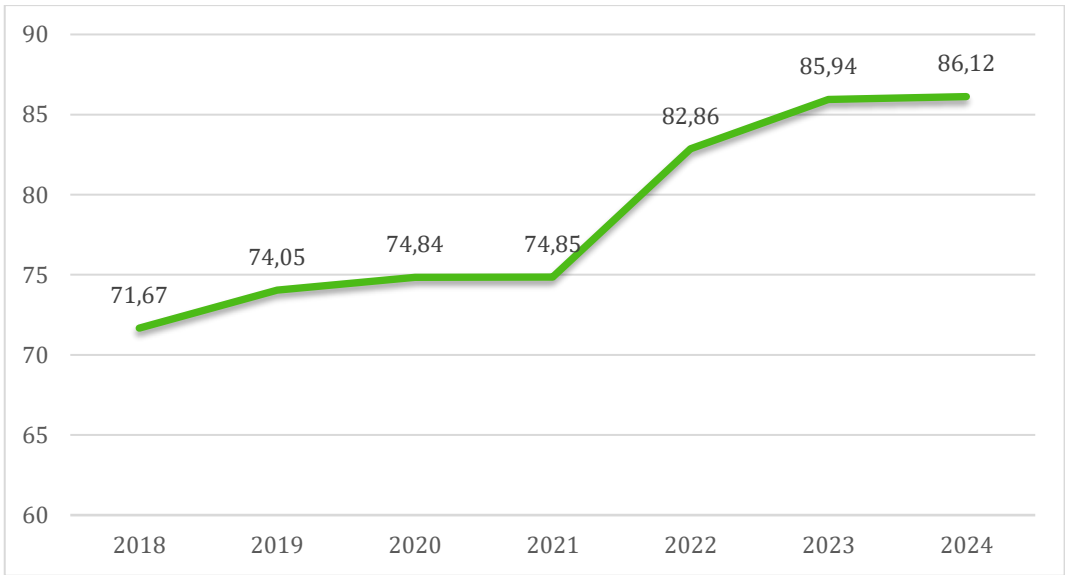
Gambar 2. 27 Persentase Capaian Air Minum Layak Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP-CK) Provinsi Lampung, 2025

Sanitasi Layak. Untuk persentase penduduk yang memiliki akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung dari Tahun 2018 s.d 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2018 hanya 71,67% penduduk Provinsi Lampung memiliki Akses Sanitasi Layak menjadi 86,12% di Tahun 2024. Berikut merupakan persentase capaian Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung tahun 2018-2024.

Gambar 2. 28 Persentase Capaian Akses Sanitasi Layak Provinsi Lampung



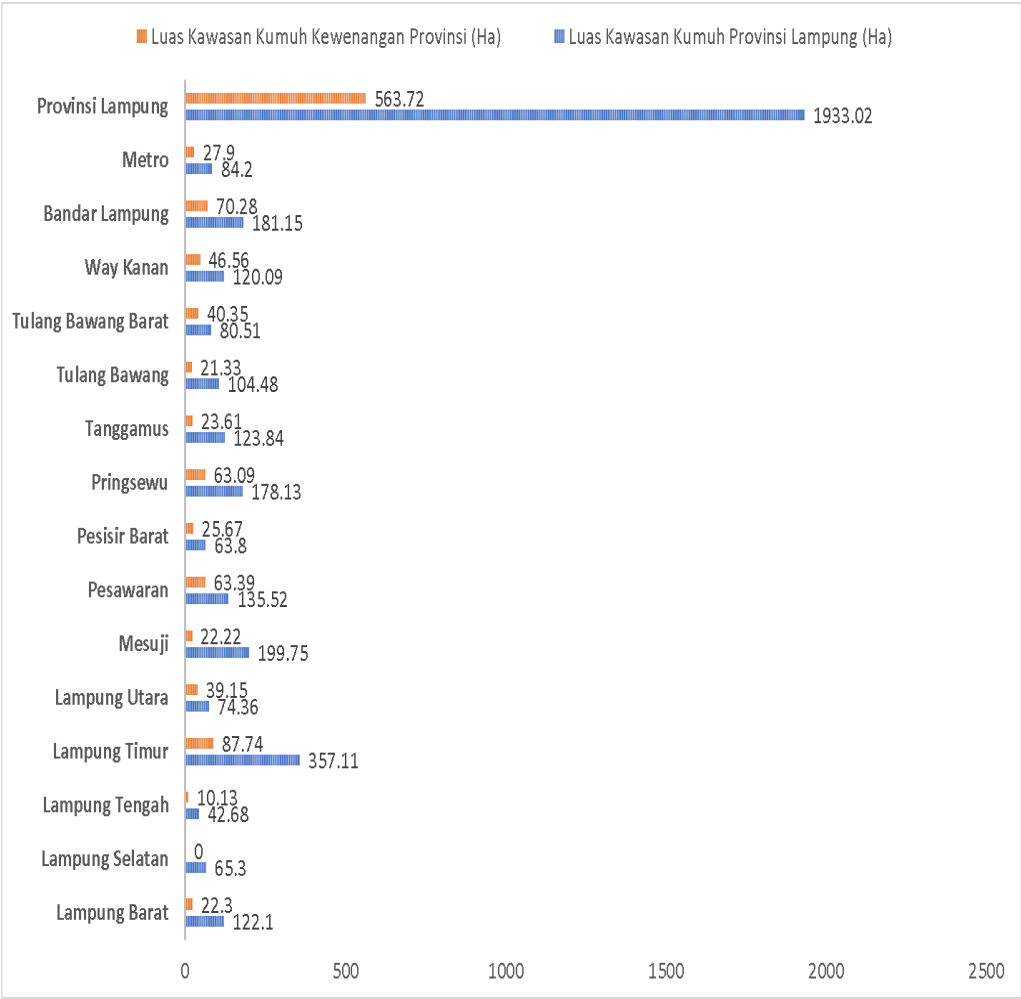
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP-CK) Provinsi Lampung, 2025

Permukiman kumuh merupakan wilayah di perkotaan yang ditandai oleh tingginya tingkat kepadatan penduduk dan umumnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kawasan seperti ini dapat ditemukan di banyak kota besar di seluruh dunia. Di negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, kawasan kumuh sering menjadi sumber berbagai permasalahan kesehatan akibat lingkungan yang tidak bersih dan tidak layak huni. Di Indonesia sendiri, hampir seluruh kota besar menghadapi tantangan serupa, sebagaimana yang juga terjadi di negara berkembang lainnya.

Permukiman kumuh sering dianggap sebagai permasalahan serius dalam tata kelola kota yang perlu segera ditangani. Meningkatnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama munculnya kawasan permukiman baru, termasuk yang berkembang tanpa perencanaan yang baik. Kualitas permukiman yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi penduduk serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan kota. Selain dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas kota, tingginya angka kemiskinan, dan kurang optimalnya peran pemerintah dalam pengendalian pembangunan dan penyediaan layanan dasar.

Menyadari permasalahan ini, sejak tahun 2014 seluruh pemerintah kota dan kabupaten telah melakukan pemetaan dan pendataan luas kawasan kumuh di wilayahnya masing-masing, yang kemudian ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan bupati atau wali kota. Berikut merupakan luasan permukiman kumuh di Provinsi Lampung.

Gambar 2. 29 Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung 2025



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, 2025

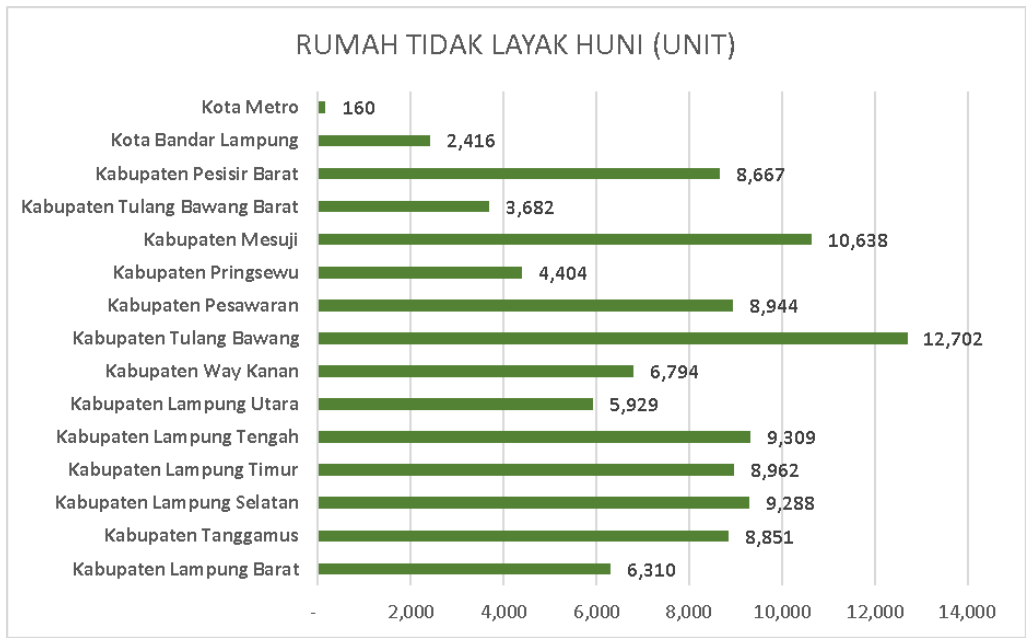
Luasan kumuh diatas didapatkan dari rekapitulasi SK Kumuh masing-masing Kabupaten/Kota dengan total luasan wilayah kumuh sebesar 1933,02 ha. Kabupaten Lampung Timur menjadi Kota/Kabupaten dengan luasan kumuh paling besar dengan 357,11 ha dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten/Kota dengan sisa wilayah kumuh paling sedikit yaitu dengan 42,68 ha.



Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak baik perorangan maupun badan hukum. Usaha pemerintah tersebut tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Permasalahan yang dihadapi dalam konteks perumahan pada banyak Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung adalah semakin berkembangnya perumahan dan pemukiman yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan oleh konsep penataan kota yang umumnya berkembang secara bertahap tetapi tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Penataan kota tidak dipersiapkan atau direncanakan untuk menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menampilkan wajah ganda, di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur modern di sepanjang tepi jalan utama kota, namun di sisi lain nampak menjamurnya lingkungan tidak layak huni dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup di wilayah perkotaan tersebut, sehingga menunjukkan adanya krisis dalam perencanaan perkotaan. Berikut merupakan jumlah RTLH di Provinsi Lampung tahun 2025.

Gambar 2. 30 Jumlah RTLH Tahun 2025 di Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP-CK) Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, jumlah RTLH yang paling besar berada pada Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 12,702 unit, sedangkan jumlah RTLH paling sedikit di Kota Metro sebanyak 160 unit.

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Meningkatnya aktivitas penduduk kota dari waktu ke waktu akan berdampak pada meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan. Beberapa isu permasalahan pada sektor persampahan yang sedang berkembang di Provinsi Lampung adalah:

- Belum optimalnya pengurangan dan penanganan sampah domestik maupun regional di Provinsi Lampung;
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (dari sumber, TPS, dan TPA) serta dalam hal pengangkutan dari hulu ke hilir;
- Pengelolaan persampahan berorientasi 3R yang belum efektif dan terpadu serta Sarana atau prasarana 3R berbasis komunitas (permukiman) masih belum tersedia secara memadai dan terdistribusi merata; dan

- Perlunya teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan.

Sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah yang sudah tercampur antara sampah organik dan anorganik. Sedangkan 75% sampah organik berasal dari pasar tradisional dan rumah tangga. Sebagai contoh, di Kota Bandar Lampung jenis sampah yang dominan adalah sampah organik 66%, plastik 14,5%, kertas 9%, logam, kaca, tekstil dan lain-lain 10.5%. Upaya dalam pemilahan belum terlaksana dengan baik, sehingga permasalahan sampah perlu mendapat perhatian yang lebih dengan cara pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jika tidak segera dilakukan penanganan yang baik, maka sampah akan menjadi masalah yang serius dikemudian hari, diproyeksikan untuk tahun 2029 timbulan sampah di Provinsi Lampung ada di kisaran angka 2 juta ton/tahun.

Konsep penanganan masalah persampahan di Provinsi Lampung dimulai dari paradigma “mengurangi produksi sampah” melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mulai dari rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar sampai ke sampah industri. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah atau pendauran ulang sampah. Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Teknologi yang diusulkan adalah kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang. “Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju *Zero Waste*” yang merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk dapat

mencapai hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan beberapa usaha, diantaranya:

- Melakukan perubahan paradigma dari tujuan membuang menjadi memanfaatkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Perbaiki dalam sistem manajemen pengelolaan sampah secara keseluruhan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan lainnya.

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Informasi Sejarah Kebencanaan dan Potensi Risiko Bencana Daerah

Informasi risiko bencana serta sejarah kebencanaan di Provinsi Lampung dari sejarah kejadian dan dampak bencana, deskripsi penduduk terpapar ancaman bencana, deskripsi potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana, deskripsi potensi luas wilayah terdampak bencana dan informasi tingkat risiko bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 16 Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Lampung Tahun 2000-2024

Jenis Bencana	Banjir	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrem	Epidemi dan Wabah Penyakit	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Gempa bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kegagalan Teknologi	Kekeringan	Letusan Gunung berapi	Likuefaksi	Tanah Longsor	Tsunami
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2002	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	4	0
2004	6	0	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
2005	13	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2006	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2007	8	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
2008	25	0	17	0	1	0	6	0	16	1	0	5	0
2009	22	1	19	0	0	0	6	0	1	0	0	6	0
2010	66	2	24	0	3	3	30	0	1	0	0	29	0
2011	19	3	43	0	0	1	351	0	13	0	0	9	0
2012	48	2	55	0	2	0	277	0	15	0	0	21	0
2013	66	1	35	0	1	3	86	0	2	0	0	13	0
2014	54	6	48	0	0	2	187	0	1	0	0	26	0
2015	45	0	14	0	0	2	293	0	0	0	0	16	0

Jenis Bencana	Banjir	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrem	Epidemi dan Wabah Penyakit	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Gempa bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kegagalan Teknologi	Kekeringan	Letusan Gunung berapi	Likuefaksi	Tanah Longsor	Tsunami
2016	34	3	28	0	1	6	72	0	0	0	0	19	0
2017	25	1	45	0	3	0	74	0	0	0	0	9	0
2018	18	0	54	0	0	0	25	0	4	1	0	5	1
2019	24	0	70	0	0	2	230	0	1	0	0	15	0
2020	58	0	108	0	1	0	60	0	0	1	0	17	0
2021	57	0	162	0	2	7	65	0	0	0	0	16	0
2022	67	0	126	0	2	14	56	0	0	0	0	21	0
2023	38	0	104	0	1	0	183	0	14	0	0	9	0
2024	46	0	95	0	0	0	51	0	0	0	0	4	0
Jumlah	751	19	1.074	0	17	40	2.054	0	85	3	0	248	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, 2025

Tabel 2. 17 Kerugian Bencana Provinsi Lampung Tahun 2000-2024

b	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban					Kerusakan								Kerugian
								Rumah				Fasilitas				
			Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terdendam	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Umum	
1	Banjir	751	128	33	720	178.979	11.083	3.761	5.797	26.304	87.091	56	5	1.763	14.332	Rp 13.966.781.000,00
2	Banjir Bandang	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp -
3	Cuaca Ekstrem	1.074	23	0	132	10.384	409	3.149	2.348	10.843	163	87	5	27	315	Rp 1.993.289.000,00
4	Letusa Gunung berapi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp -
5	Gelombang Ekstrem	17	3	0	1	0	0	0	0	66	0	0	0	1	1	Rp -
6	Gempa bumi	40	0	0	0	0	150	0	2	20	0	0	0	1	0	Rp -
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	2.054	18	0	20	28	9	2.020	613	1.413	10	17	0	3	1.412	Rp 115.909.553.000,00
8	Kekeringan	85	0	0	1	266.572	24	48	62	266	0	2	1	2	154	Rp -
9	Tanah Longsor	248	52	13	170	18	715	123	198	679	34	6	0	4	593	Rp 1.650.600.000,00
10	Tsunami	1	120	8	4.008	0	9.366	600	70	1.029	0	0	0	0	0	Rp -
Total		4.292	344	54	5.052	455.981	21.756	9.701	9.090	40.620	87.298	168	11	1.801	16.807	Rp 133.520.223.000,00

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, 2025

Dari beberapa sumber data yang telah di rekapitulasi dari tahun 2000-2024 atau dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, ditemukan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah bencana alam paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian secara rupiah di Provinsi Lampung. Bencana lainnya yang paling sering terjadi berturut-turut adalah banjir dan cuaca ekstrem. Secara korban, Kekeringan menimbulkan korban terbesar yang



diikuti oleh banjir dan tsunami. kerusakan rumah dan fasilitas yang terdampak, banjir memiliki nilai terbesar dan diikuti oleh cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Walaupun demikian, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi perlu diperhatikan karena kondisi geologis daripada Lampung itu sendiri.

Secara kecenderungan, dari 144 perbandingan 5 tahunan, ditemukan bahwa 43.05% cenderung naik, dan 23.61% turun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun, bencana alam di Lampung mengalami intensifikasi kejadian yang juga diikuti oleh naiknya jumlah korban, kerusakan dan kerugian. Secara lebih dalam untuk setiap bencana alam, ditemukan bahwa setiap bencana alam yang ada pada Tabel 2.12 memiliki kecenderungan naik secara tren dalam 25 tahun terakhir.

2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menekankan pentingnya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai strategi utama untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Melalui kebijakan ini, upaya mitigasi dan adaptasi diintegrasikan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian dan kehutanan, energi, transportasi, dan limbah. RPJPN mendorong pengembangan teknologi bersih dan sumber energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Intensitas emisi GRK menunjukkan banyaknya emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu negara. Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan PRK, yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan output aktivitas ekonomi negara menggunakan data Pendapatan Domestik



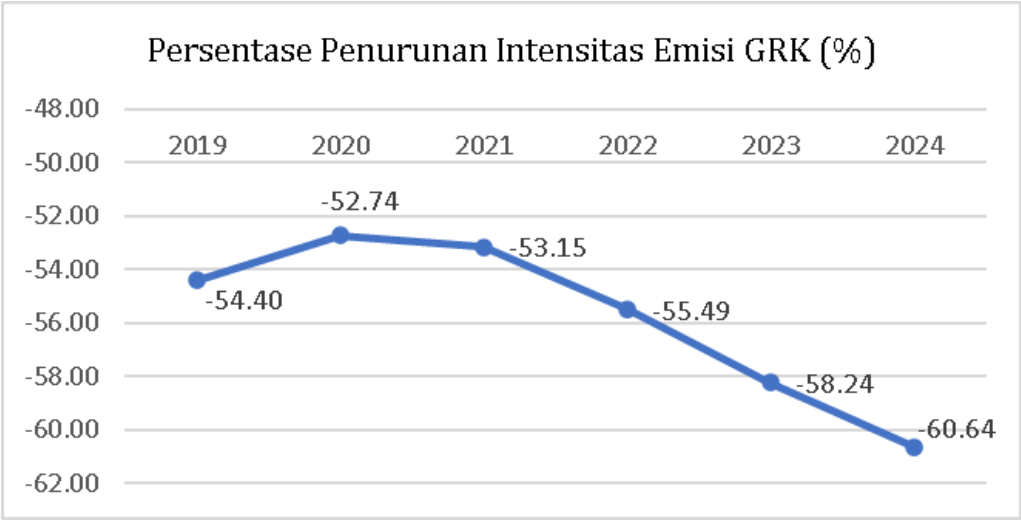
Bruto (PDB) konstan tahun 2010. Tahun 2010 dijadikan tahun dasar perhitungan PDB oleh Badan Pusat Statistik, mengacu pada rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB. Persentase penurunan intensitas emisi GRK mengukur ketercapaian strategi pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Persentase penurunan intensitas emisi GRK diperhitungkan dari perbandingan selisih intensitas emisi GRK dengan intensitas emisi baseline (tahun dasar 2010). Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Penanganan perubahan iklim dan bencana telah mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung. Sejalan dengan komitmen Persetujuan Paris pada Conference of Parties (COP) 21 UNFCCC Tahun 2015, Indonesia terus mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Demikian juga dengan Provinsi Lampung telah mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt ton CO₂e atau sebesar 38,59 % dari total Business As Usual/BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton CO₂e. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 menetapkan arah kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada perlindungan lingkungan dan penguatan daya tahan masyarakat terhadap perubahan iklim, dimana Indikator utama dalam kebijakan ini mencakup penurunan intensitas emisi GRK, yang diharapkan dapat mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi dan konsumsi.

Selain itu, penurunan emisi GRK kumulatif (ton CO₂e) menjadi fokus utama, di mana target ambisius ditetapkan untuk meminimalkan akumulasi emisi dari tahun ke tahun. Penurunan emisi GRK tahunan (ton CO₂e) juga menjadi indikator penting, mencerminkan hasil nyata dari implementasi kebijakan yang diambil.

Nilai Intensitas Emisi (IE) GRK yang didefinisikan sebagai jumlah emisi GRK (CO₂e) per satuan output ekonomi (miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) pada jangka waktu dan wilayah tertentu. Perilaku Intensitas Emisi dalam kurun waktu tertentu dapat menggambarkan relasi kecepatan peningkatan emisi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula yang ditangkap dalam aplikasi penerus PEP RAD GRK yakni AKSARA atau Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia.

Gambar 2. 31 Capaian Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2021 -2024



Sumber: Hasil Pemodelan Tim LCDI Bappenas 2025, diolah

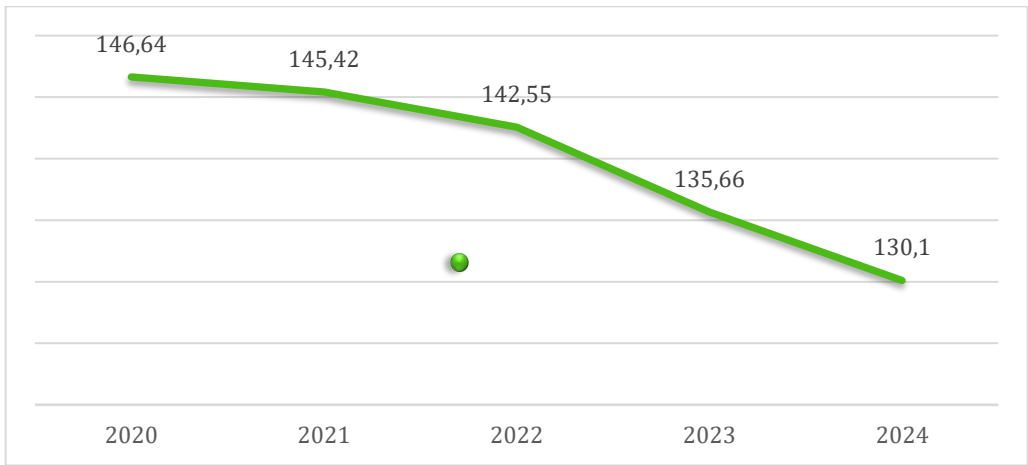
3. Indeks Risiko Bencana

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, Sesar Mentawai dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Potensi bencana disebabkan oleh bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Bencana yang berpotensi tersebut dikaji

berdasarkan yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung berapi, cuaca ekstrem dan tanah longsor.

Pada tahun 2024 Data Informasi Bencana Indonesia mencatat 3 (tiga) jenis bencana dominan terjadi di Provinsi Lampung yaitu banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Provinsi Lampung memiliki indeks risiko 130,1 (sedang). Nilai indeks risiko di tingkat provinsi merupakan rata- rata dari nilai indeks risiko kabupaten/kota. Keberhasilan penurunan risiko bencana provinsi adalah menurunnya nilai risiko bencana di kabupaten/kota.

Gambar 2. 32 Nilai Indeks Risiko Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko Bencana di Provinsi Lampung terdiri atas:

a. Risiko Banjir

Bencana banjir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan kelas bahaya dan kerentanan yang beragam, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18 Tingkat Risiko Banjir di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Lampung Barat	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Lampung Selatan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Lampung Tengah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Lampung Timur	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Lampung Utara	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Mesuji	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Metro	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Pesawaaran	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Pesisir Barat	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Pringsewu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tanggamus	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Tulang Bawang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Tulang Bawang Barat	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Way Kanan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Provinsi Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelas risiko banjir di Provinsi Lampung terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kelas Sedang dan Tinggi. Terdapat 8 Kabupaten yang memiliki kelas risiko sedang, sedangkan 7 Kabupatennya memiliki kelas risiko tinggi yang terjadi di Provinsi Lampung saat ini. Secara keseluruhan, kelas risiko bencana banjir di Provinsi Lampung adalah Tinggi.

Gambar 2. 33 Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

b. Risiko Banjir Bandang

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa terjadi pada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang berpotensi terdampak bencana banjir bandang. Hasil kajian ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat dan Tengah memiliki kelas risiko yang tinggi, serta 5 Kabupaten lainnya memiliki kelas risiko sedang. Dengan demikian, kelas risiko bencana banjir bandang dengan di Provinsi Lampung adalah Tinggi.

Tabel 2. 19 Tingkat Risiko Banjir Bandang di Provinsi Lampung

N o	Kabupaten/Ko ta	Kelas Bahaya	Kelas Kerentan an	Kelas Kapasit as	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Lampung Barat	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Lampung Tengah	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
4	Pesawaaran	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5	Pesisir Barat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
6	Tanggamus	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7	Way Kanan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Gambar 2. 34 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

c. Risiko Cuaca Ekstrem

Cuaca dan Iklim di Provinsi Lampung selain dipengaruhi oleh faktor lokal juga merupakan hasil dari interaksi atmosfer dan laut dan gangguan-gangguan yang bersumber dari lokasi

lain. Hasil pengkajian bahaya kejadian cuaca ekstrem dari data 30 tahun terakhir di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota memiliki potensi bahaya dengan kelas tinggi. Hasil rekapitulasi kelas bahaya, kerentanan, dan kapasitas cuaca ekstrem dapat dilihat pada Tabel.

Diturunkan dari informasi kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan, secara umum Provinsi Lampung memiliki kerentanan sedang dalam menghadapi bahaya cuaca ekstrem. Sebanyak 4 wilayah kota/kabupaten dengan kelas kerentanan sedang, sedangkan 11 kota/kabupaten lainnya memiliki kelas kerentanan rendah. Meskipun didominasi oleh kelas bahaya tinggi, namun didukung dengan kapasitas masyarakat pada tingkat sedang, seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung memiliki risiko menderita kerugian yang disebabkan oleh bahaya cuaca ekstrem pada kelas sedang. Potensi bahaya cuaca ekstrem diproyeksikan akan semakin meningkat di masa mendatang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya mitigasi dan adaptasi menghadapi perubahan iklim global.

Tabel 2. 20 Tingkat Risiko Cuaca Ekstrem di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
2	Lampung Barat	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
3	Lampung Selatan	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
4	Lampung Tengah	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
5	Lampung Timur	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
6	Lampung Utara	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
7	Mesuji	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
8	Metro	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
9	Pesawaaran	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
10	Pesisir Barat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
11	Pringsewu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
12	Tanggamus	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
13	Tulang Bawang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
14	Tulang Bawang Barat	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
15	Way Kanan	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
Provinsi Lampung		Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Gambar 2. 35 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

d. Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit

Bahaya epidemi dan wabah penyakit berpotensi memapar 13 kabupaten di Provinsi Lampung dengan kategori kelas bahaya sedang, kelas kerentanan sedang, dan kelas kapasitas sedang. Secara keseluruhan, kelas risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Lampung adalah Sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Tingkat Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentan an	Kelas Kapasit as	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
2	Lampung Selatan	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
3	Lampung Tengah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
4	Lampung Timur	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
5	Lampung Utara	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah
6	Mesuji	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah
7	Metro	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
8	Pesawaaran	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
9	Pesisir Barat	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah
10	Pringsewu	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
11	Tanggamus	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
12	Tulang Bawang Barat	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
13	Way Kanan	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
Provinsi Lampung		Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Daerah tingkat risiko sedang terluas terdapat pada Kecamatan Gadingrejo di Kecamatan Pringsewu. Hal ini perlu menjadi perhatian dikarenakan terdapat kasus penyakit KLB yang tinggi pada daerah tersebut, diantaranya kasus penyakit demam berdarah dan malaria.

Gambar 2. 36 Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

e. Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Kelas risiko Gelombang Ekstrem diperoleh dari hasil kelas bahaya, kerentanan, kapasitas Gelombang Ekstrem di Provinsi Lampung yang ditunjukkan dalam Tabel berikut. Jika dilihat pada tabel, seluruh wilayah di Provinsi Lampung memiliki kelas risiko sedang.

Pada indikator kelas bahaya, 4 wilayah berada dalam kategori sedang, dan 3 wilayah berada dalam kategori sedang. Indikator ini menggambarkan potensi ancaman fisik akibat gelombang ekstrem dan abrasi berdasarkan karakteristik geografis dan faktor oseanografi. Wilayah seperti Pesawaran, Pesisir Barat, dan Tanggamus memiliki potensi bahaya tinggi karena gelombang tinggi di wilayah tersebut.

Kelas kerentanan, yang mengukur seberapa rentan suatu

wilayah terhadap dampak tsunami berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur, menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung masuk dalam kategori sedang, dan satu wilayah berada dalam kategori rendah, yaitu pesisir barat. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun potensi bahaya tinggi, kerentanan masyarakat terhadap dampak gelombang ekstrem dan abrasi relatif sedang. Kemungkinan besar, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, dan penyediaan infrastruktur mitigasi telah berkontribusi dalam mengurangi kerentanan ini.

Pada indikator kelas kapasitas, yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan memitigasi dampak tsunami, seluruh wilayah masuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mitigasi, kapasitas daerah-daerah di Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyediaan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan kapasitas yang belum optimal, risiko dampak tsunami tetap berada pada tingkat yang signifikan.

Secara keseluruhan, kombinasi potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas menghasilkan kelas risiko sedang untuk 6 kabupaten/kota, dan 1 kabupaten dengan kelas risiko tinggi di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa meskipun ancaman gelombang ekstrem dan abrasi tidak dapat dihindari, wilayah ini memiliki peluang yang cukup besar untuk meminimalkan dampak bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi. Kabupaten yang memiliki risiko tinggi, menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi.

Tabel 2. 22 Tingkat Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Lampung

N o	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentan an	Kelas Kapasit as	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Lampung Selatan	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Lampung Timur	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang

4	Pesawaaran	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5	Pesisir Barat	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
6	Tanggamus	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7	Tulang Bawang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Sebagian besar kecamatan di Provinsi Lampung berada dalam kategori risiko sedang. Setiap kecamatan dianalisis berdasarkan luas wilayah yang berpotensi terdampak gelombang ekstrem dan abrasi, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: bahaya rendah, sedang, dan tinggi. Tabel 3.101 menunjukkan informasi total luas wilayah terdampak dan penetapan kelas risiko untuk setiap kecamatan yang memiliki risiko sedang atau tinggi. Adapun total luas risiko tertinggi berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan total luas 3.143,65 ha yang memiliki risiko tinggi.

Gambar 2. 37 Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

f. Risiko Gempa bumi

Kelas risiko Gempa bumi di Provinsi Lampung merupakan indikator penting untuk memahami tingkat bahaya dan kerentanan wilayah pesisir terhadap potensi bencana tsunami. Risiko ini diklasifikasikan berdasarkan luas wilayah terdampak yang terbagi dalam kategori bahaya rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan kelas risiko ini tidak hanya mempertimbangkan letak geografis, tetapi juga karakteristik lingkungan serta dampak yang mungkin timbul terhadap populasi dan infrastruktur. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai kelas risiko Gempa bumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana dan langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat dari dampak yang lebih besar.

Tabel 2. 23 Tingkat Risiko Gempa bumi di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentan an	Kelas Kapasit as	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Lampung Barat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Lampung Selatan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Lampung Tengah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Lampung Timur	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Lampung Utara	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Mesuji	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
8	Metro	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
9	Pesawaaran	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
10	Pesisir Barat	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
11	Pringsewu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
12	Tanggamus	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
13	Tulang Bawang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
14	Tulang Bawang Barat	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
15	Way Kanan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Gambar 2. 38 Peta Risiko Gempa Bumi di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel diatas, analisis mengenai kelas risiko Gempa bumi per kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa seluruh wilayah dikategorikan memiliki risiko tinggi. Penilaian risiko ini didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu kelas bahaya, kelas kerentanan, dan kelas kapasitas. Kombinasi dari ketiga indikator tersebut memberikan gambaran tentang tingkat bahaya yang dihadapi oleh masing-masing wilayah, serta kapasitas mereka dalam menghadapi potensi bencana Gempa bumi.

Pada indikator kelas bahaya, sebagian besar wilayah berada dalam kategori tinggi, kecuali Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada dalam kategori sedang. Wilayah Kabupaten Mesuji memiliki potensi bahaya rendah karena berada di kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kategori ini menggambarkan potensi bahaya fisik akibat Gempa bumi berdasarkan karakteristik Kelas topografi. Intensitas guncangan di batuan dasar, dan Intensitas guncangan di permukaan. Kelas kerentanan, yang mengukur seberapa rentan suatu wilayah terhadap dampak Gempa bumi berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur, menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota di Provinsi

Lampung masuk dalam kategori rendah hingga tinggi. Kemungkinan besar, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, dan penyediaan infrastruktur mitigasi telah berkontribusi dalam mengurangi kerentanan ini. Namun, pada indikator kelas kapasitas, yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan mitigasi dampak gempa bumi, seluruh wilayah masuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mitigasi, kapasitas daerah-daerah di Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyediaan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan kapasitas yang belum optimal, risiko dampak gempa bumi tetap berada pada tingkat yang signifikan. Secara keseluruhan, kombinasi antara potensi bahaya rendah hingga tinggi, kerentanan yang rendah hingga tinggi, dan kapasitas yang sedang menghasilkan kelas risiko tinggi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa meskipun bahaya Gempa bumi tidak dapat dihindari, wilayah ini memiliki peluang yang cukup besar untuk meminimalkan dampak bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi.

g. Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Total dua kabupaten memiliki risiko rendah, enam kabupaten memiliki risiko sedang, dan tujuh kabupaten memiliki risiko tinggi. Sehingga berdasarkan aturan penarikan contoh kelas maksimum pada level kabupaten/kota, maka kelas risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Provinsi Lampung adalah Tinggi.

Tabel 2. 24 Tingkat Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Lampung Barat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Lampung Selatan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

4	Lampung Tengah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Lampung Timur	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Lampung Utara	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Mesuji	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
8	Metro	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
9	Pesawaaran	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
10	Pesisir Barat	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
11	Pringsewu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
12	Tanggamus	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
13	Tulang Bawang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
14	Tulang Bawang Barat	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
15	Way Kanan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Gambar 2. 39 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

h. Risiko Kegagalan Teknologi

Bencana kegagalan teknologi berpotensi memapar 3 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan kategori kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan sedang dan kelas kapasitas sedang. Secara keseluruhan, kelas risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi Lampung adalah Sedang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 25 Tingkat Risiko Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kot a	Kelas Bahaya	Kelas Kerentan an	Kelas Kapasita s	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
2	Lampung Selatan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
3	Lampung Tengah	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Provinsi Lampung		Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Bandar Lampung memiliki luas terbesar yang masuk ke dalam kelas Sedang. Hal ini dapat menjadi perhatian dikarenakan di Bandar Lampung bersama dengan Lampung Selatan memiliki kawasan industri dan beberapa industri eksisting merupakan industri yang memiliki bahaya berdasarkan Perka BNPB No. 02 Tahun 2012 yang berupa bahaya sedang pada jenis industri manufaktur, dan bahaya tinggi pada jenis industri.

Gambar 2. 40 Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

i. Risiko Kekeringan

Berdasarkan analisis bahaya kekeringan, seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung memiliki potensi bahaya tinggi. Kondisi masyarakat Lampung didominasi oleh tingkat kerentanan tinggi terhadap bahaya kekeringan. Meskipun didukung dengan kapasitas masyarakat pada level sedang, dengan kelas bahaya dan kerentanan tinggi mengakibatkan Provinsi Lampung memiliki kelas risiko kekeringan sedang. Hasil ini menunjukkan peran signifikan peningkatan kapasitas masyarakat yang rawan terpapar bencana kekeringan sehingga kerugian dan dampak kekeringan dapat diminimalkan. Hasil pengkajian risiko kekeringan menunjukkan bahwa sebagian besar Provinsi Lampung berada pada kelas risiko kekeringan tinggi. Untuk lebih lengkapnya, rekapitulasi kelas bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko kekeringan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 26 Tingkat Risiko Kekeringan di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentan an	Kelas Kapasit as	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Lampung Barat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Lampung Selatan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Lampung Tengah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Lampung Timur	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Lampung Utara	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Mesuji	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Metro	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
9	Pesawaaran	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
10	Pesisir Barat	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
11	Pringsewu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
12	Tanggamus	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
13	Tulang Bawang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
14	Tulang Bawang Barat	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
15	Way Kanan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Gambar 2. 41 Peta Risiko Kekeringan di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

j. Risiko Letusan Gunung berapi

Kelas risiko Letusan Gunung berapi di Provinsi Lampung merupakan indikator penting untuk memahami tingkat ancaman dan kerentanan wilayah daratan terhadap potensi bencana Letusan Gunung berapi. Risiko ini diklasifikasikan berdasarkan luas wilayah terdampak yang terbagi dalam kategori bahaya rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan kelas risiko ini tidak hanya mempertimbangkan letak geografis, tetapi juga karakteristik lingkungan serta dampak yang mungkin timbul terhadap populasi dan infrastruktur. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai kelas risiko Letusan Gunung berapi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana dan langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat dari dampak yang lebih besar.

Tabel 2. 27 Tingkat Risiko Letusan Gunung berapi di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Lampung Selatan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Gambar 2. 42 Peta Risiko Letusan Gunung berapi di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

k. Risiko Likuefaksi

Bencana likuefaksi terdampak pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Untuk kelas risiko dapat dijabarkan bahwa terdapat 1 kabupaten yang tergolong risiko rendah, 11 kabupaten dan 2 kota tergolong kelas risiko sedang dan 1 kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang tergolong kelas risiko tinggi, Secara umum dapat di kategorikan kelas risiko likuefaksi di Provinsi Lampung adalah Tinggi.

Tabel 2. 28 Tingkat Risiko Likuefaksi di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Lampung Barat	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Lampung Selatan	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
4	Lampung Tengah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
5	Lampung Timur	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
6	Lampung Utara	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah

7	Mesuji	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
8	Pesawaran	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
9	Pesisir Barat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
10	Pringsewu	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
11	Tanggamus	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
12	Tulang Bawang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
13	Tulang Bawang Barat	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
14	Way Kanan	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Gambar 2. 43 Peta Risiko Likuefaksi di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

1. Risiko Tanah Longsor

Bencana tanah longsor terdampak pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan sedang, dan kelas kapasitas sedang. Untuk kelas risiko dapat dijabarkan bahwa terdapat 4 kabupaten/kota yang tergolong risiko rendah, 6 kabupaten/kota tergolong memiliki kelas risiko sedang dan 5 kabupaten/kota tergolong memiliki risiko tinggi. Secara umum dapat dikategorikan kelas risiko tanah longsor di Provinsi Lampung adalah Tinggi yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 29 Tingkat Risiko Tanah Longsor di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentan an	Kelas Kapasit as	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Lampung Barat	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Lampung Selatan	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Lampung Tengah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
5	Lampung Timur	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
6	Lampung Utara	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Mesuji	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
8	Metro	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
9	Pesawaaran	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
10	Pesisir Barat	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
11	Pringsewu	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
12	Tanggamus	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
13	Tulang Bawang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
14	Tulang Bawang Barat	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
15	Way Kanan	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Gambar 2. 44 Peta Risiko Tanah Longsor di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

m. Risiko Tsunami

Kelas risiko tsunami di Provinsi Lampung merupakan indikator penting untuk memahami tingkat bahaya dan kerentanan wilayahpesisir terhadap potensi bencana tsunami. Risiko ini diklasifikasikan berdasarkan luas wilayah terdampak yang terbagi dalam kategori bahaya rendah, sedang, dan tinggi.

Penentuan kelas risiko ini tidak hanya mempertimbangkan letak geografis, tetapi juga karakteristik lingkungan serta dampak yang mungkin timbul terhadap populasi dan infrastruktur. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai kelas risiko tsunami di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana dan langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat dari dampak yang lebih besar.

Tabel 2. 30 Tingkat Risiko Tsunami di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Bandar Lampung	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Lampung Selatan	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Lampung Timur	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
4	Pesawaaran	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Pesisir Barat	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Tanggamus	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
7	Tulang Bawang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Provinsi Lampung		Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel diatas, analisis mengenai kelas risiko tsunami per kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa seluruh wilayah dikategorikan memiliki risiko sedang sampai tinggi, Penilaian risiko ini didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu kelas bahaya, kelas kerentanan, dan kelas kapasitas. Kombinasi dari ketiga indikator tersebut memberikan gambaran tentang tingkat ancaman yang dihadapi oleh masing-masing wilayah, serta kapasitas mereka dalam menghadapi potensi bencana tsunami.

Pada indikator kelas bahaya, sebagian besar wilayah berada dalam kategori tinggi, kecuali Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang yang berada dalam kategori sedang. Kategori ini menggambarkan potensi ancaman fisik akibat tsunami berdasarkan karakteristik geografis dan kedekatan dengan pesisir. Wilayah seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Tanggamus memiliki potensi bahaya tinggi karena berada di kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Kelas kerentanan, yang mengukur seberapa rentan suatu wilayah terhadap dampak tsunami berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur, menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung masuk dalam kategori sedang sampai tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa dengan potensi bahaya tinggi, kerentanan masyarakat terhadap dampak tsunami relatif tinggi juga.

Namun, pada indikator kelas kapasitas, yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan memitigasi dampak tsunami, seluruh wilayah masuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mitigasi, kapasitas daerah-daerah di Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyediaan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan kapasitas yang belum optimal, risiko dampak tsunami tetap berada pada tingkat yang signifikan.

Secara keseluruhan, kombinasi antara potensi bahaya yang tinggi, kerentanan yang tinggi, dan kapasitas yang sedang menghasilkan kelas risiko sedang sampai tinggi untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa meskipun ancaman tsunami tidak dapat dihindari, wilayah ini memiliki peluang yang cukup besar untuk meminimalkan dampak bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi. Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Selatan, yang memiliki potensi bahaya tinggi, menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi.

Gambar 2. 45 Peta Risiko Tsunami di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

4. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pengukuran IKD selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,01 yakni dari nilai 0,43 ke nilai 0,42 yang berada pada kelas sedang.

Tabel 2. 31 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2024

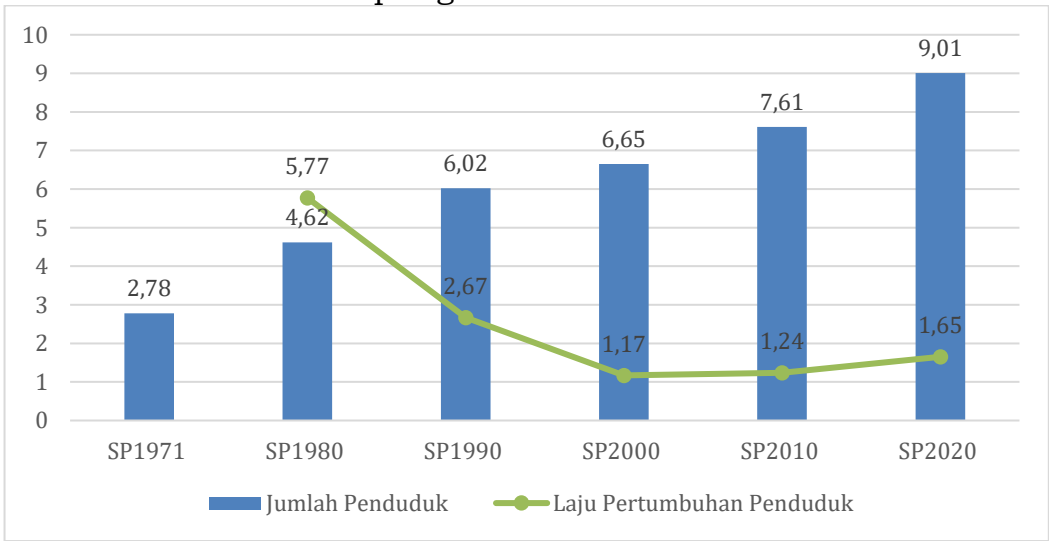
No	Kabupaten / Kota	IKD 2023	Kelas IKD 2023	IKD 2024	Kelas IKD 2024
1	Lampung Barat	0.37	Sedang	0.39	Sedang
2	Tanggamus	0.70	Tinggi	0.71	Tinggi
3	Lampung Selatan	0.41	Sedang	0.53	Sedang
4	Lampung Timur	0.26	Rendah	0.46	Sedang
5	Lampung Tengah	0.44	Sedang	0.47	Sedang
6	Lampung Utara	0.31	Rendah	0.29	Rendah
7	Way Kanan	0.53	Sedang	0.66	Tinggi
8	Tulang Bawang	0.47	Sedang	0.49	Sedang
9	Pesawaran	0.43	Sedang	0.45	Sedang
10	Pringsewu	0.27	Rendah	0.42	Sedang
11	Mesuji	0.36	Sedang	0.37	Sedang
12	Tulang Bawang Barat	0.32	Rendah	0.41	Sedang
13	Pesisir Barat	0.30	Rendah	0.36	Sedang
14	Kota Bandar Lampung	0.78	Tinggi	0.70	Tinggi
15	Kota Metro	0.54	Sedang	0.52	Sedang
Provinsi Lampung		0.43	Sedang	0.42	Sedang

Sumber: BNPB, 2025

2.1.1.7 Demografi

Penduduk Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 9,01 juta jiwa atau tepatnya 9.007.848 jiwa. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, jumlah penduduk Provinsi Lampung berada di posisi ke-8 (delapan) terbanyak di Indonesia atau ke-2 (dua) terbanyak di Pulau Sumatera setelah provinsi Sumatera Utara. *Share* penduduk Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 3,33 persen sedangkan di Sumatera mencapai 15,38 persen.

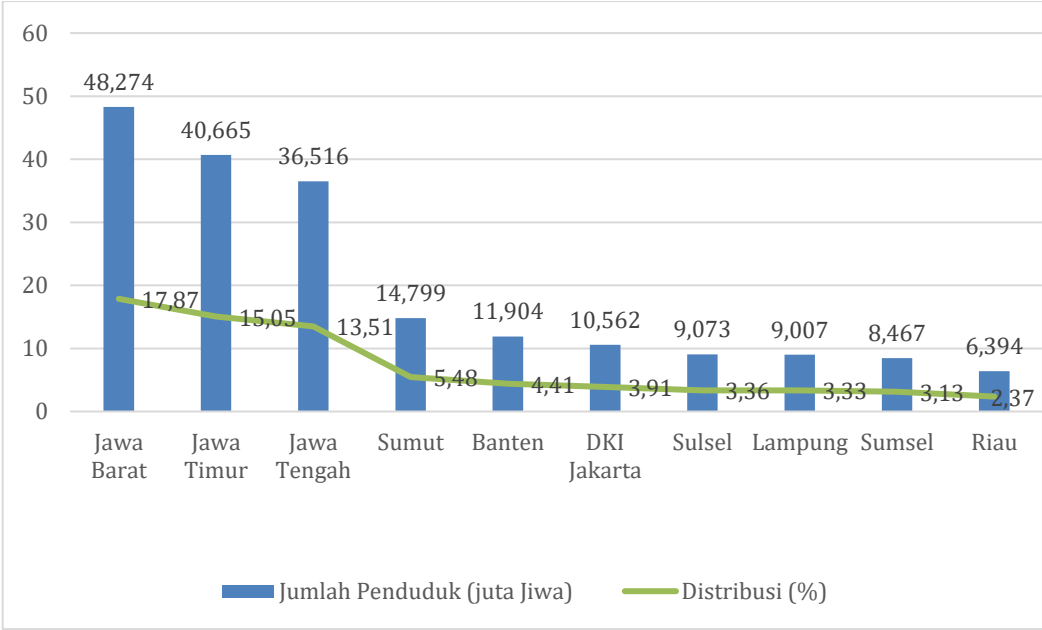
Gambar 2. 46 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Lampung Tahun 1971-2020



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan publikasi BPS Lampung, sepanjang sensus penduduk yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali di Provinsi Lampung, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Lampung terjadi antara tahun 1971-1980, yang mencapai 5,77 persen. Laju Pertumbuhan penduduk pada periode tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 2,31 persen. Sementara pada periode selanjutnya 1980–2020, laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di antara tahun 1990–2000 yang mencapai 1,17 persen (angka nasional mencapai 1,44 persen). Pada periode terakhir, tahun 2010–2020, laju pertumbuhan mencapai 1,65 persen sedangkan angka nasional sebesar 1,25 persen.

Gambar 2. 47 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Distribusinya di Indonesia Tahun 2020

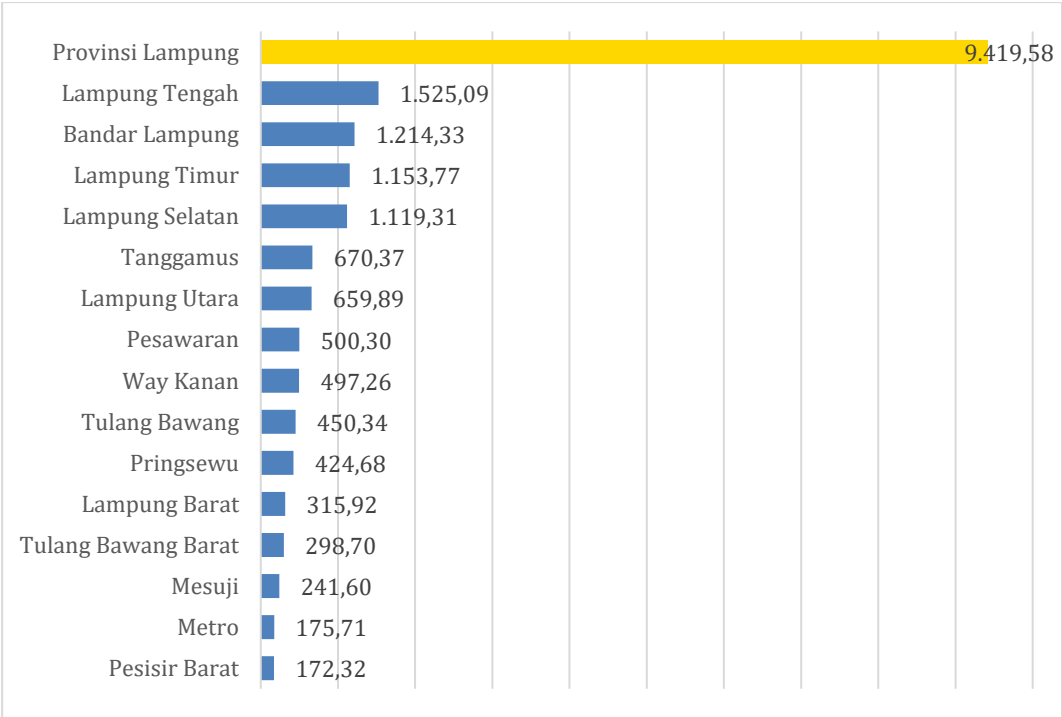


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dinamika penduduk di 3 (tiga) provinsi terbanyak di Indonesia sepanjang 2010–2020 mengalami tren penurunan kontribusi. Hal ini berbeda dengan kontribusi penduduk di Provinsi Lampung. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 18,12 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 17,87 persen. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai 15,77 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 15,05 persen. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 13,63 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 13,51 persen. Sementara itu, distribusi penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010 mencapai 3,20 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,33 persen. Terjadinya pergeseran persentase penduduk di provinsi-provinsi besar (seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) dan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia mengalami dinamika.

Pada Tahun 2024, Kabupaten Lampung Tengah memiliki sumbangan terbesar terhadap total jumlah penduduk Provinsi Lampung yaitu sebesar 1,525.09 ribu Jiwa yang diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 1,214.33 ribu Jiwa , Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,153.77 ribu Jiwa, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 1,119.31 ribu Jiwa.

Gambar 2. 48 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024

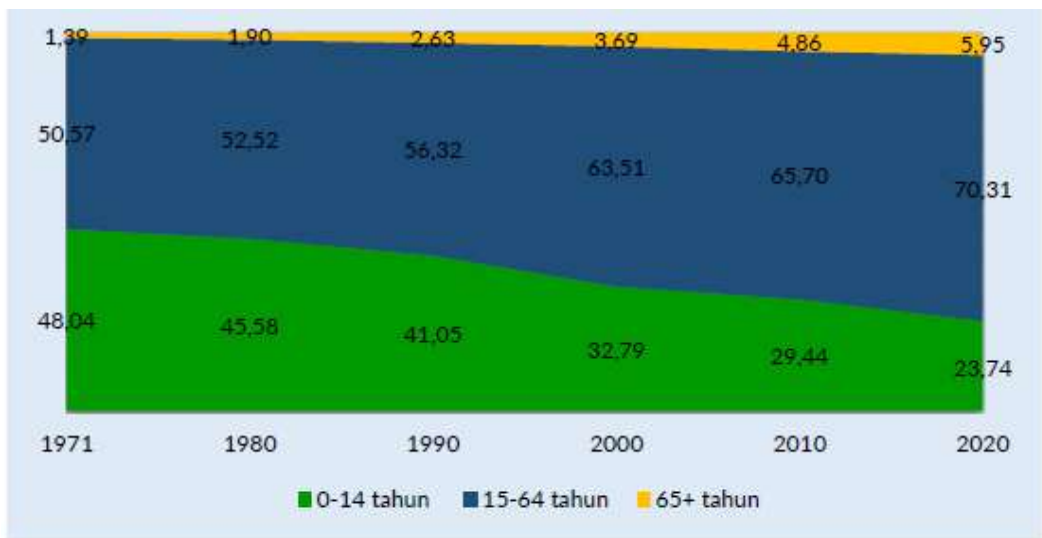


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

1. Perubahan Struktur Penduduk Lampung

Seiring dengan peristiwa menurunnya tingkat kelahiran sejak tahun 70-an, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) di Provinsi Lampung terus menurun. Pada tahun 1971, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) mencapai 48,04 persen. Periode selanjutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 1980 persentasenya mencapai 45,58 persen, tahun 1990 mencapai 41,05 persen, tahun 2000 mencapai 32,79 persen, tahun 2010 mencapai 29,44 persen, dan tahun 2020 mencapai 23,74 persen. Sementara itu, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 50,57 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,31 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Lampung masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,31 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

Gambar 2. 49 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1971-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

2. Keberadaan Masyarakat Adat

Secara historis, masyarakat asli Lampung yang terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung Pesisir (Ulun Peminggir) yaitu mereka suku Lampung asli yang mendiami wilayah Lampung bagian pesisir dan Lampung Pepadun (Ulun Pepadun) adalah suku asli Lampung yang mendiami wilayah dataran rendah dan tinggi yaitu di daerah Abung, Tulangbawang, Waykanan/Sungkai, Pubian dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung sendiri sebagai entitas yang berbudaya mempunyai kearifan lokal. Sifat dan watak orang Lampung mencakup: (1) *Piil pesenggiri*, rasa malu untuk melakukan sikap yang terhina menurut agama dan lingkungan sosial-budaya, (2) *Bejuluk-beadok* yakni kepribadian yang sesuai dengan gelar adat yang disandangnya, (3) *Nemui Nyimah* adalah sikap saling beramah tamah dengan tamu, (4) *Nengah Nyappur* ialah perilaku aktif dalam bermasyarakat serta tidak individualis, dan terakhir (5) *Sakai Sambayan* yaitu gotong royong dan saling membantu. Acuan keseluruhan sifat ideal tersebut merupakan sikap dan watak yang diharapkan dimiliki orang Lampung. Keseluruhan prinsip ini membangun konsepsi *piil ulun* Lampung, memiliki keterikatan yang kuat antara masing-masing prinsip dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

Keseluruhan sikap individu tersebutlah yang akhirnya membentuk karakter masyarakat Lampung yang menjunjung nilai-



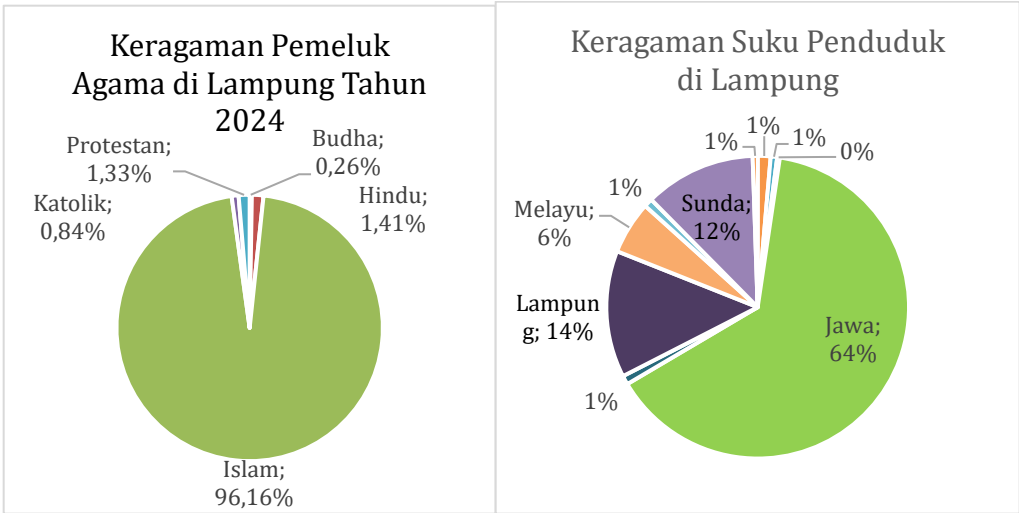
nilai luhur, menjaga sikap yang baik, saling menghormati antar sesama. Karakter masyarakat Lampung tersebut menjadi landasan bagi sikap individu maupun masyarakat Lampung sehingga menjadi slogan provinsi yang bermakna dalam kesatuan daerah Lampung, yang memiliki dua golongan yaitu adat pepadun dan saibatin sekaligus orang asli dan orang pendatang di Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki toleransi yang cukup baik terhadap keragaman budaya dan pengaruh dari luar termasuk pendatang dari daerah lain. Piil Pesenggiri adalah salah satu cara masyarakat Lampung dalam menerima keberadaan masyarakat pendatang agar bersama-sama dapat saling menjaga keharmonisan dan saling bekerjasama.

Dari perspektif perdamaian, nilai-nilai yang terkandung dalam *piil pesenggiri* secara jelas membimbing masyarakat untuk saling menghargai, tolong-menolong, bermasyarakat, berjiwa besar dan bergaul dengan baik. Tindakan ideal bagi masyarakat Lampung adalah mengacu kepada nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal tersebut. Dalam konteks masyarakat yang masih berpegang pada adat, institusi lokal berperan sebagai rujukan dalam tata kelola birokrasi dan pola interaksi masyarakat. Semua didasarkan kepada kearifan lokal dan dilembagakan demi kepentingan bersama. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, terdapat sebuah institusi lokal yang mempunyai peran penting, yaitu kekerabatan (Djausal, 2018). Ikatan kekerabatan yang kuat terdorong oleh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piil pesenggiri. *Bejuluk-beadok* menciptakan kedekatan emosional antara yang memberi *juluk* dan *adok* kepada pemberinya. *Nemuy nyimah* dan *nengah nyappur* menjaga kedekatan tersebut dan peluang untuk membangun relasi baru. Dan *sakai sambayan* mengikat kuat kekerabatan tersebut menjadi sebuah komunitas yang saling menghargai, membutuhkan dan tolong menolong. Memperkuat ikatan kekerabatan yang terus diperluas dalam interaksi sosial, merupakan *wujud keterbukaan masyarakat Lampung* selama berabad-abad.

Dalam perkembangannya, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat majemuk. Beragam suku, ras, etnik, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat hidup berdampingan di dalamnya. Kehidupan sosial kemasyarakatan yang

plural tersebut menjadikan Lampung berjuluk sebagai “Miniatur Indonesia”. Bersatunya keberagaman masyarakat di Provinsi Lampung selaras dengan semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai* yang juga menggambarkan bahwa penduduk Lampung terdiri dari *Jurai*/golongan penduduk asli dan pendatang sebagai wujud keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang tentunya sangat sejalan dengan amanah dasar negara Pancasila dan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang tercermin dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dengan beragam suku, budaya, ras dan agama maupun status sosial. Modal sosial tersebut akan saling melengkapi dan menjadi kekuatan besar untuk mencapai cita-cita pembangunan yang diharapkan, dan menjadi landasan dari proses pembangunan yang telah dan akan dijalankan.

Gambar 2. 50 Keragaman Pemeluk Agama Tahun 2024 dan Keragaman Suku Penduduk Tahun 2010 di Lampung

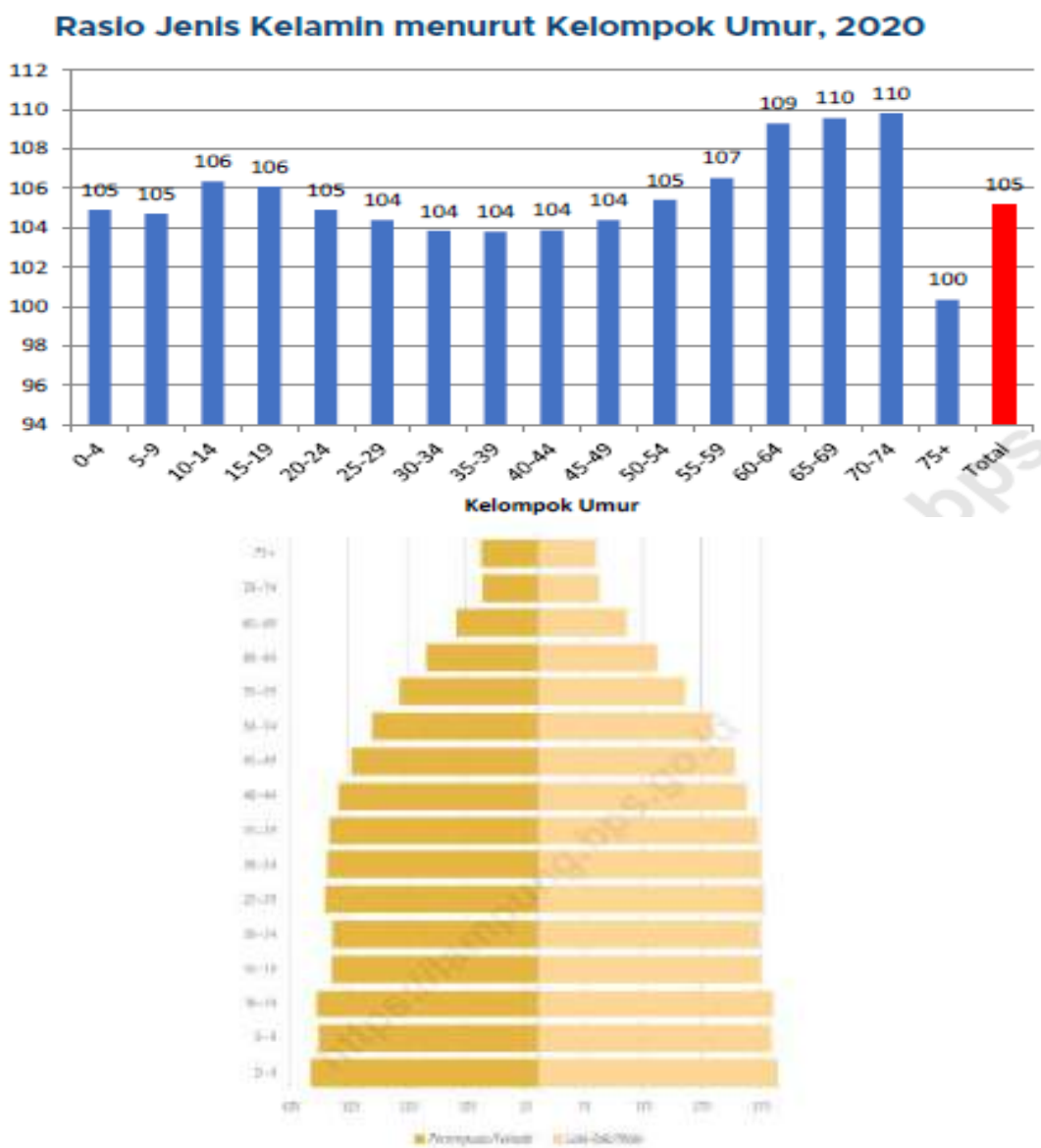


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

3. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin laki-laki masih lebih banyak dari pada perempuan, hasil Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Lampung sebanyak 4,62 juta orang, atau 51,25 persen dari penduduk Provinsi Lampung. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Lampung sebanyak 4,39 juta orang, atau 48,75 persen dari penduduk Provinsi Lampung. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Lampung sebesar 105, yang artinya terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Lampung pada tahun 2020.

Gambar 2. 51 Rasio Jenis Kelamin dan Piramida Penduduk Lampung Tahun 2020

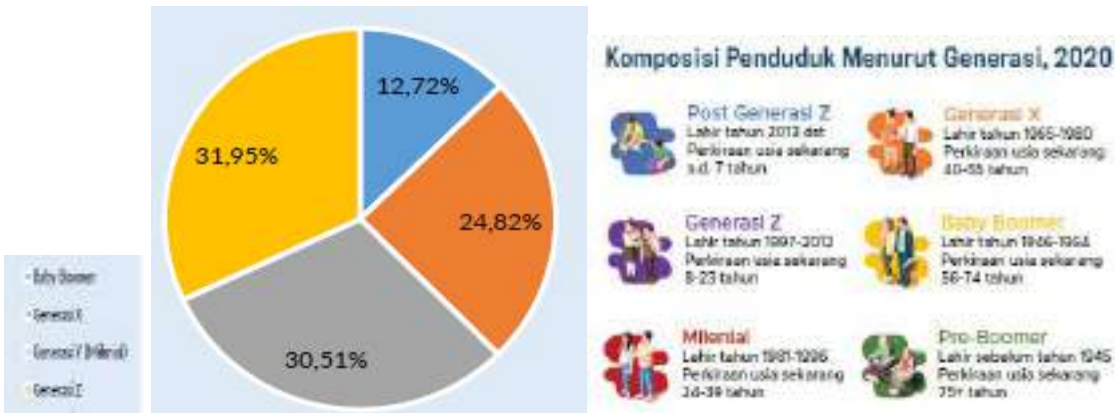


Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

4. Penduduk menurut Generasi.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Provinsi Lampung didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,80 persen dari total populasi (2,48 Juta orang) dan generasi milenial sebanyak 26,54 persen dari total populasi Provinsi Lampung. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. 52 Persentase Penduduk Lampung Menurut Generasi, Tahun 2020



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Beberapa tahun ke depan, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Kelompok Penduduk usia produktif terdiri dari kelompok generasi Z, Y, X (milenial) dan *baby boomer*. Generasi Z memiliki persentase paling besar dibandingkan generasi lainnya. Persentase generasi Z mencapai 31,95 persen dari total penduduk usia produktif. Selanjutnya generasi Y yang mencapai 30,51 persen, generasi X mencapai 24,82 persen, dan generasi *baby boomer* mencapai 12,72 persen.

5. **Kepadatan Penduduk**

Tabel 2. 32 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020, 2023, dan 2024 (km²)

Kabupaten/Kota	2020	2023	2024
Lampung Barat	142.6	147.65	149.3
Tanggamus	220.76	228.31	231
Lampung Selatan	479.53	498.01	504.46
Lampung Timur	287.3	295.44	298.33
Lampung Tengah	321.31	331.58	335.26
Lampung Utara	250.28	246.14	248.42
Way Kanan	129.48	139.08	140.82
Tulang Bawang	139.14	143.26	144.92
Pesawaran	373.54	386.28	390.98

Pringsewu	659.85	682.29	690.57
Mesuji	103.17	108.13	109.79
Tulang Bawang Barat	222.57	230.58	233.1
Pesisir Barat	54.45	56.7	57.56
Bandar Lamppung	6361.17	6543	6609.7
Metro	2305.89	2375	2400.1
Lampung	268.46	277.4	280.6

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 280,6 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 6.609,68 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 57,56 jiwa/km².

6. Proyeksi Jumlah Penduduk

Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung 2020-2030 berdasarkan buku proyeksi penduduk indonesia 2020-2045 yang di publikasikan BPS Provinsi Lampung menjelaskan bahwa jumlah penduduk lampung di tahun 2029 diproyeksikan sebanyak 9,910 juta jiwa dan menyentuh angka 10 juta jiwa pada tahun 2030.

Tabel 2. 33 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2025-2029

Parameter	2020	2025	2026	2027	2028	2029
Laki-laki	4,605.04	4,857.47	4,904.02	4,949.10	4,992.67	5,034.75
Perempuan	4,379.84	4,665.44	4,719.77	4,772.93	4,824.88	4,875.61
Total	8,984.88	9,522.91	9,623.79	9,722.03	9,817.55	9,910.36
Sex Ratio (%)	105.14	104.12	103.9	103.69	103.48	103.26
Age Group	2020	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	773.96	796.36	793.07	789.5	785.68	781.73
5–9	777.07	772.83	776.69	781.14	786.16	791.23
10–14	732.88	777.38	781.56	782.29	780.25	776.64
15–19	730.43	731.59	738.84	748.48	759.03	768.72
20–24	749.66	727.57	724.6	722.69	722.38	724.3
25–29	742.85	746.73	743.66	739.13	733.86	728.83
30–34	736.07	739.6	740.79	742.54	744.17	744.72
35–39	701	731.72	734.17	735.09	735.06	734.95
40–44	662.37	695.68	702.33	709.36	716.22	722.07
45–49	592.02	654.11	662.66	669.62	675.57	681.29
50–54	506.18	579.38	593.11	606.45	619.06	630.53
55–59	417.45	488.32	502.81	517.34	531.78	545.96
60–64	321.67	393.54	407.39	420.92	434.28	447.72

65–69	234.97	291.97	304.82	318.21	331.87	345.44
70–74	147.62	199.57	209.61	219.33	229.01	239.07
75+	158.7	196.56	207.66	219.94	233.19	247.15
Total	8,984.88	9,522.91	9,623.79	9,722.03	9,817.55	9,910.36

Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk.

Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya. Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mongolia, Thailand, Vietnam diperkirakan mengalami ageing population mulai tahun 2040. Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan Indonesia mengalami fase penuaan penduduk.

Gambar 2. 53 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2030



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tabel 2. 34 Proyeksi Jumlah Penduduk kabupaten/kota se Provinsi Lampung 2025 – 2030

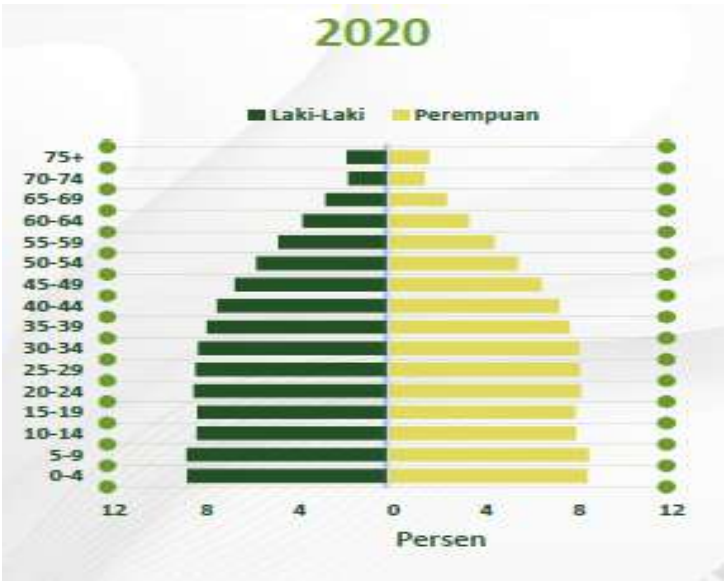
No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Lampung Barat	319,30	322,59	325,77	328,86	331,85	334,74
2	Tanggamus	678,02	685,54	692,88	700,03	707,01	713,82
3	Lampung selatan	1.133,39	1.147,20	1.160,72	1.173,95	1.186,89	1.199,54
4	Lampung Timur	1.164,70	1.175,37	1.185,74	1.195,82	1.205,62	1.215,12
5	Lampung Tengah	1.541,43	1.557,29	1.572,66	1.587,53	1.601,85	1.615,63
6	Lampung Utara	665,76	671,49	677,04	682,43	687,05	692,71
7	Way Kanan	503,31	509,25	515,06	520,75	526,31	531,76
8	Tulang Bawang	455,40	460,34	467,17	469,88	474,46	478,94
9	Pesawaran	506,26	512,16	518,00	523,75	529,44	535,04
10	Pringsewu	429,74	434,74	439,68	444,51	449,27	453,93
11	Mesuji	245,21	248,75	252,21	255,60	258,91	262,15
12	Tulang Bawang Barat	301,79	304,76	307,62	310,39	313,03	315,60
13	Pesisir Barat	174,86	117,39	179,91	182,40	184,89	187,36
14	Bandar Lampung	1.226,21	1.237,63	1.248,53	1.258,92	1.268,79	1.278,14
15	Metro	177,52	179,31	181,05	182,75	184,39	185,98
Provinsi Lampung		9.522,91	9.623,79	9.722,03	9.817,55	9.910,36	10.000,47

Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

7. Penduduk Usia Produktif

Berdasarkan komposisi penduduknya, penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020 berbentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah. Dalam kondisi ini, penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan sehingga menurunkan rasio ketergantungan umur. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, rasio ketergantungan umur penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif adalah sebesar 45,87, yang berarti dari setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 52,20. Kondisi peningkatan penduduk usia kerja dan penurunan rasio ketergantungan penduduk disebut sebagai bonus demografi atau *windows of opportunity*.

Gambar 2. 54 Komposisi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dalam konteks kependudukan, setiap pertumbuhan penduduk harus disertai dengan peningkatan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas salah satunya dipicu oleh kualitas SDM. Keseimbangan antara laju pertumbuhan kuantitas dan pertumbuhan kualitas penduduk adalah modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang optimal. Banyak faktor yang memengaruhi kualitas pembangunan di suatu wilayah. Tabel di bawah ini mendeskripsikan bahwa jumlah penduduk yang banyak tidak selalu selaras dengan kualitas yang tinggi penduduknya.

Tabel 2. 35 Jumlah Penduduk di Sepuluh Provinsi Terbanyak di Indonesia, 2020

Provinsi	Jumlah (Juta) ¹	Kepadatan (Orang/km ²)	Sex Ratio (Laki-laki Per 100 Perempuan) ¹	Rasio Ketergantungan ¹	Tingkat Pengangguran (%) ²	PDGB Per Kapita (Juta/Tahun) ²	Peningkat IPM ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jawa Barat	48.27	1.365	108.13	42.94	10.46	41.81	10
Jawa Timur	40.67	851	99.60	42.33	5.84	57.65	16
Jawa Tengah	36.52	1.113	101.15	43.16	6.48	38.60	14
Sumatera Utara	14.80	208	100.61	48.32	6.91	55.18	15
Banten	11.90	1.232	104.04	42.89	10.64	47.60	8
DKI Jakarta	10.56	15.907	102.06	39.73	10.95	260.44	1
Sulawesi Selatan	9.07	194	98.39	45.84	6.31	56.53	13
Lampung	9.01	260	103.14	45.87	4.67	41.62	25
Sumatera Selatan	8.47	92	104.16	47.09	5.51	53.51	24
Riau	6.39	73	105.11	46.24	6.32	102.29	7

Sumber Tabel : ¹Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), ²BPS, Diolah

8. Analisis Proyeksi Kependudukan Lima Tahun Kedepan

Provinsi Lampung, yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup dinamis di Indonesia. Sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang terus berkembang, proyeksi penduduk Lampung hingga tahun 2030 menjadi perhatian penting dalam merencanakan kebijakan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Berdasarkan Publikasi BPS dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Lampung di tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 9,52 juta jiwa dan menyentuh angka 10 juta jiwa pada tahun 2030. Seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2020-2030

Parameter	2020	2025	2030
PENDUDUK			
Laki-laki (000)	4605,0 4	4857,4 7	5075,3 3
Perempuan (000)	4379,8 4	4665,4 4	4925,1 4
Total (000)	8984,8 8	9522,9 1	10000, 47
Komposisi Umur (%)			
0-14	25,42	24,64	23,46
15-64	68,56	68,13	67,84
65+	6,02	7,23	8,7
Dependency Ratio (%)	45,87	46,77	47,41
FERTILITAS			
Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,23	2,17
Crude Birth Rate (CBR)	18,2	16,81	15,59
Jumlah Kelahiran (000)	163,48	160,13	155,94
MORTALITAS			
Eo Laki-laki	71,42	71,77	72,03
Eo Perempuan	75,61	76,65	77,35
Eo Laki-laki + Perempuan	73,46	74,15	74,62
IMR Laki-laki	19,18	15,94	13,73
IMR Perempuan	13,63	11,42	9,91
IMR Laki-laki + Perempuan	16,47	13,73	11,86

Crude Death Rate (CDR)	5,68	6,09	6,72
Jumlah Kematian (000)	51,01	57,95	67,22
MIGRASI			
Net Migration Rate	0,00	0.01	0,01

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2024

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Lampung diperkirakan mencapai sekitar 9 juta jiwa. Dengan keberagaman ekonomi yang mencakup sektor pertanian, industri, dan jasa, serta infrastruktur yang terus berkembang, provinsi ini mengalami perubahan demografis yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang relatif tinggi serta arus migrasi dari provinsi lain yang mencari peluang ekonomi lebih baik.

Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk.

Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya.

Gambar 2. 55 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2030



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Menurut proyeksi demografis, jumlah penduduk Lampung diperkirakan akan mencapai sekitar 10 juta jiwa pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan laju pertumbuhan tahunan yang stabil meskipun terdapat variasi di berbagai daerah di provinsi ini. Adapun proyeksi jumlah penduduk kabupaten/kota se-Provinsi Lampung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Proyeksi Jumlah Penduduk kabupaten/kota se Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2030

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (per 1000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Lampung Barat	319.30	322.59	325.77	328.86	331.85	334.74
2	Tanggamus	678.02	685.54	692.88	700.03	707.01	713.82
3	Lampung Selatan	1.133.39	1.147.20	1.160.72	1.173.95	1.186.89	1.199.54
4	Lampung Timur	1.164.70	1.175.37	1.185.74	1.195.82	1.205.62	1.215.12
5	Lampung Tengah	1.541.43	1.557.29	1.572.66	1.587.53	1.601.85	1.615.63
6	Lampung Utara	665.76	671.49	677.04	682.43	687.65	692.71
7	Way Kanan	503.31	509.25	515.06	520.75	526.31	531.76
8	Tulang Bawang	445.40	460.34	465.17	469.88	474.46	478.94
9	Pesawaran	506.26	512.16	518.00	523.75	529.44	535.04
10	Pringsewu	429.74	434.74	439.68	444.51	449.27	453.93
11	Mesuji	245.21	248.75	252.21	255.60	258.91	262.15
12	Tulang Bawang Barat	301.79	304.76	307.62	310.39	313.03	315.60
13	Pesisir Barat	174.86	177.39	179.91	182.40	184.89	187.36
14	Bandar Lampung	1.226.21	1.237.63	1.248.53	1.285.92	1.268.79	1.278.14
15	Metro	177.52	179.31	181.05	182.74	184.39	185.98
Provinsi Lampung		9.522.91	9.623.79	9.722.03	9.817.55	9.910.36	10.000.47

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

9. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lima Tahun Kedepan

a. Energi

Rencana sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pentingnya energi listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tiap penduduk membuat pentingnya untuk memproyeksikan kebutuhan listrik tiap individu agar dapat tercukupi dalam masa mendatang. Pemerataan pelayanan terhadap kebutuhan listrik tersebut perlu diusahakan semaksimal mungkin mengingat salah satu indikator berkembangnya suatu kota atau wilayah adalah terpenuhinya kebutuhan akan penerangan/listrik. Jenis pembangkit yang disediakan untuk tiap kawasan tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemungkinan pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang terjangkau. Hal tersebut dapat dilakukan, mengingat telah terdapat berbagai penelitian mengenai berbagai macam sumber energi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi penyediaan listrik. Adapun rencana sistem jaringan energi di Provinsi Lampung meliputi:

1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau dibawah permukaan tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung. Pengembangan jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik meliputi:

- Koridor Labuhan Maringgai - Tanjung Pakis di Lampung Timur;
- Koridor Lampung Barat - Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;
- Koridor Zona Ekonomi Eksklusif - Laut Jawa di Perairan;
- Legundi - Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran;
- Pahawang di Kabupaten Pesawaran; dan
- Pekon Doh Sawang Balak di Perairan.

Gambar 2. 56 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

b) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi:
 - PLTA Besai Unit 1 di Kabupaten Lampung Barat;
 - PLTA Besai Unit 2 di Kabupaten Lampung Barat;
 - PLTA Batu Tegi Unit 1 di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTA Batu Tegi Unit 2 di Kabupaten Tanggamus; dan
 - PLTA Semangka di Kabupaten Tanggamus.
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 - PLTU Tarahan Unit 3 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - PLTU Tarahan Unit 4 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - PLTU Sebalang Unit 1 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - PLTU Sebalang Unit 2 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - PLTU Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah;
 - PLTU Gunung Agung di Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - PLTU Pelabuhan Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan.
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:
 - PLTP Ulu Belu unit 1 di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTP Ulu Belu unit 2 di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTP Ulu Belu unit 3 di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTP Ulu Belu unit 4 di Kabupaten Tanggamus;
 - Rencana PLTP Gunung Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;

- Rencana PLTP Suoh Sekincau di Kabupaten Lampung Barat; dan
- Rencana PLTP Way Ratai di Kabupaten Pesawaran.
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:
 - PLTD Pulau Legundi unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 di Kabupaten Pesawaran;
 - Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran;
 - PLTD Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTD Pulau Pisang unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05 di Kabupaten Pesisir Barat;
 - PLTD Pulau Sebesi unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - PLTD Pulau Tabuan unit 01, unit 03, unit 04, unit 05, unit 06, unit 07 di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTD Tarahan unit 5 dan unit 6 di Kabupaten Lampung Selatan;
 - PLTD Tegineneng unit 1, unit 2 dan unit 3 di Kabupaten Pesawaran;
 - PLTD Teluk Betung unit 7, unit 8 dan unit 10 di Kota Bandar Lampung; dan
 - PLTD Natar di Kota Bandar Lampung.
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang ditetapkan meliputi:
 - PLTG MPP Tarahan di Lampung Selatan;
 - PLTG Tarahan Unit 1 di Lampung Selatan; dan
 - PLTG Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan.
- Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang ditetapkan meliputi:
 - PLTMG Lampung Peaker (LNG) di Kabupaten Lampung Selatan;
 - PLTMG New Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan;
 - PLTMG Sribawono di Kabupaten Lampung Timur;
 - PLTMG Sutami di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - PLTMG SW Sutami di Kabupaten Lampung Selatan.
 - Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang ditetapkan di PLTBg Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah.
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) meliputi:

- PLTM Batu Brak unit 1, unit 2 di Kabupaten Lampung Barat;
- PLTM Sumber Jaya di Kabupaten Lampung Barat;
- PLTM Sukarame di Kabupaten Lampung Barat;
- PLTM Melesom unit 2 di Kabupaten Pesisir Barat;
- PLTM Besai Kemu di Kabupaten Way Kanan;
- PLTM Kukusan di Kabupaten Tanggamus; dan
- Rencana PLTM Pahiton di Kabupaten Lampung Barat.
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang direncanakan meliputi:
 - PLTS Way Tias di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTS Way Haru di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTS Margomulyo di Kabupaten Tanggamus;
 - PLTS Suka Maju di Kabupaten Mesuji;
 - Rencana PLTS Pulau Legundi di Kabupaten Pesawaran; dan
 - Rencana PLTS Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus.
- Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) meliputi:
 - PLTBm Lambu Kibang di Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
 - PLTBm Tulang Bawang Tengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:

- a. Jaringan transmisi tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
- b. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 1. PHI Incomer 150 KV Lampung 1 Metro dan Tegineneng di Kabupaten Pesawaran.
 2. PHI Incomer 150 KV Langkapura di Kota Bandar Lampung.
 3. SUTT – SKTT 150 KV Tarahan – Garuntang di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
 4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV meliputi:
 - SUTT 150 KV Baturaja - Bukit Kemuning di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara;

- 
- SUTT 150 KV Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat;
 - SUTT 150 KV Bukit Kemuning – Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
 - SUTT 150 KV Kota Agung – Pagelaran di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
 - SUTT 150 KV Kotabumi – Tegineneng di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah;
 - SUTT 150 KV Menggala – Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang;
 - SUTT 150 KV Natar – Sutami di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - SUTT 150 KV Natar - Teluk Betung (Bandar Lampung) di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
 - SUTT 150 KV Pagelaran – Tegineneng di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
 - SUTT 150 KV Seputih Banyak – Sribawono di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
 - SUTT 150 KV Sribawono – Tarahan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - SUTT 150 KV Sutami – Tarahan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - SUTT 150 KV Tarahan – Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - SUTT 150 KV Tarahan - Sebalang – Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
 - SUTT 150 KV Tegineneng – Metro di Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro;
 - SUTT 150 KV Tegineneng - Metro – Sribawono di Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
 - SUTT 150 KV Tegineneng – Natar di Kabupaten Pesawaran dann

- SUTT 150 KV Ulubelu – Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
 - SUTT 150 KV Menggala – Gumawang di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan.
 - SUTT 150 KV Dente Teladas – Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
 - SUTT 150 KV Gedong Tataan - Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
 - SUTT 150 KV Gumawang – Mesuji di Kabupaten Mesuji;
 - SUTT 150 KV Kalianda – Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - SUTT 150 KV Mesuji – Dipasena di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang;
 - SUTT 150 KV Pagelaran – Gedong Tataan di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran;
 - SUTT 150 KV Seputih Banyak – Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah;
 - SUTT 150 KV Seputih Banyak - Menggala di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah;
 - SUTT 150 KV Sukarame – Jatiagung di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung;
 - SUTT INC PHI 150 KV Pakuan Ratu Way Kanan di Kabupaten Way Kanan; dan
 - Rencana SUTT 150 KV Liwa – Bengkunat Krui di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.
5. Rencana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV Gumawang – Lampung, 1 di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 6. Rencana Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV Teluk Betung – Garuntang di Kota Bandar Lampung.
- c. Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk, bertahap di seluruh kabupaten dan kota di



wilayah provinsi, berupa peningkatan jaringan Gardu Induk (GI) eksisting dan rencana GI, meliputi:

- Gardu induk Adijaya di Kabupaten Lampung Tengah;
- Gardu induk Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus;
- Gardu induk Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
- Gardu induk Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
- Gardu induk Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
- Gardu induk Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
- Gardu induk Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
- Gardu induk Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
- Gardu induk Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
- Gardu induk Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
- Gardu induk Langkapura di Kota Bandar Lampung;
- Gardu induk Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
- Gardu induk Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
- Gardu induk Mesuji di Kabupaten Mesuji;
- Gardu induk Metro di Kota Metro;
- Gardu induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
- Gardu induk New Tarahan di Kota Bandar Lampung;
- Gardu induk Pagelaran di Kabupaten Pringsewu;
- Gardu induk Pakuan Ratu di Kabupaten Way Kanan;
- Gardu induk Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
- Gardu induk Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
- Gardu induk Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
- Gardu induk Sribawono di Kabupaten Lampung Timur;
- Gardu induk Sukarame di Kota Bandar Lampung;
- Gardu induk Sutami di Kabupaten Lampung Selatan;
- Gardu induk Tarahan di Kota Bandar Lampung;
- Gardu induk Tegineneng di Kabupaten Pesawaran;
- Gardu induk Teluk Betung di Kota Bandar Lampung;
- Gardu induk Ulu Belu di Kabupaten Tanggamus;
- Gardu induk Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran;
- Gardu induk Teluk Pandan di Kabupaten Pesawaran;
- Rencana gardu induk Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;

- Rencana gardu induk Bandar Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah;
- Rencana gardu induk GIS Garuntang di Kota Bandar Lampung;
- Rencana gardu induk Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
- Rencana gardu induk Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
- Rencana gardu induk Bandar Negeri Semuong di Kabupaten Tanggamus;
- Rencana gardu induk Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
- Rencana gardu induk Sukadana di Kabupaten Lampung Timur.

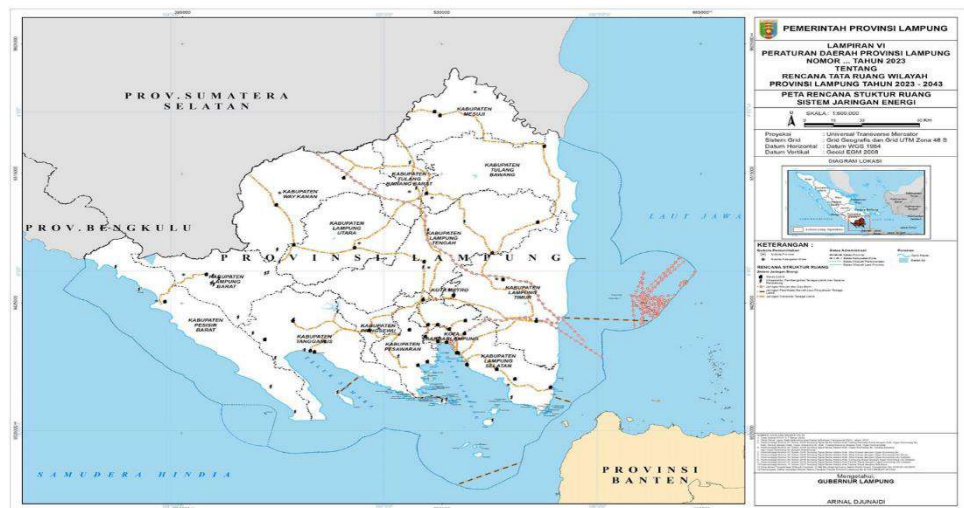
Berikut adalah kondisi kebutuhan daya listrik di Provinsi Lampung Tahun 2023-2029, dengan ketentuan bahwa satu jiwa penduduk dengan kebutuhan pemenuhan daya listriknya adalah 450 VA.

Tabel 2. 38 Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

No	Kabupaten/Kota	Total Kebutuhan Daya Listrik (kVA)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Lampung Barat	143,685	145,166	146,597	147,987	149,333	150.633
2.	Tanggamus	305,109	308,493	311,796	315,014	318,155	321.219
3.	Lampung Selatan	510,026	516,240	522,324	528,278	534,101	539.793
4.	Lampung Timur	524,115	528,917	533,583	538,119	542,529	546.804
5.	Lampung Tengah	693,644	700,781	707,697	714,389	720,833	727.034
6.	Lampung Utara	299,592	302,171	304,668	307,094	309,443	311.720
7.	Way Kanan	226,490	229,163	231,777	234,338	236,840	239.292
8.	Tulang Bawang	204,930	207,153	209,327	211,446	213,507	215.523
9.	Pesawaran	227,817	230,472	233,100	235,688	238,248	240.768
10.	Pringsewu	193,383	195,633	197,856	200,030	202,172	204.269
11.	Mesuji	110,345	111,938	113,495	115,020	116,510	117.968
12.	Tulang Bawang Barat	135,806	137,142	138,429	139,676	140,864	142.020
13.	Pesisir Barat	78,687	79,826	80,960	82,080	83,201	84.312
14.	Bandar Lampung	551,795	556,934	561,839	566,514	570,956	575.163
15.	Metro	79,884	80,690	81,473	82,233	82,976	83.691
PROVINSI LAMPUNG		4.285,310	4.330,706	4.374,914	4.417,898	4.459,662	4,500.212

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2024

Gambar 2. 57 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

b. Fasilitas Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia akan ditopang oleh kualitas pendidikannya. Pendidikan akan terkait dengan dengan fasilitas pendidikan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Untuk itu, penting merumuskan kebutuhan fasilitas pendidikan dengan mempertimbangkan struktur demografi anak usia sekolah. Secara umum, usia sekolah terbagi menjadi 5 kelompok usia, yaitu PAUD (<7 tahun), sekolah dasar/ sederajat (7-12 tahun), sekolah menengah pertama/ sederajat (13-15 tahun), sekolah menengah atas/ sederajat (16-18 tahun) dan pendidikan tinggi (>18 tahun).

Dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Provinsi Lampung pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 39 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Lampung

Jenjang Pendidikan	Usia Penduduk	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Sekolah yang Ada	Jumlah Kebutuhan Sekolah 2029
Pendidikan Usia Dini (PAUD) termasuk TK	5-6	309,316	3730	583
SD/MI	7-12	933,688	5515	37
SMP/MA	13-15	442,807	2146	37
SMA/SMK/MAN	16-18	434,529	1344	37

Sumber: data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2025

c. Fasilitas Kesehatan

Pelayanan kesehatan mutlak memerlukan dukungan ketersediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang keberadaannya sangat penting, karena terlibat langsung dengan masyarakat. Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat di Indonesia, sesuai dengan definisinya, yakni unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, puskesmas merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sarana pelayanan kesehatan dasar tersebut didukung oleh sarana puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta jaringannya baik bidan di desa, posyandu dan poskesdes.

Selanjutnya, indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diikuti dengan jumlah RS dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Sesuai dengan standar pemenuhan bahwa rasio Kebutuhan Puskesmas adalah 1 Puskesmas untuk 20.000 Penduduk atau alternative minimal 1 kecamatan 1 Puskesmas dan untuk pemenuhan Rumah sakit dengan standar 1 tempat tidur untuk dimanfaatkan oleh 1000 Penduduk, yang diperkirakan penambahan 5 Rumah sakit untuk setiap 5 tahunnya.

Tabel 2. 40 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung

Uraian	Kondisi Tahun 2023	2025	2029
Jumlah Penduduk (Jiwa)	9,313,980	9,522,910	10,000,470
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan			
1. Rumah Sakit (Unit)	82	87	92
Tempat Tidur (TT) RS	9249	9,523	10,000
2. Puskesmas	320	476	500

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2024

d. Persampahan

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Meningkatnya aktivitas penduduk kota dari waktu ke waktu akan berdampak pada meningkatnya timbunan sampah yang dihasilkan. Beberapa isu permasalahan pada sektor persampahan yang sedang berkembang di Provinsi Lampung adalah:

- Belum optimalnya pengurangan dan penanganan sampah domestik maupun regional di Provinsi Lampung;
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (dari sumber, TPS, dan TPA) serta dalam hal pengangkutan dari hulu ke hilir;
- Pengelolaan persampahan berorientasi 3R yang belum efektif dan terpadu serta Sarana atau prasarana 3R berbasis komunitas (permukiman) masih belum tersedia secara memadai dan terdistribusi merata; dan
- Perlunya teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan.

Sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah yang sudah tercampur antara sampah organik dan an organik. Sedangkan 75% sampah organik berasal dari pasar tradisional dan rumah tangga. Sebagai contoh, di Kota Bandar Lampung jenis sampah yang dominan adalah sampah organik 66%, plastic 14,5%, kertas 9%, logam, kaca, tekstil dan lain-lain 10.5%. Upaya dalam pemilahan belum terlaksana dengan baik, sehingga permasalahan sampah perlu mendapat perhatian yang lebih dengan cara pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan



yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jika tidak segera dilakukan penanganan yang baik, maka sampah akan menjadi masalah yang serius dikemudian hari, diproyeksikan untuk tahun 2029 timbulan sampah di Provinsi Lampung ada di kisaran angka 2 juta ton/tahun.

Konsep penanganan masalah persampahan di Provinsi Lampung dimulai dari paradigma “mengurangi produksi sampah” melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mulai dari rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar sampai ke sampah industri. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah atau pendauran ulang sampah. Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Teknologi yang diusulkan adalah kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang. “Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju *Zero Waste*” yang merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk dapat mencapai hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan beberapa usaha, diantaranya:

- Melakukan perubahan paradigma dari tujuan membuang menjadi memanfaatkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Perbaiki dalam sistem manajemen pengelolaan sampah secara keseluruhan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan lainnya.

Adapun rencana sistem jaringan persampahan wilayah di Provinsi Lampung berupa rencana tempat pemrosesan akhir regional Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran.

Dilakukan proyeksi timbulan persampahan Provinsi Lampung dengan menggunakan hitungan faktor timbulan sampah yang ditentukan dengan memperhitungkan proyeksi penambahan jumlah penduduk. Dimana pada tahun 2025 sebesar 4.719,02 ton/hari, sedangkan pada tahun 2029 sebesar 4.908,89 ton/hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 41 Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (ton/hari)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Lampung Barat	127,72	129,04	130,31	131,54	132,74
2	Tanggamus	379,69	383,90	388,01	392,02	395,93
3	Lampung Selatan	566,70	573,60	580,36	586,98	593,45
4	Lampung Timur	582,35	587,69	592,87	597,91	602,81
5	Lampung Tengah	709,06	716,35	723,42	730,26	736,85
6	Lampung Utara	266,30	268,60	270,82	272,97	275,06
7	Way Kanan	201,32	203,70	206,02	208,30	210,52
8	Tulang Bawang	227,70	230,17	232,59	234,94	237,23
9	Pesawaran	202,50	204,86	207,20	209,50	211,78
10	Pringsewu	171,90	173,90	175,87	177,80	179,71
11	Mesuji	98,08	99,50	100,88	102,24	103,56
12	Tulang Bawang Barat	150,90	152,38	153,81	155,20	156,52
13	Pesisir Barat	69,94	70,96	71,96	72,96	73,96
14	Bandar Lampung	858,35	866,34	873,97	881,24	888,15
15	Metro	106,51	107,59	108,63	109,64	110,63
Provinsi Lampung		4.719,02	4.768,57	4.816,73	4.863,51	4.908,89

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJPD, Data Diolah 2023/2024

Setelah dilakukan timbulan persampahan dihitung juga kebutuhan sarana pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota se- Provinsi yang dibagi menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) Pusat Daur Ulang (PDU) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 42 Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung

Kabupat en /Kota	Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	TP ST	TPS 3R	P D U	TP ST	TPS 3R	P D U	TP ST	TPS 3R	P D U	TP ST	TPS 3R	P D U	TP ST	TPS 3R	P D U
Lampun g Barat	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Tangga mus	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Lampun g Selatan	1	4	0	1	5	0	1	6	0	1	9	0	1	9	0
Lampun g Timur	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Lampun g Tengah	1	4	0	1	5	0	1	6	0	1	9	0	1	9	0
Lampun g Utara	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Way Kanan	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Tulang Bawang	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Pesawar an	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Pringsew u	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Mesuji	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Tulang Bawang Barat	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Pesisir Barat	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Bandar Lampun g	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0
Metro	1	4	1	1	5	1	1	6	1	1	9	1	1	9	1
Provinsi Lampun g	3	66	1	3	83	1	3	100	1	3	144	1	3	134	2

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2025

e. Air Bersih

Rencana penyediaan sistem air bersih yang layak bagi penduduk Provinsi Lampung harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua dan Pemandian Umum.

Kebutuhan air bersih penduduk dengan mempertimbangkan standar pemenuhan kebutuhan air bersih seperti *standard coverage* (90%), *household connection* (HC) untuk kebutuhan per jiwa penduduknya adalah 150 liter/orang/hari, *public connection* (PC) untuk kebutuhan per jiwa penduduknya adalah 30 liter/orang/hari.

Secara keseluruhan air bersih untuk domestik adalah penjumlahan kebutuhan air bersih dari *Household Connection* (HC) dan *Public Connection* (PC) dan non domestik (20% dari total kebutuhan air bersih domestik). Berikut adalah hasil perhitungan kebutuhan air bersih di tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2025-2029. Kebutuhan air bersih untuk penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2025 adalah 16.532,830 liter/kab.kota/detik dan pada tahun 2029 sebesar 17,205.49 liter/kab.kota/detik. Hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 43 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Lampung 2025 - 2029

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Lampung Barat	554.34	560.05	565.57	570.94	576.13
Tanggamus	1,177.12	1,190.17	1,202.92	1,215.33	1,227.45
Lampung Selatan	1,967.69	1,991.67	2,015.14	2,038.11	2,060.57
Lampung Timur	2,022.05	2,040.57	2,058.58	2,076.08	2,093.09
Lampung Tengah	2,676.09	2,703.63	2,730.31	2,756.13	2,780.99
Lampung Utara	1,155.83	1,165.78	1,175.42	1,184.77	1,193.84
Way Kanan	873.802	884.11	894.2	904.08	913.73
Tulang Bawang	790.625	799.2	807.59	815.76	823.72
Pesawaran	878.924	889.17	899.31	909.29	919.17
Pringsewu	746.076	754.76	763.33	771.72	779.98
Mesuji	425.712	431.86	437.86	443.75	449.5
Tulang Bawang Barat	523.941	529.1	534.06	538.87	543.45
Pesisir Barat	303.576	307.97	312.34	316.67	320.99
Bandar Lampung	2,128.84	2,148.66	2,167.59	2,185.63	2,202.76
Metro	308.194	311.3	314.32	317.26	320.12
Provinsi Lampung	16,532.83	16,707.97	16,878.52	17,044.36	17,205.49

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2025

f. Sanitasi

Provinsi Lampung memiliki target untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap akses sanitasi yang layak. Berdasarkan data yang didapatkan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Lampung terlihat bahwa pada tahun 2023 dari total seluruh penduduk yang ada baru 81,64% penduduk yang memiliki sanitasi yang layak. Walaupun angka tersebut selalu naik setiap tahunnya tetap perlu ada suatu target tertentu untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat Provinsi Lampung. Berdasarkan data tersebut masih perlu adanya peningkatan akses sanitasi layak di Provinsi

Lampung, peningkatan akses sanitasi bisa dilakukan dengan membuat Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Regional dimana nantinya SPAL tersebut akan melayani ke beberapa Kabupaten/Kota.

Target Pemerintah Provinsi Lampung terhadap akses sanitasi adalah sebesar 100 % pada tahun 2029. Oleh karena itu dengan tingkat kenaikan akses sebesar 1-3% pertahun maka didapatkan hasil pada tahun 2025 target akses sanitasi layak sudah mencapai angka 87,92% penduduk Provinsi Lampung dapat memiliki akses sanitasi layak dan pada akhir tahun perencanaan pada tahun 2029 didapatkan hasil bahwa 100% penduduk Provinsi Lampung terlayani sanitasi layak.

Selain itu, dapat dilihat bahwa pada tahun tertentu terdapat kabupaten yang sudah memiliki akses air minum sebesar 100% seperti Kota Metro dan Lampung Selatan pada tahun 2025, Pringsewu pada tahun 2026, Lampung Barat dan Lampung Timur pada tahun 2027 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 44 Proyeksi Akses Sanitasi Layak 2025 - 2029

Kabupaten/Kota	Proyeksi Akses Sanitasi Layak				
	2025	2026	2027	2028	2029
Lampung Barat	82, 61	85,82	100,00	100,00	100,00
Tanggamus	71, 25	74,02	76,79	79,56	82,33
Lampung Selatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lampung Timur	89,73	93,22	96,70	100,00	100,00
Lampung Tengah	81, 97	85, 15	88,34	91,52	94,71
Lampung Utara	78,71	81,77	84,83	87,89	90,95
Way Kanan	82, 46	85,66	88,87	92,07	95,28
Tulang Bawang	88, 66	92,10	95,55	99,00	102,44
Pesawaran	87,06	90,45	93,83	97,22	100,60
Pringsewu	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00
Mesuji	82,59	85, 80	89,01	92,22	95,43
Tulang Bawang Barat	78,71	81,77	84,83	87,89	90,95
Pesisir Barat	78,71	81,77	84,83	87,89	90,95

Kabupaten/Kota	Proyeksi Akses Sanitasi Layak				
	2025	2026	2027	2028	2029
Bandar Lampung	81,66	84,84	88,01	91,19	94,36
Metro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Provinsi Lampung	85,18	88,16	91,44	93,76	95, 87

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2024

g. Perumahan

Berdasarkan hasil proyeksi rumah dengan pembagian kategori luasan rumah, terdiri dari luasan Kavling Rumah Mewah seluas 600 m2, luasan Kavling Rumah Sedang seluas 400 m2, luasan Kavling Rumah Sederhana seluas 200 m2, dan luasan kavling Rumah Sangat Sederhana seluas 70 m2. Dari hasil analisis dapat diketahui Proporsi kebutuhan rumah tahun 2045 = 198.984 Rumah Mewah (RM), 397.974 Rumah Sedang (RSd), 795.944 Rumah Sederhana (RS), dan 596.957 Rumah Sangat Sederhana (RSS). Jadi total rumah yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk di tahun 2045 yaitu 1.989.858 rumah. Untuk lebih jelasnya proyeksi pemenuhan kebutuhan rumah tahun 2025 hingga tahun 2045 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah:

Tabel 2. 45 Jumlah Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2029

Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Rumah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Lampung Barat	63860,0	64518,0	65154,0	65772,0	66370,0
Tanggamus	135604,0	137108,0	138576,0	140006,0	141402,0
Lampung Selatan	226678,0	229440,0	232144,0	234790,0	237378,0
Lampung Timur	232940,0	235074,0	237148,0	239164,0	241124,0
Lampung Tengah	308286,0	311458,0	314532,0	317506,0	320370,0
Lampung Utara	133152,0	134298,0	135408,0	136486,0	137530,0
Way Kanan	100662,0	101850,0	103012,0	104150,0	105262,0
Tulang Bawang	91080,0	92068,0	93034,0	93976,0	94892,0
Pesawaran	101252,0	102432,0	103600,0	104750,0	105888,0
Pringsewu	85948,0	86948,0	87936,0	88902,0	89854,0
Mesuji	49042,0	49750,0	50442,0	51120,0	51782,0
Tulang Bawang Barat	60358,0	60952,0	61524,0	62078,0	62606,0

Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Rumah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pesisir Barat	34972,0	35478,0	35982,0	36480,0	36978,0
Bandar Lampung	245242,0	247526,0	249706,0	251784,0	253758,0
Metro	35504,0	35862,0	36210,0	36548,0	36878,0
Provinsi Lampung	1904582,0	1924758,0	1944406,0	1963510,0	1982072,0

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2025

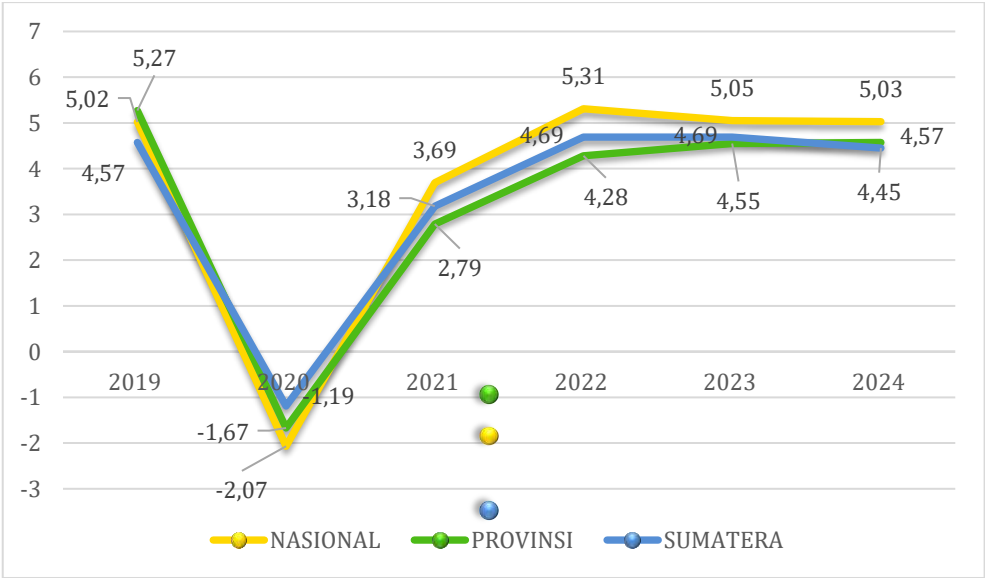
2.1.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) indikator makro dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Gambar 2. 58 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2019-2024

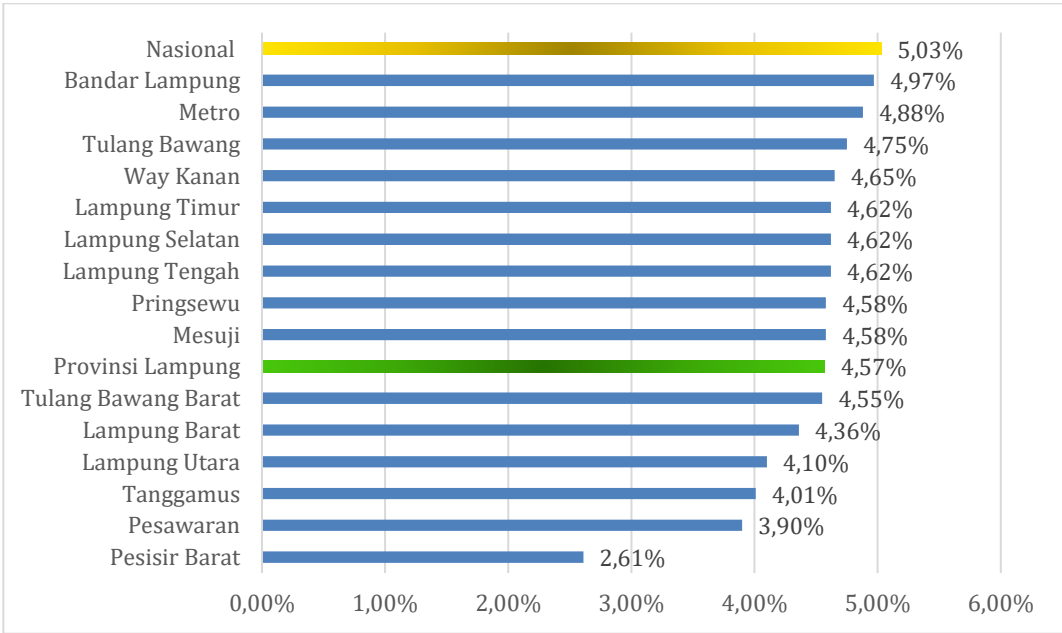


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selama periode 2019-2024, sebagai dampak *pandemic Covid-19* yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen. Sejalan waktu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami *recovery* dan mengalami peningkatan, untuk Tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (c to c), tumbuh sebesar 4,57 persen, menguat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,55 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2021 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp371.903,17 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp247.001,67 miliar. Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05) dan Sumatera (4,45). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2024 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 483.882,92 Miliar dan Rp. 281.557,20 Miliar.

Gambar 2. 59 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 tumbuh sebesar 2,79 persen, menguat dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi

sebesar 1,67 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,26 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,78 persen.

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 berada pada urutan ke-6 setelah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Aceh dan Bengkulu. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik berikut.

Pola spasial pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2024 menunjukkan, sebanyak 9 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung (4,97), Kota Metro (4,88), Kabupaten Lampung Selatan (4,62), Kabupaten Pringsewu (4,58), Kabupaten Lampung Tengah (4,62), Kabupaten Tulang Bawang (4,75), Kabupaten Lampung Timur (4,62), Kabupaten Way Kanan (4,65) dan Kabupaten Mesuji (4,58). Peta persebaran capaian kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar Berikut.

Gambar 2. 60 Peta Persebaran Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024



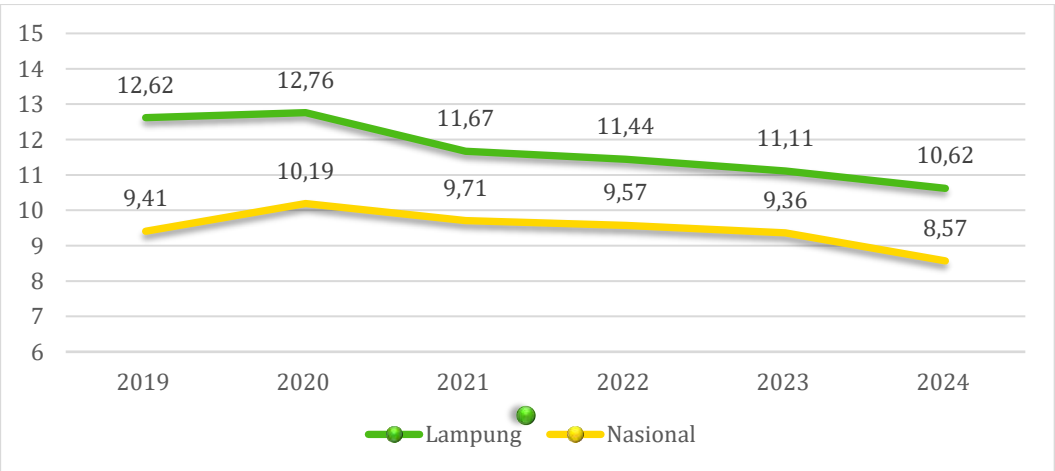
Sumber: Bappeda Provinsi Lampung (2025)

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih menjadi perhatian banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan maka diperlukan sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia. Indikator-indikator tersebut antara lain jumlah dan persentase penduduk miskin serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya yang terbanding antar waktu dan antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,62 persen di tahun 2019 menjadi 10,69 persen di Tahun 2024, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,03 persen.

Gambar 2. 61 Capaian Angka Kemiskinan Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Bila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 11,43 ribu orang. Untuk September

2022, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 mencapai 970,67 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 31,74 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 24,9 ribu orang.

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel di bawah ini menunjukkan pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 697,19 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 737,71 ribu jiwa. Namun, di perkotaan jumlah penduduk miskin Tahun 2024 mengalami peningkatan dari 232,96 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 244,04 ribu jiwa pada Tahun 2024.

Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan cukup fluktuatif, dimana pada periode 2019 mengalami penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2020 ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic Covid-19. Untuk kemiskinan di pedesaan, tren pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan tidak stabil dan memiliki karakteristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan

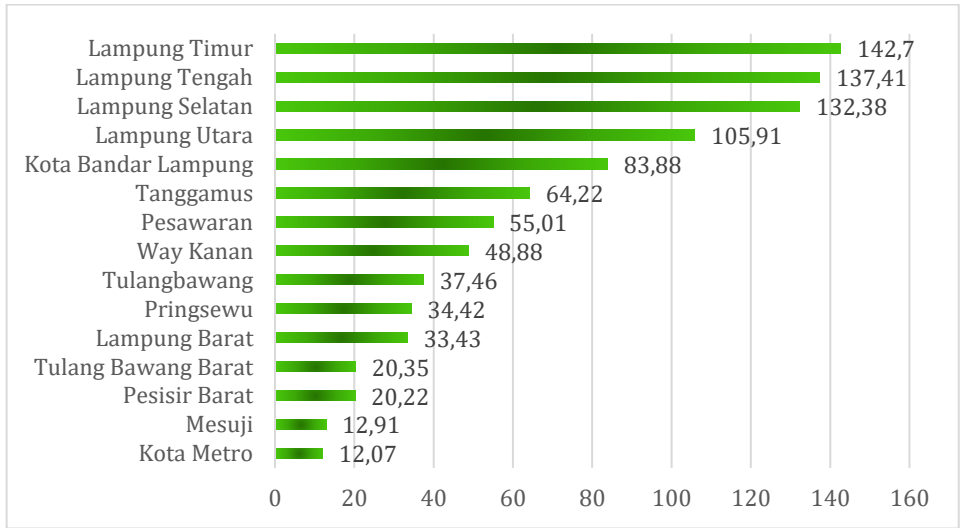
Tabel 2. 46 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung
Tahun 2019 – 2024 (Ribu Jiwa)

LOKASI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota	224.69	259,28	236,48	239,11	232,96	244,04
Desa	816.79	831,86	770,54	756,48	737,71	697,19
Kota + Desa	1041.48	1.091,14	1.007,02	995,59	970,67	941,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota, empat (4) Kabupaten terbanyak penduduk miskin adalah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara, walaupun dengan persentase penduduk miskin terbesar namun dari segi jumlah penduduk miskin, menempati urutan keempat setelah Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.

Gambar 2. 62 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-
Provinsi Lampung 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Pola Spasial Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, menunjukkan masih terdapat 9 Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan diatas Provinsi Lampung dan 6 Kabupaten/Kota yang meiliki angka kemiskinan lebih rendah dari Provinsi Lampung.

Gambar 2. 63 Pola Spasial Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2024.



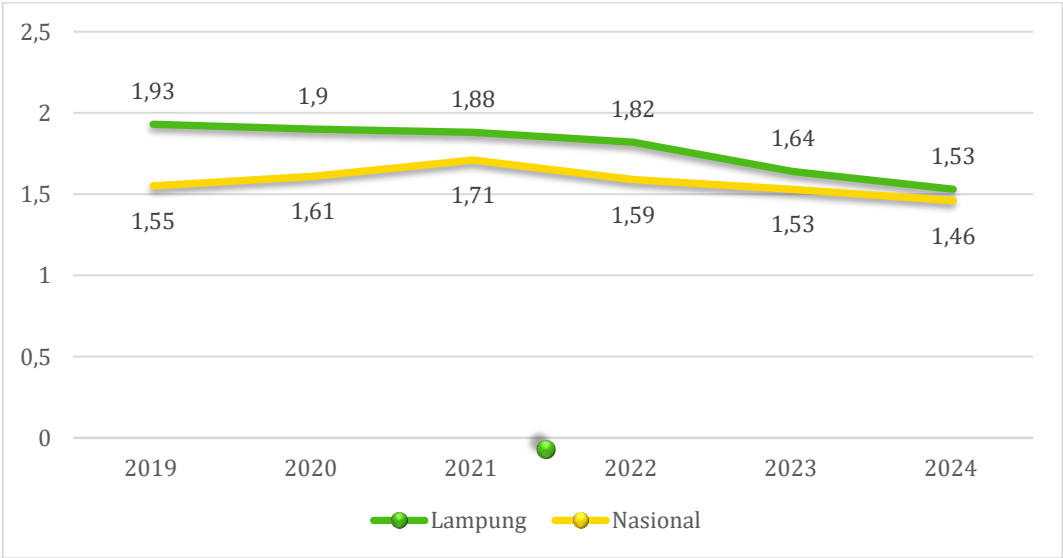
Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2025

A. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 1,93 di tahun 2019 menjadi 1,53 di Tahun 2024. Penurunan P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan, begitu juga sebaliknya. Peningkatan Nilai P1 di Provinsi Lampung seharusnya diwaspadai karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin jauh atau semakin dalam dari garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada Maret 2024 berada pada angka 1,53.

Gambar 2. 64 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia 2019-2024

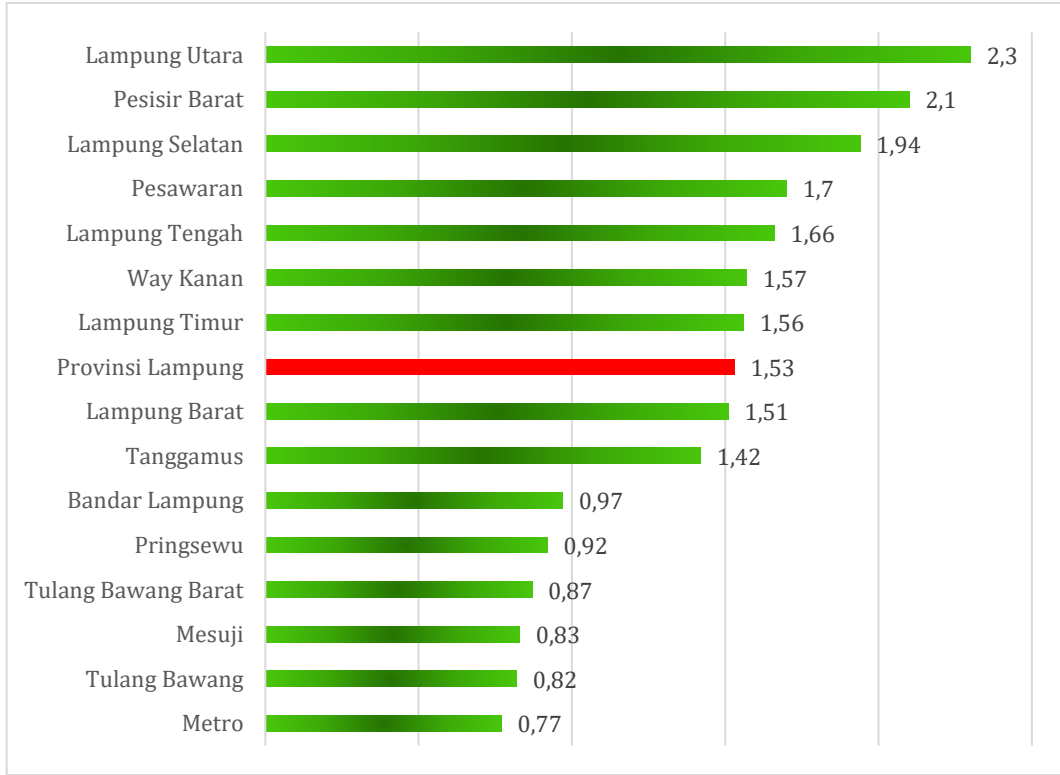


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kedalaman kemiskinan di Provinsi Lampung terus menurun masih diatas Nasional disebabkan oleh: (1) mayoritas penduduk miskin bergantung pada sektor pertanian tradisional sehingga masih minim sentuhan teknologi dan ketergantungan kepada iklim sehingga produktivitas masih rendah, (2) minim infrastruktur pendukung ekonomi sehingga menyebabkan biaya logistik tinggi dan sulit pemasaran hasil pertanian, (3) kualitas SDM rendah dikarenakan keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri, (4) rendahnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan (5) letak geografis Provinsi Lampung yang rentan akan bencana alam.

Terdapat tujuh (7) Kabupaten yang memiliki Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih besar daripada angka Provinsi yakni : Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Way Kanan, Lampung Selatan. Untuk Nilai Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil daripada angka Provinsi yakni : Bandar Lampung, Metro, Lampung Barat, Mesuji, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.

Gambar 2. 65 Realisasi Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Lampung

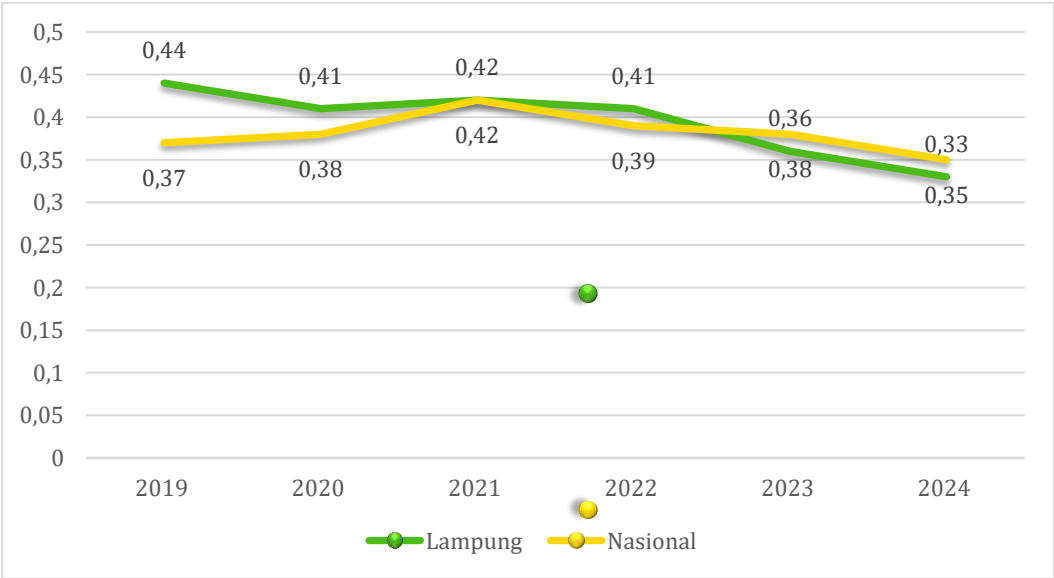


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

B. Indeks Keparahahan Kemiskinan

Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tren Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,44 Tahun 2019 menjadi 0,35 di Maret 2024. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Indeks Keparahahan Kemiskinan pada September 2024 sebesar 0,396, naik dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,35. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Keparahahan Kemiskinan Provinsi Lampung berada di bawah Indeks P2 Nasional.

Gambar 2. 66 Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

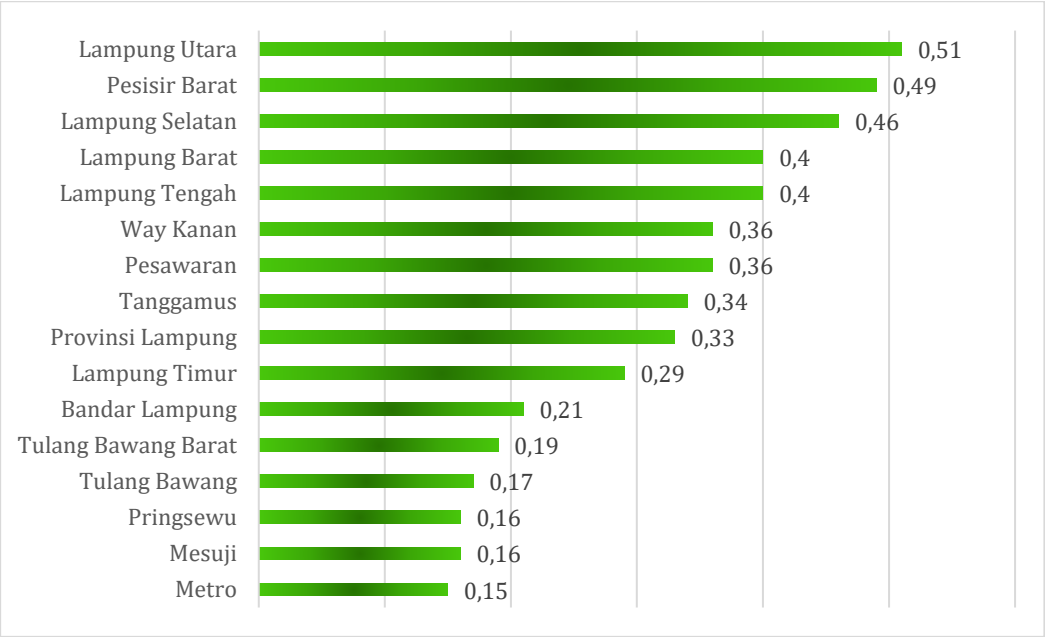
Indeks keparahan kemiskinan Provinsi Lampung semakin baik dikarenakan Lampung termasuk provinsi dengan cakupan bansos yang luas, banyaknya penduduk miskin terkonsentrasi di kisaran garis kemiskinan sehingga masih rentan miskin dan bukan karena kemiskinan benar-benar teratasi, disamping itu dengan masih dominannya penduduk miskin pada sektor pertanian yang masih merupakan petani tradisional dan minim sentuhan teknologi

sehingga masih bergantung pada kondisi alam menyebabkan rentan terhadap guncangan iklim seperti kekeringan dan banjir

Terdapat delapan (8) Kabupaten yang memiliki Keparahana Kemiskinan (P2) yang lebih besar daripada angka Provinsi yakni : Lampung Utara (0,51), Pesisir Barat (0,49), Lampung Selatan (0,46), Lampung Barat (0,40), Lampung Tengah (0,40), , Way Kanan (0,36), Pesawaran (0,36) dan Tanggamus (0,34).

Selanjutnya terdapat tujuh (7) Kabupaten/Kota yang memiliki Keparahana Kemiskinan di bawah Provinsi Lampung yaitu : Lampung Timur (0,29), Kota Bandar Lampung (0,21), Kabupaten Tulang Bawang Barat (0,19), Tulang Bawang (0,17), Pringsewu (0,16), Mesuji (0,16), Kota Metro (0,15).

Gambar 2. 67 Keparahana Kemiskinan Kab/Kota se-Provinsi Lampung (September 2024)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

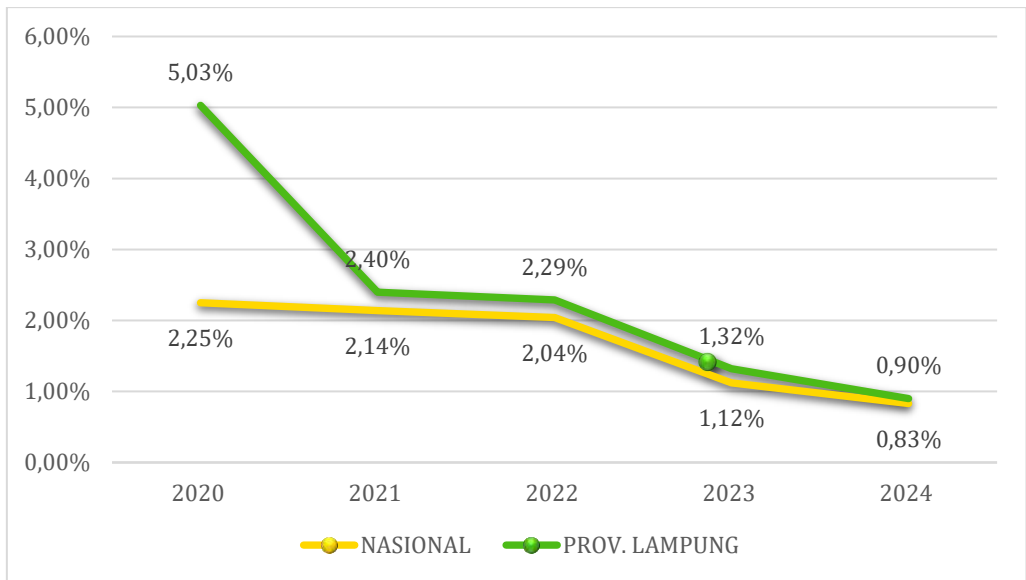
C. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Kategori Kemiskinan Ekstrem ketika biaya hidup seseorang dibawah garis kemiskinan ekstrem yaitu dibawah atau setara dengan USD 1.99 per hari berdasarkan paritas daya beli, sehingga

misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan.

Gambar 2. 68 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025

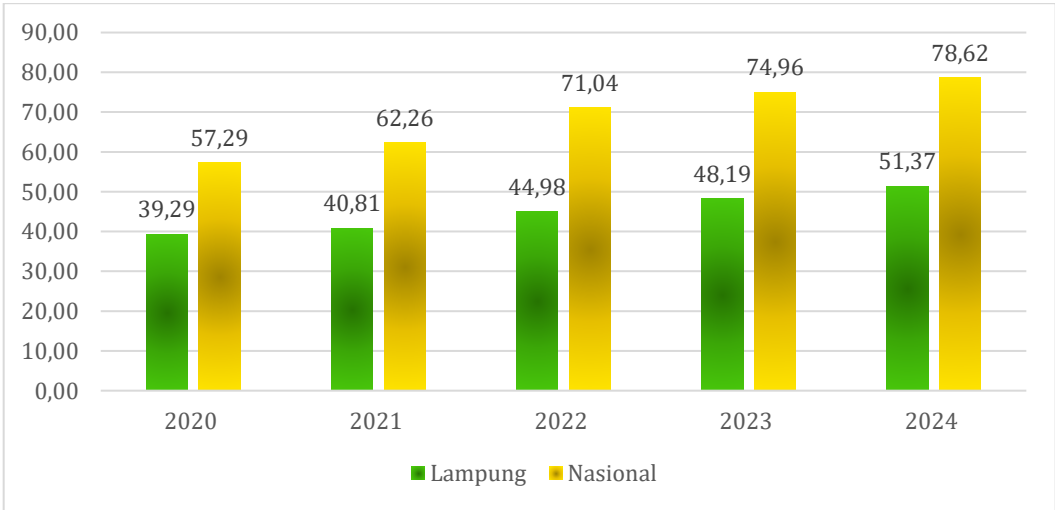
Provinsi Lampung terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem, hal ini terlihat pada data dari tahun 2020 tren kemiskinan ekstrem di Lampung terus menurun dari 5.03% menjadi 0.9% di tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah kabupaten/kota terus berupaya untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung dengan menerapkan tiga strategi yaitu peningkatan pendapatan, pengurangan beban masyarakat miskin, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

3. Pendapatan per Kapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan dari Rp. 32,29 juta menjadi Rp. 51,37 juta. Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung,

mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp 51,37 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 78,62 Juta Rupiah pada tahun 2024.

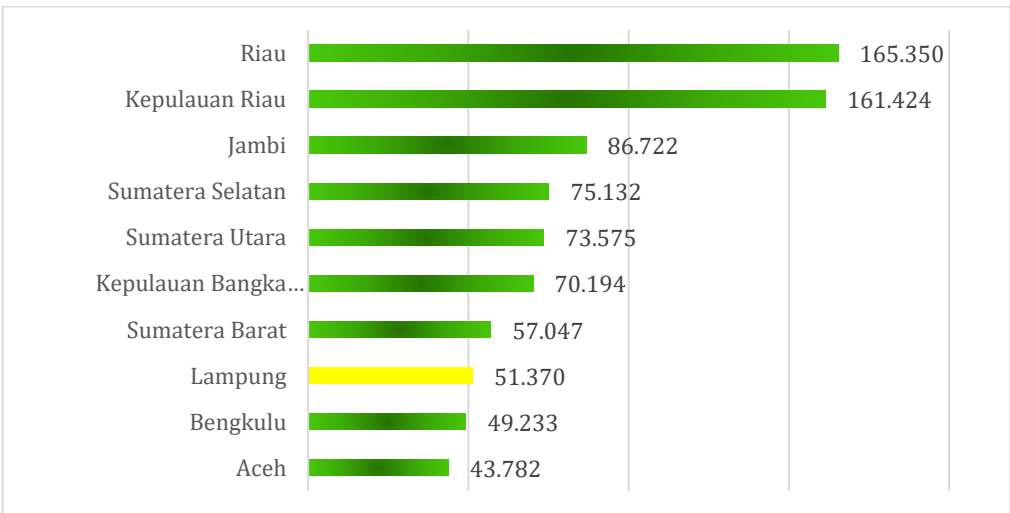
Gambar 2. 69 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2020- 2024 (ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Bila dibandingkan dengan regional Sumatera, PDRB Perkapita Provinsi Lampung hanya menempati 3 terendah bersama-sama Provinsi Aceh dan Bengkulu. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan produktivitas pada sektor-sektor strategis di Provinsi Lampung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

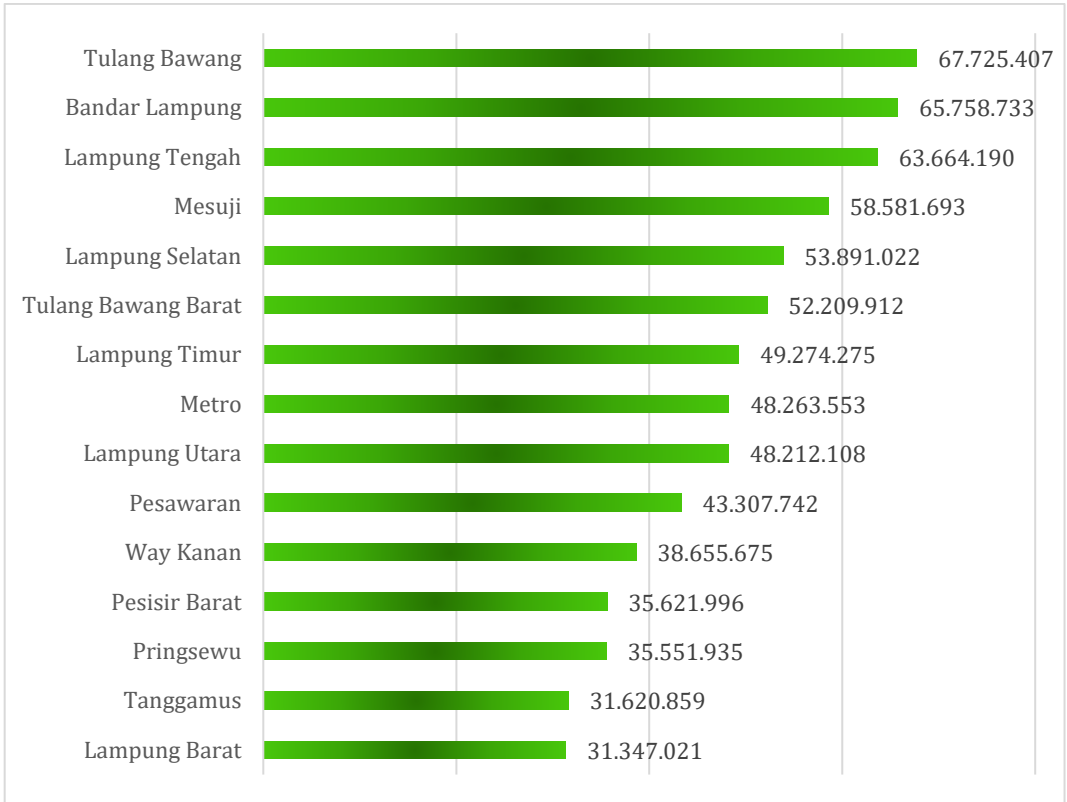
Gambar 2. 70 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2024 (ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2024 menunjukkan Kabupaten Way Kanan merupakan Kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan perkapita tertinggi sebesar 8,64 persen, diikuti Kabupaten Lampung Barat sebesar 8,60 persen dan Kabupaten Lampung Utara sebesar 7,73 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat dan Pesawaran, masing-masing sebesar 5,44 persen dan 5,87 persen. Pada Tahun 2024, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar dengan capaian sebesar Rp. 67,72 juta, lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung sebesar Rp. 51,37 juta.

Gambar 2. 71 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

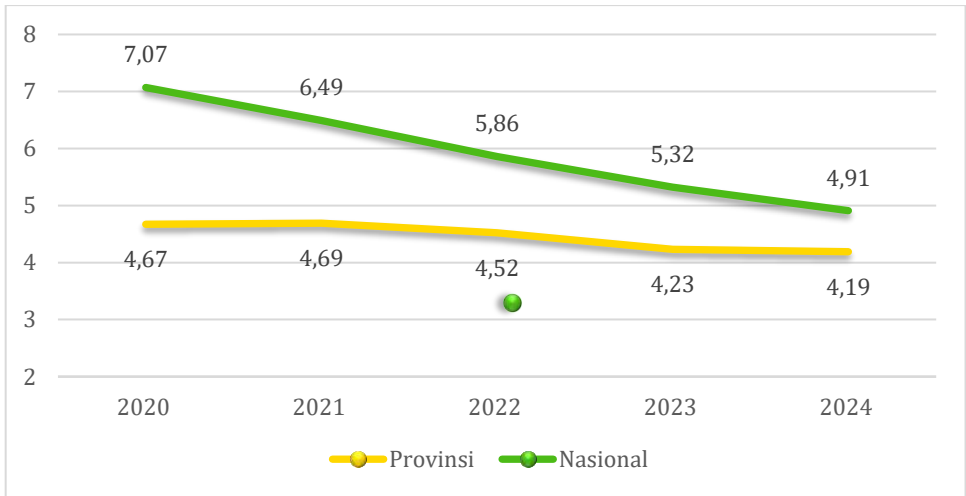


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kesehatan pasar kerja di suatu wilayah.

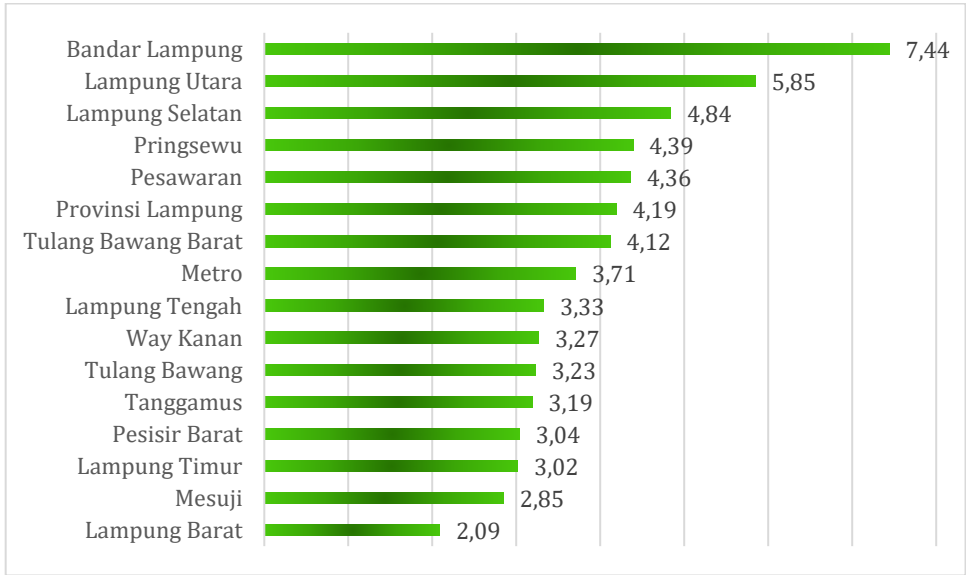
Gambar 2. 72 Capaian TPT Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumbe: Badan Pusat Statistik, 2025

Sejak Pandemi Covid-19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Mulai Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan penurunan menjadi 4,52, kemudian pada Tahun 2024 TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 4,19. Hal ini merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian sejak Covid-19 dan meningkatnya sektor usaha sehingga mampu menyerap tenaga kerja padat karya (*labor-intensive*) yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan. Selama periode 2020-2024, capaian TPT Provinsi Lampung selalu lebih baik dibandingkan TPT Nasional (4,91) pada Tahun 2024.

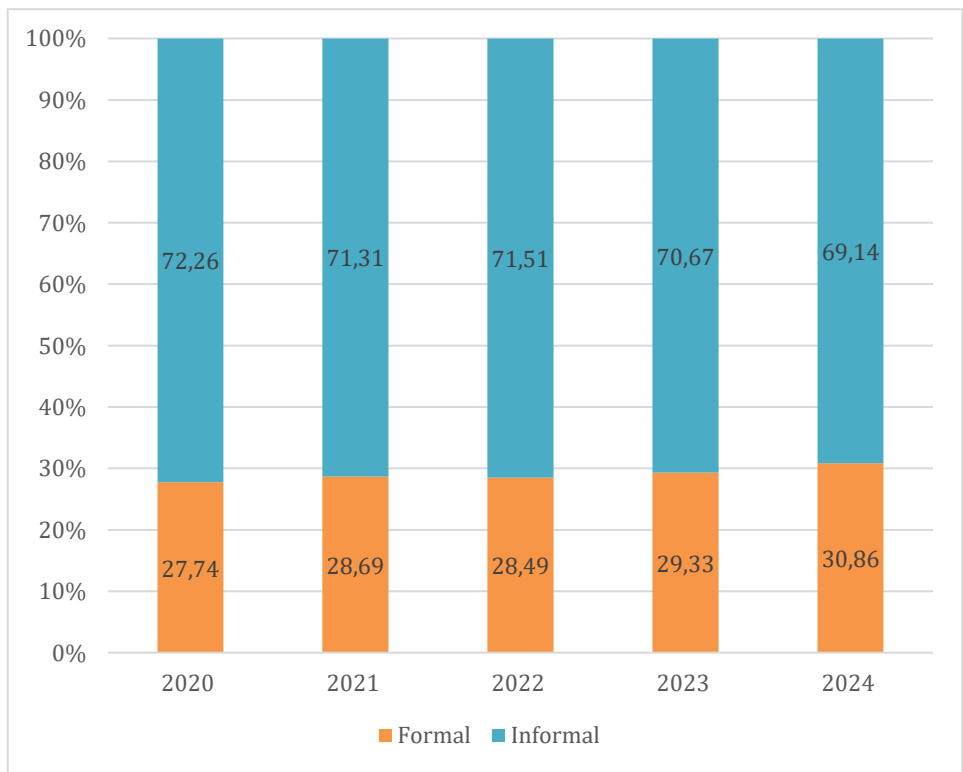
Gambar 2. 73 Capaian TPT Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Pada tahun 2024, di tingkat Kabupaten/Kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 7,44 persen diikuti Lampung Utara (5,85), Lampung Selatan (4,84), Pringsewu (4,39%) dan Pesawaran (4,36). Selain lima Kabupaten/Kota ini, semua Kabupaten/Kota memiliki nilai TPT lebih rendah daripada Provinsi Lampung. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah dengan angka 2,09 persen.

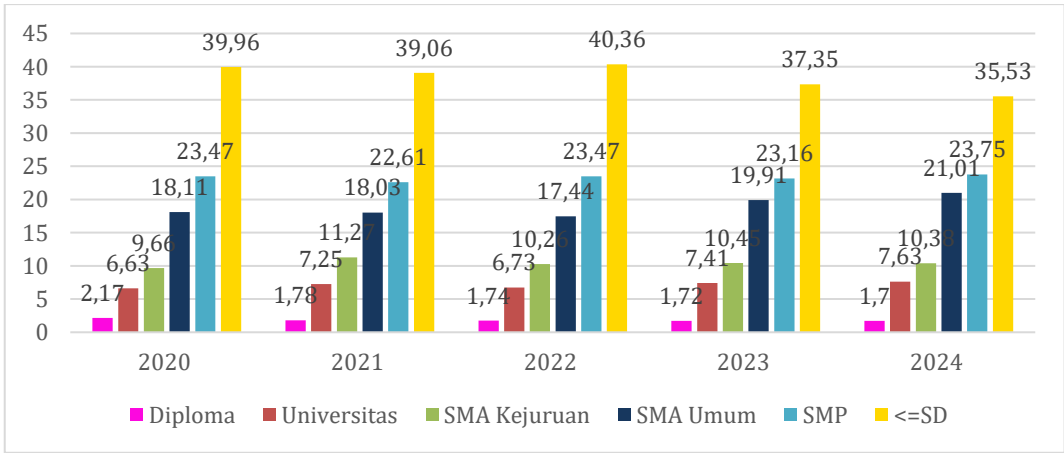
Gambar 2. 74 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di sektor formal periode Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 27,74% Tahun 2020 menjadi 30,86% Tahun 2024, Meskipun terdapat peningkatan jumlah pekerja sektor formal, sektor informal masih mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pekerja yang belum memiliki akses ke pekerjaan dengan perlindungan sosial dan jaminan kerja yang memadai.

Gambar 2. 75 Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan tertinggi di Provinsi Lampung menunjukkan gambaran penting mengenai kualitas tenaga kerja dan tantangan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Persentase tenaga kerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Provinsi Lampung Tahun 2024 masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan SD sebesar 35,53%, lulusan SMP sebesar 23,75% dan lulusan SMA Umum sebesar 21,01%. Namun demikian data pada periode 2020-2024 persentase tenaga lulusan SD menurun serta persentase tenaga lulusan SMP dan SMA Umum mengalami peningkatan.

Tabel 2. 47 Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Tahun 2019-2024

NO	UNIT KERJA	LULUSAN PELATIHAN											
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	UPTD-BLK B. Lampung	1.624	1.124	272	272	336	336	448	448	328	328	408	396
	APSD	144	144	32	32	96	96	96	96	80	80	80	80
	APBN	880	880	340	340	240	240	352	352	240	240	328	316
2	UPTD-BLK Kalianda	360	360	128	128	192	192	256	256	352	352	272	272
	APSD	64	64	0	0	64	64	96	96	64	64	64	64
	APBN	496	496	128	128	128	128	200	200	240	240	208	208
	Kerjasama	-	-	0	0	0	0	62	62	48	48	-	-
3	UPTD-BLK Metro	856	856	128	128	272	272	368	368	304	304	272	272
	APSD	64	64	0	0	96	96	112	112	64	64	64	64
	APBN	392	392	128	128	176	176	256	256	240	240	208	208
4	UPTD-BLK Way Abang	344	344	128	128	208	208	272	272	304	304	288	288
	APSD	80	80	0	0	80	80	96	96	64	64	80	80
	APBN	464	464	128	128	128	128	128	128	240	240	208	208
	Kerjasama	-	-	0	0	0	0	48	48	-	-	-	-
	Jumlah	2.784	2.784	656	656	1.088	1.088	1.444	1.444	1.280	1.280	1.392	1.328

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2025

Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui 4 (empat) BLK bertujuan

untuk **meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja** khususnya bagi pencari kerja.

Tabel 2. 48 Tenaga Kerja Tersertifikasi Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Laki-Laki		Tenaga Kerja Perempuan		Total	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Lampung Selatan	801	1121	1559	1401	2360	2522
Lampung Tengah	864	1015	2155	1928	3019	2943
Lampung Utara	313	665	714	1079	1027	1747
Lampung Barat	165	205	318	335	483	540
Tulang Bawang	170	227	710	620	880	747
Tanggaman	324	357	1001	754	1325	1161
Lampung Timur	700	799	4178	2735	4878	3534
Way Kanan	157	227	462	306	619	533
Pesawaran	272	381	938	775	1210	1156
Pringsewa	304	310	782	661	1086	971
Mesuji	86	82	423	355	509	437
Tulang Bawang Barat	183	180	564	497	747	677
Pesisir Barat	102	22	87	22	189	44
Bandar Lampung	2285	2857	2077	2638	4362	5495
Metro	665	779	1021	863	1687	1762
TOTAL	7375	9270	482	14989	7857	24259

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2025

Dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif, keberadaan tenaga kerja tersertifikasi menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Tenaga kerja tersertifikasi adalah individu yang telah mengikuti pelatihan dan berhasil melalui uji kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional, serta memperoleh sertifikat resmi dari lembaga yang berwenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

5. Indeks Gini

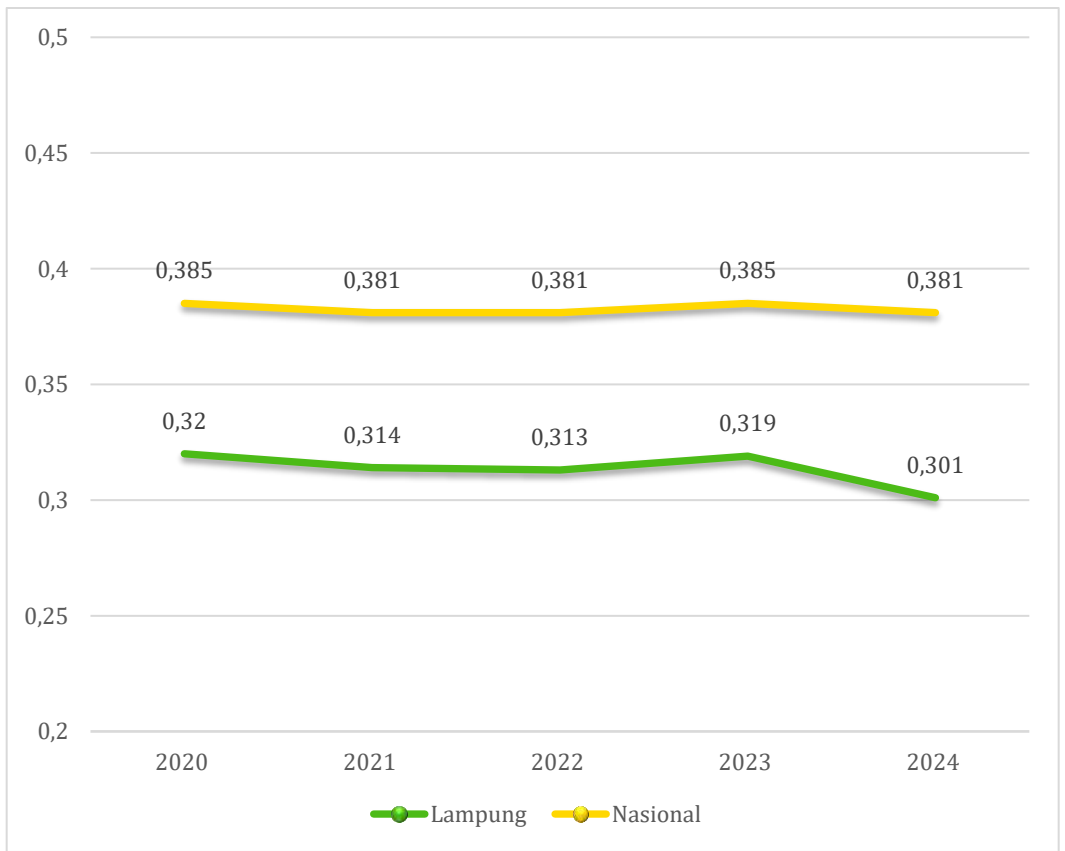
Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,330 tahun 2019 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, namun pada tahun 2023 Rasio Gini Provinsi Lampung sedikit meningkat menjadi 0,319 dan nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional (0,385), dan pada Tahun 2024 nilai Rasio Gini Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,301 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu turun sebesar 0,018 poin.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor (*crosscutting*), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

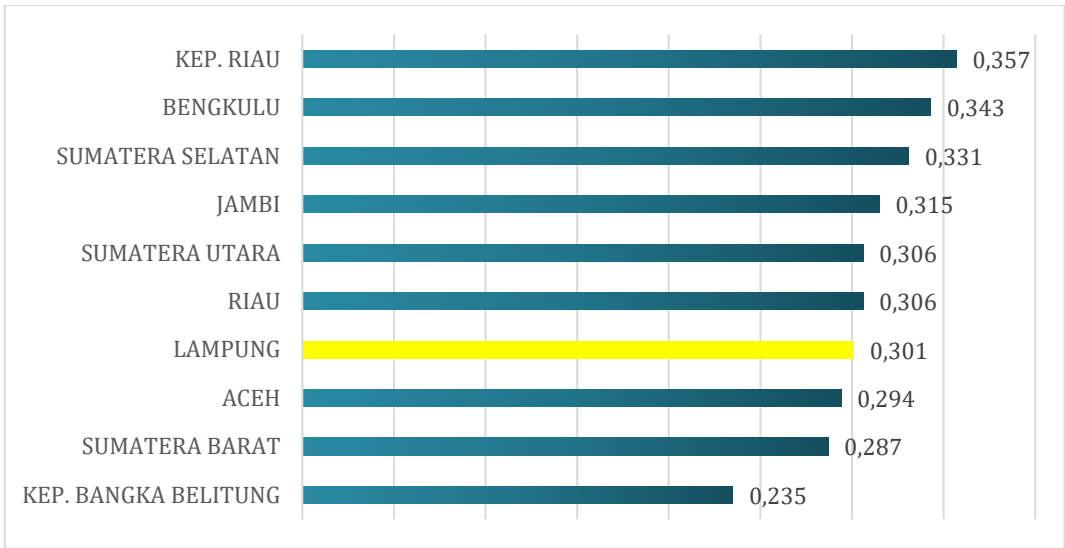
Gambar 2. 76 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara regional Sumatera, ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan menempati urutan keempat terendah bersama-sama Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh.

Gambar 2. 77 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung
Lingkup Regional Sumatera Tahun 2024

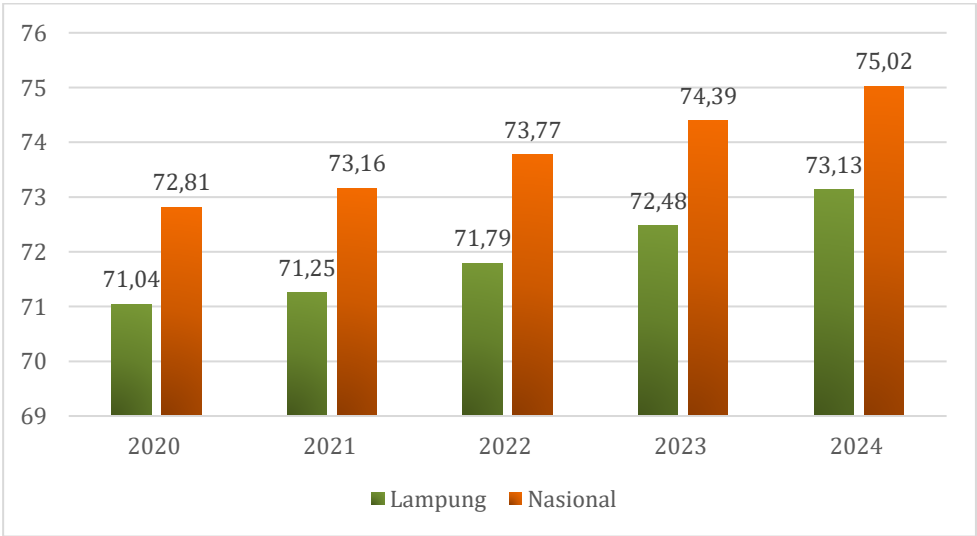


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

6. Indeks Pembangunan Manusia

Tren pembangunan manusia Provinsi Lampung yang digambarkan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Predikat kategori SEDANG di tahun 2021 telah meningkat menjadi kategori TINGGI di tahun 2022. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat besaran IPM Provinsi Lampung mencapai 71,04 persen. Kondisi ini terus membaik hingga pada tahun 2024 skor Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung mencapai 73,13 persen. Artinya dalam kurun waktu lima tahun pengamatan telah mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,42 poin rata-rata per tahun.

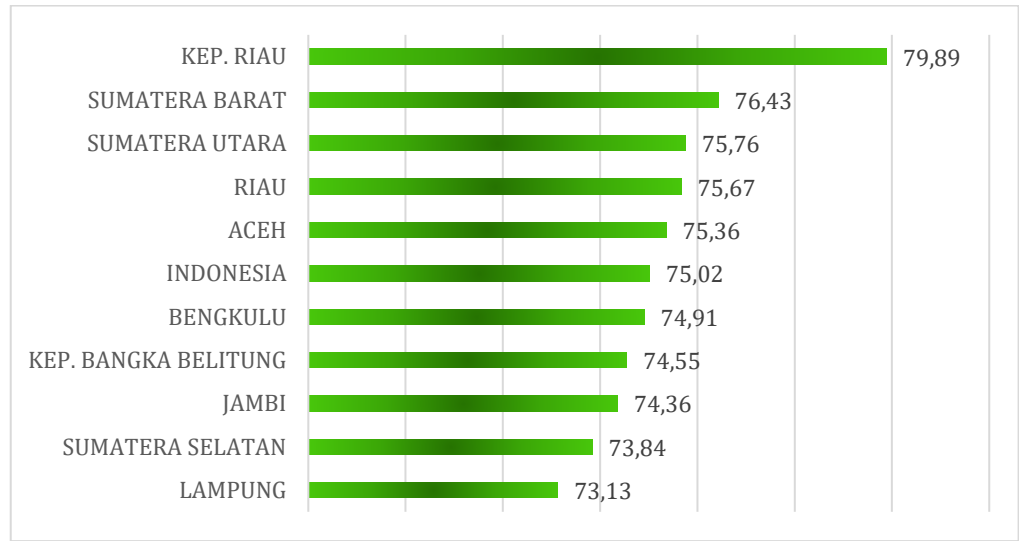
Gambar 2. 78 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024
(SP 2020)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Pada lingkup nasional capaian IPM Provinsi Lampung masih berada dibawah capaian IPM Nasional. IPM Provinsi Lampung pada tahun 2024 adalah 73,13 dan IPM Indonesia pada tahun 2024 mencapai 75,02. Secara umum tren peningkatan terjadi pada seluruh provinsi. Di wilayah pulau Sumatera, rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Lampung pertahun 2020-2024 lebih tinggi dari semua provinsi dengan capaian 0,72 persen, tercepat kedua setelah Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2. 79 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024 (SP 2020)

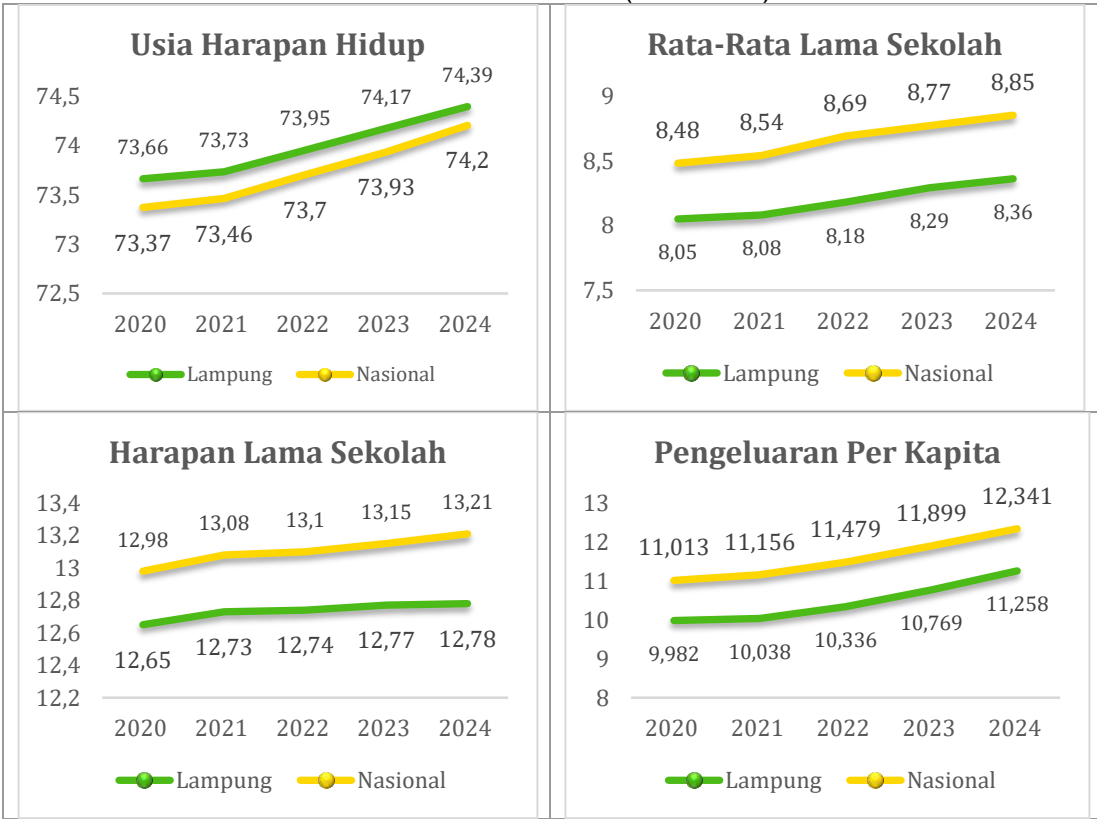


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tiga komposit yang digunakan untuk mengukur angka IPM terbentuk dari capaian indikator-indikator pada bidang kesehatan (USIA HARAPAN HIDUP), pendidikan (RLS dan HLS), dan ekonomi (Pengeluaran Perkapita). Usia harapan hidup (USIA HARAPAN HIDUP) penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2024 adalah sebesar 74,39 tahun. Artinya seorang bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki peluang untuk hidup sampai berusia sekitar 74 tahun. Umur harapan hidup penduduk Provinsi Lampung berada di atas umur harapan hidup nasional yang sebesar 74,15 tahun. Rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan yang kini mencapai 8,36 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Lampung usia 25 tahun ke atas masih cukup jauh di bawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Rata-rata lama sekolah nasional mencapai 8,85 tahun atau berada di atas RLS Provinsi Lampung. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung pada

tahun 2024 mencapai 12,78 tahun. Ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Provinsi Lampung dapat menikmati jenjang akhir pendidikan SLTA. Angka HLS Provinsi Lampung berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 13,21 tahun. Biaya pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2024 sebesar Rp11,25 juta per kapita/tahun. Pada tahun 2024 relatif terdapat kenaikan pengeluaran penduduk dibanding tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita Provinsi Lampung sendiri meningkat 4,35 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,76 juta.

Gambar 2. 80 Komponen IPM Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024 (SP 2020)



Keterangan : Badan Pusat Statistik, 2025

7. Indeks Modal Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merujuk pada usaha-usaha peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, akhlak, dan karakter untuk meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan bangsa.

Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index* (HCI) merupakan indikator baru yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Tahun 2018 digunakan untuk menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan bagi produktivitas individu dan negara, dengan

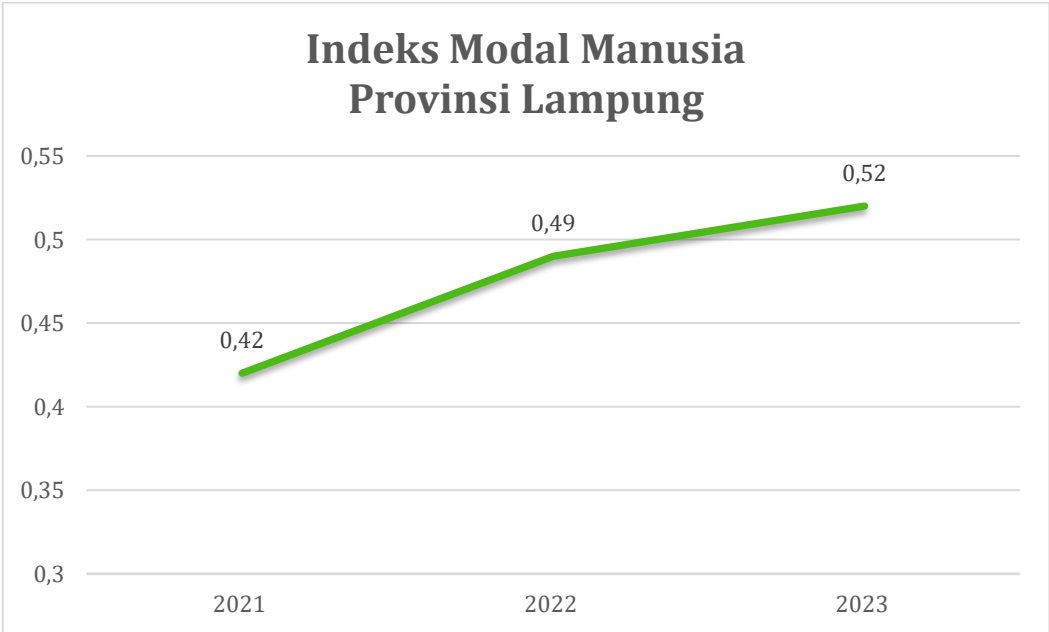
mengukur modal manusia yang bisa diakumulasi seorang anak yang lahir pada hari ini, saat dia berusia 18 tahun nanti, serta melihat risiko kondisi kesehatan dan pendidikan yang terjadi di negara tempat dia hidup.

Indikator-indikator yang digunakan mencakup *survival* (kemampuan bertahan hidup masyarakat sampai umur lima tahun), pendidikan (diukur dari harapan pencapaian lama bersekolah) dan kualitas pendidikan (skor tes), serta kesehatan (diukur dari kelangsungan hidup usia 15-60 tahun dan persentase balita tidak tengkes/*stunting*).

Berdasarkan penjelasan dari Bank Dunia, Indeks Modal Manusia ditampilkan dalam rentang nilai antara 0 dan 1, apabila nilai suatu negara mendekati angka 1, maka produktivitas pekerja generasi selanjutnya dipastikan sangat tinggi, didukung oleh lingkungan hidup yang sehat dan pendidikan yang mumpuni.

Tahun 2018 Indeks Modal Manusia Indonesia menempati peringkat ke-87 dari total 157 negara dengan nilai 0,53. Tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 0,54 dengan peringkat ke-96 dari 173 negara, artinya, produktivitas dari setiap anak yang lahir hanya mencapai 54 persen dari kapasitas idealnya. Pada level Asia Tenggara, Indonesia mencapai urutan ke enam setelah Singapura 0,88 poin, Vietnam 0,69 poin, Brunei Darussalam 0,63 poin, Malaysia 0,61 poin, dan Thailand 0,61 poin

Gambar 2. 81 Indeks Modal Manusia Tahun 2021-2023



Sumber: Hasil Rakortek Perencanaan Pembangunan Tahun 2024

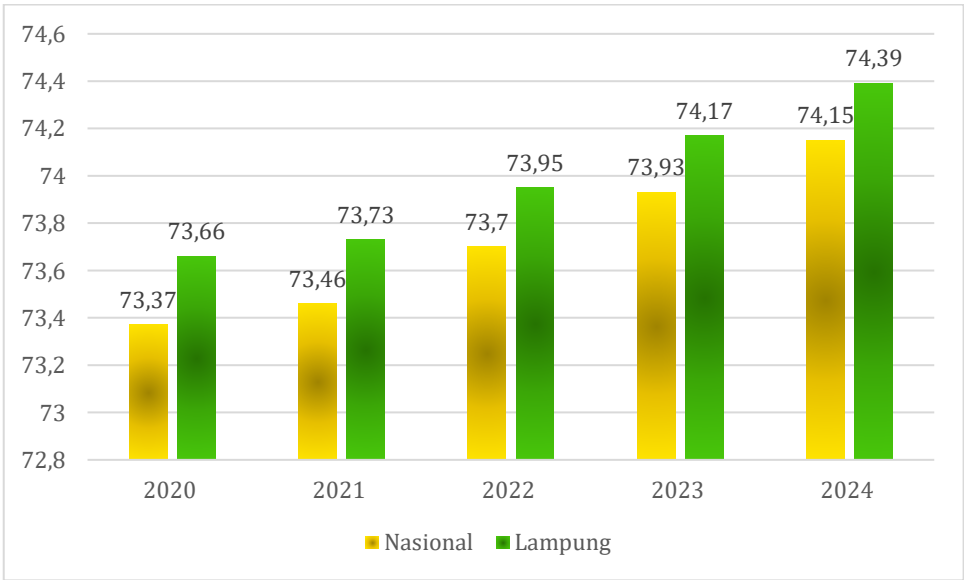
Dari Data IMM Provinsi Lampung Tahun 2021 (0,42) hingga Tahun 2023 (0,52) terlihat peningkatan capaian ditiap tahunnya, ini menandakan bahwa potensi produktivitas sumberdaya manusia di Provinsi Lampung semakin baik, karena semakin mendekati angka satu.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Konsekuensi dari meningkatnya Usia Harapan Hidup penduduk Indonesia adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). USIA HARAPAN HIDUP mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang semakin baik.

Gambar 2. 82 Usia Harapan Hidup Laki-Laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2019 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

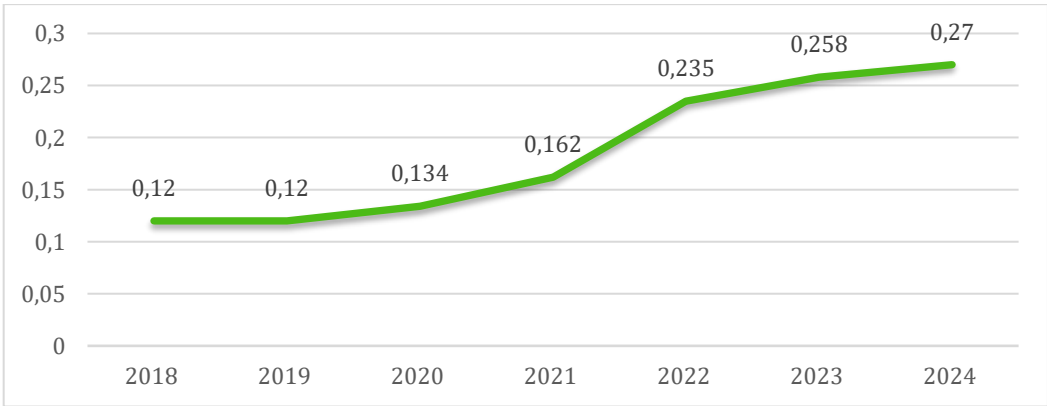
Berdasarkan data Gambar 2.79 Capaian USIA HARAPAN HIDUP Lampung selalu melampaui angka nasional tiap tahun, Usia Harapan Hidup merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi Tingkat kesejahteraan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga saat ini masih diyakini sebagai indikator yang lebih komprehensif menilai kesejahteraan masyarakat karena tidak hanya mengukur dari satu sisi yaitu

ekonomi atau tingkat pendapatan saja, tetapi juga memperhitungkan dimensi pengetahuan dan kesehatan.

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) didapat berdasarkan perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan $IKS > 0,8$ (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

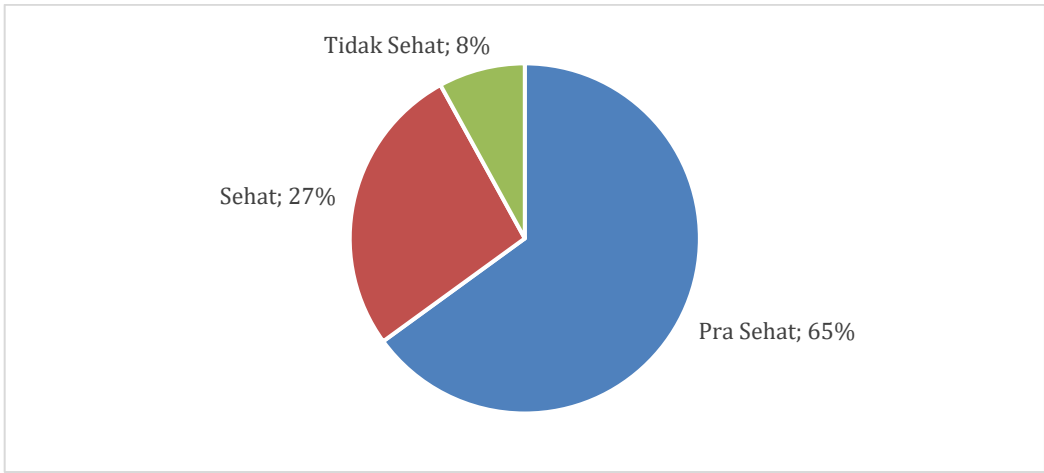
Gambar 2. 83 Tren Capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Lampung Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Dari grafik di atas terlihat peningkatan indikator keluarga sehat dari 0,12 pada tahun 2018 sampai menjadi 0,27 pada akhir tahun 2024. Untuk persentase Indeks Keluarga Sehat tahun 2024, baru ada 27% keluarga sehat, 65% keluarga pra sehat dan 8% keluarga tidak sehat, dengan grafik sebagai berikut:

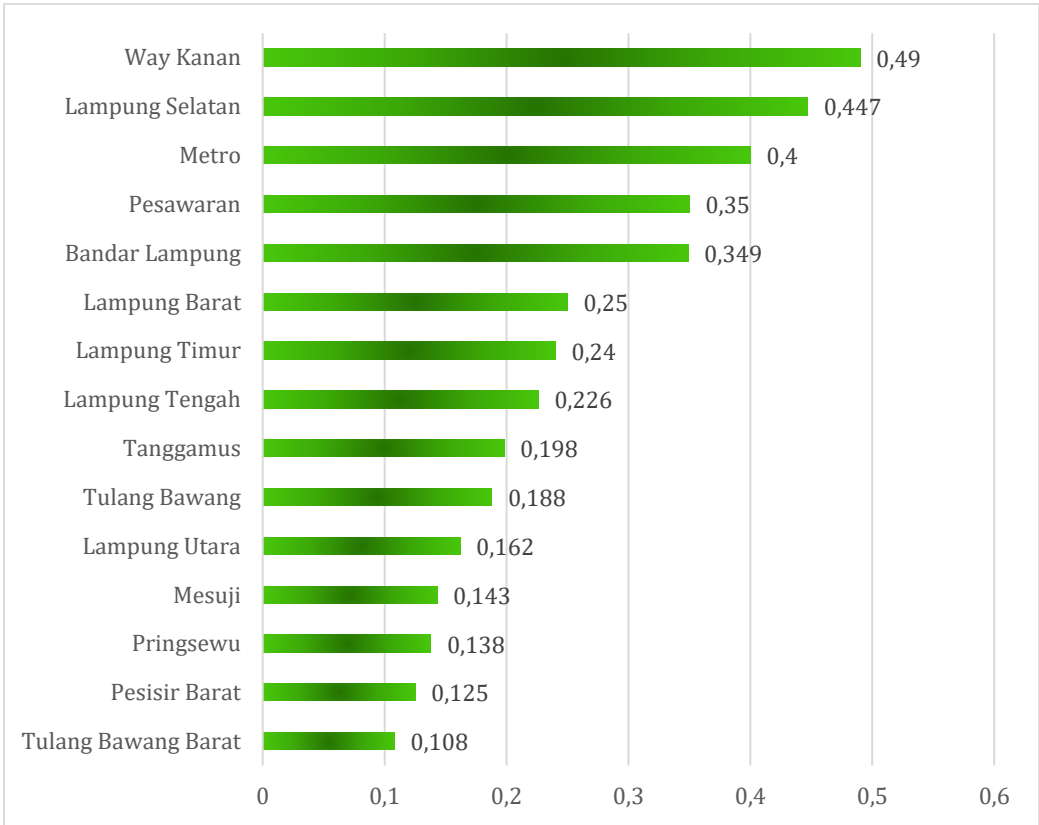
Gambar 2. 84 Persentase Indeks Keluarga Sehat (IKS) Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Hingga kini, belum ada kabupaten/kota yang mencapai indeks keluarga pra sehat maupun sehat, seluruh kabupaten/kota masih masuk dalam kelompok tidak sehat. Distribusi capaian Indeks keluarga sehat per kabupaten/kota tahun 2024, IKS tertinggi ada di Kabupaten Way Kanan mencapai 0,49 dan terendah ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya mencapai 0,108 dengan distribusi per kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik berikut:

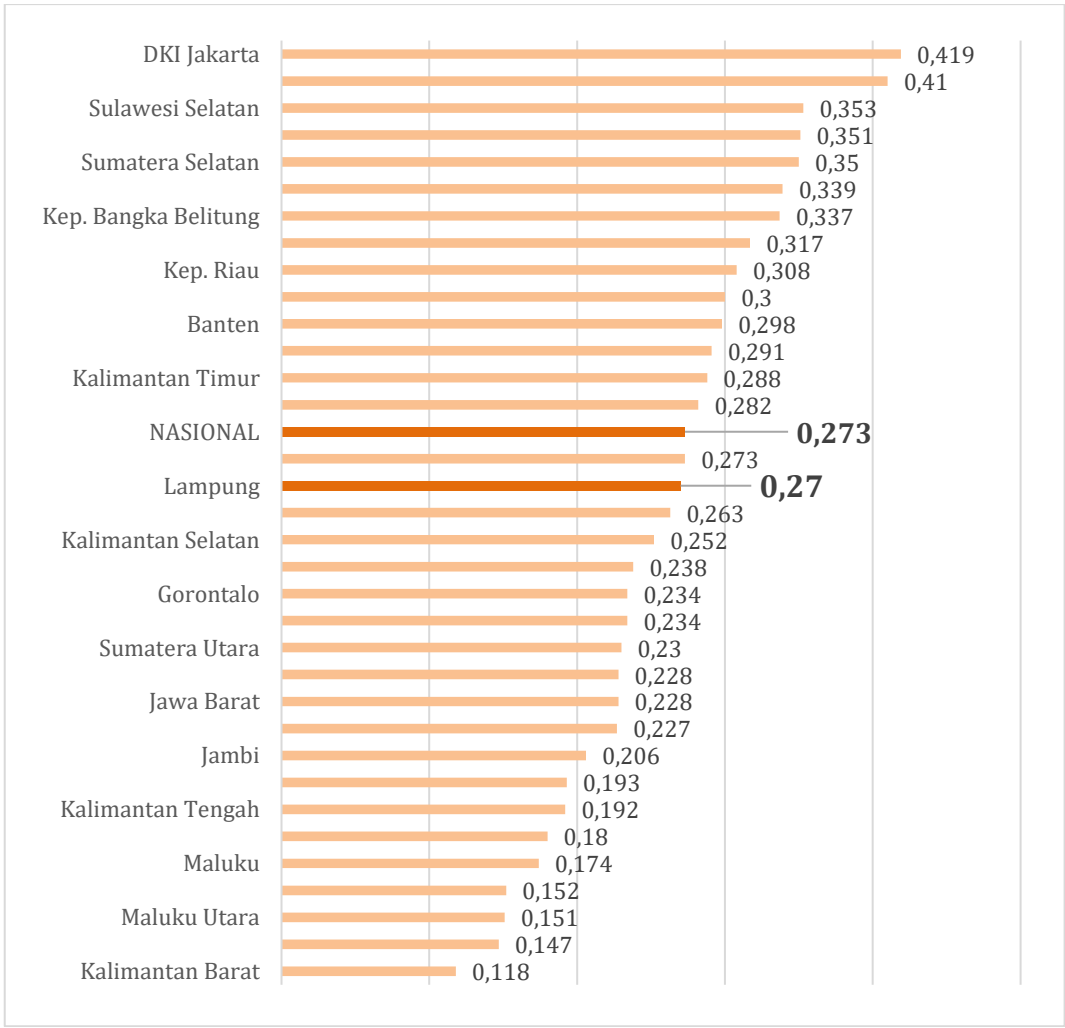
Gambar 2. 85 Distribusi Capaian Indeks Keluarga Sehat per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwasanya Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari pergeseran posisi peringkat Provinsi Lampung secara Nasional. Saat ini IKS Provinsi Lampung melebihi rata-rata indeks nasional. Indeks keluarga sehat Provinsi Lampung tahun 2024 adalah 0,27 sedangkan indeks keluarga sehat tingkat nasional yaitu 0,273; yang memiliki arti baru ada 27 Persen keluarga sehat di Provinsi Lampung.

Gambar 2. 86 Distribusi indeks keluarga sehat per provinsi tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

3. Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) mengukur jumlah kematian perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan dalam kurun waktu 42 hari setelah persalinan, yang disebabkan oleh komplikasi terkait kehamilan atau penanganannya. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) mengukur jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi adalah indikator sensitif terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat.

Gambar 2. 87 Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Provinsi Lampung



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

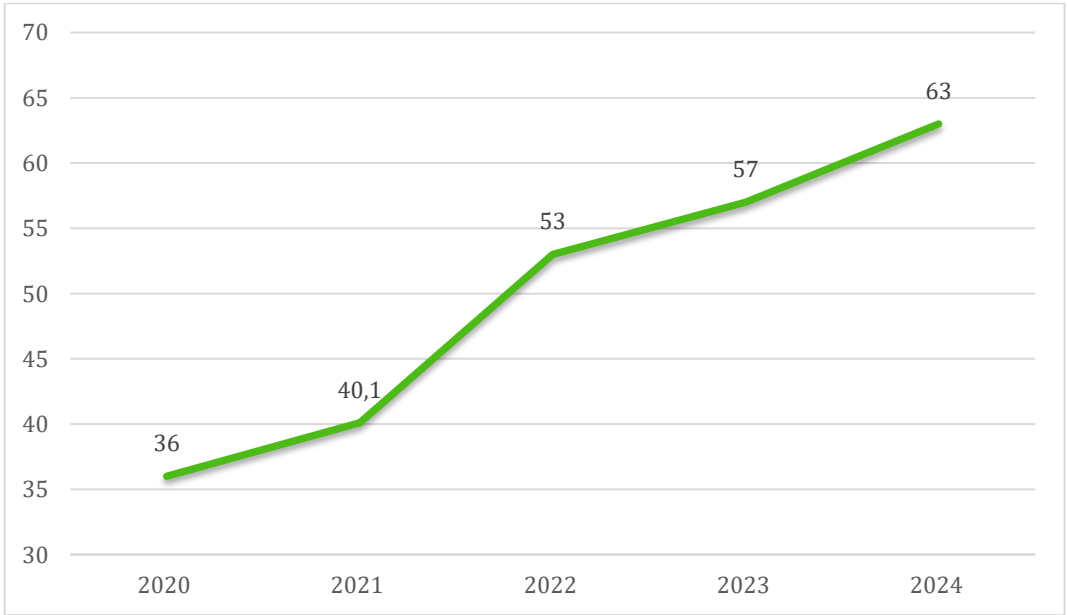
Berdasarkan gambar diatas, jumlah kasus kematian bayi mengalami peningkatan di tahun 2024. Jumlah kasus kematian bayi yang tinggi menandakan adanya masalah serius pada kesehatan ibu selama kehamilan, kualitas perawatan neonatal, praktik menyusui, sanitasi dan akses air bersih, serta status gizi masyarakat. Sedangkan untuk kasus kematian ibu menunjukkan data kasus yang cenderung stagnan, walaupun ada sedikit penurunan di tahun 2024. Kasus kematian ibu menandakan bahwa sistem kesehatan, khususnya layanan kesehatan ibu dan anak, masih memiliki banyak kelemahan. Ini bisa berupa kurangnya akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, ketersediaan tenaga medis yang terlatih (dokter kandungan, bidan), peralatan yang tidak lengkap, atau bahkan hambatan sosial dan budaya yang membuat ibu sulit mendapatkan pertolongan.

4. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia dan penyebab utama kematian dari agen infeksius. Target global dan milestone untuk penurunan insiden TBC dan kematian TBC telah ditetapkan sebagai bagian dari SDGs dan End TBC Strategi TBC pada akhir tahun 2030; yaitu penurunan 90% kematian TBC dan 80% penurunan insiden TBC (kasus baru dan kambuh per 100.000 penduduk per tahun) antara 2015 dan 2030.

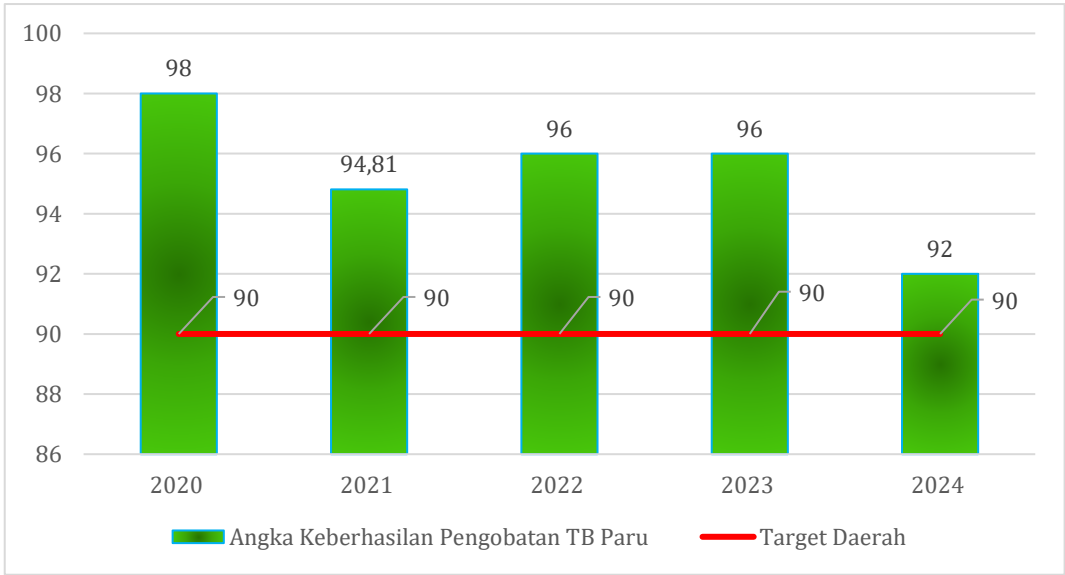
Berdasarkan data angka penemuan kasus TBC (CDR) semua kasus TB di Provinsi Lampung terlihat bahwa penemuan kasus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat, namun angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Semakin tinggi CDR mengartikan semakin banyak kasus TBC yang ditemukan secara dini dan diobati, sehingga menurunkan angka penularan di masyarakat. CDR yang rendah mengartikan kasus TBC masih banyak yang belum ditemukan sehingga mengindikasikan penularan TBC yang tinggi di Kabupaten/Kota tersebut.

Gambar 2. 88 Cakupan Penemuan Kasus TBC (CDR) Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2. 89 Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru (success rate) Provinsi Lampung 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025



Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi prioritas di wilayah pulau Sumatera Indonesia yang memiliki daya ungkit besar dalam capaian program *Tuberculosis* nasional dengan jumlah penduduk yang dimilikinya. Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi prioritas di Indonesia untuk melaksanakan strategi *Public Private Mix* (PPM) dimana sebelumnya salah satu masalah di program *tuberculosis* adalah rendahnya pencatatan dan pelaporan dari tingkat FKTP maupun FKRTL baik pemerintah dan swasta. Dengan penerapan strategi PPM, terjadi peningkatan capaian secara signifikan. Pada tahun 2021 sampai 2023 terjadi peningkatan keterlibatan fasyankes dalam program tuberkulosis, Rumah Sakit Pemerintah di angka 70% dan saat ini di tahun 2023 sudah 100%, Rumah Sakit Swasta dari 61% menjadi 95%, Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) dari 0% menjadi 28%, Klinik Pemerintah dari 0% menjadi 25% dan Klinik Swasta dari 3% menjadi 46%. Tidak hanya peningkatan jumlah fasyankes terjadi juga peningkatan dalam capaian angka kasus TBC. Capaian dari Rumah Sakit Pemerintah tahun 2021 berjumlah 1667 kasus sementara tahun 2023 sudah 2453 kasus ditemukan (masih bisa meningkat), dari rumah sakit swasta tahun 2021 berjumlah 2316 kasus pada tahun 2023 sudah ditemukan 4788 kasus (masih bisa meningkat), sementara dari TPMD, Klinik Swasta dan Pemerintah dari 47 kasus ditemukan tahun 2021 saat ini sudah ditemukan 815 kasus di tahun 2023 dan masih bisa mengalami peningkatan.

Komponen yang menyebabkan keberhasilan pengobatan TB paru (*success rate*) adalah sebagai berikut :

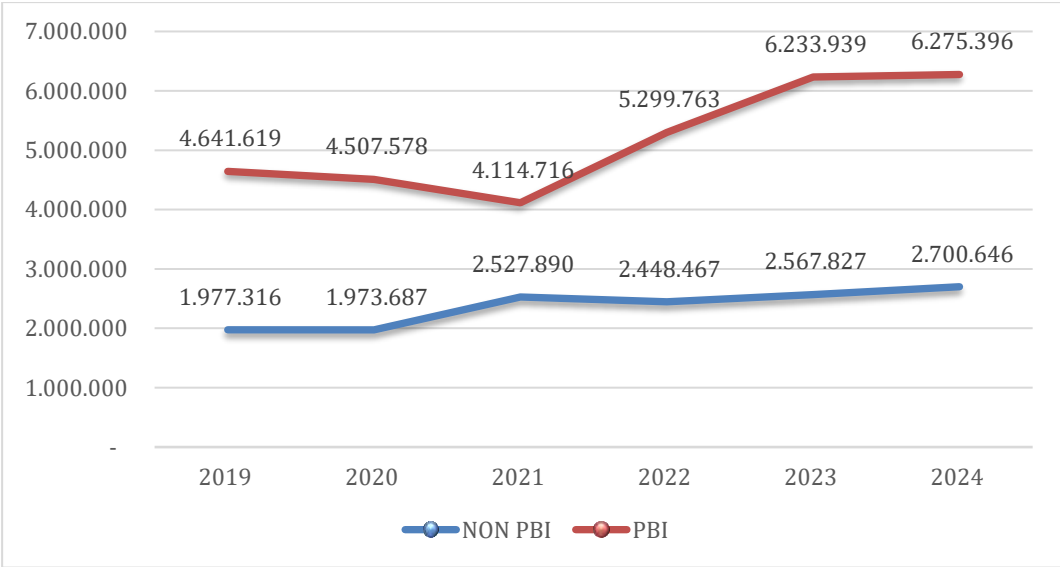
1. Berhasilnya petugas puskesmas dalam melakukan pendampingan pengawasan minum obat pasien yang ada di layanannya serta terjalin dengan baiknya komunitas atau mitra TBC yaitu ILS (Inisiatif Lampung Sehat) yang kader-kadernya memiliki tupoksi sebagai PMO (Pengawasan Menelan Obat) serta petugas investigasi kontak.
2. Tingkat kepatuhan tinggi pasien pengobatan salah satunya dapat dipengaruhi oleh adanya motivasi. Motivasi dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan berobat penderita.

- 
3. Obat-obatan dan layanan diberikan secara gratis, pusat pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat serta adanya keinginan dari dalam diri untuk sembuh.
 4. Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk pengobatan TB, dimana keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggota keluarganya yang sakit.

5. Cakupan Kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)

Untuk menjamin setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana amanat UUD 1945. Dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, Pemerintah memberikan bantuan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemberian bantuan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebelum tahun 2019, Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 melalui kontribusi penerimaan pajak rokok sebesar 37,5%, Pemerintah Provinsi Lampung ikut mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. Pembiayaan JKN untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Lampung dialokasikan untuk PBI yang berasal dari narapidana, penghuni panti sosial, guru honor murni SMK/SMA dan membantu pembiayaan PBI masyarakat miskin di Kabupaten/Kota. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Lampung meningkat hingga mencapai 35,65 persen, yaitu dari 6.618.935 jiwa pada tahun 2019 menjadi 8.976.042 jiwa di tahun 2024.

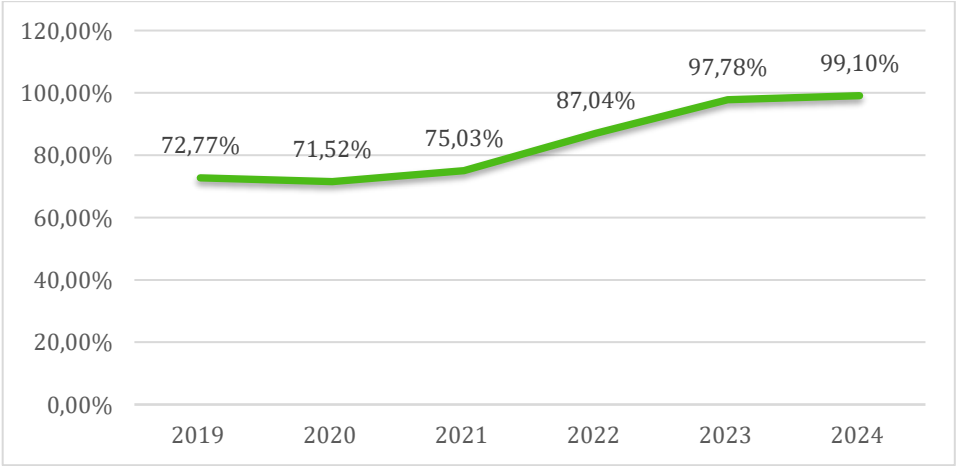
Gambar 2. 90 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2025

Dalam rangka mendukung kebijakan jaminan sosial secara nasional, khususnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Provinsi Lampung terus meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program JKN. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah penduduk Provinsi Lampung yang menjadi Peserta JKN terus mengalami peningkatan, ditahun 2019 sebesar 72,77 persen meningkat menjadi 99,10 persen ditahun 2024. Dengan capaian tersebut Provinsi Lampung menyandang predikat *Universal Health Coverage (UHC)*. Keberhasilan tersebut tidak terlepas partisipasi mandiri dari masyarakat dan dukungan pemerintah baik pusat, daerah dan Kabupaten/Kota.

Gambar 2. 91 Tren Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Peserta JKN Tahun 2019-2024



Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2025



Meskipun cakupan kepesertaan JKN yang tinggi menunjukkan upaya besar dalam menjangkau masyarakat, namun cakupan keaktifan peserta JKN juga tidak kalah pentingnya, karena merupakan akses nyata terhadap pelayanan kesehatan. Hanya dengan status kepesertaan yang aktif, masyarakat dapat merasakan manfaat riil dari JKN. Jika jumlah peserta yang tidak aktif tinggi, data kepesertaan menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari pemanfaatan layanan.

Berdasarkan data rilis BPJS, cakupan keaktifan peserta JKN Provinsi Lampung semester II tahun 2024 tercatat sebesar 67,43 persen. Bila dibandingkan antara cakupan kepesertaan JKN Provinsi Lampung sebesar 99,10 persen dengan cakupan keaktifan peserta JKN Provinsi Lampung di periode yang sama, terdapat selisih 31,67 persen. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat 31,67 persen peserta JKN yang tidak aktif kepesertaannya sehingga tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan.

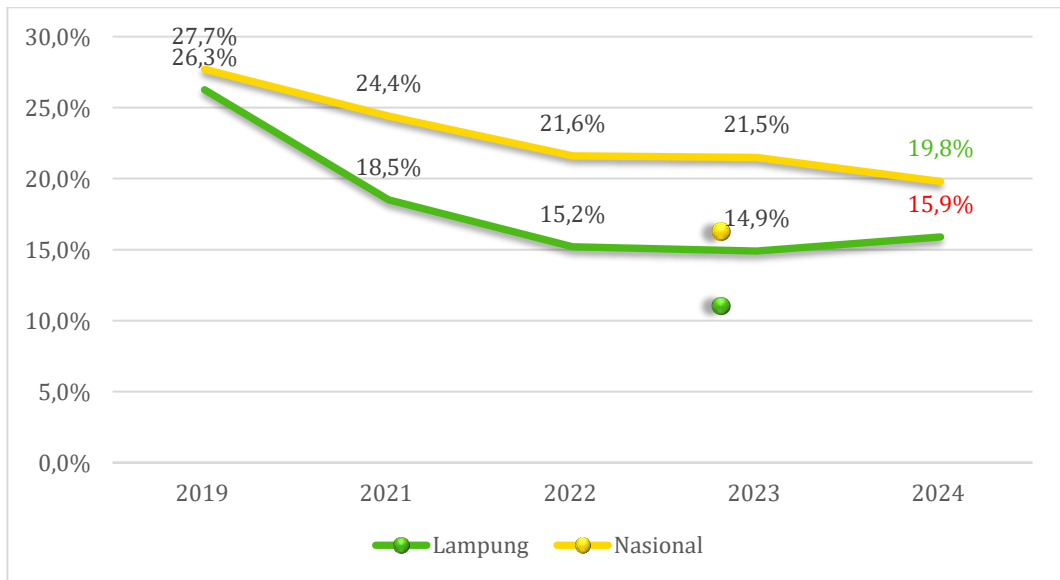
Peningkatan cakupan keaktifan peserta JKN bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota saja, namun peran serta masyarakat juga mutlak diperlukan. Edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban dalam membayar iuran JKN akan sangat membantu dalam upaya peningkatan cakupan keaktifan peserta JKN Provinsi Lampung.

6. Prevalensi Stunting

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kondisi status gizi masyarakat khususnya balita adalah dengan menggunakan indikator prevalensi stunting. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Gambar 2. 92 Prevalensi Stunting Provinsi Lampung dan Nasional 2013-2024



Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SKI 2023, SSGI 2022 dan 2024

Prevalensi stunting Provinsi Lampung terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, berdasarkan SSGBI di tahun 2019 Prevalensi *stunting* Provinsi Lampung sebesar 27,7 persen, ditahun 2020 data tidak tersedia dikarenakan tidak dilakukan survey pada masa pandemi Covid. Ditahun 2021 berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting sebesar 18,5 persen dan terus menurun ditahun 2022 sebesar 15,2 persen dan 14,9 persen ditahun 2023. Namun pada tahun 2024 melalui Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), tercatat prevalensi stunting Provinsi Lampung mengalami peningkatan menjadi 15,9 persen. Beberapa hal yang menyebabkan kejadian stunting di antaranya:

- a. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-

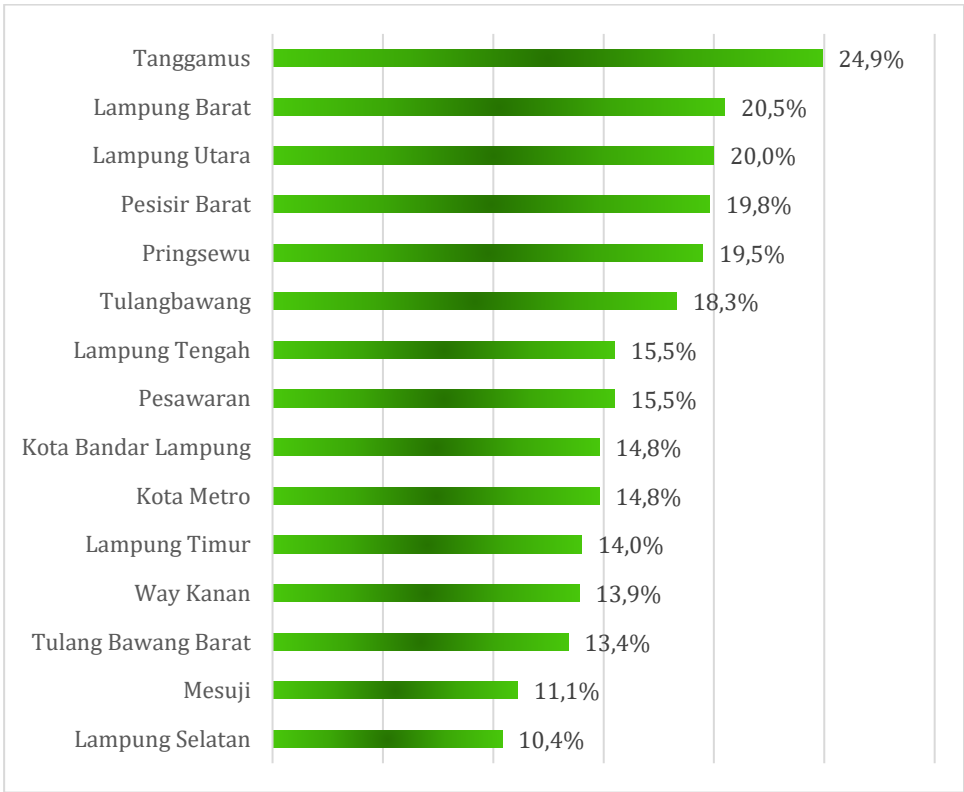


ASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

- b. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau *AnteNatal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dan anak belum mendapat akses memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi memadai serta masih terbatasnya akses layanan pembelajaran dini berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal terutama bagi keluarga berisiko stunting yang kebanyakan berasal dari keluarga miskin.
- d. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih Buang Air Besar (BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

Berdasarkan data prevalensi stunting Kabupaten/Kota terdapat sepuluh Kabupaten/Kota yang angka prevalensi stuntingnya meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu : Tanggamus, Pesisir Barat, Pringsewu, Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Pesawaran, Tulang Bawang, Metro, Mesuji.

Gambar 2. 93 Tren Prevalensi Stunting Kab/Kota Tahun 2024



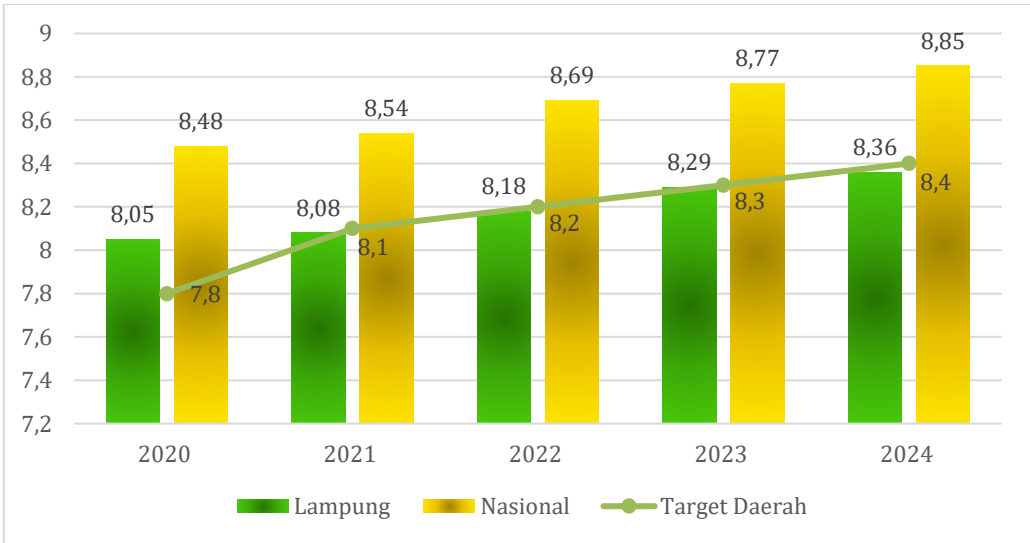
Sumber: Survey Status Gizi Indonesia 2024

2.1.2.3 Pendidikan yang Berkualitas yang Merata

1. Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

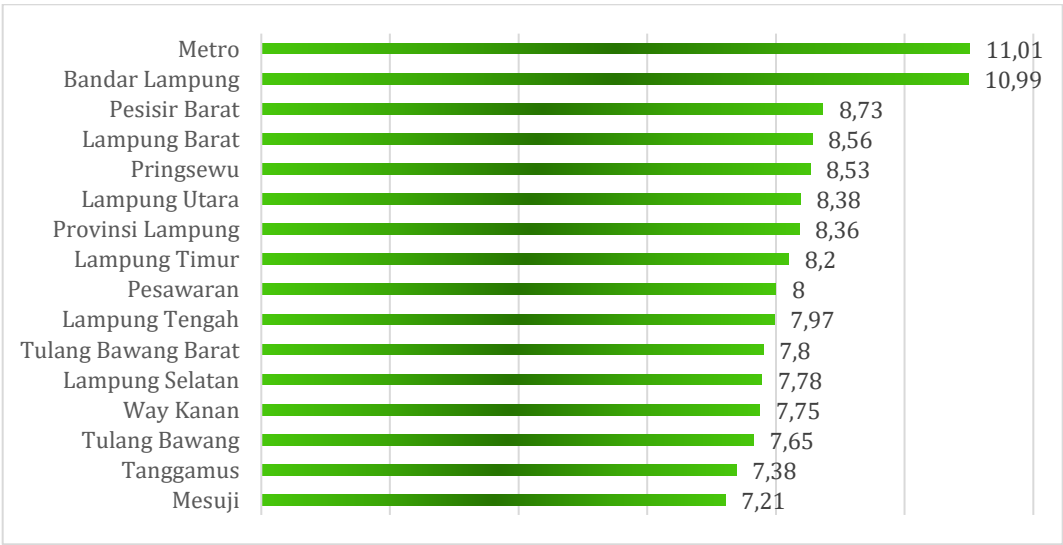
Gambar 2. 94 Capaian RLS Provinsi Lampung terhadap Target Daerah dan Capaian RLS Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Indonesia, 2025

Berdasarkan data Gambar 2.91 Capaian RLS Provinsi Lampung terhadap Target Daerah dan Capaian RLS Nasional kurun waktu tahun 2019-2024, terus menunjukkan peningkatan namun capaiannya belum mencapai target yang ditentukan dan angka tersebut masih dibawah capaian nasional. Berdasarkan angka tersebut rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas memiliki status pendidikan pada tingkat Sekolah menengah Pertama (kelas 2).

Gambar 2. 95 Capaian RLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

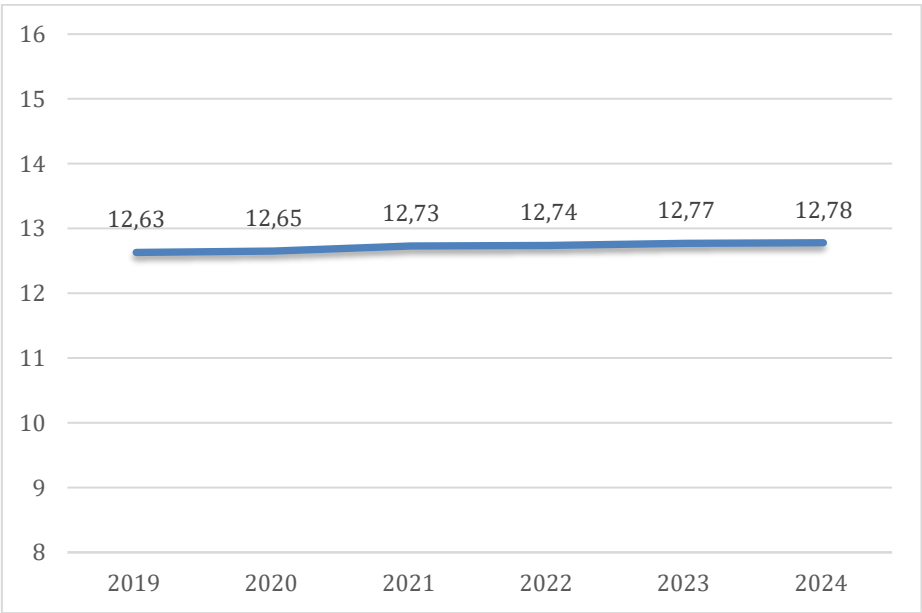
Bila melihat capaian rata-rata lama sekolah di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung hanya dua Kota yang memiliki capaian rata-rata lama sekolah tingkat menengah atas yaitu Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan capaian yang lebih baik.

2. Harapan Lama Sekolah

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, dapat digunakan indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Gambar 2. 96 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung, 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Perkembangan HLS dan RLS Provinsi Lampung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, HLS Provinsi Lampung mencapai 12,78 atau bisa dikatakan rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,78 tahun atau setara dengan Diploma I. Sedangkan RLS Lampung pada tahun 2024 telah mencapai 8,36 atau secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,36 tahun atau telah menamatkan kelas VIII/kelas 2 SMP..

3. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Selain itu, indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

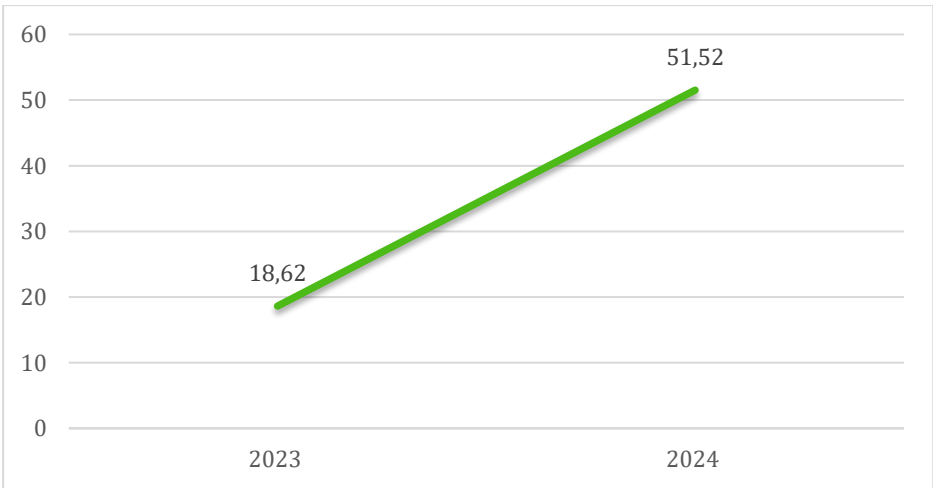
Gambar 2. 97 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Angka Partisipasi Sekolah di provinsi Lampung khususnya jenjang SMA/SMK/MA (Kelompok usia 16-18 tahun) terus menunjukkan peningkatan namun nilai peningkatannya masih sangat kecil (+0,6 poin) dan ditahun 2024 baru mencapai 72,35 persen (katagori rendah). Capaian ini menggambarkan bahwa dari 100 anak usia 16-18 tahun terdapat 27 anak yang tidak bersekolah. Selain angka partisipasi sekolah menengah (16-18 tahun), Provinsi juga memiliki kewenangan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan khusus (4-18 Tahun).

Gambar 2. 98 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Usia 4 - 18 Tahun Provinsi Lampung Tahun 2-23 - 2024



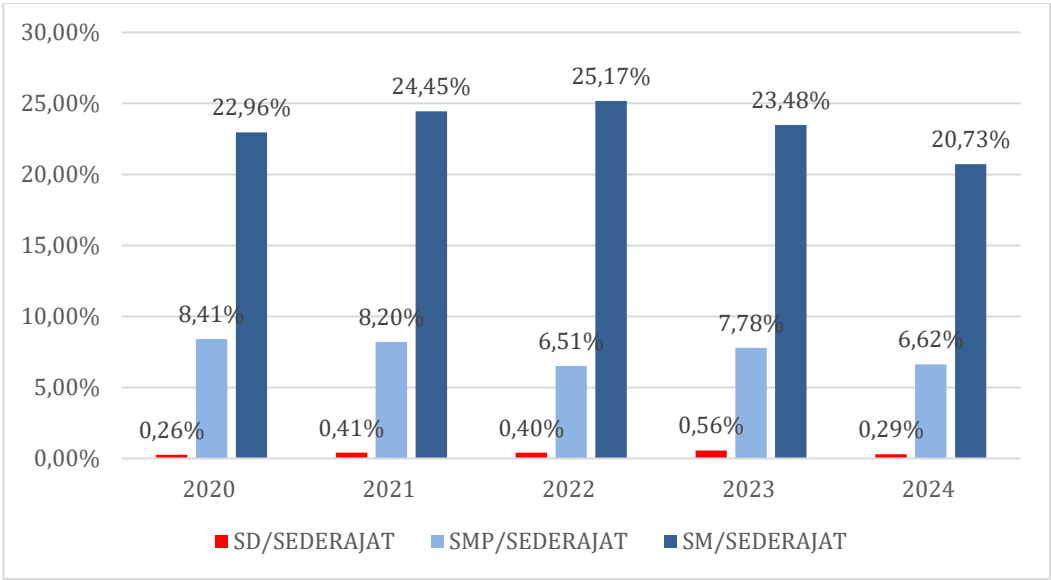
Sumber : *Rapor Pendidikan, Kemendibud Ristek, 2025*

Dalam konteks pendidikan khusus, APS memberikan gambaran tentang seberapa banyak anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan, baik secara inklusif di sekolah reguler maupun di sekolah khusus seperti SLB. Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan, terlihat pada peningkatan angka partisipasi sekolah pendidikan khusus (usia 4-18 tahun) dari tahun 2023 sebesar 18,62 persen meningkat menjadi 51,52 persen ditahun 2024. Namun capaian tersebut masih tergolong rendah

4. **Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)**

Salah satu tantangan pembangunan pendidikan Indonesia terkait partisipasi sekolah adalah masih adanya anak yang tidak sekolah (ATS). Anak Tidak Sekolah adalah persentase penduduk usia jenjang pendidikan tertentu yang tidak sedang bersekolah. Penduduk yang sedang prasekolah dianggap sebagai bersekolah. Penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi namun telah memiliki ijazah SMA ke atas dianggap sebagai bersekolah. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.

Gambar 2. 99 Angka Anak Tidak Sekolah Provinsi Lampung, Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Pendidikan, BPS, 2020,2021,2022,2023,2024

Berdasarkan Gambar 2.96, terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur, semakin meningkat pula persentase anak tidak sekolah. Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada di kelompok umur 16-18 tahun, dimana dari 100 anak berumur 16-18 tahun, 21 anak di Provinsi Lampung tahun 2024 diantaranya tidak bersekolah

5. Angka Literasi / Numerisasi

Nilai skor PISA, hanya didapat nilainya secara Nasional, belum dapat diturunkan menjadi nilai masing-masing Provinsi. Oleh sebab itu untuk menilai kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter, Provinsi Lampung menggunakan Asesman Kompetensi Literasi, numerasi dan pendidikan karakter yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional yang diambil dari Platform Rapor Pendidikan Provinsi Lampung, pada tahun 2024, tingkat literasi siswa menengah/ sederajat baik swasta maupun negeri telah mencapai kompetensi minimum atau sebesar 68,28

persen dengan katagori “Sedang”, begitu juga dengan capain literasi Sekolah menengah kejuruan sebesar 55,74 persen. Untuk capaian literasi sekolah luar biasa, untuk SMALB sebesar 51,28 dengan katagori “Kurang” , SMPLB sebesar 62,5 dengan katagori “sedang” dan SDLB sebesar 74,54 dengan katagori “sedang”. Kemampuan Numerasi untuk SMA umum semua sebesar 51,96 dengan katagori “sedang”, SMK umum semua sebesar 55,74 dengan katagori “kurang”, SMA LB sebesar 64,09 dengan katagori “kurang”, SMP LB sebesar 50,97 dengan katagori “sedang”, SD LB sebesar 70,9 dengan katagori “sedang”. Untuk pembentukan karakter siswa, assesmen iklim kebhinekaan digunakan untuk mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian. Capaian Iklim kebinekaan di Provinsi Lampung untuk SMA, SDLB, SMPLB dan SMK sudah mencapai katagori “Baik”, namun perlu perhatian lebih untuk SMALB yang masih masuk katagori “sedang”

Tabel 2. 49 Hasil Assesmen Nasional terkait kompetensi minimum dan Survei Karakter Di Provinsi Lampung Tahun 2023-2024

Asesmen Nasional	2023	2024
Kemampuan Literasi		
SMA	52,31	68,28
SMK	41,4	55,74
SDLB	57,89	74,54
SMPLB	57,89	62,5
SMALB	24,14	51,28
Kemampuan Numerasi		
SMA	42,96	51,96
SMK	34,16	55,74
SDLB	55,26	70,9
SMPLB	50	50,97
SMALB	20,69	64,09
Iklim Keamanan		
SMA	69,45	71,2
SMK	70,24	66,33
SDLB	76,1	75,24
SMPLB	76,23	68,02
SMALB	70,63	63,74
Iklim Kebinekaan		
SMA	61,64	66,63
SMK	51,5	53,5
SDLB	49,51	55,16
SMPLB	52,14	55,24

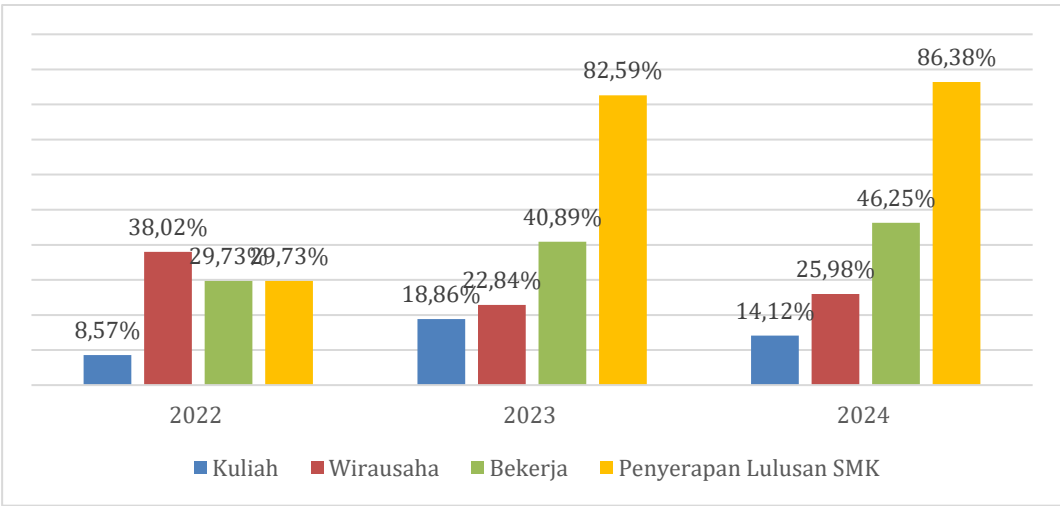
Asesmen Nasional	2023	2024
SMALB	49,78	51,43
Iklim Inklusivitas		
SMA	53,31	55,91
SMK	52,17	54,57
SDLB	58,09	56,49
SMPLB	57,97	58,75
SMALB	56,18	55,29

Sumber: *Rapor Pendidikan Kemendikbud*

6. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan

Lulusan sekolah kejuruan atau SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dipersiapkan untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Mereka memiliki keterampilan praktis yang lebih banyak daripada lulusan SMA, sehingga lebih siap untuk langsung terjun ke dunia kerja. Namun, lulusan SMK juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi wirausaha

Gambar 2. 100 Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Lampung Tahun 2022 – 2024



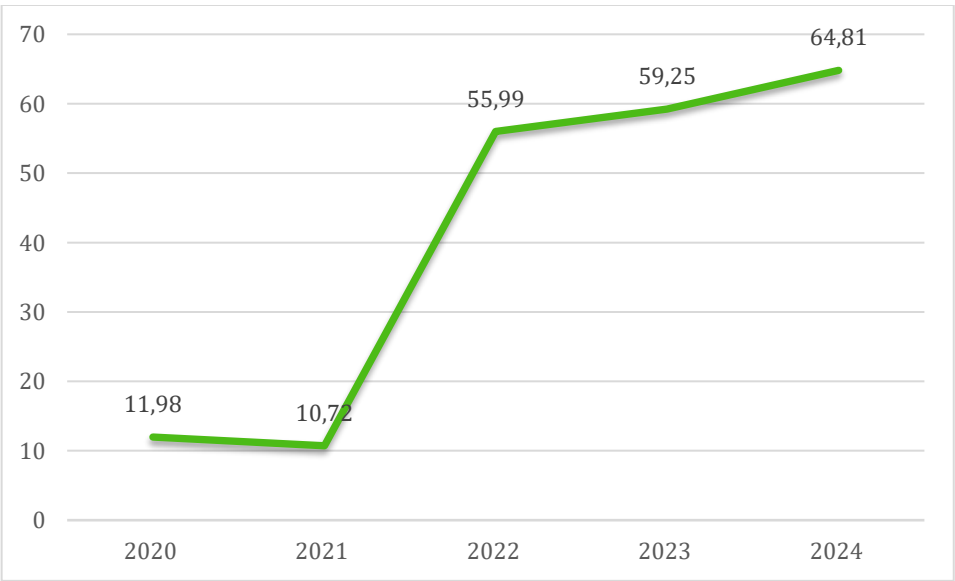
Sumber: *Rapor Pendidikan Kemendikbud*

Berdasarkan grafik diatas dari tahun 2022 -2024 sebagian besar lulusan SMK bekerja, melanjutkan pendidikan dan berwirausaha. Hanya sekitar 14 persen yang tidak terserap. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan sekolah dalam mempersiapkan siswanya. Grafik diatas juga menunjukan bahwa ditahun 2024 sebagian besar lulusan SMK melanjutkan bekerja (46,25 persen), diikuti dengan wirausaha (25,98 persen) dan melanjutkan studi 14,12 persen). SMK juga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dalam pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat digunakan indikator indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir sangat berfluktuatif, dengan capaian di tahun 2024 sebesar 64,81 persen dengan katagori sedang dan angka ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 59,25 persen. Indikator-indikator penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencakup pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kualitas sumber daya tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, dan keterlibatan serta jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan berbasis SNP juga menjadi salah satu indikator yang dinilai dan belum banyak OPD yang punya perpustakaan, beberapa sekolah juga belum punya, termasuk perpustakaan di tingkat desa (belum seluruhnya memiliki).

Gambar 2. 101 Tren Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



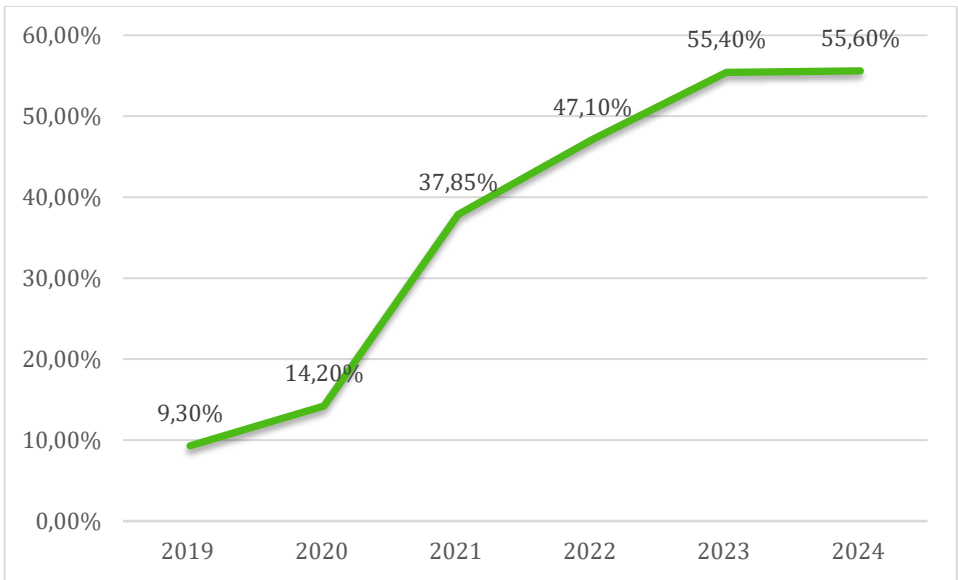
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025

Provinsi Lampung terus mengupayakan strategi peningkatan literasi dilaksanakan melalui pembudayaan literasi keluarga, satuan pendidikan, dan pembudayaan literasi masyarakat. Sinergi lintas pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam peningkatan

budaya literasi. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang daerah dengan melaksanakan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif.

Salah satu upaya meningkatkan literasi masyarakat adalah meningkatkan pengunjung perpustakaan yang telah mendaftar jadi anggota perpustakaan baik secara online maupun offline yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota perpustakaan. Capaian pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2019 sebesar 9,3 persen meningkat menjadi 55,6 persen ditahun 2024 dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,2 persen setiap tahunnya.

Gambar 2. 102 Persentase Pengunjung Perpustakaan yang menjadi Anggota Perpustakaan Tahun 2019 - 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2025

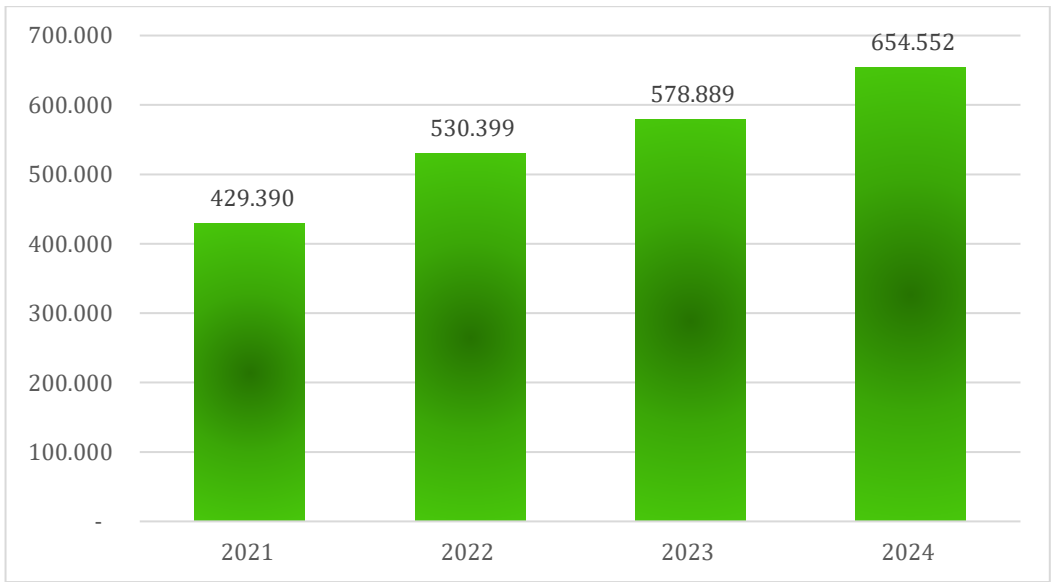
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm),

Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Ketenagakerjaan, Provinsi Lampung memiliki angka kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS sebanyak 654.552 orang pada tahun 2024. Dibandingkan dengan tahun 2021, angka tersebut naik sebesar 52,4 % atau 225.162 orang.

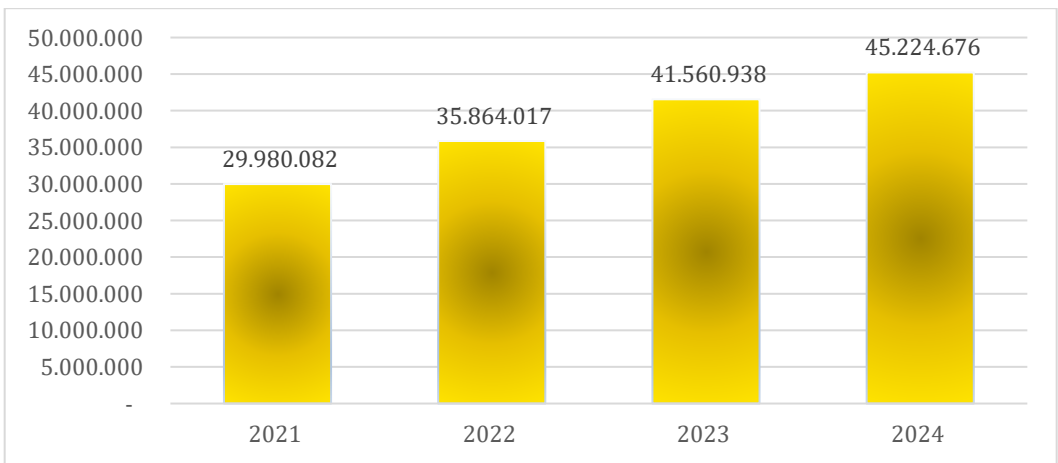
Gambar 2. 103 Jumlah Peserta Aktif Jaminan Sosial Tenaga kerja Provinsi Lampung 2021-2024



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2025

Jika dibandingkan dengan data peserta jaminan sosial tenaga kerja nasional, kenaikan jumlah peserta jaminan sosial stabil setiap tahunnya, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 101.009 orang dibandingkan Tahun 2023, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 48.490 orang. .

Gambar 2. 104 Jumlah Peserta Aktif Jaminan Sosial Tenaga kerja Nasional 2021-2024



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2025

2. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena disfungsi sosial, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, atau faktor-faktor lain, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan mandiri. Mereka membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah atau lembaga sosial untuk dapat kembali berdaya dan menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pelayanan kesejahteraan sosial hadir sebagai jaring pengaman untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan PPKS dapat diberdayakan untuk kembali mandiri, produktif, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Penanganan PPKS kewenangan Provinsi dilakukan melalui pemenuhan SPM urusan sosial didalam panti maupun pemberian bantuan kepada penerima manfaat diluar panti. Pemenuhan hak dasar hingga pelatihan untuk tujuan pemberdayaan PPKS dilakukan melalui pelayanan di panti sosial baik milik pemerintah ataupun masyarakat

Tabel 2. 50 PPKS Tertangani di Provinsi Lampung

JENIS PPKS	2020			2021			2022			2023			2024		
	Jumlah	Ditangani	%	Jumlah	Ditangani	%	Jumlah	Ditangani	%	Jumlah	Ditangani	%	Jumlah	Ditangani	%
Anak Terlantar	8.536	3.354	39,3	8.536	3.445	40,4	68.409	670	1,0	21.313	1.870	8,8	8.536	565	6,6
Penyandang Disabilitas	38.228	2.271	5,9	38.228	2.281	6,0	14.434	752	5,2	14.335	2.059	14,4	38.228	920	2,4
Lanjut Usia	396.155	1.827	0,5	396.155	1.837	0,5	76.962	23.377	30,4	53.714	14.504	27,0	39.615	770	1,9
Tuna Sosial	505	25	5,0	505	50	9,9	347	25	7,2	408	25	6,1	505	25	5,0
Jumlah JIwa	443.424	7.477	1,69	443.424	7.613	1,72	160.152	24.824	15,50	89.770	18.458	20,56	86.884	2.280	2,62

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa penanganan PPKS di Provinsi Lampung memiliki tren positif sejak tahun 2020 di 1,69 persen hingga 20,56 persen di 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana jumlah PPKS tertangani hanya berjumlah 2280 orang dari jumlah PPKS 86.884 orang, dengan kata lain hanya sejumlah 2,62 persen PPKS yang tertangani. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah populasi PPKS yang sangat besar dibandingkan jumlah penanganan yang mampu dilakukan Dinas Sosial Provinsi Lampung dari tahun ke tahun. Renovasi panti sosial milik provinsi dapat menambah kapasitas panti sehingga dapat menambah jumlah



PPKS yang terlayani di panti. Namun juga perlu didukung dengan pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk penanganan PPKS didalam panti.

2.1.2.5 Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 didefinisikan sebagai suatu keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang pengukurannya didasarkan pada 3 dimensi, yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama.

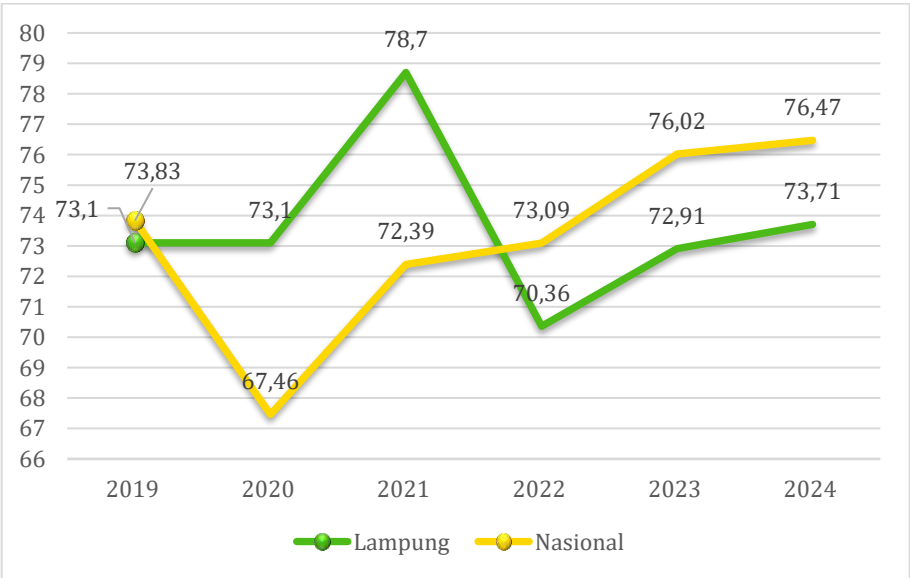
Dimensi toleransi mencakup sikap saling menghargai, tidak memaksakan agama tertentu, dan kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Dimensi kesetaraan mencakup kesetaraan hak dan kewajiban antar umat beragama, serta tidak adanya diskriminasi berdasarkan agama. Dimensi ketiga, yaitu Kerjasama mencakup kolaborasi antar umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pembangunan.

Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Indeks KUB menggambarkan kuatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan

pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Kondisi toleransi di Provinsi Lampung terbilang cukup baik, dibandingkan kondisi nasional maupun provinsi lainnya. Dibandingkan tren secara nasional, angka Indeks Toleransi Provinsi Lampung hanya sedikit di bawah angka Indeks Toleransi Nasional. Pada tahun 2022, angka Indeks Toleransi Provinsi Lampung menempati urutan ke-25. Posisi itu turun tiga peringkat dibandingkan tahun 2021 ketika Provinsi Lampung menempati urutan ke-22. Hal itu tentu perlu menjadi introspeksi bagi seluruh pemangku kerukunan di Provinsi Lampung. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka Indeks Toleransi di Provinsi Lampung.

Gambar 2. 105 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025

Gambar 2.102 menampilkan capaian IKUB Provinsi Lampung dimana terlihat pada tahun 2020 dan 2021 capaian IKUB Provinsi Lampung lebih baik dari kondisi nasional. Namun ditahun 2022 terjadi penurunan yang mengakibatkan capaian Provinsi Lampung lebih rendah dari capaian nasional. Capaian IKUB Provinsi Lampung kembali membaik di tahun 2023 dan 2024 dengan memiliki tren positif, naik dari 70,36 di 2020 menjadi 73,71 di tahun 2024.

Kanwil Kemenag Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan skors indeks KUB adalah sebagai berikut:

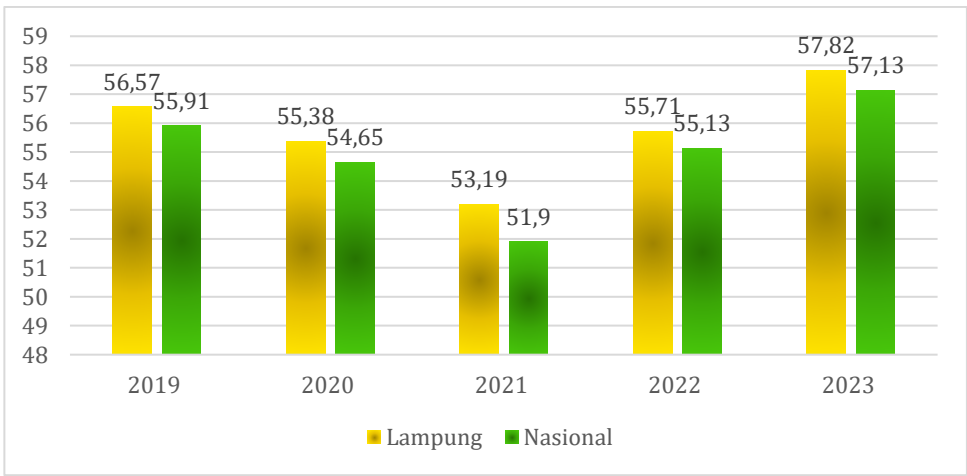
- 
1. Memaksimalkan usaha pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.
 2. Memberikan pelatihan tentang cara menahan diri dari tindakan di luar hukum, dan memberikan advokasi hukum bagaimana menggunakan jalur yang tidak melanggar hukum dalam menangani potensi konflik yang dapat meningkat menjadi manifest.
 3. Membantu usaha yang dilakukan Pemerintah dan Pemda dalam pemeliharaan 48 kerukunan dan pengantisipasi konflik.
 4. Sebagai bangsa majemuk, tak dipungkiri ada banyak potensi integrasi dan potensi konflik di dalam masyarakat Indonesia. Beberapa potensi konflik/ketidakrukunan telah memanifest di beberapa daerah, namun secara nasional kondisi kerukunan berjalan baik (rukun).
 5. Ada beberapa faktor keagamaan yang dapat mempengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan lebih berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik).
 6. Pemerintah telah dan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan.
 7. Masyarakat (termasuk elemen LSM, media, dan mahasiswa) perlu memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan/keharmonisan masyarakat sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing. Selain itu, upaya dalam menciptakan kehidupan yang religius, berbudaya, aman, dan damai dapat terlaksana dengan memberdayakan kelembagaan kesejahteraan sosial dan keagamaan seperti pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah (rumah ibadah, pondok pesantren, TPA) dan bantuan kepada tokoh agama.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan

pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK disusun Kemendikbud bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan , warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender.

Gambar 2. 106 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023

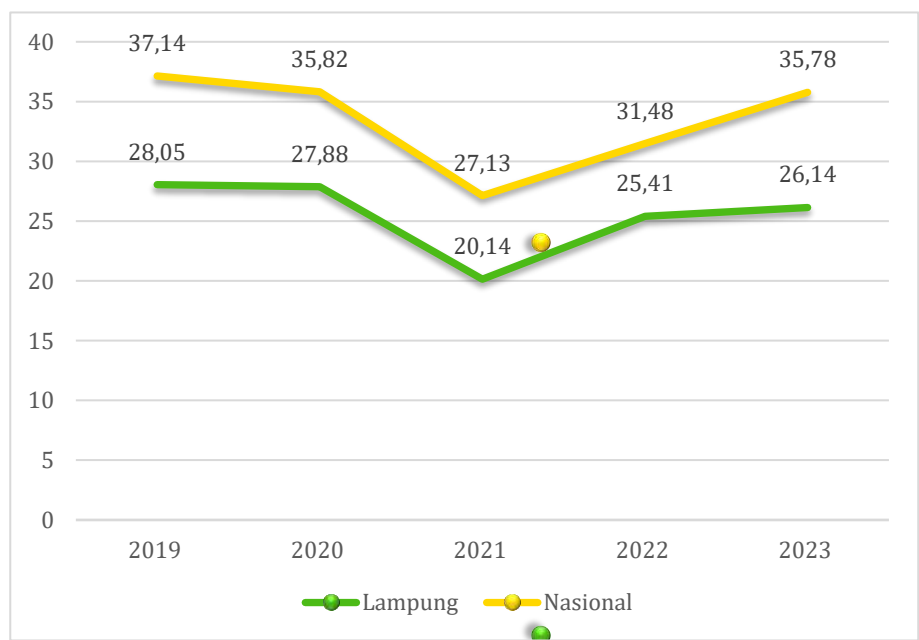


Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 53,19 persen menjadi 57,82 persen ditahun 2023. Capaian IPK Provinsi Lampung melebihi angka nasional setiap tahunnya. Namun masih terdapat kendala pada registrasi terhadap warisan budaya benda meliputi : bangunan, struktur, dan situs cagar budaya, serta warisan budaya tak benda. Permasalahan lainnya adalah kurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya serta masuknya ideologi radikalisme seperti gerakan yang berusaha mengubah total tatanan sosial yang ada di masyarakat.

3. Dimensi Ekspresi Budaya

Gambar 2. 107 Dimensi Ekspresi Budaya Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2025

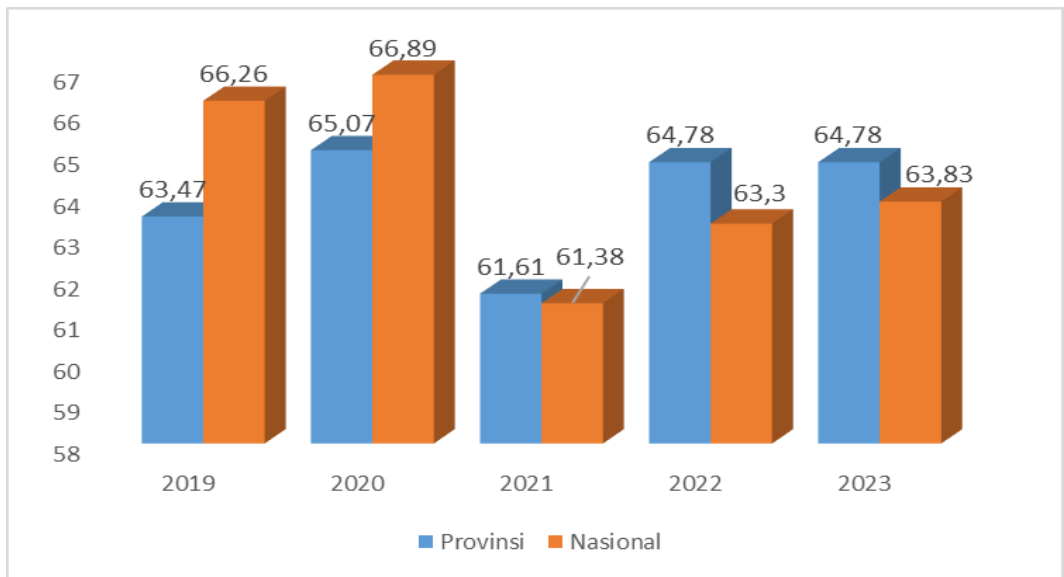
Provinsi Lampung konsisten dibawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar -9,64 poin di tahun 2023. Potensi penyebab ketertinggalan Provinsi Lampung di banding nasional minimnya infrastruktur budaya seperti sanggar seni terbatas, anggaran untuk program budaya tidak memadai, dokumentasi kegiatan budaya tidak tercatat dalam statistik resmi, atau aktivitas budaya terkonsentrasi di Bandar Lampung.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung tahun 2022 adalah 64,78, angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (69,57). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung belum tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai 93,11% dengan predikat kinerja kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 108 Capaian IPA Provinsi Lampung terhadap target daerah dan Capaian Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung, BPS dan BPS Provinsi Lampung 2023.

Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 64,78. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (61,61), maka terjadi peningkatan mencapai 3,17 poin. Walaupun terjadi peningkatan, masih belum dapat mengejar capaian Tahun 2020 (65,07), sehingga dari grafik terlihat bahwa IPA Provinsi Lampung tahun 2019-2020 masih berada di bawah capaian nasional, sedangkan pada tahun 2021 capaian IPA Provinsi Lampung berada di atas capaian nasional (61,38) dan pada Tahun 2022 juga melampaui capaian nasional (63,3) yaitu 64,78. Walaupun capaian IPA Provinsi Lampung telah berada di atas capaian nasional, akan tetapi capaian ini masih rendah sehingga Provinsi Lampung harus tetap bekerja lebih keras untuk dapat mengejar ketertinggalan ini. Untuk meningkatkan nilai IPA di Provinsi Lampung, maka harus diamati dari setiap variabel pembentuknya.

Bila diamati secara nasional, klaster pembentuk IPA dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 adalah Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, sedangkan capaian terendah pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Pada tahun 2022, semua klaster penyusun IPA Nasional mengalami kemajuan bila dibandingkan capaian Tahun 2021.

Indeks Perlindungan Anak berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan keberhasilan suatu wilayah dalam melindungi anak-anaknya, termasuk dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi. Jumlah dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung dapat terlihat pada gambar 2.106 dibawah. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2020 hingga 2023, penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak telah dilakukan 100 persen oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

Gambar 2. 109 Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



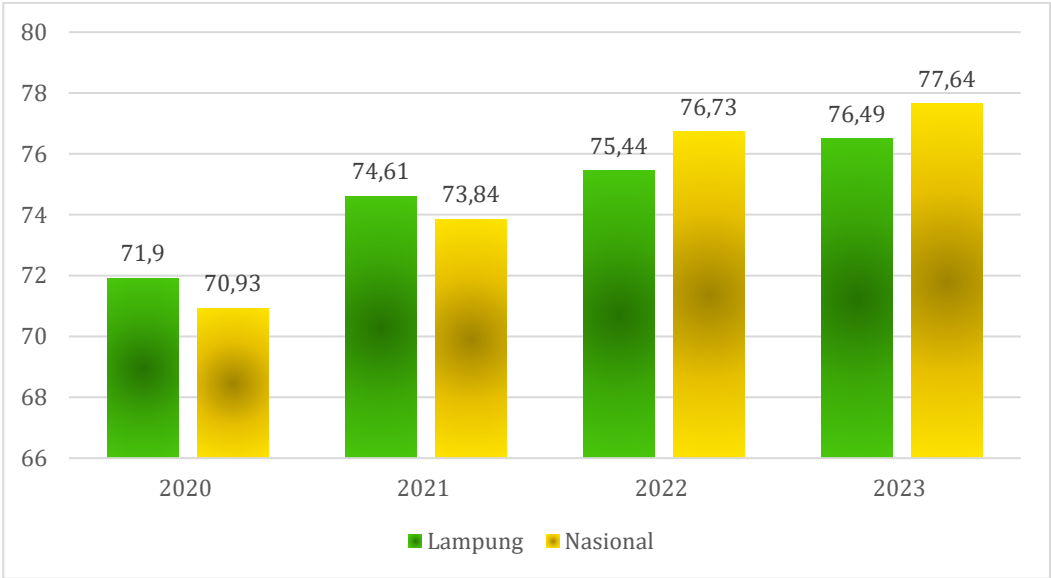
Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diwujudkan. Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi ruang pertama dan utama, yang turut menentukan kualitas hidup tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, nilai-nilai kesetaraan gender mulai dikenalkan, untuk kemudian diinternalisasikan dalam gerak tiap anggota keluarganya baik di rumah maupun di masyarakat. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dengan keseluruhan dimensi dan indikatornya, dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga. Berdasarkan data BPS indeks kualitas keluarga Provinsi Lampung Tahun 2022 sebesar 75.44 persen, dan mengalami kenaikan menjadi 76,49

persen ditahun 2023. Namun capain tersebut berada diatas angka nasional.

Gambar 2. 110 Tren Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber: Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Indeks Kualitas Keluarga dibentuk berdasarkan 5 Dimensi: (1) Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) yang termasuk kategori kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak; (2) Dimensi Kualitas Ketahanan Fisiki (KKF); (3) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE); (4) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP); dan (5) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB). Pencapaian dimensi tertinggi pembentuk IKK Provinsi Lampung adalah kualitas legalitas struktur dengan capaian sebesar 88,33 persen sedangkan nilai terendah pada dimensi Kualitas ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) sebesar 66,22 persen. Dengan perolehan angka tersebut Provinsi Lampung masuk dalam kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak (50,00 <IKK< 75,00).

Tabel 2. 51 Pencapaian Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

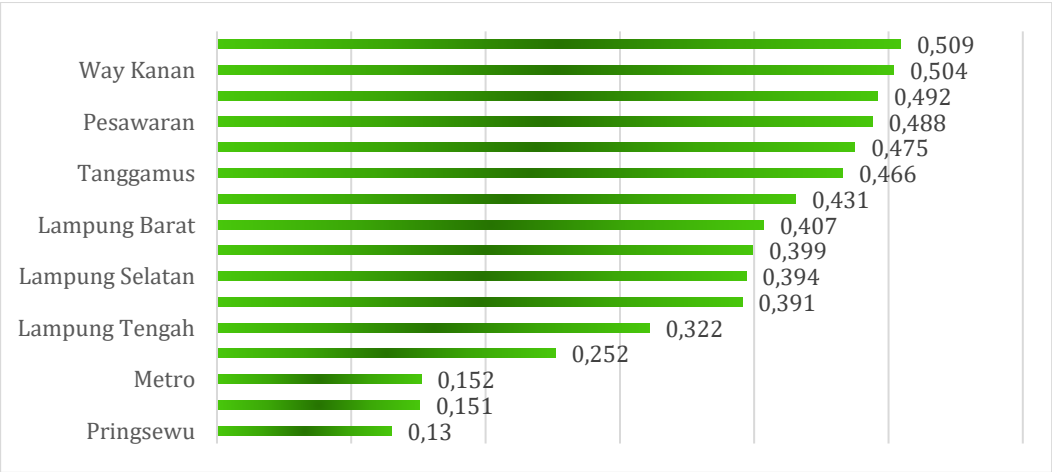
No	Dimensi	2020	2021	2022	2023
1	Kualitas Legalitas Struktur (KLS)	86,57	88,5	89,3	88.33
2	Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	69,59	76,44	74,98	76
3	Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	71,76	70,83	70,08	73.23
4	Kualitas ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)	66,22	64,83	71,27	72.76
5	Kualitas Ketahan Sosial-Budaya (KKSB)	58,66	66,23	65,74	66.22
	IKK	71,9	74,61	75,44	76.49

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran Ketimpangan Gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh Ketimpangan Gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,399 di tahun 2024 atau menurun sebesar 0,038 poin dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender. Dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara Nasional di tahun 2024 sebesar 0,421, Provinsi Lampung lebih rendah sebesar 0,022 poin. Perbaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan capaian dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan.

Gambar 2. 111 Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

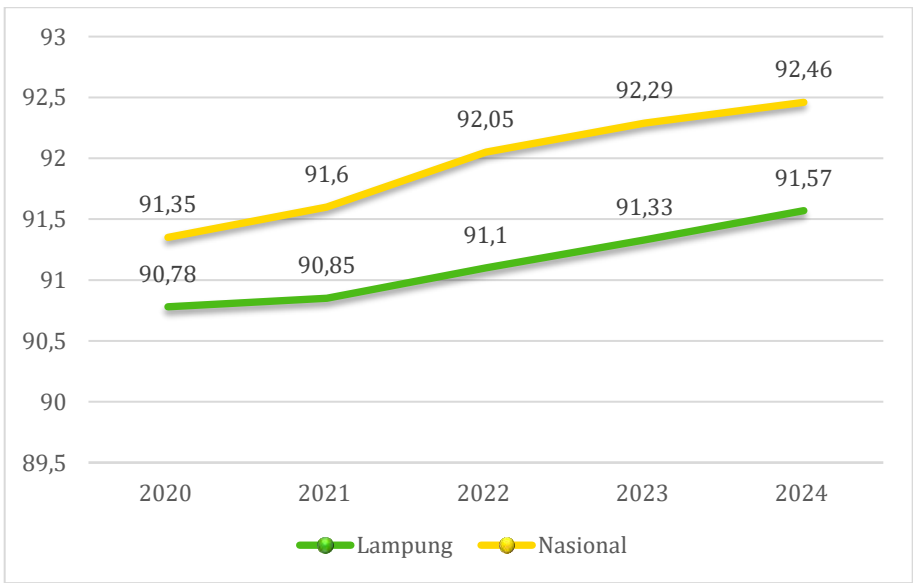
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator yang dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) menganalisis ketimpangan gender dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020 IPG Provinsi Lampung sebesar 90,78 persen dan naik menjadi 90,85 persen di tahun 2021. Capaian ini

lebih rendah dari IPG nasional tahun 2021 yang sebesar 91,6 persen.

Kualitas SDM juga terukur melalui perbandingan capaian IPM laki-laki dan perempuan yaitu melalui indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender). Peningkatan ini membawa IPG mendekati angka 100, yang artinya semakin baik karena ketimpangan IPM perempuan dan IPM laki-laki semakin hilang. Capaian IPG Provinsi Lampung pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 90,78 menjadi sebesar 91,57 ditahun 2024, akan tetapi capaian tersebut masih berada dibawah capaian nasional sebesar 92,46. Tren pertumbuhan IPG di Provinsi Lampung pada periode ini dapat dilihat pada grafik berikut

Gambar 2. 112 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024



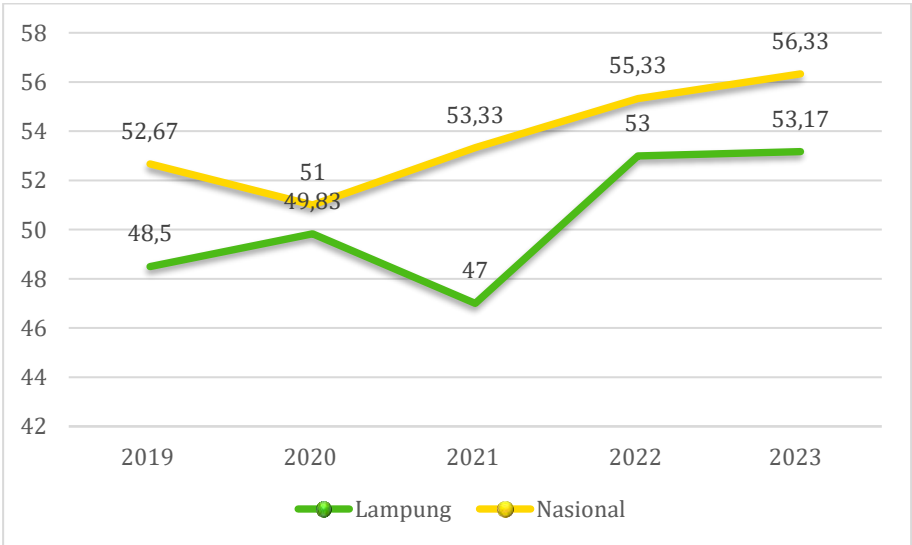
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

5. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Masalah krisis moral yang dialami pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa (dekadensi moral) seperti pengangguran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, perilaku LGBT dan faham radikalisme. Hal-hal tersebut menyebabkan belum optimalnya potensi pemuda dalam mengaktualisasikan dirinya. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Provinsi Lampung belum optimal. Pada tahun 2023, Provinsi Lampung memiliki persentase pemuda sebesar 22,94 persen (Statistik Pemuda Indonesia, 2023) dan peningkatan IPP sebesar 0,17 poin,

menjadi 53,17 dari 53 pada tahun 2022 . Meskipun demikian, angka IPP Lampung lebih rendah 3,16 poin dibandingkan nasional (56,33 persen). Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya domain lapangan dan kesempatan kerja sebanyak 5 poin. Domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya. Sedangkan domain pendidikan meningkat menjadi 70 dari 66,67 di tahun 2022 serta domain kesehatan dan kesejahteraan meningkat menjadi 67,50 dari 65 di tahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bahwa potensi pemuda di Provinsi Lampung belum maksimal.

Gambar 2. 113 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan Demografi (*Demographic Dependency Ratio*) adalah ukuran yang digunakan dalam demografi untuk menilai rasio antara jumlah orang yang dianggap “tergantungan” pada populasi yang “produktif”. Biasanya, angka ini melibatkan membandingkan jumlah anak-anak (usia di bawah 15 tahun) dan lansia (usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah populasi usia kerja (antara 15 dan 64 tahun). Struktur penduduk Lampung di tahun 2035 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah

penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (*dependency ratio*) mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,60 persen (862,95 ribu penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 15,42 persen (1,606 juta penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Lampung yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk Lampung. Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang ageing population antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang persiapan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

Gambar 2. 114 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung, serta Jumlah Penduduk Lansia Tahun 2025-2035

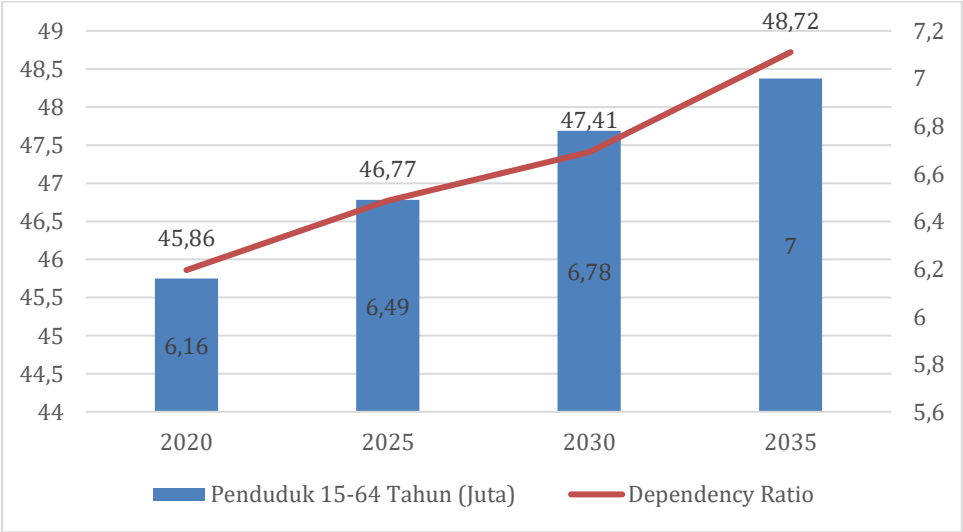


Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 49 penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun

dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan sebesar 48,72 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 33,36 persen dan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia sebesar 15,36 persen. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif.

Gambar 2. 115 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Lampung Tahun 2020-2035



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

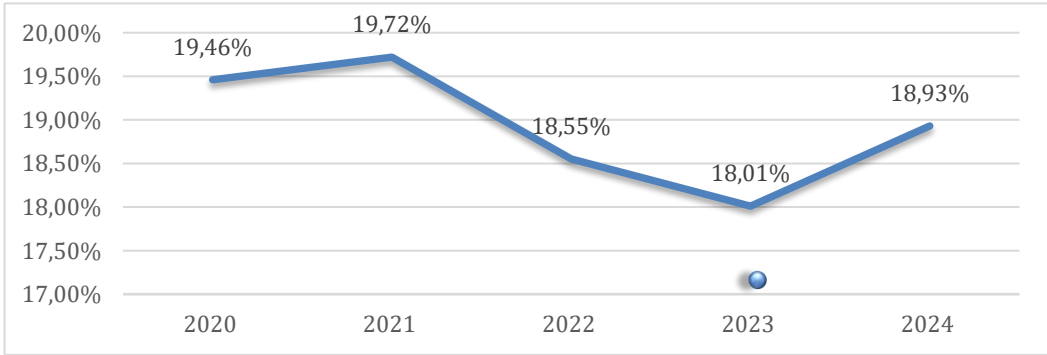
Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Lampung. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Kinerja ekonomi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen (ctc) sesuai dalam range target RPJMD 2019-2014. Nilai tersebut menguat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,28 persen (ctc). Namun, capaian kinerja ekonomi Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 5,05 persen (ctc).

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB kedua terbesar di Lampung dengan kontribusi di tahun 2024 sebesar 18,93

persen dari total PDRB, disusul oleh Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan yang memberikan kontribusi sebesar 13,98 persen. Di sisi lain, Kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Gambar 2. 116 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan sektor industri pengolahan cukup fluktuatif sebagai dampak ketidakstabilan kondisi perekonomian global dan nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 9,09 persen pada tahun 2024, meningkat sebesar 7.66 poin dari capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 1,43 persen.

Gambar 2. 117 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024



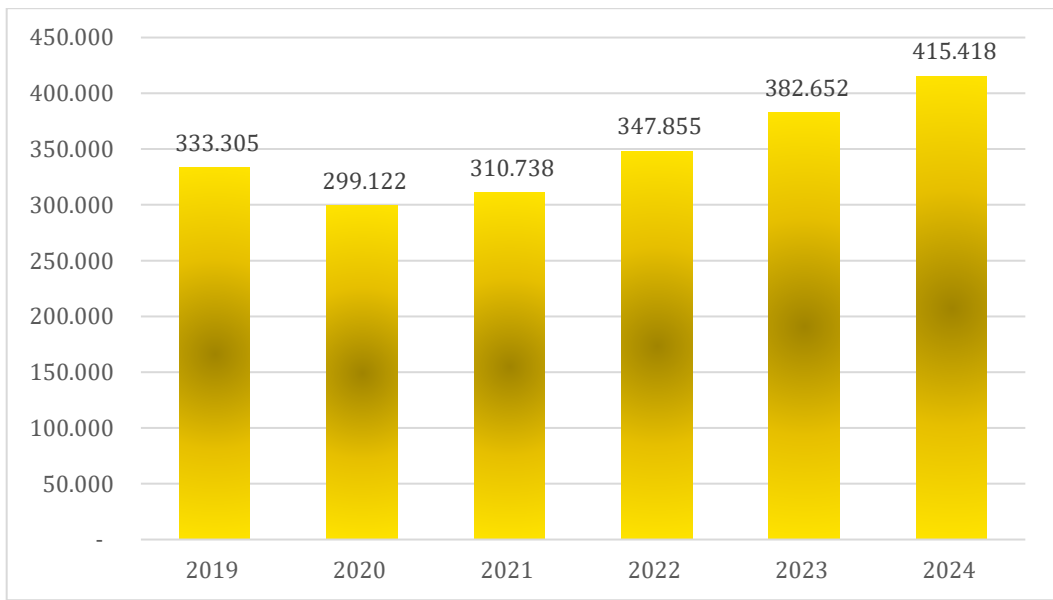
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan salah satu sektor lapangan usaha dalam PDRB. Dalam kurun waktu 2019-2024, PDRB (ADHK) sektor lapangan usaha penyediaan

akomodasi makan dan minum di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu senilai Rp.333, 305 juta, menjadi Rp.415,418 juta yang menunjukkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan setiap tahun.

Gambar 2. 118 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Indonesia

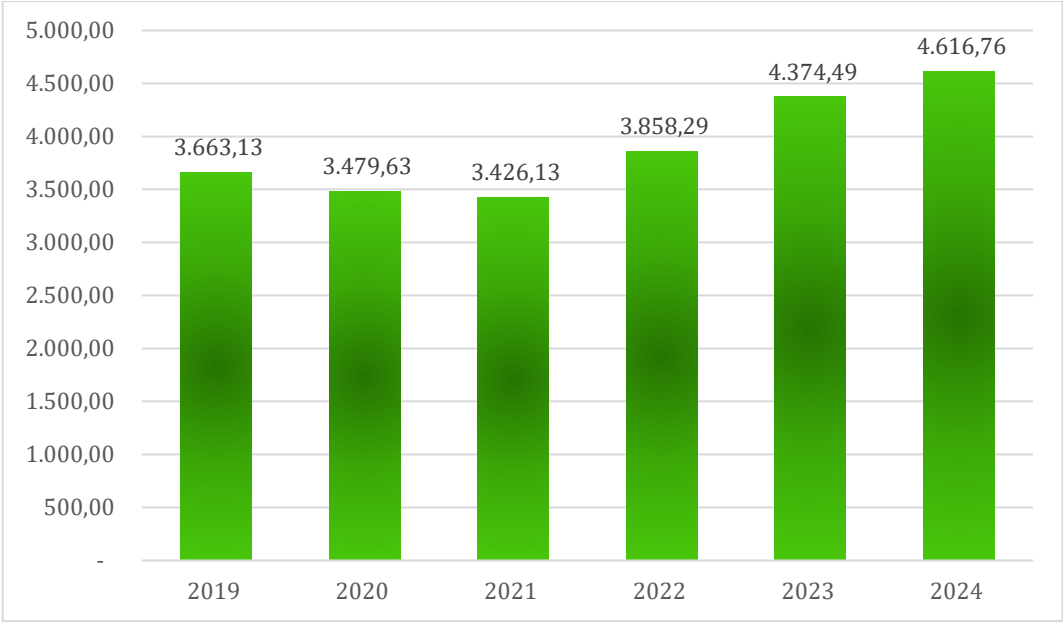


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

PDRB ADHK Sektor Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 10,26 persen yang mana pada tahun 2019 sebesar Rp333,304 Juta menjadi Rp299,122 Juta pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020 kemampuan masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam hal konsumsi akomodasi makan dan minum namun perlahan membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2024.

Pada Provinsi Lampung, dalam kurun waktu 2019-2024, PDRB (ADHK) sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu senilai Rp3,66 juta, menjadi RP4,61 juta. Ini berarti dalam lima tahun terakhir, pendapatan per kapita penduduk Provinsi Lampung pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan rata-rata 4,99 persen per tahun.

Gambar 2. 119 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Lampung



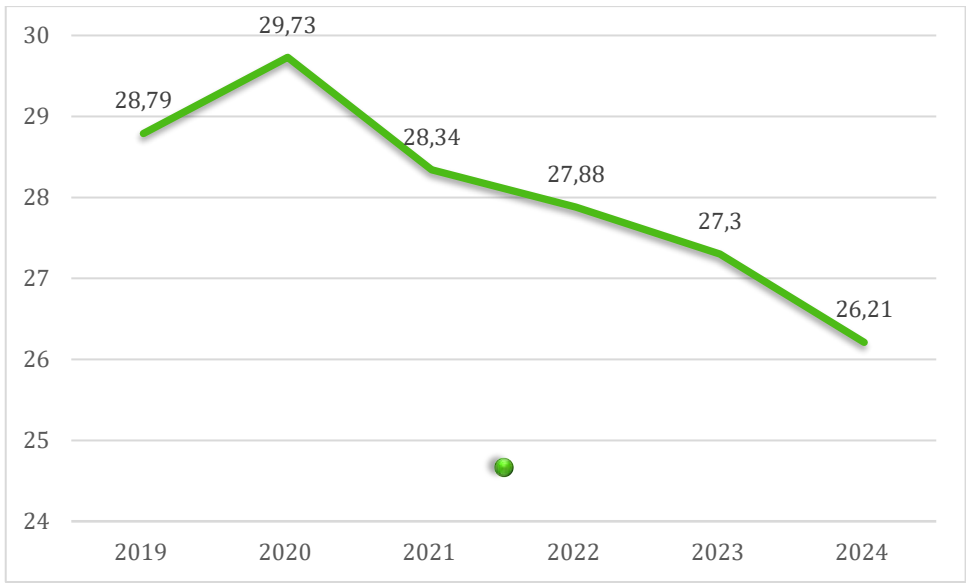
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Namun di Tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Provinsi Lampung pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 5% dari Rp3,66 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp3,48 juta pada tahun 2020 lalu terjadi penurunan lagi pada tahun 2021 sebesar 1,54% menjadi Rp3,43 juta. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara Provinsi Lampung dengan Indonesia secara keseluruhan. Provinsi Lampung mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 kemampuan masyarakat Lampung mengalami penurunan dalam hal konsumsi akomodasi makan dan minum dan baru kembali membaik pada tahun 2022.

3. Rasio PDRB Sektor Pertanian

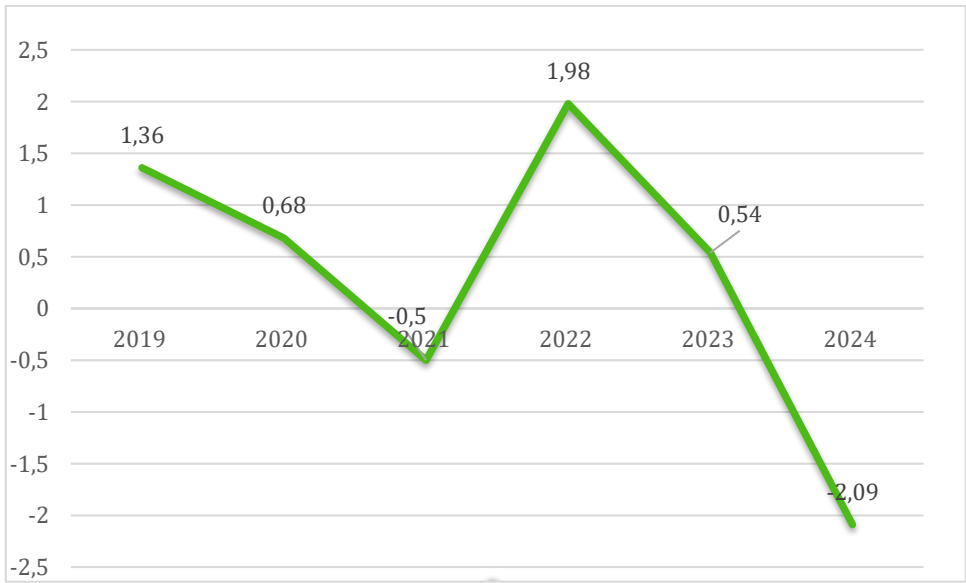
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung adalah sektor pertanian. Sektor ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang vital karena memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan serta penyedia bahan baku untuk industri. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung sebesar 26,21% ditahun 2024 turun 1,09% dibanding tahun lalu, penurunan kontribusi sektor pertanian terjadi dalam 4 tahun terakhir.

Gambar 2. 120 Rasio PDRB Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2. 121 Laju Perumbuhan PDRB Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Pertumbuhan positif PDRB sektor pertanian dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4.11%, namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 menjadi -0.53% dan terakhir di tahun 2024 turun kembali -1.75%. Pertumbuhan negatif pada tahun 2022 – 2024 mengindikasikan kontraksi pada sektor pertanian yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, kebijakan pemerintah, atau gangguan pasokan. Perlu perhatian khusus untuk mengidentifikasi penyebab dan mengambil langkah-langkah perbaikan.

Tabel 2. 52 Pertumbuhan PDRB Lampung berdasarkan Lapangan Usaha 2024

PDRB SEKTOR	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)
	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,09
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-1,75
a. Tanaman Pangan	-5,17
b. Tanaman Hortikultura	0,43
c. Tanaman Perkebunan	0,33
d. Peternakan	0,85
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,06
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	-12,84
3. Perikanan	-3,37

Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

Berdasarkan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2024, tercatat mengalami penurunan sebesar -2,09%.

Secara rinci, subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian turun -1,75%. Pada subsektor ini, komoditas tanaman pangan mengalami penurunan cukup signifikan sebesar -5,17%, sedangkan tanaman hortikultura masih tumbuh positif sebesar 0,43%, begitu pula dengan tanaman perkebunan sebesar 0,33%, peternakan sebesar 0,85%, dan jasa pertanian dan perburuan sebesar 0,06%.

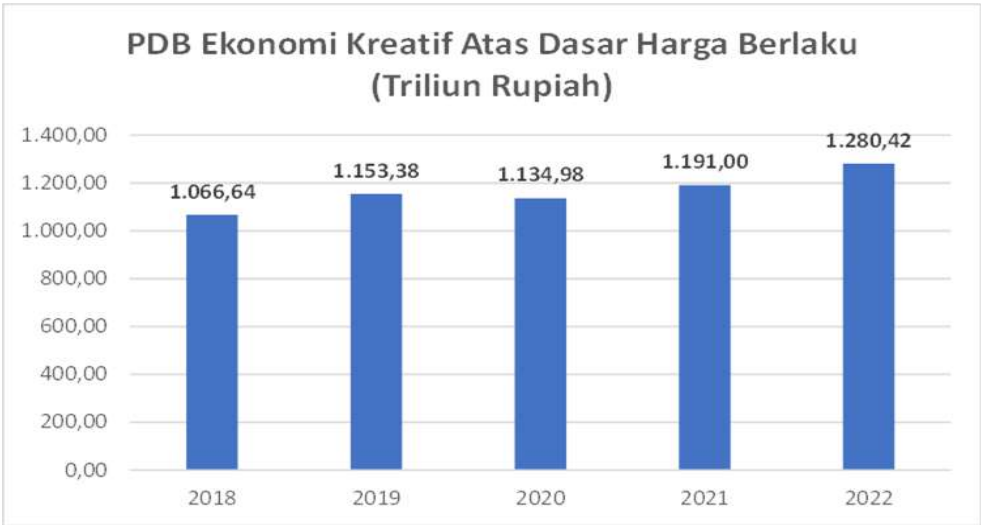
Sementara itu, subsektor kehutanan dan penebangan kayu mengalami penurunan paling besar yaitu -12,84%. Pada subsektor perikanan, juga tercatat penurunan dengan pertumbuhan -3,37%.

4. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2019, ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan

intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Nilai PDB Ekonomi kreatif didapatkan dari jumlah subsektor Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Film, Animasi dan Video, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Fashion, Aplikasi dan Game Developer, Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, Seni Pertunjukan, dan Seni Rupa. Berikut ini merupakan hasil PDB Ekonomi kreatif skala nasional dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 2. 122 PDB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah) 2018-2022



Sumber: Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023

Dapat dilihat bahwa PDB Ekonomi Kreatif tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar 1.280,42 Triliun Rupiah. Sedangkan terendahnya berada pada tahun 2018 sebesar 1.066,64 Triliun Rupiah. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,13% atau Rp 86,74 Triliun. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,6% atau Rp 18,4 Triliun.

5. Rasio Kewirausahaan Nasional

Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia, diproyeksikan akan mendapat puncak bonus demografi di 2030. Berdasarkan survei *World Economic Forum* tahun 2019, sebanyak 35,5% pemuda usia 15-35 tahun di Indonesia berkeinginan menjadi pengusaha. Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) menjadi isu nasional yang cukup mendapat perhatian saat ini. Aktivitas kewirausahaan yang masih belum



optimal perlu didorong melalui peningkatan kualitas SDM dengan target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% di 2024.

Guna mencapai target rasio kewirausahaan dan pertumbuhan wirausaha baru, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Pengaturan dalam Perpres tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan ekosistem kewirausahaan. Pengaturan tersebut juga menjadi pedoman yang menyinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, keberadaan Perpres juga bertujuan memperkuat ekosistem kewirausahaan, menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas wirausaha dan skala usaha.

Dalam Perpres disebutkan kemudahan yang diberikan kepada wirausaha, yakni pendaftaran perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi, akses pembiayaan dan peminjaman, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, akses pasar digital BUMN, akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, akses area komersial dan tempat perbelanjaan, akses riset dan pengembangan usaha, serta akses peningkatan kapasitas usaha.

Misi Transformasi ekonomi yang tercantum dalam rancangan akhir RPJPD Provinsi Lampung diarahkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya para generasi muda yang membuka usaha sendiri atau berwirausaha sebagai dampak bonus demografi yang akan mencapai puncak dalam 5-10 tahun ke depan.

Aktivitas pembelajaran tidak hanya diarahkan pada transfer of knowledge semata, akan tetapi juga peningkatan aspek soft skill dan entrepreneur yang akan membuat peserta didik memiliki bekal keilmuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, riset, manajemen risiko, analisis, dan kemampuan pengambilan

keputusan. Semua itu jika dipadukan dengan aspek kewirausahaan (entrepreneur) akan mampu menghasilkan generasi masa depan dengan tingkat produktivitas tinggi.

6. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu menjadi tulang punggung perekonomian dan mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Tabel 2. 53 Jumlah Koperasi di Provinsi Lampung 2020 - 2024

Kota/Kabupaten	2020		2021		2022		2023		2024	
	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
Kab. Lampung Barat	44	109	45	111	49	110	50	112	55	112
Kab. Tanggamus	76	252	81	252	97	251	86	275	92	276
Kab. Lampung Selatan	242	214	254	215	267	220	281	220	355	226
Kab. Lampung Timur	56	468	64	468	82	467	92	467	114	584
Kab. Lampung Tengah	397	258	403	258	415	258	254	432	190	584
Kab. Lampung Utara	73	265	153	186	163	185	165	185	176	184
Kab. Way Kanan	73	665	89	663	99	661	106	663	120	663
Kab. Tulang Bawang	49	142	54	144	56	144	54	149	74	151
Kab. Tukang Bawang Barat	45	84	47	82	49	86	53	86	59	86
Kab. Pesawaran	110	106	112	106	120	105	128	105	150	106
Kab. Mesuji	115	39	118	39	118	39	122	39	136	39
Kab. Pringsewu	69	112	79	110	91	110	97	111	109	113
Kab. Pesisir Barat	46	21	50	21	57	21	60	29	67	29
Kota Bandar Lampung	171	572	178	571	192	568	170	604	295	700
Kota Metro	99	115	81	150	103	150	105	158	152	166
Binaan Provinsi	183	108	219	108	266	108	299	107	-	-
Binaan Nasional	32	97	48	96	55	96	65	96	-	-
Jumlah	1880	3627	2075	3580	2279	3579	2187	3838	2144	4019
Total Koperasi	5507		5655		5858		6025		6163	

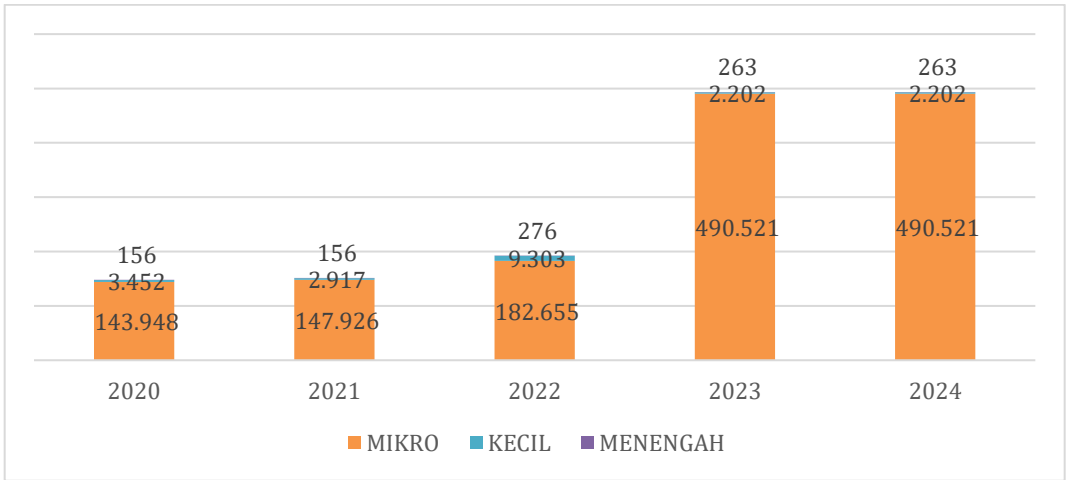
Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

Koperasi memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para anggota koperasi. Oleh karena itu, pemerintah pun berusaha mendorong masyarakat untuk mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Jumlah koperasi di Provinsi Lampung dalam 5 tahun terus

meningkat namun untuk koperasi aktif terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir hal ini disebabkan faktor eksternal dan internal baik karena kondisi usaha yang tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun dikarenakan pengelolaan koperasi yang belum baik. terkait dengan koperasi binaan provinsi dan nasional pada tahun 2024 sudah dimasukkan sesuai dengan lokasi koperasi yang ada di Kabupaten/Kota.

Sektor UKM memiliki peran penting dalam perekonomian dimana UKM terbukti mampu bertahan dalam kondisi kritis, sebagai contoh ketika menghadapi krisis moneter tahun 1998 dan pandemic covid-19

Gambar 2. 123 Jumlah UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung (ODS Kementerian Koperasi UKM 2020-2024)

Sektor UKM di tahun 2023 tumbuh sangat tinggi, dengan pertumbuhan usaha mikro mencapai 328.596 unit dalam periode tahun 2020 sampai 2023. Selama periode tersebut usaha mikro tumbuh konsisten, berbeda dengan pertumbuhan usaha kecil dan usaha menengah dimana di tahun 2022 masing-masing mengalami penurunan dengan jumlah usaha kecil 291 unit dan usaha menengah sebanyak 46 unit. Secara umum di tahun 2023 pertumbuhan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sangat tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan asset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta, Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi

produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria asset lebih dari 500 juta dengan omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 milyar, dan usaha menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan asset lebih dari 500 juta sampai 10 milyar, dengan omset lebih dari minimal 2,5 milyar sampai 50 milyar.

Berdasarkan data tersebut, Lampung memiliki potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UKM yang sangat banyak dan cukup banyak menyerap tenaga. Di tahun 2020 jumlah UKM di Provinsi Lampung sebanyak 147.556 unit, secara konsisten mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga berjumlah 492.986 unit di tahun 2023. Selama periode 2020 sampai 2023 pertumbuhan UKM mencapai 345.430 unit.

Tabel 2. 54 Jumlah Data UKM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	354	1747	7667	20521	20521
Lampung Selatan	701	186	3749	41173	41173
Lampung Tengah	796	701	26495	60848	60848
Lampung Timur	511	547	41327	33528	33528
Lampung Utara	364	796	27407	28656	28656
Mesuji	292	457	3111	16433	16433
Pesawaran	482	840	3084	43330	43330
Pesisir Barat	68	23	2472	10621	10621
Pringsewu	373	179	3587	45683	45683
Tanggamus	186	482	5249	27801	27801
Tulang Bawang	23	292	35612	32428	32428
Tulang Bawang Barat	179	1933	7425	23750	23750
Way Kanan	840	429	8979	58004	58004
Bandar Lampung	118533	118533	1943	30940	30940
Metro	23864	23854	14127	19270	19270
JUMLAH	147566	150999	192234	492986	492986

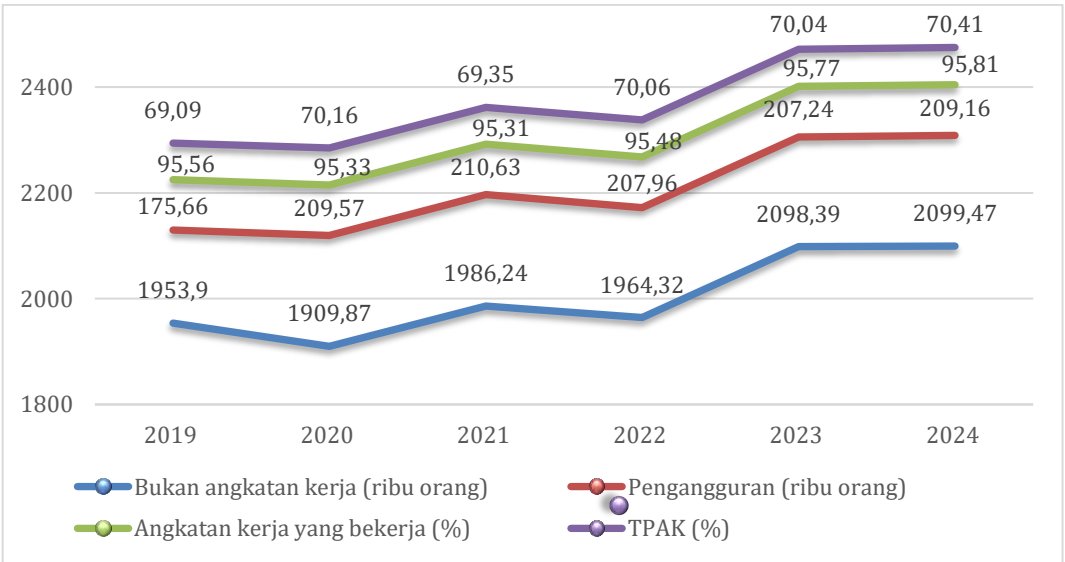
Sumber:Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (ODS Kementerian Koperasi UKM 2020-2024)

Jumlah UKM di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, terdapat 447.890 UKM pada tahun 2024 meningkat signifikan jika dibandingkan jumlah UKM pada tahun 2020. Sebaran UKM kabupaten/kota pada tahun 2024 terbanyak di Kota Bandar Lampung (63.450), Lampung Tengah (60.848), Way Kanan (57.876) dan Pringsewu (45.683).

7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebesar 70,41 persen, yaitu naik 0,37 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2024, cenderung mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,37% poin per Agustus 2024. Kenaikan ini terutama didukung oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja, mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (TW IV 2024) sebesar pada 4.57% (yoy) dibanding TW IV 2023.

Gambar 2. 124 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2019-2024

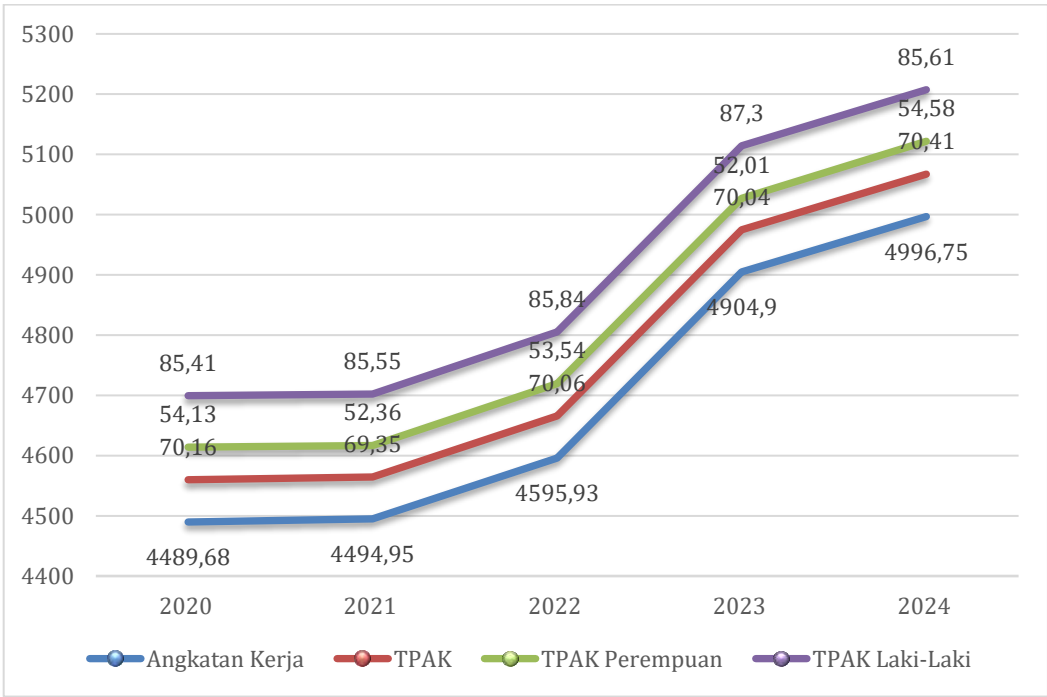


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, jumlah penduduk umur 15 tahun yang termasuk angkatan kerja mencapai 4.904,90 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 543,05 ribu orang selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Gambar 2. 125 Status Ketenagakerjaan Provinsi Lampung



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Sementara itu, TPAK selama periode Agustus 2020 sampai Agustus 2024 mengalami penurunan dari 70.16 di Agustus 2020 menjadi 70,41 di Agustus 2024, penurunan tertinggi terdapat di tahun 2021 pada angka 69,35. Hal yang sebaliknya terjadi, jumlah penduduk usia kerja selama periode 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan.

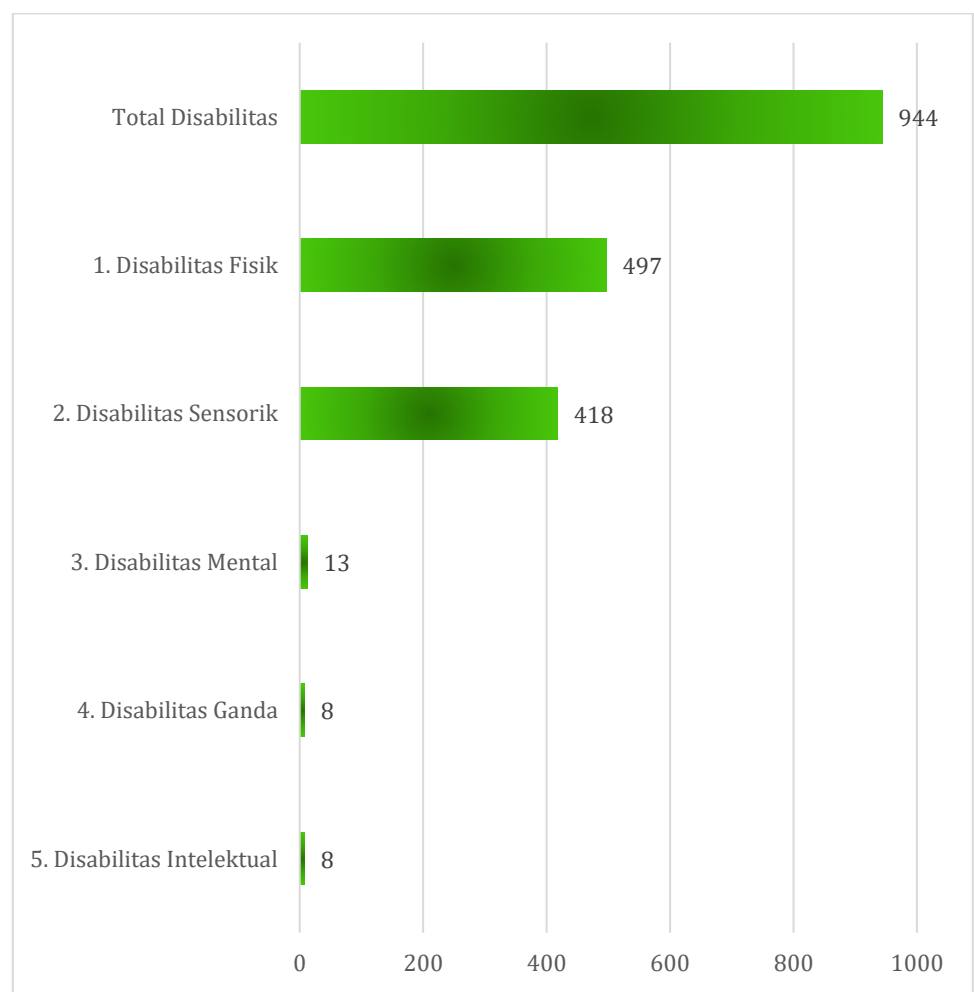
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) jika dilihat menurut jenis kelamin, menunjukkan TPAK Laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK Perempuan. Di Agustus 2023 TPAK Laki-Laki mencapai 85.61 sementara TPAK perempuan hanya sebesar 54.58. Dalam periode Agustus 2020 sampai Agustus 2024, TPAK Perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen poin. Sedangkan TPAK Laki-laki mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi yaitu 0.2 persen poin. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa pada Agustus 2024 untuk TPAK perempuan dari 100 penduduk usia kerja perempuan terdapat sekitar 54 orang yang termasuk angkatan kerja.

● **Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal**

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 penyandang disabilitas fisik dan mental adalah seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti

gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran atau kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental dan tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak dan wajar.

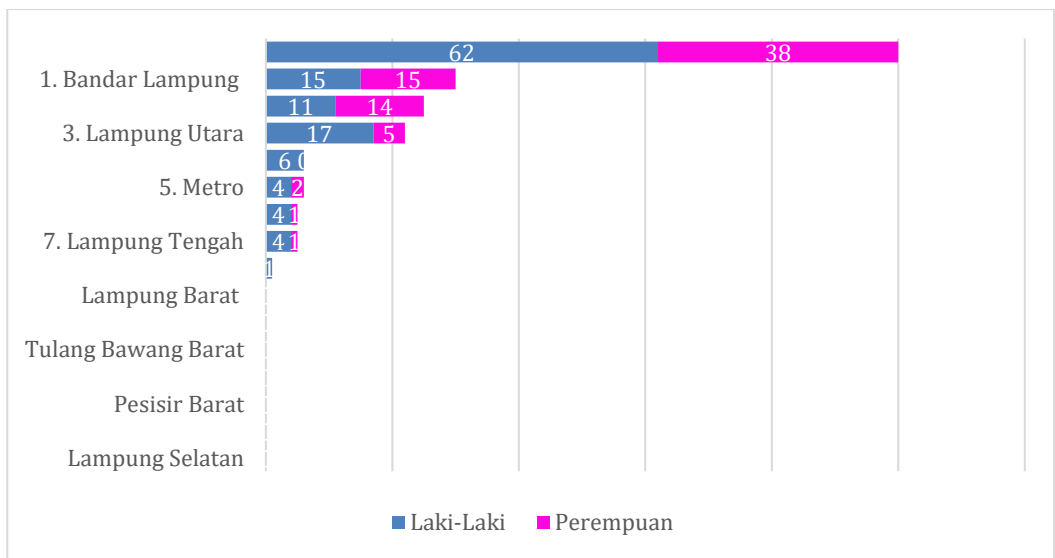
Gambar 2. 126 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2025

Secara Nasional, Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa untuk penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, penempatan tertinggi adalah pada disabilitas fisik dengan total 497 orang. Diikuti oleh tenaga kerja disabilitas sensorik dengan total 418 orang. Di tahun 2024 telah ditempatkan sebanyak 44 tenaga kerja penyandang disabilitas diantaranya 33 orang laki-laki dan 11 orang Perempuan.

Gambar 2. 127 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, 2023

Jumlah tenaga kerja disabilitas di tahun 2023 sebesar 100 orang yang tersebar di sejumlah perusahaan di Provinsi Lampung, dengan jumlah terbesar terdapat di kota Bandar Lampung. Tenaga kerja disabilitas yang telah tersebar di seluruh perusahaan di Provinsi Lampung sebagian besar tenaga kerja disabilitas laki-laki dengan jumlah sebesar 62 orang dan tenaga kerja disabilitas perempuan sebesar 38 orang.

8. Indeks Inovasi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk penjabaran dan perundangan tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang diberikan mandat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri di Tahun 2024. Bentuk inovasi daerah terdiri dari Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah,

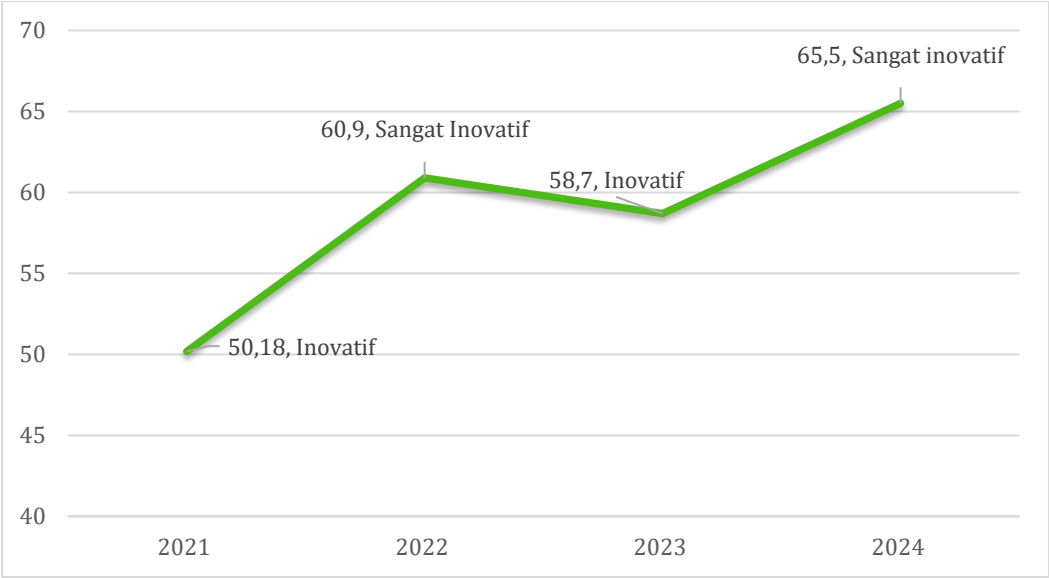


Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi bentuk lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jenis inovasinya antara lain Inovasi Digital dan Inovasi Nondigital.

Pemerintah daerah didorong untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi dengan melaksanakan penilaian inovasi daerah melalui rangkaian pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan *Innovative Government Awards* (IGA). IID dan IGA yang dilaksanakan setiap tahun, dimana Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib untuk berpartisipasi. Kedua kegiatan tersebut merupakan tahapan wajib penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja daerah dalam melaksanakan inovasi, dimana IID adalah tahapan penjangkaran dan penilaian inovasi yang telah dilakukan daerah, sedangkan IGA adalah tahapan pemaparan inovasi unggulan oleh Kepala Daerah dan pengapresiasian atas daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam pelaksanaan birokrasi. Skor Indeks Inovasi Daerah diukur dan ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan kategori yang diberikan kepada daerah yang mengikuti IID yaitu daerah terinovatif, sangat inovatif dan inovatif. Pemerintah Pusat akan memberi apresiasi dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) kepada daerah yang meraih kategori daerah terinovatif.

Pada Tahun 2022 Provinsi Lampung masuk dalam sepuluh besar Provinsi dengan Predikat Sangat Inovatif di peringkat 8 (delapan) dengan skor indeks 60,90, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022. Namun capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung mengalami penurunan di Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, yang berada pada peringkat 10 dengan predikat Inovatif dan capaian skor indeks 58,70 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 20024 dengan predikat sangat inovatif dan capaian skor indeks 65,5.

Gambar 2. 128 Capaian Indikator Kinerja IID Balitbangda Provinsi Lampung Th. 2019-2023



Sumber: Balitbangda, 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Pemerintah Pusat telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19, namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu tujuan Indonesia Emas (IE) terkait Penerapan Ekonomi Hijau dengan Indeks Ekonomi Hijau menjadi salah satu indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta untuk mendukung Agenda Pembangunan khususnya dalam kerangka Transformasi Ekonomi, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Ekonomi hijau memiliki prinsip utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan. Ekonomi Hijau merupakan model ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau, infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan, untuk mewujudkan



kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Dalam implementasinya, Ekonomi Hijau diharapkan dapat mendukung promosi investasi hijau, penyediaan modal dan infrastruktur berkelanjutan, serta lapangan kerja dan keterampilan yang layak untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, ekonomi hijau akan mendorong pemberdayaan penciptaan modal yang memastikan inklusivitas, mengandung modal alam rendah karbon, modal fisik yang efisien sumber daya, dan modal manusia dengan keterampilan hijau (*United Nations Partnership for Action on Green Economy/PAGE*, 2017). Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060.

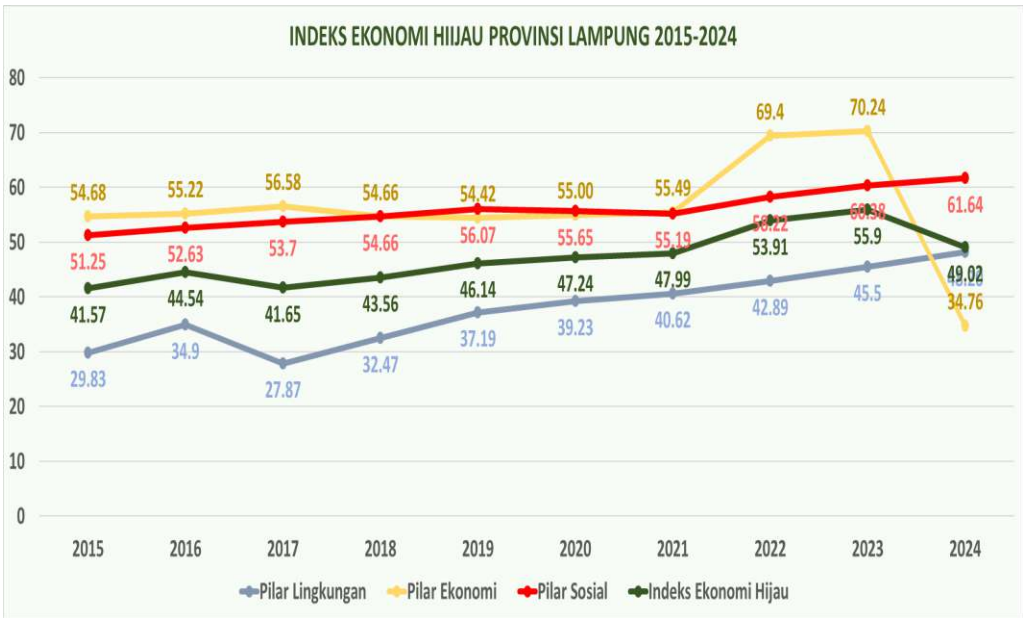
Indeks Ekonomi Hijau Indonesia menghitung skor Indonesia dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dengan melihat perbandingan kemajuan dari indikator terhadap nilai minimal dan target maksimal yang ingin dicapai. Nilai minimal indikator berdasarkan data historis Indonesia dari acuan terendah, sedangkan nilai maksimal didasarkan target yang sudah dicantumkan dalam Visi Indonesia 2045 dan target dalam model *Low Carbon Development Initiative* (LCDI) 2045 untuk mencapai *Net Zero Emission* 2060. Adapun rentang waktu data histori Indeks Ekonomi Hijau Indonesia mulai 2011 sampai 2020. Indeks Ekonomi Hijau Indonesia mencakup tingkat nasional, dan di tingkat provinsi yang bertujuan untuk mengukur Indeks Ekonomi Hijau provinsi. Pendekatan dan proses pengembangan Indeks Ekonomi Hijau di tingkat provinsi mengacu pada pengembangan Indeks Ekonomi Hijau di tingkat nasional, namun dengan penyesuaian agar indeks tersebut kontekstual, sesuai, dan dapat mencerminkan keadaan di tingkat provinsi.



Indeks Ekonomi Hijau provinsi terdiri dari 16 (enam belas) indikator yang mewakili 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ke-16 indikator tersebut antara lain: (1) luas tutupan hutan, (2) bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari sumber energi primer, (3) Kualitas air permukaan (Konsentrasi BOD), (4) Kualitas udara (Konsentrasi NO₂), (5) Persentase penurunan emisi Kumulatif dari Baseline, (6) Penurunan tutupan lahan gambut, (7) Intensitas emisi, (8) Intensitas energi final, (9) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, (10) Produktivitas pertanian, (11) Produktivitas tenaga kerja sektor industri, (12) Produktivitas tenaga kerja sektor jasa, (13) Rata-rata Lama Sekolah, (14) Usia Harapan Hidup, (15) Tingkat Kemiskinan, dan (16) Tingkat Pengangguran Terbuka. Masing-masing indikator dihitung nilai skornya dengan melakukan normalisasi menggunakan batas maksimum dan batas minimum untuk melihat sejauh mana ketercapaian nilai indikator terhadap target yang akan dicapai serta menormalisasi nilai indikator agar berada dalam rentang nilai yang diinginkan. Hasil akhir dari perhitungan Indeks Ekonomi Hijau provinsi diklasifikasikan menjadi 6 kategori berikut:

Kategori BURUK pada rentang nilai	:	0,00 – 25,00
Kategori SEDANG TIER 1 pada rentang nilai	:	25,01 - 37,50
Kategori SEDANG TIER 2 pada rentang nilai	:	37,51 – 50,00
Kategori BAIK TIER 1 pada rentang nilai	:	50,01 – 62.50
Kategori BAIK TIER 2 pada rentang nilai	:	62,51 – 75,00
Kategori SANGAT BAIK pada rentang nilai	:	75,01 - 100

Gambar 2. 129 Hasil perhitungan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung Tahun 2015-2024:



Sumber: Bappenas, 2025

Indeks Ekonomi Hijau (IEH) Provinsi Lampung pada periode tahun 2015–2021 berada dalam rentang nilai 41,57–47,99 (kategori sedang/tier 2), dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 47,99. Secara umum, tren Indeks Ekonomi Hijau periode ini cenderung meningkat. Pada tahun 2022 dan 2023, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung naik signifikan hingga masing-masing mencapai 53,91 dan 55,90 (kategori baik/tier 1). Tahun 2024 mencatat nilai 49,02 yang menurun dibanding dua tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh penurunan nilai pada pilar ekonomi.

Jika dilihat per pilar, pilar ekonomi memiliki capaian komposit terbaik pada tahun 2017 sebesar 56,58, yang dipengaruhi oleh tingginya produktivitas padi, produktivitas tenaga kerja sektor industri, dan PDRB per kapita. Pilar ini kembali meningkat tajam pada tahun 2022–2023 (69,4 dan 70,24) karena kontribusi dari produktivitas padi dan perikanan budidaya, peningkatan produktivitas tenaga kerja industri dan jasa, serta kenaikan PDRB per kapita. Namun, pada tahun 2024 nilainya turun drastis menjadi 34,76. Pilar sosial menunjukkan tren peningkatan dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 61,64, yang didorong oleh naiknya Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sementara itu,



pilar lingkungan memiliki nilai komposit yang relatif rendah dibanding dua pilar lainnya. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 48,20, dipengaruhi oleh kualitas udara yang baik, peningkatan bauran EBT, dan kemajuan pada aksi adaptasi serta mitigasi penurunan emisi GRK.

Kedepannya masih diperlukan sejumlah intervensi yang lebih mendukung dan masif untuk meningkatkan performa pada sektor-sektor prioritas seperti energi, pertanian, dan investasi. Selain itu, pelestarian lingkungan (termasuk lahan, gambut, dan kualitas air) dan penanggulangan kemiskinan juga menjadi isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan dijadikannya Indeks Ekonomi Hijau provinsi sebagai salah satu indikator pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendukung Kementerian PPN/Bappenas dalam penyediaan dan validasi berbagai data indikator ekonomi hijau, serta memastikan pencapaian target ekonomi hijau daerah.

2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indonesia Blue Economy Index adalah indeks dalam mengukur ekonomi maritim yang terdiversifikasi dan berkelanjutan untuk Indonesia, berdasarkan pada kepastian kesehatan dan ketahanan ekosistem laut dan pelestarian manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang. IBEI terdiri dari tiga pilar, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial dengan bobot masing-masing 36,9% untuk pilar lingkungan, 32,6% untuk pilar ekonomi, dan 30,5% untuk pilar sosial. Pembuatan estimasi bobot tersebut menggunakan metode *multi-level Principal Component Analysis* (PCA). *Principal Component Analysis* adalah metode reduksi dimensi yang akan tetap mempertahankan variasi dan pola dominan dari data. Base line Indeks Ekonomi Biru Lampung di tahun 2023 yaitu 21.53, dengan proyeksi capaian tahun 2024 sebesar 22.63.

Dalam lima tahun ke depan, Provinsi Lampung berpeluang menjadikan ekosistem Blue Carbon sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Mangrove dan rawa pasang surut tidak hanya melindungi pesisir dari abrasi dan tsunami, tetapi juga berfungsi



sebagai penyerap karbon yang sangat efektif. Potensi besar ini terutama terdapat di Teluk Lampung, Pesisir Timur, dan selatan hingga Bakauheni, dengan cadangan karbon hingga lima kali lipat lebih tinggi dibanding hutan darat. Namun, degradasi mangrove, pencemaran, dan tekanan pembangunan menjadi ancaman serius yang berpotensi melepaskan emisi besar.

Selain menyerap karbon, Blue Carbon juga mendukung adaptasi bencana di wilayah rawan tsunami, abrasi, dan banjir pesisir. Implementasi program membutuhkan dukungan kelembagaan, riset, monitoring, dan sistem data yang kuat, termasuk kontribusi universitas dan LSM. Data ini penting untuk mengukur kontribusi Lampung terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan memastikan akuntabilitas pengelolaan pesisir.

Dari sisi pembiayaan, Lampung berupaya memanfaatkan skema blue bonds (sumber pembiayaan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan), dana CSR, serta pasar karbon sebagai sumber pendanaan tambahan yang memperkuat kapasitas daerah. Proyek Blue Carbon yang kredibel berpeluang menghasilkan pendapatan baru sekaligus memperluas basis pembiayaan pembangunan. Lebih jauh, keberhasilan pengelolaan Blue Carbon sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat pesisir. Nelayan, petambak, dan komunitas lokal perlu diberdayakan sebagai aktor utama. Prinsip partisipatif, transparansi, dan pembagian manfaat akan memperkuat keberlanjutan program.

3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Pemanfaatan energi di Provinsi Lampung saat ini masih didominasi oleh energi fosil. Namun demikian arah transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan mulai menunjukkan tren yang positif. Peran Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan energi daerah serta mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.

Capaian porsi EBT dalam bauran energi daerah Provinsi Lampung meningkat dari 30,23% pada tahun 2022 menjadi 35,22% pada tahun 2023 atau setara dengan 1,46 juta *ton oil equivalent*

(MTOE) dari total pasokan energi. sedangkan potensi Energi Terbarukan di Provinsi Lampung meliputi energi panas bumi 1.758 MW dengan cadangan mungkin sebesar 898 MWe ; energi bayu 63,5 MW; bio energi 374,4; Energi surya 121,5 GW; dan Energi air 3.509 MW.

Potensi dan upaya pengembangan energi terbarukan di Lampung tidak hanya mencakup identifikasi potensi, tetapi juga telah mulai diarahkan ke tahap implementasi. Beberapa inisiatif penting antara lain:

- Pemanfaatan Potensi panas bumi, terdapat 13 lokasi potensi panas bumi yang tersebar di kabupaten/kota. Potensi Panas Bumi Ulubelu telah dimanfaatkan melalui pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu di Kabupaten Tanggamus, dengan kapasitas terpasang mencapai 220 MW, yang menjadi salah satu pembangkit panas bumi terbesar di Pulau Sumatera yang berkontribusi penting dalam mendukung bauran energi bersih nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Tabel 2. 55 Potensi Panas Bumi di Provinsi Lampung

No.	Nama Lokasi Panas Bumi	Sumber Daya Spekulatif	Sumber Daya Hipotetik	Cadangan Mungkin	Cadangan Terduga	Cadangan Terbukti	Cadangan Terpasang
1	Panas Bumi Wai Umpu	0	40	14	0	0	0
2	Panas Bumi Danau Ranau	0	0	210	0	0	0
3	Panas Bumi Purunan	25	0	0	0	0	0
4	Panas Bumi Sekincau Barat - Gunung Sekincau	0	0	52	0	0	0
5	Panas Bumi Sekincau Timur - Becingut	0	0	244	0	0	0
6	Panas Bumi Suoh Kalibata - Suoh Antatai	0	0	82	0	0	0
7	Panas Bumi Pajar Bulan	100	0	0	0	0	0
8	Panas Bumi Natar	25	0	0	0	0	0
9	Panas Bumi Ulubelu	0	0	133	0	220	220

No.	Nama Lokasi Panas Bumi	Sumber Daya Spekulatif	Sumber Daya Hipotetik	Cadangan Mungk	Cadangan Terduga	Cadangan Terbukti	Cadangan Terpasang
10	Panas Bumi Lempasing	225	0	0	0	0	0
11	Panas Bumi Wai Ratai	0	0	105	0	0	0
12	Panas Bumi Kalianda	0	0	58		0	0
13	Panas Bumi Pematang Belirang	0	0	0	225	0	0
	Total	375	40	898	225	220	220

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2025

- Pengembangan bioetanol dari bahan baku jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan tebu, dengan potensi terbesar di Lampung Timur (550.874,84 kL), Lampung Tengah (399.013,51 kL), dan Lampung Utara (250.678,37 kL). Program ini sejalan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk bioetanol berbasis tebu dalam RPJMN 2025–2029.
- Pemanfaatan biomass tanaman Kaliandra sebagai bahan baku biomassa yang dapat diolah menjadi listrik, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit (TKKS), pelepah sawit, dan limbah kayu yang dapat dimanfaatkan menjadi bricket, biochar, bio-oil, hingga sumber confiring untuk PLTU.
- Pemanfaatan Biogas, sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Provinsi Lampung telah menghibahkan instalasi biogas tidak kurang dari 1.258 unit kepada kelompok tani/ternak yang memiliki legalitas memiliki ternak sejumlah 3 ekor sapi, sanggup menjaga ketersediannya selama 2 tahun, dan sanggup memanfaatkan instalasi biogas tersebut.
- Peluang PLTS terapung di atas bendungan besar seperti Bendungan Way Sekampung, Maratiga dan Batutegi, yang memanfaatkan permukaan air bendungan sekaligus mengurangi penguapan air.

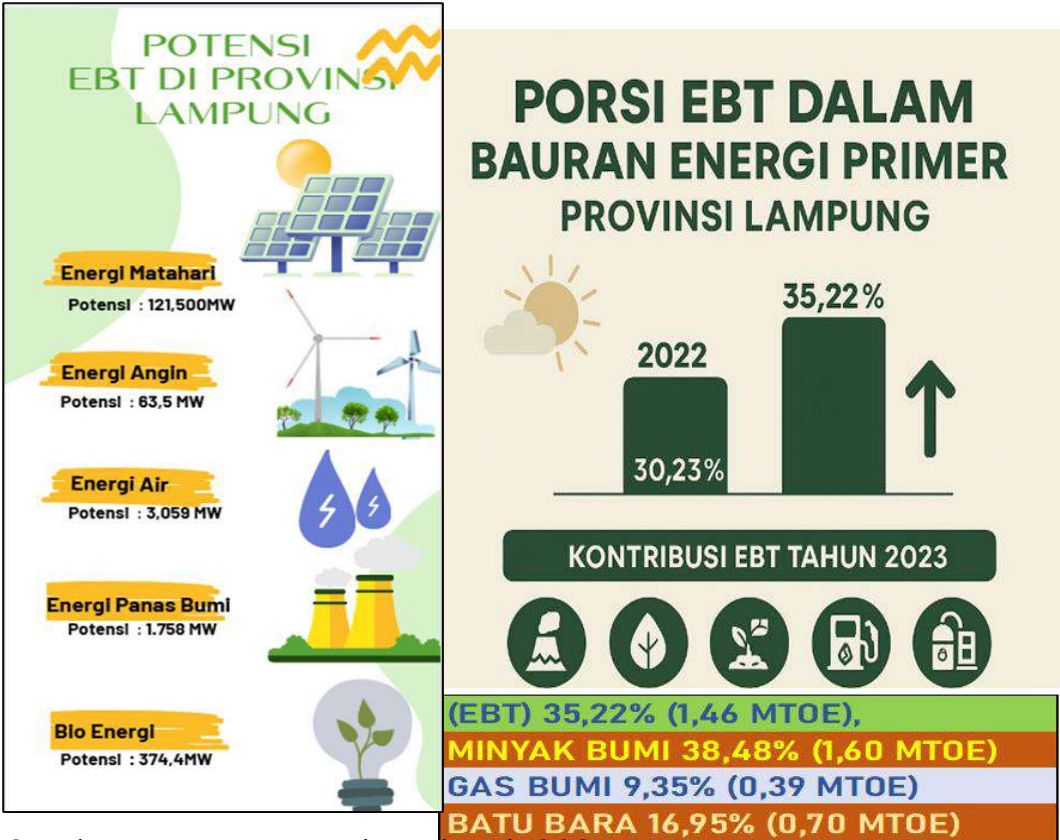
Tabel 2. 56 Potensi PLTS Pada Bendungan di Provinsi Lampung

Nama Bendungan	Status Bendungan	luas (Ha)	Kapasitas (MW) (20%)
Batu Tegi	ekisting	2100	420
Way Jepara	ekisting	310	62
Way Rarem	ekisting	419	83.7
Way Sekampung	ekisting	825	165
Margatiga	ekisting	2.314	462.79

Sumber: RUPTL Tahun 2025 - 2034

- Inisiasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui pengelolaan di TPST Natar, Lampung Selatan, yang diarahkan sebagai model pengolahan sampah menjadi energi listrik.
- Pemanfaatan mikrohidro (PLTMH) di wilayah perbukitan seperti Lampung Barat, Tanggamus, dan Way Kanan untuk memenuhi kebutuhan energi desa-desa terpencil.

Gambar 2. 130 Potensi EBT di Provinsi Lampung



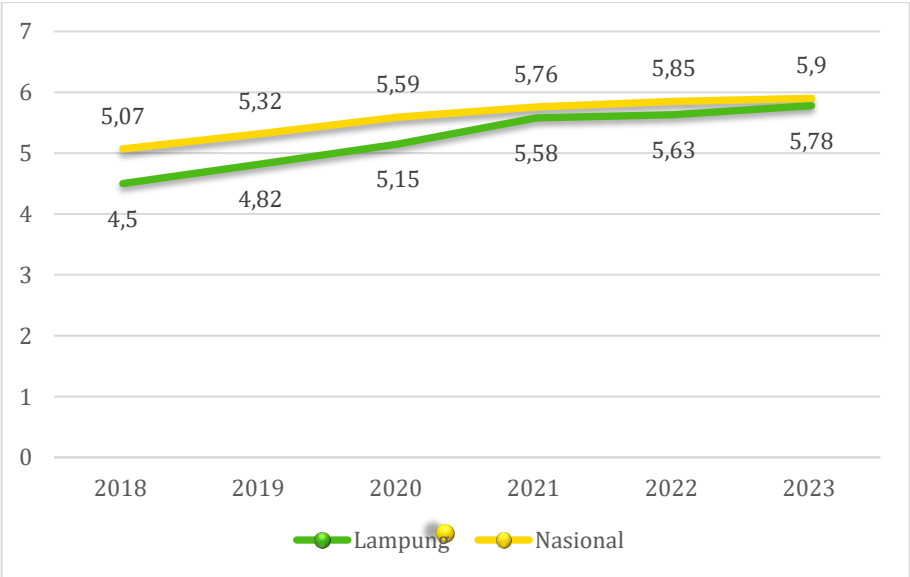
Sumber : Dewan Energi Nasional, 2024

2.1.3.4 Transformasi Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan TIK merupakan indeks komposit yang mengombinasikan 11 indikator menjadi suatu tolak ukur yang dapat digunakan untuk memantau dan pembandingan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu. Pembangunan TIK Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai Indeks Pembangunan TIK tercatat sebesar 5,07 dan terus meningkat hingga tahun 2022 dengan nilai mencapai 5,85. Indeks Pembangunan TIK disusun oleh tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Provinsi Lampung menempati dalam kategori Indeks Pembangunan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sedang selama kurun waktu dua tahun berturut-turut. Nilai Indeks Pembangunan TIK Provinsi Lampung beserta sub indeks penyusunnya sebesar 5,63 pada tahun 2022. Akan tetapi, secara umum tingkat pembangunan TIK yang berbeda dan hal ini menciptakan disparitas antarprovinsi, khususnya dalam pembangunan TIK. Disparitas ini diharapkan semakin menurun agar pembangunan TIK di seluruh Indonesia menjadi lebih merata.

Gambar 2. 131 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

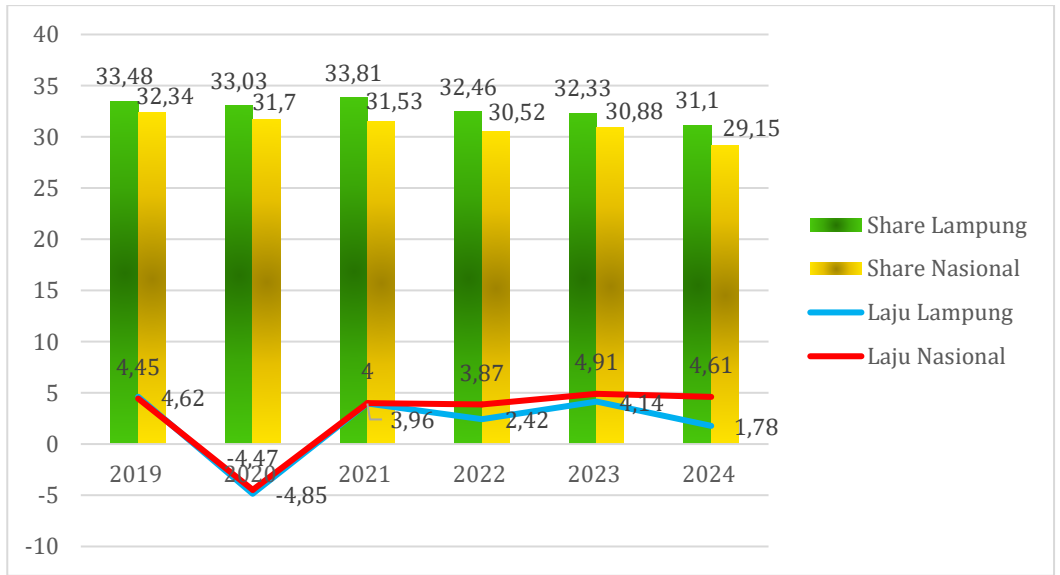
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap (Barang Modal) pada suatu unit produksi, diantaranya pembangunan gedung / konstruksi dan pembelian aset tetap lainnya. PMTB sebagai bagian dari kegiatan ekonomi menjadi komponen investasi pada PDRB periode berlaku. Akumulasi PMTB selama beberapa periode akan menjadi faktor produksi untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi pada periode yang akan datang.

Dalam struktur ekonomi Provinsi Lampung dari sisi pengeluaran, PMTB memiliki kontribusi (*share*) terbesar setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga sama halnya dengan struktur ekonomi nasional. Berdasarkan data *Share* PMTB Provinsi Lampung mengalami kenaikan dan penurunan yang relatif sedikit setiap tahun pada periode Tahun 2019 – 2024. Puncak *share* tertinggi selama periode tersebut terjadi pada Tahun 2021 sebesar 33,81%, yaitu setelah pandemi Covid-19 pembangunan mulai tumbuh kembali. Kemudian laju pertumbuhan PMTB Provinsi Lampung cenderung mengalami perlambatan pada periode Tahun 2019 – 2024, hal tersebut salah satunya disebabkan oleh telah selesainya proyek pembangunan yang ada di Provinsi Lampung seperti pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan dilanjutkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang memicu kontraksi pada semua sektor termasuk pertumbuhan PMTB di Provinsi Lampung. Laju pertumbuhan PMTB Tahun 2021 – 2024 baik Provinsi Lampung maupun nasional mengalami pola yang sama yaitu terjadi perlambatan laju di Tahun 2022 hingga tahun 2024.

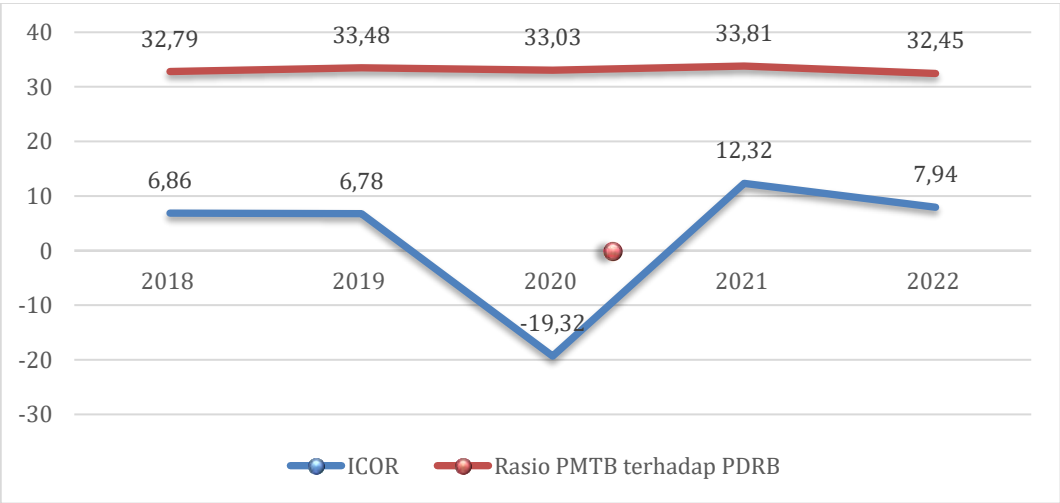
Gambar 2. 132 Perkembangan *Share* dan Laju Pertumbuhan PMTB Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Efisiensi Modal dalam Perekonomian (ICOR). Berkenaan dengan hal itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Lampung di tahun 2022 tercatat sebesar 7,94 yang berarti lebih kecil dibanding ICOR tahun 2021 yang sebesar 12,32. Nilai ICOR tersebut memberi sinyal bahwa untuk menghasilkan 1 (satu) unit output maka kebutuhan input juga semakin sedikit; yang berarti efisien secara ekonomi. Meski demikian, nilai ICOR tahun 2022 belum seirit ICOR pada rentang tahun 2018-2019 yang berada pada kisaran 6,73-6,86. Secara umum, nilai ICOR Lampung pada periode tahun 2018-2022 belum banyak berubah signifikan, kecuali di tahun 2020 dimana perekonomian menghadapi tekanan Covid-19.

Gambar 2. 133 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022

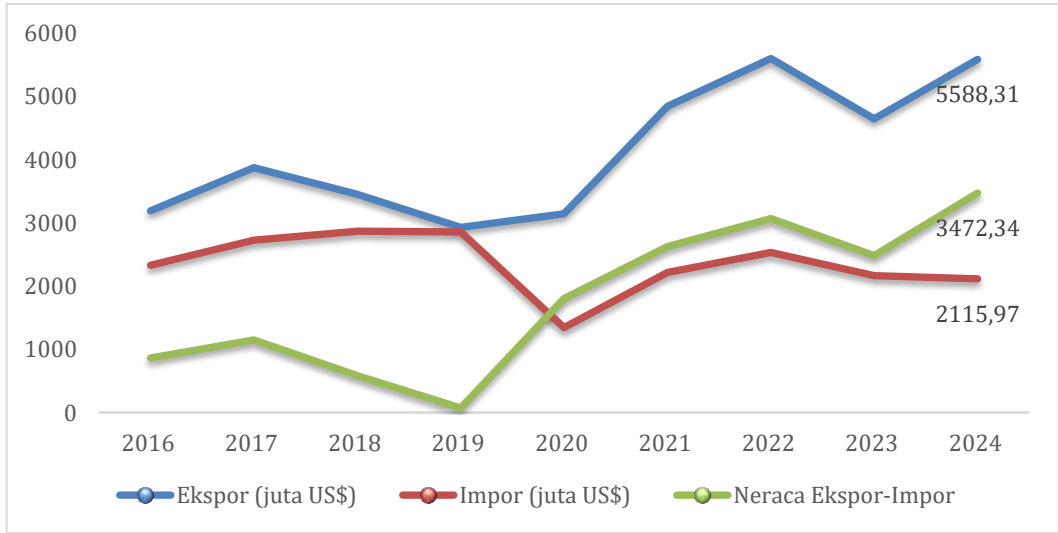


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023

2. Ekspor Barang dan Jasa

Komponen ekspor pada PDRB Provinsi Lampung menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah, baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain. Tahun 2023, komponen ekspor memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung sebesar 51,79 persen. Kontribusi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 52,88 persen. Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Lampung berupa barang, sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa.

Gambar 2. 134 Kinerja Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung Tahun 2016-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Kinerja perdagangan ekspor Provinsi Lampung selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup berfluktuasi. Tren Peningkatan kinerja ekspor dimulai pada tahun 2020 sampai puncaknya di tahun 2022 dengan nilai sebesar 5.606,3 Juta USD. Namun di tahun 2023 kembali terjadi penurunan kinerja ekspor yang lebih rendah dari tahun 2021 yakni sebesar 4,645,81 Juta USD, dan ditahun 2024 nilai kinerja ekspor provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 5,588,3 Juta USD. Ekspor komoditas tertinggi pada tahun 2024 masih didominasi oleh komoditi Minyak Sawit (CPO) senilai 2.491,32 USD. Komoditas lainnya yang mengalami peningkatan ekspor cukup tinggi ditahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu Kopi Robusta, Nanas dan turunannya, Udang Beku/Olahan dan Pulp.

Tabel 2. 57 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Komoditi Unggulan Tahun 2020-2025

No.	KOMODITI UNGGULAN	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Volume (TON)	Nilai (dalam juta \$)	Volume (TON)	Nilai (dalam juta \$)	Volume (TON)	Nilai (dalam juta \$)	Volume (TON)	Nilai (dalam juta \$)	Volume (TON)	Nilai (dalam juta \$)
1	MINYAK SAWT/CPO	1.561.416	1.087	2.413.535	1.516,3	2.997.859,1	1.975,72	3.095.714,4	1.633,43	3.686.244,3	1.491,32
2	BATUBARA	6.552.839	306,36	7.120.183	796,5	8.446.113	1.253,65	10.749.217,4	957,94	11.685.716,9	890,13
3	Kopi ROBUSTA	241.923	367	256.271	393,7	283.314	530,72	216.872,0	376,43	183.958,3	340,01
4	NANAS/TURUNAN	218.388	283,1	330.610	156,9	262.467,1	344,48	228.551,2	286	146.757,8	321,05
5	UDANG BEKU/DIAHAN	23.673	213,3	42.883	242,9	22.886,9	221,47	20.679,2	178,13	13.889,9	118,93
6	PULP	421.792	170,9	363.244	216,5	364.488,1	240,55	380.937	205,66	429.472,2	246,68
7	KARET SIR	86.853	108,5	79.315	121	47.912,9	82,48	47.383,2	65,81	56.904,0	90,34
8	TAPIOKA/PATI SINGKONG	56.349	20,7	344.371	182,3	4.383,7	1,82	152.431,5	71	5.955,4	3,09
9	LADA HITAM	23.371	56,2	15.301	44,2	12.785,2	48,63	8.657,5	34,54	24.443,9	133,86
10	MOLASSES	327.740	55	449.185	78	413.081,3	67,83	559.875,0	91,36	378.388,7	69,23
11	KELAPA DAN TURUNAN	22.761	8,7	16.723	7,7	29.476,9	14,78	20.566,8	10,47	11.387,5	7,75
12	KAKAO DAN TURUNANNYA	407	0,3	28	0,03	2.137,77	5,27	836,9	2,57	20,8	0,11
	LAINNYA	1.616.125	496	1.192.992	982,9	661.363,8	813,62	1.013.951,8	732,66	156.530,7	375,77
	TOTAL EKSPOR	11.152.176,0	3.144,8	12.441.641	4.817,1	13.548.715,6	5.606,25	16.495.677,4	4.645,81	17.886.050,1	5.588,30

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Konektivitas Transportasi antar wilayah

Konektivitas simpul-simpul transportasi di Provinsi Lampung memegang peranan penting dalam mendukung pergerakan orang dan barang, integrasi wilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Saat ini, konektivitas antar simpul transportasi Darat, Laut, Udara, transportasi kereta api dan transportasi perkotaan masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi, jangkauan, dan keterpaduan antarmoda.

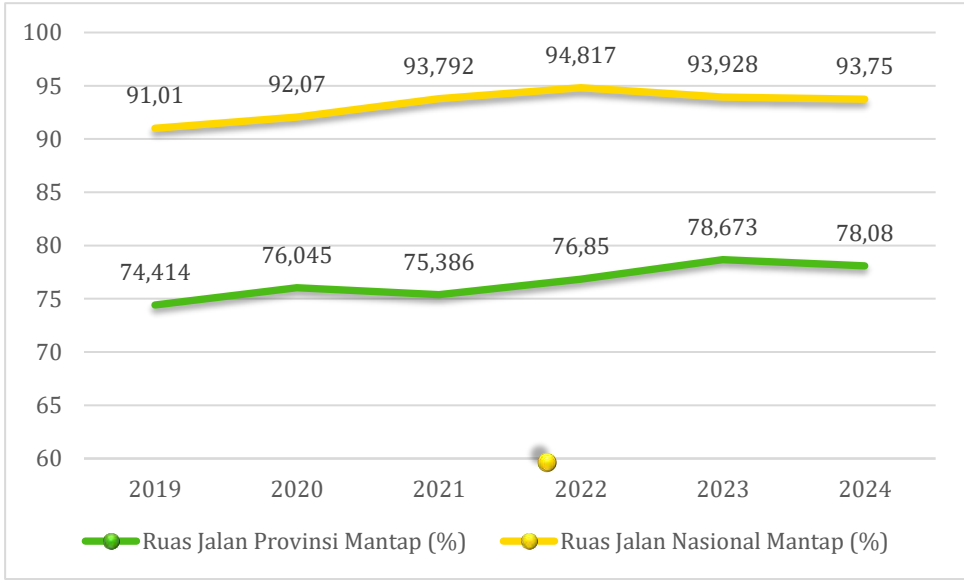
Transportasi Darat

Pelayanan transportasi darat merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Efektivitas moda ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan, serta peran terminal sebagai simpul layanan transportasi. Konektivitas jaringan jalan provinsi dan nasional berkontribusi besar terhadap kelancaran arus kendaraan umum maupun angkutan barang.

Infrastruktur Jaringan Jalan

Transportasi merupakan salah satu kunci utama pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan efisiensi antar daerah potensial sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Kondisi Infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Lampung sebagaimana Tabel berikut

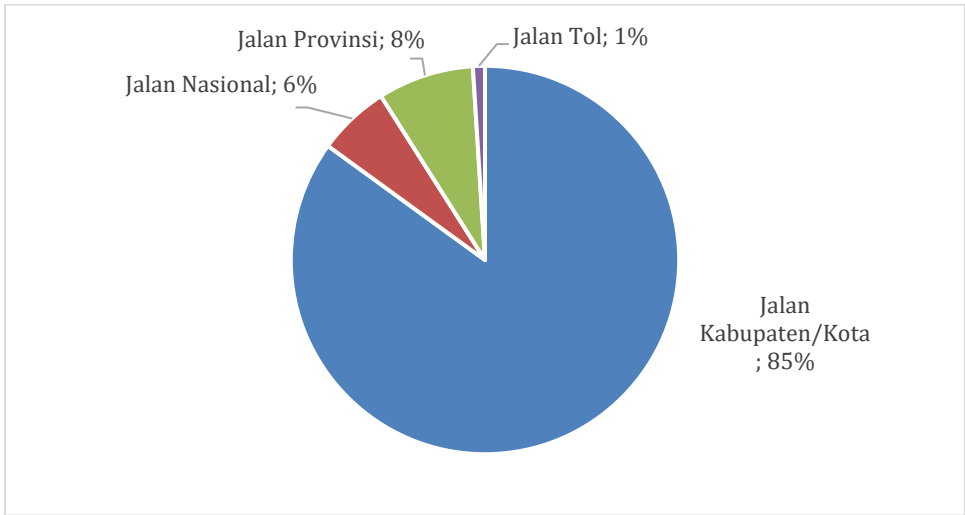
Gambar 2. 135 Kondisi Ruas Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: Data PIK-Bappeda, 2025

Kondisi kemantapan jalan status provinsi pada tahun 2019 adalah sebesar 74,41%, dan pada tahun 2024 mencapai 78,08%. Jaringan jalan provinsi juga didukung oleh jaringan jalan nasional yang memiliki tingkat kemantapan relatif lebih baik. Di tahun 2024 kondisi kemantapan jaringan jalan nasional tercatat mencapai 93,75%. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, maupun jaringan transportasi manusia serta fungsi sosial lainnya. Gambaran infrastruktur jalan yang merupakan penunjang transportasi darat di Provinsi Lampung sebagaimana grafik di bawah ini :

Gambar 2. 136 Komposisi jalan di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: data PIK-Bappeda, 2025

Gambar 2. 137 Panjang Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: (Nasional) 430/KPTS/M/2022 (Provinsi) G/434/V.03/HK/2023 (Kab/Kota) Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekertariat Jenderal Kemen PUPR Tahun 2019 (Tol) Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT Tahun 2019

Jaringan jalan nasional, Jalan tol, jalan provinsi, dan kabupaten/kota telah menghubungkan sebagian besar wilayah, namun pemerataan infrastruktur dan dukungan simpul transportasi seperti terminal masih terbatas. Di Provinsi Lampung, moda angkutan jalan berupa Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) berperan strategis sebagai penghubung antar pusat-pusat kegiatan, baik dalam skala regional maupun nasional. Beberapa terminal tipe B belum terintegrasi dengan moda transportasi lain, sementara akses menuju pelabuhan dan stasiun kereta api juga belum optimal.



Keterbatasan transportasi publik dalam kawasan perkotaan berdampak pada rendahnya penggunaan moda umum antar simpul, sehingga mobilitas masyarakat masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan barang informal.

Terminal

Provinsi Lampung memiliki beberapa terminal sebagai berikut :

- Terminal Type A : 2 (dua) buah, yaitu Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Terminal Betan Subing Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VI Lampung-Bengkulu selaku perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
- Terminal Type B : 3 (tiga) buah, yaitu Terminal Mulyojati Kota Metro, Terminal Simpang Propau Kotabumi dan Terminal Bakauheni, yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan direncanakan dalam jangka panjang akan dikembangkan 16 terminal, sehingga total menjadi 19 terminal Tipe B yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung;
- Terminal Barang : Terminal Gayam dibangun pada tahun 2013 dengan luas sekitar 30 ha, terminal ini diharapkan menjadi simpul logistik strategis, namun, saat ini terminal tersebut mengalami kendala dan tidak beroperasi sesuai fungsinya. Selain itu direncanakan pembangunan terminal barang di Kabupaten Pesawaran yang diharapkan dapat mendukung aktivitas logistik dari wilayah hinterland.
- Jembatan Timbang, Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dan menjaga umur infrastruktur jalan, direncanakan pembangunan beberapa jembatan timbang di lokasi strategis. Salah satu jembatan timbang yang telah beroperasi adalah UPPKB Way Urang, dengan kapasitas mencapai 80 ton dan panjang platform 18 meter, Kedepan direncanakan revitalisasi ataupun pengembangan Jembatan Timbang Simpang Pematang dan Jembatan Timbang Blambangan Umpu.

Transportasi Laut

Transportasi laut di Provinsi Lampung didukung oleh sejumlah simpul utama dan pelabuhan pengumpan regional yang memainkan peran penting dalam konektivitas antar wilayah. Pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan strategis nasional, sementara Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung melayani pelayaran barang skala domestik maupun internasional. Kedua pelabuhan ini memiliki konektivitas langsung dengan jaringan jalan nasional, meskipun integrasi antarmoda—khususnya dengan angkutan umum dan kereta api—masih memerlukan penguatan. Dalam upaya memperluas konektivitas wilayah pesisir dan hinterland, terdapat lima pelabuhan pengumpan regional yang saat ini pengelolaannya telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Pelabuhan Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan, Pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung, Pelabuhan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur, Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang dan Pelabuhan Mesuji di Kabupaten Mesuji. Kelima pelabuhan ini memiliki potensi besar dalam mendukung distribusi logistik lokal, perikanan, dan perdagangan antarpulau, terutama dari wilayah pedalaman ke pusat distribusi utama. Selain kelima pelabuhan tersebut, terdapat pelabuhan lain seperti Pelabuhan Batu Balai dan Pelabuhan Kota Agung yang juga memiliki potensi strategis dalam mendukung konektivitas wilayah pesisir. Namun, keterhubungan pelabuhan-pelabuhan tersebut dengan jaringan jalan dan simpul transportasi lainnya masih membutuhkan peningkatan dan pengembangan.

Provinsi Lampung memiliki infrastruktur transportasi udara yang terdiri atas bandara pengumpul, bandara pengumpan, dan bandara khusus yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Peran bandara ini sangat penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, mobilitas orang dan barang, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada wilayah yang relatif terpencil atau berbatasan langsung dengan provinsi lain. Sedangkan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan merupakan bagian dari sistem transportasi



perairan yang pengelolaannya berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Sistem Jaringan (SDP) Sungai, Danau dan Penyeberangan, Jaringan transportasi ini dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan penumpang dan barang melalui jalur sungai dan danau. Selain dimanfaatkan sebagai sarana transportasi juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata menuju objek-objek wisata.. Pelabuhan sungai dan danau berdasarkan Kepmenhub Nomor KP 432 Tahun 2017, pelabuhan sungai dan danau di Provinsi Lampung meliputi: 1) Pelabuhan Pagar Dewa; 2) Pelabuhan Dermaga Lumbok; 3) Pelabuhan Sukau; 4) Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung; 5) Pelabuhan Wiralaga; 6) Pelabuhan Mesuji Timur; 7) Pelabuhan Sungai Sidang; 8) Pelabuhan Dermaga Sungai Cabang Way Seputih; 9) Pelabuhan Dermaga Sungai Kota Terpadu Mandiri SP.VIII; 10) Pelabuhan Dermaga Kuala Teladas; 11) Pelabuhan Dermaga Panaragan; 12) Pelabuhan Dermaga Karta; dan 13) Pelabuhan Dermaga Gunung Terang. Pelabuhan penyeberangan di Provinsi Lampung meliputi: 1) Pelabuhan Bakauheni; 2) Pelabuhan Ketapang; 3) Pelabuhan Tabuan; 4) Pelabuhan Madang; 5) Pelabuhan Pulau Sebesi; 6) Pelabuhan Canti; 7) Pelabuhan Teluk Betung dan Rencana Pelabuhan di Tanah Merah di Kabupaten Mesuji. Pelabuhan Lintas penyeberangan antarnegara di Provinsi Lampung meliputi: Kota Agung di Perairan Teluk Semangka; dan Panjang di Perairan Teluk Lampung. Sedangkan Pelabuhan Lintas penyeberangan antar provinsi berada di Lempasing di Kota Bandar Lampung.

Transportasi Udara

Provinsi Lampung memiliki infrastruktur transportasi udara yang terdiri atas bandara pengumpul, bandara pengumpan, dan bandara khusus yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Peran bandara ini sangat penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah, mobilitas orang dan barang. Bandar Udara Radin Inten II, yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dan merupakan satu-satunya bandara komersial utama di Provinsi Lampung. Bandara ini terus mengalami pengembangan, baik dari sisi terminal penumpang,



perpanjangan landasan pacu, hingga peningkatan kapasitas layanan. Namun, konektivitas dari dan menuju bandara ini ke kabupaten/kota lainnya di Lampung masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi keterpaduan moda transportasi darat. Sementara peran bandara pengumpan antara lain :

- Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat, yang berfungsi mendukung aksesibilitas wilayah barat Lampung yang selama ini tergolong sulit dijangkau karena kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang terbatas.
- Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan, yang berfungsi ganda sebagai bandara pengumpan dan bandara khusus TNI. Bandara ini memiliki potensi strategis dalam mendukung konektivitas kawasan utara Lampung serta pengembangan wilayah perbatasan dan ketahanan nasional.

Sedangkan **Bandara khusus**, yang belum melayani penerbangan komersial umum namun berfungsi untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya seperti pertahanan dan sektor perkebunan, terdiri atas:

- Lanud M. Bunyamin di Kabupaten Tulang Bawang (pusat latihan tempur TNI AU),
- Lanud Pulau Kelagian di Kabupaten Pesawaran,
- Bandar Udara Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur,
- Bandar Udara Sugar Group di Kabupaten Lampung Tengah,
- Bandar Udara Gunung Madu di Kabupaten Lampung Tengah,
- Bandar Udara Indo Lampung Perkasa di Kabupaten Tulang Bawang,
- Bandar Udara Sungai Merah di Kabupaten Mesuji,
- Bandar Udara Sungai Buaya di Kabupaten Mesuji, mendukung aktivitas perkebunan.

Sistem Jaringan Kereta Api

Provinsi Lampung mempunyai jalur kereta api antara Bandar Lampung – Palembang, yang merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api di Sumatera Bagian Selatan yang dioperasikan oleh PT Kereta Api (Persero) Divre IV Tanjung Karang. Jaringan jalur kereta api yang terdapat di Provinsi Lampung diantaranya : Prabumulih (Sumatera Selatan) - Tegineneng - Tarahan;



Reaktivasi jalur menuju Pelabuhan Panjang; dan beberapa rencana pengembangan antara lain : 1) Rencana jalur kereta api ganda (*double track*) Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti ; 2) Rencana Shortcut/longcut Tegineneng - Pelabuhan Panjang- Tarahan; 3) Rencana jalur rel Kereta Api Bakauheni- Bandar Lampung - Palembang;

Transportasi Perkotaan

Transportasi perkotaan di Provinsi Lampung, khususnya di Kawasan Metropolitan Bandar Lampung dan sekitarnya, masih menghadapi tantangan dalam penyediaan angkutan massal yang andal dan berkelanjutan. Layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang sebelumnya sempat mendukung mobilitas masyarakat di pusat kota, kini tidak lagi tersedia, sehingga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dan berkontribusi pada kemacetan lalu lintas. Peningkatan sistem angkutan massal yang terintegrasi dan terjangkau menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang mobilitas penduduk, mengurangi beban lalu lintas, dan memperkuat konektivitas antar kawasan dalam mendukung pengembangan wilayah metropolitan secara berkelanjutan.

2. Persentase Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan salah satu konsep penting dalam pembangunan desa yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan status desa-desa di seluruh nusantara, termasuk upaya untuk memperbanyak jumlah desa mandiri. Menurut Indeks desa membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), persentase desa mandiri di Provinsi Lampung tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang menggembirakan yakni sebesar 14,68% dimana pada tahun 2023 sebesar 7,40% hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Desa-desa mandiri ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, tetapi juga aktif dalam



pengembangan ekonomi lokal. Mereka telah berhasil mengelola potensi sumber daya alam dan manusia, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar. Namun, tantangan tetap ada. Masih ada banyak desa yang berada pada kategori desa berkembang dan tertinggal, yang memerlukan perhatian dan program pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat proses transformasi ini. Dengan terus berupaya meningkatkan persentase desa mandiri, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana setiap desa memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

3. Indeks Desa Membangun

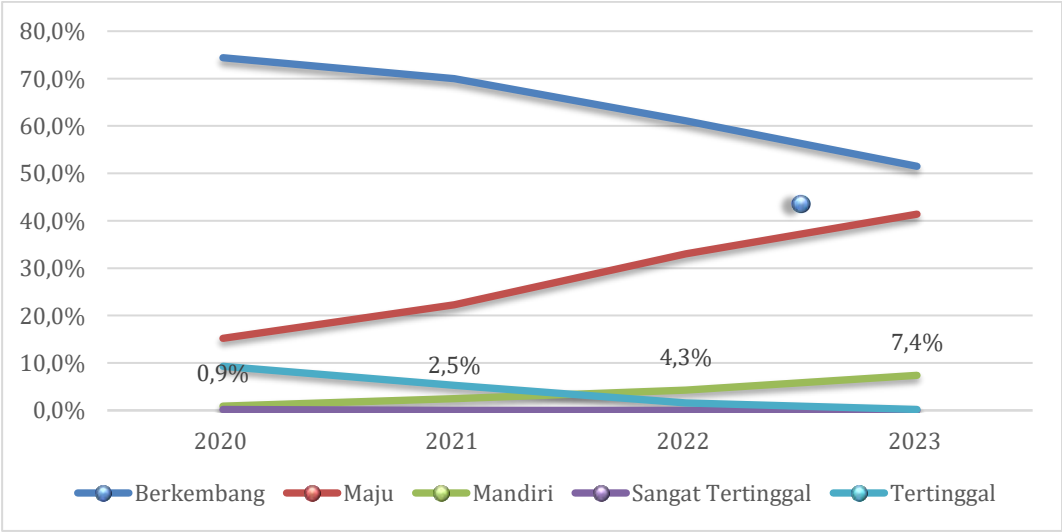
Sejak tahun 2024, telah dilakukan proses revitalisasi terhadap alat ukur pembangunan desa di Indonesia. Sebelumnya, terdapat dua indikator yang digunakan secara paralel, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT, dan Indeks Desa (ID) yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Namun, berdasarkan arahan Presiden dan hasil kesepakatan lintas kementerian/lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, BPS, dan Kementerian Keuangan, disepakati untuk mengintegrasikan alat ukur tersebut menjadi satu indikator tunggal, yaitu Indeks Desa (ID).

Indeks Desa secara resmi diluncurkan pada 4 Maret 2024 dan ditetapkan sebagai satu-satunya alat ukur pembangunan desa yang digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Indikator utama yang digunakan adalah Persentase Desa Mandiri, yang kini tercantum sebagai salah satu dari 45 Indikator Utama Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Penggunaan ID menggantikan IDM secara penuh, dengan basis data yang telah diperbaharui dan pendataan yang lebih komprehensif, meliputi 6

dimensi dan 48 indikator penyusun, serta mengadopsi metodologi yang lebih mutakhir dan representatif.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan harmonisasi data, efektivitas perencanaan pembangunan desa, serta mempermudah integrasi antara dokumen RPJMN dengan RPJMD di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 2. 138 Indeks Desa Membangun Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber:

1. Tahun 2020 : Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020
2. Tahun 2021 : Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021
3. Tahun 2022 : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 80 Tahun 2022
4. Tahun 2023 : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 174 Tahun 2023

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

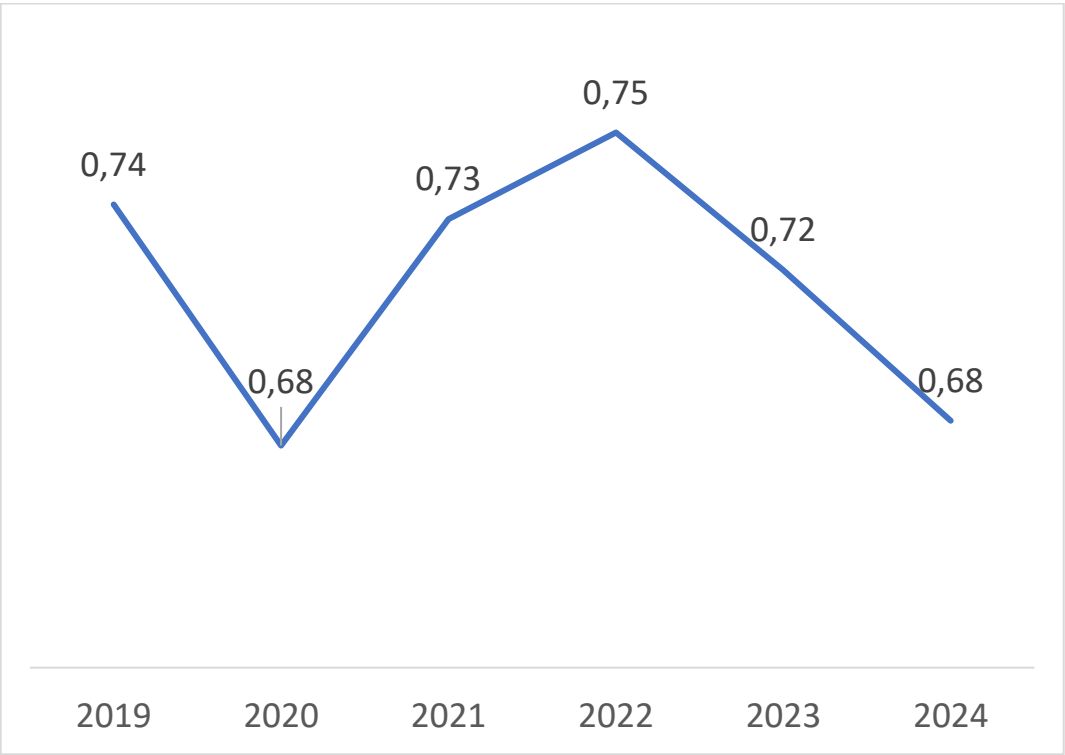
1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Pajak daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP). Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (*economy*), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (*tax ratio*), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak

dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu daerah dengan PDRB, angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pajak yang diterima dan PDRB Provinsi Lampung mengalami peningkatan, kecuali Tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19. Namun peningkatan pajak tidak sebanding dengan peningkatan PDRB Provinsi Lampung sehingga pada Tahun 2023 rasio pajak terhadap PDRB Provinsi Lampung menurun menjadi 0,72 persen dibanding Tahun 2022 sebesar 0,75 persen.

Gambar 2. 139 Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023

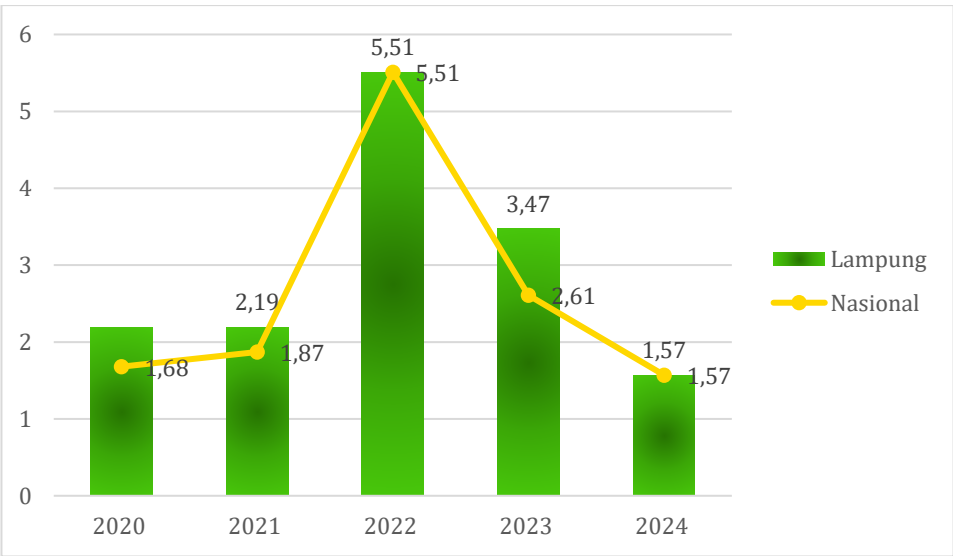


Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2024 diolah

2. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

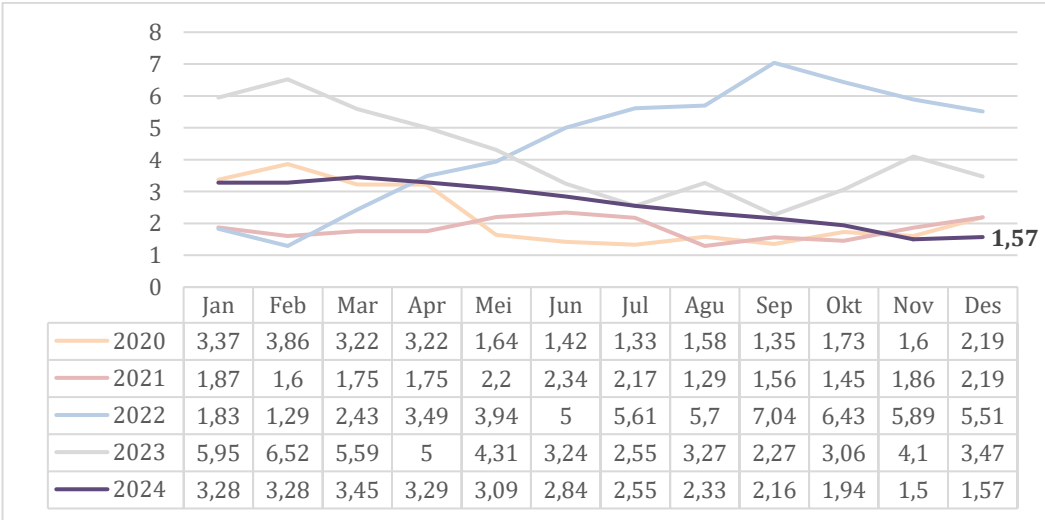
Gambar 2. 140 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara tahunan (y to d), inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada Triwulan IV 2024 tercatat masih berada pada rentang sasaran inflasi yaitu $3\% \pm 1$, yaitu senilai 1,57%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2023 sebesar 3,47%. Capaian Tahun 2024 tersebut terpantau sama dengan inflasi nasional sebesar 1,57% (y on y), namun lebih rendah daripada inflasi gabungan 28 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,17% (y to d).

Gambar 2. 141 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan IV 2024 tercatat terkendali, inflasi bulanan Lampung sebesar 0,47% (mtm) dan inflasi tahunan Lampung mencapai 1,57% (yoy), sama dengan angka inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy). Penyumbang inflasi terbesar pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh lima komoditas dengan andil



inflasi terbesar dari komoditas cabai merah sebesar 0,12 persen, bawang merah sebesar 0,08 persen, telur ayam ras 0,05 persen. Kemudian disusul cabe rawit 0,05 persen, dan terong sebesar 0,04 persen.

Untuk wilayah Sumatera, dengan capaian tersebut, Provinsi Lampung menempati peringkat ke-16 secara nasional dan tidak termasuk dalam 7 provinsi dengan inflasi tertinggi. secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Lampung, seperti Bandar Lampung (1,67%), Metro (1,51%), Mesuji (1,78%), dan Lampung Timur (1,37%), berada dalam target sasaran inflasi nasional.

Provinsi Lampung mendapat alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,8 Milyar rupiah. Upaya - upaya yang telah dan akan dilakukan dalam pengendalian inflasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung berupa strategi ketersediaan pasokan, strategi keterjangkauan harga, strategi kelancaran distribusi, dan strategi komunikasi yang efektif melalui diskusi, pemantauan harga langsung ke pasar - pasar besar.

Beberapa upaya juga dilakukan dalam penanganan inflasi dan kemiskinan di Provinsi Lampung, seperti :

- a. Peningkatan industri pengolahan dengan meningkatkan kompetensi para IKM yang ada di Provinsi Lampung untuk ikut serta dalam era Industri 4.0;
- b. Hilirisasi yang juga menjadi perhatian bagi pemerintah pusat di mana dapat memicu penyerapan modal dari luar Provinsi Lampung dan juga penyerapan tenaga kerja;
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), menumbuh-kembangkan rasa cinta masyarakat Lampung untuk menggunakan dan mengkonsumsi produk hasil Provinsi Lampung sendiri.
- d. Serta mengajak para IKM untuk dapat bersaing dengan daerah daerah lain dapat menjual produknya dengan standar siap ekspor.

Upaya sinergi dan koordinasi TPID akan terus menjadi kunci dalam pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Lampung. Capaian inflasi yang terkendali, menunjukkan keberhasilan strategi

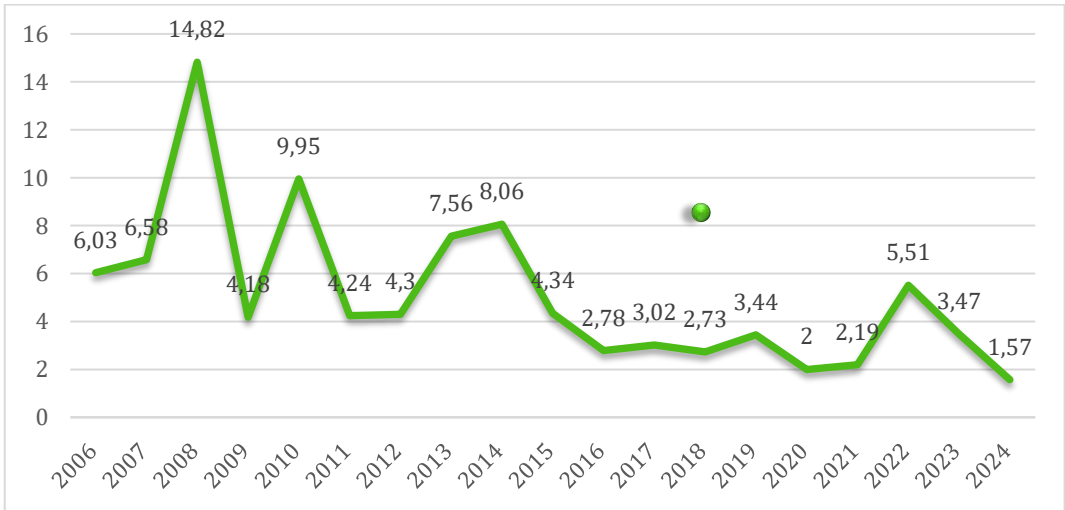


pengendalian harga di Lampung, sekaligus memperkuat optimisme dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.

Pengendalian Inflasi. Data statistik Lampung menunjukkan bahwa lebih 60 persen porsi perekonomian Lampung ditopang oleh konsumsi masyarakat, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang juga dominan pada sisi permintaan (*demand*). Pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat, diantaranya dengan memperkuat program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif). Menguatnya daya beli masyarakat akan mendorong bergeraknya perekonomian pada sisi penawaran (*supply*). Pengendalian inflasi dalam tingkat yang wajar, akan menjadi insentif bagi pelaku ekonomi untuk terus memproduksi. Inflasi yang berlebihan akan menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya menggerus kualitas pertumbuhan ekonomi.

Tingkat inflasi Lampung pada periode tahun 2005-2010 sangat fluktuatif dan sempat berada pada level dua digit. Sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan oleh pemerintah pusat, sinergitas pengendalian inflasi di daerah dan antardaerah semakin diperkuat untuk menghadapi berbagai tekanan inflasi yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal dalam perekonomian. Sejak tahun 2011 tingkat inflasi terus dijaga pada rentang sasaran yang mendukung kondisi perekonomian. Pengendalian inflasi berfokus untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis, yang didukung dengan upaya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan antisipasi terhadap ancaman cuaca ekstrem yang dapat mengganggu rantai pasok bahan pangan masyarakat. Catatan pada lima tahun terakhir telah menunjukkan bahwa tingkat inflasi Lampung berada pada level 2-5 persen dan menjadi momentum untuk terus mendukung upaya pembangunan ekonomi yang diharapkan.

Gambar 2. 142 Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2006-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Birokrasi

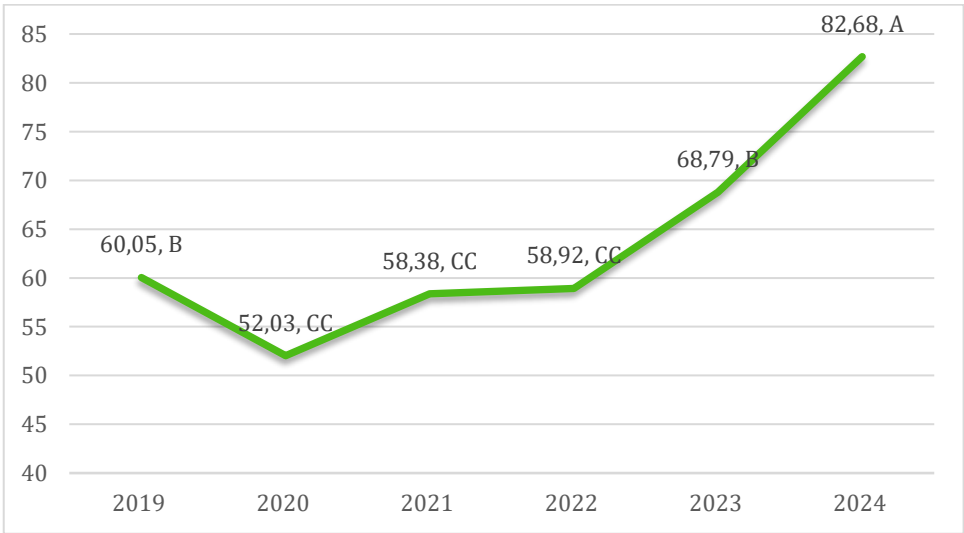
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah pusat melaksanakan dan menyusun peta jalan “Reformasi Birokrasi” di seluruh Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2010-14, Tahun 2015-2019, dan Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus

terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 2024.

Gambar 2. 143 Indeks Reformasi Birokrasi



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi terus mengalami perbaikan dari tahun 2020 dengan predikat cukup yang bertahan 3 tahun lalu mengalami perbaikan hingga menyandang predikat memuaskan.

2. Indeks Materi Hukum dengan Proksi Daerah : Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang terfokus pada penajaman pelaksanaan reformasi pada substansi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia sebagai *leading institution* pada pelaksanaan program meso pada lingkup reviu terhadap Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan pengukuran Indeks Reformasi Hukum, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan serta sistem regulasi pusat maupun daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) yaitu:

1. memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam pengharmonisasian regulasi;
2. mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu;
3. mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan; serta
4. meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (*legal drafter*) pusat maupun daerah.

Untuk pelaksanaan/implementasi Indeks Reformasi Hukum di Provinsi Lampung bahwa di tahun 2024 (triwulan I dan II) melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah dilakukan pengharmonisasian produk hukum daerah yang meliputi 2 (dua) peraturan daerah dan 2 (dua) Keputusan Gubernur yaitu melalui penginputan pada aplikasi Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; berkoordinasi secara langsung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung (pertemuan dan rapat koordinasi); serta pengharmonisasian peraturan perundangan/produk hukum daerah sebanyak 2 (dua) rancangan peraturan daerah.

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola

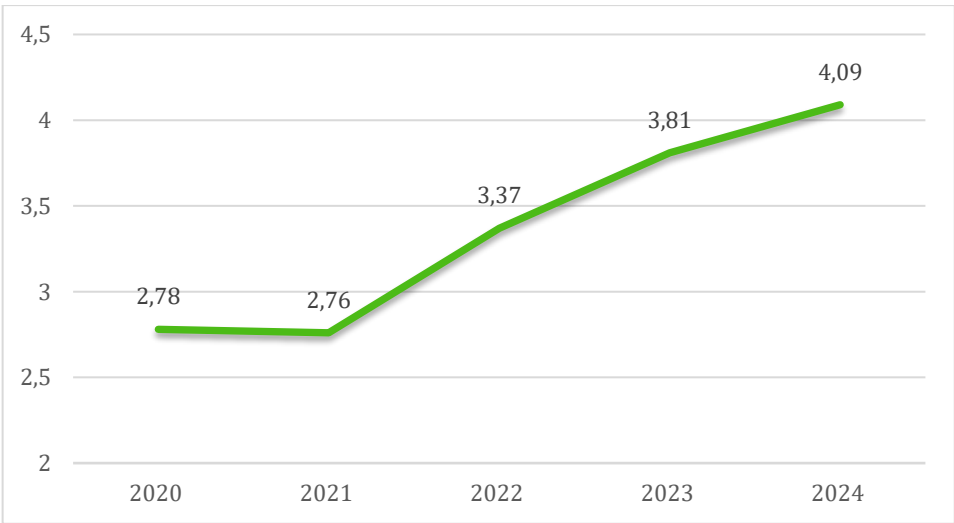


pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau *Electronic Government (E-Government)* melalui penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, ASN, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel; meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama; meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas; serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Dalam rangka mendukung implementasi SPBE, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dan *stakeholder* terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis elektronik. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, capaian Indeks SPBE Provinsi Lampung mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020 sebesar 2,78 (kategori cukup) kemudian meningkat di tahun 2024 sebesar 4.09 (kategori sangat baik), untuk perkembangannya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 144 Capaian Indeks SPBE Provinsi Lampung, 2020-2024



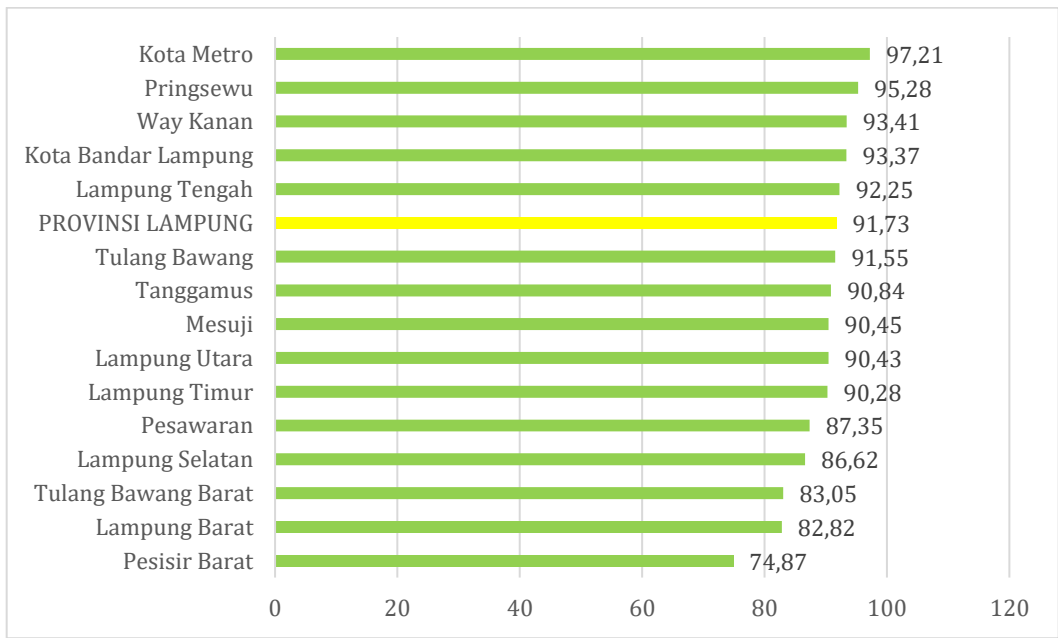
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2025

4. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, bahwa Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan serta inovasi. penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya desk evaluation; observasi lapangan; kuesioner; dan/atau wawancara.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah diawasi oleh lembaga negara, yaitu Ombudsman, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BMHN) serta badan swasta/perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Pada tahun 2024, Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 2. 145 Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2024



Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung berada pada kualitas sedang dari segi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk Provinsi Lampung juga. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya:

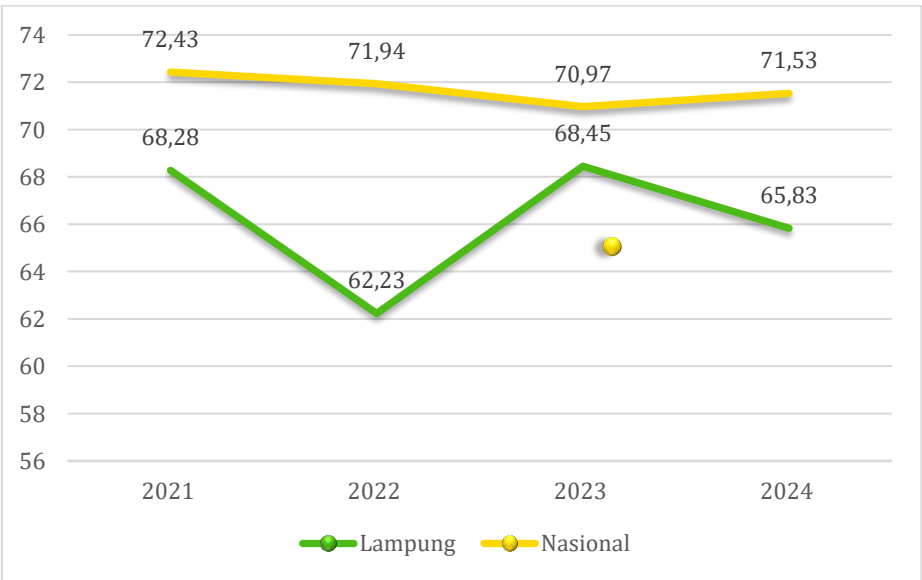
1. Revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi di bidang pelayanan publik;
2. Peningkatan profesionalisme pejabat pelayan publik;
3. Korporatisasi unit pelayanan publik;
4. Pengembangan dan pemanfaatan Elektronik Government (E-Government) bagi instansi pelayanan publik;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; serta
6. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit penyelenggara pelayanan Masyarakat

5. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat serta data obyektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan dan

para pihak pemangku kepentingan. Dari Indeks Integritas Nasional diperoleh nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dinilai dengan meliputi 7 (tujuh) elemen yaitu pengelolaan pengadaan barang dan jasa; integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan anggaran; transparansi; perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*); pengelolaan sumber daya manusia dan sosialisasi anti korupsi. Untuk capaian SPI Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masih tergolong dalam kategori sedang dengan rincian sebagai berikut

Gambar 2. 146 Survei Penilaian Integritas Provinsi Lampung, 2021-2024



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2025
Dari hasil survey tersebut kemudian dihasilkan beberapa poin rekomendasi yaitu:

- Meminimalisir perdagangan pengaruh dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan daerah;
- Memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi;
- Optimalisasi pengawasan internal dan eksternal;
- Penguatan sosialisasi, kampanye dan pelatihan antikorupsi terhadap pegawai/pejabat dan pengguna layanan;
- Peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan *Conflict of Interest* (COI); dan
- Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait korupsi.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan di tingkat lokal. Sebagai instrumen hukum yang lahir dari kebutuhan dan karakteristik daerah, Perda harus ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Penegakan Perda yang berkeadilan tidak hanya menegaskan kewibawaan pemerintah daerah, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar melindungi kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok rentan. Ketika penegakan Perda dilakukan secara transparan dan akuntabel, hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mencerminkan substansi demokrasi yang partisipatif.

Selain itu, Perda memiliki peran strategis dalam memperkuat keamanan nasional yang tangguh. Melalui regulasi yang mengatur ketertiban umum, pengelolaan sumber daya, serta pencegahan potensi konflik sosial, Perda mampu menjaga stabilitas sosial di daerah yang berdampak langsung pada keamanan nasional. Penegakan yang konsisten terhadap Perda juga mencerminkan kualitas demokrasi substantif, di mana hukum tidak hanya menjadi produk politik, tetapi juga sarana untuk menjamin keadilan sosial dan ketertiban bersama. Oleh karena itu, penegakan Perda harus selalu selaras dengan prinsip keadilan, keamanan berkelanjutan, dan nilai-nilai demokrasi yang hidup dalam masyarakat.

2. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian aksi Hak Asasi Manusia di daerah (HAMP) menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga. Aksi HAMP mencakup berbagai bidang seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, serta hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Tingginya persentase capaian menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam

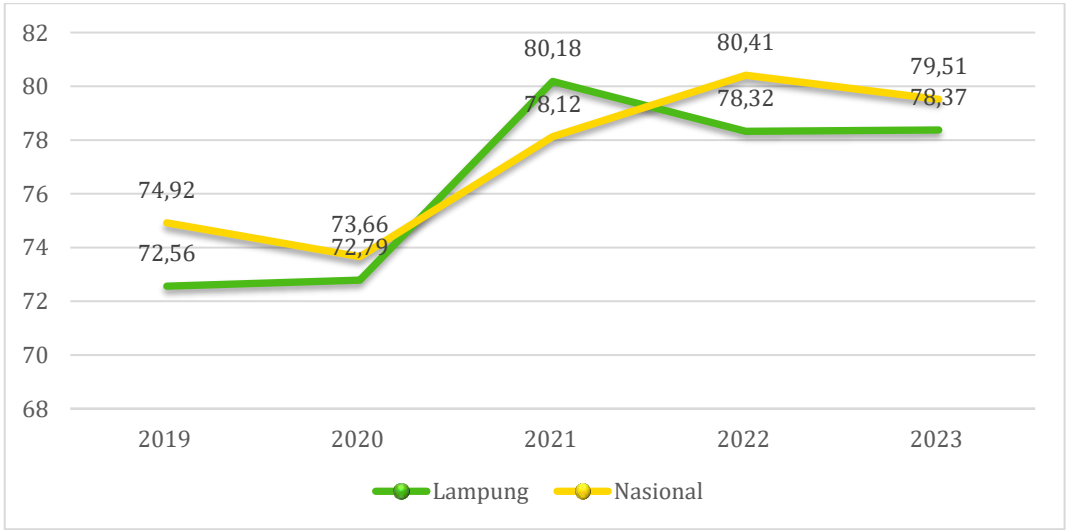
mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mendukung demokrasi substantif, karena hak asasi manusia adalah fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Dalam konteks keamanan nasional yang tangguh, capaian aksi HAMP juga memainkan peran strategis. Ketika hak-hak warga dihormati dan dipenuhi, potensi konflik sosial dapat ditekan, dan kepercayaan terhadap negara semakin kuat. Sebaliknya, jika pemenuhan HAM diabaikan, ketidakpuasan publik bisa tumbuh menjadi ketegangan sosial yang mengancam stabilitas. Oleh karena itu, capaian aksi HAMP tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai refleksi nyata dari keberhasilan pembangunan daerah yang adil, aman, dan demokratis secara substansial.

3. Indeks Demokrasi Indonesia

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 22 indikator demokrasi.

Gambar 2. 147 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
** 2021 dan 2022 metode baru

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi,



yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Indeks Demokrasi Indonesia khususnya Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat IDI Lampung pada tahun 2021 mencapai 80,18 atau kategori tinggi. IDI Lampung tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni, 72,79. Terdapat perubahan metode penilaian IDI pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total ada 28 aspek yang menjadi indikator penilaian. Namun untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aspek yang dijadikan penilaian hanya 22 jenis yang termuat dalam tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. IDI Lampung tahun 2021 yang mencapai 80,18 terdiri dari tiga komposisi nilai, yakni aspek kebebasan 76,64, Aspek kesetaraan 81,82 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 81,96. Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 78,32. Angka capaian ini berada di atas target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 yaitu 74.

4. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan penggabungan dari beberapa pendekatan/aspek yang mencakup rasa keamanan manusia yang terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu 1) keamanan dari bencana; 2) pemenuhan kesejahteraan sosial; 3) perlindungan dan pemanfaatan atas Kebhinekaan; serta 4) keamanan dari kekerasan. Dengan demikian, Indeks Rasa Aman sedianya dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat keamanan rakyat Indonesia yang dapat dijadikan modal dalam penentuan dasar perencanaan, proyeksi, atau implementasi program pembangunan; menjadi sistem pencegahan dini (*Early Warning Sistem*) berdasarkan komponen kebencanaan; menjadi sistem dukungan bagi pengambilan keputusan; dan tolak ukur bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan masyarakat.

5. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan aksi massa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, personil Linmas yang terlibat masih kurang dan belum optimalnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung mencatat 301 kasus sengketa tanah selama periode tahun 2015 s.d. 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi konflik tanah antar-masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Beberapa tindak kekerasan telah terjadi di Provinsi Lampung. Data menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di setiap wilayah kabupaten/kota sangat beragam. Menurut data dari Kepolisian Daerah Lampung, jumlah tindak pidana kriminalitas total di Provinsi Lampung selama tahun 2020 sejumlah 8.829 kasus atau rata-rata 735 kasus per bulan.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks ini menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan peta sebaran skor IDSD pada gambar di bawah, skor IDSD yang lebih dari 3,51 di Tahun 2024 masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara hampir semua provinsi di Pulau Sumatera berada pada rentang skor IDSD 3,01 – 4,00.

Gambar 2. 148 Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Buku Indeks Daya Saing Daerah 2024 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 Provinsi Lampung tercatat sebesar 3,46 dari Skala 5, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,36. Capaian ini, sedikit lebih tinggi dari rerata nasional (3,43) dan identik dengan rata-rata kabupaten/kota di provinsi Lampung, mencerminkan distribusi daya saing yang relatif merata meskipun terdapat disparitas antar daerah. Pilar terkuat provinsi Lampung adalah Pilar 10 (Ukuran Pasar) dengan skor 4,61, diikuti Pilar 1 (Institusi) dengan skor 4,13, sedangkan kelemahan utama terletak pada Pilar 7 (Pasar Produk), Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja), dan Pilar 9 (Sistem Keuangan) yang seluruhnya berada jauh di bawah rerata nasional. Hasil skoring menunjukkan sebanyak enam kabupaten/kota memiliki skor di atas provinsi, yaitu Kota Metro (4,12), Kota Bandar Lampung (3,80), Lampung Selatan (3,56), dan Pringsewu (3,70), Lampung Tengah (3,47) dan Lampung Utara (3,49). Sementara sembilan daerah lainnya masih tertinggal diantaranya adalah Pesisir Barat (3,12), Mesuji (3,16), dan Tulang Bawang Barat (3,26). Skoring antar daerah menunjukkan ketimpangan cukup mencolok, dengan rentang skor IDSD dari yang tertinggi 4,12 di Kota Metro hingga yang terendah 3,12 di Kabupaten Pesisir Barat, menunjukkan perlunya

intervensi khusus di wilayah-wilayah tertinggal seperti Mesuji dan Pesisir Barat, serta replikasi praktik baik dari daerah unggul seperti Kota Metro, Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Upaya strategis perlu difokuskan pada penguatan pilar-pilar lemah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan sosial, pemberdayaan UMKM, serta penerapan pendekatan klaster pembangunan guna mempercepat daya saing secara merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Tabel 2. 58 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Nama Kab/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM			PASAR			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
KOTA METRO	4,31	3,89	4,89	3,60	3,93	4,31	5,00	3,87	4,18	4,78	4,25	3,41	4.12
BANDAR LAMPUNG	4,06	3,95	4,88	3,79	3,91	3,95	0,01	3,85	3,82	4,76	4,63	3,95	3.80
PRINGSEWU	4,72	3,67	4,67	3,58	3,84	4,00	4,25	3,34	1,04	4,04	4,55	2,71	3.70
LAMPUNG SELATAN	4,60	3,77	4,58	3,74	3,75	3,41	3,14	2,62	1,70	4,64	4,31	2,47	3.56
LAMPUNG UTARA	3,85	4,11	4,40	3,42	3,74	3,65	3,74	3,01	1,10	4,37	4,87	1,65	3.49
LAMPUNG TENGAH	4,50	3,93	4,75	3,56	3,78	3,88	2,64	2,65	0,88	4,85	4,54	1,72	3.47
PROVINSI LAMPUNG	4,13	3,34	3,73	4,15	3,86	3,91	2,05	2,39	2,69	4,61	3,61	3,06	3.46
LAMPUNG BARAT	4,81	3,07	4,52	3,53	3,60	3,99	3,96	2,57	1,14	3,84	4,74	1,34	3.43
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3.43
TULANG BAWANG	4,19	3,36	4,66	3,89	3,79	3,57	2,75	2,37	1,44	4,35	4,85	1,68	3.41
PESAWARAN	4,38	3,68	4,65	3,56	3,73	3,54	3,25	2,83	0,92	4,21	4,49	1,64	3.41
LAMPUNG TIMUR	4,30	3,64	4,40	3,53	3,86	3,84	2,65	2,52	0,79	4,60	4,26	1,98	3.36
TANGGAMUS	4,20	3,30	4,21	3,40	3,69	3,94	3,74	2,43	1,31	4,18	4,48	1,34	3.35
WAY KANAN	4,27	3,72	4,59	3,59	3,75	3,69	2,85	2,82	0,90	4,13	4,57	0,99	3.32
TULANG BAWANG BARAT	4,15	3,30	4,66	3,64	3,79	3,50	2,66	2,16	1,73	4,04	4,67	0,82	3.26
MESUJI	4,19	2,61	4,66	3,85	3,65	3,62	2,57	2,52	1,29	3,99	4,22	0,75	3.16
PESISIR BARAT	4,26	2,79	3,65	3,57	3,82	3,82	3,50	2,56	0,75	3,61	4,28	1,39	3.12

Sumber: Buku Indeks Daya Saing Daerah 2024 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Pilar 1 : Institusi	Pilar 5 : Kesehatan	Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 2 : Infrastruktur	Pilar 6 : Keterampilan	Pilar 10: Ukuran Pasar
Pilar 3 : Adopsi TIK	Pilar 7 : Pasar Produk	Pilar 11: Dinamisme Bisnis
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja	Pilar12 : Kapabilitas Inovasi

2.1.4.4 Indikator Kinerja Utama Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan secara efektif dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Urusan-urusan ini mencakup bidang wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta urusan pilihan seperti pariwisata dan pertanian. Penilaian terhadap kinerja dilakukan berdasarkan capaian program, serapan anggaran, serta hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Secara umum, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan melalui perencanaan yang terukur, pelaporan yang transparan, dan pengawasan yang akuntabel. Evaluasi kinerja menjadi penting tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan peningkatan kinerja di tiap urusan, Provinsi Lampung diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan tata pemerintahan yang responsif, efisien, dan demokratis.

Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah

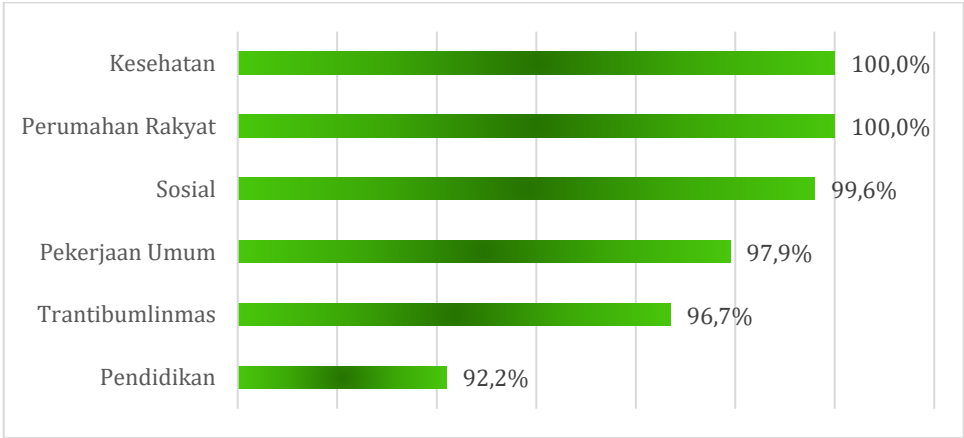
No	Indikator Kinerja Utama Provinsi	Satuan	Realisasi 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.57
2	Inflasi	Persen	1.57
3	Indeks Gini	Poin	0,301 (Sep)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.19
5	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	2,31 (Tw I)

No	Indikator Kinerja Utama Provinsi	Satuan	Realisasi 2024
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73.13
7	Prevalensi Stunting	Persen	15.9
8	Indeks Perlindungan Anak	Poin	64.78
9	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0.399
10	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	10.62
11	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Persen	88.34
12	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	15.86
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73.11
14	Indeks Risiko Bencana	Poin	130.1
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A (82,34)
16	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4.27
17	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	78.37
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74.04
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	57.82

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan landasan hukum yang menjadi pedoman bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dari tiap urusan diatur melalui Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan terkait atau Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Gambar 2. 149 Realisasi Capaian SPM Prov. Lampung Tahun 2024

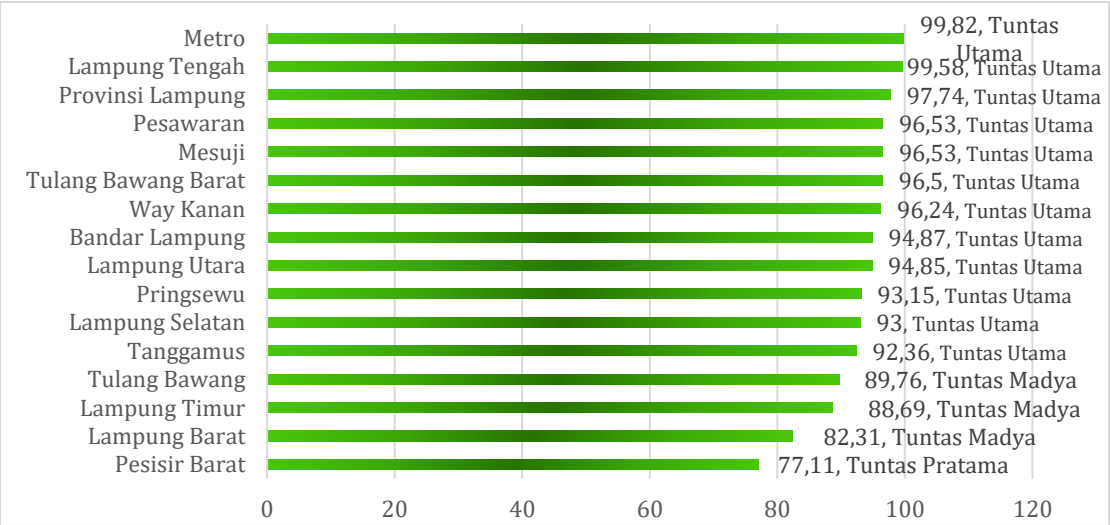


Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

Gambar 2.146 di atas menunjukkan bahwa 6 urusan SPM Provinsi Lampung di tahun 2024 telah berada pada capaian tinggi. Kategori Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Tuntas Paripurna dengan capaian 100 persen dicapai pada urusan Kesehatan dan Perumahan

Rakyat. Sedangkan untuk empat urusan lainnya, yaitu urusan Sosial, Pekerjaan Umum, Trantibumlinmas, dan Pendidikan, termasuk dalam kategori IP SPM Tuntas Utama. Secara keseluruhan, grafik diatas merefleksikan keberhasilan Provinsi Lampung dalam pemenuhan 6 urusan SPM, meskipun masih terdapat ruang perbaikan khususnya pada urusan Sosial, Pekerjaan Umum, Trantibumlinmas, dan Pendidikan.

Gambar 2. 150 Capaian SPM per Urusan Kab/Kota Tahun 2024



Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

Berdasarkan Gambar 2.147 diatas, terdapat 11 Kabupaten/Kota dengan capaian diatas 90 persen. Sedangkan 4 Kabupaten sisanya memiliki capaian dibawah 90 persen, dengan capaian terendah sebesar 77,11 persen ditempati oleh Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2. 60 Capaian SPM Per Urusan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Capaian SPM Tahun 2024 (%)						Rata-rata	IP (Indeks Pencapaian) SPM
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	Metro	100	100	100	100	98,89	100	99,82	Tuntas Utama
2	Lampung Tengah	100	97,45	100	100	100	100	99,58	Tuntas Utama
3	Pesawaran	99,92	87,6	100	100	91,67	100	96,53	Tuntas Utama
4	Mesuji	94,87	86,74	100	100	98,16	99,4	96,53	Tuntas Utama
5	Tulang Bawang Barat	94,99	93,71	91,23	100	100	99,07	96,50	Tuntas Utama
6	Way Kanan	90,32	93,18	100	100	99,56	94,36	96,24	Tuntas Utama
7	Bandar Lampung	100	100	96,84	100	86,8	85,6	94,87	Tuntas Utama
8	Lampung Utara	87,42	86,75	97,39	100	100	97,55	94,85	Tuntas Utama
9	Pringsewu	82,1	86,64	100	100	95,67	94,5	93,15	Tuntas Utama
10	Lampung Selatan	66,25	97,78	100	95	98,96	100	93,00	Tuntas Utama
11	Tanggamus	86,15	93,43	81,78	95	97,77	100	92,36	Tuntas Utama
12	Tulang Bawang	87,71	92,81	100	76,92	83,36	97,76	89,76	Tuntas Madya
13	Lampung Timur	66,58	83,61	90,33	95	97,07	99,56	88,69	Tuntas Madya
14	Lampung Barat	70,77	93,11	91,49	50	96,24	92,25	82,31	Tuntas Madya
15	Pesisir Barat	61,03	87,4	100	100	67,33	46,92	77,11	Tuntas Pratama

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id



Tabel Capaian SPM Per Urusan Kabupaten/Kota Tahun 2024 diatas memperlihatkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota berada pada kategori "Tuntas Utama" dalam Indeks Pencapaian (IP) SPM, dengan capaian rata-rata di atas 90 persen. Kinerja penerapan SPM terbaik dipegang oleh Kota Metro dengan IP SPM 99,82 persen yang menunjukkan konsistensi yang sangat baik dalam pemenuhan di seluruh urusan SPM. Di sisi lain, Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan capaian terendah, dengan kategori "Tuntas Pratama" dengan rata-rata penerapan SPM sebesar 77,11 persen.

Berdasarkan capaian SPM per urusan, Perumahan Rakyat umumnya menunjukkan capaian maksimal, yaitu 100 persen di 10 Kabupaten/Kota. Adapun posisi terendah capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat ditempati oleh Kabupaten Lampung Barat dengan capaian 50 persen. Pada Urusan Pendidikan, terdapat 3 Kabupaten yang capaiannya dibawah 70 persen, yaitu Pesisir Barat, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Sedangkan untuk urusan Sosial dan Trantibumlinmas, capaian terendah ditempati oleh Kabupaten Pesisir Barat. Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Lampung menunjukkan capaian SPM yang sangat baik secara agregat, namun masih terdapat disparitas antar daerah yang cukup jauh, sehingga perlu menjadi perhatian lebih lanjut.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Berdasarkan PP. Nomor 28/2018, “Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan,”

Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari semangat otonomi daerah yang kondusif dan produktif dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif. Kerja sama tidak hanya sebatas legal formal berbentuk dokumen kesepakatan bersama akan tetapi agar segera ditindaklanjuti perjanjian kerjasamanya sehingga akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan

masyarakat. Lebih lanjut, sebelum melaksanakan kerjasama tentunya daerah melakukan pemetaan potensi daerah yang ada sehingga kerjasama yang nantinya akan dilakukan merupakan prioritas di daerah tersebut.

No	Substansi Kerjasama	Pihak yang terlibat	Jangka Waktu Kerjasama
1	Nota Kesepahaman Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pemerintah Provinsi Lampung	- Biro Perekonomian Setda Prov Lampung - KPPU Provinsi Lampung	
2	Perjanjian Kerjasama Tentang Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	- Dinas KPTPH Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2025-2029
3	Perjanjian Kerjasama Tentang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Dinas KPTPH Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2025-2029
4	Perjanjian Kerjasama Tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2025-2029
5	Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Masjid Raya Al Bakrie Lampung	- Pemerintah Provinsi Lampung - Yayasan Bakrie Amanah	Dimulai tahun 2025
6	Kerjasama <i>Sister Province</i>	- Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Shandong (Rep. Rakyat Tiongkok)	Dimulai tahun 2025
7	Perjanjian Kerjasama Tentang Pembangunan dan Pengembangan Pertanian	- Dinas KPTPH Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2025-2029
8	Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pembangunan Stasiun Pengisian	Dinas ESDM Provinsi Lampung	Dimulai Tahun

No	Substansi Kerjasama	Pihak yang terlibat	Jangka Waktu Kerjasama
	Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)	PT. PLN UID Lampung	2025
9	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Antar Daerah melalui percepatan konektivitas wilayah Perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemanfaatan Bersama Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan	- Pemprov. Lampung - Pemprov Sumatera Selatan - PemKab Way Kanan - Pemkab Lampung Barat - Pemkab Ogan Komering Ulu - Pemkab Ogan Komering Ulu Timur - Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan	Dimulai Tahun 2024
10	Kesepakatan bersama tentang pemindahtanganan dan perubahan nama pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada sebagian area persetujuan penggunaan kawasan Hutan PT.Tanggamus Electric power di area hutan register 39	- Dinas BMBK - PT. TEP	Dimulai Tahun 2025
11	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	- Pemprov. Lampung dengan Pemprov Jawa Timur - Pemprov Lampung dengan Pemprov Bali - Pemprov Lampung dengan Pemprov Kepri	Tahun 2023-2028 Tahun 2023-2028 Tahun 2023-2025
12	Perjanjian Kerjasama Tentang Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Mekanisme PTSP di Provinsi Lampung	- DPMPTSP Prov Lampung - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah III	Tahun 2025-2028
13	Perjanjian Kerjasama Tentang Peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- DPMPTSP Prov Lampung - DPMPTSP Prov Sumatera Selatan	Tahun 2024-2029

No	Substansi Kerjasama	Pihak yang terlibat	Jangka Waktu Kerjasama
14	Kesepakatan Bersama Tentang Kerja Sama Sub Regional Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat, Penanggulangan Permasalahan Sosial, Serta Penanggulangan Bencana	Pemprov Lampung	Tahun 2024-2027
		Pemprov Sumatera Selatan	
		Kabupaten Way Kanan	
		Kabupaten Ogan Komering	
15	Rencana Kerjasama antara Pemprov Lampung dengan Citaglobal Environemnt Management Sdn. Bdn (Malaysia) tentang kerja sama dalam penyusunan kajian pengembangan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dan pembangkit listrik tenaga surya di Provinsi Lampung	Pemprov Lampung	Tahun 2025
		Malaysia	
	Kerjasama Pemprov Lampung dengan STAR.VISION Aerospace Ltd. (Republik Rakyat Tiongkok) tentang kerja sama strategis dalam peningkatan kapasitas teknologi satelit dan aplikasi luar angkasa	Republik Ralyat Tiongkok	Tahun 2025

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Provinsi di Kabupaten/Kota

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Provinsi Lampung, arah pembangunan infrastruktur dirancang secara makro dan menyeluruh dengan mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keterpaduan antarwilayah. Perencanaan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh wilayah—baik pesisir, pedalaman, maupun perkotaan—memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur dasar dan strategis.

Arah pembangunan kewilayahan di Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 secara strategis dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta diperkuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2045. Arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMN difokuskan pada program-program pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan arah kebijakan dalam RPJPD Lampung diimplementasikan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta sumber pembiayaan lainnya seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pinjaman daerah, dan dana bantuan pusat.

Rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung mencakup sektor-sektor utama seperti transportasi, sumber daya air, energi dan ketenagalistrikan, permukiman, sanitasi dan air minum, telekomunikasi dan digitalisasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, meningkatkan daya saing daerah, serta membuka akses terhadap layanan dasar di seluruh kabupaten/kota.



Salah satu proyek prioritas strategis adalah pembangunan dan pengembangan Kota Baru di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan baru guna mengurangi tekanan urbanisasi di Kota Bandar Lampung. Urbanisasi yang pesat tanpa perencanaan yang matang telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, banjir, kawasan kumuh, dan menurunnya kualitas udara serta air. Kota Baru akan dikembangkan sebagai kawasan terpadu dengan infrastruktur modern yang mendukung fungsi hunian, perdagangan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Pengembangan ini tidak hanya bertujuan untuk mendistribusikan beban wilayah secara spasial, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat sistem perkotaan regional di Provinsi Lampung.

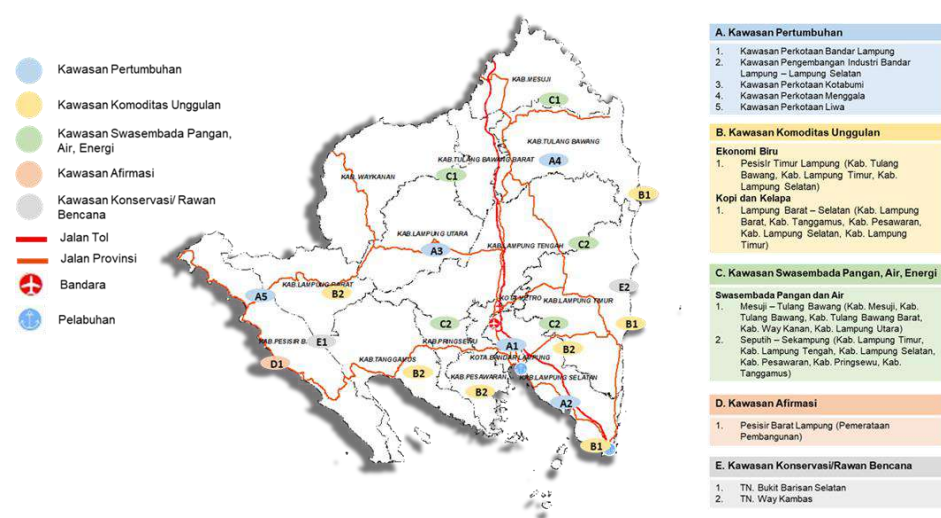
Selain itu, berbagai pembangunan infrastruktur lainnya tengah direncanakan dan dilaksanakan, seperti pembangunan jalan tol dan jalan strategis provinsi, jaringan irigasi dan pengendalian banjir, infrastruktur pelabuhan dan bandara, serta kawasan industri dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur, agar investasi publik dapat diarahkan pada sektor-sektor prioritas dan wilayah yang paling membutuhkan.

Rencana Pembangunan Infrastruktur tahun 2025-2029 adalah salah satu fokus utama dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. RPJMN menetapkan prioritas nasional yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci utama. Rencana pembangunan infrastruktur dalam RPJMN tercantum pada arah pengembangan kewilayahan yang dibagi per wilayah bahkan Provinsi dengan lokus di beberapa kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Provinsi Lampung yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota

melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Lampung pada RPJMN dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu: Kawasan Pertumbuhan; Kawasan Komoditas Unggul; Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi; Kawasan Afirmasi serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 151 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang Tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Dukungan program dan kegiatan pada Arah Pengembangan Kewilayahan RPJMN 2025-2029, tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 pada Bab IV. Lokasi prioritas rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan *highlight* indikasi intervensi antara lain:

Tabel 2. 61 Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Provinsi Lampung Pada RPJMN 2025-2029

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
A	1.	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung	a. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung antara lain melalui: - Penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
	2.	Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan	

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
			b Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman)
			c Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu a.l. VCO, tepung kelapa dan arang tempurung serta produk hilirisasi lanjutankelapa a.l. krimer nabati, santan instan dan karbon aktif
			d Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu a.l. raw sugar, GKP, molase, bagasse serta produk hilirisasi lanjutan tebu a.l. bioetanol, sirup glukosa dan bioplastik
			e Pengembangan pelabuhan Panjang
			f Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (PHTC)
			g Pengembangan SPAM Regional Pesawaran-Bandar Lampung-Lampung Selatan
			h Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang
			i Preservasi jalan ruas Bandar Lampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kota Agung dan Bandar Lampung-Metro-Sukadana
			j Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Interkoneksi Sumatera-Jawa (Jembatan Selat Sunda)
			k Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 Kv Kalianda-Merak (Interkoneksi 500 Kv Sumatera-Jawa)
			l Pembangunan TPST Regional Bandar Lampung-Metro-Lampung Selatan
			m Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bandar Lampung
			n Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung
			o Pembangunan Infrastruktur PLTP Rajabasa
			p Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningk

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			atan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan indusri wilayah
	3	Kawasan Perkotaan Kotabumi	a Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kotabumi, antara lain melalui: - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan b Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC) c Pengembangan SPAM Perkotaan Kotabumi d Peningkatan/pelebaran jalan ruas Kotabumi–Terbanggi Besar dan Kotabumi–Bukitkemuning–Blambangan Umpu e Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Mayor Jenderal HM Ryacudu Kotabumi (PHTC) f Pengembangan kota agropolitan Kotabumi
	4	Kawasan Perkotaan Menggala	a Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Menggala, antara lain melalui: - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
			b Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)
			c Pengembangan SPAM Perkotaan Menggala
			d Peningkatan/pelebaran jalan ruas Menggala–Wiralaga Mulya dan Menggala–Pancaragan
			e Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Menggala Tulangbawang (PHTC)
			f Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala)
			g Pengembangan kota agropolitan Menggala
	5	Kawasan Perkotaan Liwa	a Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Liwa, antara lain melalui: - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
			b Pengembangan SPAM Perkotaan Liwa
			c Peningkatan/pelebaran jalan ruas Liwa–Bukit Kemuning dan Liwa–Krui
			d Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa (PHTC)
			f Pengembangan kota agropolitan Liwa
	B KAWASAN KOMODITAS UNGGULAN		
	1.	Kawasan Komoditas	a Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
C		Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab.Lampung Selatan)	b Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Selatan
			c Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
			d Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan tangkap
			e Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat
			f Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
			g Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
			h Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
			2.
	b Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa)		
	c Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, kelapa)		
	d Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, kelapa)		
	e Pengembangan Produk Bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura		
	f Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan kelapa		
KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR DAN ENERGI			
1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Mesuji-Tulangbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara)	a Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Atas	
		b Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	
		c Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)	
		d Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan perternakan)	
		e Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			f Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
			g Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu
			h Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, Sub-DAS Way Umpu
			i Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
			j Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern /benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
			k Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			l Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
	2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus)	a Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem b Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah c peningkatan luas lahan pertanian (Ekstensifikasi) d Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi) e Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) f Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura g Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura h Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas i Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara j Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/ pakan organik

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			k Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen
			l Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
			m Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
D KAWASAN AFIRMASI			
	1	Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan)	a Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
			b Peningkatan ketahanan bencana
			c Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah
			d Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perkebunan (kopi) dan pariwisata bahari
			e Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
			f Peningkatan 6A pariwisata di Pesisir Barat

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			g Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui
			h Pengembangan SPAM Perkotaan Krui
			i Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan Krui (PHTC)
			j Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi & akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital
			k Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
			l Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kabupaten Pesisir Barat dan Tulang Bawang Barat.
			m Penambahan Sekolah baru tingkat Menengah Atas di Kabupaten Pesisir Barat
			n Peningkatan tipe Rumah Sakit dari tipe C ke tipe B
E KAWASAN KONSERVASI DAN RAWAN BENCANA			
1	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana yaitu: TN Bukit Barisan Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat) dan TN Way Kambas (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah)	a	Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
		b	Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
		c	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		d	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		e	Penguatan Hutan Lestari
		f	Perlindungan dan Pengamanan Hutan
		f	Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
		g	Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
		h	Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
2.	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung (Kab. Tanggamus, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Lampung Barat)	a	Penerapan Nature Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Pesisir Selatan Lampung (Megathrust Selat Sunda)
		b	Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)

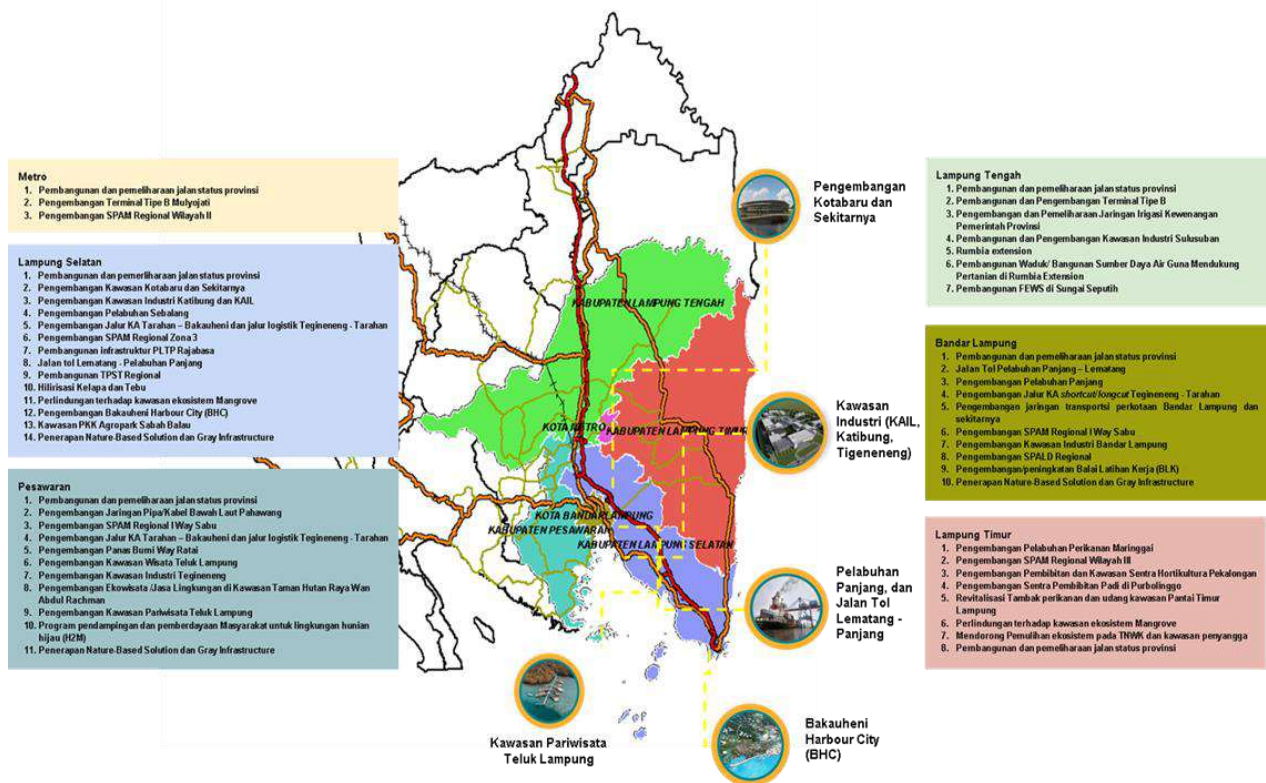
Lokasi Prioritas	<i>Highlight Indikasi Intervensi</i>
Provinsi Lampung	a. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	b. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah - Revitalisasi pendidikan nonformal
	- Penguatan pengetolaan dan ekselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
	c. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: - Penurunan kematian ibu dan anak - Pencegahan dan Penurunan stunting - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	d. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: - Penuntasan TBC - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa - Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
	e. Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
	f. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: - Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	- Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	g. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: - Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik
	- Penerapan <i>Internet of things (IoT)</i> di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time - Perluasan penggunaan kendaraan listrik
	h. Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: - Perluasan infrastruktur digital
	- Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital - Pembangunan jaringan <i>broodband</i> hingga ke pelosok
	i. Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: - Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital - Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN - Digitalisasi layanan publik prioritas - Pengembangan ekosistem layanan Publik digital
	j. Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, antara lain melalui: - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) - Penanggulangan judi dan penyelundupan - Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 telah tercantum kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan potensi wilayahnya. Rencana pembangunan ini merupakan kewenangan provinsi dimana pembangunannya bersumber pada alokasi dana APBD Provinsi ataupun diusulkan

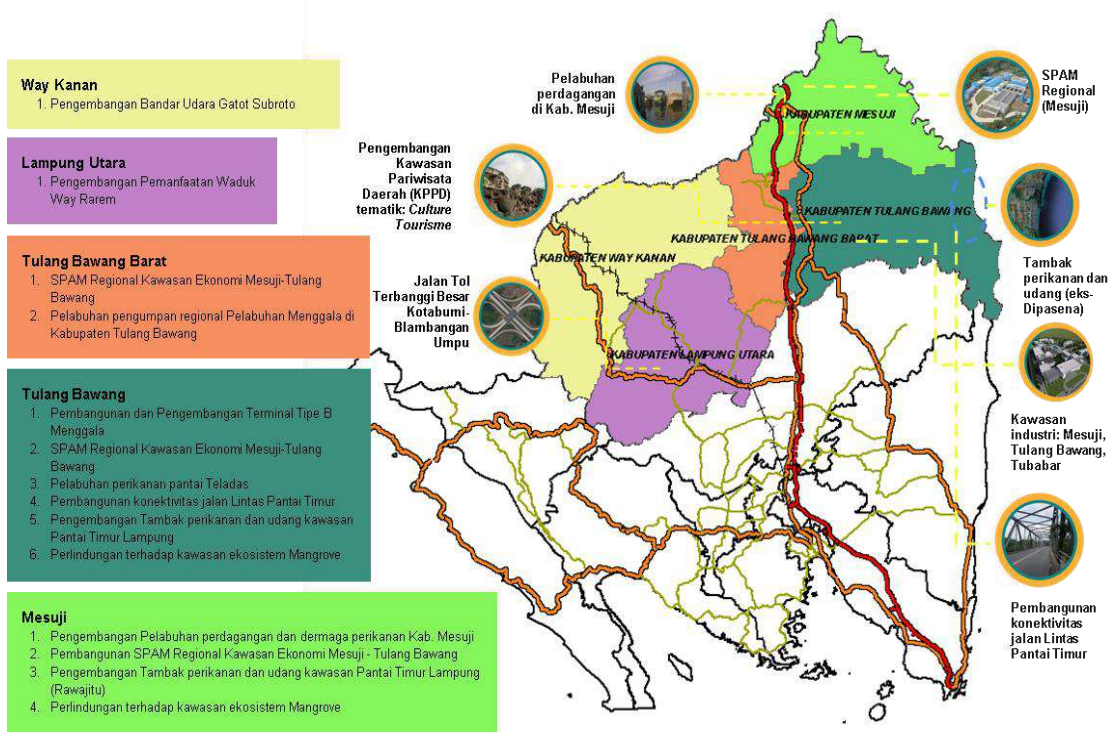
melalui pembiayaan APBN. Berikut adalah rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Lampung.

Gambar 2. 152 Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah I



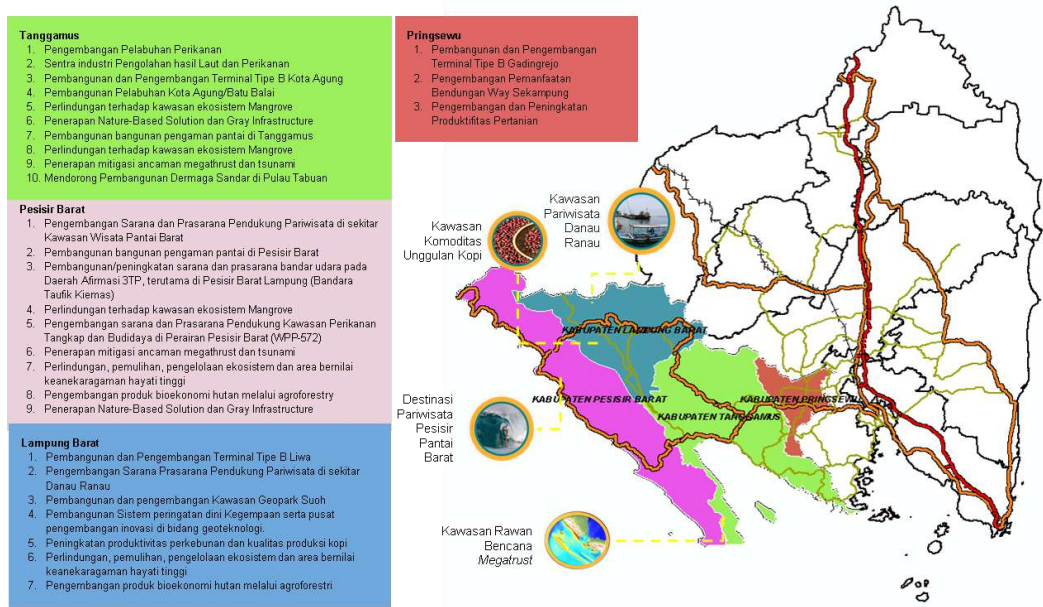
Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

Gambar 2. 153 Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah II



Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

Gambar 2. 154 Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah III



Sumber : Bappeda Prov Lampung 2025, data di olah

Arah pengembangan infrastruktur dan kewilayahan di Provinsi Lampung yang sebagian besar dilaksanakan melalui pembiayaan **APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota**, dengan fokus pada pemanfaatan potensi wilayah dalam tiga koridor ekonomi utama untuk mendorong pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dengan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

Tabel 2. 62 Arah Pengembangan Infastruktur Kewilayahan

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
Koridor Ekonomi Wilayah I : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi			
1	Lampung Timur	-	Pembangunan dan pemeliharaan jalan status provinsi
			Pembangunan jalan penghubung/lingkar Kawasan Metropolitan Lampung Raya

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan Maringgai
			Pengembangan SPAM Regional Wilayah III
			Pengembangan Pembibitan dan Kawasan Sentra Hortikultura Pekalongan
			Pengembangan Sentra Pembibitan Padi di Purbolinggo
			Revitalisasi Tambak Perikanan dan Udang Kawasan Pantai Timur Lampung
			Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove
			Mendorong Pemulihan Ekosistem pada TNWK dan Kawasan Penyangga
			Pembangunan Unit Sekolah Baru Tingkat SMA
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Penetapan Mitigasi Bencana terhadap ancaman bencana <i>Megathrust</i> & Tsunami
2	Lampung Selatan	Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan status provinsi

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
		(PKW) Perkotaan Kalianda	Pengembangan Kawasan Kotabaru dan Sekitarnya
			Pengembangan Kawasan Industri Katibung
			Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) I & II
			Pengembangan Pelabuhan Sebalang
			Pengembangan Jalur KA Tarahan-Bakauheni dan Jalur Logistik Tigeneneng - Tarahan
			Pengembangan SPAM Regional Zona III
			Penetapan Mitigasi Bencana terhadap ancaman bencana <i>Megathrust</i> & Tsunami
			Pembangunan Infrastruktur PLTP Rajabasa
			Jalan Tol Lematang - Pelabuhan Panjang
			Pembangunan TPST Regional
			Hilirisasi Kelapa dan Tebu
			Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove
			Pengembangan <i>Bakauheni Harbour City</i> (BHC)

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Kawasan PKK Agropark Sabah Balau
			Penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i>
			Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Lampung
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Pembangunan Lampung Sport Center
			Pembangunan Unit Sekolah Baru Tingkat SMA di Jatiagung
3	Lampung Tengah	-	Pembangunan dan pemeliharaan jalan status provinsi
			Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Sulusuban
			Rumbia <i>Extension</i>
			Pembangunan Waduk/Bangunan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pertanian di Rumbia Extension
			Pembangunan FEWS di Sungai Seputih

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Pembangunan unit sekolah baru tingkat menengah atas (SMA)
4	Pesawaran	-	Pembangunan dan pemeliharaan jalan status provinsi
			Pengembangan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Pahawang
			Pengembangan SPAM Regional I Way Sabu
			Pengembangan Jalur KA Tarahan-Bakauheni dan Jalur Logistik Tegineneng - Tarahan
			Pengembangan Panas Bumi Way Ratai
			Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Lampung
			Pengembangan Kawasan Industri Tegineneng
			Pengembangan Ekowisata / Jasa Lingkungan di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman
			Pengembangan Kawasan Pariwisata Teluk Lampung
			Program Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau (H2M)

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure Penetapan Mitigasi Bencana terhadap ancaman bencana Megathrust & Tsunami
5	Bandar Lampung	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Bandar Lampung	Pembangunan dan pemeliharaan jalan status provinsi
			Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang
			Pengembangan Pelabuhan Panjang
			Pengembangan Jalur KA shortcut/longcut Tegineneng - Tarahan
			Pengembangan jaringan transportasi perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya
			Pengembangan SPAM Regional I Way Sabu
			Pengembangan Kawasan Industri Bandar Lampung
			Pengembangan SPALD Regional
			Kawasan sekitar Bandara Radin Inten II
			Pembangunan RTLH Program Bantuan

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS)
			Pengembangan/peningkatan Balau Latihan Kerja (BLK)
			Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure Penetapan Mitigasi Bencana terhadap ancaman bencana Megathrust & Tsunami
6	Metro	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Metro	Pembangunan dan pemeliharaan jalan status provinsi
			Pembangunan jalan penghubung/lingkar Kawasan Metropolitan Lampung Raya
			Pengembangan Terminal Tipe B Mulyojati
			Pengembangan SPAM Regional Wiilayah II
Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism			
1	Lampung Utara	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Kotabumi	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Pengembangan Pemanfaatan Waduk Way Rarem
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Pembangunan Unit Sekolah Baru Tingkat SMA
			Dukungan Untuk Kabupaten Afirmatif Berbasis Tingkat Kemiskinan
2	Way Kanan	-	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Pembangunan Kawasan Industri Way Kanan
3	Tulang Bawang	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Menggala	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Menggala
			SPAM Regional Kawasan Ekonomi Mesuji - Tulang Bawang
			Pelabuhan Perikanan pantai Teladas
			Pelabuhan pengumpan regional Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Pembangunan konektivitas jalan Lintas Pantai Timur
			Pengembangan Tambak Perikanan dan udang Kawasan Pantai Timur Lampung
			Perlindungan Terhadap Kawasan Ekosistem Mangrove Penetapan Mitigasi Bencana terhadap ancaman bencana Megathrust & Tsunami
			Pembangunan Unit Sekolah Baru Tingkat SMA
4	Tulang Bawang Barat	-	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			SPAM Regional Kawasan Ekonomi Mesuji - Tulang Bawang
			Peningkatan Tipe Rumah Sakit dari Tipe C ke Tipe B
5	Mesuji	-	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Pengembangan Pelabuhan perdagangan dan dermaga perikanan Kab. Mesuji

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Pembangunan SPAM Regional Kawasan Ekonomi Mesuji - Tulang Bawang
			Pengembangan Tambak perikanan dan udang kawasan Pantai Timur Lampung (Rawajitu)
			Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove
			Dukungan Untuk Kabupaten Afirmatif Berbasis Tingkat IPM
Koridor Ekonomi Wilayah III : Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam			
1	Tanggamus	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Kota Agung	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan
			Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Kota Agung
			Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Lampung
			Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove
			Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Penetapan Mitigasi Bencana terhadap ancaman bencana Megathrust & Tsunami
			Sentra industri Pengolahan hasil Laut dan Perikanan
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Penanganan Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Pengembangan Pelabuhan Batu Balai, Kecamatan Kota Agung Timur
			Pembangunan bangunan pengaman pantai berupa Tembok Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa, Way Belu Kecamatan Kota Agung Bara, Tembok Laut TPI Pekon Tigeneneng Kecamatan Limau dan di sekitar TPI Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo
			Tanggul Penahan Tanah Sepanjang Kawasan Batu Keramat dan Kawasan Batu Tegi
			Pembangunan unit sekolah baru tingkat menengah atas (SMA)

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Mendorong Pembangunan Dermaga Sandar di Pulau Tabuan
2	Pringsewu	-	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Gadingrejo
			Pengembangan Pemanfaatan Bendungan Way Sekampung
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Pengembangan dan Peningkatan Produktifitas Pertanian
3	Pesisir Barat	-	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata di sekitar Kawasan Wisata Pantai Barat
			Pembangunan bangunan pengaman pantai di Pesisir Barat
			Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung (Bandara Taufik Kiemas)

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Mangrove
			Pengembangan sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya di Perairan Pesisir Barat (WPP-572)
			Penerapan mitigasi ancaman megathrust dan tsunami
			Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
			Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestry
			Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure Penetapan Mitigasi Bencana terhadap ancaman bencana Megathrust & Tsunami
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Sistem jaringan air bersih
			Pembangunan Unit Sekolah Luar Biasa (SLB)

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			Peningkatan Tipe Rumah Sakit dari Tipe C ke Tipe B
			Pembangunan unit sekolah baru Tingkat Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB)
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4	Lampung Barat	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Liwa	Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Perkotaan Liwa
			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Provinsi
			Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Liwa
			Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata di sekitar Danau Ranau
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi
			Mendorong Pembangunan dan pengembangan Kawasan Geopark Suoh
			Pembangunan Sistem peringatan dini Kegempaan serta pusat pengembangan inovasi di bidang geoteknologi Penetapan Mitigasi Bencana terhadap

No	Kabupaten /Kota	Hirarki Wilayah	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
			ancaman bencana Megathrust & Tsunami
			Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi kopi
			Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
			Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
			Penataan kawasan permukiman tradisional, guna meningkatkan nilai tambah KSPN Danau Ranau
			Dukungan Untuk Kabupaten Afirmatif Berbasis Tingkat Kemiskinan

2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda Kinerja Keuangan BUMD Pemerintah Provinsi Lampung: Strategi Perbaikan dan Akselerasi Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen strategis yang digunakan dalam upaya tersebut adalah pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tidak hanya dirancang sebagai entitas



bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja BUMD menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Di Provinsi Lampung, terdapat tiga BUMD utama yang memiliki mandat dan peran strategis dalam sektor yang berbeda, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) di sektor jasa keuangan, PT Lampung Jasa Utama (LJU) serta PT Wahana Raharja (WR) pada sektor aneka usaha. Ketiga entitas ini memegang peran penting dalam mendukung fungsi pelayanan publik sekaligus sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks inilah, kinerja BUMD menjadi krusial untuk dikaji secara akademik dan empiris, khususnya dalam melihat kontribusinya terhadap efektivitas fiskal daerah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro.

Namun demikian, meskipun memiliki potensi besar, optimalisasi peran BUMD kerap menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi kelembagaan, tata kelola, efisiensi operasional, hingga kapasitas manajerial. Permasalahan umum yang sering ditemukan antara lain adalah lemahnya koordinasi antara pemegang saham dan manajemen, rendahnya akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta minimnya inovasi dalam model bisnis. Hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi beberapa BUMD terhadap PAD serta terbatasnya peran mereka dalam pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, evaluasi dan kajian terhadap kinerja keuangan serta tata kelola BUMD menjadi penting dilakukan untuk merumuskan strategi pembenahan yang lebih terarah, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung)

Tabel 2. 63 Laporan Keuangan Lampung Jasa Utama Provinsi Lampung

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG								
Tahun	Laba Setelah Pajak	Modal Sendiri (Ekuitas)	Aktiva	Aktiva Tetap	Aktiva Lancar	Liabilitas	Pendapatan Usaha	Beban Ops
2024	103.153.733.815	1.473.231.987.577	10.464.397.323.738	190.481.598.701	10.273.915.725.036	8.991.165.336.158	1.207.898.577.492	1.056.582.764.092
2023	167.567.187.179	1.466.449.592.201	10.326.773.104.587	197.426.776.195	10.129.346.328.392	8.860.323.512.386	1.046.468.862.826	807.096.343.865
2022	170.349.094.847	1.413.162.349.674	10.209.292.457.554	184.597.221.913	10.011.865.681.359	8.796.130.107.880	1.015.066.107.023	768.147.379.039
2021	206.080.443.934	1.316.009.334.100	10.703.979.949.187	182.792.857.718	10.521.187.091.469	9.387.970.615.087	938.570.423.123	710.233.368.568
2020	289.217.520.401	1.123.725.644.677	8.072.135.056.023	162.181.650.964	7.909.953.405.059	6.948.409.411.346	907.223.313.853	670.153.146.825
2019	147.532.615.495	906.140.410.159	7.972.989.597.860	29.109.907.571	7.943.879.690.289	7.066.849.187.701	919.107.082.425	705.789.631.883
2018	87.321.706.744	821.843.994.664	7.348.167.382.969	28.828.119.961	7.319.339.263.008	6.526.323.388.305	819.373.021.497	632.417.151.750

Gambaran Keuangan

- **Aset dan Ekuitas:** Bank Lampung mencatatkan tren kenaikan aset secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2018, total aset berada di angka Rp7,35 triliun, meningkat menjadi Rp10,46 triliun pada tahun 2024. Ekuitas juga tumbuh dari Rp821,84 miliar (2018) menjadi Rp1,47 triliun (2024).
- **Laba Bersih:** Laba setelah pajak tertinggi tercatat pada 2020 sebesar Rp289,2 miliar. Namun, sejak tahun tersebut terjadi penurunan bertahap:
 - 2021: Rp206,08 miliar
 - 2022: Rp170,35 miliar
 - 2023: Rp167,56 miliar
 - 2024: Rp103,15 miliar
- **Pendapatan Usaha dan Beban Operasional:** Pendapatan usaha terus meningkat dari Rp6,52 triliun pada 2018 menjadi Rp8,99 triliun pada 2024. Namun, beban operasional juga menunjukkan kenaikan dari Rp632,4 miliar menjadi Rp1,05 triliun dalam kurun waktu yang sama.
- **Aset Lancar dan Liabilitas:** Aset lancar bertambah signifikan dari Rp28,8 miliar (2018) menjadi Rp190,48 miliar (2024). Liabilitas meningkat dari Rp7,32 triliun menjadi Rp10,27 triliun dalam periode yang sama.

Analisis

- a) **Kinerja Aset dan Ekuitas:** Bank Lampung mencatat pertumbuhan aset yang konsisten dari Rp7,35 triliun pada 2018 menjadi Rp10,46 triliun pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan keberhasilan ekspansi intermediasi keuangan, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik daerah ini. Di sisi lain, ekuitas meningkat dari Rp821,8 miliar menjadi Rp1,47 triliun, menandakan kemampuan bank dalam memperkuat permodalan internal secara berkelanjutan.
- b) **Profitabilitas dan Tantangan:** Meskipun secara historis tetap mencatatkan laba, tren penurunan profitabilitas sejak 2020 menjadi perhatian serius. Laba bersih turun drastis dari Rp289,2 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp103,15 miliar pada 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan margin bunga bersih yang semakin tertekan, peningkatan beban operasional, serta risiko *non-performing loan (NPL)* yang mungkin meningkat. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan optimalisasi struktur biaya dan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyaluran kredit.
- c) **Efisiensi dan BOPO:** Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terus membengkak, mengindikasikan perlunya efisiensi mendalam, terutama di sektor operasional dan teknologi informasi. Transformasi digital, mulai dari core banking system hingga layanan mobile dan internet banking, wajib menjadi bagian integral strategi bank ke depan.
- d) **Inovasi dan Penguatan Daya Saing:** Bank Lampung memiliki peluang besar untuk memperkuat peran dalam pembiayaan sektor prioritas daerah, seperti UMKM, pertanian, dan infrastruktur. Diversifikasi produk ke pembiayaan hijau (*green financing*) serta kolaborasi dengan startup fintech lokal dapat menjadi terobosan inovatif dalam memperluas jangkauan layanan keuangan.

Kesimpulan

Sebagai BUMD strategis, Bank Lampung memiliki pondasi keuangan yang relatif kuat. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD, bank ini harus

melakukan lompatan transformasi digital dan efisiensi biaya, serta menerapkan manajemen risiko berbasis data secara lebih ketatt.

2. PT Lampung Jasa Utama (LJU)

Tabel 2. 64 Laporan Keuangan PT Lampung Jasa Utama

PT. LAMPUNG JASA UTAMA								
Tahun	Laba Setelah Pajak	Modal Sendiri (Ekuitas)	Aktiva	Aktiva Tetap	Aktiva Lancar	Liabilitas	Pendapatan Usaha	Beban Ops
2024	15.080.131.464	87.941.213.761	89.886.788.735	2.318.141.817	15.949.701.361	1.945.574.974	2.436.595.982	4.010.670.137
2023	192.122.757.266	213.740.548.650	215.216.867.299	2.365.128.325	200.367.541.767	1.476.318.649	3.176.898.172	4.271.423.067
2022	1.602.063.446	21.723.924.486	23.921.472.957	2.313.519.233	5.174.547.195	2.197.548.470	3.526.043.538	3.168.915.934
2021	4.287.161.668	23.325.987.932	25.141.607.011	2.694.530.786	5.040.411.580	1.815.619.079	4.690.181.307	4.613.200.632
2020	5.541.887.636	27.606.223.679	27.926.031.587	3.073.272.609	7.449.729.831	319.807.907	1.197.603.004	6.253.801.253
2019	8.899.596	35.209.446.972	41.424.319.331	2.992.980.303	18.419.618.708	6.214.872.359	2.551.328.841	2.105.565.147
2018	79.084.584	25.447.998.126	25.631.442.235	658.369.374	20.355.546.329	183.444.199	2.846.449.714	2.240.100.392

Gambaran Keuangan

- **Laba dan Ekuitas:** Tahun 2022 masih mencatat kerugian sebesar Rp1,6 miliar, namun kemudian mengalami perbaikan menjadi laba Rp192,1 miliar pada 2023 dan turun kembali menjadi Rp15,08 miliar pada 2024. Ekuitas pun tumbuh dari Rp21,7 miliar (2022) menjadi Rp 87,94 miliar (2024).
- **Aset dan Struktur Aktiva:** Total aset pada 2022 sebesar Rp23,92 miliar naik menjadi Rp213,7 miliar pada 2023, namun turun menjadi Rp89,88 miliar pada 2024. Aset tetap relatif stabil, berada di kisaran Rp2,3 miliar–Rp2,6 miliar. Aset lancar meningkat dari Rp5,17 miliar (2022) ke Rp15,94 miliar (2024).
- **Pendapatan dan Beban Operasional:** Pendapatan usaha pada 2022 tercatat Rp2,2 miliar, naik menjadi Rp3,17 miliar pada 2023 dan Rp4,01 miliar pada 2024. Beban operasional mengalami fluktuasi, dari Rp3,17 miliar (2022), naik ke Rp4,27 miliar (2023), lalu turun menjadi Rp2,44 miliar (2024).
- **Liabilitas:** Liabilitas mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp5,17 miliar (2022) menjadi Rp200,3 miliar (2023), lalu menurun drastis ke Rp15,9 miliar pada 2024.

Analisis

- a. **Pemulihan Kinerja dan Lompatan Finansial:** LJU tampil sebagai salah satu *success story* dalam transformasi BUMD. Dari kondisi merugi Rp1,6 miliar pada 2022, LJU berhasil membalik keadaan dengan membukukan laba hingga Rp15,08 miliar pada 2024. Ekuitas perusahaan juga melonjak hampir empat kali lipat, dari Rp21,7 miliar menjadi Rp87,9 miliar, mencerminkan perbaikan signifikan dalam manajemen, efisiensi, dan tata kelola keuangan.
- b. **Optimalisasi Aset dan Skala Usaha:** Walau terdapat perbaikan struktur keuangan, total aset LJU yang hanya Rp89,8 miliar pada 2024 masih belum sebanding dengan potensi pengembangan usaha sektor jasa di Lampung. Peluang untuk ekspansi ke sektor usaha yang potensial sangat terbuka lebar.
- c. **Efisiensi Operasional:** Rasio efisiensi mulai membaik, dengan beban operasional yang berhasil ditekan meskipun pendapatan masih terbatas. Namun untuk dapat berkontribusi optimal terhadap PAD dan membiayai ekspansi, LJU perlu menaikkan skala ekonominya melalui strategi bisnis yang adaptif dan agresif, termasuk menjajaki skema joint venture dan digitalisasi layanan.
- d. **Reorientasi Model Bisnis:** LJU bisa dikembangkan menjadi entitas pengelola aset strategis Pemerintah Provinsi Lampung.

Kesimpulan

LJU merupakan bukti nyata bahwa transformasi BUMD dapat tercapai dengan komitmen manajerial dan dukungan regulasi yang tepat. Untuk terus tumbuh, LJU perlu diarahkan menjadi perusahaan jasa publik modern yang efisien, inovatif, dan berbasis digital.

3. PT Wahana Raharja (WR)

Tabel 2. 65 Laporan Keuangan PT Wahana Raharja

PT. WAHANA RAHARJA								
Tahun	Laba Setelah Pajak	Modal Sendiri (Ekuitas)	Aktiva	Aktiva Tetap	Aktiva Lancar	Liabilitas	Pendapatan Usaha	Beban Ops
2024	14.377.966	2.684.774.680	7.691.564.630	952.537.806	4.460.109.275	5.006.789.950	6.498.881.355	1.606.258.177
2023	75.480.913	3.324.864.754	9.365.270.778	2.839.697.955	2.839.697.955	6.030.406.024	16.683.029.311	1.845.626.033

PT. WAHANA RAHARJA								
Tahun	Laba Setelah Pajak	Modal Sendiri (Ekuitas)	Aktiva	Aktiva Tetap	Aktiva Lancar	Liabilitas	Pendapatan Usaha	Beban Ops
2022	1.886.144.827	3.065.500.494	7.555.602.994	4.259.174.025	928.839.023	4.490.102.500	1.120.703.323	2.979.557.482
2021	2.515.110.647	5.007.630.923	8.575.298.266	4.575.288.184	1.923.910.266	3.567.667.343	5.745.492.412	3.800.685.830
2020	2.217.756.355	7.003.361.491	10.943.610.032	1.288.389.352	5.274.120.679	3.940.248.539	3.282.019.509	3.081.408.105
2019	1.564.437.699	9.221.117.846	14.863.453.480	1.419.613.757	8.062.739.722	5.642.335.633	6.050.314.596	3.305.542.575
2018	2.591.455.717	5.235.555.545	10.591.649.815	1.574.913.380	6.385.636.433	5.356.094.270	7.125.390.946	3.383.144.630

Gambaran Keuangan

- Laba Bersih:** PT Wahana Raharja mengalami tren rugi berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2022, yaitu:
 - 2018: -Rp2,59 miliar
 - 2019: -Rp1,56 miliar
 - 2020: -Rp2,21 miliar
 - 2021: -Rp2,51 miliar
 - 2022: -Rp1,88 miliar
 Kemudian membukukan laba pada 2023 sebesar Rp75,48 juta dan sedikit menurun menjadi Rp14,38 juta pada 2024.
- Ekuitas dan Aset:** Ekuitas tertinggi dicapai pada 2019 sebesar Rp9,22 miliar, kemudian terus menurun hingga menyentuh Rp2,68 miliar pada 2024. Aset juga menurun dari Rp14,86 miliar (2019) menjadi Rp7,69 miliar (2024).
- Pendapatan Usaha dan Beban Operasional:** Pendapatan usaha tahun 2024 tercatat sebesar Rp6,49 miliar. Beban operasionalnya mencapai Rp1,61 miliar. Dibandingkan tahun 2018, pendapatan usaha lebih tinggi (Rp5,35 miliar), namun beban operasional menurun dari Rp3,38 miliar menjadi Rp1,61 miliar.
- Aset Lancar dan Liabilitas:** Aset lancar menurun dari Rp6,38 miliar (2018) menjadi Rp4,46 miliar (2024). Liabilitas juga menurun dari Rp6,39 miliar (2018) menjadi Rp5,01 miliar (2024).

Analisis

- a. **Kondisi Finansial yang Mengkhawatirkan:** WR berada dalam posisi keuangan yang sangat rapuh. Laba bersih tahun 2024 hanya Rp14,3 juta, jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan operasional atau membangun kapasitas usaha. Lebih mengkhawatirkan lagi, ekuitas turun drastis dari Rp9,22 miliar (2019) menjadi hanya Rp2,68 miliar (2024), mencerminkan erosi permodalan yang serius.
- b. **Struktur Neraca dan Liabilitas Tinggi:** Aset yang menurun dan meningkatnya liabilitas menimbulkan risiko keberlanjutan. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi menempatkan perusahaan dalam posisi sulit untuk mengakses pembiayaan tanpa jaminan tambahan. Ketergantungan terhadap dukungan eksternal, termasuk dari APBD, menjadi sangat tinggi.
- c. **Inefisiensi Usaha dan Margin Tipis:** Pendapatan usaha sebesar Rp6,49 miliar di tahun 2024 tidak mampu menghasilkan margin keuntungan yang sehat karena tingginya beban tetap dan operasional. Tidak adanya efisiensi berarti model bisnis yang diterapkan saat ini tidak memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang.
- d. **Arah Restrukturisasi yang Mendesak:** WR perlu menjalani restrukturisasi komprehensif. Langkah strategis meliputi:
 - Audit aset secara menyeluruh,
 - Penutupan unit usaha tidak produktif,
 - Penentuan ulang core business yang relevan dengan potensi Lampung (seperti distribusi pangan dan logistik),
 - Pemetaan ulang sumber daya manusia, dan
 - Eksplorasi skema kemitraan strategis dengan swasta maupun BUMD lain.

Kesimpulan

WR berada di persimpangan antara revitalisasi atau dilikuidasi. Tanpa intervensi menyeluruh dari sisi kebijakan, manajemen, dan permodalan, keberadaan WR justru berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang bagi pemerintah daerah.

Rekomendasi Umum Penguatan BUMD Lampung

1. **Reformasi Tata Kelola dan Manajemen Risiko:** Penerapan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) harus dikawal dengan sistem audit internal yang kuat, SOP terstandar, dan pelatihan berkala bagi jajaran manajemen.
2. **Transformasi Digital BUMD:** Digitalisasi proses bisnis dan layanan publik harus menjadi strategi jangka panjang, dari sistem keuangan, logistik, hingga pelayanan konsumen.
3. **Optimalisasi Kontribusi terhadap PAD:** BUMD harus diposisikan sebagai entitas pencetak nilai tambah ekonomi daerah. Skema insentif berbasis kinerja dan transparansi kontribusi terhadap PAD perlu diterapkan.
4. **Sistem Monitoring Terpadu dan Real-Time:** Pengembangan dashboard monitoring berbasis data keuangan dan operasional real-time diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan intervensi tepat waktu.
5. **Selektivitas dalam Penyertaan Modal:** Setiap tambahan modal harus berbasis kajian kelayakan dan analisis fiskal jangka panjang untuk menghindari pemborosan sumber daya publik.
6. **Konsolidasi dan Sinergi Antar-BUMD:** Penggabungan usaha atau kolaborasi lintas BUMD dapat menciptakan efisiensi skala dan memperkuat posisi tawar di pasar regional.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah selama periode 2020-2024 mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah dalam kurun waktu ini menjadi dasar penting untuk memahami sejauh mana efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mendukung program-program prioritas pembangunan daerah.



Analisis terhadap kinerja keuangan daerah pada periode ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti pertumbuhan pendapatan daerah, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer, serta efektivitas pengelolaan belanja daerah. Selain itu, aspek pembiayaan daerah, termasuk utang daerah dan investasi pemerintah daerah, juga menjadi bagian dari kajian untuk menilai keseimbangan fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

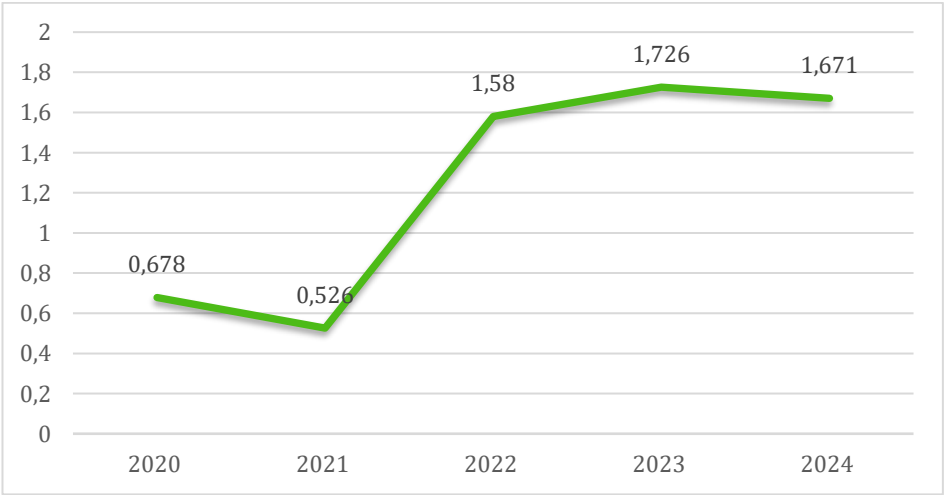
Dalam periode ini, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, dalam kurun 2020-2024, kebijakan fiskal daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika perekonomian nasional dan global, dampak pandemi COVID-19, serta perubahan regulasi dalam sistem keuangan daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan daerah pada periode ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan APBD, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah ke depan guna meningkatkan kemandirian fiskal serta memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Gambaran kemampuan

keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah yang disebut Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Gambar 2. 155 Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020-2024

Pada tahun 2020, rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung sebesar **0,678** dalam **Kategori Sedang**. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan kapasitas fiskal menjadi 0,526, yang masih berada dalam kategori sangat rendah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan drastis dalam kapasitas fiskal daerah menjadi 1,58 yang menempatkan Lampung dalam kategori rendah. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penerimaan daerah, baik dari PAD maupun dana transfer. Tren peningkatan berlanjut sampai tahun 2023 sebesar 1,726 dalam Kategori Sedang, walaupun pada tahun 2024 Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mengalami sedikit penurunan menjadi **1,671**, tetapi masih dalam **Kategori Sedang**. Meskipun terjadi sedikit penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan mampu membiayai kebutuhan pembangunan dengan tingkat kemandirian yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama setelah tahun 2021. Hal ini



mengindikasikan adanya upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Ke depan, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan.

Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024 merupakan cerminan dari kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), APBD menjadi instrumen utama dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam periode 2020-2024, kebijakan pengelolaan APBD menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika perekonomian global dan nasional, kebijakan desentralisasi fiskal, serta dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan APBD harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kinerja pelaksanaan APBD 2020-2024 akan dievaluasi melalui tiga aspek utama, yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan program pembangunan. Belanja ini terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

3. **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit atau mengelola surplus anggaran.

Selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci kinerja ketiga aspek tersebut selama periode 2020-2024. Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berikutnya guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 66 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Daerah			
2020	7.244.171.719.572,14	7.019.319.471.883,36	96,90%
2021	7.538.150.772.809,50	7.469.469.346.029,05	99,09%
2022	6.915.251.441.290,74	6.836.946.972.193,71	98,87%
2023	8.093.971.284.382,17	6.987.319.981.739,03	86,33%
2024	8.631.369.872.980,04	7.451.586.834.830,78	86,33%
Belanja Daerah			
2020	7.381.124.107.714,45	6.967.358.448.182,63	94,39%
2021	7.557.497.851.948,54	7.097.651.401.591,13	93,92%
2022	7.106.758.595.503,07	6.786.374.070.612,94	95,49%
2023	8.280.862.934.283,54	7.048.993.246.381,70	85,12%
2024	8.756.517.330.866,74	7.506.810.403.825,15	85,73%
Penerimaan Pembiayaan			
2020	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	100,00%
2021	190.917.079.139,04	182.638.158.429,09	95,66%
2022	382.687.154.212,33	383.279.770.163,01	100,15%
2023	292.773.893.437,37	292.676.358.793,37	99,97%
2024	125.147.457.886,70	125.120.850.614,70	99,98%
Pengeluaran Pembiayaan			
2020	199.180.000.000,00	197.176.332.704,00	98,99%
2021	171.570.000.000,00	171.176.332.704,00	99,77%
2022	191.180.000.000,00	141.176.332.704,00	73,84%
2023	105.882.243.536,00	105.882.243.536,00	100,00%
2024	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)



Berdasarkan Tabel diatas bahwa pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan daerah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan persentase pencapaian berkisar antara 86,33% hingga 98,87% dari target yang ditetapkan. Tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan mengingat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup tinggi. Efektivitas penggalan sumber pendapatan daerah terlihat dari capaian realisasi yang relatif tinggi, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dalam persentase realisasi (86,33%). Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan fiskal, perlambatan ekonomi, atau tantangan dalam optimalisasi PAD (Tabel 3.1).

Belanja Daerah menunjukkan realisasi yang cukup baik dengan tingkat pencapaian antara 83,72% hingga 94,39%. Namun, efisiensi dalam realisasi anggaran perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan bahwa belanja daerah benar-benar mendukung program prioritas pembangunan. Belanja yang tidak mencapai target mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan pencairan anggaran atau hambatan administratif lainnya. Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi harus dievaluasi lebih lanjut, terutama dalam memastikan belanja operasional dan modal dapat memberikan dampak yang optimal (Tabel 3.1).

Pembiayaan Daerah, pada sisi penerimaan pembiayaan, realisasi cenderung mencapai target dengan persentase hampir 100% di setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup baik dalam mengelola sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Namun, pada aspek pengeluaran pembiayaan, terdapat fluktuasi signifikan, terutama pada tahun 2023 yang hanya mencapai 73,84% dari target. Hal ini dapat berimplikasi pada pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran



(SiLPA) dan strategi fiskal daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penggunaan pembiayaan benar-benar mendukung stabilitas keuangan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja realisasi pendapatan daerah mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan serta ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal nasional, kondisi ekonomi regional dan nasional, serta dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal periode ini. Evaluasi terhadap rata-rata realisasi pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir bertujuan untuk memahami tingkat pencapaian target pendapatan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, analisis rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah menjadi penting untuk menilai tren peningkatan atau penurunan pendapatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah yang positif menunjukkan adanya peningkatan dalam kapasitas fiskal, sedangkan perlambatan atau penurunan pertumbuhan dapat menjadi indikasi perlunya strategi lebih efektif dalam optimalisasi pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber pendapatan lainnya.

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan memperkuat daya dukung APBD dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal seperti yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 67 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI (TAHUN)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	7.019.319.471.883,36	7.469.469.346.029,05	6.836.946.972.193,71	6.987.319.981.739,03	7.451.586.834.830,78
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.842.286.479.070,36	3.249.669.847.265,05	3.678.302.294.580,71	3.766.194.060.533,03	4.039.218.171.476,78
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	2.386.345.268.304,00	2.721.138.045.704,00	3.126.137.885.658,00	3.232.821.385.715,00	3.301.063.910.591,76
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	17.080.208.104,00	14.664.095.996,00	6.602.045.154,00	7.066.246.737,00	485.949.536.889,25
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.873.630.623,14	33.335.927.752,08	45.568.658.794,74	51.110.035.229,39	193.520.241.461,01
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	408.987.372.039,22	480.531.777.812,97	499.993.704.973,97	475.196.392.851,64	58.684.482.534,76
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.461.886.209.957,00	4.209.156.682.009,00	3.118.930.589.890,00	3.210.209.160.206,00	3.401.546.333.354,00
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	157.793.963.126,00	4.201.782.231.009,00	3.100.575.550.394,00	3.178.010.152.004,00	3.375.379.510.190,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	157.793.963.126,00		253.438.083.044,00	205.629.846.354,00	193.915.796.000,00
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	123.204.760.040,00		151.118.931.842,00	113.149.097.214,00	193.915.796.000,00
4.2.01.01.02	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	34.589.203.086,00		102.319.151.202,00	92.480.749.140,00	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum-(DAU)	1.732.551.921.000,00		1.719.175.460.727,00	1.801.100.499.930,00	2.016.506.597.065,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus-(DAK)	571.540.325.831,00		1.126.520.832.623,00	1.109.218.409.720,00	1.137.693.320.125,00
4.2.01.01.04.01	- Dana Alokasi Khusus-(DAK Fisik)			1.126.520.832.623,00	1.109.218.409.720,00	251.303.028.753,00
4.2.01.01.04.02	- Dana Alokasi Khusus-(DAK Non Fisik)					886.390.291.372,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal)			1.441.174.000,00	62.061.396.000,00	27.263.797.000,00

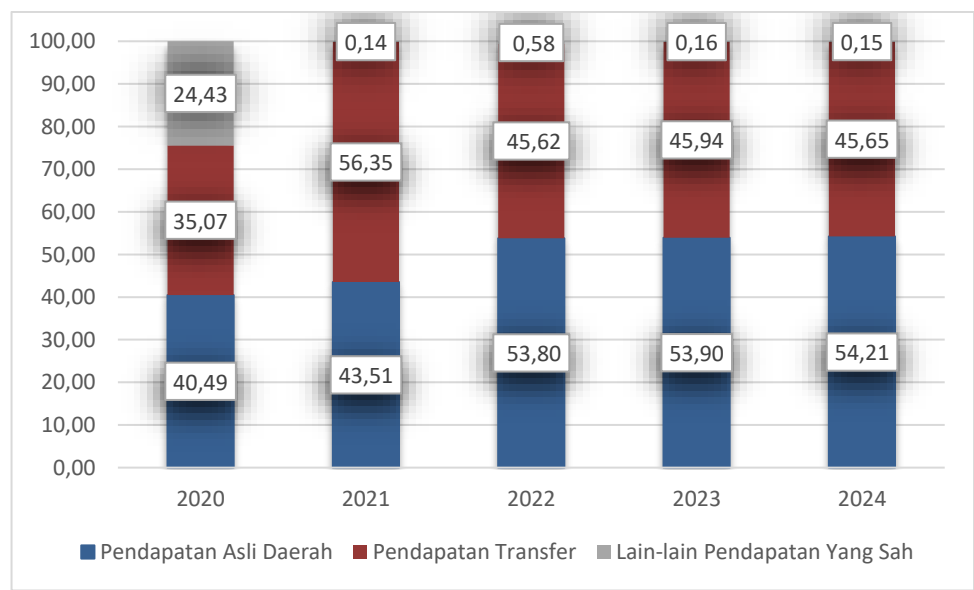


KODE REKENING	URAIAN	REALISASI (TAHUN)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		7.374.451.000,00	18.355.039.496,00	32.199.008.202,00	26.166.823.164,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota (OTD Haji + Diklat)		7.374.451.000,00	18.355.039.496,00	32.199.008.202,00	26.166.823.164
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.715.146.782.856,00	10.642.816.755,00	39.714.087.723,00	10.916.761.000,00	10.822.330.000,00
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	8.946.876.858,00	10.565.423.805,00	39.714.087.723,00	3.962.951.000,00	10.822.330.000,00
4.3.02	DANA DARURAT	46.434.098.000,00				
4.3.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	1.659.765.807.998,00	77.392.950,00		6.953.810.000,00	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)

Tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Gambar 3.1), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dengan tetap menjadi mayoritas komponen pembentuk pendapatan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Lampung sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

Gambar 2. 156 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)

Perkembangan proporsi pendapatan daerah Provinsi Lampung selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya perubahan dalam komposisi sumber pendapatan, khususnya antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari 40,49% pada Tahun 2020 menjadi 54,21% di Tahun 2024, menunjukkan upaya optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal. Pendapatan Transfer menurun dari 56,35% pada tahun 2021 menjadi 45,65% di tahun 2024, menandakan berkurangnya ketergantungan terhadap dana pusat seiring dengan peningkatan PAD. Lain-lain Pendapatan yang Sah tetap kecil (0,14%–0,58%) dan belum menjadi sumber signifikan bagi keuangan daerah.

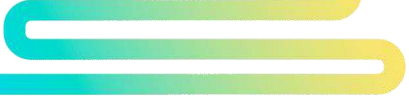


Secara umum, capaian ini menunjukkan adanya progres dalam peningkatan kemandirian fiskal, khususnya melalui pertumbuhan PAD. Namun demikian, jika dikaitkan dengan target pembangunan lima tahun ke depan, pertumbuhan pendapatan daerah tersebut masih menghadapi keterbatasan. Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi ekonomi yang berkelanjutan menuntut ketersediaan ruang fiskal yang lebih luas.

Dengan demikian, meskipun tren PAD meningkat, struktur pendapatan daerah saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk mendanai target pembangunan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta penggalan potensi pendapatan baru. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. **Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah**, termasuk penguatan sistem digitalisasi, pengawasan terhadap sektor tambang, serta pemanfaatan peluang opsen pajak pasca implementasi Undang-Undang HKPD.
2. **Peningkatan kontribusi aset daerah dan BUMD** melalui manajemen aset yang lebih produktif serta inovasi model bisnis.
3. **Pengembangan skema pembiayaan kreatif** seperti kemitraan dengan sektor swasta, *public-private partnership* (KPBU), dan potensi obligasi daerah.
4. **Peningkatan iklim investasi** pada sektor unggulan (pertanian, pariwisata, energi terbarukan, dan industri pengolahan) yang dapat memperluas basis penerimaan daerah.

Melalui strategi tersebut, diharapkan kapasitas fiskal Provinsi Lampung dapat terus diperkuat, sehingga pendapatan daerah tidak hanya cukup untuk mendanai belanja rutin, tetapi juga mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana arah RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.



Belanja Daerah, selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Lampung selama 5 tahun menunjukkan realisasi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang semula pada tahun 2020 sebesar Rp 6.967 Triliun menjadi sebesar Rp 7.506 Triliun pada tahun 2024.

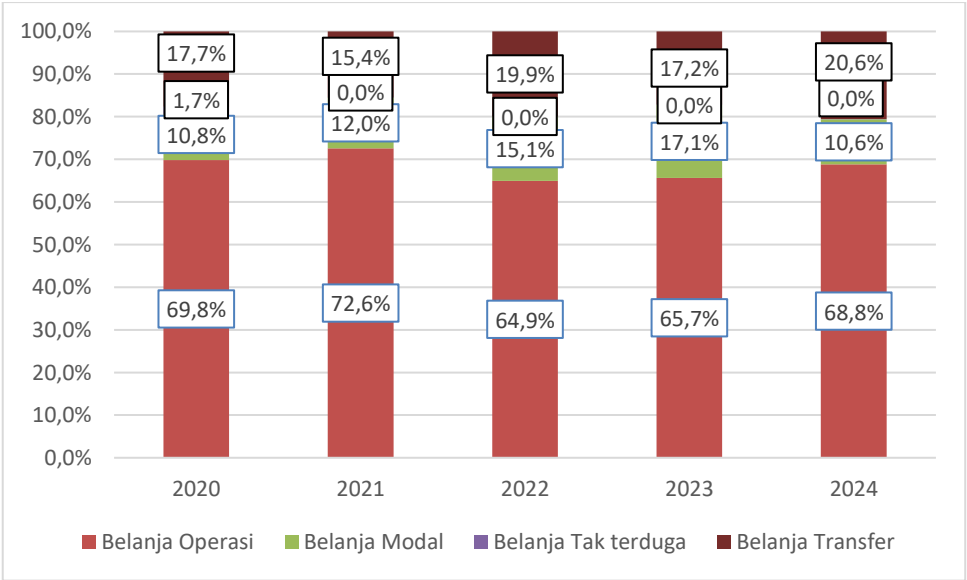
Tabel 2. 68 Realisatii Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI (TAHUN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Daaerah	6.967.358.448.183	7.097.651.401.591	6.786.374.070.613	7.048.993.246.382	7.506.810.403.825
Belanja Operasi	4.864.108.842.522	5.151.247.340.068	4.407.709.739.254	4.628.237.542.976	5.164.775.276.916
Belanja Pegawai	1.971.312.365.234	1.934.758.007.515	1.970.940.686.655	2.066.144.093.644	2.386.292.035.527
Belanja Barang	1.423.341.867.180	1.506.510.162.000	1.816.423.482.990	1.972.392.255.140	1.978.510.550.970
Belanja Bunga	31.583.615.813	22.161.585.802	12.829.045.899	3.112.977.135	-
Belanja Subsidi	1.437.518.594.295	-	-	2.800.000.000	-
Belanja Hibah	352.400.000	1.682.887.389.922	587.127.478.960	570.388.618.057	797.803.865.119
Belanja Bantuan Sosial	-	4.930.194.829	20.389.044.750	13.399.599.000	2.168.825.300
Belanja Bantuan Keuangan					
Belanja Modal	752.528.210.220	849.692.114.832	1.025.325.883.958	1.207.289.357.587	797.024.095.018
Belanja Tanah	8.785.013.950	127.714.760	-	1.209.400.000	-
Belanja Peralatan dan Mesin	254.940.012.556	185.593.022.022	235.268.685.782	152.608.643.054	119.206.756.912
Belanja Bangunan dan Gedung	181.815.588.817	240.978.511.325	284.635.293.070	280.952.181.006	219.628.388.605
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	280.131.995.852	390.107.373.948	481.854.158.305	743.100.436.419	435.067.370.012
Belanja Aset Tetap Lainnya	26.855.599.045	32.885.492.778	23.567.746.801	29.418.697.108	22.806.679.489
					314.900.000
Belanja Tak terduga	119.312.701.296	126.400.000	223.500.000	2.794.882.500	1.077.864.999
Belanja Tak terduga	119.312.701.296	126.400.000	223.500.000	2.794.882.500	1.077.864.999
Transfer	1.231.408.694.145	1.096.585.546.691	1.353.114.947.401	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	1.231.408.694.145	1.096.585.546.691	1.353.114.947.401	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)

Sepanjang tahun 2020–2024, penggunaan Belanja Daerah masih diprioritaskan untuk Belanja Operasi, untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintah daerah wajib dan mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta prioritas daerah. Belanja Modal mengalami peningkatan hingga 20,6 % ditahun 2024 hal ini menunjukkan peningkatan investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap. Peningkatan ini positif karena menunjukkan komitmen Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang bersifat produktif. Fluktuasi belanja tidak terduga berkaitan dengan kondisi darurat seperti pandemi, sementara belanja transfer tetap relatif kecil dan stabil.

Gambar 2. 157 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)

Struktur belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2020–2024 masih didominasi oleh belanja operasi dengan proporsi berkisar antara 64,9% hingga 72,6%. Dominasi belanja operasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar APBD masih diarahkan untuk belanja rutin, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Namun demikian, terdapat tren positif pada belanja modal yang meningkat signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 15,1% dan 17,1% dari total belanja. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,8% dan tahun 2024 yang kembali



menurun menjadi 10,6%. Belanja modal pada periode tersebut mencerminkan adanya prioritas pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur strategis, baik pada bidang transportasi, irigasi, pendidikan, maupun kesehatan.

Belanja modal yang meningkat ini memberikan dampak nyata terhadap pembangunan sektor riil, baik melalui perbaikan konektivitas wilayah, penguatan ketahanan pangan, maupun peningkatan kualitas pelayanan dasar. Selain itu, belanja transfer yang relatif stabil dapat memperkuat sinergi pembangunan dengan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mendukung target RPJMD 2025–2029 diperlukan konsistensi dalam meningkatkan porsi belanja modal yang produktif, sehingga pembangunan infrastruktur dan sektor riil dapat terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Lampung.

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
 - f. Penerimaan Piutang Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah;
 - c. Pembayaran Pokok Utang; dan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung periode tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 69 Realisasi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI (TAHUN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN	138.956.055.438	11.461.825.725	242.103.437.459	186.794.115.257	125.120.850.614,70
Penerimaan Pembiayaan Daerah	336.132.388.142	182.638.158.429	383.279.770.163	292.676.358.793	125.120.850.614,70
Penggunaan SILPA	336.132.388.142	182.638.158.429	383.279.770.163	292.676.358.793	125.120.850.614,70
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	197.176.332.704	171.176.332.704	141.176.332.704	105.882.243.536	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Investasi Pemda	56.000.000.000	30.000.000.000	-	-	-
Pembayaran Pokok Hutang	141.176.332.704	141.176.332.704	141.176.332.704	105.882.243.536	-
PEMBIAYAAN NETTO	138.956.055.438	11.461.825.725	242.103.437.459	186.794.115.257	125.120.850.614,70
SILPA	190.917.079.139	383.279.770.163	292.676.339.040	125.120.850.615	69.897.281.620,32

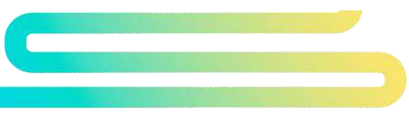
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran posisi keuangan Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran. Informasi dalam neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan serta kemampuan daerah dalam mendanai operasional dan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam periode 2020–2024, perkembangan neraca daerah Provinsi Lampung mencerminkan akumulasi kekayaan daerah, efisiensi pengelolaan kewajiban, serta stabilitas ekuitas sebagai hasil dari pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Penyajian data neraca daerah selama lima tahun terakhir menjadi landasan penting dalam mengevaluasi posisi keuangan serta menentukan arah kebijakan fiskal jangka menengah untuk periode RPJMD 2025–2029.

Tabel 2. 70 Necara Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	ASET					
A	Aset Lancar	417.250.657.840,81	572.290.805.763,49	447.294.206.512,39	297.546.780.743,94	222.420.000.266,30
B	Investasi Jangka Panjang	487.396.970.917,00	571.054.436.311,69	661.404.527.688,33	872.303.470.796,88	741.238.508.591,38
C	Aset Tetap	10.182.106.235.517,60	10.552.863.682.501,00	11.033.119.802.090,65	11.806.342.012.166,00	12.110.455.237.144,96
D	Aset Lainnya	145.243.841.042,25	141.108.563.536,48	140.587.494.066,97	169.706.133.230,42	131.625.879.372,08
	JUMLAH ASET	1.231.997.705.317,70	11.837.317.488.112,60	12.282.486.030.358,30	13.145.898.396.937,24	13.214.429.426.720,73
II	KEWAJIBAN					
A	Kewajiban Jangka Pendek	652.416.720.033,16	880.177.953.822,71	949.130.280.317,28	1.534.228.727.018,03	857.330.181.927,45
B	Kewajiban Jangka Panjang	220.971.645.197,00	79.795.312.493,00	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	873.388.365.230,16	959.973.266.315,71	949.130.280.317,28	1.534.228.727.018,03	857.330.181.927,45
III	EKUITAS					
	JUMLAH EKUITAS	10.358.609.340.087,50	10.877.344.221.796,90	11.333.275.750.041,06	11.611.669.669.919,21	11.407.894.209.216,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.231.997.705.317,70	11.837.317.488.112,60	12.282.486.030.358,34	13.145.898.396.937,24	12.214.429.426.720,73

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)



Keuangan Provinsi Lampung selama periode 2020–2024 menunjukkan struktur aset dan ekuitas yang relatif stabil dengan rasio likuiditas dan solvabilitas yang sehat. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Tingginya porsi aset tetap dan investasi jangka panjang juga menandakan adanya basis kekayaan daerah yang kuat sebagai modal pembangunan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk mengambil kebijakan fiskal yang lebih agresif, misalnya dengan meningkatkan belanja modal strategis guna mempercepat pembangunan infrastruktur, atau bersifat adaptif dalam merespons dinamika ekonomi, seperti penguatan jaringan perlindungan sosial pada masa krisis. Struktur keuangan yang sehat memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk melakukan manajemen risiko fiskal yang lebih baik, menjaga stabilitas keuangan, sekaligus mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang menuju kemandirian fiskal.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dalam mewujudkan visi Gubernur dan Presiden, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang sehat guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Dengan kebijakan fiskal yang inovatif dan berbasis pada prinsip keberlanjutan, Lampung dapat memperkuat kemandirian fiskalnya dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dengan kebijakan keuangan yang berorientasi pada kinerja dan pembangunan berkelanjutan, Lampung dapat menjadi daerah yang lebih mandiri, kompetitif, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2025-2029 **“Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas”**.

Tabel 2. 71 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH	7.250.000.000.000,00	7.303.522.088.000,00	7.404.394.722.508,00	7.442.099.779.000,00	7.477.400.013.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.675.032.820.130,00	3.720.057.337.000,00	3.785.452.664.000,00	3.816.768.052.000,00	3.846.498.571.000,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	2.881.083.331.000,00	2.944.197.337.000,00	3.007.785.668.000,00	3.037.904.207.000,00	3.067.483.571.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	481.946.670.000,00	655.280.000.000,00	656.459.504.000,00	657.050.317.000,00	657.640.000.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	202.001.691.000,00	59.100.000.000,00	59.395.500.000,00	59.692.477.000,00	58.975.000.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.001.128.130,00	61.480.000.000,00	61.811.992.000,00	62.121.051.000,00	62.400.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.491.188.288.470,00	3.572.160.862.000,00	3.607.609.910.508,00	3.613.990.919.000,00	3.619.503.930.000,00
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.431.028.425.470,00	3.534.907.095.000,00	3.568.195.425.508,00	3.574.477.898.000,00	3.579.892.130.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.502.673.559.000,00	192.089.113.000,00	193.625.825.000,00	193.916.263.000,00	194.207.130.000,00
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	159.990.021.000,00	192.089.113.000,00	193.625.825.000,00	193.916.263.000,00	194.207.130.000,00
4.2.01.08	Dana Transfer Umum-(DAU)	2.138.935.822.000,00	2.226.036.000.000,00	2.246.576.916.000,00	2.250.845.411.000,00	2.254.212.000.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus-(DAK)	1.105.682.767.000,00	1.116.781.982.000,00	1.127.992.684.508,00	1.129.716.224.000,00	1.131.473.000.000,00
4.2.01.09.01	- Dana Alokasi Khusus-(DAK Fisik)	60.159.863.000,00	62.540.612.000,00	63.103.477.508,00	63.229.684.000,00	63.387.000.000,00
4.2.01.09.02	- Dana Alokasi Khusus-(DAK Non Fisik)	1.013.002.041.000,00	1.054.241.370.000,00	1.064.889.207.000,00	1.066.486.540.000,00	1.068.086.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal)	-	-	-	-	-
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	32.929.763.800,00	37.253.767.000,00	39.414.485.000,00	39.513.021.000,00	39.611.800.000,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota (OTD Haji + Diklat)	32.929.763.800,00	37.253.767.000,00	39.414.485.000,00	39.513.021.000,00	39.611.800.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	111.008.990.600,00	11.303.889.000,00	11.332.148.000,00	11.340.808.000,00	11.397.512.000,00
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	111.008.990.600,00	11.303.889.000,00	11.332.148.000,00	11.340.808.000,00	11.397.512.000,00
4.3.02	DANA DARURAT	-	-	-	-	-
4.3.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	8.114.000.000.000,00	7.007.522.088.000,00	7.108.394.722.508,00	7.246.099.779.000,00	7.381.400.013.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.008.555.161.493,32	3.692.330.990.831,58	3.840.558.318.490,31	3.827.671.875.936,75	3.677.771.070.512,13
5.1.01	Belanja Pegawai	3.047.723.650.257,15	2.102.256.626.400,00	2.132.518.416.752,40	2.173.829.933.700,00	2.214.420.003.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.586.821.234.090,97	1.511.702.352.232,08	1.370.667.889.538,41	1.134.469.930.037,24	1.428.979.054.412,63
5.1.03	Belanja Bunga	41.457.723.215,00	54.000.000.000,00	36.000.000.000,00	18.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	30.000.000,00				
5.1.05	Belanja Hibah	328.522.553.930,20	23.000.000.000,00	300.000.000.000,00	500.000.000.000,00	23.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000,00	1.372.012.199,50	1.372.012.199,50	1.372.012.199,50	1.372.012.199,50
5.1.07	Belanja Bantuan Keuangan	-				
5.2	BELANJA MODAL	1.671.831.671.370,00	959.609.543.655,13	911.734.152.875,69	1.072.546.856.007,91	1.366.936.749.642,99
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	21.236.250.000,00	21.236.250.000,00	21.236.250.000,00	21.236.250.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.383.613.167.136,68	2.334.345.303.513,29	2.334.866.001.142,01	2.324.644.797.055,35	2.315.455.942.844,89
	Selisih Pendapatan dan Belanja	-864.000.000.000,00	296.000.000.000,00	296.000.000.000,00	196.000.000.000,00	96.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	864.000.000.000,00	-296.000.000.000,00	-296.000.000.000,00	-196.000.000.000,00	-96.000.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.004.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Penerimaan Pinjaman	1.000.000.000.000,00				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	140.000.000.000,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	100.000.000.000,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	40.000.000.000,00				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pendapatan Daerah, merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Tahun 2026-2030 dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, serta mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan daerah. Kebijakan sektor pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menekankan pentingnya penguatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta penguatan sinergi dalam pemanfaatan dana transfer.

Selain itu, kebijakan fiskal daerah menyelaraskan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta arah pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini, Provinsi Lampung akan menyelaraskan strategi pendapatan dengan prioritas nasional, seperti transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan investasi melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif, guna meningkatkan kapasitas fiskalnya, mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing. Kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak dan penerapan teknologi informasi (*e-tax system*). Penyesuaian regulasi daerah terkait tarif dan jenis retribusi agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal dan potensi yang dimiliki. Mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif dan legal untuk menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Peningkatan peran BUMD sebagai penyumbang pendapatan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan model bisnis.

2. Peningkatan Kualitas Pendapatan Transfer

Mengoptimalkan penerimaan dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui pemenuhan indikator kinerja dan kelengkapan dokumen perencanaan. Memperkuat sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan fiskal nasional



memberikan nilai tambah langsung bagi pendapatan daerah. Mendorong kinerja fiskal daerah agar memenuhi syarat penerimaan Dana Insentif Fiskal dan dana tambahan lainnya.

3. Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif

Meningkatkan kapasitas penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti pendapatan dari hibah, bantuan keuangan, kerja sama pemerintah-swasta, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mendorong pelibatan CSR dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor sosial, pendidikan, dan lingkungan.

4. Peningkatan Ketahanan Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Pajak Daerah

Melanjutkan implementasi kebijakan opsen pajak provinsi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sinkronisasi sistem pemungutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah duplikasi dan menurunkan biaya kepatuhan masyarakat.

Belanja Daerah, merupakan instrumen utama dalam mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam periode 2026-2030 merancang kebijakan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, dan berbasis kinerja, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi ketentuan alokasi belanja wajib (mandatory spending) sesuai amanat peraturan perundang-undangan, seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, guna menjamin terpenuhinya layanan publik yang bermutu dan merata.

Selanjutnya, dalam rangka menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah Daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari program secara efisien guna menjawab kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Langkah-langkah



tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional. Dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan, kebijakan belanja daerah akan difokuskan pada:

1. Proyeksi Belanja Daerah didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah, terdiri dari : belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan gaji pegawai beserta tunjangan pegawai ; belanja bunga diproyeksi berdasarkan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Provinsi Lampung; Belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja tidak terduga diperhitungkan untuk mengampu belanja standar pelayanan minimal;
2. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
3. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta Standar Pelayanan Maksimal (SPM);
5. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
6. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah, dengan tetap mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Meningkatkan proporsi belanja produktif seperti belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
8. Mengoptimalkan belanja operasi agar lebih efisien, terutama dalam pengelolaan belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial.

- 
9. Memperkuat sinergi belanja transfer dengan kabupaten/kota untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
 10. Menjaga fleksibilitas anggaran dengan alokasi belanja tidak terduga yang memadai guna mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana alam dan krisis ekonomi.

Seluruh kebijakan belanja daerah ini harus selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta mendukung prioritas pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, seperti peningkatan daya saing ekonomi, penguatan sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan pendekatan yang berbasis hasil (performance-based budgeting), diharapkan belanja daerah dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Pembiayaan Daerah, merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menutupi defisit anggaran serta mendukung program pembangunan strategis tahun 2026-2030 merancang kebijakan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal, optimalisasi sumber pembiayaan, serta efisiensi dalam pengelolaan utang daerah. Dalam kerangka perencanaan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan daerah akan mempertimbangkan:

1. Optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memastikan anggaran yang tidak terserap dapat dimanfaatkan kembali secara efektif.
2. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk selektif dalam penggunaan pinjaman daerah untuk proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah.
3. Efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan, terutama dalam pengelolaan cicilan pokok utang dan penyertaan modal daerah, agar tidak membebani APBD dan tetap menjaga keseimbangan fiskal.
4. Memperkuat peran pembiayaan kreatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tradisional.

Seluruh kebijakan pembiayaan daerah ini harus selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta mendukung kebijakan fiskal



nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong kemandirian fiskal. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan akuntabel, pembiayaan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen yang strategis dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Skema Pembiayaan Alternatif (Non APBD)

Pembangunan infrastruktur strategis merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah sering kali menjadi tantangan utama dalam merealisasikan proyek infrastruktur berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan alternatif selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan skema pembiayaan kreatif di luar APBD dalam pembangunan infrastruktur melalui kemitraan Publik-Swasta (KPS) dan pembiayaan/ hibah dari lembaga-lembaga Internasional (World Bank, ADB, IDB, UKEF, etc). antara lain:

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP), Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi perkotaan. Pemanfaatan skema KPBU memungkinkan proyek dibiayai oleh swasta, sementara pemerintah daerah tetap mengawasi keberlangsungan dan manfaat sosialnya.
2. Penerbitan Obligasi Daerah, Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti jalan tol dan kawasan industri.
3. Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Filantropi, Meningkatkan sinergi dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk mendukung proyek infrastruktur berbasis kepentingan sosial dan ekonomi.

- 
4. Pinjaman Daerah dengan Mekanisme yang Terkelola dengan Baik, Mengakses pinjaman dari Lembaga Keuangan seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) atau Lembaga Keuangan Lainnya dan Bank Pembangunan Daerah dengan skema yang berkelanjutan.
 5. Sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meningkatkan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur energi, air bersih, dan transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
 6. Skema LVC (*Land Value Capture*) dan VGF (*Viability Gap Fund*) Pendekatan pembiayaan pembangunan yang menangkap kenaikan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah mengenakan kontribusi pada pengembang properti yang diuntungkan oleh pembangunan jalan atau transportasi publik.
 7. Pembiayaan hijau (*green finance*). Pendanaan yang diarahkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan melalui Carbon trade: Mekanisme jual-beli kredit karbon antara pihak yang menghasilkan emisi lebih rendah dan yang menghasilkan emisi lebih tinggi.
 8. Pembiayaan lainnya serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui pengembangan skema alternatif, seperti kemitraan publik-swasta, kontribusi swadaya, serta inovasi pembiayaan berbasis komunitas.

Tabel 2. 72 Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan dan Sumber Pembiayaannya

NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
1	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan status provinsi	APBD, Pinjaman Daerah, CSR	Dinas BMBK	Investor Dalam dan Luar Negeri	Telah tersusun Dokumen Perencanaan : DED, Amdal, Feasibility Studi (FS)
2	Pengembangan Kawasan Kotabaru dan Sekitarnya	APBD, APBN, Kerjasama Badan Usaha	Dinas PKPCK, Dinas BMBK	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>DOKUMEN TEKNIS :</u> • Surat Rekomendasi usulan penetapan PSN dari Kementerian Dalam Negeri • Masterplan Kawasan Kotabaru • FS kawasan Perkantoran dan AMDAL Kawasasn Perkantoran Sudah disampaikan surat permintaan Rekomendasi dari Kemenhub untuk masuk ke dalam PSN
3	Pengembangan Kawasan Industri Katibung	APBD, Investasi	Dinas Perindustrian/ Tim Persiapan KI Katibung	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>DOKUMEN TEKNIS :</u> • KI Katibung Akan tertera pada revisi RTRW dan RDTR, RPJMD Lamsel • Dokumen FS Pengembangan Kawasan Industri Katibung (Proses Penyusunan)
4	Pengembangan Pelabuhan Sebalang	APBD, Kerjasama Badan Usaha	Dinas Perhubungan	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>DOKUMEN TEKNIS :</u> Dokumen DED Pengembangan Pelabuhan Sebalang
5	Pembangunan jalur Kereta Api Logistik Prabumulih-Tarahan Lampung	APBN/KPBU	Kemenhub/PT.KAI	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>DOKUMEN TEKNIS :</u> 1. Sudah Masuk dalam RTRW Provinsi Lampung 2. Sudah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian 3. Dokumen FS sudah disusun Kemenhub 4. Dokumen DED sudah disusun Kemnhub



NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
					Sudah disampaikan surat permintaan Rekomendasi dari Kemenhub untuk masuk ke dalam PSN
6	Pengembangan SPAM Regional : Regional 1 Zona 1. Sumber Air Baku : Way Sabu, Daerah pelayanan : Kab. Pesawaran (Kec. Teluk Pandan), Kota Bandar Lampung (Kec. Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur). Lokasi ROT (Return On Tariff) : ROT Teluk Pandan (induk) dan ROT Bandar Lampung	D, Kerjasama U)	Dinas PKPCK	Investor Dalam dan Luar Negeri	DOKUMEN TEKNIS : 1. Dok. RISPAM 2. Feasibility Study (FS), 3. Kajian Kelembagaan, Detail Engineering Design (DED), 4. AMDAL SPAM, Bisnis Plan SPAM, Penyediaan pengadaan lahan SPAM (DPPT)



NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
7	Pengembangan SPAM Regional. SPAM Regional (Lokasi Tulang Bawang/Mesuji), Pelayanan: Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat	APBN, APBD, Kerjasama (KPBU)	Dinas PKPCK	Investor Dalam dan Luar Negeri	DOKUMEN TEKNIS : • RISPAM SPALD Regional, Rencana Induk SPALD Regional
8	Pembangunan TPST Regional dan PLTSa	APBD, KPBU	Dinas PKPCK dan Dinas LH	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>DOKUMEN TEKNIS</u> :TPST • Master Plan TPSTregional, Feasibility Study (FS) • Sudah disampaikan surat permintaan Rekomendasi dari Kemenhub untuk masuk ke dalam PSN
9	Pengembangan layanan Rumah Sakit Daerah dr. Abdul Moeloek	APBD Kabupaten,Kerjas ama Badan Usaha	RSUD dr. Abdul Moeloek	Investor Dalam dan Luar Negeri	Belum tersedia
10	Pengembangan jaringan transportasi massal mendukung Kawasan	APBD, Kerjasama (KPBU)	Dinas Perhubungan	Investor Dalam dan Luar Negeri	• Dokumen Studi Transportasi Kawasan Aglomerasi oleh Dishub



NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
	Metropolitan Lampung Raya				
11	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	APBD, Kerjasama Badan Usaha	Dinas Perhubungan	Investor Dalam dan Luar Negeri	Belum tersedia
12	Kawasan PKK Agropark Sabah Balau	APBD, Kerjasama Badan Usaha	Dinas KPTPH	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>Dokumen Teknis :</u> Masterplan
13	Pengembangan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 1. Pembangunan Observatorium 2. Pengembangan Ekowisata / Jasa Lingkungan di Kawasan Taman	APBD, APBN, Kerjasama Badan Usaha	Dinas Kehutanan	Investor Dalam dan Luar Negeri	Belum tersedia



NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
	Hutan Raya Wan Abdul Rachman				
14	Kawasan PKK Agropark Sabah Balau	APBD, Kerjasama Badan Usaha	Dinas KPTPH	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>Dokumen Teknis</u> : Masterplan (Review)
15	Pemanfaatan Bendungan Way Sekampung dan Marga Tiga untuk PLTS	APBN, Kerjasama Badan Usaha	ESDM, BBWS KEMENPU	Investor Dalam dan Luar Negeri	Telah dilakukan penjajakan investasi yang di fasilitasi oleh FOILA. Investasi berupa PLTS terapung yang berada di atas bendungan
16	Perlindungan terhadap kawasan ekosistem mangrove	Green Finance	Dinas LH, Dinas Kehutanan, DKP	Investor Dalam dan Luar Negeri	Belum tersedia
17	Pengembangan panas bumi Rajabasa	Investasi	Kementerian ESDM	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dipersiapkan oleh Kementerian ESDM



NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
18	Pengembangan Panas Bumi Way Ratai	Investasi	Kementerian ESDM	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dipersiapkan oleh Kementerian ESDM
19	Pengembangan panas bumi Sekinjau Selatan dan Danau Ranau	Investasi	Kementerian ESDM	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dipersiapkan oleh Kementerian ESDM
20	Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC)	Investasi	PT. ASDP	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Teknis : 1. Telah Masuk dalam Dokumen RPJP Prov.Lampung 2. Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung
21	Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Lampung	APBD, Investasi	Dinas Pariwisata	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Teknis : Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043
22	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata di sekitar Kawasan Wisata Pantai Barat	APBN, APBD, Investor	Dinas Pariwisata	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Teknis : Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung



NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
23	Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata di sekitar Danau Ranau	APBD, Kerjasama Badan Usaha	Dinas Pariwisata	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Teknis : Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043
24	Pengembangan Kawasan Geopark Suoh	APBD Kabupaten,Kerjasama Badan Usaha	Dinas ESDM	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Teknis : Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043
25	Kawasan Industri Way Kanan	Investasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Teknis : Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung, RTRW Kab.lampung Selatan
26.	Pengembangan Kawasan Industri Tegineneng	Investasi	PemKab Pesawaran/Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Teknis : Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043
27.	Kawasan Industri Tanggamus	Investasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Investor Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Teknis : Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043



NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
28.	Pengembangan industri kelautan Tanggamus	Investasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/DKP	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>Dokumen Teknis :</u> Telah Masuk dalam Lampiran indikasi Program pada Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043
29.	Pengembangan Pembibitan dan Kawasan Sentra Hortikultura Pekalongan	APBD, Kerjasama Badan Usaha	Dinas KPTPH	Investor Dalam dan Luar Negeri	Belum tersedia
30.	Pengembangan Sentra Pembibitan Padi	APBD, Kerjasama Badan Usaha	Dinas KPTPH	Investor Dalam dan Luar Negeri	Belum tersedia
31.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi	APBN, APBD	Dinas PSDA		Belum tersedia
32	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai	APBN, APBD, Kerjasama Badan Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>Dokumen Teknis :</u> Telah Masuk dalam Lampiran indikasi Program pada Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043



NO.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PD TERKAIT	CALON MITRA	KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS
33	Revitalisasi Tambak Perikanan dan Udang Kawasan Pantai Timur Lampung	APBN, APBD, Investasi, CSR	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>Dokumen Teknis :</u> Telah Masuk dalam Lampiran indikasi Program pada Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043
34	Pembangunan pelabuhan di Pesisir Barat	Investasi	Kementrian Perhubungan	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>Dokumen Teknis :</u> Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043
35	Sentra industri pengolahan ikan di Tanggamus	Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	Investor Dalam dan Luar Negeri	<u>Dokumen Teknis :</u> Telah Masuk dalam Dokumen RTRW Prov.Lampung Provinsi 2023-2043
36	Pembangunan Lampung Sport Center	Investasi, APBD, APBN	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PKPCK, BPKAD, Biro Administrasi Pembangunan	Investasi Dalam Negeri	<u>Dokumen Teknis:</u> 1. Dokumen Masterplan, Amdal, DED GOR Indoor 2. Lahan dalam proses akhir pengadaan tanah
37	Pembangunan Kawasan Industri Lampung (KAIL) II	Investasi, APBD, APBN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPKAD, Biro Administrasi Pembangunan	Investasi Dalam dan Luar Negeri	<u>Dokumen Teknis:</u> Belum Tersedia

Sumber : Bappeda, 2025



Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung serta strategi kebijakan pembangunan nasional, termasuk mendukung agenda peningkatan konektivitas, pembangunan ekonomi daerah, serta percepatan investasi.

Dengan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan alternatif, diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung dapat lebih cepat terealisasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan, sekaligus menciptakan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani kapasitas fiskal daerah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2020–2024 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun demi pembangunan ke depan perlu dirumuskan permasalahan pembangunan terhadap aspek sosial maupun ekonomi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam mengelola sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya.

2.3.1.1. Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

- 1. Kualitas Pembangunan Manusia:** Meskipun dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 0,42 poin dan masuk dalam kategori tinggi (73,13), IPM Provinsi Lampung merupakan yang terendah di Sumatera dan masih lebih rendah dari IPM nasional sebesar 75,02 serta menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan IPM terendah di Sumatera. Rendahnya aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur khususnya pada masyarakat bawah dan pedesaan serta tingginya kesenjangan terhadap layanan keuangan dan faktor produksi di masyarakat menyebabkan kinerja pembangunan manusia di Provinsi Lampung rendah.
- 2. Kemiskinan:** Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung tahun 2024 sebesar 10,69 persen, angka capaian tersebut belum mencapai target tahun 2024 sebesar 9,18 persen dan masih berada di atas capaian Nasional di tahun 2024 (9,03%). Kinerja penanggulangan kemiskinan yang rendah tersebut disebabkan oleh tidak terkoordinasi dan terpadunya upaya penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung dengan baik dan konvergen dikarenakan prioritas dan afirmasi yang



berbeda tanpa dukungan penggunaan analisis dari data yang akurat.

3. **Pertumbuhan Ekonomi:** Ekonomi Provinsi Lampung pada Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,57%, berada di atas capaian rata-rata Sumatera (4,45%) akan tetapi masih berada di bawah capaian Nasional (5,03%). Pertumbuhan ekonomi Lampung sangat tergantung kepada sektor primer pertanian yang rentan berfluktuasi dan dengan nilai tambah rendah namun menyerap sebanyak 40,57% tenaga kerja (2024) yang umumnya memiliki keterampilan rendah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tidak inklusif dan merata distribusi nilai tambahnya terhadap penduduk. Kualitas pertumbuhan ekonomi Lampung diperburuk dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di provinsi Lampung, bahwa sejumlah 52% dari 1.942.3462 orang tenaga kerja sektor tersebut berpendidikan rendah, kemudian sebanyak lebih dari 25% dari total pekerja berstatus pekerja keluarga tidak dibayar.
4. **Tata Kelola Pemerintahan:** Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung tahun 2024 meningkat dibandingkan Tahun 2023 menjadi sebesar 82,68 (A) atau berada pada interpretasi “Memuaskan”, kendati demikian masih perlu peningkatan menuju “Sangat Memuaskan” (kategori AA) yang berada pada rentang >90-100. Hingga saat ini pemerintahan yang bersifat melayani masih belum menjadi acuan yang terstandarisasi dan terimplementasi secara faktual di Provinsi Lampung. Rendahnya partisipasi masyarakat akibat dari terbatasnya akses pada layanan publik akibat dari mekanisme penanggulangan yang kurang responsif dan tidak mengadopsi teknologi informasi serta SDM ASN yang kurang terlatih.
5. **Trantibumlinmas:** Dalam kurun waktu tahun 2020-2022 tercatat masih terjadinya kasus kriminalitas di Provinsi Lampung sebanyak 11.194 kasus, dengan rasio penduduk yang terkena kasus kejahatan sebesar 121,59%. Masih



perlu upaya yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait dalam mencegah dan menanggulangi tingkat kejadian kejahatan/kriminalitas/konflik serta meningkatkan rasa aman masyarakat di Provinsi Lampung.

2.3.1.2. Permasalahan Pembangunan Per-Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Permasalahan pembangunan per-urusan di Provinsi Lampung antara lain berikut:

1. Pendidikan

- Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 8,36 tahun atau setara dengan kelas 2 sekolah menengah pertama. Data tersebut menunjukkan bahwa Penduduk Provinsi Lampung belum dapat mencapai wajib belajar 13 tahun;
- Masih kurangnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, hal ini terlihat pada angka partisipasi sekolah jenjang menengah yang baru mencapai 72,35 persen dan di bawah rata-rata nasional sebesar 74,64 persen ;
- Masih banyaknya anak usia sekolah (16-18 tahun) yang tidak melanjutkan pendidikan dan tidak pernah bersekolah dengan angka anak tidak sekolah tingkat Menengah Atas sebesar 20,73% pada tahun 2024, dimana salah satu penyebabnya adalah biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh sebagian masyarakat;

- 
- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan rasio antara guru dan siswa baik SMA (1:20) maupun SMK (1:15) sudah memenuhi standar yang ditetapkan, namun bila melihat penyebaran guru untuk daerah perkotaan dan pedesaan serta status PNS dan Non PNS masih belum terpenuhi;
 - Kualitas mutu pendidikan (kompetensi minimum pendidikan dan pendidikan karakter) yang masih perlu ditingkatkan, yang dilihat berdasarkan asesmen Nasional kemampuan literasi, numerasi, iklim kebhinekaan, iklim keamanan dan iklim inklusivitas. Saat ini capaian literasi untuk semua jenjang dalam kategori “sedang” dan capaian Numerasi dalam kategori “sedang” pada jenjang SMA, SMPLB dan SDLB. Untuk SMK dan SMALB masuk dalam kategori “kurang”. Capaian Iklim kebhinekaan, inklusivitas dan keamanan di Provinsi Lampung untuk semua jenjang kewenangan provinsi mencapai kategori “sedang” dan kurangnya pengembangan kurikulum pendidikan menengah;
 - Masih kurangnya pendidikan inklusif (Partisipasi sekolah anak disabilitas baru mencapai 51,52%, Kategori “rendah”), hal ini dikarenakan belum semua sekolah menengah umum/kejuruan mampu menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), kurangnya edukasi kepada orang tua dan juga kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran ABK serta kompetensi guru ;
 - Masih rendahnya tingkat melanjutkan sekolah menengah kejuruan ke perguruan tinggi (14,12%), lulusan yang bekerja (46,25%), lulusan yang berwirausaha (25,98%) dan nilai capaian kualitas/kompetensi lulusan sekolah menengah khususnya sekolah menengah kejuruan sebesar 67,34/ kategori sedang dan persentase kepuasan DUDI terhadap lulusan SMK sebesar 76,5 persen/kategori sedang, hal ini yang menyebabkan lulusan SMK sulit bersaing di pasar kerja ;

- 
- Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran, hanya 63,71 % sekolah kejuruan yang memiliki fasilitas TIK

2. Kesehatan

- Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, dapat dilihat dari peningkatan kasus kematian ibu sebanyak 96 kasus (tahun 2021), meningkat menjadi 105 kasus (tahun 2023). Begitu juga kasus kematian bayi yang meningkat dari 511 kasus di tahun 2019 menjadi 624 kasus di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas pelayanan, kondisi bumil yang kurang baik dan faktor lainnya;
- Status gizi masyarakat yang masih kurang ditandai dengan masih tingginya prevalensi stunting yaitu 15,9 persen (SSGI, 2024), bumil KEK (10,7 persen), remaja putri dengan anemia (13,3 persen) dan obesitas pada balita (0,6 persen);
- Belum optimalnya akses dan mutu layanan kesehatan yang ditandai masih rendahnya rasio Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (3,43), masih rendahnya puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (37,8%) dan masih rendahnya Puskesmas dan Rumah sakit yang akreditasi
- Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, TB, Malaria dll) dan masih tingginya angka kejadian penyakit tidak menular terutama hipertensi, diabetes, jantung dan paru serta meningkatnya gangguan kesehatan mental;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung pada tahun 2024 masih menunjukkan angka yang belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan dari 78,67% pada akhir 2023 menjadi 78,81% pada 2024, angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 94,2% pada tahun yang sama;

- Belum terintegrasinya kelas jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota hingga ke sentra produksi;
- Target nasional untuk akses air minum layak di tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 100% masih belum tercapai, dengan realisasi di Provinsi Lampung mencapai 87,19%.
- Kondisi jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Lampung memiliki rata-rata kerusakan sebesar 37% (mulai 30% sampai dengan 70%) dengan luas areal layanan 17.440 Ha. Kerusakan disebabkan karena faktor usia bangunan, bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi) dan kurangnya pemeliharaan, yang mengakibatkan usia pakai jaringan irigasi semakin pendek dan mengganggu pengairan pertanian.
- Peningkatan infrastruktur irigasi di Provinsi Lampung masih diperlukan untuk mendukung upaya swasembada pangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian, terutama di sentra-sentra produksi utama.
- Terbatasnya kapasitas prasarana pengendali banjir serta menurunnya kapasitas tampung sungai berkontribusi pada bertambahnya daerah rawan banjir.
- Terjadinya peningkatan sedimentasi pada sungai dan saluran irigasi yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

- Masih minimnya kualitas rumah dan Pelayanan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada kawasan kumuh di Provinsi Lampung seluas 465,85 Ha atau 23,66% dari total kawasan kumuh di Provinsi Lampung;
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan terkait penyediaan lahan bagi korban bencana di Indonesia masih belum optimal, dengan capaian pada Triwulan II 2024, hanya sebesar 35,3%;
- Kurangnya dukungan atensi pemerintah pusat terhadap Provinsi Lampung, atensi pemerintah pusat lebih terfokuskan pada PSN (Program Strategis Nasional);



5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Tingkat radikalisme yang semakin tinggi berasal dari konten digital dan marak terjadi pada kelompok rentan (ibu-ibu, remaja, dan pelajar);
- Kasus konflik sosial di masyarakat pada tahun 2019-2023 terjadi 10 kasus) dan tingginya rasio kriminalitas (sebesar 121,59% di tahun 2023 dengan total kejadian kriminal sebanyak 11.194 kejadian);
- Belum optimalnya penegakan peraturan daerah terutama yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, longsor) yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan masyarakat, serta menyebabkan erosi pantai/abrasi yang dapat merusak lingkungan pesisir. Selain itu, Lampung juga berada pada wilayah dengan potensi bencana geologi akibat posisi Lampung yang berdekatan dengan zona sesar aktif, keberadaan Gunung Rajabasa dan Gunung Krakatau menjadi yang salah satu sumber ancaman erupsi yang dapat menimbulkan tsunami maupun hujan abu vulkanik
- Provinsi Lampung, khususnya wilayah Kota Bandar Lampung, memerlukan upaya pengendalian banjir yang lebih intensif akibat meningkatnya frekuensi dan dampak banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat dan mengancam infrastruktur.
- Belum meratanya sarana dan prasarana keagamaan yang ada di masyarakat.

6. Sosial

- Belum optimalnya penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena tidak sebanding dengan populasi PPKS dan sasaran penanganan;

- 
- Penanganan PPKS pada panti sosial/LKS yang masih belum optimal, terutama karena kurangnya SDM pada panti sosial/LKS baik kualitas maupun kuantitas.
 - Masih banyaknya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang belum terakreditasi dan belum terdaftar pada Kementerian Sosial.
 - Kurangnya sinergi, kolaborasi, dan inovasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung Penanganan PPKS;
 - Masih minimnya afirmasi dari dunia usaha kepada tenaga kerja PPKS yang telah diberdayakan;
 - Belum maksimalnya upaya pemulihan kegiatan ekonomi yang berdampak pada perbaikan kualitas hidup keluarga miskin khususnya daerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah Afirmasi 3TP;
 - Kurangnya kesejahteraan terutama keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas; serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan disabilitas;
 - Masih minimnya akses peningkatan kapasitas *care giver* lansia maupun keluarga lansia dalam mendampingi lansia terutama bagi lansia non potensial di komunitas maupun panti sosial, serta belum terintegrasinya upaya pemberdayaan dan pengembangan lansia dengan kegiatan ekonomi produktif.
 - Belum optimalnya penanganan kebencanaan.
 - Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

7. Tenaga Kerja

- Tenaga kerja Provinsi Lampung Per Februari 2024 masih didominasi sektor informal sebesar 72,5%, sementara tenaga kerja sektor informal di Nasional sebesar 59,17% dan Sumatera sebesar 58,40%. Selain itu, tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal juga masih terbatas;

- Tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal masih terbatas dengan total 100 orang yang tersebar di sejumlah perusahaan di Provinsi Lampung;
- Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Provinsi Lampung Per Februari 2024 sebesar 46,19%, sementara di Nasional sebesar 28,64% dan rata-rata Sumatera sebesar 34,02%;
- Mayoritas penduduk bekerja di Provinsi Lampung memiliki tingkat pendidikan rendah (SD ke bawah) Per Februari 2024 sebesar 37,03%, sementara Nasional sebesar 36,54% dan rata-rata Sumatera sebesar 32,23%;
- Kurangnya *link and match* kebutuhan pasar kerja lokal serta keterbatasan jenis pelatihan (tidak *update*) yang ada di BLK (hanya ada 4 BLK di Provinsi Lampung dengan *output* 320 orang per tahun). Selain itu, lulusan pelatihan di BLK masih kurang diminati pasar kerja karena tidak adanya sertifikasi kompetensi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- Lulusan pelatihan dari BLK masih kurang diminati pasar kerja karena tidak adanya sertifikasi kompetensi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih rendahnya perlindungan bagi perempuan dan anak, terlihat dari peningkatan jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD P2TP2A dalam kurun waktu 3 tahun dari 146 kasus (2020) menjadi 152 kasus (2023) yang didominasi kekerasan terhadap anak kemudian diikuti kekerasan terhadap perempuan;
- Ketimpangan gender di Provinsi Lampung tahun 2023 mencapai 0,43, meski lebih baik 0,01 poin dari angka Nasional namun pada komposit keterlibatan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan menikmati hasil pembangunan belum mendapatkan porsi yang seimbang dengan laki-laki.



9. Pangan

- Rendahnya laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan -5,17% (2024); hortikultura 0.43% (2024); dan peternakan 0.85% (2024);
- Prevalensi ketidakcukupan pangan Provinsi Lampung cenderung fluktuatif (Tahun 2021 sebesar 10,25%, Tahun 2022 sebesar 14,63%, dan Tahun 2023 sebesar 8,81%) dan lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,53% (Tahun 2023), untuk tahun 2024 PoU Provinsi Lampung naik menjadi 10,68% masih jauh diatas PoU Nasional 8,27%.
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Lampung fluktuatif. Tahun 2023 sebesar 92,4%, dan pada tahun 2024 skor PPH turun 1,3% menjadi 91,1 % sehingga masih berada di bawah skor PPH Nasional sebesar 95,37 %
- Komoditas unggulan untuk tanaman pangan di Provinsi Lampung terdiri dari 3 (tiga) komoditas yaitu Padi, Jagung, dan Ubikayu. Harga Komoditas Padi dan Jagung cukup baik. Untuk ubi kayu harga Rp. 900,00/kg (2021) naik menjadi Rp. 1.100,00 – Rp. 1.200,00/Kg (2022) tetapi untuk 2024 harganya turun drastis.

10. Lingkungan Hidup

- Kualitas lingkungan hidup di Lampung masih perlu ditingkatkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung pada tahun 2024 berada pada kategori "BAIK" dengan nilai 73,11. Capaian IKLH Provinsi Lampung Tahun 2024 masih berada di bawah capaian IKLH Nasional Tahun 2024 yaitu sebesar 73,57 poin;
- Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 62,97 (kategori SEDANG) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 38,49 (kategori KURANG) yang masih di bawah target.;
- Belum tersedianya TPST Regional dan minimnya lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) baik kuantitas maupun kualitas.

11.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih banyaknya masyarakat penduduk rentan administrasi kependudukan yang menempati wilayah tempat tinggal tidak sesuai dengan domisili sebagaimana data kependudukan;
- Minimnya pemanfaatan data kependudukan dalam pembangunan.

12.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih rendahnya capaian desa mandiri yaitu sebesar 7,4 persen pada tahun 2023 dan berada di posisi terendah ke-5 se Sumatera;
- Revitalisasi BUMDes salah satu upaya untuk mengembalikan BUMDes sebagai badan usaha yang menghimpun, mewadahi dan mengembangkan potensi lokal desa. Dari total 2.446 BUMDes, sebanyak 1.000 BUMDes telah termasuk dalam kategori **maju** dan 500 BUMDes termasuk dalam kategori **mandiri** serta sisanya masih perlu ditingkatkan kembali agar mampu mendukung pengembangan desa dan masyarakat desa;
- Masih tingginya persentase kemiskinan di pedesaan dibandingkan perkotaan (kemiskinan perdesaan sebesar 12,65% berbanding 8,02% untuk kemiskinan perkotaan tahun 2023);
- Migrasi penduduk dari desa ke kota yang berdampak negatif bagi desa, yaitu minimnya sumber daya manusia produktif dalam mengolah potensi lokal dan mengembangkan pembangunan desa.

13.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih tingginya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun atau menikah di bawah umur (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*) sebesar 19,3 persen yang berakibat kurangnya kualitas bayi yang dilahirkan.

14. Perhubungan

- Konektivitas jaringan transportasi yang masih rendah untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dan kegiatan antar wilayah;
- Kondisi fasilitas dan simpul transportasi yang belum memadai seperti terminal, pelabuhan, dan bandara;
- Masih tingginya tingkat *Over Dimension Over Loaded* (ODOL);
- Belum ada transportasi massal perkotaan di Wilayah Aglomerasi Metropolitan Bandar Lampung;
- Belum terintegrasi pelabuhan panjang sebagai pelabuhan logistik dengan jalur kereta api.

15. Komunikasi dan Informatika

- Masih terbatasnya akses dan infrastruktur telekomunikasi dalam pengembangan SPBE;
- Kurangnya keamanan data dan privasi dalam adopsi SPBE.

16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Koperasi Simpan Pinjam masih mendominasi jumlah koperasi dan lebih diminati anggotanya. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas dan berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional
- Masih belum optimalnya pemasaran dan promosi produk UKM melalui media digital dan terkendalanya akses pasar
- Terkendalanya akses pembiayaan dan permodalan bagi UKM
- Hasil produksi UKM masih belum optimal (desain produk belum berbasis inovasi dan bahan baku belum sesuai standar) serta masih bergantung pada pekerja yang belum profesional
- Belum optimalnya tata kelola kelembagaan koperasi
- Masih rendahnya daya saing usaha koperasi
- Masih rendahnya kapasitas SDM koperasi

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi
- Masih rendahnya kapasitas SDM UMKM dan wirausaha yang mandiri

17. Penanaman Modal

- ICOR Provinsi Lampung yang masih tinggi sebesar 7,46 (Tahun 2023) dibandingkan ICOR Nasional sebesar 6,33 (Tahun 2023);
- Kontribusi PMTB yang cenderung melambat (33,48% Tahun 2019 menjadi 31,10% Tahun 2024);
- Realisasi PMA dan PMDN cenderung melambat (Realisasi Investasi Tahun 2024 sebesar 9,66 Triliun Rupiah atau tercapai sekitar 74,54% dari target);
- Terbatasnya proyek investasi yang *ready to offer* untuk ditawarkan pada investor

18. Kepemudaan dan Olahraga

- Masih rendahnya keikutsertaan pemuda dalam pembangunan atau kegiatan masyarakat (69,17%) serta masih banyaknya pemuda yang terlibat dalam masalah sosial;
- Masih rendahnya pemuda yang berwirausaha (0,4 %);
- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, hal ini terlihat dari masih rendahnya persentase Atlet Pelajar Berprestasi ajang nasional (58,31%)
- Masih rendahnya budaya dan partisipasi masyarakat pada kegiatan olahraga, hal ini terlihat pada capaian persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir yang masih rendah (39,41%)
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi berstandar Internasional untuk mendukung pelaksanaan PON 2032



19. Statistik

- Kurangnya keterbukaan informasi publik;
- Pemahaman terkait pengumpulan data sektoral melalui kegiatan statistik dan metadata statistik masih minim;
- Sebaran data sektoral masih belum sesuai prinsip satu data.

20. Kebudayaan

- Masih rendahnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang berada pada kategori “sedang” terutama dimensi ekonomi budaya yang masih rendah (27,77%) dan ekspresi budaya (26,14%);
- Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal yang menyebabkan terjadinya degradasi budaya lokal dalam lingkungan masyarakat.

21. Perpustakaan

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Lampung Tahun 2024 masuk dalam kategori sedang (64,81 persen) dikarenakan masih rendahnya minat, gemar dan budaya membaca masyarakat;
- Masih rendahnya implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Digital dan Inklusi Sosial.

22. Kearsipan

- Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dinamis pada perangkat daerah serta masih terbatasnya SDM fungsional pengelola arsip.

23. Pariwisata

- Masih rendahnya kontribusi sektor penyediaan makan minum dalam PDRB Provinsi Lampung Tahun 2024 sebesar 1,61% dibanding Nasional sebesar 0,27%;
- Masih rendahnya daya saing pariwisata Lampung di tingkat Nasional (Jumlah Wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan Tahun 2024 sebesar 17,875 Juta



orang atau hanya 1,75% dari total wisatawan Nasional sebesar 1,021 milyar orang);

- Kurangnya daya Tarik wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara (Rata-rata lama menginap tamu asing dan mancanegara Tahun 2023 adalah 1,46 hari, sementara di Nasional adalah 1,62 hari);
- Menurunnya tingkat penghunian kamar hotel berbintang dari 55,67% (Tahun 2022) menjadi 53,52% (Tahun 2023).

24. Pertanian

- Laju pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas) cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir (Laju Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2023 sebesar 0,55 persen, menurun dibandingkan capaian 2019 sebesar 1,36 persen);
- Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung selama 10 tahun terakhir (Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 27,29 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 33,16 persen);
- Masih rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung jika dibandingkan Sumatera dan Nasional (Tahun 2024, NTP Provinsi Lampung Rata-rata 124,89 dan Nasional 109,39);
- Masih rendahnya nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dibanding Sumatera dan Nasional (Tahun 2023 sebesar Rp. 61.626.262,3, Nasional Rp. 66.352.036,91 dan rata-rata Sumatera sebesar Rp. 96.897.736,88 per tenaga kerja);
- Sumber daya manusia pertanian didominasi oleh pendidikan dasar sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas hasil pertanian. Pada Tahun 2024, Pekerja pertanian berdasarkan tingkat pendidikan SD sebanyak 1.011.726 jiwa (52,09 %), Menengah pertama 507.950 jiwa (26,15%), menengah atas 393.175 jiwa (20,24 %) dan perguruan tinggi 29.495 (1,52%)

- Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan masih terdapat lahan yang tidak mendapatkan irigasi akibat supply air dari bendungan yang kurang ketika musim kemarau;
- Masih terbatasnya hilirisasi produk hasil pertanian dan masih rendahnya harga di tingkat petani;
- Terbatasnya akses permodalan di tingkat petani dan dukungan sarana prasarana pertanian (dalam arti luas);
- Mayoritas petani didominasi oleh petani gurem/lahan kurang dari 0,35 ha dan penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas;
- Adanya risiko bencana seperti banjir dan longsor di kawasan sentra pertanian yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur sumber daya air dan mengancam produktivitas pertanian.

25. Peternakan

- Produk peternakan belum dilengkapi sertifikasi agar bisa bersaing di nasional maupun global serta keterbatasan pengolahan peternakan;
- Harga pakan ternak yang cenderung tinggi mengakibatkan tingginya harga produksi;
- Keterbatasan permodalan karena mayoritas peternak masih didominasi peternak kecil;
- Investasi sektor peternakan masih sangat minim, hanya 0,24% di Tahun 2023 padahal potensi Lampung sangat besar;
- Laju pertumbuhan sektor peternakan menurun dari 7,51% (Tahun 2019) menjadi 7,01% (Tahun 2023).

26. Perkebunan

- Produktivitas sektor perkebunan masih rendah, khususnya kopi Lampung (0,7 ton/ha) masih di bawah Sumatera Selatan (0,8 ton/ha) bahkan Negara Brazil bisa mencapai 7-8 ton/ha;
- Laju pertumbuhan sektor perkebunan menurun dari 2,79% (Tahun 2019) menjadi -2,09% (Tahun 2024);

- 
- Masih terbatasnya SDM dan penggunaan teknologi perkebunan.

27. Kehutanan

- Degradasi hutan yang semakin tinggi, dengan banyaknya alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies flora dan fauna.
- Makin banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Kewenangan Provinsi yang dapat menyebabkan persoalan pengelolaan hutan diantaranya: deforestasi, konflik tenurial, tindak pidana kehutanan, dan pemicu kebakaran hutan dan lahan.
- Pengembangan Taman Hutan Raya (TAHURA) sebagai destinasi wisata masih belum optimal dan memerlukan dukungan investasi untuk meningkatkan pemanfaatan serta pengelolaan kawasan secara berkelanjutan;
- Masih tingginya jumlah luasan lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman lingkungan.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Lampung.

28. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Lampung mengalami defisit kapasitas pembangkitan listrik, yang mengakibatkan ketidakstabilan pasokan listrik, dan ketergantungan pada interkoneksi wilayah Sumbagsel. beban puncak kelistrikan di Provinsi Lampung di Oktober - November Tahun 2024 tercatat mencapai sekitar 1.350 MW. Sementara itu, daya mampu sistem kelistrikan Lampung mencapai 1.479 MW, yang terdiri dari pasokan pembangkit lokal dengan total kapasitas terpasang sekitar 893,5 MW, namun daya mampu netto (*available*) sebesar 762,3MW. Kekurangannya disuplai melalui transfer interkoneksi dari



Sistem Sumatera melalui jaringan P3BS (Pengatur Penyaluran Beban Sumatera).

- Potensi energi listrik yang berasal dari panas bumi masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari 13 Potensi panas bumi hanya terdapat 4 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yaitu WKP Ulu Belu, WKP Raja basa, WKP Way Ratai, WKP Danau Ranau dan 1 Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) Sekincau Selatan. bumi baru 1 lokasi yang dapat dimanfaatkan di Ulu Belu;
- Masih rendahnya pembangunan jaringan gas sementara kebutuhan energi gas di Lampung mencapai sekitar 5% sampai Tahun 2023 pemasangan SR sebesar 17.156 dari target 100.000 (Tahun 2025 dalam Perda RUED).

29. Perdagangan

- Masih kurangnya kemitraan antar industri kecil menengah dengan perusahaan besar dan BUMN/BUMD;
- Meningkatnya andil inflasi bahan makanan terhadap capaian Inflasi Provinsi Lampung (andil inflasi bahan makanan tahun 2024 sebesar 2,05 persen, meningkat dibandingkan capaian 2023 sebesar 2,54 persen);
- Kerjasama antar daerah masih terbatas pada perdagangan komoditas pertanian yang bernilai tambah rendah.

30. Perindustrian

- Masih rendahnya nilai tambah sektor industri manufaktur dibanding Sumatera dan Nasional (Tahun 2023 Lampung sebesar Rp.5070 per kapita, Sumatera sebesar Rp.10.221 per kapita, dan Nasional sebesar Rp. 9.000 per kapita);
- Kinerja sektor perindustrian masih didominasi oleh industri makanan dan minuman (Tahun 2024 sebesar 16,14%), dengan kontribusi yang cenderung menurun selama 5 tahun terakhir dari 20% (Tahun 2019) menjadi 18,01% (Tahun 2023), berada di bawah capaian kontribusi industri pengolahan Nasional sebesar 18,67%;

- Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Tahun 2024 SUB SEKTOR sebesar 9,09% sementara sebesar Nasional sebesar 4,64%;
- Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam penerapan standar mutu/kualitas produk (PIRT, BPOM, HALAL, HACCP), penggunaan teknologi, inovasi, diversifikasi produk dan pengemasan produk;
- Terbatasnya jumlah industri besar dan sedang.

31. Transmigrasi

- Perpindahan penduduk mengakibatkan pergeseran budaya dan sosial antara pendatang dan penduduk lokal bahkan berpotensi menimbulkan konflik budaya, perbedaan adat istiadat, dan penolakan dari masyarakat setempat;
- Belum meratanya ketersediaan dan akses sarana prasarana dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah) di daerah transmigrasi yang berdampak pada kesulitan beradaptasi.

32. Kelautan dan Perikanan

- Kontribusi sub sektor perikanan cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir (kontribusi sub sektor perikanan tahun 2023 sebesar 5,26 persen, meningkat dari capaian tahun 2019 sebesar 2,40 persen);
- Laju pertumbuhan sub sektor perikanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir (laju pertumbuhan sub sektor perikanan tahun 2021 sebesar 0,91 persen, Tahun 2022 sebesar -5,34 persen dan Tahun 2023 sebesar 5,52 persen);
- Masih belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penggunaan alat tangkap ikan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan;
- Penggunaan lahan perikanan yang tidak sesuai menyebabkan kontaminasi sumber penyakit;
- Produksi kebutuhan pakan belum tercukupi meski sudah dilakukan kerjasama dengan universitas namun masih



kekurangan bahan baku pembuatan pakan yang masih impor.

33. Perencanaan Pembangunan

- Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan yang masih belum optimal;
- Implementasi kebijakan satu data indonesia sebagai acuan perencanaan pembangunan di daerah masih belum memenuhi kriteria data yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data;
- Instrumen perencanaan seperti penjabaran kinerja (cascading, crosscutting, dan pohon kinerja) di tingkat perangkat daerah masih belum optimal digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

34. Keuangan

- Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah;
- Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dioptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat;
- Belum optimalnya sistem pengelolaan aset daerah.

35. Kepegawaian Serta Pendidikan Pelatihan

- Belum efektifnya layanan digitalisasi kepegawaian secara terpadu sebagai dasar peningkatan kompetensi ASN;
- Belum terintegrasinya sistem pembelajaran yang memadukan antara pekerjaan dengan pembelajaran ASN secara efisien dan efektif.

36. Penelitian dan Pengembangan

- Kurangnya kolaborasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang inovatif dan relevan, antara lembaga penelitian, universitas, dan instansi/lembaga swasta;

- 
- Belum optimalnya peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Pengembangan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - Belum adanya penjamin kualitas riset dan inovasi dikarenakan belum optimalnya tim pengendali mutu.

37. Persandian

- Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang diukur melalui Indeks KAMI (versi 4.2) tahun 2024 mencapai 378;
- Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) / Computer Security Incident Response Team (CSIRT) baru mencapai 6 CSIRT dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

38. Pengawasan

- Hasil Survei Penilaian Integritas Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebesar 65,83 masuk dalam kategori rentan, menurun sebanyak 2,61 poin dari hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 sebesar 68,44.
- Belum optimalnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern di Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Keterbatasan SDM APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

39. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Demokrasi, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Politik.
- Adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi unjuk rasa, konflik sosial, dan terorisme.

- Adanya potensi degradasi moral dan budaya di masyarakat sebagai dampak pengaruh budaya asing.

40. Badan Penghubung

- Belum efektifnya layanan digitalisasi secara terpadu sebagai dasar peningkatan pelayanan publik
- Belum optimalnya potensi PAD dalam pemanfaatan anjungan Lampung di TMII

41. Sekretariat Daerah

- Belum optimalnya koordinasi administratif dan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- Belum optimalnya pemenuhan layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

42. Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan rancangan peraturan daerah (Perda)
- Belum optimalnya penyerapan aspirasi dan informasi dari masyarakat

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan kajian terhadap RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Laporan KLHS RPJMD, dan evaluasi kinerja dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta hasil FGD Tematik Teknokratik dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Akademisi, Praktisi, dan stakeholder lainnya, serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional (global), nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Provinsi Lampung.

Tabel 2. 73 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Lampung

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional
1. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan	1. Rendahnya Produktivitas	1. Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam



Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional
2. Krisis Energi 3. Perang dan Ketegangan Geopolitik 4. Isu Kesehatan Mental dan Kesejahteraan 5. Krisis Pengungsi dan Migrasi 6. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi 7. Transformasi Digital dan Keamanan Siber 8. Krisis Pangan Global	2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat 4. Kebutuhan Hidup Tingai pada Usia Produktif 5. Krisis Lingkungan 6. Dinamika Geopotitik dan Geoekonomi 7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah 2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi 3. Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan 4. Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. 5. Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. 6. Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan. 7. Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal 8. Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi 9. Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal sosial dalam mendukung stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 10. Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional
		11. Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal 12. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlanter

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung 2025.

Isu Strategis 1: Peningkatan Ketahanan Ekonomi Lampung di Tengah Gejolak Global melalui Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi

Di tengah peperangan dan ketidakstabilan geopolitik, Provinsi Lampung menghadapi tantangan strategis terkait ketahanan pangan dan energi. Sebagai lumbung pangan dan sentra komoditas ekspor, Lampung rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok. Oleh karena itu, strategi utama adalah diversifikasi pasar ekspor dan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah serta mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Langkah ini diperkuat dengan upaya untuk memperkuat infrastruktur logistik dan kemitraan internasional agar dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.

Meskipun laju pertumbuhan industri pengolahan hanya mencapai 1,90% selama lima tahun terakhir, sektor ini tetap memberikan kontribusi signifikan sebesar 19,15% terhadap PDRB. Namun, hilirisasi masih belum optimal, terlihat dari rendahnya penyerapan bahan baku lokal dan dominasi ekspor komoditas mentah (68,01%). Hambatan seperti inefisiensi produksi, lemahnya struktur industri, dan minimnya teknologi memperkuat urgensi pembangunan kawasan industri yang terintegrasi untuk menarik investasi dan memperkuat rantai pasok lokal.

Di sisi lain, meskipun struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor primer, provinsi ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2024 yang menempati peringkat 10 secara nasional. Peningkatan produktivitas komoditas seperti jagung dan ubi jalar



menunjukkan potensi besar untuk diversifikasi pangan dan hilirisasi terpadu. Untuk mengurangi ketergantungan pada beras, diversifikasi pangan berbasis keanekaragaman hayati lokal perlu diperkuat melalui edukasi dan promosi konsumsi alternatif sehat seperti jagung dan singkong. Pendekatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diarahkan agar tidak terpaku pada beras, tetapi juga mencakup pangan lokal non-nasi yang bergizi dan bernilai ekonomi tinggi bagi petani Lampung.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan ke depan harus berfokus pada penguatan hilirisasi sektor industri, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan mencakup peningkatan investasi yang terarah, reformasi tata kelola perizinan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Transformasi struktural ini adalah kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Isu Strategis 2: Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih belum optimal, mencerminkan lemahnya daya ungkit sektor produktif, terutama di pedesaan yang kaya potensi namun belum tergarap maksimal. Ketergantungan pada sektor primer bernilai tambah rendah, minimnya investasi, keterbatasan infrastruktur dan akses pembiayaan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kesenjangan juga tampak dalam sektor pertanian dan perikanan, di mana kebutuhan benih unggul belum terpenuhi akibat data yang tidak akurat, distribusi alat pertanian yang tidak tepat sasaran, hingga alih fungsi lahan yang tak terkendali, yang berdampak pada penurunan produktivitas. Di sektor perikanan, menurunnya produksi akibat penyakit ikan, mahalnya pakan karena bahan impor, dan belum optimalnya distribusi solar bersubsidi memperparah kondisi nelayan kecil.

Sementara itu, geliat sektor pariwisata yang mencatat 13,98 juta kunjungan wisatawan pada 2023 belum diiringi kesiapan infrastruktur, akses transportasi publik, promosi digital, maupun



integrasi UMKM lokal. Tiga dari tujuh kawasan wisata unggulan berkembang optimal, sisanya belum tergarap maksimal karena minimnya sinergi antar pihak, pendanaan terbatas, serta lemahnya strategi dan promosi event. Pengembangan Taman Hutan Raya (TAHURA) sebagai destinasi wisata juga masih belum optimal dan memerlukan dukungan investasi untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pembangunan daerah masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional yang belum mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau secara menyeluruh, padahal peluang besar ada di sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan industri daur ulang. Konsep Blue Economy pun menghadapi tantangan serius, mulai dari degradasi ekosistem laut akibat polusi dan perubahan iklim, hingga rendahnya kapasitas SDM dan kurangnya teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, diperlukan reformasi tata kelola, penguatan data dan regulasi, integrasi ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan pembangunan, serta sinergi lintas sektor untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Lampung.

Isu Strategis 3: Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang tercermin dari disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan untuk Provinsi Lampung. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus berjalan, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang signifikan, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara masyarakat pedesaan, terutama petani dan nelayan, masih berjuang dengan pendapatan yang rendah dan akses terbatas terhadap fasilitas dasar.

Angka Kemiskinan yang masih tinggi terutama di perdesaan menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Meskipun berbagai program bantuan sosial serta pembangunan infrastruktur telah digulirkan oleh pemerintah, namun penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan belum menunjukkan hasil yang



signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah memperdalam jurang kesejahteraan antara desa dan kota.

Tantangan pergeseran struktur kelas masyarakat, di mana mobilitas sosial dan ekonomi menjadi semakin kompleks. Meskipun ada pertumbuhan di kelas menengah, kelompok ini sering kali rentan dan berpotensi kembali ke kelas bawah akibat tekanan ekonomi, seperti tingginya biaya hidup dan ketidakstabilan pekerjaan. Di sisi lain, kesenjangan antara kelas kaya dan kelas bawah semakin melebar, diperparah oleh ketidakmerataan akses terhadap modal, aset, dan kesempatan. Masyarakat di perdesaan, khususnya petani skala kecil, sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan kesulitan untuk naik kelas

Pembangunan ekosistem ekonomi berbasis desa masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya integrasi program pengentasan kemiskinan dengan potensi lokal desa, yang disebabkan oleh kurangnya konvergensi dalam perencanaan antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa. Hal ini menyebabkan intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya selaras dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh. Perencanaan di tingkat desa cenderung berfokus pada pencapaian target SDGs Desa, namun masih mengabaikan pemanfaatan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) sebagai dasar perencanaan. Selain itu, lemahnya komunikasi dan sinergi dengan perencanaan di tingkat daerah menyebabkan proses perencanaan desa belum mampu merespons kebutuhan riil serta menggali potensi lokal secara komprehensif dan berkelanjutan. Program-program pengentasan kemiskinan hingga saat ini masih bersifat sektoral dan top-down, tanpa melibatkan perencanaan partisipatif dari masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDesa yang diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi lokal, belum mampu berperan secara optimal akibat berbagai keterbatasan, baik dari sisi kapasitas kelembagaan,



akses pembiayaan, maupun dukungan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan di desa membutuhkan program yang fokus dilaksanakan di desa, untuk itu pemerintah pusat mencanangkan program koperasi desa merah putih. Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memotong rantai pasok yang panjang dalam tata niaga di desa, dimana dalam tata niaga di desa masih banyak dikuasai oleh tengkulak/middleman sehingga petani/nelayan mendapatkan margin yang minim dan masyarakat sebagai konsumen akhir mendapatkan harga yang tinggi.

Selain mensukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang menggabungkan pemanfaatan data desa secara akurat, pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDesa, serta sinergi antarlembaga pemerintah di semua tingkatan. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar tepat sasaran, kontekstual, dan berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.

Isu Strategis 4: Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Peningkatan ruang fiskal di Provinsi Lampung hingga saat ini masih belum optimal. Hal ini tercermin dari berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas penerimaan dan belanja daerah. Salah satu tantangan utama adalah penetapan target penerimaan pajak daerah yang belum sepenuhnya didasarkan pada potensi riil yang dimiliki. Formulasi penetapan target yang cenderung bersifat inkremental dan belum berbasis pada data wajib pajak yang valid mengakibatkan terjadinya gap antara potensi dan realisasi penerimaan. Berdasarkan hasil perhitungan potensi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat selisih potensi pajak yang cukup signifikan, yakni lebih dari Rp58 miliar, yang hingga kini belum dapat digarap secara optimal.

Selain itu, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen belum merata.



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya BUMD yang bergerak di sektor jasa keuangan yang secara konsisten memberikan kontribusi dividen kepada daerah. Sementara itu, kinerja BUMD di sektor non-jasa dan non-keuangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pariwisata, di mana kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah masih terbatas, meskipun tren peningkatan kunjungan wisata menunjukkan korelasi positif terhadap penerimaan retribusi dan pajak daerah.

Di sisi lain, efektivitas belanja daerah dalam mendukung pencapaian outcome pembangunan masih menghadapi tantangan. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting yang mencapai Rp1,38 triliun tercatat belum sepenuhnya efektif, di mana sebesar 54,38% dari total anggaran tersebut belum secara langsung mendukung capaian akhir yang ditargetkan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar belanja daerah benar-benar berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting).

Isu Strategis 5: Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Lampung menjadi isu yang semakin mendesak, terutama di tengah tingginya dominasi penggunaan energi fosil seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Ketergantungan terhadap sumber energi tersebut tidak hanya melemahkan ketahanan energi daerah, tetapi juga menjadi hambatan dalam percepatan transisi menuju energi bersih. Tantangan utama dalam proses transisi ini meliputi belum memadainya infrastruktur energi, terbatasnya investasi, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan energi terbarukan. Selain itu, masih terjadi ketimpangan akses energi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana sejumlah wilayah perdesaan menghadapi keterbatasan akses terhadap listrik yang andal. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mendorong percepatan pembangunan



energi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, khususnya dari sumber panas bumi, tenaga surya, air, dan bioenergi. Dari total 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang ada di Lampung, saat ini baru WKP Ulubelu yang telah beroperasi secara komersial. Oleh karena itu, percepatan pengembangan WKP lainnya perlu menjadi prioritas guna memperkuat pemanfaatan potensi energi lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Selain panas bumi, pemanfaatan energi surya dan bioenergi juga memiliki prospek yang menjanjikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah terpencil dan perdesaan. Diversifikasi sumber energi terbarukan ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan energi daerah, tetapi juga mendorong kemandirian energi regional yang berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan berwawasan lingkungan di Provinsi Lampung.

Isu Strategis 6: Belum optimalnya dukungan Infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan yang signifikan, utamanya disebabkan oleh belum meratanya pusat-pusat kegiatan ekonomi serta ketimpangan konektivitas antarwilayah. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan kawasan ekonomi baru yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi menjadi salah satu langkah strategis. Pembangunan kawasan ekonomi berbasis eco-city diarahkan untuk mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan, mendorong pertumbuhan wilayah baru yang berwawasan lingkungan, serta memastikan aksesibilitas yang inklusif dan efisien. Selain bertujuan untuk mengurangi tekanan pembangunan yang terkonsentrasi di Kota Bandar Lampung, strategi ini juga diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi alternatif di wilayah lain yang memiliki potensi unggulan, baik di wilayah daratan maupun pesisir dan kepulauan.

Namun demikian, upaya pengembangan kawasan ekonomi baru di Provinsi Lampung masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur konektivitas yang belum optimal. Hingga tahun 2023,



tingkat kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Lampung tercatat baru mencapai 93,90%, sementara kemantapan jalan kabupaten masih bervariasi antara 23,59% hingga 64,99%, jauh di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMN. Di sisi lain, alokasi anggaran pemeliharaan jalan kabupaten belum mampu mendorong peningkatan signifikan terhadap kualitas jaringan jalan tersebut. Ancaman terhadap keberlanjutan infrastruktur jalan juga datang dari tingginya frekuensi kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan, untuk mengatasi hal ini pemerintah merencanakan peningkatan kondisi jalan mantap dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun pada tahun 2026. Minimnya aksesibilitas turut terlihat pada sektor pelabuhan, di mana sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung belum beroperasi secara optimal untuk mendukung arus logistik, khususnya di wilayah pesisir dan hinterland. Sementara itu, konektivitas udara juga masih menghadapi berbagai kendala. Bandar Udara Taufiq Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat masih terkendala proses perluasan lahan, sedangkan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan belum memiliki grand design pengembangan dan belum didukung oleh moda transportasi massal yang memadai sebagai penghubung antarwilayah.

Dalam rangka mewujudkan proyeksi strategis jangka panjang yaitu pengembangan kawasan ekonomi berbasis eco-city (Kota Baru) untuk merespons kepadatan spasial dan beban pertumbuhan Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Komitmen terhadap pengembangan kawasan ini telah dinyatakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025–2029, serta diperkuat dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan panjang, termasuk dalam RTRW Provinsi Lampung, maka dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan integratif. Penguatan konektivitas melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, optimalisasi pelabuhan, peningkatan fasilitas bandara, dan pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan menjadi kunci utama. Selain itu, pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan, integrasi tata ruang, serta prinsip keberlanjutan melalui green infrastruktur dan penataan hunian yang inklusif. Dengan pendekatan tersebut, Provinsi Lampung diarahkan untuk



membangun kawasan ekonomi baru yang berdaya saing, berkelanjutan, serta tangguh secara sosial dan lingkungan.

Isu Strategis 7: Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penyerapan tenaga kerja secara optimal

Secara demografi, proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang tertuang dalam buku publikasi BPS, bahwa jumlah penduduk Lampung di tahun 2030 diproyeksikan sebanyak 10 juta jiwa. Jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) akan terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035. Disisi lain, angka ketergantungan (dependency ratio) cenderung berada pada posisi yang relatif rendah atau dibawah 50 %. Kondisi dominannya penduduk usia produktif dan angka ketergantungan yang relatif rendah ini disebut sebagai Bonus Demografi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama dalam hal produktivitas sumber daya manusia (SDM) yang memerlukan dukungan agar lebih sehat, terdidik dan berdaya saing.

Bonus demografi diprediksi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja sehingga harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang luas, hal inilah yang menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang luas dan mampu memberikan kesejahteraan bagi penduduk usia produktif. Selain ketersediaan lapangan pekerjaan, harus diimbangi pula dengan peningkatan keterampilan soft skill dan hard skill, baik melalui pendidikan sekolah menengah vokasi, pelatihan tenaga kerja serta fasilitasi sertifikasi profesi tenaga kerja.

Tingginya biaya hidup, terutama untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan, sering kali tidak seimbang dengan tingkat upah yang ada. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya beli dan kesulitan dalam menabung atau berinvestasi bagi kelompok usia produktif. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan lapangan kerja formal yang layak dan persaingan yang ketat, memaksa banyak orang untuk bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak stabil.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal penting dalam mewujudkan Transformasi Sosial menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam konteks tersebut, isu dan



tantangan SDM yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Pada aspek kualitas pendidikan isu yang dihadapi mencakup kompetensi minimum pendidikan dan pendidikan karakter, lulusan pendidikan kejuruan (SMK) dan pelatihan vokasi yang siap berwirausaha dan bekerja bersama dunia usaha dan dunia industri, kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang efektif, serta materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu perlu didorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui pemerataan akses pendidikan untuk memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan wajib belajar 13 tahun. Perbaikan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai, subsidi pendidikan bagi kelompok kurang beruntung, mendorong pendidikan non formal, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta digitalisasi proses pembelajaran, serta memenuhi hak-hak disabilitas dengan meningkatkan sarana prasarana pendidikan sekolah inklusi. Upaya peningkatan kualitas dan akses yang merata dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Faktor lainnya yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan adalah pemuda. Pemuda menjadi kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi, karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi motor penggerak perubahan dan pembangunan di masa depan. Di bidang ekonomi, pemuda dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif, agen transformasi digital, wirausahawan, tenaga kerja terampil, dan konsumen cerdas. Kewirausahaan membantu pemuda menjadi mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pemuda yang menjadi pengusaha muda (entrepreneur) memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan potensi ini, pemuda perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang tepat.

Sedangkan di bidang olahraga, pemuda memiliki peran penting dari menjadi atlet, pelatih, motivator, hingga pengelola dan pembina



cabang olahraga, yang dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan olahraga. Pemuda dapat menjadi agen perubahan dalam dunia olahraga, dengan mendorong inovasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas olahraga di berbagai bidang. Untuk mendukung prestasi pemuda dan olahraga maka perlu membangun sinergitas para pemuda, atlet, dan organisasi olahraga; menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat mulai dari desa, sekolah, dan instansi; memberikan apresiasi terhadap prestasi pemuda bidang akademik, seni, lingkungan, dan olahraga; serta membangun pusat olahraga berstandar internasional (Lampung Sport Center).

Berdasarkan publikasi Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024, status gizi masyarakat masih kurang baik ditandai dengan angka prevalensi stunting Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, untuk itu perlu dilakukan konvergensi dari semua pihak yang dapat menurunkan prevalensi stunting melalui intervensi sensitif maupun intervensi spesifik. Tantangan lain di bidang kesehatan dalam menghadapi kondisi bonus demografi yang perlu mendapat perhatian diantaranya: peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes tipe 2, obesitas, dan kanker yang terjadi akibat perubahan gaya hidup dan kurangnya aktivitas fisik. Penduduk usia produktif sering menghadapi stres akibat tuntutan pekerjaan dan kehidupan dan berdampak pada kesehatan mental. Upaya lainnya adalah peningkatan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana untuk mendukung perencanaan keluarga dan kesehatan ibu. Disisi lain, kewaspadaan terhadap potensi kuncunya pandemi penyakit baru (new emerging disease) perlu terus dilakukan sekaligus perluasan cakupan vaksinasi dan pemantauan untuk penyakit menular seperti campak, polio, dan influenza. Untuk mendukung hal itu semua, peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan melalui pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten/kota serta pengembangan teknologi kesehatan digital dan telemedicine sebagai potensi dalam mengatasi masalah kesehatan di masa mendatang.

Selain itu, proporsi penduduk lanjut usia (lansia) umur 60 tahun ke atas ditahun 2035 diproyeksikan akan mencapai 1,606 juta



penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memasuki fase struktur umur penduduk menua, sehingga harus dipersiapkan dan diantisipasi melalui strategi menjelang “aging population” seperti penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia, serta pengembangan peluang kerja bagi lansia agar tetap produktif, penyelenggaraan program jaminan sosial secara konvergen dalam memberikan perlindungan dan jaminan hari tua bagi pekerja informal.

Keluarga berkualitas perlu dipersiapkan dalam menghadapi bonus demografi. Tantangan yang dihadapi mencakup: ketimpangan komunikasi dan kesehatan mental terhadap dinamika keluarga; keterbatasan ekonomi yang berdampak pada kualitas kehidupan keluarga; penentuan dan pembagian peran serta tanggung jawab secara adil dalam keluarga. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga juga menjadi ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, maka dari itu Upaya yang perlu dilakukan melalui penguatan ketahanan keluarga untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan dan perubahan, baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun psikologis, agar tetap harmonis dan sejahtera. Salah satu bentuknya adalah membudayakan keluarga inti harmonis serta meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan pranata sosial budaya yang tangguh.

Isu Strategis 8: Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek dan Inovasi) menjadi katalis strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang inklusif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital secara masif diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, industri kreatif, dan UMKM, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi. Lampung memiliki potensi besar sebagai daerah inovatif, sebagaimana tercermin dalam penggunaan teknologi tepat guna di desa, tumbuhnya layanan teknologi informasi di wilayah perkotaan, dan berbagai inovasi lokal yang dikembangkan melalui perguruan tinggi serta Badan Penelitian



dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Namun, pengembangan ekosistem inovasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan industri, keterbatasan insentif bagi riset yang aplikatif, serta rendahnya tingkat adopsi dan komersialisasi hasil inovasi.

Selain itu, seiring meningkatnya penggunaan teknologi, risiko keamanan siber juga menjadi tantangan besar. Data pribadi dan informasi penting milik pemerintah dan masyarakat rentan terhadap serangan siber, seperti peretasan dan penipuan daring. Oleh karena itu, strategi utama Lampung harus berfokus pada percepatan pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat, serta penguatan sistem dan regulasi keamanan siber untuk melindungi data dan menciptakan ekosistem digital yang aman dan tepercaya. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung.

Menjawab tantangan tersebut, penguatan kapasitas sumber daya manusia berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak, didukung oleh regulasi yang adaptif, pendanaan inovasi yang berkelanjutan, serta pengembangan pusat kreativitas dan inkubasi inovasi daerah. Penerapan konsep desa cerdas dan hilirisasi komoditas unggulan berbasis teknologi juga menjadi bagian dari strategi transformasi struktural daerah. Inovasi harus ditempatkan bukan sekadar sebagai instrumen peningkatan daya saing, tetapi sebagai fondasi pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta menopang ketahanan ekonomi jangka panjang.

Isu Strategis 9: Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal sosial dalam mendukung stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Provinsi Lampung sebagai wilayah dengan karakter masyarakat yang multietnis, multikultural, dan multiagama memiliki kekayaan sosial budaya yang sangat potensial dalam mendukung terwujudnya



kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Keberagaman ini menjadi kekuatan apabila dikelola secara bijaksana melalui penguatan nilai-nilai religiusitas, adat istiadat, serta semangat kebangsaan yang telah mengakar kuat di berbagai komunitas. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan taat hukum, sekaligus menjadi modal sosial strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sangat penting sebagai modal sosial untuk pembangunan, karena nilai-nilai ini membentuk karakter bangsa, mendorong toleransi, dan memperkuat persatuan, yang semuanya mendukung stabilitas dan kemajuan nasional. Nilai religius yang dipedomani pada seluruh lingkup kehidupan masyarakat akan tercermin dari budaya dan kehidupan bermasyarakat, hal ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan karena merupakan modal sosial yang sangat mendasar sebagai pilar karakter bangsa yang mampu memperkuat persatuan dan stabilitas sosial.

Di Lampung, pelestarian ini tercermin dari berbagai upaya seperti penguatan keimanan melalui kegiatan keagamaan, pelestarian tradisi adat, pengusulan cagar budaya, penggunaan aksara dan bahasa Lampung di ruang publik, hingga sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan semangat "Lampung Bersama", yang dapat diperkuat melalui revitalisasi nilai-nilai lokal seperti "Piil Pesenggiri" sebagai prinsip hidup orang Lampung, serta pendekatan budaya Sakai Sambayan yang menumbuhkan solidaritas dan semangat gotong royong antarwarga. Penyelenggaraan festival seni, revitalisasi sarana budaya, dan penguatan kelembagaan adat menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kebudayaan (sanggar, balai desa, perguruan silat, lembaga adat) yang inklusif dan berdaya tahan.

Kondisi penduduk Lampung yang majemuk dan sangat heterogen dengan beragam sosial dan budaya memiliki kerentanan mengalami konflik antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) secara vertikal maupun horizontal. Kemajemukan sosial budaya menyimpan potensi konflik SARA yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan stabilitas politik serta keamanan daerah. Kerentanan ini dapat



diperburuk oleh faktor eksternal seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan tingginya pengangguran, yang mendorong timbulnya tindakan kriminal dan penyalahgunaan sosial. Oleh karena itu, stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas) harus menjadi prasyarat utama dalam menciptakan ruang hidup yang aman, harmonis, dan terlindungi, guna mendukung iklim pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Permasalahan lainnya yang muncul pada isu trantibumlinmas adalah krisis pengungsi dan migrasi, terutama dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya. Sebagai salah satu pintu gerbang utama Sumatera, Lampung menjadi titik transit penting bagi para pengungsi yang mendarat di pesisir. Penanganan pengungsi ini menimbulkan tantangan kompleks, mulai dari ketersediaan fasilitas penampungan yang memadai, jaminan kebutuhan dasar (pangan, kesehatan), hingga masalah keamanan dan potensi konflik sosial dengan masyarakat lokal.

Di samping itu, Lampung juga menghadapi tantangan migrasi internal dari daerah lain. Gelombang urbanisasi dan migrasi musiman, terutama ke sektor pertanian dan perkebunan, dapat memicu masalah kependudukan jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini mencakup isu kesejahteraan sosial, penyediaan lapangan kerja, dan layanan publik yang merata. Oleh karena itu, isu strategis Lampung tidak hanya terbatas pada penanganan pengungsi internasional, tetapi juga manajemen migrasi internal untuk memastikan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Isu Strategis 10: Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup

Provinsi Lampung menghadapi tekanan serius terhadap kualitas lingkungan hidup akibat dampak perubahan iklim dan meningkatnya intensitas bencana. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 menunjukkan angka 73,11 (kategori baik), capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada pada kategori sedang (62,97) akibat pencemaran limbah domestik dan pertanian, sementara Indeks



Kualitas Lahan menunjukkan angka yang memprihatinkan (38,49), mencerminkan masifnya alih fungsi kawasan lindung dan praktik pemanfaatan tanah yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan, menurunkan produktivitas lahan, serta meningkatkan kerentanan ekologis masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pedesaan dan pesisir.

Perubahan iklim memperparah kondisi tersebut melalui peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan pergeseran musim yang berdampak pada kekeringan, gagal panen, dan penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Emisi gas rumah kaca dari sektor-sektor utama seperti pertanian, energi, dan peternakan terus meningkat, termasuk kontribusi signifikan gas metana dari 775.000 ekor sapi potong yang mencapai 96.000 ton per tahun. Sementara itu, potensi penyerapan karbon dari kawasan pesisir seluas ±39.200 ha (mangrove, lamun, rawa) belum dimanfaatkan secara optimal sebagai penyeimbang emisi. Apabila tidak diintervensi, akumulasi emisi ini akan mendorong peningkatan suhu rata-rata Lampung dan berdampak sistemik terhadap kesehatan, ekonomi, dan kelestarian ekosistem.

Di sektor kelautan, praktik ilegal seperti illegal fishing yang menggunakan alat tangkap merusak, seperti bom dan pukat harimau, turut mempercepat degradasi lingkungan laut. Kerusakan terumbu karang, berkurangnya populasi ikan, serta hilangnya habitat biota laut berdampak langsung pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan ketahanan ekosistem pesisir terhadap bencana. Reklamasi pesisir yang tidak terkontrol juga memperburuk kondisi, karena mengorbankan hutan mangrove—pelindung alami dari badai dan abrasi—dan memicu pencemaran serta konflik sosial akibat terganggunya ruang hidup masyarakat pesisir. Jika dibiarkan, kedua praktik ini akan mempercepat krisis ekologis di wilayah pesisir dan memperbesar risiko bencana lingkungan jangka panjang.

Di sisi lain, tekanan kebencanaan yang meningkat signifikan—di mana 43% kejadian bencana dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren kenaikan—menambah kompleksitas tantangan lingkungan di Lampung. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, diperparah dengan kerentanan geologis akibat



posisi Lampung yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau, Gunung Rajabasa, dan zona sesar aktif. Khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung, frekuensi dan dampak banjir yang semakin tinggi menuntut upaya pengendalian banjir yang lebih intensif, karena telah mengganggu aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur, dan meningkatkan potensi kerugian sosial-ekonomi. Selain merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan jiwa, rangkaian bencana ini mempercepat pencemaran dan degradasi kualitas air serta tanah yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Menghadapi ancaman ganda dari perubahan iklim dan kebencanaan, Provinsi Lampung membutuhkan pendekatan pembangunan yang integratif dan berkelanjutan. Kebijakan mitigasi perubahan iklim harus dipadukan dengan strategi adaptasi berbasis komunitas dan penguatan sistem peringatan dini. Pengendalian emisi, pelestarian kawasan lindung, percepatan transisi menuju energi bersih, serta pengembangan ekonomi rendah karbon menjadi langkah krusial agar pembangunan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam menjaga keberlanjutan ekologis dan ketahanan lingkungan hidup jangka panjang.

Isu Strategis 11: Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan menekankan pada transparansi, efisiensi, dan integritas. Provinsi Lampung saat ini telah mencapai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,68 dengan kategori “A”, sebuah capaian positif yang mencerminkan keberhasilan penguatan kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM aparatur, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Capaian ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui Penguatan birokrasi yang berintegritas di Provinsi Lampung, antara lain melalui: menguatkan jejaring kerjasama antar kota/kabupaten; memperkuat instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif; percepatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor



keuangan pada sektor prioritas; pengembangan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam pengajuan perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, retribusi, dan layanan lainnya dilakukan secara online melalui portal resmi pemerintah daerah; Optimalisasi fungsi hotline atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital; serta mengadakan forum dialog publik secara rutin untuk membahas perkembangan pembangunan daerah serta mendengarkan masukan dari masyarakat.

Namun demikian, pengendalian fraud di berbagai level pemerintahan masih menjadi tantangan yang belum tertangani secara sistematis. Di tingkat pemerintah daerah, belum tersedia standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif dalam aspek pencegahan, deteksi, dan respon terhadap *fraud*. Sistem *whistleblowing* pun belum berjalan optimal karena lemahnya perlindungan bagi pelapor. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya monitoring dan evaluasi atas kegiatan antikorupsi, sehingga efektivitas implementasinya tidak terukur dengan baik. Masalah ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih kuat serta sistem pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi.

Keterbatasan kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengelola risiko fraud dan melakukan pencegahan menjadi penghambat dalam menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel. Di tingkat desa, tantangan semakin kompleks karena masih kuatnya intervensi kepala desa, lemahnya pengawasan oleh BPD dan APIP daerah, serta ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan BUMDes. Banyak BUMDes juga menjalankan usaha tanpa analisis potensi desa yang matang, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kegagalan bisnis.

Di sisi lain, kelembagaan BUMD menghadapi berbagai hambatan struktural seperti lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah, ketiadaan satuan pengawas internal, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya komitmen pimpinan terhadap integritas serta prinsip good corporate governance. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan pentingnya reformasi pengawasan dan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh agar pengelolaan dana publik dapat berlangsung secara transparan,



akuntabel, dan berintegritas, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan BUMD.

Isu Strategis 12: Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlanter

Dalam konteks pembangunan daerah, “No One Left Behind” atau “tidak ada satu pun yang tertinggal” menjadi target utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), yang tidak hanya mencerminkan komitmen global, tetapi juga menjadi prinsip moral dan strategi pembangunan yang mengutamakan keadilan sosial dan inklusivitas di Provinsi Lampung. Prinsip tersebut mengamanatkan bahwa seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, harus menjadi bagian dari pembangunan yang turut merasakan hasilnya dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang masih terjadi terutama terhadap kelompok-kelompok rentan yang mencakup anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan kelompok terlanter atau dikenal juga dengan istilah GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) atau kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

Kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Lampung pada tahun 2022 diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang menunjukkan angka capaian sebesar 64,78. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal, mengingat angka tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2020–2024, yaitu sebesar 69,57 untuk tahun 2022. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sinergi lintas sektor serta penguatan program dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak anak guna mencapai target yang telah direncanakan.

Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah dituntut memperkuat sistem perlindungan sosial dan memastikan akses setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan



peradilan, serta membangun sistem pembangunan yang berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan. Hal ini hanya dapat dicapai melalui ketersediaan data terpilah yang akurat, kebijakan yang responsif terhadap gender dan disabilitas, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Pendekatan partisipatif dan berbasis data menjadi kunci dalam memastikan bahwa program pembangunan menjangkau dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, Pemenuhan hak Penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat dilakukan melalui perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang selaras dengan pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus perlindungan sosial diantaranya untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan melalui bantuan sosial, tanggap risiko bencana alam dan non alam, layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi para penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok terlanjar serta hunian yang layak dan terjangkau.



PERDA

**RPJMD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025-2029**

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



**BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Provinsi Lampung memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari kolonisasi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1829-1942. Provinsi Lampung resmi berdiri pada 18 Maret 1964 dengan ibu kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (saat ini menjadi Kota Bandar Lampung). Perkembangan Provinsi Lampung dari masa ke masa tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Lampung, tepatnya ketika Lampung masih berstatus sebagai keresidenan dan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan hingga akhirnya menjadi Provinsi Lampung pada 18 Maret 1964 dengan gubernur pertama Kusno Danupoyo.

Lampung memiliki dua suku asli atau disebut dengan masyarakat adat yaitu masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung. Sedangkan masyarakat adat Pepadun biasa disebut dengan Lampung Pedalaman. Tahun 2009, Gubernur Lampung saat itu, Komjen Pol (P) Sjachroedin ZP memprakarsai perubahan motto Provinsi Lampung dari “Sang Bumi Ruwa Jurai” menjadi “Sai Bumi Ruwa Jurai”. Motto ini tertuang dalam Perda Provinsi Lampung No. 4 tahun 2009 tentang Lambang Daerah Provinsi Lampung. Secara harfiah, Sai Bumi Ruwa Jurai berarti Satu Bumi Dua Jiwa. Sai Bumi berarti satu bumi, yaitu bumi Lampung. Sedangkan Ruwa Jurai diartikan sebagai dua unsur golongan masyarakat adat pepadun dan masyarakat adat pesisir. Selain itu, Ruwa Jurai juga dapat diartikan sebagai dua jurai masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung, yaitu masyarakat suku asli Lampung dan masyarakat pendatang.

Untuk mewujudkan seluruh cita-cita dan harapan besar masyarakat Lampung, ditambah dengan adanya gambaran mengenai kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur terpilih bersama Jihan Nurlela sebagai Wakil Gubernur terpilih Provinsi Lampung telah menyusun Visi-Misi, Program Kerja, dan Strategi Implementasi dengan merujuk kepada RPJPD Provinsi Lampung 2025 - 2045 dan juga Visi-Misi dan Program Kerja Presiden dan Wapres terpilih 2024 - 2029. Visi-Misi dan Program Kerja ini disusun dengan pertimbangan yang mendalam dengan menggunakan pengolahan data primer, data sekunder, pelaksanaan survei deskriptif, dan juga *Focus Group Discussion* dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan berbagai elemen yang mewakili masyarakat.



Provinsi Lampung merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki banyak keunggulan. Di antara keunggulan yang dimiliki, antara lain Provinsi Lampung memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, memiliki lahan subur yang bila dikembangkan akan menjadi sebuah terobosan baru di bidang pertanian, memiliki potensi sumber daya energi, memiliki kekayaan kawasan laut dan hutan yang menunggu untuk dieksplorasi, dan memiliki jumlah masyarakat produktif serta bonus demografi yang dimiliki lebih awal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Secara administratif, Provinsi Lampung terbagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 229 kecamatan dan 2.654 desa/kelurahan. Daerah Tingkat II yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Lampung Timur yaitu 5.325,03 Km² dan Daerah Tingkat II dengan luas wilayah paling kecil adalah Kota Metro dengan luas 61,79 Km². Posisi Provinsi Lampung yang berada di ujung Pulau Sumatera dan berbatasan dengan Pulau Jawa melalui Provinsi Banten menjadikannya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Posisi ini sangatlah strategis dan seharusnya bisa menjadikan Lampung sebagai daerah tujuan investasi, pariwisata, industri. Selain itu, Provinsi Lampung juga menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki institut teknologi sehingganya Provinsi Lampung memiliki keunggulan dalam segi penyediaan sarana belajar tingkat perguruan tinggi, khususnya di bidang teknik. Hal-hal tersebut di atas perlu dikelola dengan baik dan optimal agar dapat menarik perhatian para pelaku usaha, investor, pelajar, wisatawan, dan pihak lainnya yang pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Lampung.

Untuk mengelola permasalahan dan potensi yang ada di Provinsi Lampung, dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik guna terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan undang-undang. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih harus memiliki kombinasi kemampuan *multiple intelligence*, *transformational leadership*, dan *servant leadership* yang mampu merangkul semua golongan yang ada di Provinsi Lampung untuk secara bersama-sama memajukan Provinsi Lampung dengan prinsip Sakai Sambayan.

Dilihat dari sisi lain, untuk mewujudkan kesinambungan program pembangunan dari tingkat II hingga tingkat nasional, maka diperlukan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintahan provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, serta stakeholder terkait.



3.1 TINJAUAN KEBIJAKAN RPJMN 2025-2029

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.



PRIORITAS NASIONAL 1

- Mempertahankan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2

- Membantapkan sistem pemerintahan keamanan negara dan melindungi keberlanjutan bangsa melalui ekosistemada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 3

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya regulasi & inovasi & bisnis yang bertarifnya, mendorong investasi swasta, mengoptimalkan sumberdaya alam, membangun kemitraan antara sektor publik dengan swasta, memperkuat peran aktor lokal.

PRIORITAS NASIONAL 4

- Mempromosikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta keadilan gender, kesetaraan sosial, kesehatan, lingkungan hidup, kesejahteraan para perempuan, pemuda, dan masyarakat adat.

PRIORITAS NASIONAL 5

- Mengajukan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6

- Mutakhirkan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan inklusi, dan pemberdayaan kelompok rentan.

PRIORITAS NASIONAL 7

- Berkepastian reformasi birokrasi, hukum, dan disiplin, serta mempromosikan pencegahan dan pemberantasan korupsi, suap, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8

- Mempromosikan pembangunan ketahanan pangan nasional dengan tinggi energi, iklim dan budaya, serta meningkatkan kualitas pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bergizi.

17 Program Prioritas Presiden

- 1 Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
- 2 Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3 Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4 Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5 Pemberantasan kemiskinan
- 6 Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia
pemeliharaan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8 Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9 Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

10. Penguatan ketahanan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bertantais baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya manusia untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadat, pendidikan, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)



Sasaran Utama Pembangunan Nasional



Keterangan: *Cut off kemiskinan ekstrem 2,15 GR

3.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2029

3.2.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2025-2029

A. Visi Pembangunan Daerah 2025-2029

“BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS”

BERSAMA

Kemajuan Pembangunan Daerah adalah keniscayaan, menjadi tujuan, kewajiban sekaligus tantangan. Tidak semata menjadi tugas Pemerintah Daerah, karena tidak akan terwujud hanya mengandalkan kemampuan sepihak. Kebersamaan adalah kunci. Sinergi dan kolaborasi harus dilakukan, seluruh elemen dan pemangku kepentingan harus dilibatkan. Pemerintah Daerah, bersama sektor swasta, pelaku bisnis, komunitas, praktisi, akademisi, media dan lainnya, secara BERSAMA bergandengan bergerak dan berkontribusi untuk mewujudkan kemajuan Pembangunan Daerah sebagai cita-cita sekaligus tanggung jawab bersama

LAMPUNG
MAJU

Makna kata LAMPUNG MAJU mengacu pada visi dan misi untuk mengembangkan daerah Lampung mengalami lompatan dalam pembangunan berkelanjutan meliputi: Ekonomi Lampung berbasis industri yang inklusif, kesehatan yang merata, pendidikan yang berbasis akhlak, kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang aman dan nyaman, lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya, tata kelola pemerintahan akuntabel dan layanan publik yang ramah. Dalam pencapaian Visi LAMPUNG MAJU dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Dengan demikian Provinsi Lampung pada akhirnya dapat berkontribusi

INDONESIA
EMAS

positif terhadap pencapaian cita-cita Lampung Maju

Visi INDONESIA EMAS menggambarkan posisi Indonesia pada tahun 2045 akan berumur 100 tahun atau 1 abad. Pemerintah pusat telah mencanangkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera. (Merujuk RPJPN 2025 - 2045). Provinsi Lampung akan fokus pada aspek-aspek tersebut dan melibatkan seluruh elemen komunitas, industri, akademisi, media massa, serta pemerintah, untuk berjalan bersama dan berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas

KESELARASAN VISI RPJMD DAN RPJMN

Keselarasan visi antara **RPJMD Provinsi Lampung** dengan Visi **RPJMN Nasional** sangat penting untuk memastikan sinergi pembangunan antara daerah dan pusat dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang **Indonesia Emas 2045**. Keselarasan antara kedua visi tersebut tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Keselarasan Visi RPJMD Prov. Lampung 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029

Unsur Visi	RPJMD Lampung	RPJMN Nasional	Keselarasan
Kata Kunci "Bersama"	Menekankan partisipasi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan pemda	Menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat dan seluruh elemen bangsa	Keduanya mengedepankan pendekatan inklusif dan kolaboratif
Frasa "Lampung Maju" dan "Indonesia Maju"	Fokus pada kemajuan daerah Lampung dalam berbagai aspek (ekonomi, infrastruktur, SDM, layanan publik)	Fokus pada kemajuan nasional dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan	Lampung Maju menjadi bagian integral dari pencapaian Indonesia Maju
Tujuan Akhir: "Menuju"	Lampung berkontribusi aktif	Indonesia Emas sebagai cita-cita kolektif nasional	RPJMD menjadi bagian dari tahapan

Unsur Visi	RPJMD Lampung	RPJMN Nasional	Keselarasan
Indonesia Emas (2045)"	dalam mewujudkan Indonesia Emas	pada 2045 (100 tahun kemerdekaan)	kontribusi daerah untuk tujuan nasional

B. Misi Pembangunan Daerah 2025-2029

Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, pariwisata, dan infrastruktur. Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 3 (tiga) Misi / 3 (tiga) Cita Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang berlandaskan pada Visi **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”**. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat.

CITA KE-1	
Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Fokus pembangunan ekonomi Lampung akan dilakukan dengan meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif sehingga semua kelompok dan golongan secara bersama-sama melakukan upaya pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya melalui peningkatan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan, mendorong kewirausahaan, industri kreatif, pariwisata, dan UMKM maupun koperasi. Mengutamakan swasembada pangan, air, dan energi, serta investasi dalam hilirisasi dan industrialisasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dimulai dari desa, menjadi salah satu tulang punggung dalam mendorong perekonomian daerah. Selain itu perlu didorong inisiatif menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memperluas lapangan pekerjaan. Program kerja yang diusulkan meliputi pembangunan pusat ekonomi baru dengan cara bekerjasama dengan BUMN, serta investor dalam negeri dan luar negeri. Pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, dan pengintegrasian desa dalam ekonomi digital melalui konsep desa cerdas. Selain itu, ditekankan juga penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui teknologi digital dan IoT (Internet of Things) serta hilirisasi untuk

CITA KE-1

meningkatkan output dan diversifikasi ekonomi lokal. Pemerataan infrastruktur untuk mendorong perekonomian, peningkatan akses ke modal untuk usaha kecil, dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat mendukung semua inisiatif ini untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung. Strategi ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan Lampung yang maju dan berkelanjutan. Melanjutkan revitalisasi pasar dan memperkuat peran bank daerah khususnya bank rural guna mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. Inisiatif seperti hilirisasi dan industrialisasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi produk unggulan untuk memperluas pasar baik domestik maupun ekspor. Misi ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa, perempuan, generasi muda, dan kaum disabilitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan diharapkan juga akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di Provinsi Lampung.

CITA KE-2

Memperkuat
Sumber Daya
Manusia
yang Unggul
dan Produktif

Fokus misi ini adalah memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui komitmen dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan inovatif, meningkatkan layanan kesehatan yang komprehensif, mendukung kegiatan olahraga, mendorong kemajuan dalam sains dan teknologi serta penguatan peran perempuan, generasi muda dan penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, misi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang berkualitas, sehat dan produktif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi dan ikut serta merasakan hasil pembangunan daerah.

Dalam misi memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan Mirza-Jihan berkomitmen untuk

meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan berkualitas dijamin melalui inisiatif seperti meningkatkan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya pengajar di sekolah tingkat atas dan perguruan tinggi, serta mengintegrasikan kurikulum yang mengakomodir kebutuhan industri modern dan penguatan karakter termasuk kearifan lokal. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta kampanye kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit. Khusus untuk generasi muda, pemerintah fokus pada pembinaan keterampilan melalui pusat pelatihan dan inkubator bisnis yang mendukung kewirausahaan dan inovasi. Program ini melibatkan kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Selain itu, pemerintah mendukung pemberdayaan perempuan melalui program yang menargetkan peningkatan peran wanita dalam semua sektor ekonomi dan sosial. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, lansia, disabilitas, serta kelompok terlanjur juga menjadi prioritas. Upaya peningkatan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan regulasi yang mendukung kesetaraan di tempat kerja juga diintegrasikan. Pengembangan olahraga juga menjadi salah satu prioritas, dengan tujuan menjadikan Lampung sebagai pusat atlet berprestasi, mendukung pembangunan fasilitas olahraga modern, dan melaksanakan program-program yang dapat mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat muda di berbagai cabang olahraga. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga tetapi juga mendorong gaya hidup aktif dan sehat di kalangan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung tetapi juga akan mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan SDM yang unggul dan produktif.

CITA KE-3

Meningkatkan
Kehidupan
Masyarakat
Beradab,
Berkeadilan,
dan Lingkungan
Berkelanjutan
serta Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Efektif dan
Berintegritas

Untuk menciptakan masyarakat Provinsi Lampung yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, strategi yang diusulkan berfokus pada harmonisasi antara lingkungan alam, budaya, dan layanan publik. Pendekatan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang merangkul keberagaman seni dan budaya melalui penyelenggaraan festival dan workshop, serta revitalisasi lembaga kebudayaan untuk memperkuat identitas Lampung.

Komitmen untuk memperkuat keberagaman dan inklusivitas di Provinsi Lampung melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terus diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan. Selain itu, peningkatan layanan publik yang berbasis digital bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif dan mempercepat penyampaian layanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan birokrasi. Dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang harmonis, program kerja dan strategi implementasi yang telah dirancang mencakup pembaruan kebijakan dan praktik yang mendukung interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini antara lain meliputi pelatihan dan pendampingan bagi lembaga kebudayaan dan komunitas seni, peningkatan fasilitas publik yang mendukung aktivitas sosial dan budaya, serta inisiatif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial dalam setiap aspek pembangunan. Penekanan pada penggunaan teknologi modern dalam layanan publik dan pengelolaan sumber daya alam juga direncanakan untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain hal tersebut, misi ini juga menekankan kepada peningkatan kualitas lingkungan hingga penurunan resiko bencana di Provinsi Lampung.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) tujuan, 8 (delapan) indikator tujuan, 13 (tiga belas) sasaran, dan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2030

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS												
Misi 1: Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif												
1.1	Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,57 (2024)	5,2	5,5	6,0	6,4	6,8	7,2	-
			Gini Rasio	indeks	0,301	0,300 - 0,301	0,274 - 0,280	0,273 - 0,279	0,272 - 0,277	0,271 - 0,275	0,270 - 0,275	-
			Nilai Tukar Petani	Nilai	124,98 (2024)	126,30	127,80	129,40	130,00	131,50	133,00	-
		1.1.1 Meningkatkan Investasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan	Pertumbuhan PMTB	persen	1,78 (2024)	2,9-4,9	3,0-5,0	3,1-5,1	3,2-5,2	3,3-5,3	3,4-5,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan
			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	persen	9,09 (2024)	7-10	8-11	9-12	10-13	11-14	12-15	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												Hortikultura, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		1.1.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	-2,09	0,54	0,62	0,71	0,82	0,94	1,09	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, , Dinas Peternakan Dan
			Indeks Ketahanan Pangan	indeks	82,58	83,07	83,58	84,09	84,6	85,11	85,62	Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Penelitian Pembangunan Daerah
		1.1.3 Terwujudnya Ekosistem	Persentase Desa Mandiri	persen	14,68 (Berdasarkan Perhitungan data Indeks Desa	21,42	23,96	24,37	24,98	25,22	25,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi, Dinas Peternakan dan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Ekonomi Berbasis Desa			Membangun)							Kesehatan Hewan, Biro Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Biro Pem Otda, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
		1.1.4 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	5,58	5,64	5,69	5,75	5,81	5,86	5,92	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.5 Meningkatnya Kualitas infrastruktur pembangunan	Kemantapan Jalan	persen	78,08	78,00	80,88	82,33	84,75	87,95	91,79	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kominfo, Biro Adbang, BPKAD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas
			Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	25,92	26,21	26,49	26,78	27,07	27,35	27,63	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
		1.1.6 Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	persen	10,62	9,5-10,0	8,79-9,9	7,79- 8,79	6,79- 7,79	5,79- 6,79	5,00-5,79	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, , Dinas Pternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Biro Perekonomian, BPS, Dinas Tenaga Kerja
			Tingkat Inflasi	persen	1,5	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,19	3,86-4,0	3,51- 3,95	3,4-3,85	3,30- 3,80	3,25- 3,73	3,10- 3,70	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif												
2.1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia		Indeks Modal Manusia	indeks	0,53 (2024)	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	-
		2.1.1 Meningkatkan Kualitas daya Saing Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,36	8,45-8,50	8,55-8,60	8,65-8,70	8,75-8,80	8,85-8,90	8,95-9,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan
			Harapan Lama Sekolah	tahun	12,78	12,80-12,82	12,83-12,85	12,85-12,87	12,88-12,90	12,90-12,94	12,95-13,01	
		2.12 Meningkatkan Daya Saing	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	53,17 (2023)	53,51	53,68	53,85	54,02	54,19	54,36	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dispora, Dinkes, Perlindungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Pemuda dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	indeks	0,377	0,395	0,414	0,433	0,452	0,472	0,492	Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.1.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	74,39	74,55	74,74	74,93	75,12	75,37	75,5	Dinas Kesehatan, RSUD, RSJ, RSBNH, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Biro Kesra, Dinas Kominfo
			Prevalensi Stunting	persen	14,9 (2023)	13,2	12,62	11,77	11,3	10,83	10,36	
		2.1.4 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Serta Pemenuhan Hak	Indeks Perlindungan Anak	indeks	64,78 (2022)	66,22	67,94	69,66	71,38	72,1	74,64	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja
			Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,430 (2023)	0,420	0,411	0,401	0,392	0,387	0,383	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Perlindungan Anak dan Perempuan										
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, Dan Lingkungan Berkelanjutan Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Berintegritas												
3.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,34	83,00-84,00	84,01-85,00	85,01-86,00	86,01-87,00	87,01-88,00	88,01-89,00	-
		3.1.1 Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,34	83,00-84,00	84,01-85,00	85,01-86,00	86,01-87,00	87,01-88,00	88,01-89,00	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPKAD, Inspektorat Dinas Kominfo, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, BPSDM, Sekretariat DPRD, Badan Penghubung, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.2	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	60,64	62,79	64,03	67,96	70,43	72,13	74,17	
		3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	73,11 (metode lama)	70,99	71,2	71,41	71,63	71,84	72,05	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Hidup dan Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	130,1	129,97	127,94 -	125,91 -	123,88 -	121,85 -	119,82 -	Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Kehutanan, Dinas Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan & Keswan.
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	persen	9,15	9,52	9,95	10,47	11,07	11,66	12,3	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	35,22	36	36,6	37	37,4	37,8	38,2	
3.3	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya.		Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	78,32 (2022)	79-80	80-81	80-81	81-82	81-82	82-83	-
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	57,82 (2023)	58,5	59,6	60,8	61,9	63	63,5	-
		3.3.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	78,32 (2022)	79-80	80-81	80-81	81-82	81-82	82-83	Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Kesra
			Ekspresi Budaya	persen	26,14 (2023)	37,31	38,71	40,11	41,51	42,91	44,31	

3.3 KESELARASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2025-2029 DENGAN RPJPD 2025-2045 DAN RPJMN 2025-2029

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan kepala daerah terpilih selama lima tahun ke depan. Sebagai dokumen perencanaan strategis, RPJMD ini dirancang agar **selaras dan konsisten dengan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD 2025–2045)** serta terintegrasi dengan **RPJMN 2025–2029** sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional

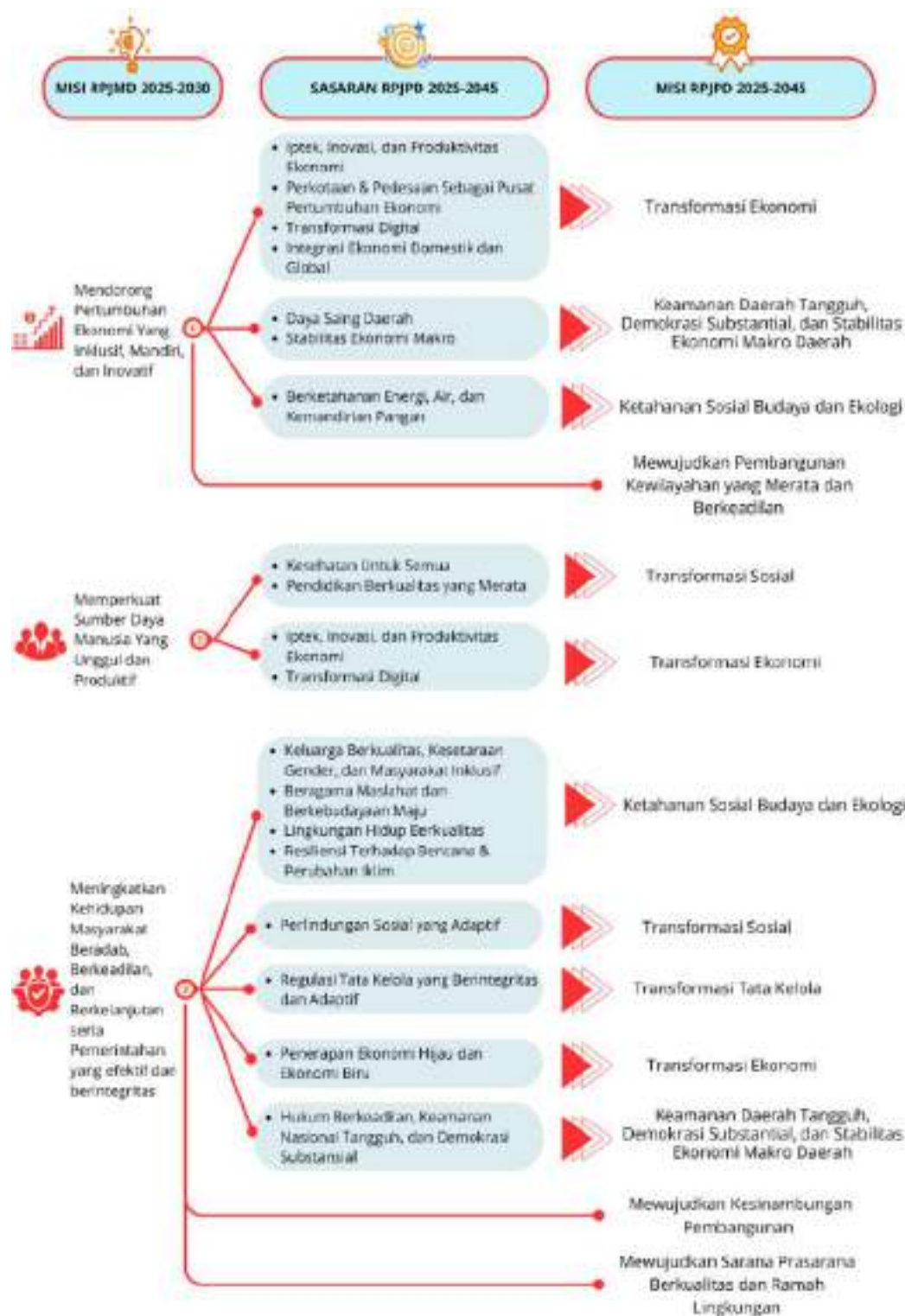
Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan Provinsi Lampung berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan **Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah** yaitu: **“Lampung Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”**. Visi ini mencerminkan komitmen jangka panjang untuk mendorong ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan antar wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

RPJMD 2025–2029 menjadi langkah awal (milestone) yang strategis dalam menjabarkan visi besar tersebut ke dalam program-program pembangunan konkret di berbagai sektor. Di sisi lain, keselarasan dengan **RPJMN 2025–2029** juga menjadi prinsip utama dalam penyusunan RPJMD. Pemerintah Provinsi Lampung turut mendukung agenda pembangunan nasional, seperti transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.

3.3.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD

Keselarasan antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) menggambarkan kesesuaian Misi RPJMD dengan Misi dan Sasaran RPJPD. Sehingga Misi pada periode jangka pendek (5 tahun) selaras dengan periode jangka panjang (20 tahun), yang terlihat pada gambar di bawah ini.

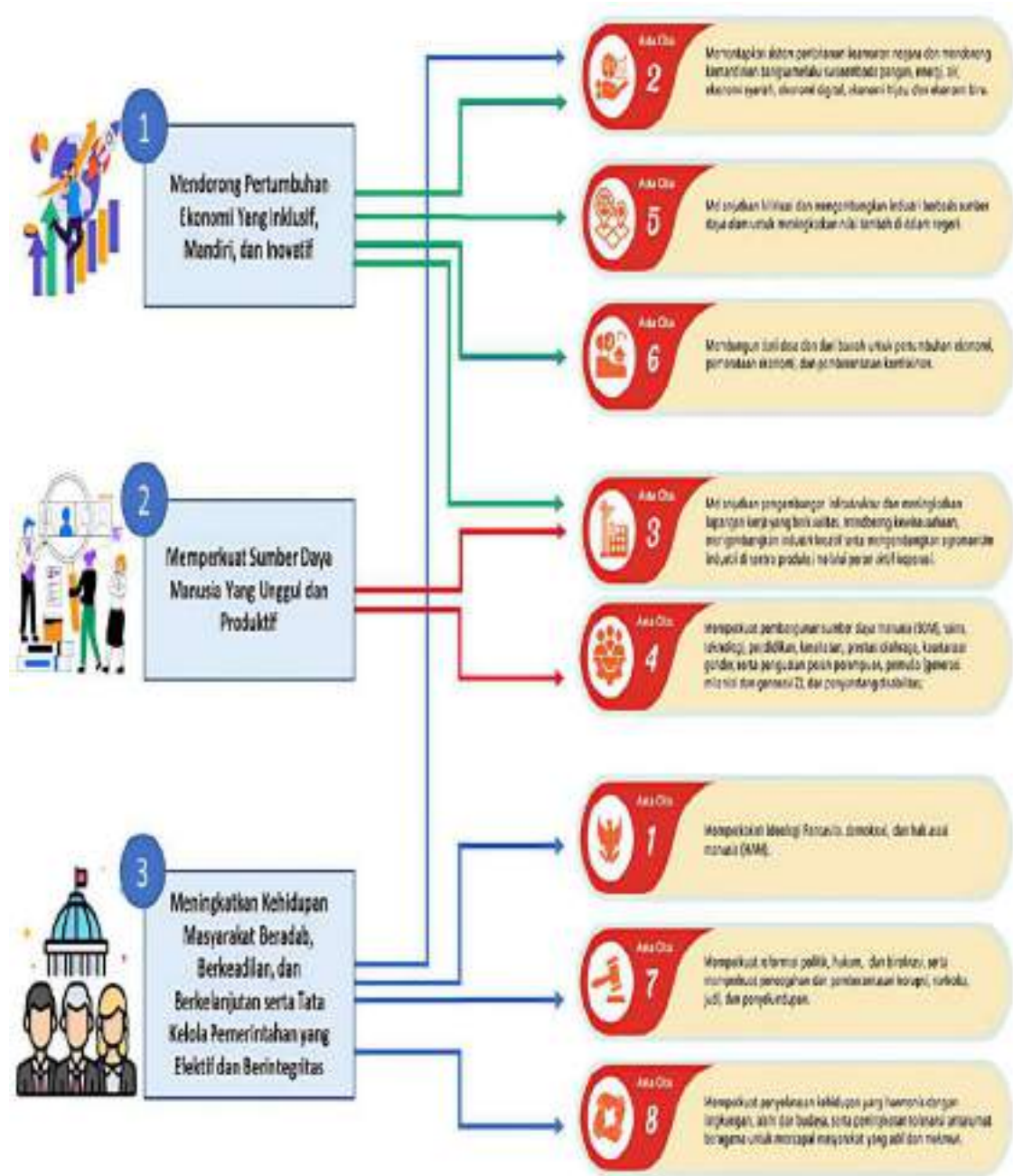
Gambar 3. 1 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD



3.3.2. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN

Keselarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sangat penting untuk mencapai Visi pembangunan nasional dan daerah secara sinergis, sehingga arah pembangunan daerah pada RPJMD selaras dengan arah pembangunan nasional. Keselarasan Misi pada RPJMD Provinsi Lampung dengan Misi RPJMN terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 2 Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN



3.3.3. Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Prioritas Nasional pada RPJMN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang sinergis antara pusat dan daerah, penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan secara seksama **keselarasan sasaran pembangunan daerah** dan indikatornya dengan sasaran nasional serta **prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029**. RPJMD Provinsi Lampung telah selaras dengan prioritas nasional seperti pada tabel di bawah ini. Hal ini mencerminkan dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN.

Tabel 3. 3 Keselarasan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung dengan Prioritas Nasional (PN)

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
	Misi 1: Mendorong Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif				
1	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	- Pertumbuhan PMTB - Pertumbuhan sektor industri pengolahan	- Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan - Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	- Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat) - Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI) - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) - Indeks Ekonomi Hijau - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) - Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Lahan - Indeks Kualitas Air Laut	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
			Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	- Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%) - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
			- Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan - Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	- Rasio PDB Industri Pengolahan (%) - Biaya Logistik (% PDB) - Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) - Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
			Meningkatnya total aset	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	Prioritas Nasional 3:

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
			sektor keuangan terhadap PDB	• Aset Perbankan/PDB (%) • Aset Dana Pensiun/PDB (%) • Aset Asuransi/PDB (%) • Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) • Total Kredit/PDB (%) • Inklusi Keuangan (%)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
			• Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	• Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%) • Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
	Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	• Laju pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas) • Indeks Ketahanan Pangan	• Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	• Indeks Ketahanan Pangan • Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) • Indeks Ketahanan Air Nasional • Kapasitas tampungan air (m3/kapita) • Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan(%) • Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
			Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)		
	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri (%)	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
	Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	- Meningkatnya nilai tambah pariwisata - Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	- Rasio PDB Pariwisata (%) - Devisa Pariwisata (Miliar USD) - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan	Kemantapan Jalan	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok infrastruktur terhadap PDB (%)	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
					n Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
		Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	- Tingkat kemiskinan - Tingkat inflasi - Tingkat Pengangguran Terbuka	- Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan - Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	- Tingkat kemiskinan (%) - Tingkat kemiskinan ekstrem (%) - Proporsi penduduk kelas menengah (%) - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) - Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2	Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif				
	Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	- Rata rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	- Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) - Harapan Lama Sekolah (tahun) - Rata-rata nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains - Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
				- Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) - Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
			Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba		Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
	Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat	- Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games - Peringkat pada Asian Games - Peringkat pada Asian Para Games - Peringkat pada SEA Games	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Usia Harapan Hidup - Prevalensi Stunting	Terwujudnya kesehatan untuk semua	- Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) - Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) - Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	(Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	- Indeks Perlindungan Anak - Indeks Ketimpangan Gender	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga - Indeks Perlindungan Anak - Indeks Pembangunan Pemuda - Indeks Ketimpangan Gender - Indeks Pembangunan Gender - Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) - Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	- Indeks Demokrasi Indonesia - Indeks Hak Asasi Manusia	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
3	Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Pemerintahan yang efektif dan berintegritas				
	Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	<i>Asia Power Index (Military Capability)</i> <i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i> - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) <i>Global Cybersecurity Index</i> - Indeks Keamanan Laut Nasional	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
			Terwujudnya supremasi	Indeks Pembangunan Hukum	Prioritas Nasional 7: Memperkuat

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
			hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional • Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani • Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan • Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	• Indeks Persepsi Korupsi • Indeks Materi Hukum • Indeks Integritas Nasional • Indeks Integritas Partai Politik • Indeks Reformasi Birokrasi Nasional • Indeks Pelayanan Publik • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri • <i>Return on Asset (ROA)</i> BUMN (%) • Tingkat Inflasi (%)	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Indeks Resiko Bencana • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	• Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	• Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
		• Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	• Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan	• Indeks Ketahanan Energi • Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
			energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air		Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
	Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	• Indeks Demokrasi Indonesia • Ekspresi Budaya	• Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	• Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) • Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2025

3.4 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.4.1. Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas dalam pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung, yaitu “*Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas*”, maka disusunlah 3 (tiga) Misi Provinsi Lampung yang dijabarkan melalui 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung. Arah kebijakan pembangunan dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang lima tahun ke depan. Arah Kebijakan yang disusun adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi pembangunan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Rincian arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

NO .	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
1.	Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	
2.	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	
3.	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	
		Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	
		Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya.	

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, maka disusun pula strategi yang selaras dengan arah kebijakan. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi



sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi Pembangunan Provinsi Lampung disusun melalui 5 tahapan pembangunan, yaitu Tahapan I (tahun 2026) hingga Tahapan V (tahun 2030). Penahapan strategi pembangunan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang secara terukur dan konsisten. Dengan membagi pembangunan menjadi 5 (lima) tahapan, maka strategi pembangunan lebih fokus pada pencapaian tujuan spesifik di setiap tahapan, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Setiap tahap pembangunan diarahkan untuk memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan daya saing ekonomi, menuntaskan pelayanan dasar, serta memastikan keberlanjutan pembangunan sosial dan lingkungan menuju perwujudan Lampung yang inklusif, mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan. Penahapan strategi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030 ditampilkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Penahapan Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS							
Misi 1: Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1.	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung	1. Penguatan dasar dan pondasi pelayanan perizinan dan investasi 2. Pengembangan Kawasan Industri menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri baru di wilayah strategis 3. Pembangunan infrastruktur dasar 4. Penataan kelembagaan dan konsolidasi kebijakan 5. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi	1. Diversifikasi investasi di sektor energi terbarukan, teknologi, dan pariwisata, melalui insentif dan kebijakan investasi 2. Membentuk kemitraan strategis untuk menarik investasi global 3. Pengembangan kawasan pariwisata berstandar internasional guna meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Perluasan Promosi dan Fasilitasi Investasi	1. Peningkatan Realisasi Persebaran Investasi 2. Optimalisasi pengembangan sektor industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian dan perikanan 3. Implementasi industri yang mengadopsi teknologi canggih dan distilisasi di sektor industri 4. Peningkatan pembangunan fasilitas ekspor 5. Penguatan Inovasi Layanan dan Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan Realisasi dan Persebaran Investasi 2. Penerapan konsep Green Investment dan pengembangan Kawasan Industri Hijau dalam mendorong investasi yang ramah lingkungan dan penerapan teknologi energi terbarukan 3. Transformasi ekonomi berkelanjutan sebagai implementasi Economy Circular di sektor utama	1. Penguatan regulasi kebijakan dan efektivitas strategi yang diterapkan 2. Pengembangan rencana investasi jangka panjang berdasarkan perubahan dinamika pasar 3. Pengembangan pusat inovasi dan riset di bidang energi terbarukan dan teknologi informasi untuk mendukung investasi jangka panjang

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
				5. Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman)			
2.		Meningkatkan Hilirisasi Komoditas Unggulan	1. Penguatan peran IPTEK untuk pertumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan 2. Penguatan integrasi riset dan inovasi dan kebijakan pembangunan dengan berkolaborasi dengan akademisi dan sektor terkait 3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM dalam menunjang	1. Peningkatan peran IPTEK untuk pertumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan 2. Peningkatan integrasi riset dan inovasi dan kebijakan pembangunan dengan berkolaborasi dengan akademisi dan sektor terkait 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan	1. Percepatan peran IPTEK untuk pertumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan 2. Percepatan integrasi riset dan inovasi dan kebijakan pembangunan dengan berkolaborasi dengan akademisi dan sektor terkait 3. Percepatan peningkatan kapasitas	1. Perwujudan peran IPTEK untuk pertumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan 2. Perwujudan integrasi riset dan inovasi dan kebijakan pembangunan dengan berkolaborasi dengan akademisi dan sektor terkait 3. Perwujudan kelembagaan dan kualitas	1. Pengembangan peran IPTEK untuk pertumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan 2. Pengembangan integrasi riset dan inovasi dan kebijakan pembangunan dengan berkolaborasi dengan akademisi dan sektor terkait 3. Pengembangan kelembagaan dan kualitas

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung serta pendukung ekosistem halal 4. Identifikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. 5. Penguatan sarana dan prasarana Hilirisasi Komoditas Unggulan serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah 6. Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui	kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung serta pendukung ekosistem halal 4. Perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. 5. Peningkatan sarana dan prasarana Hilirisasi Komoditas Unggulan serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan	kelembagaan dan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung serta pendukung ekosistem halal 4. Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. 5. Percepatan sarana dan prasarana Hilirisasi Komoditas Unggulan serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan	SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung serta pendukung ekosistem halal 4. Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. 5. Perwujudan sarana dan prasarana Hilirisasi Komoditas Unggulan serta pemanfaatan teknologi,	SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung serta pendukung ekosistem halal 4. Implementasi dan Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. 5. Pengembangan sarana dan prasarana Hilirisasi Komoditas Unggulan serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			pemanfaatan inovasi teknologi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah 7. Penguatan literasi digital, kapasitas akses informasi dan pemasaran bagi IKM Guna meningkatkan produktivitas Produk 8. Penguatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal 9. Penguatan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis 10. Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui	perekonomian daerah 6. Peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah 7. Peningkatan literasi digital, kapasitas akses informasi dan pemasaran bagi IKM Guna meningkatkan produktivitas Produk 8. Peningkatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal 9. Peningkatan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah	pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah 6. Percepatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah 7. Percepatan literasi digital, kapasitas akses informasi dan pemasaran bagi IKM Guna meningkatkan produktivitas Produk 8. Percepatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal	inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah 6. Perwujudan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah 7. Perwujudan literasi digital, kapasitas akses informasi dan pemasaran bagi IKM Guna meningkatkan produktivitas Produk	vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif 6. Pengembangan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah 7. Pengembangan literasi digital, kapasitas akses informasi dan pemasaran bagi IKM Guna meningkatkan produktivitas Produk 8. pengembangan ekosistem bisnis

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			Pembangunan Kawasan Industri 11. Penguatan hilirisasi industri dan tata kelola pertambangan melalui pengawasan terpadu serta optimalisasi penerimaan daerah	lingkungan dan ekonomis. 10. Peningkatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui Pembangunan Kawasan Industri 11. Peningkatan hilirisasi industri dan tata kelola pertambangan melalui pengawasan terpadu serta optimalisasi penerimaan daerah	9. Percepatan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. 10. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui Pembangunan Kawasan Industri 11. Percepatan hilirisasi industri dan tata kelola pertambangan melalui pengawasan terpadu serta optimalisasi penerimaan daerah 12. Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasny	8. Perwujudan ekosistem bisnis pelaku industri lokal 9. Perwujudan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. 10. Perwujudan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui Pembangunan Kawasan Industri 11. Perwujudan hilirisasi industri dan tata kelola pertambangan melalui pengawasan terpadu serta optimalisasi penerimaan daerah 12. Peningkatan kapasitas dan akses	pelaku industri lokal 9. Pengembangan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. 10. Pengembangan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui Pembangunan Kawasan Industri 11. Pengembangan hilirisasi industri dan tata kelola pertambangan melalui pengawasan terpadu serta optimalisasi penerimaan daerah 12. Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
					a melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan Artificial Intellegence dan/serta/maupun Internet of Things	informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan Artificial Intellegence dan/serta/maupun Internet of Things	meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan Artificial Intellegence dan/serta/maupun Internet of Things
3.		Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	1. Penguatan ketersediaan dan distribusi sarana prasarana produksi pertanian serta literasi digital sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Penguatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan terpadu	1. Peningkatan ketersediaan dan distribusi sarana prasarana produksi pertanian serta literasi digital sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia	1. Percepatan ketersediaan dan distribusi sarana prasarana produksi pertanian serta literasi digital sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Percepatan kualitas dan kuantitas	1. Perwujudan ketersediaan dan distribusi sarana prasarana produksi pertanian serta literasi digital sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Perwujudan kualitas dan kuantitas	1. Pengembangan ketersediaan dan distribusi sarana prasarana produksi pertanian serta literasi digital sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Pengembangan kualitas dan kuantitas

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan meningkatkan produktivitas hasil pertanian 3. Penguatan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian mendukung keberlangsungan swasembada pangan 4. Penguatan mutu produk pertanian unggulan melalui pengembangan bibit bersertifikat serta kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara 5. Penguatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan	pertanian melalui pelatihan terpadu pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 3. Peningkatan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian mendukung keberlangsungan swasembada pangan 4. Peningkatan mutu produk pertanian unggulan melalui pengembangan bibit bersertifikat serta kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara	Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan pelatihan terpadu dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 3. Percepatan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian mendukung keberlangsungan swasembada pangan 4. Percepatan mutu produk pertanian unggulan melalui pengembangan	Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan pelatihan terpadu dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 3. Perwujudan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian mendukung keberlangsungan swasembada pangan 4. Perwujudan mutu produk	Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan pelatihan terpadu dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 3. Pengembangan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian mendukung keberlangsungan swasembada pangan 4. Pengembangan mutu produk pertanian unggulan melalui pengembangan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi 6. Penguatan peran IPTEK di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan 7. Penguatan integrasi riset, inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian di Provinsi Lampung 8. Penguatan peran, kapasitas dan kualitas kelembagaan petani baik melalui Bumdes/BUMD, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih)	5. Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi 6. Peningkatan peran IPTEK di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan 7. Peningkatan integrasi riset, inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka mendorong diversifikasi produk komoditas	bibit bersertifikat serta kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara 5. Percepatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi 6. Percepatan peran IPTEK di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan	pertanian unggulan melalui pengembangan bibit bersertifikat serta kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara 5. Perwujudan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi 6. Perwujudan peran IPTEK di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang	bibit bersertifikat serta kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara 5. Pengembangan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi 6. Pengembangan peran IPTEK di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian Masyarakat 9. Penguatan lahan pertanian dari alih fungsi lahan melalui LP2B serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau 10. Penguatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui hilirisasi, upaya pemberian subsidi dan asuransi, penyelesaian permasalahan secara terstruktur, penyempurnaan regulasi dan mekanisme sistematis terintegrasi serta	pertanian di Provinsi Lampung 8. Peningkatan peran, kapasitas dan kualitas kelembagaan petani baik melalui Bumdes/BUMD, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian Masyarakat 9. Peningkatan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan melalui LP2B serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau	7. Percepatan integrasi riset, inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian di Provinsi Lampung 8. Percepatan pera, kapasitas dan kualitas kelembagaan petani baik melalui Bumdes/BUMD , Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian Masyarakat 9. Percepatan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan melalui LP2B serta	murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan 7. Perwujudan integrasi riset, inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian di Provinsi Lampung 8. Perwujudan peran, kapasitas dan kualitas kelembagaan petani baik melalui Bumdes/BUM D, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan	7. Pengembangan integrasi riset, inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian di Provinsi Lampung 8. Pengembangan peran, kapasitas dan kualitas kelembagaan petani baik melalui Bumdes/BUMD , Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian Masyarakat 9. Pengembangan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan melalui

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			pemanfaatan teknologi digital 11. Penguatan infrastruktur jalan dan sumberdaya air dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 12. Koordinasi Stabilisasi harga Produk Hasil Pertanian 13. Pemantauan dan Pengendalian harga Pangan 14. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim	10. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui hilirisasi, upaya pemberian subsidi dan asuransi, penyelesaian permasalahan secara terstruktur, penyempurnaan regulasi dan mekanisme sistematis terintegrasi serta pemanfaatan teknologi digital 11. Peningkatan infrastruktur jalan dan sumberdaya air dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 12. Koordinasi Stabilisasi harga Produk Hasil Pertanian	menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau 10. Percepatan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui hilirisasi, upaya pemberian subsidi dan asuransi, penyelesaian permasalahan secara terstruktur, penyempurnaan regulasi dan mekanisme sistematis terintegrasi serta pemanfaatan teknologi digital 11. Percepatan infrastruktur jalan dan	keberdayaan perekonomian Masyarakat 9. Perwujudan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan melalui LP2B serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau 10. Perwujudan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui hilirisasi, upaya pemberian subsidi dan asuransi, penyelesaian permasalahan	LP2B serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau 10. Pengembangan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui hilirisasi, upaya pemberian subsidi dan asuransi, penyelesaian permasalahan secara terstruktur, penyempurnaan regulasi dan mekanisme sistematis terintegrasi serta pemanfaatan teknologi digital 11. Pengembangan infrastruktur

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
				13. Pemantauan dan Pengendalian harga Pangan 14. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim	sumberdaya air dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 12. Koordinasi Stabilisasi harga Produk Hasil Pertanian 13. Pemantauan dan Pengendalian harga Pangan 14. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim	secara terstruktur, penyempurnaan regulasi dan mekanisme sistematis terintegrasi serta pemanfaatan teknologi digital 11. Perwujudan infrastruktur jalan dan sumberdaya air dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 12. Koordinasi Stabilisasi harga Produk Hasil Pertanian 13. Pemantauan dan Pengendalian harga Pangan 14. Pengelolaan sumber daya	jalan dan sumberdaya air dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 12. Koordinasi Stabilisasi harga Produk Hasil Pertanian 13. Pemantauan dan Pengendalian harga Pangan 14. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
						air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim	
4.		Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	1. Penguatan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Penguatan kapasitas kelembagaan petani 3. Penguatan Pemberdayaan UMKM pertanian dan peran Kopdes Merah Putih serta kerjasama antara lembaga keuangan untuk untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM	1. Peningkatan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani 3. Peningkatan Pemberdayaan UMKM pertanian dan peran Kopdes Merah Putih serta kerjasama antara lembaga keuangan untuk untuk menunjang pertumbuhan ekonomi	1. Percepatan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Percepatan kapasitas kelembagaan petani 3. Percepatan Pemberdayaan UMKM pertanian dan peran Kopdes Merah Putih serta kerjasama antara lembaga keuangan untuk untuk menunjang pertumbuhan ekonomi	1. Perwujudan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Perwujudan kapasitas kelembagaan petani 3. Perwujudan Pemberdayaan UMKM pertanian dan peran Kopdes Merah Putih serta kerjasama antara lembaga	1. Pengembangan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani 3. Pengembangan Pemberdayaan UMKM pertanian dan penguatan peran Kopdes Merah Putih serta kerjasama antara lembaga keuangan untuk untuk menunjang pertumbuhan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			4. Penguatan peran IPTEK di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 5. Penguatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 6. Penguatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis <i>Evidence Based Policy</i> 7. Penguatan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 8. Penguatan Transparansi	kerakyatan dan UMKM 4. Peningkatan peran IPTEK di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 6. Peningkatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis <i>Evidence Based Policy</i> 7. Peningkatan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembanagan inovasi dan	kerakyatan dan UMKM 4. Percepatan peran IPTEK di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 5. Percepatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 6. Percepatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis <i>Evidence Based Policy</i> 7. Percepatan Inovasi layanan	keuangan untuk untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM 4. Perwujudan peran IPTEK di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 5. Perwujudan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 6. Perwujudan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi	ekonomi kerakyatan dan UMKM 4. Perwujudan peran IPTEK di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 5. Pengembangan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 6. Pengembangan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis <i>Evidence Based Policy</i>

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju 9. Penguatan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri 10. Penguatan Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa 11. Penguatan pembangunan	penguatan kelembagaan PPID 8. Peningkatan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju 9. Peningkatan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri 10. Peningkatan Digitalisasi dan Aksesibilitas infrastruktur	dan kelembagaan Pengembanagan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 8. Percepatan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju 9. Percepatan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa	Perencanaan pembangunan berbasis <i>Evidence Based Policy</i> 7. Perwujudan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembanagan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 8. Perwujudan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju 9. Perwujudan upaya menurunkan tingkat kemiskinan,	7. Pengembangan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembanagan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 8. Pengembangan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju 9. Pengembangan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n-helix dalam inovasi dan pembangunan. 12. Penguatan komoditas unggulan desa yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa 11. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n-helix dalam inovasi dan pembangunan . 12. Peningkatan komoditas unggulan desa yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	maju dan mandiri 10. Percepatan Digitalisasi dan Aksesibilitas infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa 11. Percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n-helix dalam inovasi dan pembangunan . 12. Percepatan komoditas unggulan desa yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri 10. Perwujudan Digitalisasi dan Aksesibilitas infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa 11. Perwujudan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n-helix dalam	meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri 10. Pengembangan Digitalisasi dan Aksesibilitas infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa 11. Pengembangan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n-helix dalam inovasi dan pembangunan . 12. pengembangan komoditas unggulan desa yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
						inovasi dan pembangunan 12. Perwujudan komoditas unggulan desa yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	
5.		Meningkatkan Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Penguatan potensi destinasi wisata dan ekonomi kreatif 2. Penguatan daya tarik destinasi wisata dan ekonomi kreatif 3. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata melalui pelestarian budaya, pembiayaan pariwisata dan pemanfaatan teknologi digital secara berkelanjutan 4. Penguatan peran kelembagaan pariwisata/Pokdar wis dan pelaku	1. Peningkatan potensi destinasi wisata dan ekonomi kreatif 2. Peningkatan daya tarik destinasi wisata dan ekonomi kreatif 3. Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata melalui pelestarian budaya, pembiayaan pariwisata dan pemanfaatan teknologi digital secara berkelanjutan 4. Peningkatan peran	1. Percepatan peningkatan potensi destinasi wisata dan ekonomi kreatif 2. Percepatan peningkatan daya tarik destinasi wisata dan ekonomi kreatif 3. Percepatan ekosistem ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata melalui pelestarian budaya, pembiayaan pariwisata dan pemanfaatan teknologi digital	1. Perwujudan potensi destinasi wisata dan ekonomi kreatif 2. Perwujudan daya tarik destinasi wisata dan ekonomi kreatif 3. Perwujudan ekosistem ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata melalui pelestarian budaya, pembiayaan pariwisata dan pemanfaatan	1. Pengembangan potensi destinasi wisata dan ekonomi kreatif 2. Pengembangan daya tarik destinasi wisata dan ekonomi kreatif 3. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata melalui pelestarian budaya, pembiayaan pariwisata dan pemanfaatan teknologi digital secara berkelanjutan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			ekraf lokal sebagai kekuatan lokal pariwisata. 5. Penguatan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif 6. Penguatan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif 7. Penguatan konektivitas dan sarana pendukung menuju destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif 8. Penguatan sistem mitigasi bencana dan keamanan wisatawan 9. Mendorong pengembangan Pelabuhan Utama Panjang dan Pelabuhan Pengumpul Kota Agung sebagai pintu gerbang perdagangan Provinsi Lampung.	kelembagaan pariwisata/Pokdarwis dan pelaku ekraf lokal sebagai kekuatan lokal pariwisata 5. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif 6. Peningkatan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif 7. Peningkatan konektivitas dan sarana pendukung menuju destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif 8. Peningkatan sistem mitigasi bencana dan keamanan wisatawan 9. Mendorong pengembangan Pelabuhan Utama Panjang dan Pelabuhan Pengumpul Kota	secara berkelanjutan 4. Percepatan peran kelembagaan pariwisata/Pokdarwis dan pelaku ekraf lokal sebagai kekuatan lokal pariwisata 5. Percepatan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif 6. Percepatan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif 7. Percepatan konektivitas dan sarana pendukung menuju destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif 8. Percepatan sistem mitigasi bencana dan keamanan wisatawan	teknologi digital secara berkelanjutan 4. Perwujudan peran kelembagaan pariwisata/Pokdarwis dan pelaku ekraf lokal sebagai kekuatan lokal pariwisata 5. Perwujudan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif 6. Perwujudan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif 7. Perwujudan konektivitas dan sarana pendukung menuju destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif	4. Pengembangan peran kelembagaan pariwisata/Pokdarwis dan pelaku ekraf lokal sebagai kekuatan lokal pariwisata 5. Perkembangan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif 6. Pengembangan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif 7. Pengembangan konektivitas dan sarana pendukung menuju destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif 8. Pengembangan sistem mitigasi bencana dan keamanan wisatawan 9. Mendorong pengembangan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			10. Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkar luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. 11. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang 12. Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pariwisata.	Agung sebagai pintu gerbang perdagangan Provinsi Lampung. 10. Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkar luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. 11. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang 12. Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pariwisata.	9. Mendorong pengembangan Pelabuhan Utama Panjang dan Pelabuhan Pengumpul Kota Agung sebagai pintu gerbang perdagangan Provinsi Lampung. 10. Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkar luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. 11. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang	8. Perwujudan sistem mitigasi bencana dan keamanan wisatawan 9. Mendorong pengembangan Pelabuhan Utama Panjang dan Pelabuhan Pengumpul Kota Agung sebagai pintu gerbang perdagangan Provinsi Lampung. 10. Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkar luar (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkar luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. 11. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang 12. Penguatan konektivitas	Pelabuhan Utama Panjang dan Pelabuhan Pengumpul Kota Agung sebagai pintu gerbang perdagangan Provinsi Lampung. 10. Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkar luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. 11. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang 12. Penguatan konektivitas

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
					12. Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pariwisata.	Panjang – Tarahan. 11. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang 12. Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pariwisata.	jalan tematik prioritas Pariwisata.
6.		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Konektivitas	1. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 125,000 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemantapan 80,88% 2. Percepatan pengelolaan simpul transportasi untuk penguatan konektivitas wilayah	1. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 69,250 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemantapan 82,33% 2. Penguatan pengelolaan simpul transportasi untuk penguatan	1. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 70,000 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemantapan 84,75% 2. Penguatan pengelolaan simpul transportasi	1. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 73,000 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemantapan 87,95% 2. Peningkatan pengelolaan	1. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 73,500 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemantapan 91,79% 2. Peningkatan pengelolaan simpul transportasi

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			3. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi	3. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi	3. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi	3. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi	3. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi
7.		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	1. Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan. 2. Pembangunan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM Regional). a. RC untuk SPAM Regional Wil. II dan Wil. III b. Pengotimalkan SR pada SPAM	1. Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) SPAM Regional Zona 2 (Argoguruh); 2. Penyusunan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk SPAM Regional Zona 2 Argoguruh. 3. Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan, Amdal dan Kelembagaan, Pergub SPALD Regional, serta	1. Pembebasan Lahan <i>Reservoir Offtake</i> (ROT) di SPAM Regional Zona 2 (Argoguruh); 2. Pembentukan Kelembagaan untuk SPAM Regional Zona 2 Argoguruh. 3. Penyiapan Dokumen DED dan Penyiapan Berkas Perjanjian Kerjasama (PKS) serta Pembebasan Lahan.	1. Pengajuan pembiayaan infrastruktur menggunakan APBN dan sumber pendanaan alternatif lain (investor, KPBU); 2. Penyiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Kepala Daerah pada SPAM Regional zona 2 Argoguruh. 3. Penetapan Lokasi, serta pengajuan	1. Pembangunan Infrastruktur (Jika Anggaran Sudah Tersedia). 2. Penyusunan Business Plan, pembentukan kelembagaan dan Mulai pembangunan Infrastruktur (Jika Anggaran Sudah Tersedia). 3. Penanganan Rumah Tidak Layak huni.

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			Regional Penyiapan Wilayah I 3. Pembangunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALd). a. Mempersiapkan Kajian b. Mempersiapkan RC 4. Pengolahan dan penanganan sistem persampahan terpadu (TPST Regional). a. Mengusulkan Rencana Lokus TPST menjadi PSN b. Mempersiapkan rencana investor 5. Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, kawasan permukiman, dan kawasan kumuh. a. Mempersiapkan Data Terverifikasi b. Validasi Kawasan Kumuh	Rencana Pengadaan Lahan SPALD Regional. 4. Penanganan Rumah Tidak Layak huni. 5. Pendataan Rumah di Lokasi Strategis Program Pemerintah Provinsi. 6. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi. 7. Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. 8. Mendukung IKD Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. 9. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air	4. Penanganan Rumah Tidak Layak huni. 5. Pendataan Rumah di Lokasi Strategis Program Pemerintah Provinsi. 6. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi. 7. Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. 8. Mendukung IKD Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. 9. Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan	pembiayaan infrastruktur menggunakan APBN dan sumber pendanaan alternatif lain (investor, KPBU). 4. Penanganan Rumah Tidak Layak huni. 5. Pendataan Rumah di Lokasi Strategis Program Pemerintah Provinsi. 6. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi. 7. Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. 8. Mendukung IKD Tingkat kesesuaian	4. Pendataan Rumah di Lokasi Strategis Program Pemerintah Provinsi. 5. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi. 6. Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. 7. Mendukung IKD Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. 8. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			c. Validasi RTLH 6. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Percepatan penyelesaian RTRW Kab/Kota b. Percepatan Perkada RDTR berbasis OSS c. Pengusulan RDTR Kawasan Strategis Provinsi. 7. Melakukan Kesepakatan Bersama (KSB) terkait SPAM Regional Zona 2 (Argoguruh); 8. Penyusunan Dokumen Bisnisplan SPAM Regional Zona 2 Argoguruh. 9. Penyiapan Penyepakatan Kerja Sama Tiga Kabupaten Kota dalam bentuk Kesepakatan Bersama (KSB) Kabupaten Tulang Bawang, Tulang	dari potensi bencana iklim	(Kotabaru, Industri). 10. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim	pemanfaatan ruang dengan RTRW. 9. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim	

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			Bawang Barat dan Mesuji (Koordinasi TKKSD). 10. Penanganan Rumah Tidak Layak huni 11. Pendataan Rumah di Lokasi Strategis Program Pemerintah Provinsi. 12. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi. 13. Mendukung IKD Tingkat kesesuaian pemanfaatan pemanfaatan ruang dengan RTRW 14. Aksesibilitas Layanan Dasar : Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. 15. Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari				

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			potensi bencana iklim				
8.		Meningkatkan Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	1. Penguatan Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Penguatan Program Bantuan Sosial yang Responsif 3. Penguatan peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah 4. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin 5. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 125,000 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemandapan 80,88%	1. Peningkatan Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Peningkatan Program Bantuan Sosial yang Responsif 3. Peningkatan peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah 4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin 5. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 69,250 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target	1. Percepatan Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Percepatan Program Bantuan Sosial yang Responsif 3. Percepatan peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah 4. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin 5. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 70,000 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta	1. Perwujudan Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Perwujudan Program Bantuan Sosial yang Responsif 3. Perwujudan peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah 4. Perwujudan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin 5. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 73,000 Km pada ruas-	1. Pengembangan Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Pengembangan Program Bantuan Sosial yang Responsif 3. Pengembangan peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah 4. Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin 5. Penanganan ruas jalan Provinsi sepanjang 73,500 Km pada ruas-ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			6. Percepatan pengelolaan simpul transportasi untuk penguatan konektivitas wilayah 7. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi	kondisi kemantapan 82,33% 6. Penguatan pengelolaan simpul transportasi untuk penguatan konektivitas wilayah 7. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi	pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemantapan 84,75% 6. Penguatan pengelolaan simpul transportasi untuk penguatan konektivitas wilayah 7. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi	ruas prioritas arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemantapan 87,95% 6. Peningkatan pengelolaan simpul transportasi untuk penguatan konektivitas wilayah 7. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi	pemeliharaan rutin jalan guna mencapai target kondisi kemantapan 91,79% 6. Peningkatan pengelolaan simpul transportasi untuk penguatan konektivitas wilayah 7. Penyediaan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan transportasi

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif							
9.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatkan Kualitas daya Saing Pendidikan	1. Memberikan kemudahan akses pendidikan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan 2. Meningkatkan mutu pendidikan 3. Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri.	1. Memberikan kemudahan akses pendidikan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan 2. Meningkatkan mutu pendidikan 3. Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan	1. Memberikan kemudahan Akses pendidikan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan 2. Meningkatkan mutu pendidikan 3. Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan	1. Pemenuhan akses pendidikan dan pengembangan kualitas layanan pendidikan 2. Meningkatkan mutu pendidikan 3. Pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri.	1. Pemenuhan akses pendidikan dan pengembangan kualitas layanan pendidikan 2. Meningkatkan mutu pendidikan 3. Pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			4. Meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja. 5. Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dan ekraf. 6. Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. 7. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK)	kebutuhan industri. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK)	kebutuhan industri. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK)	menengah (SMA) dan kejuruan (SMK)
10.		Mendorong Terciptanya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	1. Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian)	1. Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian)	1. Penguatan sistem pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian)	1. Penguatan sistem pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian)	1. Penguatan sistem pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian)

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
11.		Meningkatkan Daya Saing dan Prestasi Olahraga	1. Penyediaan sarana prasarana olahraga 2. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 3. Membangun sinergi organisasi Olahraga 4. Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat	1. Penyediaan sarana prasarana olahraga yang berstandar internasional 2. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 3. Membangun sinergi organisasi Olahraga 4. Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat	1. Pengembangan sarana prasarana olahraga 2. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 3. Membangun sinergi organisasi Olahraga 4. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat	1. Pengembangan sarana prasarana olahraga 2. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 3. Membangun sinergi organisasi Olahraga 4. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat	1. Pengembangan sarana prasarana olahraga 2. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 3. Membangun sinergi organisasi Olahraga 4. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat
12.		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan primer 2. Meningkatkan kepesertaan dan keaktifan Jaminan Kesehatan Nasional 3. Penyediaan bantuan medis darurat dan kebencanaan 4. Meningkatkan gizi masyarakat	1. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan primer 2. Meningkatkan kepesertaan dan keaktifan Jaminan Kesehatan Nasional 3. Penyediaan bantuan medis darurat dan kebencanaan	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan primer 2. Meningkatkan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 3. Penyediaan bantuan medis darurat dan kebencanaan	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan primer 2. Meningkatkan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 3. Penyediaan bantuan medis	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan primer 2. Meningkatkan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 3. Penyediaan bantuan medis darurat dan kebencanaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			5. Mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis 6. Mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit dibidang kesehatan ibu dan anak 7. Meningkatkan budaya dan pola hidup sehat serta aktivitas fisik	4. Meningkatkan gizi masyarakat 5. Mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis 6. Mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit dibidang kesehatan ibu dan anak 7. Meningkatkan budaya dan pola hidup sehat serta aktivitas fisik	4. Meningkatkan gizi masyarakat 5. Mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis 6. Mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit dibidang kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan uronefrologi 7. Meningkatkan budaya dan pola hidup sehat serta aktivitas fisik	darurat dan kebencanaan 4. Meningkatkan gizi masyarakat 5. Mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis 6. Mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit dibidang kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan uronefrologi 7. Meningkatkan budaya dan pola hidup sehat serta aktivitas fisik	4. Meningkatkan gizi masyarakat 5. Mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis 6. Mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit dibidang kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan uronefrologi 7. Meningkatkan budaya dan pola hidup sehat serta aktivitas fisik
13.		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melalui Pusat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melalui Pusat	Penguatan ketahanan keluarga dari segi ekonomi, sosial,	Penguatan ketahanan keluarga dari segi ekonomi, sosial,	Optimalisasi ketahanan keluarga dari segi ekonomi, sosial,

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	kesehatan, pendidikan dan pengasuhan	kesehatan, pendidikan dan pengasuhan	kesehatan, pendidikan dan pengasuhan
14.		Mendorong Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	Peningkatan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan	Peningkatan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan	Peningkatan kolaborasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan	Peningkatan kolaborasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan	Optimalisasi kolaborasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas							
15.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Mewujudkan Birokrasi Berintegritas	1. Peningkatan implementasi dan nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Penyederhanaan birokrasi, perizinan dan pengadaan barang dan jasa 3. Mendorong daya saing daerah melalui inovasi 4. Mendorong inovasi daerah melalui sinergi lintas sektor dan pengembangan	1. Peningkatan implementasi dan nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Penyederhanaan birokrasi, perizinan dan pengadaan barang dan jasa 3. Penguatan daya saing daerah melalui inovasi 4. Pemanfaatan inovasi daerah melalui sinergi lintas sektor dan	1. Peningkatan implementasi dan nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Penyederhanaan birokrasi, perizinan dan pengadaan barang dan jasa 3. Peningkatan daya saing daerah melalui inovasi 4. Pemanfaatan inovasi daerah melalui sinergi	1. Peningkatan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas 2. Percepatan daya saing daerah melalui inovasi 3. Peningkatan inovasi daerah melalui sinergi lintas sektor dan	1. Peningkatan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas 2. Perwujudan daya saing daerah 3. Peningkatan inovasi daerah melalui sinergi lintas sektor dan pengembangan ekosistem

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			ekosistem inovasi kolaboratif digitalisasi layanan 5. Analisa Big Data 6. Penguatan dan pemeliharaan infrastruktur TIK 7. Konsolidasi dan Penguatan dasar Evaluasi dan penguatan kelembagaan PPID 8. Fondasi & Pemetaan data Statistik sektoral 9. Analisis dan Perencanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	pengembangan ekosistem inovasi kolaboratif digitalisasi layanan 5. Pemeliharaan dan Penguatan Infrastruktur/TIK 6. Penguatan dan pemeliharaan infrastruktur TIK 7. Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur digital untuk informasi publik 8. Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Data 9. Penerapan Kerangka Kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi	lintas sektor dan pengembangan ekosistem inovasi kolaboratif digitalisasi layanan 5. Inovasi dan Adopsi Teknologi Baru 6. Penguatan layanan jaringan 7. Transparansi proaktif dan partisipasi publik 8. Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat 9. Implementasi Penuh dan Inovasi Statistik Daerah 10. Peningkatan Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	pengembangan ekosistem inovasi kolaboratif digitalisasi layanan 4. Kolaborasi dan Ekosistem Digital 5. Pengembangan integrasi layanan digital 6. Inovasi layanan dan penguatan kelembagaan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 7. Pemantapan Tata Kelola dan Keterbukaan data statistik sektoral 8. Ekosistem Keamanan Informasi yang Kolaboratif	inovasi kolaboratif digitalisasi layanan 4. Kualitas Layanan dan Keberlanjutan 5. Penguatan Infrastruktur manajemen (data center) 6. Konsolidasi dan Pencapaian Predikat Informatif Evaluasi menyeluruh dan pencapaian predikat informati secara berkelanjutan 7. Konsolidasi dan Keberlanjutan kegiatan statistik sektoral 8. Optimalisasi dan Adaptasi Berkelanjutan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
16.	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Penyediaan infrastruktur fisik (tempat pembuangan sampah (TPS), fasilitas pengolahan sampah, dan sistem pengangkutan dan Penyediaan infrastruktur non-fisik (peraturan, kebijakan, dan sosialisasi, pelatihan, penguatan kelembagaan) 2. Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor Pengelolaan limbah 3. Peningkatan Pelestarian dan rehabilitasi mangrove 4. Penguatan ketahanan iklim melalui program kampung iklim (Proklim) 5. Penguatan sistem	1. pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pemilahan Sampah Energi Listrik (PSEL) 2. Peningkatan kegiatan pengurangan emisi GRK Sektor Sampah dan Limbah serta peningkatan teknologi pengelolaan limbah 3. Peningkatan Pelestarian dan rehabilitasi mangrove 4. Peningkatan jumlah komunitas iklim dan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal 5. penerapan sistem pelaporan	1. Penerapan dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pemilahan Sampah Energi Listrik (PSEL) 2. Peningkatan kegiatan pengurangan emisi GRK Sektor Sampah dan Limbah serta Pemanfaatan Limbah 3. Peningkatan Pelestarian, rehabilitasi dan pengelolaan mangrove 4. Peningkatan jumlah komunitas iklim dan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal 5. Pengembangan sistem	1. Penerapan dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pemilahan Sampah Energi Listrik (PSEL) 2. Peningkatan kegiatan pengurangan emisi GRK Sektor Sampah dan Limbah serta Pemanfaatan Limbah 3. Peningkatan Pelestarian, rehabilitasi dan pengelolaan mangrove 4. Peningkatan jumlah komunitas iklim dan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal 5. Pengembangan sistem	1. Penerapan dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pemilahan Sampah Energi Listrik (PSEL) 2. Peningkatan kegiatan pengurangan emisi GRK Sektor Sampah dan Limbah serta Pemanfaatan Limbah 3. Peningkatan Pelestarian, rehabilitasi dan pengelolaan mangrove 4. Peningkatan jumlah komunitas iklim dan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal 5. Pengembangan sistem

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			pemantauan dan pelaporan emisi GRK secara terintegrasi lintas sektor 6. Edukasi publik dan pelibatan masyarakat dalam aksi iklim 7. Penguatan tata kelola rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan lindung dan perlindungan hutan secara intensif untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim 8. Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui perhutanan sosial berbasis agroforestry 9. Mendorong pengelolaan hutan	GRK lintas seKtor yang efektif dan terintegrasi, pendidikan dan pelatihan SDM 6. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 7. Peningkatan tata kelola rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan lindung dan perlindungan hutan secara intensif untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim 8. Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan	monitoring GRK, teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan stasiun pemantau emisi di lapangan 6. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 7. Percepatan tata kelola rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan lindung dan perlindungan hutan secara intensif untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim 8. Peningkatan peran	5. Pengembangan sistem monitoring dan pelaporan GRK 6. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 7. Optimalisasi tata kelola rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan lindung dan perlindungan hutan secara intensif untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim 8. Percepatan peran masyarakat dalam	monitoring dan pelaporan GRK 6. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 7. Perwujudan tata kelola rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan lindung dan perlindungan hutan secara intensif untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim 8. Perwujudan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			rendah emisi, kawasan hijau, daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan 10. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). 11. Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana.	sumber daya hutan melalui perhutanan sosial berbasis agroforestry 9. Memperkuat pengelolaan hutan rendah emisi, kawasan hijau, daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan 10. Pembangunan TPST Regional Bandar Lampung-Metro-Lampung Selatan	masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui perhutanan sosial berbasis agroforestry 9. Meningkatkan pengelolaan hutan rendah emisi, kawasan hijau, daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan	pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui perhutanan sosial berbasis agroforestry 9. Mempercepat pengelolaan hutan rendah emisi, kawasan hijau, daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan	hutan melalui perhutanan sosial berbasis agroforestry 9. Mewujudkan pengelolaan hutan rendah emisi, kawasan hijau, daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan
17.		Mengurangi Risiko Bencana dan Penguatan Ketangguhan Bencana	1. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 2. Menyusun Rencana Kontijensi 3. Melaksanakan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 4. Melaksanakan Sosialisasi,	1. Menyusun Rencana Kontijensi 2. Melakukan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 3. Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1. Menyusun Rencana Kontijensi 2. Melakukan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 3. Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1. Menyusun Kajian Risiko Bencana 2. Menyusun Rencana Kontijensi 3. Melakukan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 4. Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi,	1. Menyusun Rencana Kontijensi 2. Melakukan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 3. Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 5. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 6. Melaksanakan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 7. Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 8. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 9. Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi (Per Jenis Bencana) 4. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 5. Melaksanakan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 6. Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 7. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 8. Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 9. Melakukan Pengelolaan Risiko Bencana	Provinsi (Per Jenis Bencana) 4. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 5. Melaksanakan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 6. Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 7. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 8. Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 5. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 6. Melaksanakan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 7. Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 8. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Provinsi (Per Jenis Bencana) 4. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 5. Melaksanakan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 6. Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 7. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 8. Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			10. Melaksanakan Pengelolaan Risiko Bencana 11. Menyediakan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 12. Menyusun Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi 13. Merespon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 14. Merespon Cepat Penanganan Darurat Bencana 15. Melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 16. Menyediakan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 17. Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10. Menyediakan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 11. Menyusun Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi 12. Merespon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 13. Merespon Cepat Penanganan Darurat Bencana 14. Melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 15. Menyediakan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 16. Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 17. Merespon Cepat Bencana Non Alam	9. Melakukan Pengelolaan Risiko Bencana 10. Menyediakan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 11. Menyusun Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi 12. Merespon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 13. Merespon Cepat Penanganan Darurat Bencana 14. Melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 15. Menyediakan Logistik Penyelamatan	9. Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 10. Melakukan Pengelolaan Risiko Bencana 11. Menyediakan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 12. Menyusun Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi 13. Merespon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 14. Merespon Cepat Penanganan Darurat Bencana 15. Melaksanakan Pencarian,	9. Melakukan Pengelolaan Risiko Bencana 10. Menyediakan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 11. Menyusun Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi 12. Merespon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 13. Merespon Cepat Penanganan Darurat Bencana 14. Melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 15. Menyediakan Logistik Penyelamatan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			18. Merespon Cepat Bencana Non Alam 19. Melatih Keluarga Tanggap Bencana Alam 20. Penanganan Pasca Bencana Provinsi 21. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 22. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 23. Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	18. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi 19. Melatih Keluarga Tanggap Bencana Alam 20. Penanganan Pasca Bencana Provinsi 21. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota 22. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi 23. Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan	dan Evakuasi Korban Bencana 16. Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 17. Merespon Cepat Bencana Non Alam 18. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi 19. Melatih Keluarga Tanggap Bencana Alam 20. Penanganan Pasca Bencana Provinsi 21. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 16. Menyediakan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 17. Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 18. Merespon Cepat Bencana Non Alam 19. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi 20. Melatih Keluarga Tanggap Bencana Alam	dan Evakuasi Korban Bencana 16. Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 17. Merespon Cepat Bencana Non Alam 18. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi 19. Melatih Keluarga Tanggap Bencana Alam 20. Penanganan Pasca Bencana Provinsi 21. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
				bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) 24. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi 25. Menyusun Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 26. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 27. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 28. Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	22. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi 23. Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) 24. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi 25. Menyusun Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 26. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	21. Penanganan Pasca Bencana Provinsi 22. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota 23. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi 24. Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) 25. Peningkatan Kapasitas SDM	22. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi 23. Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) 24. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi 25. Menyusun Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 26. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
					27. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 28. Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi 26. Menyusun Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 27. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 28. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota 29. Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	27. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 28. Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor
18.		Mendorong Pembangunan Energi Berkelanjutan	1. Menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan energi terbarukan sebagai panduan	1. Penguatan Data potensi dan pemanfaatan EBT 2. Percepatan Pemanfaatan EBT	1. Penguatan Data potensi dan pemanfaatan EBT	1. Perluasan cakupan data potensi dan pemanfaatan EBT	1. Pemantapan data EBT secara berkelanjutan melalui pembaruan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			jangka menengah dan panjang 2. Pendataan potensi dan pemanfaatan EBT 3. Pemanfaatan EBT skala kecil (biogas/ PLTS dll) 4. Mendorong Pemanfaatan PLTS Atap di Lingkungan Pemerintah 5. Menyusun regulasi untuk mendorong pemanfaatan EBT di Provinsi Lampung 6. Implementasi Konservasi energi di lingkungan pemerintah 7. Mendorong pemanfaatan EBT di sektor industri 8. Mendorong penyelesaian kendala pemanfaatan EBT (PLTP Rajabasa dan PLTP Suoh-Sekincau dll) 9. Mendorong pemanfaatan Sumber Daya Air	skala kecil (biogas/ PLTS dll) 3. Mendorong percepatan Pemanfaatan PLTS Atap di Lingkungan Pemerintah 4. Menyusun regulasi untuk mendorong pemanfaatan EBT di Provinsi Lampung 5. Implementasi Konservasi energi di lingkungan pemerintah 6. Mendorong pemanfaatan EBT di sektor industri 7. Mendorong percepatan penyelesaian kendala pemanfaatan EBT (PLTP Rajabasa dan PLTP Suoh-Sekincau dll) 8. Mendorong Percepatan pemanfaatan Sumber Daya Air	2. Penguatan Pemanfaatan EBT skala kecil (biogas/ PLTS dll) 3. Mendorong penguatan Pemanfaatan PLTS Atap di Lingkungan Pemerintah 4. Penguatan regulasi untuk mendorong pemanfaatan EBT di Provinsi Lampung 5. Implementasi Konservasi energi di lingkungan pemerintah 6. Mendorong penguatan pemanfaatan EBT di sektor industri 7. Mendorong percepatan penyelesaian kendala pemanfaatan EBT (PLTP Rajabasa dan	2. Perluasan Pemanfaatan EBT skala kecil (biogas/ PLTS dll) 3. Mendorong perluasan Pemanfaatan PLTS Atap di Lingkungan Pemerintah 4. Perluasan cakupan regulasi untuk mendorong pemanfaatan EBT di Provinsi Lampung 5. Implementasi Konservasi energi di lingkungan pemerintah 6. Mendorong perluasan pemanfaatan EBT di sektor industri 7. Mendorong penguatan penyelesaian kendala pemanfaatan EBT (PLTP	berkala dan integrasi dengan sistem pusat. 2. Pemantapan Pemanfaatan EBT skala kecil (biogas/ PLTS dll) 3. Mendorong optimalisasi Pemanfaatan PLTS Atap di Lingkungan Pemerintah 4. Pemantapan regulasi pemanfaatan EBT sebagai instrumen penguatan transisi energi di Provinsi Lampung secara berkelanjutan 5. Pemantapan Implementasi Konservasi energi di lingkungan pemerintah 6. Mendorong pemantapan pemanfaatan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			sebagai PLTS Terapung 10. Mendorong pemanfaatan EBT oleh Badan Usaha 11. Menyusun Kajian Pemanfaatan EBT	sebagai PLTS Terapung 9. Mendorong percepatan pemanfaatan EBT oleh badan usaha melalui kebijakan yang kondusif 10. Menyusun Kajian Pemanfaatan EBT	PLTP Suoh-Sekincau dll) 8. Mendorong penguatan pemanfaatan Sumber Daya Air sebagai PLTS Terapung 9. Penguatan dukungan dan kolaborasi antar sektor untuk mendorong pemanfaatan EBT oleh badan usaha 10. Menyusun Kajian Pemanfaatan EBT	Rajabasa dan PLTP Suoh-Sekincau dll) 8. Mendorong optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Air sebagai PLTS Terapung 9. Perluasan inisiatif pemanfaatan EBT oleh badan usaha 10. Peningkatan kualitas penyusunan kajian pemanfaatan EBT	EBT di sektor industri 7. Mendorong pemantapan penyelesaian kendala pemanfaatan EBT (PLTP Rajabasa dan PLTP Suoh-Sekincau dll) 8. Mendorong perwujudan pemanfaatan Sumber Daya Air sebagai PLTS Terapung 9. Pemantapan pemanfaatan EBT oleh badan usaha secara berkelanjutan berbasis kolaborasi multipihak 10. Pemantapan kajian pemanfaatan EBT sebagai instrumen strategis dalam sistem informasi dan perencanaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
							energi terintegrasi.
19.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Mewujudkan Semangat Lampung Bersama	1. Penguatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan ideologi yang tidak sesuai 3. Melestarikan warisan budaya Lampung 4. Menyelenggarakan event/festival seni dan budaya 5. Revitalisasi sarana dan lembaga kebudayaan	1. Penguatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan ideologi yang tidak sesuai 3. Melestarikan warisan budaya Lampung 4. Menyelenggarakan event/festival seni dan budaya 5. Revitalisasi sarana dan lembaga kebudayaan	1. Percepatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan ideologi yang tidak sesuai 3. Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Lampung 4. Menyelenggarakan event/festival seni dan budaya 5. Revitalisasi sarana dan	1. Percepatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 3. Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Lampung 4. Menyelenggarakan event/festival seni dan budaya 5. Revitalisasi sarana dan	1. Perwujudan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 3. Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Lampung 4. Menyelenggarakan event/festival seni dan budaya 5. Revitalisasi sarana dan



NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA GUBERNUR	STRATEGI PEMBANGUNAN				
			TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
					lembaga kebudayaan	lembaga kebudayaan	lembaga kebudayaan



Strategi per tahapan di atas, diimplementasikan melalui Program Perangkat Daerah khususnya Program Prioritas yang merupakan Program Strategis untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas daerah Provinsi Lampung dilaksanakan untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Penjabaran tujuan, sasaran serta program prioritas ditampilkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6 MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, OUTCOME DAN INDIKATOR

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
VISI: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS					
Misi 1: Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif					
1.1. Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1.1.1. Meningkatkan Investasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan		Pertumbuhan Ekonomi		
			Gini Rasio		
			Pertumbuhan PMTB		
			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan		
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DISPERINDAG
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
		Meningkatkan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PKPCK

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penyelesaian Izin yang Tepat Waktu kewenangan Daerah Provinsi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya kemudahan berinventasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi Lampung	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi Nasional	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KPTPH
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		Penguatan Kelembagaan Peternakan	Jumlah Lembaga Peternakan yang Difasilitasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Disnakeswan
		Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase Derajat Kesehatan Hewan Wilayah Provinsi Lampung	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		Pembangunan/ Revitalisasi Infrastruktur Peternakan	Persentase Capaian Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana yang Seusai Kebutuhan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
		Persentase penurunan serangan hama dan penyakit	Meningkatnya persentase penurunan serangan hama dan penyakit (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Disbun

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Persentase peningkatan Produktivitas	Meningkatnya persentase peningkatan Produktivitas (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
		Persentase peningkatan mutu produk perkebunan	Meningkatnya Persentase peningkatan mutu produk perkebunan (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DKP
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Diskop UMKM
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatnya pekerja Indonesia Yang Terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DISNAKER
		Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat yang Bersumber dari Peralatan EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	ESDM
		Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase Pengelolaan Cekungan Air Tanah Berdasarkan Zona Konservasi Air Tanah	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	- Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha di Bidang Mineral Batubara - Jumlah Produksi dan Penerimaan Negara di Bidang Mineral & Batubara	PROGRAM PENGELOLAAN MINERBA	
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PKPCK
		Meningkatnya Indeks Keanekaragaman Hayati	Nilai Indeks Keanekaragaman Hayati	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	- Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Pada WS Kewenangan Provinsi) - Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Pada WS Kewenangan Provinsi) - Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Pada DI Kewenangan Provinsi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	PSDA
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KPPTH, KESWAN, DISBUN
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan - Peningkatan Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservasi Perairan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL	DKP
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		1. meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis riset inovasi dan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif 2. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah	1. persentase rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan 2. Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BALITBANGDA
		1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termamfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian,	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan 2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 3. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1. Indeks SPBE 2. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
	1.1.2. Meningkatkan Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional		Pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)		
			Indeks Ketahanan Pangan		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KPTPH
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Cadangan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase Derajat Kesehatan Hewan Wilayah Provinsi Lampung	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISNAKESWAN

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Pembangunan/ Revitalisasi Infrastruktur Peternakan	Persentase Capaian Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana yang Sesuai Kebutuhan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DKP
		Penguatan Kelembagaan Peternakan	Jumlah Lembaga Peternakan yang Difasilitasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DISKOP UMKM
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		1. meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis riset inovasi dan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif 2. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah	1. persentase rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan 2. Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BALITBANG

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan 2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 3. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFO
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PKPCK
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Pada WS Kewenangan Provinsi) 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	PSDA

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Rob (Pada WS Kewenangan Provinsi) 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Pada DI Kewenangan Provinsi)		
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PMDT
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa yang menjadi kewenangan provinsi	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 5 (lima) kerjasama	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan digital Aplikasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DISPERINDAG
	1.1.3. Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa		Persentase Desa Mandiri		
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan digital Aplikasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PMDT
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKER
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DISKOP UMKM

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		1. meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis riset inovasi dan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif 2. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah	1. persentase rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan 2. Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BALITBANG
		1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan 2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 3. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1. Indeks SPBE 2. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Lampung	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Keswan
		Penguatan Kelembagaan Peternakan	Jumlah Lembaga Peternakan yang Difasilitasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	1.1.4. Meningkatkan Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		PDRB Sektor Pariwisata		
		Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DISPAREKRAF
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DISPAREKRAF
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISPAREKRAF
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPAREKRAF
		1. meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis riset inovasi dan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif 2. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan	1. persentase rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan 2. Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BALITBANG

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		pemerintah daerah melalui inovasi daerah			
	1.1.5. Meningkatkan kualitas Infrastruktur pembangunan		Kemantapan Jalan		
			Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar		
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
		Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DKP
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DISPERINDAG
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PKPCK
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10–15 Ha yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Pada WS Kewenangan Provinsi) 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Pada WS Kewenangan Provinsi) 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Pada DI Kewenangan Provinsi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	PSDA

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase Pengelolaan Cekungan Air Tanah Berdasarkan Zona Konservasi Air Tanah	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1.Indeks SPBE 2.Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADBANG
		1. Meningkatkan tata kelola anggaran 2. Meningkatkan tata kelola perbendaharaan 3. Meningkatkan tata kelola akuntansi dan pelaporan	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4. Persentase Penurunan SILPA 5. Persentase laporan keuangan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penyelesaian Izin yang Tepat Waktu kewenangan Daerah Provinsi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
	1.1.6 Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Tingkat kemiskinan		
			Tingkat inflasi		
			Tingkat Pengangguran Terbuka		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DKPTPH
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase Derajat Kesehatan Hewan Wilayah Provinsi Lampung	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISBUN
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DKP
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DISPERINDAG

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DISPAREKRAF
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PKPCK
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	1.Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2.Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			(Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Pada WS Kewenangan Provinsi) 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Pada WS Kewenangan Provinsi) 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Pada DI Kewenangan Provinsi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PSDA
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISKOP UMKM
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat (APM) 2. Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat (APK)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIK
		Terlaksananya pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Terlaksananya penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1.Konektivitas Darat 2.Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1.Indeks SPBE 2.Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKER
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani di bidang kehutanan	- Persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH) - Persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif					
			Indeks Modal Manusia		
			Rata rata Lama Sekolah		

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
3.1 Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	2.1.1. Meningkatkan Kualitas daya Saing Pendidikan		Harapan Lama Sekolah		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat (APM) 2. Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat (APK)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIK
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DISPUS ARSIP
	2.1.2. Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda		
			Indeks Pembangunan Olahraga		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat (APM) 2. Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat (APK)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIK
		Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga yang berdaya saing	Persentase Atlet berprestasi yang dibina.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DISPORA
		Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dalam berorganisasi kepemudaan, sosial kemasyarakatan dan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPPPA

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKER
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DISPAREKRAF
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISKOP UMKM
	2.1.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup		
			Prevalensi Stunting		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUAM, RSJ, RSBNH
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KPTPH
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DKP
		Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Lampung	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISNAKESWAN
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PPPA

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PMDT
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat (APM) 2. Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat (APK)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIK
		Meningkatnya PPKS yang Dilayani dan di Rehabilitasi	Persentase PPKS yang Dilayani dan di Rehabilitasi di dalam panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS
		Meningkatnya pelaksanaan kebijakan urusan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan urusan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESRA
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSBNH
	2.1.4. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan		Indeks Perlindungan Anak		
			Indeks Ketimpangan Gender		
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PPPA
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			2.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
		Meningkatnya PPKS yang Dilayani dan di Rehabilitasi	Persentase PPKS yang Dilayani dan di Rehabilitasi di dalam panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS
		Terlaksananya penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	DISNAKER
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas					
3.1 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas			Indeks Reformasi Birokrasi		
	3.1.1. Terwujudnya Birokrasi Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMOTDA
		Meningkatnya pelaksanaan kebijakan urusan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan urusan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESRA
		Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	BIRO HUKUM
		Meningkatkan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Presentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PBJ

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADBANG
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan sekretariat daerah dan pimpinan	1. Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BIRO UMUM
		Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan serta Fasilitasi Administrasi Tata Usaha Pimpinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BIRO ADPIM
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
			Nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP Provinsi Lampung	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi Lampung		
		1. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti 2. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Kriteria Nilai $\geq$ B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		3. Meningkatnya Implementasi Pengelolaan Risiko	3. Nilai Penjaminan Kualitas Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah		
		4. Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
		5. Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi	5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		
		1. Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD
		2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	2. Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
		3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4. Persentase Penurunan SILPA 5. Persentase laporan keuangan tepat waktu		
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KOMINFO
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1. Indeks SPBE 2. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		1. meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis riset inovasi dan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif 2. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah	1. persentase rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan 2. Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BALITBANGDA
		1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 3. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKD
		1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar,	1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BPSDM

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		kader, manajerial dan fungsional 2. Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi 3. Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi 4. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional 2. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan 3. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi 4. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
		Meningkatnya layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persentase layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatnya pelayanan Badan Penghubung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pelayanan Badan Penghubung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	BADAN PENGHUBUNG
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERPUSTAKAAN ARSIP
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISPERINDAG
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
3.2 Terwujudnya Pembangunan Rendah			Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca		

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	3.2.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Indeks Resiko Bencana		
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif		
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentasi sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Persentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Meningkatnya penanganan B3 dan Limbah B3	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Prosentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DISHUT
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
		Meningkatnya Penyerapan Emisi Karbon sektor Kehutanan	jumlah penyerapan Emisi Karbon Sektor Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
		Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
		Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservasi Perairan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	DKP
		Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat yang Bersumber dari Peralatan EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	ESDM
		Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	DINAS PERHUBUNGAN
		Berkurangnya emisi gas rumah kaca (GRK) dari kegiatan usaha peternakan secara berkelanjutan	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Penurunan Emisi GRK Subsektor Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase peningkatan Produktivitas	Meningkatnya persentase peningkatan Produktivitas (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISBUN
		Persentase peningkatan mutu produk perkebunan	Meningkatnya Persentase peningkatan mutu produk perkebunan (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		1. Meningkatkan kualitas nilai perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan kualitas capaian nilai perencanaan pembangunan	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi 2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservasi Perairan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	DKP
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Pada WS Kewenangan Provinsi) 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Pada WS Kewenangan Provinsi) 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Pada DI Kewenangan Provinsi)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PSDA
		Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase Pengelolaan Cekungan Air Tanah Berdasarkan Zona Konservasi Air Tanah	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
		1. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	1. Prosentase Upaya Penyelamatan Korban Bencana melalui tanggap darurat dan Penyediaan Logistik. 2. Prosentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan target, SOP dan kebutuhan yang ada.	PROGRAM PENANGULANGAN BENCANA	BPBD

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD
3.3 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	3.3.1. Terwujudnya Semangat Lampung Bersama		Indeks Demokrasi Provinsi		
			Indeks pembangunan Kebudayaan		
			Indeks Demokrasi Provinsi		
			Ekspresi Budaya		
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Indeks Harmoni Indonesia (IHH) Provinsi Lampung	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESBANGPOL
		1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 2. Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Prosentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 2. Prosentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase seni budaya yang dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilakukan pengkajian ilmiah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
		Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF
		Meningkatnya pelaksanaan kebijakan urusan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan urusan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESRA

3.4.2. Keselarasan Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 secara substantif telah mengakomodasi arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Keselarasan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung sasaran nasional melalui pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari koridor Sumatera dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan RPJMN, Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan sentra pangan nasional, hilirisasi komoditas unggulan, serta konektivitas antar wilayah. Strategi pembangunan dalam RPJMD diarahkan untuk mendorong transformasi struktural di kawasan pedesaan dan pesisir, peningkatan nilai tambah komoditas berbasis sumber daya lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk.

Di sisi lain, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dalam RPJMD juga sejalan dengan prinsip RPJMN yaitu penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan. Penataan ruang, pengembangan kawasan strategis provinsi, serta integrasi pembangunan perkotaan dan pedesaan menjadi elemen utama dalam mewujudkan struktur wilayah yang produktif, inklusif, dan resilien.

Secara teknokratik, RPJMD Provinsi Lampung mengadopsi pendekatan tematik-holistik-integratif-spasial (THIS) yang digunakan dalam RPJMN, serta memastikan bahwa program prioritas daerah memberikan kontribusi langsung terhadap target nasional. Hal ini tercermin melalui penyelarasan target makro, peta kebijakan sektoral dan kewilayahan, serta sinergi lintas perangkat daerah dan lintas wilayah.

Dengan demikian, RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari orkestrasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan Lampung sebagai wilayah yang tangguh,



berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global dan dinamika domestik. Berikut Tabel Keselarasan Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 7 Keselarasan Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan Arah Pengembangan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
A. 1 Kawasan Perkotaan Bandar Lampung 2 Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan	a. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung antara lain melalui:		
	- Penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan (Kotabaru, Industri). • Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan. • Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk pemenuhan suplai air bersih • Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi • Penyederhanaan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi • Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW • Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industrialisasi • Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sumber pembiayaan non-APBD.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim dalam rencana tata ruang
	- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Pembangunan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM Regional). • RC untuk SPAM Regional Wil. II dan Wil. III • Pengotimalkan SR pada SPAM Regional Penyiapan Wilayah I • Penyediaan infrastruktur fisik (tempat pembuangan sampah (TPS), fasilitas pengolahan sampah, dan sistem pengangkutan dan Penyediaan infrastruktur non-fisik (peraturan, kebijakan, dan sosialisasi, pelatihan, penguatan kelembagaan) • Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor Pengelolaan limbah • Peningkatan Pelestarian dan rehabilitasi mangrove • Penguatan ketahanan iklim melalui program kampung iklim (Proklam) • Penguatan sistem pemantauan dan pelaporan emisi GRK secara terintegrasi lintas sektor • Edukasi publik dan pelibatan masyarakat dalam aksi iklim • Penguatan tata kelola rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan lindung dan perlindungan hutan secara intensif untuk mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim • Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui perhutanan sosial berbasis agroforestry • Mendorong pengelolaan hutan rendah emisi, kawasan hijau, daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana.
	- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK). • Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK). • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. • Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital. • Penguatan sistem pembiayaan pendidikan. • Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM. • Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja. • Penguatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa • Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit. • Meningkatkan semangat kewirausahaan muda dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda. • Meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja. • Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dan ekraf. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Memfasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai pusat aktivitas pendidikan akhlak dan karakter. • Menyelenggarakan sertifikasi pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah vokasi. • Pemerataan dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan tenaga kerja terampil di daerah. • Memfasilitasi sertifikasi profesi tenaga kerja Lampung. • Meningkatkan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat. • Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri. • Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren. • Menciptakan tata kelola teknologi informasi sekolah dan pesantren demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal. • Memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. • Sinergi tridharma perguruan tinggi dalam pembentukan generasi cerdas dan berakhlak. • Mendukung pengembangan UMKM dan pengusaha pemula. • Mengakses potensi pemuda melalui peningkatan kompetensi untuk berwirausaha. • Meningkatkan kemudahan dan kesempatan yang sama untuk berusaha bagi generasi muda.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis dan penyediaan fasilitas pelatihan bisnis yang komprehensif untuk umum, generasi muda, perempuan, dan kaum disabilitas. • Mendorong pemuda desa untuk berwirausaha. • Memfasilitasi kegiatan business matching antar stakeholders terkait untuk meningkatkan angka aktivasi dan sustainability usaha bisnis pemuda. • Mengadakan kompetisi atau program akselerator bidang inovasi dan kewirausahaan untuk mendorong generasi muda mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM, komunitas, dan investasi. • Meningkatkan kualitas pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif dari tingkat UMKM.
	- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. • Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. • Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) : Pemutakhiran data rutin berbasis desa/kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
	b. Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Mengembangkan potensi dan peluang investasi. • Memberikan kemudahan berinvestasi di Provinsi Lampung. • Meningkatkan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan. • Meningkatkan Promosi dan Branding Investasi Daerah.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Mengelola dan mengawasi investasi secara berkelanjutan. • Mempermudah proses Perizinan dan Non-Perizinan. • Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan. • Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi.
	c. Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu a.l. VCO, tepung kelapa dan arang tempurung serta produk hilirisasi lanjutan kelapa a.l. krimer nabati, santan instan dan karbon aktif	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian. • Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara. • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal. • Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan. • Mengembangkan potensi dan peluang investasi. • Memberikan kemudahan berinvestasi di Provinsi Lampung.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Meningkatkan Promosi dan Branding Investasi Daerah. • Mengelola dan mengawasi investasi secara berkelanjutan.
	d. Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu a.l. raw sugar, GKP, molase, bagasse serta produk hilirisasi lanjutan tebu a.l. bioetanol, sirup glukosa dan bioplastik	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian. • Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara. • Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan. • Menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan energi terbarukan sebagai panduan jangka menengah dan Panjang • Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan skala kecil, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan komunitas lokal. • Mendorong pengembangan Energi Bioetanol berbasis Tebu.
	e. Pengembangan pelabuhan Panjang	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Mendorong pengembangan Pelabuhan Utama Panjang dan Pelabuhan Pengumpul Kota Agung sebagai pintu gerbang perdagangan Provinsi Lampung. • Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkaran luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. • Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pariwisata.
	f. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (PHTC)	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Lampung Raya. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Disparitas Wilayah. • Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Fasilitasi akses modal melalui KUR, koperasi, dan UMKM berbasis desa, serta Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. • Kolaborasi Multipihak (Pentahelix): Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Serta Program CSR perusahaan lokal diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
	g. Pengembangan SPAM Regional Pesawaran-Bandar Lampung-Lampung Selatan	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan suplai air bersih • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tanah • Peningkatan Pengelolaan Limbah

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	h. Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang • Penguatan konektivitas jalan tematik • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi.
	i. Preservasi jalan ruas Bandar Lampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kota Agung dan Bandar Lampung-Metro-Sukadana	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur. Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas. Pengembangan terminal tipe B Gading Rejo di Kabupaten Pringsewu.
	j. Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Interkoneksi Sumatera-Jawa (Jembatan Selat Sunda)	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Mendorong peran transportasi udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas wilayah • Mendorong Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang. • Mendorong pengembangan Pelabuhan Utama Panjang dan Pelabuhan Pengumpul Kota Agung sebagai pintu gerbang perdagangan Provinsi Lampung. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas • Mendorong penerapan kebijakan Zero ODOL di Provinsi Lampung.
	k. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 Kv Kalianda-Merak (Interkoneksi 500 Kv Sumatera-Jawa)	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan energi terbarukan sebagai panduan jangka menengah dan panjang. • Memperkuat regulasi di sektor energi terbarukan, termasuk dukungan kebijakan dan kelembagaan. • Mendorong penyelesaian berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan aspek regulasi dan harga jual energi dari pembangkit EBT.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Insentif bagi sektor swasta yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan energi terbarukan. • Mendorong akses listrik yang merata dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan berbasis EBT. • Pemanfaatan potensi sumber energi panas bumi di Lampung sebagai bagian dari diversifikasi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. • Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendorong kerjasama strategis antara BUMD dan investor swasta dalam pengelolaan serta transaksi energi terbarukan.
	l. Pembangunan TPST Regional Bandar Lampung-Metro-Lampung Selatan	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Peningkatan Pengelolaan Limbah
	m. Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bandar Lampung	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Peningkatan Pengelolaan Limbah • Pemenuhan akses sanitasi layak
	n. Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan (Kotabaru, Industri). • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Disparitas Wilayah.
	o. Pembangunan Infrastruktur PLTP Rajabasa	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan energi terbarukan sebagai panduan jangka menengah dan panjang. • Memperkuat regulasi di sektor energi terbarukan, termasuk dukungan kebijakan dan kelembagaan. • Mendorong penyelesaian berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan aspek regulasi dan harga jual energi dari pembangkit EBT.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Insentif bagi sektor swasta yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan energi terbarukan. • Mendorong akses listrik yang merata dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan berbasis EBT. • Pemanfaatan potensi sumber energi panas bumi di Lampung sebagai bagian dari diversifikasi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. • Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendorong kerjasama strategis antara BUMD dan investor swasta dalam pengelolaan serta transaksi energi terbarukan.
	p. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK). • Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK). • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. • Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital. • Penguatan sistem pembiayaan pendidikan. • Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM. • Memfasilitasi Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di Wilayah Provinsi Lampung • Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja. • Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Meningkatkan semangat kewirausahaan muda dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda. • Meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja. • Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dan ekraf. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. • Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian
3 Kawasan Perkotaan Kotabumi	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kotabumi, antara lain melalui:	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan.
	- Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan (Kotabaru, Industri). • Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan suplai air bersih
	- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
		• Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia • Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara, Tanah. • Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon: Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor Pengelolaan limbah dan Integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam RPJMD dan RTRW. • Peningkatan Pengelolaan Limbah.
	- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK). • Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK). • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. • Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital. • Penguatan sistem pembiayaan pendidikan. • Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM. • Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja. • Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit. • Meningkatkan semangat kewirausahaan muda dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja. • Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dan ekraf. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
	- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. • Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. • Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Pemutakhiran data rutin berbasis desa/kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. • Pembiayaan alternatif di luar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Lampung Raya. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Disparitas Wilayah. • Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Fasilitasi akses modal melalui KUR, koperasi, dan UMKM berbasis desa, serta program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. • Kolaborasi Multipihak (Pentahelix): Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			masyarakat. Serta program CSR perusahaan lokal diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
	b. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	
	c. Pengembangan SPAM Perkotaan Kotabumi	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan suplai air bersih • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tanah • Peningkatan Pengelolaan Limbah
	d. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Kotabumi–Terbanggi Besar dan Kotabumi–Bukit Kemuning–Blambangan Umpu	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur. • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas.
	e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Mayor Jenderal HM Ryacudu Kotabumi (PHTC)	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kapasitas rumah sakit melalui penyediaan fasilitas dan tenaga Kesehatan • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	f. Pengembangan kota agropolitan Kotabumi	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian. • Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian. • Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat. • Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara;
4 Kawasan Perkotaan Menggala	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Menggala, antara lain melalui:		
	- Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan (Kotabaru, Industri). • Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan suplai air bersih
	- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara, Tanah.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon: Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor Pengelolaan limbah dan Integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam RPJMD dan RTRW. • Peningkatan Pengelolaan Limbah.
	- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK). • Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK). • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. • Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital. • Penguatan sistem pembiayaan pendidikan. • Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM. • Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja • Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit. • Meningkatkan semangat kewirausahaan muda dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda. • Meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dan ekraf. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
	- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. • Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. • Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Pemutakhiran data rutin berbasis desa/kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
	b. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Lampung Raya. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Disparitas Wilayah. • Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Fasilitasi akses modal melalui KUR, koperasi (Koperasi Desa Merah Putih), dan UMKM berbasis desa, serta Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. • Kolaborasi Multipihak (Pentahelix): Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Serta Program CSR perusahaan lokal

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
	c. Pengembangan SPAM Perkotaan Menggala	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan suplai air bersih • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tanah. • Peningkatan Pengelolaan Limbah
	d. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Menggala–Wiralaga Mulya dan Menggala–Panaragan	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur. • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas. • Pengembangan terminal tipe B Menggala di Kabupaten Tulang Bawang.
	e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Menggala Tulangbawang (PHTC)	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kualitas dan pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Lampung. • Mendukung pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten dan kota. • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Peningkatan layanan subspesialistik di RSUD
	f. Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala)		
	g. Pengembangan kota agropolitan Menggala	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian. • Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat. • Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara;
5 Kawasan Perkotaan Liwa	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Liwa, antara lain melalui:		
	- Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas • Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan (Kotabaru, Industri). • Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara ,Tanah. • Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon: Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor Pengelolaan limbah dan Integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam RPJMD dan RTRW. • Peningkatan Pengelolaan Limbah.
	- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK). • Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK). • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. • Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital. • Penguatan sistem pembiayaan pendidikan. • Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM. • Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja. • Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Meningkatkan semangat kewirausahaan muda dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda. • Meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja. • Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dan ekraf. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
	- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan		• Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. • Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. • Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Pemutakhiran data rutin berbasis desa/kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
	b. Pengembangan SPAM Perkotaan Liwa	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tanah. • Peningkatan Pengelolaan Limbah
	c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Liwa-Bukit Kemuning dan Liwa-Krui	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur. • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas. • Pengembangan terminal tipe B Liwa di Kabupaten Lampung Barat.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	d. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa (PHTC)	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan status gizi • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Mendukung Program Makan Bergizi Gratis • Peningkatan layanan subspesialistik pada RSUD
	e. Pengembangan kota agropolitan Liwa		• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian. • Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian. • Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat. • Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara;
B	Kawasan Komoditas Unggulan	Kawasan Komoditas Unggulan	
1 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru	a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Labuhan Maringgai • Mendukung kegiatan Ekonomi Biru dalam meningkatkan pemanfaatan sektor maritim.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan)	b. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Selatan	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Mendukung ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan sarana produksi perikanan.
	c. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Mengelola kawasan pesisir Lampung dengan program berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
	d. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan tangkap	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian (off farm).
	e. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor. • Budidaya ikan endemik Lampung berkelanjutan.
	f. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung. • Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. • Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
	g. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Mengembangkan potensi dan peluang investasi • Memberikan kemudahan berinvestasi di Provinsi Lampung • Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. • Lampung sebagai magnet investasi PMA dan PMDN. • Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis. • Mendukung kegiatan Ekonomi Biru dalam meningkatkan pemanfaatan sektor maritim.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Menyederhanakan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi • Menggiatkan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global. • Optimalisasi BUMD Provinsi Lampung ke dalam sektor yang strategis dan menyangkut hajat masyarakat Lampung dan ketahanan ekonomi Provinsi Lampung. • Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung. • Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor.
	h. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	
2 Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa yaitu Lampung Barat - Selatan (Kab.Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur)	a. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, kelapa)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara. • Penguatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Pelatihan adaptasi iklim berbasis komunitas, terutama untuk petani dan nelayan.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara. • Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional. • Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian (off farm). • Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
	b. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat. • Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan. • Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau; • Melakukan penguatan literasi digital sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. • Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian (off farm). • Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian dan perkebunan Lampung.
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, kelapa)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pangan (mendukung sentra produksi komoditas utama Provinsi Lampung). • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal; • Mendukung ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan sarana produksi
	d. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, kelapa)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara • Menerapkan program asuransi pertanian dan perikanan untuk melindungi petani dan nelayan. • Mendukung keberlangsungan swasembada pangan.
	e. Pengembangan Produk Bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Mendorong pengembangan Energi Bioetanol berbasis Tebu • Mengintegrasikan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. • kegiatan Ekonomi Hijau untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
	f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan kelapa	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau;

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
		Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	- Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan. - Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak.
C	Kawasan Swasembada Pangan, Air Dan Energi		
1 Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Mesuji-Tulangbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara)	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Atas	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	- Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau. - Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor. - Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional.
	b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal - Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	c. Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi • Mendukung keberlangsungan swasembada pangan.
	d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat • Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian (off farm).
	e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara • Mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian dan perkebunan Lampung.
	f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau; • Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan. • Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak.
	g. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan	• Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi dan konservasi kawasan

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu	Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan.
	h. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, Sub-DAS Way Umpu	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi. • Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara ,Tanah. • Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak. • Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
	i. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau. • Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). • Mendukung keberlangsungan swasembada pangan.
	j. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern /benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani;	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian (off farm).

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen		• Mendorong inovasi pemanfaatan teknologi digital dan IoT (Internet of Things) dalam pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan (on farm). • Integrasi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) dalam RPJMD
	k. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat. • Meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap manfaat dan risiko keuangan. • Memfasilitasi akses pembiayaan skema KUR (kredit usaha rakyat) dan keuangan syariah yang mudah dan terjangkau bagi UMKM melalui bank dan lembaga keuangan lainnya.
	l. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan. • Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. • Melibatkan dan mendukung perguruan tinggi swasta dan negeri dalam program-program pembangunan Lampung.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
2 Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus)	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	- Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau. - Mendukung keberlangsungan swasembada pangan. - Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
	b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal. - Melakukan penguatan literasi digital sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. - Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor.
	c. peningkatan luas lahan pertanian (Ekstensifikasi)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	- Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. - Mendukung keberlangsungan swasembada pangan.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional.
	d. Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan. • Mendukung keberlangsungan swasembada pangan. • Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional. • Mendorong inovasi pemanfaatan teknologi digital dan IoT (Internet of Things) dalam pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan (on farm). • Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
	e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) f. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara • Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian (off farm).

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Peningkatan nilai tambah komoditas Provinsi Lampung yang dilakukan dari desa. • Mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian dan perkebunan Lampung.
	g. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau • Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak. • Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan. • Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
	h. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). • Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan. • Mengintegrasikan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
	i. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau • Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak. • Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
	j. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian. • Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau. • Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara. • Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat. • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal. • Pembangunan rendah Karbon melalui penurunan Emisi GRK berbasis lahan. • Mendukung ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan sarana produksi perikanan. • Menjamin distribusi pupuk, benih, dan pestisida • Memberikan subsidi yang ditujukan khusus untuk nelayan, petani, pekebun dan peternak.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Melakukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyaluran/distribusi pupuk pertanian. • Menjamin dan mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat waktu. • Menyediakan Pupuk Organik Cair (POC) melalui pembangunan unit produksi mikro Pupuk Organik Cair (POC) yang dikelola oleh BUMDes. • Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
	k. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi. • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal. • Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian (off farm). • Mendukung ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan sarana produksi perikanan. • Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor.
	1. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama		• Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal • Meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap manfaat dan risiko keuangan. • Memfasilitasi akses pembiayaan skema KUR (kredit usaha rakyat) dan keuangan syariah yang mudah dan terjangkau bagi UMKM melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. • Meningkatkan peran bank daerah dalam pembangunan di daerah dan desa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM. • Penguatan permodalan bank daerah untuk memenuhi standar kebutuhan pelayanan bank daerah dengan menggandeng partner strategis atau melalui kelompok usaha bank (KUB). • Meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dan perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha desa dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. • Mengembangkan layanan digital bank daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan keuangan • Mengembangkan dan mempromosikan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan lokal.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	m . Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan. • Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. • Memfasilitasi perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk melakukan penelitian bersama dalam rangka penciptaan inovasi-inovasi baru. • Mengembangkan potensi Ekonomi Kreatif dengan Menyiapkan Pusat Kreativitas dan Inovasi Daerah (Lampung Creative and Innovation Center) melalui kemitraan bersama perguruan tinggi. • Melibatkan dan mendukung perguruan tinggi swasta dan negeri dalam program-program pembangunan Lampung.
D Kawasan Afirmasi	Kawasan Afirmasi		
1 Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan)	a. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu. • Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau. • Mendorong akses listrik yang merata dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah,

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			swasta, dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan berbasis EBT. • Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan skala kecil, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan komunitas lokal. • Pemanfaatan potensi sumber energi panas bumi di Lampung sebagai bagian dari diversifikasi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas. • Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital. • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu. • Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur. • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Penguatan Program Bantuan Sosial yang Responsif : Intervensi darurat saat terjadi bencana, inflasi, atau krisis ekonomi lokal. • Mewujudkan desa tangguh bencana. • Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). • Menganangkan dan mempersiapkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah zero waste. • Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan. • Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Pengembangan Roadmap industri energi terbarukan berbasis biomassa (Pengembangan Roadmap industri berbasis energi terbarukan)* FGD Tematik Infrastruktur. • Inisiasi pengembangan potensi energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya. • Memasyarakatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan. • Mendorong kerjasama energi terbarukan antara industri dan masyarakat penyedia bahan biomassa (...berbagai sumber energi terbarukan)* FGD Tematik Infrastruktur. • Melakukan optimalisasi BUMD dalam pengelolaan transaksi energi di interkoneksi Lampung untuk peningkatan PAD (Optimalisasi BUMD dalam Pengelolaan Transaksi energi daerah secara mandiri dan strategis untuk peningkatan PAD)* FGD Tematik Infrastruktur. • Mendorong interkonektivitas jalan dan moda transportasi antar wilayah. • Mewujudkan keadilan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. • Pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang menunjang pelayanan publik serta produktivitas ekonomi dan sosial
	b. Peningkatan ketahanan bencana	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Penguatan sistem mitigasi bencana dan keamanan wisatawan • Penguatan Program Bantuan Sosial yang Responsif: Intervensi darurat saat terjadi bencana, inflasi, atau krisis ekonomi lokal. • Meningkatkan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim melalui kebijakan Pembangunan

RPJMN			RPJMD	
Lokasi Prioritas			Arah Kebijakan	Strategi
				Berketahanan Iklim: Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk cuaca ekstrem dan bencana iklim; Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana; dan Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim • Mengurangi Risiko Bencana dan Penguatan Ketangguhan Daerah: Penguatan kelembagaan BPBD dan relawan desa tangguh bencana (Destana); Sosialisasi dan edukasi publik mengenai mitigasi risiko bencana; Audit kerentanan bencana untuk infrastruktur publik dan fasilitas vital; dan Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu.
		c. Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan.

RPJMN				RPJMD	
Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Arah Kebijakan	Strategi
			d. Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perkebunan (kopi) dan pariwisata bahari	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat. • Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan • Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau;
			e. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga suplai air ketika musim kemarau.
			f. Peningkatan 6A pariwisata di Pesisir Barat	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan destinasi wisata. • Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism).
			g. Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Mendorong peran transportasi udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas wilayah.
			h. Pengembangan SPAM Perkotaan Krui	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal.

RPJMN				RPJMD	
Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
					• Pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tanah. • Peningkatan Pengelolaan Limbah
			i. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan Krui (PHTC)	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. • Meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja konstruksi. • Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Lampung Raya. • Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Disparitas Wilayah. • Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Fasilitasi akses modal melalui KUR, koperasi, dan UMKM berbasis desa, serta Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. • Kolaborasi Multipihak (Pentahelix): Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Serta Program CSR perusahaan lokal diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
			j. Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi & akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Penggunaan teknologi digital untuk menyinkronkan data antarinstansi

RPJMN			RPJMD	
Lokasi Prioritas			Arah Kebijakan	Strategi
		k. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Penguatan Program Bantuan Sosial yang Responsif
		l. Peningkatan tips RS dari tipe D menjadi C di RSUD M. Tohir Krui	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kapasitas rumah sakit melalui penyediaan fasilitas dan tenaga Kesehatan • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Mendukung peningkatan Type RSUD M. Tohir Krui dari Type D menjadi Type C
E Kawasan Konservasi Dan Rawan Bencana				
1 Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana yaitu: TN Bukit Barisan Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat) dan TN Way Kambas (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah)			Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Mengurangi Risiko Bencana dan Penguatan Ketangguhan Daerah • Penguatan kelembagaan BPBD dan relawan desa tangguh bencana (Destana). • Sosialisasi dan edukasi publik mengenai mitigasi risiko bencana. • Audit kerentanan bencana untuk infrastruktur publik dan fasilitas vital. • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru
			Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon • Meningkatkan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim melalui kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim • Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara, Tanah • Penguatan sistem inventarisasi gas rumah kaca (GRK) di tingkat daerah.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Pembangunan rendah Karbon melalui penurunan Emisi GRK Sektor Energi • Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru • pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air dari potensi bencana iklim • Climate Smart Agriculture dalam mempertahankan produksi pangan
	c. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Insentif bagi sektor swasta yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan energi terbarukan. • Pembangunan rendah Karbon melalui penurunan Emisi GRK Sektor Energi • Pembangunan rendah Karbon melalui penurunan Emisi GRK berbasis lahan • Peningkatan Upaya dekarbonisasi Industri • Penguatan Tatakelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon • Pelatihan adaptasi iklim berbasis komunitas, terutama untuk petani dan nelayan. • Climate Smart Agriculture dalam mempertahankan produksi pangan • Peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan KLB DBD dan penyakit akibat perubahan iklim lainnya
	d. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Pembangunan rendah Karbon melalui penurunan Emisi GRK Sektor Energi • pembangunan rendah Karbon melalui penurunan Emisi GRK berbasis lahan • Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru • Peningkatan Upaya dekarbonisasi Industri

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			• Penguatan Tatakelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon Pelatihan adaptasi iklim berbasis komunitas, terutama untuk petani dan nelayan. • Climate Smart Agriculture dalam mempertahankan produksi pangan • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu.
	e. Penguatan Hutan Lestari Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Pembangunan rendah Karbon melalui penurunan Emisi GRK berbasis lahan • Penguatan Tatakelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon • Perlindungan Kawasan Pesisir dan keselamatan pelayaran
	f. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Sosialisasi dan edukasi publik mengenai mitigasi risiko bencana. • Audit kerentanan bencana untuk infrastruktur publik dan fasilitas vital.
	g. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam RPJMD dan RTRW. • Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk cuaca ekstrem dan bencana iklim. • Pelatihan adaptasi iklim berbasis komunitas, terutama untuk petani dan nelayan.
	h. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Penguatan kelembagaan BPBD dan relawan desa tangguh bencana (Destana). • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
2 Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung (Kab. Tanggamus, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Lampung Barat)	a. Penerapan Nature Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Pesisir Selatan Lampung (Megathrust Selat Sunda)	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Penguatan kelembagaan BPBD dan relawan desa tangguh bencana (Destana). Sosialisasi dan edukasi publik mengenai mitigasi risiko bencana. • Audit kerentanan bencana untuk infrastruktur publik dan fasilitas vital. • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu • Memberikan makan gratis bergizi untuk peningkatan pemenuhan gizi dan menanamkan perilaku makan sehat secara tepat sasaran .
	b. Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Mendukung Program Makan Bergizi Gratis • Meningkatkan status gizi masyarakat • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Provinsi Lampung	Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Mendukung Program Makan Bergizi Gratis • Meningkatkan status gizi masyarakat • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui:	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. • Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital. • Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM. Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK). • Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK).

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	- Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Pendidikan • Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM
	- Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Pendidikan • Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital
	- Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Penguatan sistem pembiayaan pendidikan.
	- Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Menjamin anggaran pendidikan tepat guna dan tepat sasaran. • Pendataan dan penanganan ATS melalui peran desa • Sinergi tridharma perguruan tinggi dalam pembentukan generasi cerdas dan berakhlak.
	- Revitalisasi pendidikan nonformal	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. • Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja. • Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit.
	- Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM. Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK). • Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK).

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan status gizi masyarakat • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Mendukung Program Makan Bergizi Gratis
	- Penurunan kematian ibu dan anak	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan faktor risiko kematian ibu dan bayi • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	- Pencegahan dan Penurunan stunting	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan status gizi masyarakat. • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. • Mendukung Program Makan Bergizi Gratis untuk peningkatan pemenuhan gizi dan menanamkan perilaku makan sehat secara tepat sasaran • Meningkatkan pemahaman tentang Stunting, Pola Asuh dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak. • Meningkatkan pencegahan stunting dan penanganan balita dengan masalah gizi serta fokus pada intervensi 1000 HPK dan keluarga beresiko stunting
	- Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan status gizi masyarakat • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Mendukung Program Makan Bergizi Gratis • Peningkatan layanan Kesehatan Remaja dan Kesehatan Reproduksi
	- Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Pemerataan akses layanan kesehatan, • Pemenuhan sarana dan prasarana layanan • Pemenuhan ketersediaan SDM kesehatan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan
	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal.
	- Penuntasan TBC		

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	- Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa - Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM		• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. • Peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan KLB DBD dan penyakit akibat perubahan iklim lainnya
Provinsi Lampung	Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. • Mendukung Program Makan Bergizi Gratis untuk peningkatan pemenuhan gizi dan menanamkan perilaku makan sehat secara tepat sasaran” • Meningkatkan pencegahan stunting dan penanganan balita dengan masalah gizi serta fokus pada intervensi 1000 HPK dan keluarga beresiko stunting
	Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui:	Memastikan perlindungan hak anak, perempuan, dan kaum disabilitas, serta mendorong kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan.	
	- Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan. • Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Perempuan.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	- Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	• Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan. • Pendidikan dan Kampanye Pencegahan Kekerasan Perempuan dan anak • Penegakan Hukum yang Progresif • Penguatan Sistem Informasi dan Data. • Pemulihan dan Reintegrasi Sosial Korban.
	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui:		
	- Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon. • Peningkatan Pengelolaan Limbah.
	- Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		
	Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui:		
	- Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan energi terbarukan sebagai panduan jangka menengah dan panjang. • Mendorong penyelesaian berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan aspek regulasi dan harga jual energi dari pembangkit EBT. • Pemanfaatan potensi sumber energi panas bumi di Lampung sebagai bagian dari diversifikasi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. • Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendorong kerjasama strategis antara BUMD dan investor swasta dalam pengelolaan serta transaksi energi terbarukan.
	- Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	- Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Mendorong akses listrik yang merata dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan berbasis EBT.
	- Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real_time	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Mendorong penyelesaian berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan aspek regulasi dan harga jual energi dari pembangkit EBT. • Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi. • Pemanfaatan potensi sumber energi panas bumi di Lampung sebagai bagian dari diversifikasi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
	- Perluasan penggunaan kendaraan listrik	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	• Mendorong akses listrik yang merata dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan berbasis EBT.
	Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:		
	- Perluasan infrastruktur digital	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif.	• Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi
	- Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
	- Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	• Aksesibilitas Layanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
			Mendorong akses listrik yang merata dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan berbasis EBT.
	Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui:		
	- Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	- Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi. - Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan.
	- Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	- Meningkatkan Implementasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah melalui Pembinaan dan Monitoring Capaian Kinerja. - Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik.
	- Digitalisasi layanan publik prioritas	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	- Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi. - Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan.

RPJMN		RPJMD	
Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi	Arah Kebijakan	Strategi
	- Pengembangan ekosistem layanan Publik digital	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	• Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik
	Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, antara lain melalui:		
	- Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	• Meningkatkan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang rentan terhadap korupsi, seperti penyederhanaan birokrasi, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa
	- Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	• Mendukung dan memperluas sosialisasi, serta Kerjasama dengan stakeholder dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. • Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang berkualitas. • Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah.
	- Penanggulangan judi dan penyelundupan	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya.	• Meningkatkan upaya preventif, edukasi dan pencegahan judi dan penyelundupan • Peningkatan kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara trantibumlinmas
	- Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya.	• Meningkatkan upaya preventif, edukasi dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Peningkatan kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara trantibumlinmas

3.4.3. Keselarasan Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan Proyek Prioritas Nasional (PSN) Tahun 2025-2029

Proyek Strategis Nasional (PSN) disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan Prioritas Utama (KPU). PSN dalam hal ini merupakan upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pembangunan serta mendukung prioritas presiden hingga tahun 2029. Perencanaan dan penyusunan PSN dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah. Indikasi PSN yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung, yaitu Bioethanol (Berbasis Tebu).

Tabel 3. 8 Matriks Dukungan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN)

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG	STRATEGI RPJMD PROVINSI LAMPUNG	OPD PENDUKUNG
MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)				
1.	Program Makan Bergizi Gratis	• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	1. Meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis. 2. Mendukung program nasional pemberian makanan bergizi gratis 3. Peningkatan status gizi masyarakat 4. Pencegahan dan Percepatan penurunan stunting secara tepat sasaran dan tepat waktu.	• Dinas Kesehatan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura • Dinas Peternakan dan Keswan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi • Dinas PKPCK • Dinas PPPA • Dinas Perkebunan • Dinas Pendidikan • Dinas Sosial • Dinas Kominfotik
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN				
2.	• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan	Meningkatkan Kualitas	1. Memberikan kemudahan akses dan peningkatan mutu pendidikan	• Dinas Pendidikan • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG	STRATEGI RPJMD PROVINSI LAMPUNG	OPD PENDUKUNG
	Madrasah yang Berkualitas	Pembangunan Manusia	2. Meningkatkan Partisipasi Sekolah melalui pembiayaan pendidikan 3. Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren. 5. Meningkatkan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat. 6. Memfasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai pusat aktivitas pendidikan akhlak dan karakter.	• Biro Kesejahteraan Rakyat
		• Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif • Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	1. Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital 2. Menciptakan tata kelola teknologi informasi sekolah dan pesantren demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren. 4. Sinergi tridharma perguruan tinggi dalam pembentukan generasi cerdas dan berakhlak.	• Dinas Pendidikan • Dinas Kominfotik • Biro Kesejahteraan Rakyat
3.	• Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	1. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) 2. Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri. 3. Menyelenggarakan sertifikasi keahlian pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah vokasi. 4. Kolaborasi dan optimalisasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan tenaga kerja terampil di daerah. 5. Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 6. Meningkatkan minat baca/literasi masyarakat dengan pengembangan	• Dinas Pendidikan • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dinas Tenaga Kerja

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG	STRATEGI RPJMD PROVINSI LAMPUNG	OPD PENDUKUNG
			perpustakaan inklusi sosial	
4. <				

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG	STRATEGI RPJMD PROVINSI LAMPUNG	OPD PENDUKUNG
			modernisasi jaringan secara efisien untuk menunjang ketahanan pangan dan produktivitas pertanian. 4. Mendorong Penetapan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di seluruh Kab/Kota 5. Melakukan perbaikan sistem tata kelola air 6. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Mendukung keberlangsungan swasembada pangan. Ruang Wilayah). Mendukung keberlangsungan swasembada pangan.	
8.	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi 2. Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional. 3. Memberikan subsidi yang ditujukan khusus untuk nelayan, petani, dan peternak. 4. Mendukung keberlangsungan swasembada pangan. 5. Mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan suplai produk lokal. 6. Pengembangan bibit bersertifikat di bidang pertanian, peternakan dan perikanan	DISNAKESWAN
			1. Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian 2. Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, peternakan, dan pertanian (<i>off farm</i>) seperti rumah potong hewan	- Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Biro Perekonomian
		Meningkatkan Kualitas	1. Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan	DISNAKESWAN

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG	STRATEGI RPJMD PROVINSI LAMPUNG	OPD PENDUKUNG
		Pembangunan Manusia	perbaikan pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 2. Melakukan penguatan literasi digital sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. 3. Pengembangan sistem pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan, termasuk pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi. 4. Mendorong inovasi dan adopsi teknologi pertanian melalui pelatihan	
HILIRISASI, INDUSTRIALISASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL				
9.	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	1. Mengoptimalkan fungsi <i>hotline</i> atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui platform digital terpadu (Lampung In) dengan melibatkan masyarakat secara aktif. 3. Penyediaan infrastruktur dan akses internet di seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Lampung serta fasilitasi layanan dasar provinsi 4. Mengintegrasikan sistem digital pada semua tingkat dalam satu pengelolaan terpusat di <i>Command Center</i> secara realtime yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. 5. Peningkatan akses dan literasi digital masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik berbasis teknologi. 6. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur digital dan memperluas literasi teknologi informasi masyarakat guna mendukung transformasi ekonomi digital dan pelayanan publik yang inklusif 7. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik - Bapenda - Bappeda - BPKAD - BPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - Disdukcapil - Inspektorat

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG	STRATEGI RPJMD PROVINSI LAMPUNG	OPD PENDUKUNG
			melaksanakan Pelayanan Publik 8. Peningkatan Digitalisasi Pelayanan Publik untuk peningkatan layanan dan optimalisasi PAD	
10	- Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	- Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi - Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional. - Mendukung keberlangsungan swasembada pangan. - Mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan suplai produk lokal. - Mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian dan perkebunan Lampung.	DKPTPH
			- Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian - Memaksimalkan peran BUMD bidang pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan. - Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, peternakan, dan pertanian (<i>off farm</i>) seperti rumah potong hewan.	- Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Biro Perekonomian
11	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	- Pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang menunjang pelayanan publik serta produktivitas ekonomi dan sosial. - Mendorong penggunaan teknologi dan smart infrastructure.	- Dinas Kominfotik - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
12	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	- Mengoptimalkan peluang dan potensi investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi - Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung	- Dinas Perindag - Dinas PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

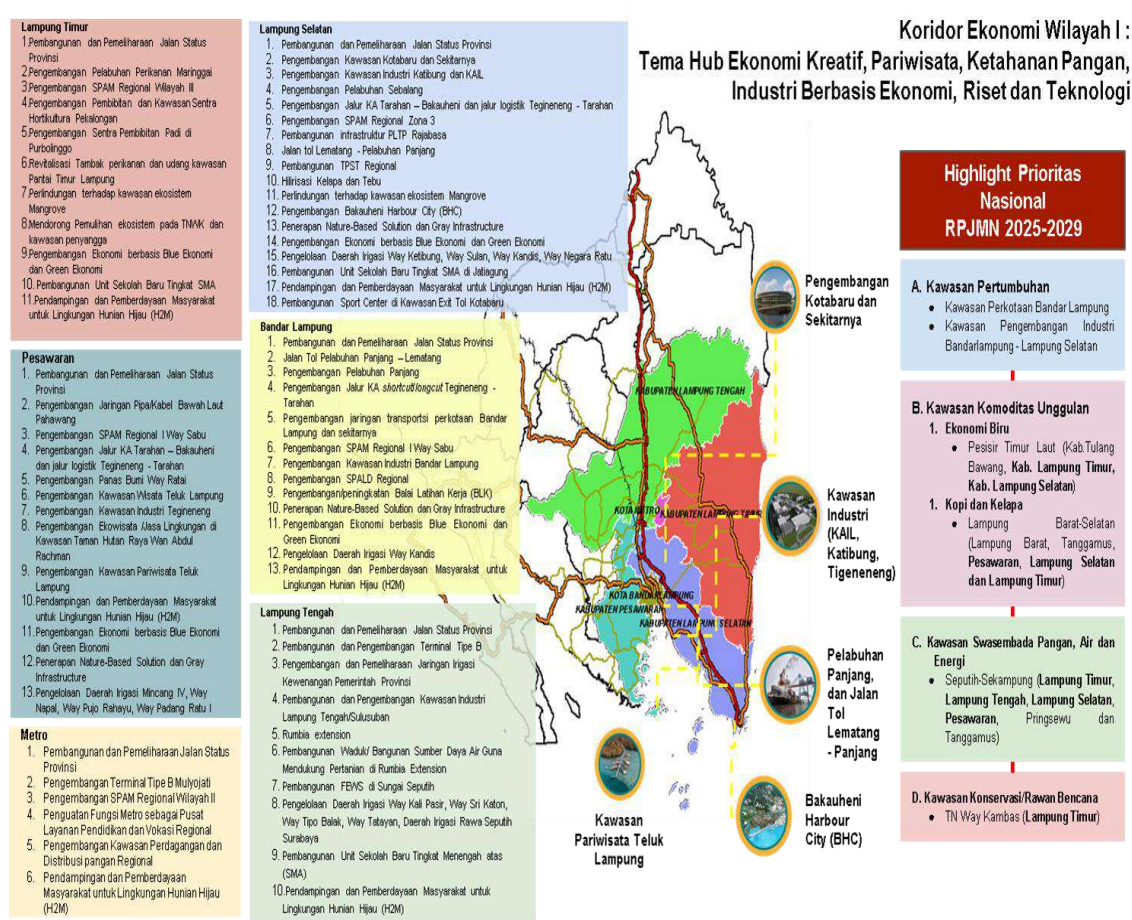
NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG	STRATEGI RPJMD PROVINSI LAMPUNG	OPD PENDUKUNG
			pertumbuhan ekonomi dan industri. 3. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung.	
KONEKTIVITAS DAN KAWASAN				
13	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Mendorong terealisasinya pengembangan infrastruktur konektivitas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2. Mendorong pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang. 3. Mendorong pengembangan jalur kereta api sejajar dengan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).	• Dinas DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI • Dinas Perhubungan • Biro Administrasi Pembangunan
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
14	• Pembangunan 3 Juta Rumah	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, kawasan permukiman, dan kawasan kumuh 2. Mendorong kerjasama dan investasi pengembangan kawasan Kotabaru (pada zona perumahan, zona perdagangan dan bisnis, zona pendidikan, city centre, dan forest park). 3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan Kotabaru Lampung (Bandar Negara)	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya
PROVINSI LAMPUNG				
15	• Bioethanol (Berkas Tebu)	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	1. Mempercepat pembangunan energi berkelanjutan 2. Mendorong pengembangan Energi Bioetanol berbasis tebu dan komoditas agro lainnya.	• ESDM • Dinas KPTPH • Dinas Perkebunan • Dinas Perindag

3.4.4. Keselarasan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka memastikan konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, diperlukan keselarasan arah kebijakan kewilayahan dalam dokumen RPJMD dengan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini menjadi krusial untuk mendorong sinergi kebijakan lintas wilayah serta penguatan peran daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pada sub bab ini menyajikan pemetaan keterkaitan dan konsistensi antara kebijakan kewilayahan yang diusung dalam RPJMD dengan arah pembangunan kewilayahan nasional, mencakup struktur ruang, pengembangan pusat pertumbuhan, konektivitas antarwilayah, dan strategi pengurangan ketimpangan antar daerah. Pemetaan yang disampaikan sudah terbagi menjadi tiga klaster wilayah sebagai berikut

Gambar 3. 3 Keselarasan Rencana Pembangunan Pada RPJMN-RPJMD Prov.Lampung 2025-2029

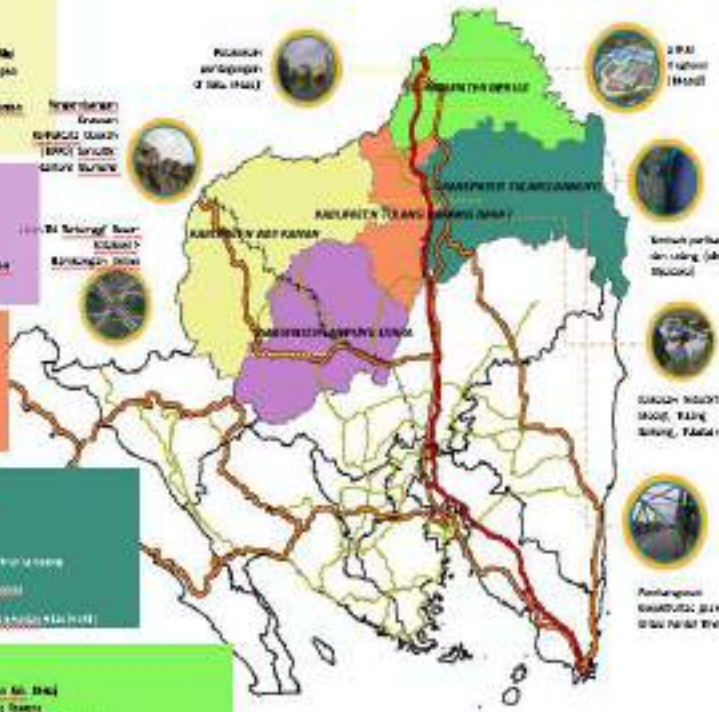


Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah I

1. Prädisposition der Patienten an das Glukose Intox
2. Prädisposition des Patienten an das Glukose Intox
3. Prädisposition des Patienten an das Glukose Intox
4. Prädisposition des Patienten an das Glukose Intox
5. Prädisposition des Patienten an das Glukose Intox

1. Fortsetzung des Frankfurter Adels (Graf Pückler)
2. Der geistreiche Wiener Adels (Graf Uexküll)
3. Der geistreiche Leipzig (Graf v. Moltke)
4. Der geistreiche Berlin (Graf v. Moltke)
5. Der geistreiche Köln (Graf v. Moltke)

- 1. Prüfung nach dem Kollisionsprinzip (Güter Recht)
- 2. UNIDIT: Abgrenzung des materiellen Strafrechts (Kriminalrecht)
- 3. Hauptkriterium: System des Recht des Strafrechts (Kriminalrecht)
- 4. UNIDIT: das Strafrecht
- 5. Strafrecht des UNIDIT: Strafrecht des UNIDIT
- 6. Strafrecht des UNIDIT: Strafrecht des UNIDIT

[illegible][illegible][illegible]

4. *Harpori* Cirs - *Resist* Timur Laut
(Kab. Taling, Bawang, Kab. Lampung
Timur, Kab. Lampung Selatan)

- Mien lü - Taling la xang (və b, mənq)
və b, mənq mənq, və b, Taling
mə nənq, və b, Taling mə nənq mə nənq,
və b, lə nənq ura va)

Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah II

[illegible][illegible]

LEARNING OBJECT

1. Pengetahuan dan Penguasaan Aspek Dasar Psikologi
2. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
3. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
4. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
5. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
6. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
7. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
8. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
9. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
10. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
11. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi
12. Pengetahuan dan Penguasaan Teori dan Konsep Dasar Psikologi

- 1. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. Honorar, GEMA)
- 2. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)
- 3. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)
- 4. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)
- 5. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)
- 6. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)
- 7. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)
- 8. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)
- 9. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)
- 10. Produktions- und Vertriebskosten (z.B. GEMA, Honorar)



- B. Kerusakan Korosi dan Unggulan
 - a. Kopid dan Reptop
 - Lemparan Solder Selen (Lemparan Bismut, Tembaga, Perak, Nikel, Kadmium, Lemparan Solder tidak Lemparan Timah)

2. Negeri-negeri dalam Pegunungan Dieng (Tengger)
- Sepuluh kelompok (Jampung, Timor,
Jampung Tengah, Lampung, Sekeloa,
Rokan, Pongkor, dan Tengger)

- Pesisir (Biot. Lampung (Perikanan Nelayan))

- TTY BLAT System Solution
- 6246622 / 62462 / 6571232 / 910081000

Peta Rencana Pembangunan Koridor Ekonomi Wilayah III

3.4.5. Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Untuk mencapai Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” maka Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung menciptakan 7 (tujuh) program unggulan yang dilaksanakan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Program unggulan tersebut berasal dari 3 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 3 program prioritas berdasarkan visi dan misi Gubernur serta kebijakan prioritas sesuai permasalahan utama Pembangunan yaitu Program Kemantapan Jalan Provinsi dan dukungan kemantapan jalan di desa serta program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan. Tujuh program unggulan tersebut, didukung oleh program perangkat daerah dan diturunkan ke Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

A. TIGA PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)

Langkah awal menuju Lampung Maju untuk mencapai Indonesia Emas harus diwujudkan dengan 3 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Program Terbaik Cepat (PHTC) terdiri dari:

1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes /Koperasi
2. Menyediakan Pupuk Organik Cair (POC) melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik Cair (POC) yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal

B. PROGRAM UNGGULAN

Visi dan Misi Gubernur akan dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program unggulan yang merupakan program yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Program Unggulan tersebut adalah:

Tabel 3. 9 Program Unggulan Daerah

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
1.	Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Jumlah Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	66	200	334	468	602	602	1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura 2) Dinas Peternakan dan Keswan 3) Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dinas KPTPH : Peningkatan Produksi bahan pangan dan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan,Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	❖ PEMERINTAH PUSAT (BGN) ❖ PEMERINTAH KAB/KOTA ❖ BULOG ❖ PLN ❖ BPOM ❖ SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI ❖ POSYANDU ❖ KANWIL KEMENTERIAN AGAMA ❖ DINAS PENDIDIKAN ❖ DINAS KESEHATAN ❖ DINAS PERHUBUNGAN ❖ DINAS BINA MARGA BINA KONSTRUKSI ❖ BAPPEDA ❖ BPKAD
		Prevalensi Stunting	13,2	12,62	11,77	11,3	10,83	10,36	4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5) Dinas Koperasi dan UMKM 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi 7) Dinas PKPCK 8) Dinas PPPA 9) Dinas Perkebunan 10) Dinas Pendidikan 11) Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi 12) Dinas Sosial	2 Dinas peternakan dan Kesehatan hewan : kampanye gizi produk peternakan dan Fasilitasi UMKM Pendukung Makan Bergizi , Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 3 Dinas kelautan dan perikanan : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Jumlah Volume Ekspor Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.	
										4 Dinas koperasi dan UMKM : Persentase UMKM yang meningkat daya saing usahanya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, kemudahan perizinan dan fasilitasi usaha, Program	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
										Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Persentase usaha kecil yang terfasilitasi dalam peningkatan tata kelola dan manajemen usaha menuju skala menengah, Program Pengembangan UMKM Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.	
										5 Dinas PMDT : Pembinaan dan pengawasan Bumdes, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan desa, untuk kegiatan pembinaan pengawasan Bumdes Program administrasi pemerintah desa.	
										5 Dinas Perkebunan : Pembibitan Tanaman Perkebunan, Peremajaan Tanaman Sawit, Peremajaan tanaman tebu, Intensifikasi tanaman lada, Rehabilitasi Lada, Intercropping tanaman lada pada kebun kopi, Peremajaan Lada, Pasca Panen Kakao, Hilirisasi Kelapa (Pengolahan Kelapa) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Demplot lada organic Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
										Pertanian,Peremajaan Kelapa Dalam, Pengendalian OPT tanaman lada, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Pembinaan, pengawalan, dan pemantauan harga Program Penyuluh Pertanian.	
										6 Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi : Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk memperlancar distribusi makan bergizi gratis.	
										7 Dinas PKPCK : penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak	
										8 Dinas Pendidikan : Menentukan target penerima manfaat (misalnya, siswa dari keluarga kurang mampu), Memastikan makanan bergizi gratis didistribusikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan siswa, edukasi Kesehatan reproduksi remaja dan pemberian tablet tambaha darah rematri	
										9 Dinas Kesehatan : Memastikan standar kebersihan dan kesehatan makanan yang diberikan, memastikan gizi makanan yang diberikan sesuai standar, pelayanan kesehtan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak	
										10 Dinas Perindag : Program Perencanaan dan	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
										pembangunan Industri pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
										11 Dinas PPPA : Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK,	
										12 Dinas Sosial : Pemenuhan kebutuhan permakanaan didalam Panti, sesuai dengan Standar Gizi Minimal	
										13 Bappeda : Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
2.	Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi	Persentase BUMDes berkembang dan maju	35,47	37,94	40,40	42,87	45,33	47,80	1) Dinas PMDT 2) Dinas KPTPH 3) Dinas Koperasi dan UMKM 4) Dinas Perindag 5) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6) Dinas Pternakan 7) Dinas Kominfotik 8) Dinas Kelautan dan Perikanan 9) Dinas Tenaga Kerja 10) Dinas PKPCK	Meningkatkan Kerjasama antar Koperasi, BUMDes dan kelompok tani dan penyuluh pertanian yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas UMKM pada bahan baku produk unggulan lokal.	❖ Pemerintah Pusat ❖ Pemkab/ Pemkot ❖ PERBANKAN ❖ OJK ❖ BI ❖ BIRO PEREKONOMIAN ❖ PERGURUAN TINGGI ❖ BPKAD
										1 Dinas Koperasi : Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		Persentase Koperasi Yang Berkualitas	24,11	25,59	27,08	28,57	30,05	32,04		2 Dinas Perindag : Program Pengembangan Ekspor, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program perencanaan dan pembangunan industri	
		Persentase Desa Mandiri	21,42	23,96	24,37	24,98	25,22	25,45		3 Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi: • Pembinaan dan pengawasan Bumdes, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan desa, untuk kegiatan pembinaan	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
										pengawasan Bumdes Program administrasi pemerintah desa. • Memberikan pelatihan dan Pendidikan untuk pelaku usaha lokal/ UMKM dalam meningkatkan produksi yang berkualitas sesuai standar • Peningkatan Mutu Profesionalisme, Tata Kelola, Koneksi/Networking, dan Modal BUMDes	
										4 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan , Program Penyuluhan Pertanian	
										5 Dinas Perkebunan , Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
										6 Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif , Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
										7 Dinas KPTPH , Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
										8 Dinas Perikanan : Melakukan pendampingan teknis dalam budidaya ikan, pengelolaan kolam, hingga	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
											pemasaran hasil perikanan, Mendorong BUMDes untuk mengembangkan usaha pengolahan ikan, seperti abon ikan, kerupuk ikan, atau nugget ikan. 9 Dinas Tenaga Kerja : Mengadakan pelatihan kerja gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. 10 Dinas PKPCK : Penyediaan jalan lingkungan, saluran drainase, dan penerangan jalan di kawasan permukiman, melalui Program Pengembangan Permukiman, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
3.	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Indeks Ketahanan Pangan	83,07	83,58	84,09	84,6	85,11	85,62	1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Dinas Peternakan dan Keswan 3) Dinas Kelautan dan Perikanan 4) Dinas Perindag 5) Dinas PSDA	1	Dinas KPTPH : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyuluhan Pertanian	❖ BULOG ❖ BUMD ❖ BUMDES ❖ PERGURUAN TINGGI ❖ Dinas Koperasi UKM ❖ Dinas PMDT ❖ BPKAD

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
		Prevalensi ketidacukup an konsumsi pangan	8,5	7,56	6,63	5,69	4,75	3,81	6) Dinas Koperasi dan UMKM 7) Dinas Perkebunan 8) Dinas PMDT	2	Dinas Kelautan dan Perikanan : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	
										3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
										4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air : Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
										5	Dinas Koperasi UKM : Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan Ksp / Usp Koperasi,Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi,Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm), Program Pengembangan UMKM	
										6	Dinas Peternakan dan Keswan : 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
										7	Dinas Perkebunan : Program Penyuluh Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	❖ Pemerintah Pusat ❖ Pemkab/ Pemkot ❖ Akademisi ❖ Perguruan Tinggi ❖ BPKAD
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,10	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura 2. Dinas PMDT 3. Dinas Koperasi	1	Dinas KPTPH : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyuluhan Pertanian Penentuan Lokus Pembangunan Unit Pengolahan pupuk organik terutama pupuk organik cair.	
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	0,70	0,74	0,78	0,82	0,86	0,90		2	Dinas KPTPH : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyuluhan Pertanian Optimalisasi Potensi bahan baku pupuk organik terutama pupuk organik cair	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
											dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk budidaya komoditas unggulan setempat.	
4.	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	35,22	36,6	37	37,4	37,8	36,6	1) Dinas ESDM 2) Dinas Kehutanan 3) Dinas LH 4) Dinas Perindag 5) Bappeda 6) Biro Perekonomian 7) Dinas PKPCK	1	Dinas ESDM : Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Penyusunan roadmap pengembangan energi baru terbarukan, Inventarisasi Energi Baru terbarukan, review RUED, Fasilitasi Pemanfaatan Energi baru Terbarukan,	❖ Pemerintah Pusat ❖ Pemkab/ Pemkot ❖ PLN ❖ Pertamina ❖ Perguruan Tinggi /Akademisi ❖ Investor ❖ Akademisi ❖ BUMD ❖ BBWS ❖ FORUM CSR ❖ BRIN ❖ Dinas PSDA ❖ BALITBANGDA ❖ DINAS PKPCK ❖ BPKAD
										2	Dinas Kehutanan : Pengelolaan kawasan hutan yang berada di atas cadangan panas bumi, Program Pengelolaan Hutan	
										3	Dinas Lingkungan Hidup : Izin Lingkungan serta Regulasi dan pengawasan dampak lingkungan dari pengembangan EBT, Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
										4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Fasilitasi pengembangan industri pengolahan bioenergi dan produk energi baru terbarukan, Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
										5	Bappeda : Perencanaan strategis dan penganggaran	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
											program EBT, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
										6	Biro Perekonomian : Koordinasi kebijakan ekonomi untuk mendukung investasi energi hijau, Program Perekonomian dan Pembangunan	
										7	Dinas PKPCK : Penyediaan ruang dan regulasi tata ruang untuk pengembangan infrastruktur EBT, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
5	Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal	INFLASI	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 3) Biro Perekonomian 4) Dinas Perhubungan 5) Dinas Kelautan dan Perikanan 6) Dinas Peternakan		- Peningkatan akses petani, kelompok tani, dan masyarakat terhadap pasar lokal, dengan ketersediaan lapak, mobilitas produksi, dan fasilitasi pemerintah terhadap asosiasi pedagang pasar untuk menjamin suplai produk lokal - Pemerintah Kabupaten Kota perlu melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan pangan melalui pemantauan harga dan stok bahan pokok. Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga untuk menggerakkan perekonomian daerah yang berpusat pada produk lokal	- Pemerintah Pusat - Pemkab/ Pemkot - PLN - Pertamina - Perguruan Tinggi /Akademisi - Distributor - Akademisi - BUMD - Bank Indonesia - BPKAD

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
									dan Kesehatan Hewan 7) Dinas Perhubungan 8) Satpol PP 9) Dinas Kominfo	- Monitoring informasi harga pasar dan bazar produk pertanian dan peternakan dan pelaksanaan pasar lelang komoditas bagi produsen/ pelaku usaha/IKM dan Buyer Lokal untuk memotong rantai distribusi - Meningkatkan Kerjasama antar Koperasi, BUMDes dan kelompok tani dan penyuluh pertanian yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas UMKM pada bahan baku produk unggulan lokal - Memberikan pelatihan dan Pendidikan untuk pelaku usaha lokal/ UMKM dalam meningkatkan produksi yang berkualitas sesuai standar	
										1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Dukungan Pengendalian Inflasi melalui pelaksanaan pasar murah, dan fasilitas pasar Lelang, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.	
										2 Biro Perekonomian: Koordinasi kebijakan ekonomi untuk mendukung stabilisasi harga pangan, Program Perekonomian Masyarakat.	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
										3 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura: Pasar Mitra Tani merupakan salah satu cara untuk memotong rantai distribusi, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (TPID), Perlindungan Produsen dan Konsumen, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 4 Dinas Perhubungan: Pengendalian inflasi melalui 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif), Program Pembinaan, pengawalan dan pemantauan harga 5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan: Pembinaan, pengawasan dan pendampingan bagi pelaku usaha peternakan, Program Penyuluhan Peternakan. 6 Dinas Kelautan dan Perikanan: Peningkatan Produksi Perikanan untuk mendukung ketersediaan produk perikanan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program	

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
											Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. 7 Dinas Perhubungan: Fasilitasi terhadap kelancaran distribusi, Program Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8 Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 9 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik: Penyebarluasan informasi, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	
6	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah	72,99	73,63	74,28	74,92	75,56	76,20	Dinas Pendidikan	1	Pengelolaan Pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kopetensi pendidik dan tenaga pendidik, penanganan ATS, pengembangan sekolah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri, Menyelenggarakan sertifikasi pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah vokasi, penguatan Literasi dan numerasi, Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	❖ Pemerintah Pusat ❖ Pemkab/ Pemkot ❖ CSR ❖ Non Government Organization (NGO) ❖ BPKAD



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
7	Kemantapan Jalan Provinsi dan dukungan kemantapan Jalan di Desa	Tingkat Kemantapan Jalan	78,00	80,88	82,33	84,75	87,95	91,79	1. Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi 2. Dinas Pkpck	1 2	Program Penyelenggaraan Jalan Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU)	❖ Pemerintah Pusat ❖ Pemkab/Pemkot ❖ Pemerintah Desa ❖ Lembaga Keuangan / Bank ❖ Korporasi (CSR) ❖ BPKAD



PERDA

**RPJMD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025-2029**

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



**BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh semua perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdistributasi di Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Untuk dapat mengukur ketercapaian program perangkat daerah maka disajikan dengan indikator program beserta target dan pagu indikatif. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Daftar Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disajikan dalam bentuk yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Lampiran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 2 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).		
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik
	01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	• Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	• Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik • Sekretariat DPRD
	01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	01.05 PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.		
	02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.02 PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	==	==
	02.03 PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	==	==
	02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik
	02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Program Pengaturan Pertahanan Di Wilayah	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Cipta Karya

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Pesisir , Laut Dan Pulau	
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	==	==
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	==	==
	02.10 PP: Swasembada Pangan	● Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan ● Program Penanganan Kerawanan Pangan ● Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ● Program Penyuluhan Pertanian ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ● Program Pengelolaan Sumber Daya Air	● Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura ● Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	02.11 PP: Swasembada Energi	● Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan ● Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	● Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral ● Dinas PMPTSP
	02.12 PP: Swasembada Air	● Program Pengelolaan Aspek Kegeologian ● Program Pengelolaan Sumber Daya Air ● Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ● Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	● Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral ● Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ● Dinas Kehutanan ● Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	● Program Perekonomian Dan Pembangunan ● Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	● Biro Perekonomian ● Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	02.14 PP: Ekonomi Digital	• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) • Program Pengembangan Umkm	• Badan Pendapatan Daerah • Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah • Dinas Perindustrian Dan Perdagangan • Dinas Koperasi Dan Umkm
	02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya • Dinas Lingkungan Hidup
	02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	• Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	• Dinas Kehutanan • Dinas Kelautan Dan Perikanan • Dinas Lingkungan Hidup
	02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i>	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral • Dinas PMPTSP
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	• Program Pengelolaan Hutan • Program Pengelolaan Hutan Adat	Dinas Kehutanan
	02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil • Pengelolaan Perikanan Tangkap • Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		
	03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran • Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	• Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral • Dinas PMPTSP

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata dan Ekraf
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Ekraf
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.		
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung - Biro Kesra

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan <i>Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic</i> (STEAM)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	• Diknas • Disnaker • Dispora • Dinas Koperasi UMKM
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	• Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Riset Dan Inovasi Daerah	Balitbangda
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	• Program Kepegawaian Daerah • Program Penataan Organisasi	• Bkd • Biro Organisasi
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	• Program Pengembangan Kurikulum • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan	• Dikbud • Dispora • Dinas Perpustakaan Dan Arsip

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pembinaan Perpustakaan	
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	- Dinas Kesehatan - Dinas Pppa
	04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Dinas PMDT - Dinas Ketahanan Pangan TPH - Dinas Peternakan Dan Keswan - Dinas Kelautan Dan Perikanan - Dinas PKPCK
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Dinas Kesehatan - Rsam
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Dinas Kesehatan - Rsam - Rsj
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	- Dinas Kesehatan - Rsam - Rsj
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	- Dinas PPPA - Dinas PMDT

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Masyarakat Hukum Adat	
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPPA
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
	04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPPA
	04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	- Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Penempatan Tenaga Kerja	- Dinas Sosial - Disnaker
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.		
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan - Program Pengembangan Ekspor - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	- Bappeda - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan - Dinas Ketahanan Pangan, TPH - Dinas Perkebunan - Dinas Kelautan Dan Perikanan - Dinas Peternakan & Kewan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Mineral dan Batubara	Dinas EDSM
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Bappeda - Dinas BMBK - Dinas PKPCK
	05.03 PP: Optimalisasi <i>Backbone</i> Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) - Program Pengelolaan Pelayaran - Program Pengelolaan Perkeretaapian - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	- Bappeda - Dinas BMBK - Dinas Perhubungan - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	- Program Pengendalian Izin Usaha Industri - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan - Dinas PTSP

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pengembangan Ekspor - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Pelayanan Penanaman Modal	- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan - Dinas PTSP
	05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Dinas PTSP - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan - Bappeda
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.		
	06.01 PP: Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi	- Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pengelolaan Profil Kependudukan - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	- Bappeda - Diskominfo - Disdukcapil - Dinas Sosial
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Hubungan Industrial - Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	- Dinas Tenaga Kerja - Dinas Pemuda Dan Olahraga - Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Dinas PKPCK - Bappeda

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Bukan Kewenangan Provinsi	
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	- Program Pengembangan Perumahan - Program Pengembangan Permukiman - Program Kawasan Permukiman	Dinas PKPCK
	06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMDT
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.		
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol
	07.02 PP: Reformasi Hukum	- Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	- Biro Hukum - Inspektorat
	07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	- Program Penataan Organisasi - Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum - Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Biro Organisasi - Biro Hukum - Inspektorat

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan <i>Advocaat General</i>	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
	07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Lampung
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Biro Pem Otda
	07.10 PP: Pemerintah Digital	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Badan Pendapatan Daerah Lampung - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	07.15 PP: Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	07.16 PP: Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.		
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penanggulangan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air	- Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kehutanan - Dinas Perhubungan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
			• Dinas Perikanan dan Kelautan • Dinas Kesehatan
	08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2025

4.1.3 Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan daftar Kegiatan Prioritas Utama (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan staftehotders lainnya.

Sebagai dukungan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) maka Provinsi Lampung melakukan keselarasan dengan program perangkat daerah pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3 Dukungan Program pada Kegiatan Prioritas Utama (RPJMN Lampiran 1)

PRIORITAS NASIONAL (PN)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) PADA RPJMN	NOMENKLATUR PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
PN 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
PN 2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Penyediaan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

PRIORITAS NASIONAL (PN)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) PADA RPJMN	NOMENKLATUR PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Dinas PMPTSP
	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penguatan implementasi Transisi Energi Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah partisipasi para pihak dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Lembaga)	Dinas Kehutanan
	Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (AIR)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang di Bangun	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (1 Dokumen)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Ketersediaan bangunan MCK pada daerah rawan sanitasi	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya ketersediaan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

PRIORITAS NASIONAL (PN)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) PADA RPJMN	NOMENKLATUR PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Dinas Kehutanan
	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Dinas Kehutanan
	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	Dinas Kehutanan
	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Data dan Informasi Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Kelautan dan Perikanan
PN 3	Pembangunan infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

PRIORITAS NASIONAL (PN)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) PADA RPJMN	NOMENKLATUR PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
PN 4	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembinaan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitasi sekolah Pengadaan alat Praktek dan Peraga Peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan biaya personil peserta didik menengah dan kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitasi sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, <i>in-service training</i>), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan biaya personil peserta didik menengah dan kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Pengembangan Riset dan Inovasi untuk Percepatan Pembangunan, Indeks Inovasi Daerah dan Lomba Anugrah Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

PRIORITAS NASIONAL (PN)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) PADA RPJMN	NOMENKLATUR PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya identifikasi faktor penyebab kematian ibu dan anak	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Penurunan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Menurunnya Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Dinas Kesehatan
	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Cakupan Penemuan Kasus TBC	Dinas Kesehatan
	Pemberian Makan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya kegiatan Makan Bergizi Gratis	Dinas Kesehatan
	Penguatan Ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Dinas Kesehatan
	Eliminasi penyakit kusta & <i>Schistosomiasis</i>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Menurunnya kasus penyakit kusta & <i>Schistosomiasis</i>	Dinas Kesehatan
	Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Integrasi Layanan Primer Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terbangunnya RSUD Kab/Kota	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL (PN)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) PADA RPJMN	NOMENKLATUR PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Terpenuhinya pemerataan SDM kesehatan	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Perlindungan, Pemeliharaan dan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga
PN 5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Dokumen Hilirisasi Kelapa Sawit	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Unit Pengolahan VCO	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Dokumen Hilirisasi Komoditas Unggulan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
PN 6	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran Melalui Kartu Kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Dinas Sosial
	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Dinas Koperasi dan UKM

PRIORITAS NASIONAL (PN)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) PADA RPJMN	NOMENKLATUR PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan UKM
	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
PN 7	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep <i>Total Reward</i> Berbasis Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Kinerja ASN	Badan Kepegawaian Daerah
	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pemerintahan Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
PN 8	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS NASIONAL (PN)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) PADA RPJMN	NOMENKLATUR PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
			Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	
	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Perlindungan, Pemeliharaan dan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	PROGRAM KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU2 KECIL PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Dilegalisasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

4.1.4 Program perangkat daerah mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Sebagai upaya mewujudkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengintegrasikan program-program perangkat daerah yang secara langsung mendukung tematik pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Tematik pembangunan tersebut meliputi antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, trantibum, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penurunan Angka Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan. Setiap perangkat daerah telah merumuskan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas capaian pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan program ini juga menunjukkan komitmen Provinsi Lampung dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel keselarasan Tematik, program perangkat daerah dan perangkat daerah yang bertanggungjawab.

Tabel 4. 4 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, trantibum, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Jiwa
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Bandar Negara Husada

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum	Pol PP
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan gedung	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Pengendalian Inflasi Penurunan Stunting	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program pengembangan ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyuluhan pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung; Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung; Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung; Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung; Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung; Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung; Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
		Program penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
3		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan sampah
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Dinas PKPCK	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
		Dinas PKPCK	Program Kawasan Pemukiman
		Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
		Program pengendalian penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Penurunan Angka Kemiskinan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program pengembangan umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Dinas Kehutanan
		Program pengelolaan ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program fasilitasi dan koordinasi hukum	Biro Hukum
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program penyelenggaraan jalan	Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan gedung	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
		Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Dinas Sosial
		Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Program penanganan bencana	Dinas Sosial
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Perkebunan
		Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian provinsi	Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Ketahanan Pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyuluhan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan	•Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) •Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup •Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) •Program Pengelolaan Persampahan •Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) •Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LH

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		• Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
		• Program Pengelolaan Hutan • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DINAS KEHUTANAN
		• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	DKP
		• Program Pengelolaan Energi Terbarukan • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	ESDM
		• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	PKPCK
		• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	DISHUB
		• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian	DINAS KPTPH, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PETERNAKAN & KESWAN
		• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	DINAS KESEHATAN
		• Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DINAS PSDA
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selama periode 2025–2029 diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Evaluasi atas kinerja tersebut menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan ukuran kinerja yang terstruktur dan sistematis melalui penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

4.2.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029. IKU tersebut mencerminkan prioritas pembangunan strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola pemerintahan, serta kualitas hidup masyarakat. Setiap indikator telah dirumuskan secara terukur dan realistis dengan target tahunan yang progresif hingga tahun 2029. Penetapan IKU ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, serta menjadi bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Lampung.

Tabel 4. 5 Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,2	5,5	6,0	6,4	6,8	7,2	
2.	Gini Rasio	indeks	0,300 - 0,301	0,274 - 0,280	0,273 - 0,279	0,272 - 0,277	0,271 - 0,275	0,270 - 0,275	
3.	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	83,07	83,58	84,09	84,6	85,11	85,62	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Persentase Desa Mandiri	persen	21,42	23,96	24,37	24,98	25,22	25,45	
5.	Kemantapan Jalan	persen	78,00	80,88	82,33	84,75	87,95	91,79	
6.	Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	26,21	26,49	26,78	27,07	27,35	27,63	
7.	Tingkat kemiskinan	persen	9,5-10,0	8,79-9,90	7,79-8,79	6,79-7,79	5,79-6,79	5,00-5,79	
8.	Tingkat inflasi	persen	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,86-4,0	3,51-3,95	3,4-3,85	3,30-3,80	3,25-3,73	3,10-3,70	
10.	Indeks Modal Manusia	indeks	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	
11.	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	53,51	53,68	53,85	54,02	54,19	54,36	
12.	Indeks Perlindungan Anak	indeks	66,22	67,94	69,66	71,38	72,1	74,64	
13.	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,400	0,395	0,390	0,385	0,380	0,375	
14.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	83,00-84,00	84,01-85,00	85,01-86,00	86,01-87,00	87,01-88,00	88,01-89,00	
15.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	62,79	64,03	66,73	69,43	72,13	74,17	
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	70,99	71,2	71,41	71,63	71,84	72,05	
17.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,97	127,94-128,94	125,91-127,91	123,88-126,88	121,85-125,86	119,82-124,83	
18.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	36	36,6	37	37,4	37,8	38,2	
19.	Indeks Demokrasi Provinsi Lampung	indeks	79-80	80-81	80-81	81-82	81-82	82-83	
20.	Indeks pembangunan Kebudayaan	indeks	58,5	59,6	60,8	61,9	63	63,5	

4.2.1. Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen utama dalam mengukur capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan. IKD dirancang untuk mencerminkan sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Seluruh indikator disusun secara kuantitatif dan ditetapkan dengan proyeksi tahunan dari tahun 2025 hingga 2030. Penetapan target IKD ini tidak hanya bertujuan sebagai instrumen pengukuran, tetapi juga sebagai pendorong bagi perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat akuntabilitas publik di setiap lini birokrasi.

4.2.1.1. Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

Indikator makro yang disajikan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah indikator makro yang digunakan sebagai sasaran utama pembangunan Provinsi Lampung dalam arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 pada Lampiran IV. Indikator makro pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025–2029, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, serta berbagai indikator makro lainnya, disajikan dengan target capaian tahun 2025-2030 pada tabel di bawah ini. Target ini menjadi acuan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Tabel 4. 6 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

NO	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	4,57	5,2	5,5	6,0	6,4	6,8	7,2
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta	51.37	55,1	60,1	65,3	70,3	75,5	80,6
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,62	9,5-10,0	8,79-9,90	7,79-8,79	6,79-7,79	5,79-6,79	5,00-5,79
5	Rasio Gini	Rasio	0,302	0,300-0,301	0,274 - 0,280	0,273 - 0,279	0,272 - 0,277	0,271 - 0,275	0,270 - 0,275
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,52 (2023)	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
7	Penurunan Intensitas emisi GRK	Persen	60,64	62,79	64,03	66,73	69,43	72,13	74,17
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,11 (metode lama)	70,99	71,20	71,41	71,63	71,84	72,05
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,19	3,86-4,0	3,51-3,95	3,4-3,85	3,30-3,80	3,25-3,73	3,10-3,70

4.2.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran strategis yang mencerminkan kinerja prioritas pembangunan daerah secara langsung dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. IKK dipilih secara selektif dari berbagai urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan, yang dinilai mampu menjadi pengungkit utama pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan IKK dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029 mengacu pada prinsip akuntabilitas berbasis hasil (*result-based management*), dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kualitas lingkungan, serta penguatan reformasi

birokrasi. IKK juga disusun dengan mempertimbangkan sinergi lintas sektor, arah kebijakan RPJMN, serta indikator pembangunan nasional dan global (SDGs).

Di dalam IKK terdapat pula Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdapat dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang ditampilkan per aspek maupun urusan pemerintahan. Melalui penetapan target IKK yang terukur dan terarah, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat Lampung, serta mendorong percepatan terwujudnya visi pembangunan daerah menuju Lampung Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Tabel 4. 7 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,07	83,58	84,09	84,6	85,11	85,62	Dinas KPTPH
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan**	%	8,5	7,56	6,63	5,69	4,75	3,81	Dinas KPTPH
3	Kapasitas Air Baku (m3/kapita)**	m3/kapita	0,44	1,18	1,92	2,66	3,41	4,00	Dinas PSDA
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan **	%	18,72	21,29	23,86	25,43	29,00	31,57	Dinas PKPCK
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Angka	70,99	71,20	71,41	71,63	71,84	72,05	DLH
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	%	5	6,8	8,6	10,4	12,2	15	Dinas PKPCK
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	%	24	28	31	34	38	42	DLH
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah**	%	14,46	17,88	21,30	24,73	28,14	31,57	Dinas PKPCK
9.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**								Dinas LH, Kehutanan, KPTPH, ESDM, PKPCK, Perhubungan, DKP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bappeda
	a. Kumulatif**	%	9,52	9,95	10,47	11,07	11,66	12,30	
	b. Tahunan**	%	15,32	17,14	19,55	22,66	23,02	25,30	
10	Indeks Risiko Bencana**	Angka	129,97	127,94-128,94	125,91-127,91	123,88-126,88	121,85-125,86	119,82-124,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	angka	0,537	0,546	0,554	0,564	0,576	0,588	Dinas LH, Dinas Kehutanan, DKP, KPTPH
12	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,48	0,54	0,6	0,66	0,72	0,78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2	5,5	6,0	6,4	6,8	7,2	BPS
2	Tingkat Kemiskinan**	%	9,5-10,0	8,79-9,90	7,79-8,79	6,79-7,79	5,79-6,79	5,00-5,79	Dinsos BPS
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	55,1	60,1	65,3	70,3	75,5	80,6	KPTPH, Disbun, Disnak, DKP, Dispar, Diskop, Disperindag, dll
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	3,86-4,0	3,51-3,95	3,4-3,85	3,30-3,80	3,25-3,73	3,10-3,70	BPS Dinas Tenaga Kerja
5	Indeks Gini	Angka	0,300 - 0,301	0,274 - 0,280	0,273 - 0,279	0,272 - 0,277	0,271 - 0,275	0,270 - 0,275	BPS
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	BPS
7	Usia Harapan Hidup**	Tahun	74,60	74,80	75,00	75,25	75,45	75,65	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	Dinkes
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**	Angka	122	109	97	86	77	75	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
9	Prevalensi Stunting**	%	13,2	12,62	11,77	11,3	10,83	10,36	Dinkes
10	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	90	90	90	90	90	90	Dinkes
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)**	%	70	72	75	78	80	85	Dinas Kesehatan
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)**	%	95	95	96	96	97	97	Dinas Kesehatan, RSAM, RSBNH
11	a)Cakupan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional (%)**	%	70	72	74	76	78	80	Dinas Kesehatan
	b) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,6	98,68	98,76	98,84	98,92	99	Dinas Kesehatan
12	Rata-Rata Lama Sekolah**	Tahun	8,45-8,50	8,55-8,60	8,65-8,70	8,75-8,80	8,85-8,90	8,95-9,00	Disdikbud
13	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	12,80-12,82	12,83-12,85	12,85-12,87	12,88-12,90	12,90-12,94	12,95-13,01	Disdikbud
14	Angka Literasi ** Angka Numerasi**	%	69,26 66,23	70,12 68,53	71,1 71,73	72 74,03	72,98 76,33	73,96 78,63	Disdikbud
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:** - Literasi membaca - Numerasi	%	30,2 20,3	32,2 22,2	34,3 24,3	36,3 26,2	38,2 28,2	40,0 30,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)**	%	7,77	8,08	8,39	8,7	9,01	9,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)**	%	72,42	73,06	73,71	74,35	75	75,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	65.77	69.03	72.79	75.55	78.81	82,07	Dinas Perpustakaan dan Arsip
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja (%)**	%	22	24	26	28	30	32	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	%	38,39	45,53	48,63	51,79	55,05	58,35	BPJS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Angka	74,33	74,70	75,08	75,45	75,82	75,9	Kemenag
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Angka	59,11	59,70	60,28	60,87	61,45	61,80	Disdikbud
24	Indeks Perlindungan Anak**	Angka	66,22	67,94	69,66	71,38	72,1	74,64	Dinas PPPA
25	Indeks Ketimpangan Gender**	Angka	0,400	0,395	0,390	0,385	0,380	0,375	Dinas PPPA
26	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,94	91,08	91,18	91,30	91,40	91,50	Dinas PPPA
27	Indeks Pembangunan Pemuda**	Angka	53.51	53.68	53.85	54.02	54.19	54,36	Dispora
28	Persentase Penurunan Konflik Sosial**	%	100	100	100	100	100	100	Badan Kesbangpol
29	Ketahanan Sosial Budaya	%	81,8	83,8	84,4	85,7	87	88,3	Badan Kesbangpol
30	Persentase Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1.	Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)	%	47,3	47	46,62	46,28	45,94	45,6	BPS
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	18,97	19,15	19,35	19,55	19,87	20,1	BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	%	1,62	1,65	1,70	1,75	1,80	1,90	BPS, Disparekraf
4.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)**	ribu orang	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00	BPS/Disparekraf
5.	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,54	0,62	0,71	0,82	0,94	1,09	BPS, Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan
6.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BPS/Disparekraf
7.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**	%	2,65	2,70	2,73	2,76	2,80	2,83	Dinas Koperasi dan UKM
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)**	%	99,55	99,57	99,59	99,61	99,63	99,65	Dinas Perindag
8.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**	%	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	Dinas Koperasi dan UKM
9.	Rasio Kewirausahaan Daerah**	%	2,90	2,93	2,96	3	3,03	3,06	Dinas Koperasi dan UKM
10.	Return on Asset (ROA) BUMD**	%	4,06	4,11	4,17	4,22	4,28	4,33	Biro Perekonomian
11.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**	%	32	33	34	35	36	37	Dinas Tenaga Kerja
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,60	70,70	70,80	70,90	71,00	71,10	Dinas Tenaga Kerja
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	55,34	56,24	57,08	58	58,89	59,5	Dinas PPPA Dinas Tenaga Kerja
14.	Indeks Inovasi Daerah**	Angka	65,7	65,9	66,1	66,3	66,5	66,7	Balitbangda

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
15.	Indeks Ekonomi Hijau**	Angka	49,53	51,81	54,11	56,61	58,65	59,34	Dinas Kehutanan, Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas KPTH, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
16.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	36	36,6	37	37,4	37,8	38,7	Dinas ESDM, Perkebunan, KPTPH, Peternakan
17.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Angka	5,85	6,09	6,33	6,57	6,80	7,04	Dinas Kominfo
18.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi**	Nilai	9,15	8,75	8,35	8	7,65	7,25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19.	Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto**	%	2,28	2,78	3,28	3,78	4,28	4,78	BPS/DPM PTSP
20.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	%	68,95	70,192	71,434	72,676	73,918	75,16	Dinas PKPCK
21.	Nilai Survey Penilaian Integritas**	Angka	67,33	68,83	69,33	70,83	71,33	73,33	Inspektorat
22.	Persentase Desa Mandiri	%	21,42	23,96	24,37	24,98	25,22	25,45	Dinas PMDT
23.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	BPKAD
24.	Tingkat Inflasi**	%	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	Biro Perekonomian
25.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB**	%	12,6	12,9	13,2	13,7	14,03	14,03	BI/OJK/Biro Perekonomian
26.	Aset Dana Pensiun/PDRB**	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	BI/OJK/Biro Perekonomian
27.	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi**	Juta Rupiah	1,7	1,85	1,95	2,1	2,2	2,3	BI/OJK/Biro Perekonomian
28.	Total Kredit/PDRB**	%	15,0	15,5	16,0	17,0	18,11	18,50	BI/OJK/Biro Perekonomian
29.	Inklusi Keuangan**	%	85,50	86,50	87,50	88,43	89,3	91,35	BI/OJK/Biro Perekonomian
30.	Persentase BUMD Berkinerja Sehat	%	67	100	100	100	100	100	Biro Perekonomian
31	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal;	Angka	114.566	114.793	115.014	115.225	115.405	115.584	Dinas Perindag
32	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	1,71	1,78	1,86	1,97	2,08	2,25	Biro Perekonomian
33	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	Biro Kesra
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum**	Angka	87,5	87,8	88	88,3	88,5	88,7	Biro Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Angka	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	Dinas Kominfo
3	Indeks Pelayanan Publik**	Angka	4,3	4,4	4,45	4,5	4,6	4,6	Bapenda, DPM PTSP, RSAM, RSJ, RSBNH
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	%	84	83	84	85	86	87	SatPol PP
5	Persentase Capaian Aksi HAM**	%	75	78	78	80	80	85	Badan Kesbangpol
6	Indeks Demokrasi Indonesia**	Angka	79,5	80,5	80,5	81,5	81,5	82,5	Badan Kesbangpol

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**	Angka	73	73,5	74	74,5	75	75,5	Satpol PP
8	Indeks Daya Saing Daerah**	Angka	3,47	3,48	3,49	3,50	3,51	3,52	Balitbangda
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/ Nilai	86,5	87	87,5	88	88,5	89	Biro Organisasi
10	Nilai Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	%	83,10	83,50	84,25	84,50	85,00	85,25	Badan Penghubung
		%	89,8	89,9	90	90,1	90,2	90,3	BAPENDA
		%	82	84	86	88	90	92	RSUAM
		%	89,5	89,75	90	90,25	90,50	91	RSJ
		Indeks	87,5	87,6	87,7	87,8	87,9	88,00	Dinas Perhubungan
		Indeks	3,44	3,44	3,44	3,46	3,46	3,46	PMPTSP
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	Pendidikan								
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah	%	72,99	73,63	74,28	74,92	75,56	76,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus	%	61,22	70,92	72,01	73,10	74,19	75,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan								
1	Prevalensi Wasting	%	6,80	6,50	6,00	5,50	5,00	4,70	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	122	109	97	86	77	75	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,46	Dinas Kesehatan
4	Notifikasi Kasus Tuberkulosis	%	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	70	72	74	76	78	80	Dinas Kesehatan
6	Laju Kematian/Net Death Rate	%	27	26	25	24	23	22	RSUD Abdul Moeloek
7	Readmission Rate (Tingkat Rawat Inap Ulang)	%	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	RS Jiwa Daerah
8	Layanan spesialis	Persen	50	60	70	80	90	100	RS Bandar Negara Husada
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan penyediaan lahan untuk kepentingan umum	persen	100	100	100	100	100	100	PKPCK
2	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	persen	100	100	100	100	100	100	PKPCK
3	Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai standar kebutuhan	Persen	41,00	43,00	45,00	47,00	49,00	51,00	PKPCK
4	Tingkat kemantapan jalan	persen	78,00	80,88	82,33	84,75	87,95	91,79	BMBK
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (pada WS kewenangan provinsi)	persen	24,75	24,99	25,35	25,70	26,06	26,42	PSDA
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir ROB pada WS kewenangan provinsi	persen	27,21	27,21	28,45	29,68	30,92	32,16	PSDA
7	Persentase luas layanan irigasi multi komoditas (pada DI kewenangan provinsi)	persen	71,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	PSDA

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	persen	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	PKPCK
2	Persentase Rumah tidak Layak huni yang tertangani	persen	66,29	66,62	66,95	67,28	67,61	67,95	PKPCK
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses air minum Aman	persen	9,84	10,20	10,56	10,92	11,28	11,64	PKPCK
4	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses sanitasi Aman	persen	2,49	2,66	2,83	3,00	3,17	3,34	PKPCK
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	82	83	84	85	86	87	Satpol PP
	Sosial								
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi yang Tertangani	%	19,71	19,93	20,04	20,14	20,15	20,15	Dinas Sosial
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	Tenaga Kerja								
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	96	96,14	96,49	96,62	96,8	96,9	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Perusahaan yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	%	34	38	42	46	50	54	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	Dinas PPPA
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	Dinas PPPA
3	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinas PPPA
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas PPPA
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	Dinas PPPA
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	76	76,54	76,94	77,44	77,85	78,24	Dinas PPPA
	Pangan								
1	Skor Pola Pangan Harapan	%	92,60	92,80	93,00	93,20	93,40	93,60	Dinas KPTPH
	Lingkungan Hidup								
1	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	persen	9,11	9,47	10,06	10,64	11,24		DLH, PKPCK
2	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	persen	94	95	96	97	98	99	DLH
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Persentase kepemilikan dokumen administrasi	persen	92,5	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	Disdukcapil

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
	kependudukan dan pencatatan sipil								
2	Persentase pemanfaatan data kependudukan	persen	84,62	89,74	92,31	94,87	97,43	100	Disdukcapil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase Desa Mandiri	persen	21,42	23,96	24,37	24,98	25,22	25,	Dinas PMDt
2	Persentase BUMDes Maju	persen	2,26	2,88	3,5	4,12	4,74	5,36	Dinas PMDt
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	Indeks	64,6	66,3	68,0	69,7	71,4	73,1	Dinas PPPA
	Perhubungan								
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,26	0,55	0,64	0,83	0,91	1,00	Dinas Perhubungan
2	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Provinsi	persen	28,92	29,58	30,56	31,54	32,52	33,50	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika								
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,10	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Indeks	-	1,5 (Base Line)	1,6	1,7	1,8	1,9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	72,00	72,25	72,50	72,75	73,00	73,25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Persentase tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	46	50	53	56	58	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	%	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	Dinas Koperasi dan UKM
	Penanaman Modal								
1	Nilai Realisasi Investasi	Trilyun Rupiah	9,85 T	10,2 T	10,5 T	10,8 T	11 T	12 T	DPMPSTSP
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Indeks (Skala 1-4)	3,495 (Indeks)	3,530 (Indeks)	3,531 (Indeks)	3,532 (Indeks)	3,540 (Indeks)	3,542 (Indeks)	DPMPSTSP
	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Persentase pemuda Aktif Dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan (%)	%	6,58	6,98	7,28	7,58	7,88	8,18	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Lampung Yang Meraih Juara 1, 2 dan 3 pada Event - event Nasional dan Internasional	Orang	85	95	97	99	100	110	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Jumlah Keikutsertaan Masyarakat Sebagai Peserta dalam event-event Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Orang	5000	8000	9000	10000	12000	15000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Statistik								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Persandian								
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	46	50	53	56	58	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Kebudayaan								

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
1	Persentase warisan seni dan budaya tak benda yang bersertifikasi nasional	%	92	94	95	97	99	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan								
1	Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	70,05	72,00	73,30	74,07	75,07	77,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan								
1	Nilai Pengawasan Kearsipan (NHPK)	Niali	87	87,84	87,92	si87,98	88	89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	86,4	86,7	87.10	87,5	88,50	90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	Kelautan dan Perikanan								
1	Nilai Tukar Nelayan	persen	110,26	110,54	110,81	111,09	111,37	111,65	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Nilai Tukar Pembudidaya	persen	97,62	98,06	98,50	98,94	99,49	100,04	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata								
1	Jumlah Wisatawan	juta orang	19,50	21,65	24,37	27,80	32,10	37,57	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan (length of stay)	hari	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Rata-rata pengeluaran wisatawan (spending money)	juta rupiah	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Pertanian								
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	persen	1,10	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	persen	0,70	0,74	0,78	0,82	0,86	0,90	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	ton	825.179	841.683	858.516	875.687	893.200	911.064	Dinas Perkebunan
4	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	1,36	1,72	2,12	2,77	3,16	3,60	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	87	88	89	90	91	92	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Jumlah	117	129	141	153	165	177	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Persentase peningkatan produksi produk olahan peternakan	Persen	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
Kehutanan									
1	Nilai Transaksi Ekonomi sektor Kehutanan	juta rupiah	326.438	329.702	332.999	336.329	339.693	343.090	Dinas Kehutanan
2	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	persen	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	Dinas Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral									
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer* (%)	persen	36	36,6	37	37,4	37,8	38,7	ESDM
2	Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)**	SBM/Rp	161	159.5	158	156.5	155	153.5	ESDM
3	Konsumsi listrik per kapita (kWh)**	kWh	680	712	745	777	810	842	ESDM
4	Rasio Elektrifikasi	persen	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	ESDM
Perdagangan									
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	Persen	11,96	12,1	12,17	12,24	12,3	12,35	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	Nilai	≤ 5	≤ 5	≤ 4,5	≤ 4,25	≤ 4	≤ 4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,97	19,15	19,35	19,55	19,87	20,1	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi									
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PMDT
2	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PMDT
IV UNSUR PENDUKUNG									
Sekretariat Daerah									
1	Indeks RB Provinsi Lampung	Indeks	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	Sekretariat Daerah
2	Skor RB General		74	75	76	77	78	78	Sekretariat Daerah
3	Skor RB Tematik		9	10	10	11	11	11	Sekretariat Daerah
4	Nilai Kematangan Organisasi Daerah		41,50	43,00	44,50	46,00	47,50	49,00	Biro Organisasi
5	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan		11,50	11,75	12	12,25	12,5	12,75	Biro Organisasi
6	Pencapaian Kinerja LPPD	skor	2,80	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah yang terlegitimasi.	%	80	80	80	80	80	80	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
8	Nilai survey kepuasan pelayanan internal dan eksternal pada Biro Administrasi Pimpinan	nilai	70	80	81	82	83	84	Biro Administrasi Pimpinan
9	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasi	%	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
10	Persentase jumlah perkara hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
11	Persentase Layanan Internal Sekretariat Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	%	95	96	97	98	99	100	Biro Umum
12	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	Biro Umum
13	Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	%	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	Biro Administrasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
									Pembangunan
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat DPRD									
1	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	%	40	45	50	55	60	65	Sekretariat DPRD
V UNSUR PENUNJANG									
Perencanaan									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks	94	94,5	95	95,5	96	96,5	Bappeda
2	Nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP Provinsi Lampung	nilai	22,75	23	23,25	23,5	23,75	24	Bappeda
3	Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi Lampung	nilai	19	19,25	19,5	19,75	20	20,25	Bappeda
Keuangan									
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	2,59	-4,61	3,17	4,65	3,50	1,76	Bapenda
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpajakan	%	89,80	89,90	90,00	90,10	90,20	90,30	Bapenda
3	Presentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKAD
4	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	66%	67%	68%	69%	70%	71%	BPKAD
5	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah Perundangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKAD
Kepegawaian									
1	Indeks sistem merit	Nilai	304,50	321,50	334,50	366,50	405,00	409,00	BKD
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi	Persen	81,73	88,46	94,23	96,15	100	100	BKD
3	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	61,54	65,38	65,38	80,77	96,15	99,23	BKD
4	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	Persen	50,00	62,50	62,50	87,50	100	100	BKD
5	Persentase Pegawai Dengan SKP Bernilai Baik	Persen	87,87	87,87	93,01	93,01	100	100	BKD
Pendidikan dan Pelatihan									
1	Penilaian Indeks Sistem Merit Pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	Nilai	13,5 (Baik)	13,5 (Baik)	18 (Sangat Baik)	18 (Sangat Baik)	18 (Sangat Baik)	18 (Sangat Baik)	BPSDM
Penelitian dan Pengembangan									
1	persentase rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan	Persen	60	61	62	63	64	65	Balitbangda
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65,7	65,9	66,1	66,3	66,5	66,7	Balitbangda
VI UNSUR PENGAWASAN									
Inspektorat Daerah									
1	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks	3,170	3,180	3,190	3,200	3,210	3,220	Inspektorat
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	Nilai	16,85	17,05	17,25	17,5	17,75	18,05	Inspektorat

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
3	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	67,33	68,83	69,33	70,83	71,33	73,33	Inspektorat
4	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3,060	3,080	3,100	3,110	3,120	3,140	Inspektorat
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	79,5	80,5	80,5	81,5	81,5	82,5	Kesbangpol
2	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	70	72	74	75	77	79	Kesbangpol

Ket: ** Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD 2025-2045



LAMPIRAN TABEL 4.1

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.104.454.670.477,95		2.277.329.607.100,00		1.979.449.823.238,94		2.034.899.289.422,73		2.075.641.577.169,18		2.117.198.710.670,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Perentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	1.492.488.370.214,95	100	1.626.989.473.700	100	1.384.543.354.083,64	100	1.423.284.611.030,41	100	1.451.750.303.251,02	100	1.480.785.309.316,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat (APM)	64,54	65,57	607.401.120.943,00	66,59	644.930.133.400,00	67,62	592.721.393.560,615	68,64	609.368.461.646,07	69,67	621.600.132.836,99	70,70	634.076.437.451,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1. Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat (APK)	89,54	90,24		90,66		91,08		91,5		92,24		92,98		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	57,04	60,50	4.565.179.320,00	62,75	5.410.000.000,00	65,20	2.185.075.594,68	67,55	2.246.216.746,25	69,65	2.291.141.081,17	71,75	2.336.963.902,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					7.258.779.820,00		7.121.392.900,00		6.982.535.561,12		7.115.934.437,26		7.213.951.168,01		7.313.928.233,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase seni budaya yang dikembangkan		35	2.300.000.000,00	45	2.215.097.900,00	55	2.215.097.900,00	65	2.215.097.900,00	75	2.215.097.900,00	85	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase satuan pendidikan yang mengadakan pembelajaran muatan lokal nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan		20	347.103.570,00	40	900.000.000,00	50	397.286.471,76	70	408.403.044,77	80	416.571.105,67	90	424.902.527,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Sumberdaya sejarah lokal yang dilakukan pembinaan		33	256.956.880,00	64	150.000.000,00	72	198.643.235,88	81	204.201.522,39	92	208.285.552,83	97	212.451.263,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilakukan pengkajian ilmiah		44	398.424.370,00	50	200.000.000,00	56	397.286.471,76	62	408.403.044,77	66	416.571.105,67	70	424.902.527,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Permuseuman		100	3.956.295.000,00	100	3.656.295.000,00	100	3.774.221.481,72	100	3.879.828.925,33	100	3.957.425.503,84	100	4.036.574.013,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH					2.111.713.450.297,95		2.284.451.000.000,00		1.986.432.358.800,06		2.042.015.223.859,99		2.082.855.528.337,19		2.124.512.638.903,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					260.016.502.564,73		213.154.000.000,00		210.335.165.774,74		215.530.406.960,46		219.841.015.099,67		224.237.835.401,65	Dinas Kesehatan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	72.337.235.328,02	100	71.977.870.210,00	100	67.747.740.473,57	100	69.643.407.094,27	100	71.036.275.236,16	100	72.457.000.740,88	Dinas Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Persentase AMC minimal 6 kali (K6) 2. Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen	1. 85,10% 2. 70%	1. 86% 2. 72%	187.069.589.536,71	1. 87% 2. 76%	140.243.866.790,00	1. 88% 2. 80%	142.000.000.000,00	1. 89% 2. 84%	145.283.137.669,44	1. 90% 2. 87%	148.188.800.422,83	1. 91% 2. 90%	151.152.576.431,28	Dinas Kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	43,48%	45%	331.769.700,00	45%	650.263.000,00	45,5%	325.267.259,49	46%	334.368.644,75	46%	341.056.017,64	46,5%	347.877.137,99	Dinas Kesehatan
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	100%	52.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	49.052.989,36	100%	50.425.553,44	100%	51.434.064,50	100%	52.462.745,79	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/Kota yang memiliki Posyandu siklus hidup aktif	55%	60%	225.908.000,00	65%	217.000.000,00	70%	213.105.052,33	80%	219.067.998,57	85%	223.449.358,54	90%	227.918.345,71	Dinas Kesehatan
JUMLAH					260.016.502.564,73		213.154.000.000,00		210.335.165.774,74		215.530.406.960,46		219.841.015.099,67		224.237.835.401,65	Dinas Kesehatan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					560.626.191.269,77		514.619.000.000,00		528.853.665.322,60		543.651.653.175,48		554.524.686.238,99		565.615.179.963,77	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	558.126.191.269,77	100	512.119.000.000,00	100	520.495.348.526,32	100	535.227.347.721,86	100	545.931.894.676,30	100	556.850.532.569,82	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80%	82%	2.500.000.000,00	84%	2.500.000.000,00	86%	2.358.316.796,28	88%	2.424.305.453,62	90%	2.472.791.562,69	92%	2.522.247.393,95	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Layanan Sub Spesialis	35%	-	-	-	-	50%	6.000.000.000,00	55%	6.000.000.000,00	60%	6.120.000.000,00	65%	6.242.400.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
JUMLAH					560.626.191.269,77		514.619.000.000,00		528.853.665.322,60		543.651.653.175,48		554.524.686.238,99		565.615.179.963,77	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

RUMAH SAKIT JIWA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					64.003.714.947,17		61.137.000.000,00		57.085.818.417,69		58.683.151.107,07		59.856.814.129,21		61.053.950.411,79	Rumah Sakit Jiwa
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	51.554.425.077,58	100	50.074.515.088,20	100	47.069.642.509,16	100	48.386.710.053,10	100	49.354.444.254,16	100	50.341.533.139,24	Rumah Sakit Jiwa
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88,8	89	11.762.444.169,59	89,25	10.821.608.811,80	89,5	9.840.084.355,32	89,75	10.115.422.238,58	90	10.317.730.683,35	90,5	10.524.085.297,02	Rumah Sakit Jiwa
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Sesuai Standar	100	100	686.845.700,00	100	240.876.100,00	100	176.091.553,21	100	181.018.815,39	100	184.639.191,70	100	188.331.975,53	Rumah Sakit Jiwa
JUMLAH					64.003.714.947,17		61.137.000.000,00		57.085.818.417,69		58.683.151.107,07		59.856.814.129,21		61.053.950.411,79	Rumah Sakit Jiwa

RUMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.211.360.638,00		2.000.000.000,00		1.142.708.855,58		1.174.683.280,40		1.198.176.946,02		1.222.140.484,93	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	749.603.638,00	100	700.000.000,00	100	642.335.932,48	100	660.309.296,29	100	673.515.482,22	100	686.985.791,86	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	90	90	420.720.000,00	95	1.200.000.000,00	95	400.298.338,48	100	411.499.187,29	100	419.729.171,04	100	428.123.754,46	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Sesuai Standar	16	17	41.037.000,00	19	100.000.000,00	21	100.074.584,62	23	102.874.796,82	25	104.932.292,76	27	107.030.938,61	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
JUMLAH					1.211.360.638,00		2.000.000.000,00		1.142.708.855,58		1.174.683.280,40		1.198.176.946,02		1.222.140.484,93	Rumah Sakit Bandar Negara Husada

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.053.808.369.085,89		1.691.997.000.000,00		1.001.085.590.750,67		1.005.901.350.499,02		1.021.576.539.550,84		1.032.406.308.761,86	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	52.890.118.459,89	100	56.126.264.760,00	100	59.000.000.000,00	100	63.761.000.000,00	100	66.061.000.000,00	100	66.561.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	78,08%	78,00%	998.972.851.936,00	80,88%	1.633.562.832.840,00	82,33%	937.985.369.051	84,75%	938.040.128.799	87,95%	951.415.317.851	91,79%	961.745.087.062	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	0%	5,50%	1.945.398.690,00	11,11%	2.307.902.400,00	33,33%	4.100.221.700,00	55,55%	4.100.221.700,00	77,77%	4.100.221.700,00	100%	4.100.221.700,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
JUMLAH					1.053.808.369.085,89		1.691.997.000.000,00		1.001.085.590.750,67		1.005.901.350.499,02		1.021.576.539.550,84		1.032.406.308.761,86	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					211.968.864.561,55		90.463.000.000,00		140.522.626.248,52		142.853.687.927,37		145.710.761.685,92		148.624.976.919,64	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	55.582.275.925,00	100	58.036.388.100,00	100	60.155.797.801,31	100	61.212.065.989,00	100	62.742.378.639,00	100	62.879.470.988,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Pada WS Kewenangan Provinsi)	24.69 %	24.75 %	71.849.581.241,81	24.99 %	3.647.494.600,00	25,35%	30.429.542.165,64	25.70 %	30.429.542.165,44	26.06 %	31.545.072.165,64	26.42 %	31.545.072.165,64	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Pada WS Kewenangan Provinsi)	24.86 %	27.21 %	6.454.583.680,38	27,21%	0	28,45%	2.500.000.000,00	29,68%	2.500.000.000,00	30.92 %	2.500.000.000,00	32.16 %	2.500.000.000,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Pada DI Kewenangan Provinsi)	71 %	71 %	78.082.423.714,36	71%	28.779.117.300,00	72 %	47.437.286.281,57	73 %	48.712.079.772,93	74%	48.923.310.881,28	75 %	51.700.433.766,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
JUMLAH					211.968.864.561,55		90.463.000.000,00		140.522.626.248,52		142.853.687.927,37		145.710.761.685,92		148.624.976.919,64	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					135.422.803.568,91		117.840.009.732,44		133.942.241.927,67		138.504.769.599,18		141.115.685.030,76		150.891.360.322,37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	18.101.161.805,62	100	31.532.000.640,03	100	20.242.241.927,67	100	20.577.185.674,51	100	21.206.748.468,63	100	21.688.214.839,23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	83,30	83,50	2.492.295.642,00	83,80	2.200.000.000,00	84,00	2.300.000.000,00	93,00	2.500.000.000,00	95,00	2.369.146.504,62	98,00	3.435.438.190,76	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	0	0	1.377.750.864,00	0	1.200.000.000,00	0	2.300.000.000,00	0	2.500.000.000,00	0	2.109.673.534,98	0	6.846.319.840,63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	86,12	87,72%	1.720.109.968,04	89,32%	1.550.000.000,00	90,92%	2.300.000.000,00	92,52%	2.500.000.000,00	94,12%	2.700.000.000,00	95,72%	4.100.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	0	0	-	2,5%	15.800.000.000,00	2,5%	4.600.000.000	2,5%	4.750.000.000	2,5%	5.000.000.000	2,5%	5.150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	0	0	-	2,5%	21.600.000.000,00	2,5%	30.300.000.000	2,5%	30.500.000.000	2,5%	31.000.000.000	2,5%	31.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100%	100%	80.121.804.211,00	100%	32.568.382.942,34	100%	53.489.000.000,00	100%	55.941.000.000,00	100%	57.083.000.000,00	100%	58.372.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100%	100%	24.672.564.469,00	100%	7.612.987.150,07	100%	12.511.000.000,00	100%	13.086.583.924,67	100%	13.347.116.522,53	100%	13.649.387.451,75	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	0%	2%	6.937.116.609,25	5%	3.776.639.000,00	8%	5.900.000.000,00	10%	6.150.000.000,00	15%	6.300.000.000,00	20%	6.150.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					210.486.708.156,98		36.791.990.267,56		132.370.054.862,49		137.004.860.481,98		139.951.137.652,38		135.540.798.814,05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	0%	1,33%	120.569.500,00	6,67%	206.135.000,00	32	800.000.000,00	38,67	800.000.000,00	48	800.000.000,00	57,33	800.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0%	0%		4,44%		42,22		48,89		60		73,33		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10–15 Ha yang Ditangani	0	1,86	13.360.875.883,00	3,71	9.963.064.000,00	5,57	16.596.762.840,00	7,34	16.952.611.832,00	9,28	17.167.664.069,00	11,14	17.387.017.350,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	60%	60%	197.005.262.773,98	65%	26.622.791.267,56	70%	114.973.292.022,49	75%	119.252.248.649,98	80%	121.983.473.583,38	85%	117.353.781.464,05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.651.683.586,63		1.900.000.000,00		2.494.791.784,75		2.497.892.604,93		2.500.850.457,03		2.806.867.466,17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	1	832.546.500,00	1,25	700.000.000,00	1,5	1.294.791.784,75	1,75	1.297.892.604,93	2	1.300.850.457,03	2,5	1.306.867.466,17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	0	1	1.819.137.086,63	1,25	1.200.000.000,00	1,5	1.200.000.000,00	1,75	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2,5	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
JUMLAH					348.561.195.312,52		156.532.000.000,00		268.807.088.574,91		278.007.522.686,09		283.567.673.140,17		289.239.026.602,59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					55.084.391.305,63		63.159.000.000,00		51.868.245.419,74		53.319.583.882,53		54.385.975.560,18		55.473.695.071,39	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	53.269.215.640,63	100	62.314.000.000,00	100	50.250.274.388	100	51.656.339.995,10	100	52.689.466.795,00	100	53.743.256.130,90	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Prosentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	80	82	1.815.175.665,00	83	845.000.000,00	84	1.617.971.032	85	1.663.243.887,43	86	1.696.508.765,18	87	1.730.438.940,48	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Prosentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	80	82		83		84		85		86		87		
		Proporsi Penduduk yang merasa aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		73		73		74		74		75		75		
JUMLAH					55.084.391.305,63		63.159.000.000,00		51.868.245.419,74		53.319.583.882,53		54.385.975.560,18		55.473.695.071,39	Satuan Polisi Pamong Praja

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					53.663.003.145,57		43.676.000.000,00		30.650.781.248,00		31.788.241.016,00		32.424.005.836,00		33.072.485.953,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	10.522.531.875,57	100	13.245.312.258,00	100	10.489.944.609,00	100	10.893.243.534,00	100	11.493.374.981,00	100	11.650.508.720,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatnya penangananbencana pada saat tanggap darurat, meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM sub urusan bencana (Daerah)	100 %	100 %	43.140.471.270,00	100 %	30.430.687.742,00	100 %	20.160.836.639,00	100 %	20.894.997.482,00	100 %	20.930.630.855,00	100 %	21.421.977.233,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
JUMLAH					53.663.003.145,57		43.676.000.000,00		30.650.781.248,00		31.788.241.016,00		32.424.005.836,00		33.072.485.953,00	

DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					40.634.885.146,82		46.860.000.000,00		38.331.972.862,68		39.404.549.467,50		40.192.640.456,85		40.996.493.265,98	Dinas Sosial
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	22.423.200.767,22	100%	20.564.104.351,80	100%	20.503.772.284,25	100%	21.077.493.510,16	100%	21.499.043.380,37	100%	21.929.024.247,98	Dinas Sosial
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten/Kota	100%	100%	277.970.340,00	100%	110.142.880,00	100%	260.657.415,47	100%	267.950.936,38	100%	273.309.955,11	15 Kabupaten / Kota	278.776.154,21	Dinas Sosial
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya pelayanan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Asal Lampung	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Asal Lampung yang Tertangani	100%	100%	176.808.418,00	100%	120.000.000,00	100%	168.660.680,596	100%	173.380.017,66	100%	176.847.618,01	100%	180.384.570,37	Dinas Sosial
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PPKS yang Dilayani dan di Rehabilitasi	Persentase PPKS yang Dilayani dan di Rehabilitasi di dalam panti	100%	100%	6.536.790.908,5	100%	5.193.046.691,00	100%	6.861.423.142,42	100%	7.053.414.354,68	100%	7.194.482.641,78	100%	7.338.372.294,61	Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100%	100%	626.887.470,00	100%	110.000.000,00	100%	858.636.192,12	100%	882.661.908,07	100%	900.315.146,23	100%	918.321.449,16	Dinas Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terlaksananya penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	10.330.379.143,10	100%	20.697.706.077,20	100%	9.433.498.521,50	100%	9.697.459.623,95	100%	9.891.408.816	100%	10.089.236.992,76	Dinas Sosial
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	100%	100%	262.848.100,00	100%	65.000.000,00	100%	245.324.626,32	100%	252.189.116,59	100%	257.232.899	100%	262.377.556,90	Dinas Sosial
JUMLAH					40.634.885.146,82		46.860.000.000,00		38.331.972.862,68		39.404.549.467,50		40.192.640.456,85		40.996.493.265,98	Dinas Sosial

DINAS TENAGA KERJA																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					39.445.178.687,65		33.827.000.000,00		37.209.690.972,55		38.250.864.724,62		39.015.882.019,12		39.796.199.659,51	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya kualitas layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	100	100	27.311.365.707,65	100	26.305.502.672,00	100	25.763.990.029,40	100	26.484.898.735,33	100	27.014.596.710,04	100	27.554.888.644,24	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	13,33	26,67	25.000.000,00	46,67	32.984.768,00	60	22.325.814,58	80	22.950.518,83	100	23.409.529,21	100	23.877.719,80	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	55,56	60	10.635.000.000,00	65	6.065.000.000,00	70	10.154.524.666,41	75	10.438.660.983,35	80	10.647.434.203,02	85	10.860.382.887,08	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	49	50	149.095.000,00	55	230.000.000,00	60	141.396.825,70	65	145.353.285,95	70	148.260.351,67	75	151.225.558,71	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Pekerja pada Perusahaan yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	11.524	12.400	1.104.836.980,00	13.000	968.512.560,00	13.500	919.079.367,02	14.000	944.796.358,70	14.500	963.692.285,87	15.000	982.966.131,59	Dinas Tenaga Kerja
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Terlindungnya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-hak Dasarnya	55.500	60.000	219.881.000,00	61.200	225.000.000,00	61.800	208.374.269,45	62.400	214.204.842,46	63.000	218.488.939,31	15.000	222.858.718,09	Dinas Tenaga Kerja
JUMLAH					39.445.178.687,65		33.827.000.000,00		37.209.690.972,55		38.250.864.724,62		39.015.882.019,12		39.796.199.659,51	Dinas Tenaga Kerja

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					12.742.473.920,80		12.493.000.000,00		11.960.738.061,85		12.257.093.366,70		12.474.235.234,04		12.706.319.938,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	10.784.016.120,80	100%	10.470.190.000,00	100%	10.150.425.128,37	100%	10.389.108.911,33	100%	10.565.571.089,55	100%	10.726.422.511,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	5,6%	5,7%	392.574.600,00	5,8%	350.000.000,00	5,9%	448.770.977,83	6%	461.328.151,79	6,1%	465.554.714,83	6,2%	470.965.809,12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,01%	55,34%		56,24%		57,08%		58%		58,89%		59,50%		
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	1.212.633.000,00	100%	1.202.681.900,00	100%	897.541.955,65	100%	922.656.303,58	100%	928.109.429,66	100%	932.931.618,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	100%	100%	51.385.000,00	100%	50.000.000,00	100%	54.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	29.949.300,00	100%	100.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	54.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,65%	61,78%	45.131.900,00	61,98%	100.000.000,00	62,48%	60.000.000,00	62,78%	65.000.000,00	63,20%	70.000.000,00	63,90%	86.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	226.784.000,00	100%	220.128.100,00	100%	300.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	320.000.000,00	100%	340.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75,96%	76%		76,54		76,94%		77,44%		77,85%		78,24%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					150.000.000		250.000.000		201.077.055		245.024.568		277.925.059		300.883.561	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2,21	2,2	-	2,2	25.000.000,00	2,2	30.000.000	2,19	50.000.000	2,19	65.000.000	2,18	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)		19		18,6		18,2		17,8		17,4		17		

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		67,90%	-	68,70%	25.000.000,00	69,50%	30.000.000	70,30%	50.000.000	71,10%	65.000.000	71,90%	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				9%		8,7%		8,4%		8,1%		7,8%		7,5%		
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100%	100%	150.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	141.077.055,36	100%	145.024.568,04	100%	147.925.059,40	100%	150.883.560,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
JUMLAH					12.892.473.920,80		12.743.000.000,00		12.161.815.117,21		12.502.117.934,74		12.752.160.293,44		13.007.203.499,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					15.837.511.783,84		16.306.000.000,00		14.939.948.020,45		15.357.986.475,75		15.665.146.205,262		15.978.449.129,367	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya layanan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase layanan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan aset	100	100	15.127.961.574,34	100	14.853.551.370,00	100	14.270.638.349,13	100	14.669.948.681,63	100	14.963.347.655,27	100	15.262.614.608,37	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	100%	111.446.600,00	100%	135.008.000,00	100%	109.061.620,55	100%	112.113.301,27	100%	114.355.567,30	100%	116.642.678,64	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	62,97	70,47	150.719.750,00	70,67	493.130.990,00	70,87	167.327.417,83	71,07	172.009.448,53	71,27	175.449.637,50	71,47	178.958.630,25	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,94	71,39		71,69		71,99		72,29		72,59		72,89		
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH	38%	61,44%	23.317.200,00	61,51%	23.317.200,00	61,58%	22.409.922,03	61,65%	23.036.979,71	61,72%	23.497.719,31	61,79%	23.967.673,69	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	100%	100%	43.790.299,00	100%	62.395.440,00	100%	43.325.849,26	100%	44.538.160,78	100%	45.428.924,00	100%	46.337.502,48	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	83%	94%	40.121.760,50	95%	54.501.000,00	96%	38.843.864,85	97%	39.930.764,84	98%	40.729.380,13	99%	41.543.967,74	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	25.874.300,00	100%	26.040.000,00	100%	23.903.916,83	100%	24.572.778,36	100%	25.064.233,93	100%	25.565.518,61	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku Kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	100%	21.467.600,00	100%	28.490.000,00	100%	20.915.927,23	100%	21.501.181,07	100%	21.931.204,69	100%	22.369.828,78	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	100%	100%	46.745.200,00	100%	149.360.000,00	100%	46.313.838,86	100%	47.609.758,07	100%	48.561.953,24	100 %	49.533.192,30	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	77,35%	83,89%		83,95%		84,01%		84,07%		84,13%		84,19		
2.11.10 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	33,70%	58,00%	246.067.500,00	60,00%	480.206.000,00	62,00%	197.207.313,87	64,00%	202.725.421,48	65,00%	206.779.929,91	66,00%	210.915.528,51	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH					15.837.511.783,84		16.306.000.000,00		14.939.948.020,45		15.357.986.475,75		15.665.146.205,26		15.978.449.129,37	Dinas Lingkungan Hidup

DINAS KEPEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIL					6.153.198.634,00		6.048.000.000,00		5.804.474.696,67		5.966.891.167,70		6.086.228.991,15		6.207.953.570,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	5.899.049.319,00	100%	5.748.000.000,00	100%	5.504.474.696,67	100%	5.666.891.167,70	100%	5.786.228.991,15	100%	5.907.953.570,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase pelaksanaan pendaftaran kependudukan di Provinsi Lampung	100%	100%	139.383.228,00	100%	110.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 PROGRAM PENDCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase pelaksanaan pencatatan sipil di Provinsi Lampung	100%	100%	28.398.627,00	100%	93.000.000,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	100%	35.692.460,00	100%	42.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	50.675.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JUMLAH					6.153.198.634,00		6.048.000.000,00		5.804.474.696,67		5.966.891.167,70		6.086.228.991,15		6.207.953.570,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					15.989.800.201,30		12.790.000.000,00		15.033.835.995,76		15.455.900.616,81		15.766.018.629,14		16.082.339.001,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	12.804.819.546,30	100%	10.665.000.000,00	100%	11.983.751.086,58	100%	12.320.470.512,16	100%	12.567.879.922,40	100%	12.820.237.520,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0	0	0,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	100%	2.000.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	1.886.993.940,84	100%	1.939.794.394,43	100%	1.978.590.282,32	100%	2.018.162.087,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100%	472.319.275,00	100%	385.000.000,00	100%	581.545.484,17	100%	597.817.855,11	100%	609.774.212,21	100%	621.969.696,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	100%	100%	712.661.380,00	100%	1.700.000.000,00	100%	561.545.484,17	100%	577.817.855,11	100%	589.774.212,21	100%	601.969.696,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					64.461.120,00		80.000.000,00		110.577.654,60		112.272.693,24		113.518.147,10		114.788.510,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Pengembangan kawasan transmigrasi	0%	~%	0,00	100%	0,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	100%	100%	64.461.120,00	100%	80.000.000,00	100%	60.577.654,60	100%	62.272.693,24	100%	63.518.147,10	100%	64.788.510,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
JUMLAH					16.054.261.321,30		12.870.000.000,00		15.144.413.650,36		15.568.173.310,05		15.879.536.776,24		16.197.127.511,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					18.330.988.252,21		19.902.000.000,00		18.280.292.253,69		18.763.816.470,48		19.119.092.799,89		19.481.474.655,88	Dinas Perhubungan
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	17.174.097.932,21	100,00%	17.878.500.000,00	100,00%	17.077.942.253,69	100,00%	17.199.966.470,48	100,00%	17.454.242.799,89	100,00%	17.526.974.655,88	Dinas Perhubungan
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	37,50%	37,50%	1.116.159.630,00	50,00%	1.700.000.000,00	62,50%	1.121.000.000,00	75%	1.320.000.000,00	87,50%	1.299.850.000,00	100%	1.544.000.000,00	Dinas Perhubungan
		2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	28,92%	28,92%		29,58%		30,56%		31,54%		32,52%		33,50%		Dinas Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	0 %	0%	40.730.690,00	0%	323.500.000,00	100%	31.350.000,00	100%	193.850.000,00	100%	315.000.000,00	100%	360.500.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	0 %	0 %	-	0%	-	16,67%	50.000.000,00	33,33%	50.000.000,00	50%	50.000.000,00	66,67%	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
JUMLAH					18.330.988.252,21		19.902.000.000,00		18.280.292.253,69		18.763.816.470,48		19.119.092.799,89		19.481.474.655,88	Dinas Perhubungan

DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					41.529.592.720,00		33.808.000.000,00		39.074.600.369,99		40.170.754.747,71		40.976.169.842,67		41.797.693.239,52	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	16.922.103.370,00	100	17.670.000.000,00	100	14.997.509.719,90	100	15.418.557.886,24	100	15.727.929.043,97	100	16.043.487.624,85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	100	100	15.059.081.800,00		7.268.000.000,00	100	14.714.632.252,58	100	15.127.765.153,14	100	15.431.320.456,20	100	15.740.946.865,32	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	3,50	4,10	9.548.407.550,00	4,20	8.870.000.000,00	4,30	9.362.458.397,52	4,40	9.624.431.708,33	4,50	9.816.920.342,50	4,60	10.013.258.749,35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)				1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					58.122.810,00		120.000.000,00		105.003.951,98		106.543.031,44		107.673.892,07		108.827.369,91	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,5	2,7	58.122.810,00	2,9	120.000.000,00	3,1	105.003.951,98	3,3	106.543.031,44	3,5	107.673.892,07	3,7	108.827.369,91	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					61.202.450,00		100.000.000,00		108.932.805,69		110.581.819,40		111.793.455,79		113.029.324,90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	41	46	61.202.450,00	50	100.000.000,00	53	108.932.805,69	56	110.581.819,40	58	111.793.455,79	60	113.029.324,90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
JUMLAH					41.648.917.980,00		34.028.000.000,00		39.288.537.127,66		40.387.879.598,55		41.195.637.190,52		42.019.549.934,33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH LAMPUNG																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					15.789.112.960,80		15.898.000.000,00		14.894.292.118,00		15.311.053.064,00		15.617.274.125,00		15.929.619.607,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	15.232.712.960,80	100%	14.783.000.000,00	100%	13.919.292.118,00	100%	14.196.053.064,00	100%	14.277.274.125,00	100%	14.479.619.607,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,65%	0,66%	5.600.000,00	0,67%	10.000.000,00	0,68%	10.000.000,00	0,69%	15.000.000,00	0,70%	15.000.000,00	0,71%	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5,43%	0%		9,71%	70.000.000,00	14%	65.000.000,00	18,29%	70.000.000,00	22,57%	70.000.000,00	26,86%	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	83,33%	83,81%	5.600.000,00	84,29%	30.000.000,00	84,76%	30.000.000,00	85,24%	50.000.000,00	85,71%	75.000.000,00	86,19%	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	14%	18,57%	60.000.000,00	22,86%	75.000.000,00	27,14%	75.000.000,00	31,43%	75.000.000,00	35,71%	150.000.000,00	40%	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2,00%	4%	5.600.000,00	6%	315.000.000,00	8%	220.000.000,00	10%	255.000.000,00	12%	300.000.000,00	14%	325.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	9,13%	9,14%	255.600.000,00	9,17%	475.000.000,00	9,21%	440.000.000,00	9,24%	505.000.000,00	9,27%	555.000.000,00	9,30%	630.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2. Pertumbuhan Wirausaha	50%	55%		60 peesen		65%		70%		75%		80%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalín Kemitraan dan Ekspor	31,11%	34,07%	224.000.000,00	37,04%	140.000.000,00	40%	135.000.000,00	42,96%	145.000.000,00	45,93%	175.000.000,00	48,89%	175.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
JUMLAH					15.789.112.960,80		15.898.000.000,00		14.894.292.118,00		15.311.053.064,00		15.617.274.125,00		15.929.619.607,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					16.921.537.234,86		17.590.000.000,00		15.962.538.191,95		16.409.190.000,86		16.737.373.800,37		17.072.121.277,89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya Administrasi Perkantoran	Persentase Terwujudnya Administrasi Perkantoran	100%	100%	16.785.130.004,86	100%	16.990.000.000,00	100%	15.561.068.089,95	100%	16.004.190.000,86	100%	16.351.373.800,37	100%	16.666.121.277,89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	-11,24%	2,6%	2.000.000,00			3%	150.000.000,00	3%	80.000.000,00	2%	50.000.000,00	2%	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkaun promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	3%	5%	6.366.430,00	7%	450.000.000,00	8,5 %	100.000.000,00	9%	100.000.000,00	10%	100.000.000,00	10,5%	125.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penyelesaian Izin yang Tepat Waktu kewenangan Daerah Provinsi	100%	100%	128.040.800,00	-	100%	15.470.102,00	100%	25.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi Nasional	74%	90%	-	90%	100.000.000,00	95%	100.000.000,00	95%	100.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	5%	-	7,5%	50.000.000,00	8%	36.000.000,00	9%	100.000.000,00	10%	36.000.000,00	10%	36.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
JUMLAH					16.921.537.234,86		17.590.000.000,00		15.962.538.191,95		16.409.190.000,86		16.737.373.800,37		17.072.121.277,89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					71.363.490.173,72		39.072.000.000,00		67.319.087.007,16		69.202.759.367,07		70.586.814.554,41		71.998.550.845,50	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	58.480.921.368,72	100	21.522.000.000,00	100	54.690.026.284,62	100	56.220.321.709,80	100	57.344.728.144,00	100	58.491.622.706,88	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dalam berorganisasi kepemudaan, sosial kemasyarakatan dan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan		770969	3.640.945.710,00	771739	1.000.000.000,00	772510	3.783.332.689,80	773280	3.889.195.076,43	774060	3.966.978.977,96	778420	4.046.318.557,52	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga yang berdaya saing	Presentase Atlet berprestasi yang dibina	55,87	56,11	9.211.351.350,00	58,36	16.250.000.000,00	59,61	8.818.800.397,94	61,86	9.065.561.477,09	63,11	9.246.872.706,63	65,36	9.431.810.160,76	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti organisasi kepramukaan		156618	30.271.745,00	156796	300.000.000,00	156974	26.927.634,80	157152	27.681.103,75	157330	28.234.725,82	157508	28.799.420,34	Dinas Pemuda dan Olahraga
JUMLAH					71.363.490.173,72		39.072.000.000,00		67.319.087.007,16		69.202.759.367,07		70.586.814.554,41		71.998.550.845,50	Dinas Pemuda dan Olahraga

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					15.374.927.878,85		14.898.000.000,00		14.677.426.305,43		15.088.119.074,37		15.389.881.455,85		15.697.679.084,98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	14.381.541.283,85	100%	13.981.199.000,00	100%	13.628.614.864,36	100%	14.009.960.575,73	100%	14.290.159.787,24	100%	14.575.962.982,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,00	70,05	572.965.100,00	72,00	525.647.200,00	73,30	652.725.649,32	74,07	670.989.730,41	75,07	684.409.525,02	77,12	698.097.715,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dialih mediakan	2 jenis	4 jenis	420.421.495,00	6 jenis	391.153.800,00	8 jenis	396.085.791,75	10 jenis	407.168.768,23	10 jenis	415.312.143,59	12 jenis	423.618.386,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.04 PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di bidang Perpustakaan	16%	16%	0,00	16%	0,00	16%	0,00	16%	0,00	16%	0,00	20%	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					166.035.060,00		100.000.000,00		157.247.542,79		161.647.525,96		164.880.476,48		168.178.086,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	86,00	87,00	166.035.060,00	87,84	100.000.000,00	87,92	157.247.542,79	87,98	161.647.525,96	88,00	164.880.476,48	89,00	168.178.086,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
JUMLAH					15.540.962.938,85		14.998.000.000,00		14.834.673.848,22		15.249.766.600,33		15.554.761.932,33		15.865.857.170,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					22.535.388.901,55		21.738.000.000,00		21.258.234.462,90		21.853.066.485,41		22.290.127.815,12		22.735.930.371,43	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	21.528.617.466,55	100%	20.138.000.000,00	100%	20.278.229.854,16	100%	20.845.640.120,43	100%	21.262.552.922,84	100%	21.687.803.981,30	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya Layanan Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservasi Perairan	152.096	152.096	147.815.470,00	152.096	280.000.000,00	152.096	140.304.347	168.698	144.230.238,80	168.698	147.114.843,58	168.698	150.057.140,45	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	188.722	190.609	229.271.235,00	194.421	500.000.000,00	202.015	248.721.343,22	209.993	255.680.877,88	226.737	260.794.495,44	243.481	266.010.385,35	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	175,355	180.616	273.522.560,00	186.034	280.000.000,00	191.615	295.489.459,03	197.364	303.757.624,15	203.285	309.832.776,63	209.383	316.029.432,16	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	80%	83%	65.410.000,00	83%	220.000.000,00	83%	61.648.879,94	83%	63.373.892,81	83%	64.641.370,66	83%	65.934.198,08	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	23,72	23,82	290.752.170,00	24,05	320.000.000,00	24,56	233.840.579,09	25,07	240.383.731,34	25,58	245.191.405,97	26,08	250.095.234,09	Dinas Kelautan dan Perikanan
JUMLAH					22.535.388.901,55		21.738.000.000,00		21.258.234.462,90		21.853.066.485,41		22.290.127.815,12		22.735.930.371,43	Dinas Kelautan dan Perikanan

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					16.140.309.286,88		14.402.000.000,00		15.225.584.995,37		15.651.615.930,92		15.964.648.249,55		16.283.941.214,55	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	100	100	13.721.266.496,88	100	12.562.000.000,00	100	12.858.006.528,59	100	13.217.789.653,67	100	13.482.145.446,75	100	13.751.788.355,68	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		10%	10%	107.000.000,00	13%	1.500.000.000,00	16%	100.488.860,97	19%	103.300.665,14	22%	105.366.678,45	25%	107.474.012,02	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		10%	10%	1.371.000.000,00	15%	-	20%	1.359.644.740,09	25%	1.397.689.302,63	30%	1.425.643.088,68	35%	1.454.155.950,46	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	10%	10%	219.356.000,00	12%	340.000.000,00	15%	226.861.216,43	17%	233.209.077,37	20%	237.873.258,92	22%	242.630.724,10	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	10%	10%	721.686.790,00	12%	-	15%	680.583.649,29	17%	699.627.232,11	20%	713.619.776,75	22%	727.892.172,29	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
JUMLAH					16.140.309.286,88		14.402.000.000,00		15.225.584.995,37		15.651.615.930,92		15.964.648.249,55		16.283.941.214,55	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					34.880.000,00		12.103.878.000,00		696.632.189,00		716.905.081,00		744.131.462,00		764.953.192,00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Presentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	30,30	27,00	-	32,38	10.000.000	37,50	10.000.000	43,40	10.000.000	50,00	10.000.000	55,20	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,10	92,60	20.740.000	92,80	578.000.000	93,00	396.625.732	93,20	408.459.063	93,40	424.351.161	93,60	436.504.850	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Prevalensi Ketidakkupukan Konsumsi	10,68	8,50		7,56		6,63		5,69		4,75		3,81		

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6,10	5,24	-	4,37	36.000.000	3,49	109.743.087	2,62	112.936.752	2,18	117.225.826	2,18	120.505.952	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	95,00	95,00	14.140.000	95,00	11.479.878.000	95,00	180.263.370	95,00	185.509.266	95,00	192.554.475	95,00	197.942.390	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					55.180.676.952,00		52.404.122.000,00		51.389.677.961,37		52.826.845.256,41		53.870.493.882,16		54.941.964.659,04	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi, Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	43.928.170.952,00	100	44.246.282.000,00	100	40.337.317.256,37	100	41.452.846.659,41	100	42.064.537.383,16	100	42.805.662.714,04	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,00	1,10	116.138.000	1,12	1.050.000.000	1,14	508.518.690	1,16	523.317.237	1,18	543.191.603	1,20	558.390.784	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Peningkatan Produksi Hortikultura	0,59	0,70		0,74		0,78		0,82		0,86	0,9			
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	312.872	357.350	10.698.528.000	357.350	6.360.000.000	357.350	9.718.384.266	357.350	10.001.201.730	357.350	10.381.024.013	357.350	10.671.498.065	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	98,00	98,00	60.000.000	98,10	350.000.000	98,20	148.503.602	98,30	152.825.248	98,40	158.629.194	98,50	163.067.837	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	68,68	70,50		70,60		70,70		70,80		70,90		71,00		
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	7,50	10,00	377.840.000	12,50	397.840.000	15,00	676.954.147	17,50	696.654.382	20,00	723.111.689	22,50	743.345.259	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase Kelembagaan Petani yang Dibentuk, Dioperasikan dan Dibina	25,00	30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		55,00		
JUMLAH					55.215.556.952,00		64.508.000.000,00		52.086.310.150,37		53.543.750.337,41		54.614.625.344,16		55.706.917.851,04	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman

DINAS PERKEBUNAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.911.493.546,00		17.723.000.000,00		20.669.697.304,45		21.248.061.320,23		21.673.022.546,64		22.106.482.997,57	Dinas Perkebunan
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	16.795.618.957,00	100%	15.403.453.960,00	100%	15.655.228.738,39	100%	16.093.281.643,94	100%	16.415.147.276,82	100%	16.743.450.222,36	Dinas Perkebunan
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian (%)	Meningkatnya persentase penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian (%)	100%	100%	415.403.180,00	100%	139.783.000,00	100%	407.193.036,90	100%	418.586.808,01	100%	426.958.544,17	100%	435.497.715,05	Dinas Perkebunan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Produktivitas	Meningkatnya persentase peningkatan Produktivitas (%)	100%	100%	3.655.196.210,00	100%	1.802.725.390,00	100%	3.584.125.512,59	100%	3.684.413.832,93	100%	3.758.102.109,59	100%	3.833.264.151,78	Dinas Perkebunan
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN BENCANA	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit	Meningkatnya persentase penurunan serangan hama dan penyakit (%)	100%	100%	198.343.865,00	100%	174.944.355,00	100%	194.295.154,66	100%	199.731.776,41	100%	203.726.411,94	100%	207.800.940,18	Dinas Perkebunan
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase penilaian usaha perkebunan	Meningkatnya persentase penilaian usaha perkebunan (%)	100%	100%	62.596.780,00	100%	26.519.402,00	100%	59.942.122,18	100%	61.619.377,83	100%	62.851.765,39	100%	64.108.800,69	Dinas Perkebunan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan mutu produk perkebunan	Meningkatnya Persentase peningkatan mutu produk perkebunan (%)	100%	100%	784.334.554,00	100%	175.573.893,00	100%	768.912.739,73	100%	790.427.881,11	100%	806.236.438,73	100%	822.361.167,51	Dinas Perkebunan
JUMLAH					21.911.493.546,00		17.723.000.000,00		20.669.697.304,45		21.248.061.320,23		21.673.022.546,64		22.106.482.997,57	Dinas Perkebunan

DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					25.968.575.810,45		25.046.000.000,00		24.496.851.403,32		25.182.303.984,35		25.685.950.063,72		26.199.669.064,99	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	21.648.990.240,45	100%	20.490.532.000,00	100%	20.442.622.496,00	100%	21.014.632.675,00	100%	21.434.925.328,17	100%	21.863.623.834,73	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit ternak yang berkualitas 2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu pakan untuk mendukung produktivitas 3. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan	1. Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Lampung (Satuan Ternak - ST) 2. Jumlah Produksi Pakan Ternak di Provinsi Lampung (Ton) 3. Persentase Derajat Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung (%)	1. 2.226.380 ST 2. NA Ton 3. 86%	1. 2.285.825 ST 2. 21.702.547 Ton 3. 87%	3.188.175.295,00	1. 2.346.856 ST 2. 22.266.813 Ton 3. 88%	1.343.615.400,00	1. 2.409.517 ST 2. 22.845.750 Ton 3. 89%	2.807.339.170,87	1. 2.473.851 ST 2. 23.439.740 Ton 3. 90%	2.885.892.036,57	1. 2.539.903 ST 2. 24.049.173 Ton 3. 91%	2.943.609.877,30	1. 2.607.718 ST 2. 24.674.451 Ton 3. 92%	3.002.482.074,85	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit ternak yang berkualitas 2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu pakan untuk mendukung produktivitas 3. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan	1. Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Lampung (Satuan Ternak - ST) 2. Jumlah Produksi Pakan Ternak di Provinsi Lampung (Ton) 3. Persentase Derajat Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung (%)	1. 2.226.380 ST 2. NA Ton 3. 86%	1. 2.285.825 ST 2. 21.702.547 Ton 3. 87%	6.945.790,00	1. 2.346.856 ST 2. 22.266.813 Ton 3. 88%	2.626.913.000,00	1. 2.409.517 ST 2. 22.845.750 Ton 3. 89%	208.223.236,93	1. 2.473.851 ST 2. 23.439.740 Ton 3. 90%	214.049.583,86	1. 2.539.903 ST 2. 24.049.173 Ton 3. 91%	218.330.575,54	1. 2.607.718 ST 2. 24.674.451 Ton 3. 92%	222.697.187,05	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan 2. Meningkatkan ketersediaan produk peternakan yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)	1. Persentase Derajat Kesehatan Hewan Wilayah Provinsi Lampung (%) 2. Jumlah unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH (Unit)	1. 86% 2. 107 Unit	1. 87% 2. 117 Unit	974.094.135,00	1. 88% 2. 129 Unit	501.880.600,00	1. 89% 2. 141 Unit	891.685.391,10	1. 90% 2. 153 Unit	916.635.865,02	1. 91% 2. 165 Unit	934.968.582,32	1. 92% 2. 177 Unit	953.667.953,97	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akses pasar produk peternakan bernilai tambah melalui penguatan fasilitas pengolahan dan kemitraan berkelanjutan	Jumlah Lembaga Peternakan yang Difasilitasi (Unit)	165 Unit (Kumulatif)	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akses pasar produk peternakan bernilai tambah melalui penguatan fasilitas pengolahan dan kemitraan berkelanjutan	Jumlah Lembaga Peternakan yang Difasilitasi (Unit)	165 Unit (Kumulatif)	8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
JUMLAH					25.968.575.810,45		25.046.000.000,00		24.496.851.403,32		25.182.303.984,35		25.685.950.063,72		26.199.669.064,99	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

DINAS KEHUTANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					65.411.251.366,43		64.826.000.000,00		61.618.973.232,78		63.343.149.270,87		64.610.012.256,29		65.902.212.501,41	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	64.572.182.693,43	100	62.532.616.000,00	100	60.891.869.348,63	100	62.595.700.109,47	100	63.847.614.111,66	100	65.124.566.393,90	Dinas Kehutanan
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya Penyerapan Emisi Karbon sektor Kehutanan	jumlah penyerapan Emisi Karbon Sektor Kehutanan	6.128,50	6.143,82	221.356.464,00	6.297,41	445.634.000,00	6.347,41	215.666.406,31	6.397,41	221.701.022,45	6.447,41	226.135.042,90	6.497	230.657.743,75	Dinas Kehutanan
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya Indeks Keanekaragaman Hayati	Nilai Indeks Keanekaragaman Hayati	-	2,21	286.687.209,00	2,31	702.250.000,00	2,41	191.018.817,02	2,51	196.363.762,74	2,61	200.291.037,99	2,71	204.296.858,75	Dinas Kehutanan
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya (Kelompok)	1.919	50	314.721.000,00	50	1.075.750.000,00	50	308.094.866,16	50	316.715.746,35	50	323.050.061,28	22	329.511.062,51	Dinas Kehutanan
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	6	6	16.304.000,00	6	69.750.000,00	6	12.323.794,65	6	12.668.629,85	6	12.922.002,45	6	13.180.442,50	Dinas Kehutanan
JUMLAH					65.411.251.366,43		64.826.000.000,00		61.618.973.232,78		63.343.149.270,87		64.610.012.256,29		65.902.212.501,41	Dinas Kehutanan

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					19.023.626.455,50		20.529.000.000,00		17.945.495.118,47		18.447.632.545,50		18.816.585.196,41		19.192.916.900,33	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	17.733.081.026,00	100	17.612.909.100,00	100	16.680.337.712,62	100	17.147.074.451,04	100	17.490.015.940,06	100	17.839.816.258,86	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase Pengelolaan Cekungan Air Tanah Berdasarkan Zona Konservasi Air Tanah	25	38	132.860.800,00	42	96.897.600,00	46	100.494.772,66	63	103.306.742,25	75	105.372.877,10	92	107.480.334,64	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	1. Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha di Bidang Mineral Batubara	35	40	177.708.790,00	45	277.708.790,00	50	152.536.708,51	55	156.804.876,64	60	159.940.974,17	65	163.139.793,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		2. Jumlah Produksi dan Penerimaan Negara di Bidang Mineral & Batubara	15	20		25		30		35		40		45		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat yang Bersumber dari Peralatan EBT	0	10	414.128.840,00	50	1.124.791.870,50	60	443.253.729,43	70	455.656.523,87	80	464.769.654,35	90	474.065.047,44	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	34,8	36		36,6		37		37,4		37,8		38		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,99	99,99	565.846.999,50	99,99	1.416.692.639,50	99,99	568.872.195,26	99,99	584.789.951,69	99,99	596.485.750,73	99,99	608.415.465,74	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
JUMLAH					19.023.626.455,50		20.529.000.000,00		17.945.495.118,47		18.447.632.545,50		18.816.585.196,41		19.192.916.900,33	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					18.370.321.455,80		16.235.193.500,00		17.316.129.832,81		17.800.656.830,98		18.156.669.967,60		18.519.803.366,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100	17.026.666.555,80	100	15.910.193.500,00	100	15.727.678.021,41	100	16.169.157.211,25	100	16.473.540.355,47	100	16.794.411.162,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	-	-	-	-	-	65	50.000.000	70	50.000.000	75	70.000.000	80	80.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-	-	-	-	-	75	125.355.332,78	77,5	128.862.931,98	80	131.440.190,62	82,5	134.068.994,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7,88	7,5-8	561.000.000,00	7,25-7,75	40.000.000,00	7,0-7,5	626.776.663,91	6,75-7,25	644.314.659,89	6,5-7	657.200.953,09	6,25-6,8	670.344.972,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	5,58	10	321.000.000,00	10	45.000.000,00	5,47	376.065.998,34	5,58	386.588.795,93	5,62	394.320.571,85	5,8	402.206.983,29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	17,5	386.654.900,00	18	240.000.000,00	95	284.898.483,59	100	292.870.299,95	100	298.727.705,95	100	304.702.260,07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	-	25	75.000.000,00	-	-	35	125.355.332,78	40	128.862.931,98	45	131.440.190,62	50	134.068.994,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					11.831.143.000,00		28.760.806.500,00		11.173.718.526,54		11.486.373.164,05		11.716.100.627,33		11.950.422.639,88	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	44,36	2	11.821.143.000,00	3	28.735.806.500,00	47,2	11.093.266.821,03	50,2	11.403.589.783,05	53,2	11.630.331.280,15	56,2	11.862.324.886,08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Provinsi	-	99,55		99,57		99,59		99,61		99,63		99,65		
		Ekonomi Hijau (Angka)	-	49,53		51,81		54,09		56,37		58,65		60,93		
		Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	37,442	114,566		114,793		115,014		115,225		115,405		115,584		
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	6,16	15	10.000.000,00	18	25.000.000,00	10,96	8.546.954,51	12,33	8.786.109,00	13,01	8.961.831,18	13,7	9.141.067,80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-	35	-	38	-	95	71.904.751	100	73.997.272	100	76.807.516	100	78.956.686	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH					30.201.464.455,80		44.996.000.000,00		28.489.848.359,35		29.287.029.995,03		29.872.770.594,93		30.470.226.006,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					1.021.878.290,00		1.394.000.000,00		963.965.094,02		990.938.044,55		1.010.756.805,45		1.030.971.941,55	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100%	344.878.320,00	100%	604.480.300,00	100%	230.348.811,17	100%	236.794.259,37	100%	241.530.145	100%	246.360.747	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	272.510.300	100%	676.999.970,00	100%	789.519.700,00	100%	733.616.283	100%	754.143.785	100%	769.226.661	100%	784.611.194	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	288.109.000	4 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
JUMLAH					1.021.878.290,00		1.394.000.000,00		963.965.094,02		990.938.044,55		1.010.756.805,45		1.030.971.941,55	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					94.121.234.670,00		75.694.000.000,00		88.787.075.443,58		91.271.449.004,85		93.096.877.984,95		94.958.815.544,65	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	723.419.370,00	100	723.958.000,00	100	682.420.820,41	100	701.515.809,58	100	715.546.125,77	100	729.857.048,29	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan urusan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan urusan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	98,34	98,5	93.397.815.300,00	98,65	74.970.042.000,00	98,75	88.104.654.623,17	99	90.569.933.195,27	99,35	92.381.331.859,18	99,5	94.228.958.496,36	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Indeks Zakat Nasional														Biro Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH					94.121.234.670,00		75.694.000.000,00		88.787.075.443,58		91.271.449.004,85		93.096.877.984,95		94.958.815.544,65	Biro Kesejahteraan Rakyat

BIRO HUKUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					847.389.190,00		2.135.000.000,00		799.364.863,91		821.732.093,86		838.166.735,74		854.930.070,46	Biro Hukum
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	525.574.640,00	100	832.908.615,00	100	495.788.600,48	100	509.661.386,41	100	519.854.614,14	100	530.251.706,43	Biro Hukum
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	100	100	321.814.550,00	100	1.302.091.385,00	100	303.576.263,42	100	312.070.707,45	100	318.312.121,60	100	324.678.364,03	Biro Hukum
JUMLAH					847.389.190,00		2.135.000.000,00		799.364.863,91		821.732.093,86		838.166.735,74		854.930.070,46	Biro Hukum

BIRO PEREKONOMIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					1.004.330.020,00		1.680.000.000,00			827.140.090,91		850.284.506,49		867.290.196,63		884.636.000,56	Biro Perekonomian
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	669.451.320,00	100%	1.207.866.000,00	100%	521.098.257,27	100%	535.679.239,09	100%	546.392.823,88	100%	557.320.680,35	Biro Perekonomian	
		Proporsi Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB	1,71	1,71%		1,78%		1,86%		1,97%		2,08%		2,25%			
		4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	334.878.700,00	100%	472.134.000,00	100%	306.041.833,64	100%	314.605.267,40	100%	320.897.372,75		100%
JUMLAH					1.004.330.020,00		1.680.000.000,00			827.140.090,91		850.284.506,49		867.290.196,63		884.636.000,56	Biro Perekonomian

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					971.097.702,00		1.700.000.000,00		916.062.408,58		941.694.981,98		960.528.881,62		979.739.459,26	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan urusan Pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	394.908.200,00	100%	475.000.000,00	100%	372.527.456,42	100%	382.951.241,18	100%	390.610.266,00	100%	398.422.471,32	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	100%	100%	576.189.502,00	100%	1.225.000.000,00	100%	543.534.952,16	100%	558.743.740,81	100%	569.918.615,62	100%	581.316.987,94	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
JUMLAH					971.097.702,00		1.700.000.000,00		916.062.408,58		941.694.981,98		960.528.881,62		979.739.459,26	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					503.416.865,00		1.327.000.000,00		474.886.390,64		488.174.306,56		497.937.792,69		507.896.548,55	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	339.202.000,00	100	513.000.000,00	100	319.978.309,57	100	328.931.703,39	100	335.510.337,46	100	342.220.544,21	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	100	164.214.865,00	100	814.000.000,00	100	154.908.081,07	100	159.242.603,17	100	162.427.455,23	100	165.676.004,34	Biro Administrasi Pembangunan
JUMLAH					503.416.865,00		1.327.000.000,00		474.886.390,64		488.174.306,56		497.937.792,69		507.896.548,55	Biro Administrasi Pembangunan

BIRO ORGANISASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					707.770.454,00		1.368.000.000,00		539.568.010,50		554.665.799,15		565.759.115,13		577.074.297,43	Biro Organisasi
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	367.071.904,00	100	757.508.100,00	100	346.273.540,91	100	355.962.708,23	100	363.081.962,39	100	370.343.601,64	Biro Organisasi
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	4,0 (Tinggi)	41,5 (Tinggi)	340.698.550,00	42,5 (Tinggi)	610.491.900,00	43,5	193.294.469,59	44,5	198.703.090,92	45,5	202.677.152,74	46,5	206.730.695,79	Biro Organisasi
JUMLAH					707.770.454,00		1.368.000.000,00		539.568.010,50		554.665.799,15		565.759.115,13		577.074.297,43	Biro Organisasi

BIRO UMUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					158.486.128.930,90		167.876.000.000,00		139.127.606.030,48		143.020.570.680,32		145.880.982.093,93		148.798.601.735,80	Biro Umum
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kerumahtangaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan sekretariat daerah dan pimpinan	Persentase layanan Penunjang urusan Pemerintahan	100%	100%	158.486.128.930,90	100%	167.876.000.000,00	100%	139.127.606.030,48	100%	143.020.570.680,32	100%	145.880.982.093,93	100%	148.798.601.735,80	Biro Umum
JUMLAH					158.486.128.930,90		167.876.000.000,00		139.127.606.030,48		143.020.570.680,32		145.880.982.093,93		148.798.601.735,80	Biro Umum

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

SEKRETARIAT DPRD																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.02 SEKRETARIAT DPRD					361.240.458.154,00		229.482.000.000,00		401.300.000.000,00		401.700.000.000,00		409.734.000.000,00		417.928.680.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya layanan administrasi umum DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	Persentase layanan administrasi umum DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100%	100%	157.256.432.496,00	100%	124.167.000.000,00	100%	165.907.051.133,00	100%	163.727.051.120,00	100%	168.467.051.120,00	100%	174.462.251.120,00	Sekretariat DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persentase layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	203.984.025.658,00	100%	105.315.000.000,00	100%	235.392.948.867,00	100%	237.972.948.880,00	100%	241.266.948.880,00	100%	243.466.428.880,00	Sekretariat DPRD
JUMLAH					361.240.458.154,00		229.482.000.000,00		401.300.000.000,00		401.700.000.000,00		409.734.000.000,00		417.928.680.000,00	Sekretariat DPRD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02 KEUANGAN					1.424.137.519.640,74		1.713.149.000.000,00		1.290.917.451.963,80		1.266.217.506.162,12		1.291.541.856.285,36		1.317.372.693.411,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	100%	174.552.516.038,30	100%	212.149.685.337,54	100%	144.177.022.800,98	100%	148.211.276.455,57	100%	151.175.501.984,68	100%	154.199.012.024,38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	-	20%	1.244.065.311.214,44	20%	1.493.552.426.142,46	20%	1.142.288.217.230,06	20%	1.113.429.439.308,29	20%	1.135.698.028.094,46	20%	1.158.411.988.656,35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2. Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	-	40%		40%		40%		40%						
	Meningkatnya tata kelola	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	-	100%		100%		100%		100%						

	perbendaharaan	2. Persentase Penurunan SILPA	-	0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%				
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	-	100%		100%		100%		100%						
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-	5%	5.519.692.388,00	5%	7.446.888.520,00	5%	4.452.211.932,76	5%	4.576.790.398,26	5%	4.668.326.206,22	5%	4.761.692.730,35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
JUMLAH					1.424.137.519.640,74		1.713.149.000.000,00		1.290.917.451.963,80		1.266.217.506.162,12		1.291.541.856.285,36		1.317.372.693.411,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BADAN PENDAPATAN DAERAH LAMPUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02 KEUANGAN					109.892.189.337,97		94.199.000.000,00		103.664.238.358,33		106.564.893.569,00		108.696.191.440,39		110.870.115.269,19	Badan Pendapatan Daerah Lampung
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perencanaan , Keuangan, Kepegawaian, Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga, Aset	Persentase Realisasi Kualitas Pelayanan Umum Perencanaan , Keuangan, Kepegawaian, Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga, Aset sesuai ketentuan yang Berlaku	92,41%	100%	95.542.091.037,97	100%	79.898.104.000,00	100,00%	89.597.001.213,10	100%	92.104.037.511,69	100%	93.946.118.261,93	100%	95.825.040.627,16	Badan Pendapatan Daerah Lampung
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya elastensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3,42%	6,27%	14.350.098.300,00	-4,57%	14.300.896.000,00	3,20%	14.067.237.145,23	4,68%	14.460.856.057,31	3,56%	14.750.073.178,46	1,82%	15.045.074.642,03	Badan Pendapatan Daerah Lampung
JUMLAH					109.892.189.337,97		94.199.000.000,00		103.664.238.358,33		106.564.893.569,00		108.696.191.440,39		110.870.115.269,19	Badan Pendapatan Daerah Lampung

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH LAMPUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03 KEPEGAWAIAN					20.149.737.040,94		20.096.000.000,00		19.007.785.321,72		19.539.646.958,96		19.930.439.898,14		20.329.048.696,10	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	17.975.893.050,94	100	18.482.450.740,00	100	16.957.140.204,07	100	17.431.622.222,85	100	17.780.254.667,31	100	18.135.859.760,65	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	85,577	81,73	2.173.843.990,00	88,46	1.613.549.260,00	94,23	2.050.645.117,64	96,15	2.108.024.736,11	100,00	2.150.185.230,83	100,00	2.193.188.935,45	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	55,77	61,54		65,38		65,38		80,77		96,15		99,23		Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	50,00	50,00		62,50		62,50		87,50		100,00		100,00		Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	86,03	87,87		87,87		93,01		93,01		100,00		100,00		Badan Kepegawaian Daerah Lampung
JUMLAH					20.149.737.040,94		20.096.000.000,00		19.007.785.321,72		19.539.646.958,96		19.930.439.898,14		20.329.048.696,10	Badan Kepegawaian Daerah Lampung

BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					25.628.201.573,79		22.157.000.000,00		22.760.777.214,21		23.397.652.264,57		23.865.605.309,86		24.342.917.416,06	Badan Pengembangan SDM Daerah
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	99,16%	100	19.350.729.883,79	100%	19.557.108.200,00	100%	18.254.060.522,10	100%	18.764.831.995,54	100%	19.140.128.635,45	100%	19.522.931.208,16	Badan Pengembangan SDM Daerah

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	4,19%	1,35%	6.277.471.690,00	4,40%	2.599.891.800,00	5,69%	4.506.716.692,11	6,21%	4.632.820.269,04	6,73%	4.725.476.674,42	6,98%	4.819.986.207,91	Badan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	13,91%	9,20%		39,08%		41,38%		44,83%		45,98%		48,28%		Badan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	0,23%	0,30%		0,36%		0,38%		0,40%		0,42%		0,43%		Badan Pengembangan SDM Daerah
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	2,47%	3,02%		5,39%		5,68%		5,95%		6,21%		6,56%		Badan Pengembangan SDM Daerah
JUMLAH					25.628.201.573,79		22.157.000.000,00		22.760.777.214,21		23.397.652.264,57		23.865.605.309,86		24.342.917.416,06	Badan Pengembangan SDM Daerah

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

24.342.917.416,07

IDANG URUSAN / PROGRA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					10.063.379.004		8.979.000.000,00		9.493.054.292,54		9.758.681.840,04		9.953.855.476,84		10.152.932.586,38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	9.278.952.566	100	8.479.000.000	100	8.724.116.895	100	8.968.228.611	100	9.147.593.183	100	9.330.545.047	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	60	60	784.426.438	61	368.000.000,00	62	485.653.197,70	63	492.236.198,04	64	501.150.181,62	65	509.347.351,50	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	60	60		61		62		63		64		65		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100	100		100		100		100		100		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis riset inovasi dan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif	persentase rumusan kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan	59	60		61		63		63		64		65		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	65,5	65,7	-	65,9	132.000.000	66,1	283.284.200	66,3	298.217.031	66,5	305.112.112	66,7	313.040.188,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
JUMLAH					10.063.379.003,52		8.979.000.000,00		9.493.054.292,54		9.758.681.840,04		9.953.855.476,84		10.152.932.586,38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

BADAN PENGHUBUNG																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					18.090.639.685,84		17.788.000.000,00		17.065.383.770,63		17.542.894.579,96		17.893.752.471,56		18.251.627.520,99	Badan Penghubung
5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan per	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	16.896.164.485,84	100%	16.625.574.500,00	100%	15.938.603.399,87	100%	16.384.585.483,33	100%	16.712.277.192,99	100%	17.046.522.736,85	Badan Penghubung
5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Meningkatnya pelayanan Ba	Persentase pelayanan Badan Penghubung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	1.194.475.200,00	100%	1.162.425.500,00	100%	1.126.780.370,76	100%	1.158.309.096,63	100%	1.181.475.278,56	100%	1.205.104.784,13	Badan Penghubung
JUMLAH					18.090.639.685,84		17.788.000.000,00		17.065.383.770,63		17.542.894.579,96		17.893.752.471,56		18.251.627.520,99	Badan Penghubung

INSPEKTORAT																
BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					48.606.026.666,82		38.556.000.000,00		45.851.363.635,54		47.134.342.210,91		48.077.029.055,13		49.038.569.636,23	Inspektorat
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	46.167.849.766,82	100	37.043.472.000,00	100	43.551.366.221,31	100	44.769.987.988,68	100	45.665.387.748,46	100	46.578.695.503,43	Inspektorat
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	74%	76%	2.259.933.100,00	78%	1.430.950.000,00	80%	2.131.855.275,28	82%	2.191.507.255,66	84%	2.235.337.400,77	86%	2.280.044.148,79	Inspektorat
	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Sudah Diselesaikan	80%	82%		84%		86%		87%		88%		90%		
	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai di tindaklanjuti	90%	91%		91,5%		92%		92,5%		93%		93,5%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Kriteria Nilai ≥ BB	85%	87%		89%		90%		91%		92%		93%		
	Meningkatnya Implementasi Pengelolaan Risiko	Nilai Penjaminan Kualitas Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah	3.240	3.290		3.350		3.400		3.450		3.500		3.550		
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,12	3,14	178.243.800,00	3,16	81.578.000,00	3,19	168.142.138,95	3,24	172.846.966,57	3,28	176.303.905,90	3,34	179.829.984,01	Inspektorat
	Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2.936	3.000		3.010		3.020		3.030		3.060		3.100		
	Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	1	1		2		2		3		3		3		
JUMLAH					48.606.026.666,82		38.556.000.000,00		45.851.363.635,54		47.134.342.210,91		48.077.029.055,13		49.038.569.636,23	Inspektorat

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					22.355.443.019,78		19.482.000.000,00		21.031.887.101,63		21.620.385.641,51		22.052.793.354,34		22.493.849.221,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	20.159.941.669,78	100	13.257.000.000,00	100	18.960.812.017,64	100	19.491.359.283,01	100	19.881.186.468,67	100	20.278.810.198,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Program : Indeks Harmoni Indonesia (IHH) Provinsi Lampung	0	6	1.502.837.400,00	6,2	2.850.000.000,00	6,4	1.417.666.673,00	6,6	1.457.334.761,89	6,8	1.486.481.457,13	7	1.516.211.086,27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik indikator Program : Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pendidikan Politik dan Budaya Politik bagi Masyarakat se- Provinsi Lampung	0	20%	201.773.200,00	20%	1.100.000.000,00	20%	190.338.050,64	20%	195.663.947,66	20%	199.577.226,62	20%	203.568.771,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		0	65	106.747.180,00	66	550.000.000,00	67	100.697.467,02	68	103.515.108,25	69	105.585.410,42	66	107.697.118,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan Indikator Program : Indeks Harmoni Indonesia (IHH) Provinsi Lampung	0	6	99.919.030,00	6,2	625.000.000,00	6,4	94.256.290,69	6,6	96.893.699,74	6,8	98.831.573,73	7	100.808.205,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Indikator Program : Indeks Kewaspadaan Nasional(IKN)	0	70	284.224.540,00	71	1.100.000.000,00	72	268.116.602,64	73	275.618.840,95	74	281.131.217,77	75	286.753.842,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
JUMLAH					22.355.443.019,78		19.482.000.000,00		21.031.887.101,63		21.620.385.641,51		22.052.793.354,34		22.493.849.221,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah



PERDA

**RPJMD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025-2029**

BAB V PENUTUP



**BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus menjadi acuan di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Dalam implementasinya, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung secara tahunan.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat lima pengarusutamaan pembangunan di Provinsi Lampung meliputi :

a. Gender dan inklusi sosial;

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial adalah upaya untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang sosial, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan partisipasi dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender berfokus pada integrasi perspektif gender dalam semua kebijakan dan program, sementara inklusi sosial berupaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu dimasukkan dalam dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, serta berkeadilan dan berkelanjutan.

c. Transformasi Digital



Pengarusutamaan pembangunan daerah berbasis transformasi digital merupakan langkah strategis yang tidak hanya merespon perkembangan teknologi global, tetapi juga menjadi percepatan pencapaian visi pembangunan Provinsi Lampung. Transformasi digital menuntut integrasi yang kuat antara infrastruktur TIK, tata kelola pemerintahan yang transparan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta jaminan keamanan siber untuk melindungi data dan layanan publik. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan menjadikan prinsip digitalisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Selain itu, pengembangan ekosistem digital yang inklusif dan ramah lingkungan akan memperkuat posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera yang kompetitif di tingkat nasional maupun global. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, transformasi digital di Provinsi Lampung diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

d. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon sejalan dengan komitmen nasional menuju *Net Zero Emission* 2060 atau lebih cepat. Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Lampung diarahkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pengurangan emisi dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta penguatan konservasi hutan, pesisir, dan laut. Selain itu, Pembangunan Rendah Karbon juga mencakup transisi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan (bioenergi, tenaga surya, biomassa), efisiensi energi di sektor transportasi dan industri, serta penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah dan sumber daya.

e. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Provinsi Lampung termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, abrasi pantai, dan penurunan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pembangunan berketahanan iklim diarahkan pada penguatan adaptasi sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan; pengelolaan sumber daya air terpadu; serta perlindungan ekosistem pesisir, mangrove, dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pembangunan berketahanan iklim ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap risiko iklim, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Iklim. Dengan langkah ini, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketangguhan sosial dan ekologis.

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 disusun secara teknokratik berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, yang secara politis juga diintegrasikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah; tentunya menjadi acuan oleh seluruh pelaku pembangunan daerah, termasuk lembaga-lembaga yang merepresentasikan cabang kekuasaan negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan sesuai peran masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, guna memelihara kesinambungan pembangunan diperlukan kaidah yang perlu dilaksanakan dalam periode RPJMD Tahun 2025–2029, sebagai berikut :

Pengendalian dan Evaluasi sangat krusial dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pengendalian dan Evaluasi bertujuan untuk

mewujudkan konsistensi antara RKPD sebagai implementasi dari RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, meliputi: (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah; yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi yang Terpadu antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah serta RKPD dengan Renja Perangkat Daerah; dan keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN serta RKPD dengan RKP. Pengendalian yang berkesinambungan dan partisipatif bertujuan untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan nasional



melalui mekanisme korektif sepanjang masa implementasi, yang dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Transformasi pengendalian dalam RPJMD dan RPJMN Tahun 2025–2029 akan didorong dengan sistem informasi yang terpadu secara nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sejalan dengan pengembangan ekosistem layanan terpadu bidang perencanaan pembangunan nasional, pada tahun 2024 dilakukan pengintegrasian aplikasi KRISNA yang merupakan sistem informasi perencanaan dengan aplikasi eMonev yang merupakan sistem informasi pengendalian pembangunan. Kedua aplikasi ini telah ditetapkan menjadi aplikasi umum bidang perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penetapan ini diharapkan dapat memperkuat implementasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran agar dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pelaporan. Aplikasi e-Monev memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan oleh para pelaksana pembangunan. Dengan mengedepankan semangat interkoneksi dan interoperabilitas antar layanan pemerintah, fungsi pengendalian diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Integrasi Antaraplikasi Perencanaan dan Pengendalian



Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan, aplikasi eMonev telah dan akan diintegrasikan dengan beberapa sistem lainnya, yaitu KRISNA, SAKTI, dan SIPD. Interkoneksi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi antar lembaga. Integrasi antara aplikasi e-Monev dengan KRISNA berfungsi sebagai basis data perencanaan dan mengelola inovasi pembangunan. Integrasi antara aplikasi e-Monev dengan SAKTI berperan dalam pengelolaan anggaran dan kinerja instansi pemerintah.

Integrasi dengan e-Monev memungkinkan data kinerja dan anggaran dari SAKTI dapat diakses secara real-time untuk mendukung evaluasi pencapaian program. Sementara itu integrasi antara e-Monev dengan SIPD diharapkan dapat menciptakan tata kelola data pembangunan di tingkat daerah dengan lebih baik. Selain itu, penting juga dilakukan integrasi antara SAKTI dengan SIPD, terutama dalam rangka penyelarasan badan akun standar pusat dan



badan akun standar daerah. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih menyeluruh dan memberikan gambaran tentang kontribusi daerah dalam mencapai prioritas nasional, sekaligus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.

Dengan adanya interkoneksi antara e-Monev, KRISNA, SAKTI, dan SIPD, proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian diharapkan dapat berjalan dengan lebih terintegrasi serta komprehensif. Melalui kolaborasi dan interkoneksi antar aplikasi sebagaimana disebut di atas, perencanaan dan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 diharapkan dapat dilakukan berdasarkan tata kelola data yang akurat, real-time, dan berbasis bukti terukur (*evidence-based policy*) sehingga mampu mendorong transformasi pembangunan menjadi lebih cepat. Penguatan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui Satu Data Indonesia, sementara penguatan mekanisme dan metode pengendalian dilakukan melalui internalisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian.

Dalam pengendalian RPJMN, aplikasi e-Monev berfokus pada pengendalian langsung (yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja pelaksana) dan pengendalian berjenjang (yang dilakukan oleh unit kerja pelaksana di atasnya). Dengan pendekatan berjenjang, aplikasi e-Monev memungkinkan setiap unit kerja untuk melaporkan progres pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dievaluasi di tingkat yang lebih tinggi, sehingga memudahkan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Selain itu, aplikasi e-Monev dalam pengendalian RPJMN Tahun 2025–2029 berfokus pada pengendalian operasional atau pengendalian dalam konteks manajemen pembangunan. Aplikasi eMonev berperan penting dalam pengendalian pelaksanaan RPJMD dan RPJMN dengan membagi peran antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan



Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kementerian/lembaga/daerah. Pembagian peran ini dilakukan untuk menjamin setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencapai target pembangunan.

Pendanaan Pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan Visi RPJMD 2025-2029 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan perlu didukung dengan kebijakan pendanaan pembangunan yang searah, guna memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan pembangunan dan pemanfaatannya secara optimal, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang inovatif, hingga optimalisasi peran sektor keuangan pemerintah maupun non pemerintah.

Selain melakukan efisiensi dan peningkatan kualitas belanja daerah, pendanaan pembangunan juga dapat ditempuh oleh pemerintah dengan memanfaatkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah lainnya dan peran swasta. Untuk mewujudkan pembiayaan yang memadai beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: peningkatan inovasi sumber pendanaan pembangunan seperti penguatan dan perluasan KPBU; pemanfaatan hibah dengan terarah; kerjasama antar daerah maupun kerjasama bilateral; peningkatan produktivitas asset, penerbitan obligasi



daerah; kesertaan daerah dalam investasi strategis, atau pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif dan berhati-hati; yang ditujukan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.2 TATA KELOLA DATA PEMBANGUNAN

Dalam era pembangunan berbasis digital, Tata kelola data pembangunan dilakukan agar menjadi dasar dan tolak ukur kinerja pembangunan, sehingga dapat difungsikan oleh pemerintah untuk merespon setiap dampak dari kebijakan yang telah dilakukan sekaligus merancang strategi yang lebih kuat dampaknya. Arah kebijakan kunci dari tata kelola data pembangunan adalah perkuatan kebijakan dan ekosistem satu data dengan melalui strategi antara lain; harmonisasi kebijakan yang konsisten, penetapan dan penerapan pedoman proses bisnis Satu Data Indonesia diseluruh level kebijakan, serta pembangunan ekosistem kolaborasi melalui infrastruktur interoperabilitas dan sumber daya manusia.

Untuk memastikan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan perluasan kolaborasi, dibutuhkan tindakan terarah sebagai upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Lampung baik dengan dukungan dan pendampingan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan kolaborasi di tingkat Daerah, intervensi kebijakan maupun komitmen dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah penyelenggara Satu Data Indonesia itu sendiri. Selain itu, guna memastikan keselarasan dan kesesuaian antara regulasi dan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia, dirumuskan bahwa penyelenggaraan SDI sesuai kaidah kebijakan tata kelola data melalui koordinasi yang komprehensif di dalam Forum SDI secara konkrit dan berkesinambungan.

Sumber Daya Manusia atau talenta di Instansi Pemerintah menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data sebagai kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik juga akan sangat membutuhkan pemahaman dan



partisipasi dari berbagai pihak. Penguatan sumber daya manusia dilaksanakan mulai dari tataran kebijakan sampai dengan pembinaan kapasitas dengan tujuan memperkuat operasional penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Provinsi Lampung. Untuk itu Provinsi Lampung perlu meningkatkan pendampingan, pembinaan, dan penyajian pedoman pengelolaan, serta pemberian insentif terhadap produksi data yang sesuai standar dan metadata kepada seluruh produsen data di Provinsi Lampung terkait agenda strategis dan prioritas dalam pembangunan daerah.

5.3 KERANGKA REGULASI UNTUK MENDUKUNG RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025–2029

Untuk memastikan tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 secara optimal, diperlukan penyesuaian, pembaruan, dan penyusunan regulasi daerah yang strategis. Kerangka regulasi ini akan menjadi instrumen penting untuk mengurangi hambatan birokrasi, mendorong investasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1. Identifikasi Dasar Hukum yang Perlu Diselaraskan

Penyelarasan regulasi merupakan langkah awal yang krusial. Peraturan daerah (Perda) yang sudah ada perlu diidentifikasi untuk melihat kesesuaiannya dengan RPJMD. Beberapa hal yang perlu ditinjau meliputi:

- **Penyelarasan dengan Kebijakan Pusat:** Perda yang tidak sinkron dengan peraturan pemerintah pusat (undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri) perlu direvisi. Tujuannya adalah menghindari tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pelaksanaan program.
- **Peraturan Tata Ruang:** Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu disesuaikan dengan arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, terutama terkait dengan alokasi lahan untuk sektor strategis seperti industri, pariwisata, dan pertanian.

- **Perizinan dan Investasi:** Perda tentang perizinan dan investasi perlu disederhanakan. Regulasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama harus dipangkas untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan menarik bagi investor.

2. Dasar Hukum yang Perlu Diperbaharui

Seiring dengan dinamika pembangunan, beberapa regulasi yang sudah tidak relevan atau kurang efektif perlu diperbarui. Fokus utama pembaharuan regulasi adalah:

- **Pembaruan Perda Pajak dan Retribusi Daerah:** Peraturan mengenai pajak dan retribusi daerah perlu dievaluasi kembali. Pembaruan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha secara berlebihan.
- **Penguatan Perda Lingkungan Hidup:** Perda terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.
- **Perda Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial:** Regulasi terkait ketenagakerjaan harus diperbarui untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, serta perlindungan bagi para pekerja. Selain itu, regulasi tentang perlindungan sosial perlu ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat rentan.

3. Penyusunan Dasar Hukum Baru

Beberapa sektor pembangunan strategis dalam RPJMD mungkin belum memiliki landasan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlu disusun Perda baru yang dapat menjadi payung hukum bagi program-program unggulan. Beberapa contohnya adalah:

- **Perda tentang Ekonomi Kreatif:** Untuk mendorong sektor ekonomi kreatif, diperlukan Perda yang mengatur perlindungan hak cipta, fasilitasi modal, dan pengembangan ekosistem kreatif.

- **Perda Smart City:** Dalam rangka mewujudkan kota cerdas, diperlukan Perda yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.
- **Perda Penanggulangan Bencana:** Mengingat posisi geografis Lampung yang rawan bencana alam, perlu disusun Perda khusus yang mengatur manajemen risiko bencana, mitigasi, dan penanganan darurat.

Dengan adanya kerangka regulasi yang terstruktur dan adaptif, Provinsi Lampung akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program-program pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 secara efektif. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah demi kesejahteraan seluruh masyarakat Lampung.

5.4 MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan kondisi internal dan eksternal sangat dinamis yang membutuhkan respons kebijakan yang adaptif. Penyusunan kebijakan didesain mempertimbangkan potensi risiko yang dihadapi. Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 juga mendukung arti penting Manajemen Risiko dalam paradigma pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Manajemen Risiko adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Manajemen Risiko diperlukan untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai rencana, jadwal, dan tujuannya agar tercapai target (outcome) yang telah ditentukan tanpa ada kendala yang berarti.

Dengan langkah-langkah seperti identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, serta pemantauan risiko, diharapkan dapat meminimalisir deviasi dan mengoptimalkan manfaat lainnya seperti risiko finansial maupun risiko lingkungan hidup dan emisi karbon agar pembangunan tidak merusak ekosistem. Dalam tinjauan pembangunan jangka menengah, Manajemen



Risiko ini menjadi penting untuk : 1) memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tujuannya, 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan 3) menghasilkan kualitas dan kuantitas Pembangunan Daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Merujuk pada Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang dimaksud Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Entitas MRPN (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan lainnya) sehubungan adanya Risiko Pembangunan Nasional. Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional yang juga dikontribusikan oleh daerah, sekaligus menjamin terkendalinya Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional.

Sebagaimana MRPN, perencanaan atas pelaksanaan Pembangunan di daerah juga harus didukung penerapan Manajemen Risiko Pembangunan guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Daerah dalam setiap periode Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan secara kolaboratif konstruktif, lintas sektoral dan berkesinambungan oleh Entitas MRPN yang berada di daerah. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan tujuan :

- Meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah;
- Mengurangi deviasi terhadap perwujudan Visi, serta pencapaian Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di daerah;
- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Sebagai upaya memperkuat substansi dan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah maka RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 perlu juga diperkuat dengan kerangka regulasi dan kebijakan daerah yang mengacu pada MRPN. Hal ini dilakukan guna menjamin perwujudan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk periode 5 tahun mendatang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian RPJMN 2025-2029. Berkenaan hal tersebut, **Manajemen Risiko untuk Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 akan ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko pada setiap tahapan perencanaan pembangunan secara tahunan;** yang tentunya akan menjadi instrumen pendukung dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan yang juga dilaksanakan secara berkala.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



LAMPIRAN I

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD 2025-2029



1 DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
VISI: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS				
Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, Dan Inovatif				
1.	Tujuan: Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T : Periode tertentu T-1 : Periode sebelumnya	-
		2. Gini Rasio	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia karena ketiadaan data pendapatan, Rasio Gini dihitung menggunakan data pengeluaran. $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Keterangan : GR =Gini Ratio Fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i	-



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
		3. Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. $NTP = \frac{I_t}{I_b}$ Keterangan : NTP = Nilai Tukar Petani I_t = Indeks Harga yang diterima petani I_b = Indeks Harga yang dibayar petani	-
1.1	Sasaran: Meningkatnya Investasi Dan Hilirisasi Komoditas Unggulan	1. Pertumbuhan PMTB	$\text{Pertumbuhan PMTB} = \left(\frac{\text{PMTB}_t - \text{PMTB}_{t-1}}{\text{PMTB}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan : • PMTB_t = Nilai PMTB pada tahun berjalan • PMTB_{t-1} = Nilai PMTB pada tahun sebelumnya • Hasilnya dinyatakan dalam persentase pertumbuhan tahunan Catatan: • Gunakan PMTB atas dasar harga konstan (ADHK) untuk menghitung pertumbuhan riil investasi. • Gunakan PMTB atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk menghitung pertumbuhan nominal.	Dinas PMPTSP, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda,



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
		2. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	$\text{Pertumbuhan} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: • $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan tahun berjalan. • $PDRB_{t-1}$ = PDRB sektor industri pengolahan tahun sebelumnya • Hasilnya adalah persentase pertumbuhan tahunan sektor tersebut.	Disperindag, Diskop UKM, Disnaker, PMPTSP, Dinas LH
1.2	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung pangan nasional	1. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	$\text{Pertumbuhan Pertanian} = \left(\frac{PDRB_{\text{pertanian},t} - PDRB_{\text{pertanian},t-1}}{PDRB_{\text{pertanian},t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: • $PDRB_{\text{pertanian},t}$ - $PDRB_{\text{pertanian},t-1}$: Nilai PDRB sektor pertanian (dalam arti luas) tahun berjalan. • $PDRB_{\text{pertanian},t-1}$: Nilai PDRB sektor pertanian (dalam arti luas) tahun sebelumnya. • Gunakan harga konstan (ADHK) untuk menghitung pertumbuhan riil (bukan nominal). • Pertanian dalam arti luas mencakup: ◦ Pertanian tanaman pangan ◦ Hortikultura ◦ Perkebunan ◦ Peternakan ◦ Kehutanan dan pennebangan kayu ◦ Perikanan (budidaya dan tangkap)	Dinas KPTPH, Disbun, Disnakkeswan, Dinas, DKP.



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
		2. Indeks Ketahanan Pangan	Rumus Indeks Ketahanan Pangan: $IKP = \sum_{i=1}^n w_i \cdot N_i$ Keterangan: • w_i = bobot dari indikator ke-iii (dapat disetarakan per dimensi atau ditentukan secara empiris) • N_i = nilai ternormalisasi dari indikator ke-i (misalnya dengan skala 0 - 100 atau Z-score) • n = jumlah indikator	Dinas KPTPH, Disbun, Dinas PSDA, Disperindag, DKP
1.3	Sasaran: Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri (berdasarkan indeks desa)	Definisi Persentase Desa Mandiri adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri dari total seluruh desa di suatu wilayah tertentu. Desa mandiri sendiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat baik, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara optimal, sesuai dengan yang diukur melalui alat ukur tunggal yang menilai kinerja pembangunan desa secara komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Indeks Desa). Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT. Persentase desa mandiri = $\frac{\Sigma \text{ desa mandiri yang menjadi target}}{\Sigma \text{ total desa di Provinsi Lampung}} \times 100\%$	Dinas PMDT, Diskop UKM, Dinsos, Disdikbud, Dinkes, BMBK, Disparekraf, Bappeda, Disnaker, Disperindag, KPCK,

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
1.4	Sasaran: Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	$\text{Proporsi PDRB Pariwisata} = \frac{\text{Nilai tambah sektor Pariwisata}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100$ Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pariwisata dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i>. Catatan: Nilai tambah sektor pariwisata diperoleh dari kajian terhadap total nilai dampak (baik langsung, tidak langsung, maupun terinduksi) dari permintaan akhir sektor pariwisata terhadap nilai tambah bruto (NTB) perekonomian dengan bantuan <i>too</i>/tabel input-output.	Disparekraf, Disdikbud, Dishub, BMBK, PKPCK, Diskop UKM, Satpol PP
1.5	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan dan Energi Berkelanjutan	1. Kemantapan Jalan 2. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Kemantapan Jalan $\text{Kemantapan jalan} = \frac{\text{Panjang (jalan baik + sedang)}}{\text{total panjang jaringan jalan}} \times 100\%$ Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar $I = \frac{(a + b + c)}{3}$ Keterangan: I = Tingkat Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar a = Persentase Rumah tidak layak huni yang tertangani b = persentase penduduk yang memiliki akses air minum aman c = persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi aman	BMBK, Dishub, Bappeda, PKCPK, Disdikbud, Dinkes, Dinas LH, Dinsos



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
1.6.	Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	1. Tingkat kemiskinan	$\text{Tingkat Kemiskinan} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Penduduk miskin: Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) = GKP – GKNP - Garis Kemiskinan Pangan (GKP): Nilai minimum kebutuhan energi makanan (2100 kkal/orang/hari) dikalikan dengan harga per satuan komoditas. - Garis Kemiskinan Non-Pangan (GKNP): Nilai kebutuhan dasar non-pangan (perumahan, pendidikan, transportasi, dll).	Bappeda, Dinsos, DPMDT, Disnaker, Disdikbud, Dinkes, Diskop UKM, Dishut, Satpol PP, PPPA, BPBD, BMBK, KPCK
		2. Tingkat Inflasi	$\text{Inflasi} = \left(\frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: IHK_t = Indeks Harga Konsumen pada bulan/tahun berjalan IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen pada bulan/tahun sebelumnya - Inflasi bisa dihitung dalam: - Inflasi bulanan: perbandingan IHK bulan ini dan bulan lalu - Inflasi tahunan (year-on-year): perbandingan IHK bulan ini dan bulan yang sama tahun lalu - Inflasi tahun kalender (year-to-date): akumulasi inflasi dari Januari hingga bulan berjalan	Disperindag, KPTPH, Diskop UKM, Biro Perekonomian, Dishub



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah Penganggur: Orang yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. • Jumlah Angkatan Kerja: Orang yang bekerja + orang yang menganggur. ◦ Tidak termasuk penduduk bukan angkatan kerja (seperti pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, dll).	Disnaker, Diskop UKM, Disperindag, DPMDT, PMPTSP
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif				
2.	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Modal Manusia	Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Probabilitas bertahan hidup (survival) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. 2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui harmonized test scores. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran <i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i> menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) <i>adult survival rate</i> yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi stunting. Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:	-



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
			1. Survival dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP) 2. Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, <i>harmonized test scores</i> diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran <i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i> menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan dihitung dari data <i>adult survival rate</i> (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15-60 dan prevalensi stunting (SSGI dan SKI) 4. Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan <i>World Bank</i>. Catatan: Perlu penajakan dengan <i>Worldbank</i>, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pakar statistik membahas metode perhitungan Indeks Modal Manusia di tingkat nasional dan daerah.	
2.1.	Sasaran: Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	1. Rata rata lama sekolah	$RLS = \frac{\sum(P_i \times T_i)}{\sum P_i}$ Keterangan: • P_i : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada jenjang pendidikan ke-i • T_i : Lama waktu sekolah (dalam tahun) yang ekuivalen untuk jenjang pendidikan ke-i • $\sum P_i$: Total penduduk usia 15 tahun ke atas • Nilai RLS biasanya dihitung menggunakan data hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) oleh BPS	Disdikbud, PPPA, Dinsos



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
		2. Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pda umur a di tahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia I pada tahun t i : usia ($a, a+1, \dots, n$) FK : Faktor Koreksi Pesantren	Disdikbud, Dinsos, Disnaker
2.2.	Sasaran: Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	$IPP = \left(\prod_{i=1}^n D_i^{w_i} \right)^{\frac{1}{\sum w_i}}$ Keterangan: • D_i = Nilai indeks dimensi ke-iii (yang sudah ternormalisasi dalam skala 0–100) • w_i = Bobot dari dimensi ke-iii • n = Jumlah dimensi (lima dimensi utama) • Pendekatan agregasi geometrik digunakan untuk menggabungkan dimensi (menghindari kompensasi berlebihan antar dimensi)	Dispora, Disnaker, Dikop UKM, Disdikbud, Dinkes,
		Indeks Pembangunan Olahraga	Definisi operasional Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) adalah ukuran gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor keolahragaan di Indonesia, diukur berdasarkan 9 (sembilan) dimensi utama. Dimensi-dimensi tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Olahraga, Ketersediaan Ruang Terbuka, Literasi Fisik, Tingkat Partisipasi Olahraga, Kebugaran Jasmani, Perkembangan Personal, Kesehatan (Fisik, Psikis, Mental), Kontribusi Ekonomi, dan Performa/Prestasi Olahraga	Dispora, Disdikbud, Dinkes, PKPCK, Bappeda



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
			Cara perhitungan: Berdasarkan Sport Development Index (SDI) yang datanya dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya.	
2.3.	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup (UHH) – satuan tahun Definisi: <i>"Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu."</i> Rumus Perhitungan (dalam dokumen): Idealnya, UHH dihitung berdasarkan hasil penyusunan Tabel Kematian berdasarkan <i>Age-Specific Death Rate</i> (ASDR) Namun karena registrasi kematian belum lengkap, maka: UHH dihitung secara tidak langsung menggunakan paket program <i>MortPack</i> atau MCPDA (<i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i>) dengan asumsi model demografi tertentu. Keterangan Tambahan: - ASDR: Angka Kematian Spesifik Menurut Umur <i>MortPack</i>/MCPDA: Perangkat lunak yang digunakan oleh Bappenas/BPS untuk estimasi usia harapan hidup dari data terbatas - Data sumber berasal dari: - SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) - SP (Sensus Penduduk)	Dinkes, RSUAM, RSJ, Dinas LH, RSBNH, PKPCK
		2. Prevalensi Stunting	$\text{Prevalensi Stunting (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita yang Diukur}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Balita stunting: Anak usia 0 – 59 bulan dengan status gizi: - Stunting: Z-score TB/U < -2 SD	Dinkes, Dinsos, KPTPH, Bappeda, PKPCK, BMBK



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
			- o Sangat stunting: Z-score TB/U < -3 SD • Z-score mengacu pada standar WHO (2006) – WHO <i>Child Growth Standards</i> • Data biasanya diperoleh dari: - o Survei: SSGI (Studi Status Gizi Indonesia – Kemenkes/Bappenas) - o Pengukuran langsung di posyandu, puskesmas (Program E-PPGBM)	
2.4.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	1. Indeks Perlindungan Anak	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks\ K_j)$ Keterangan: • IPA adalah Indeks Perlindungan Anak • Wj adalah Bobot Kluster ke-j • Kj adalah nilai indeks kluster ke-j dimana untuk mendapatkan nilai Kj melalui persamaan berikut: $Indeks\ K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: • SX_{ji} adalah nilai indikator i pada Kluster ke-j yang sudah dinormalisasi • n_j adalah banyaknya indikator kluster ke-j • Indeks K_j Indeks kluster ke-j	PPPA, Dinsos, Disdikbud, Dinkes
		2. Indeks Ketimpangan Gender	$IKG = 1 - \left[\frac{H^1 \cdot E^1 \cdot L^1}{H^* \cdot E^* \cdot L^*} \right]$ Keterangan • HHH: dimensi Kesehatan Reproduksi • EEE: dimensi Pemberdayaan • LLL: dimensi Partisipasi Ekonomi • H*,E*,L*H[^]*, E[^]*, L[^]H*,E*,L*: nilai ideal dari ketiga dimensi jika tidak	PPPA, Disdikbud, Disnaker, Dinkes



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
			ada ketimpangan gender	
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas				
3.	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan Nilai Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB dengan pertimbangan mengukur sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. $\text{Nilai IRB} = \sum_{i=1}^n (\text{Bobot}_i \times \text{Nilai}_i)$ Keterangan: IRB = Indeks Reformasi Birokrasi	-
3.1.	Sasaran: Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan Nilai Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB dengan pertimbangan mengukur sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. $\text{Nilai IRB} = \sum_{i=1}^n (\text{Bobot}_i \times \text{Nilai}_i)$ Keterangan: IRB = Indeks Reformasi Birokrasi	BPKAD, Bappeda, Inspektorat



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
4.	Tujuan: Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Intensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR) $IE_t = TE_t / PDRB_t$ Keterangan: IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> (ton CO2e/2010 IDR miliar) TE_t = Total tingkat emisi GRK pada tahun <i>t</i> (ton CO2e) yakni total emisi tahun <i>t</i> setelah dilakukan aksi/kebijakan Pembangunan Rendah Karbon PDB_t = Produk Domestik Bruto tahun <i>t</i> (2010 IDR miliar) <i>t</i> = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IE_t = (IE_t - IE_{B_t}) / IE_{B_t}$ %IE_t = Persentase penurunan intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> (ton CO2e/2010 IDR miliar) IE₀ = Intensitas emisi GRK initial tahun 2010 (ton CO2e/2010 IDR miliar) <i>t</i> = titik tahun perhitungan	-
4.1.	Saasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan: IKLH Provinsi: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi IKA: Indeks kualitas air IKU: Indeks kualitas udara IKTL: Indeks kualitas tutupan lahan	DLH, Dinas Kehutanan, DKP



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
		2. Indeks Resiko Bencana	Risk = Hazard x Vulnerability/Capacity Keterangan: Risiko (risk): potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonom. Bahaya/Ancaman (hazard): suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan. Kerentanan (vulnerability): suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	E = A x EF Keterangan : E = jumlah emisi A = data aktivitas (jumlah bahan-bahan penghasil emisi) EF = faktor emisi	Dinas Kehutanan, KPTPH, Perkebunan, DKP, DLH, PKPCK, ESDM, Perindag, Perhubungan, Disnakeswan,
		4. Porsi EBT dalam Bauran Energi primer	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (Provinsi) % : <i>Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer = $\frac{\text{Jumlah Konsumsi EBT dalam Provinsi}}{\text{Total Energi Primer dalam Provinsi}}$</i>	ESDM, Dinas LH, Perindag, Disbun,



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
5	Tujuan: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	1. Indeks Demokrasi Provinsi	$IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$ Keterangan: IDI: Indeks Demokrasi Indonesia P_i: nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3) I(A_i): indeks aspek ke-i (i=1): aspek kebebasan sipil (i=2): hak-hak politik (i=3): lembaga demokrasi	-
		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender. $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ Keterangan: IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j adalah Bobot Dimensi ke-j D_j adalah Dimensi ke-j, dimana untuk mendapatkan nilai D_j melalui persamaan berikut :	-



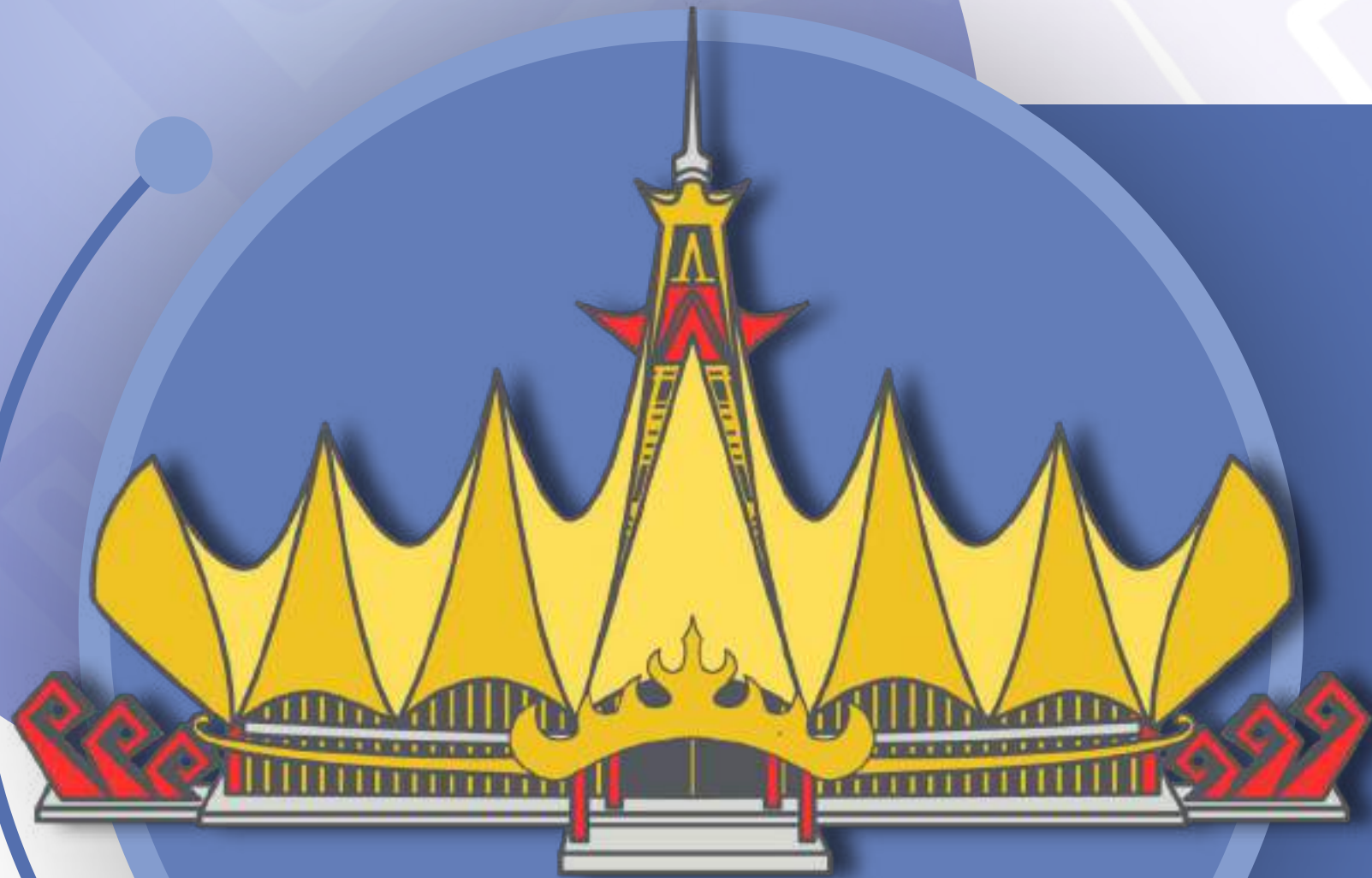
NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
			$\text{Indeks Dj} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan : SX_{ji} adalah nilai indikator I pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke-j Indeks Dj Indeks dimensi ke-j	
5.1.	Sasaran: Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	1. Indeks Demokrasi Provinsi	$IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$ Keterangan: IDI: Indeks Demokrasi Indonesia P_i: nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3) I(A_i): indeks aspek ke-i (i=1): aspek kebebasan sipil (i=2): hak-hak politik (i=3): lembaga demokrasi	Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinsos
		2. Ekspresi Budaya	$D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_j} SX_{ij}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: D_j = Nilai indeks dimensi ke-j SX_{ij} = Nilai indikator ke-i dalam dimensi ke-j yang telah dinormalisasi n_j = Jumlah indikator pada dimensi ke-j	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Kesra



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
			Indikator dalam Dimensi Ekspresi Budaya: • Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran dalam rapat selama satu tahun terakhir • Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi • Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni • Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara ada	

LAMPIRAN II

PENJENJANGAN KINERJA



POHON KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN 2025-2029



PROVINSI LAMPUNG



SISTEMATIKA

MISI 01

MENDORONG EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI, DAN INOVATIF

MISI 02

MEMPERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF

MISI 03

MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERADAB, BERKEADILAN, DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS



"BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS"

Misi Tiga Cita

*Mendorong Ekonomi yang
Inklusif, Mandiri dan Inovatif*

*Memperkuat Sumberdaya Manusia
yang Unggul dan Produktif*

*Meningkatkan Kehidupan Masyarakat
Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan
serta Tata Kelola Pemerintahan yang
Efektif dan Berintegritas*



Rahmat Mirzani Djausal

Gubernur



Jihan Nurlela Chalim

Wakil Gubernur



Pohon Kinerja - Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2030



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS											
Misi 1: Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif											
1.1	Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,57 (2024)	5.2	5.5	6.0	6.4	6.8	7.2
			Gini Rasio	indeks	0.301	0.300 - 0.301	0.274 - 0.280	0.273 - 0.279	0.272 - 0.277	0.271 - 0.275	0.270 - 0.275
			Nilai Tukar Petani	Nilai	124.98 (2024)	126.3	127.8	129.4	130	131.5	133
		1.1.1 Meningkatnya Investasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan	Pertumbuhan PMTB	persen	1.78 (2024)	2.9-4.9	3.0-5.0	3.1-5.1	3.2-5.2	3.3-5.3	3.4-5.4
			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	persen	9,09 (2024)	‘7-10	‘8-11	‘9-12	‘10-13	‘11-14	‘12-15
		1.1.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	-2.09	0.54	0.62	0.71	0.82	0.94	1.09
			Indeks Ketahanan Pangan	indeks	82.58	83.07	83.58	84.09	84.6	85.11	85.62



Pohon Kinerja - Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2030



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS											
Misi 1: Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif											
1.1	Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1.1.3 Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri	persen	14.68 (Berdasarkan Perhitungan data Indeks Desa Membangun)	21.42	23.96	24.37	24.98	25.22	25.45
		1.1.4 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	5.58	5.64	5.69	5.75	5.81	5.86	5.92
		1.1.5 infrastruktur pembangunan	Kemantapan Jalan	persen	78.08	78.00	80.88	82.33	84.75	87.95	91.79
			Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	25.92	26.21	26.49	26.78	27.07	27.35	27.63
		1.1.6 Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	persen	10.62	9.5-10.0	8.79-9.9	7.79-8.79	6.79-7.79	5.79-6.79	5.00-5.79
			Tingkat Inflasi	persen	1.5	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1
			Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4	3.86-4.0	3.51-3.95	3.4-3.85	3.30-3.80	3.25-3.73	3.10-3.70



Pohon Kinerja - Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2030



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS											
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif											
2.1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia		Indeks Modal Manusia	indeks	0.53 (2024)	0.55	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59
		2.1.1 Meningkatkan Kualitas daya Saing Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.36	8.45-8.50	8.55-8.60	8.65-8.70	8.75-8.80	8.85-8.90	8.95-9.00
			Harapan Lama Sekolah	tahun	12.78	12.80-12.82	12.83-12.85	12.85-12.87	12.88-12.90	12.90-12.94	12.95-13.01
		2.1.2 Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	53.17 (2023)	53.51	53.68	53.85	54.02	54.19	54.36
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	indeks	0.377	0.395	0.414	0.433	0.452	0.472	0.492
		2.1.3 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	74.39	74.55	74.74	74.93	75.12	75.37	75.50
			Prevalensi Stunting	persen	14.9 (2023)	13.20	12.62	11.77	11.30	10.83	10.36
		2.1.4 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga Serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	Indeks Perlindungan Anak	indeks	64.78 (2022)	66.22	67.94	69.66	71.38	72.10	74.64
			Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0.430 (2023)	0.420	0.411	0.401	0.392	0.387	0.383



Pohon Kinerja - Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2030



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS											
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas											
3.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82.68	83.00-84.00	84.01-85.00	85.01-86.00	86.01-87.00	87.01-88.00	88.01-89.00
		3.1.1 Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82.68	83.00-84.00	84.01-85.00	85.01-86.00	86.01-87.00	87.01-88.00	88.01-89.00
3.2	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	60.64	62.79	64.03	67.96	70.43	72.13	74.17
		3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	73.11 (metode lama)	70.99	71.20	71.41	71.63	71.84	72.05
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	130.10	129.97	127.94-128.94	125.91-127.91	123.88-126.88	121.85-125.86	119.82-124.83
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	persen	9.15	9.52	9.95	10.47	11.07	11.66	12.30
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	35.22	36.00	36.60	37.00	37.40	37.80	38.20
3.3	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya.		Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	78.32 (2022)	79-80	80-81	80-81	81-82	81-82	82-83
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	57.82 (2023)	58.50	59.60	60.80	61.90	63.00	63.50
		3.3.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	78.32 (2022)	79-80	80-81	80-81	81-82	81-82	82-83
			Ekspresi Budaya	persen	26.14 (2023)	37.31	38.71	40.11	41.51	42.91	44.31



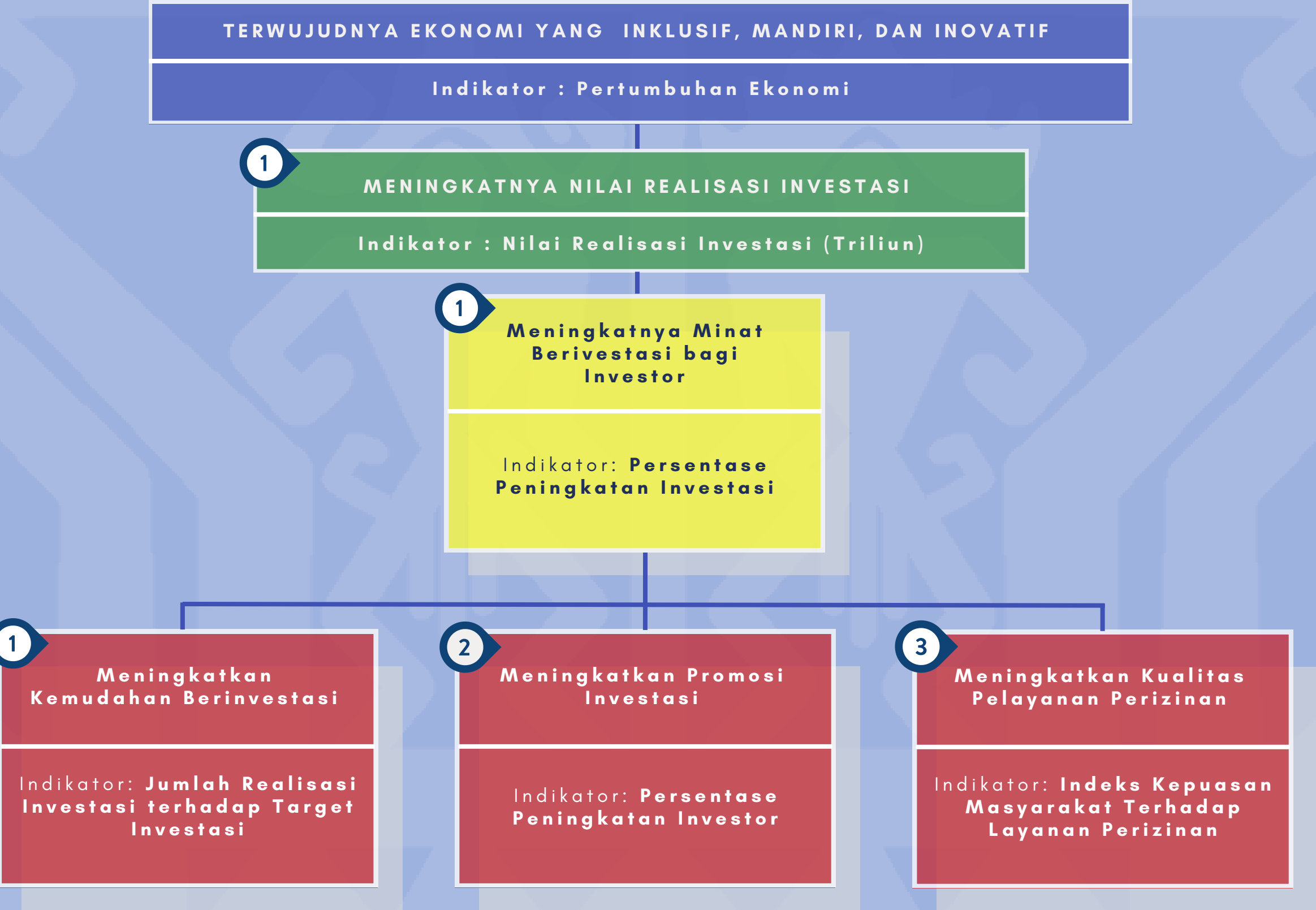
CITA KE - 1

01

MENDORONG EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI, DAN INOVATIF

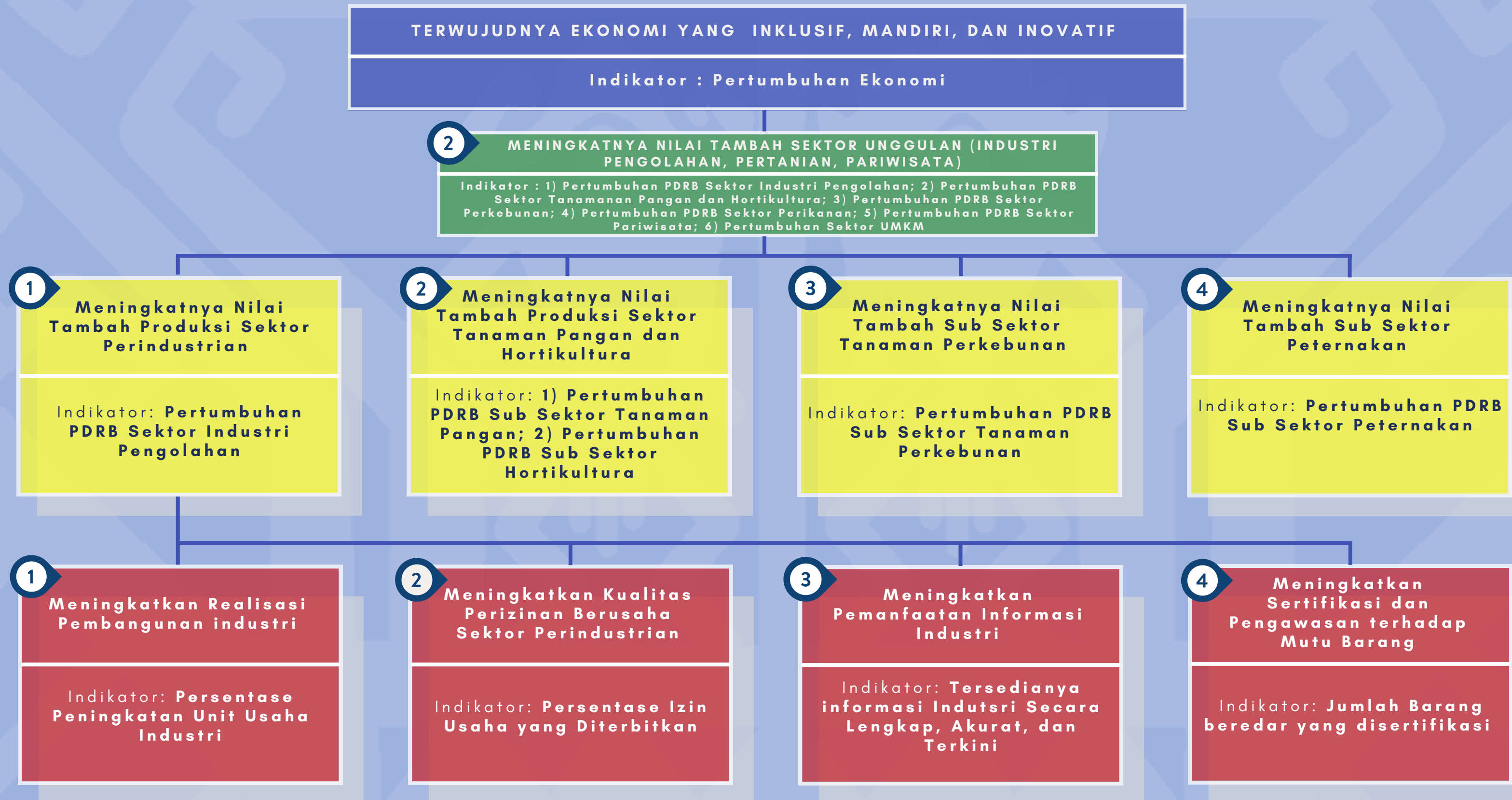
Fokus pembangunan ekonomi Lampung akan dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif sehingga semua kelompok dan golongan secara bersama-sama melakukan upaya pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya melalui penerapan ekonomi hijau di sektor pertanian, ekonomi biru di sektor kelautan, serta mendorong kewirausahaan, industri kreatif, pariwisata, dan UMKM maupun koperasi. Mengutamakan swasembada pangan, air, dan energi, serta investasi dalam hilirisasi dan industrialisasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Misi ini juga mengarah pada proses pembangunan Kota Baru “Bandar Negara” dengan konsep *Eco City* yang berwawasan hijau, *smart*, dan didukung oleh kawasan komersial sebagai penyangga kota. Tujuan lain dari pembangunan kota ini adalah sebagai pusat kebudayaan dan peradaban masyarakat Lampung. Selain itu, Provinsi Lampung sebagai daerah yang rawan bencana memerlukan mitigasi bencana yang terencana serta efektif dalam penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.





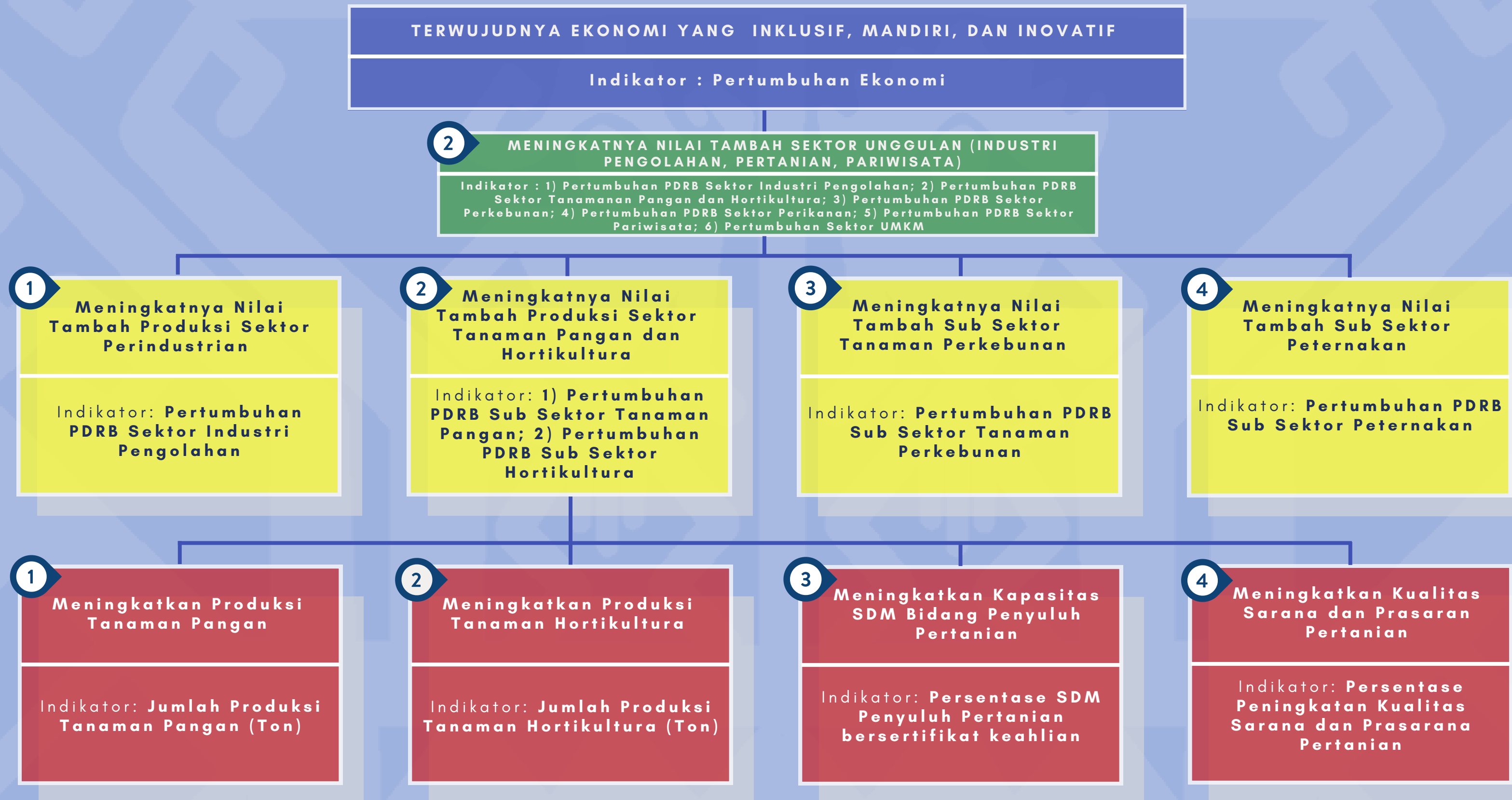
MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors



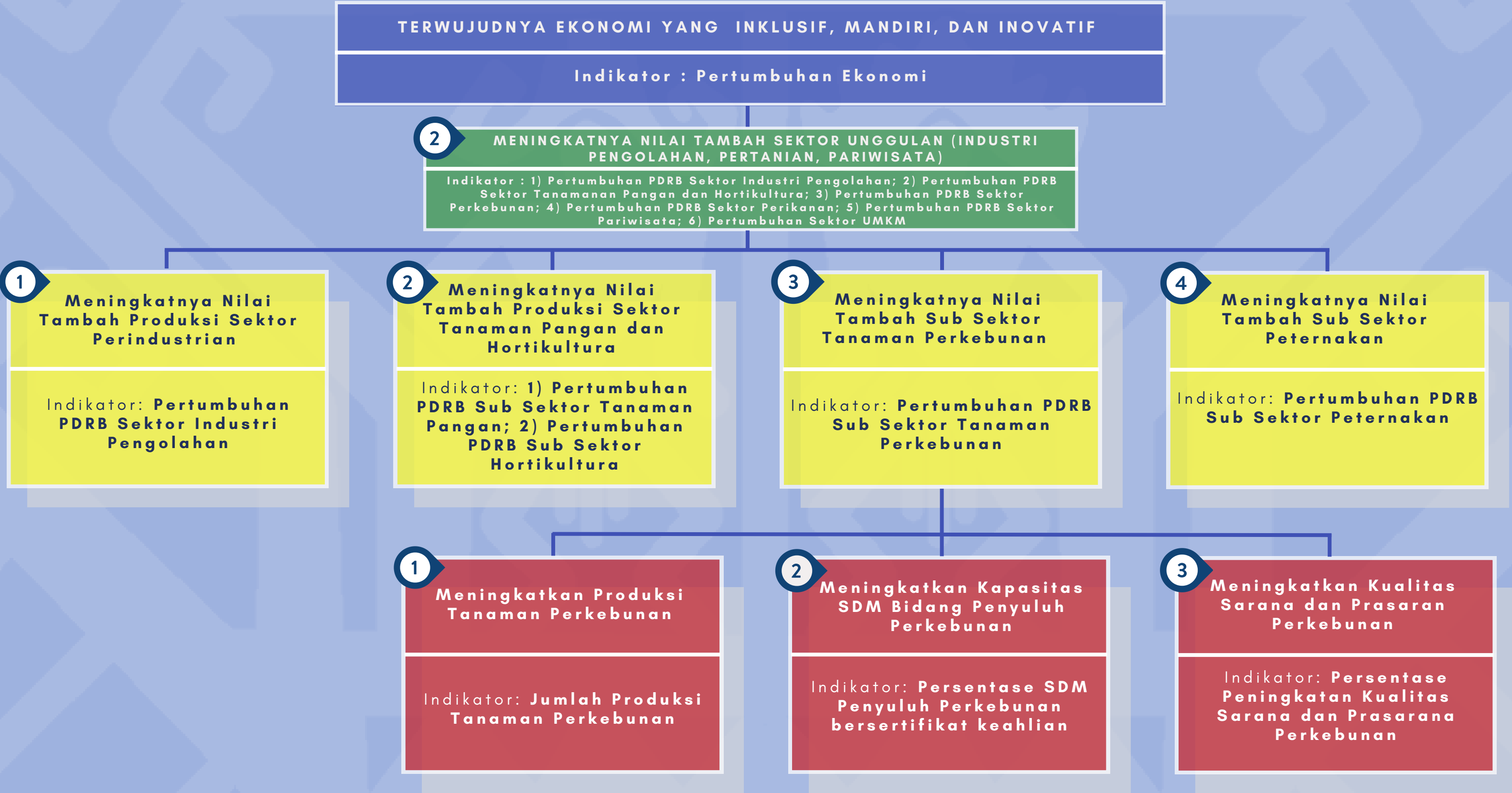
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021

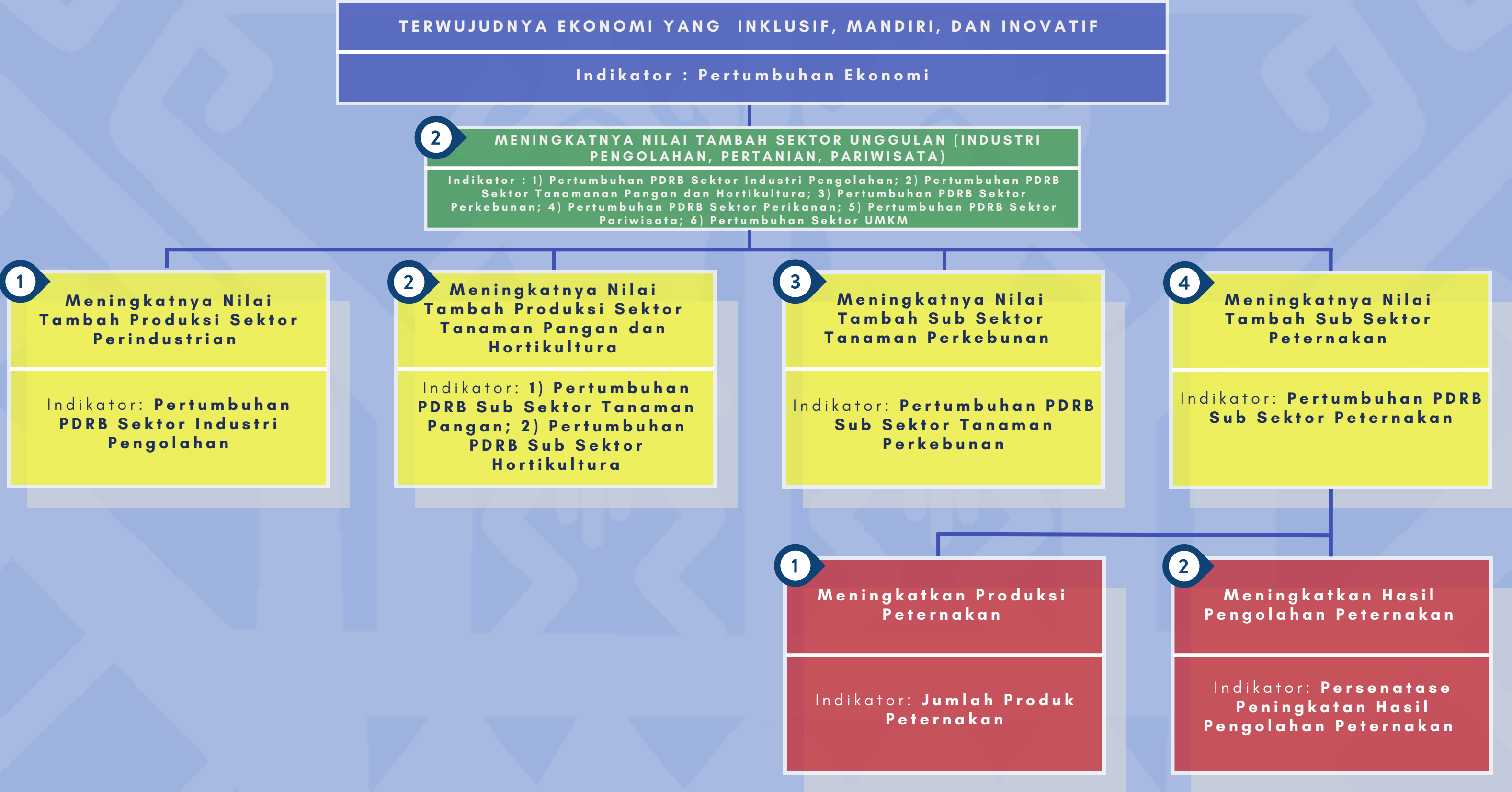


MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors



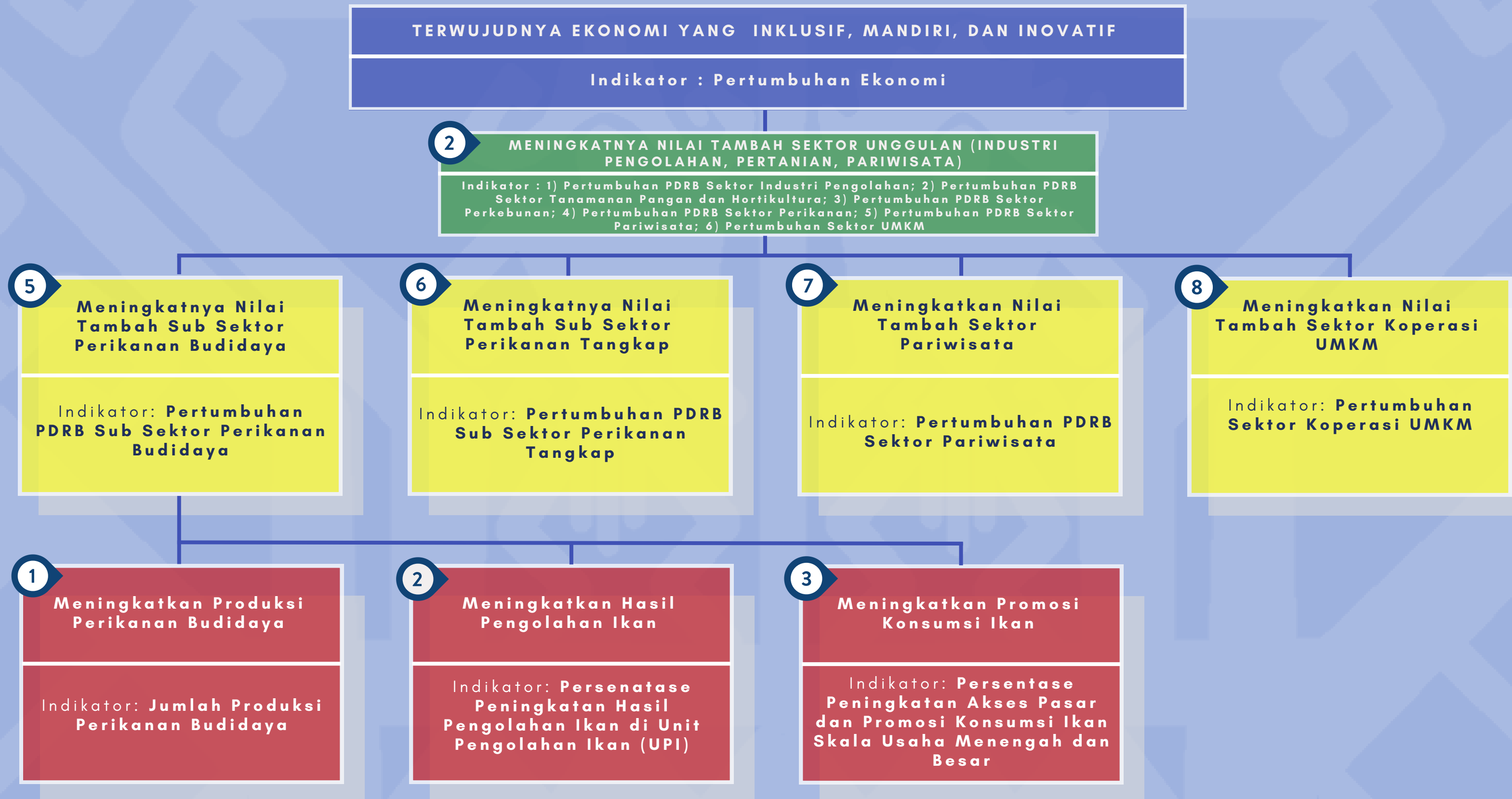
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021







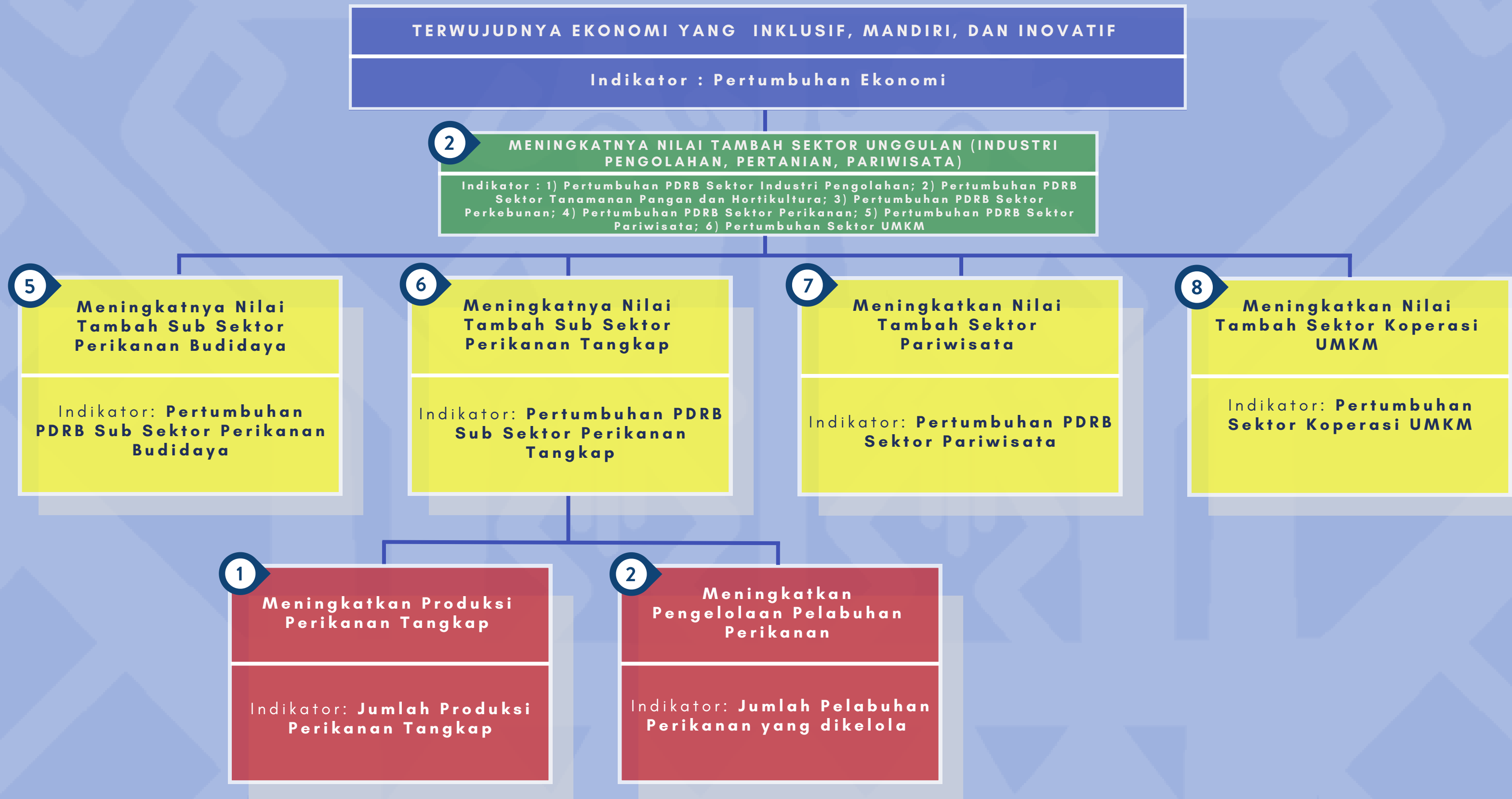
MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



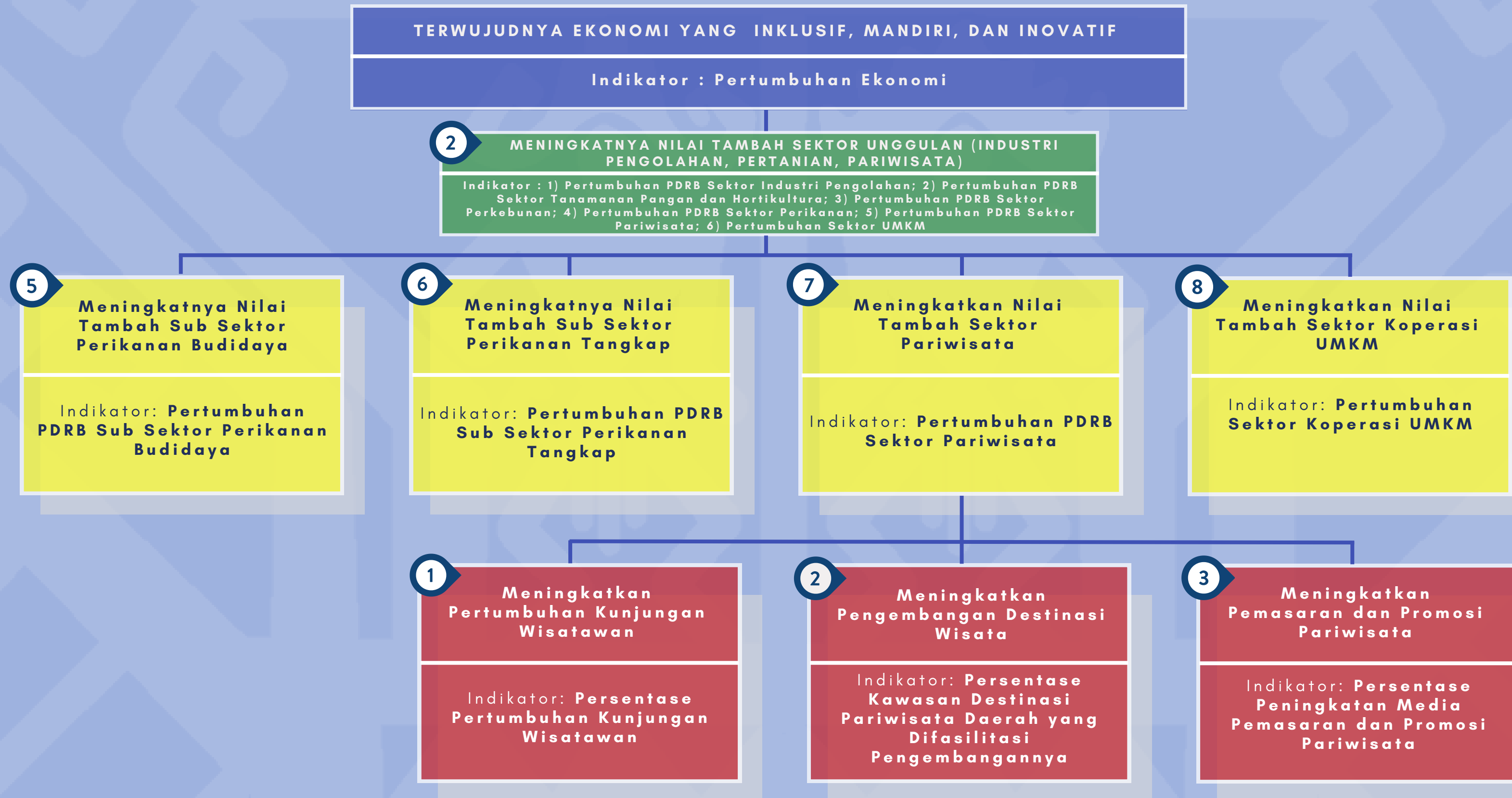
MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



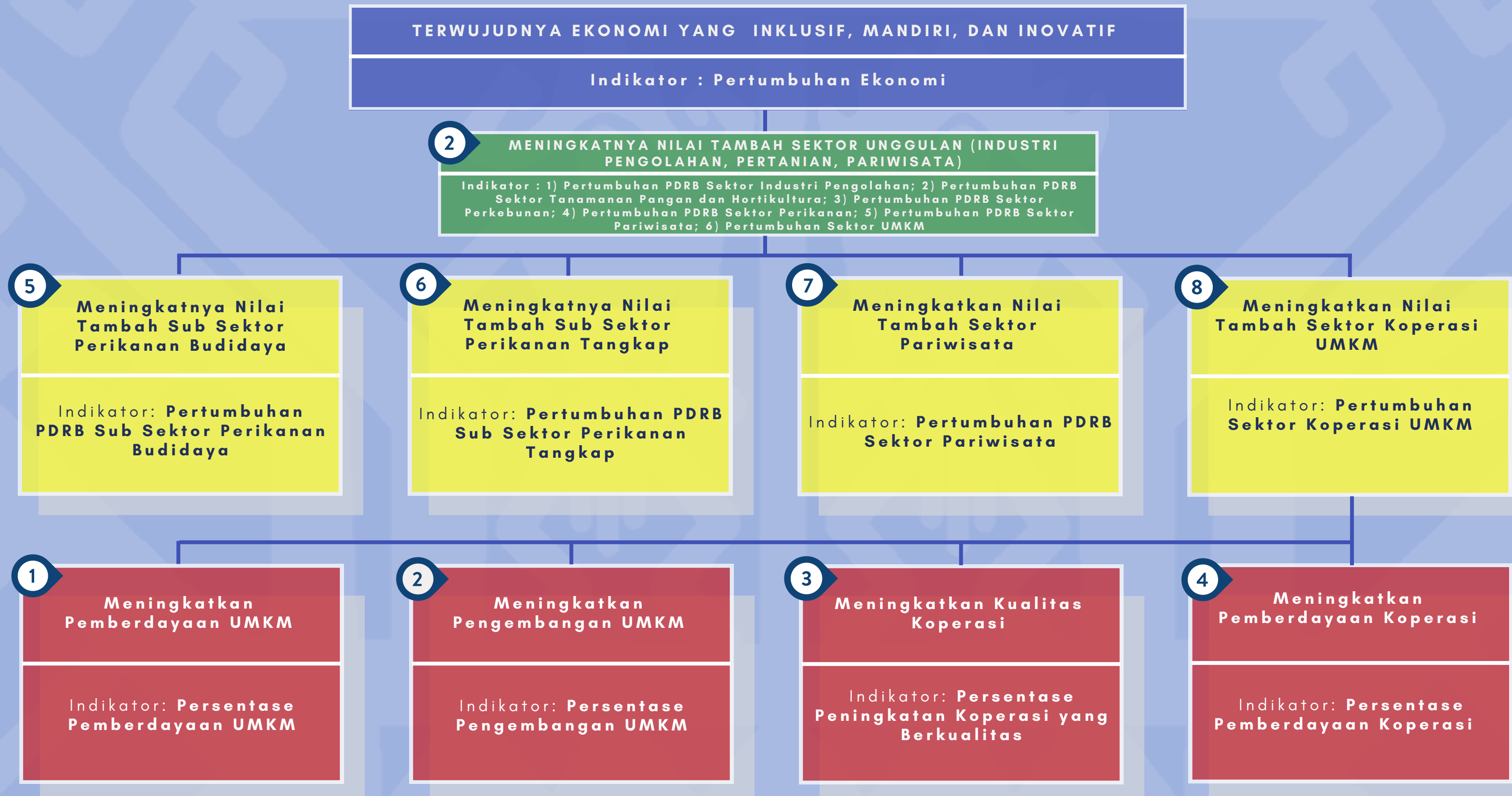
MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



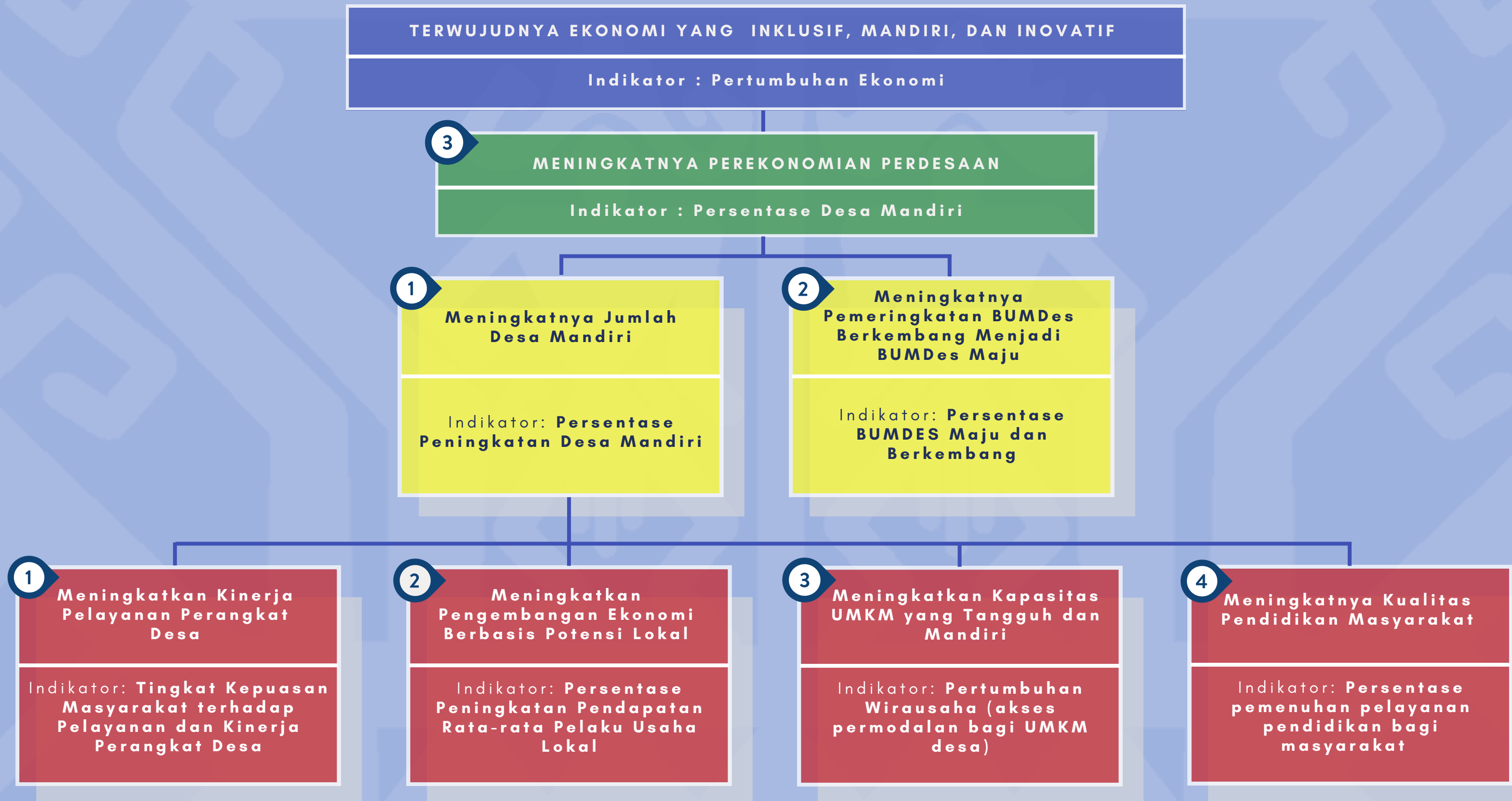
MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



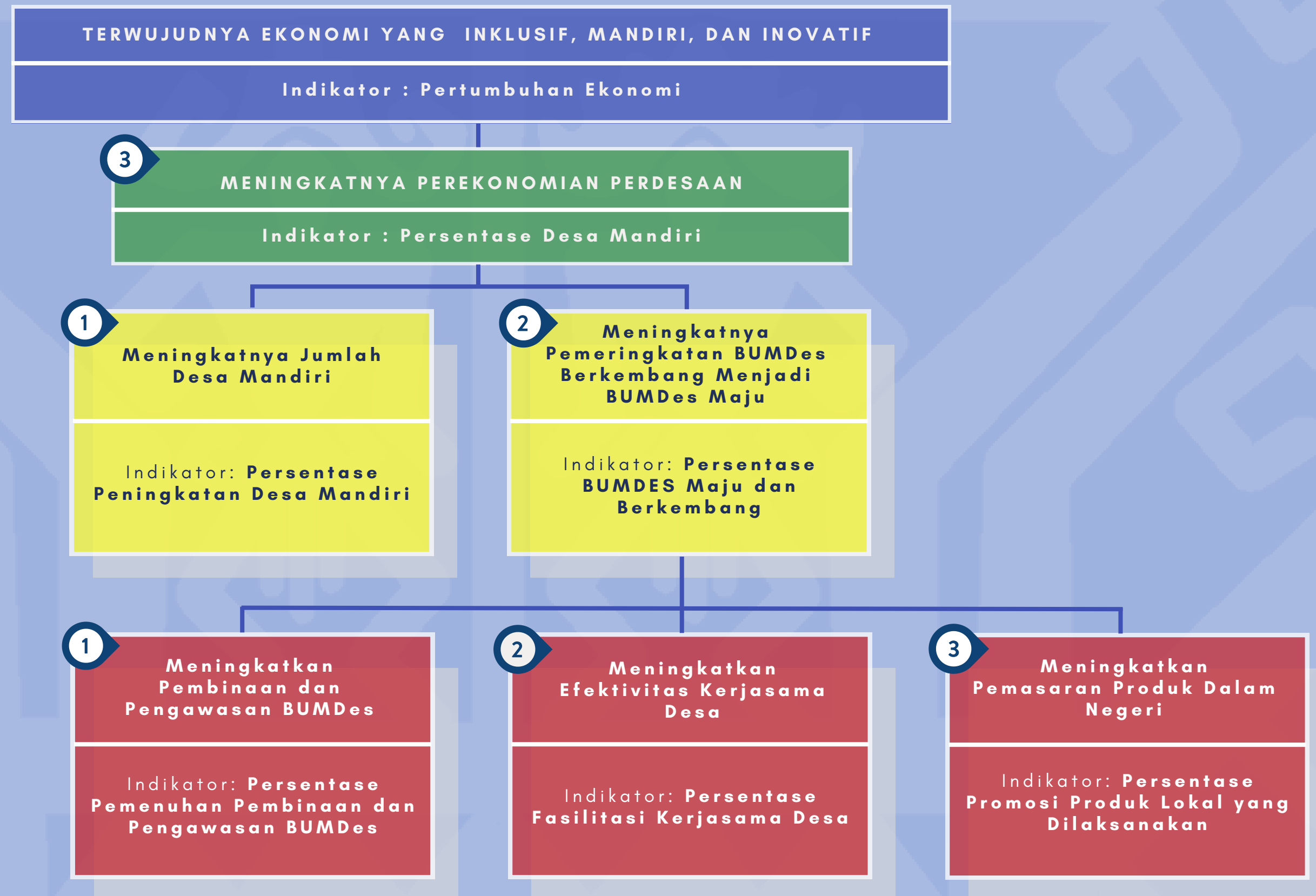
MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors

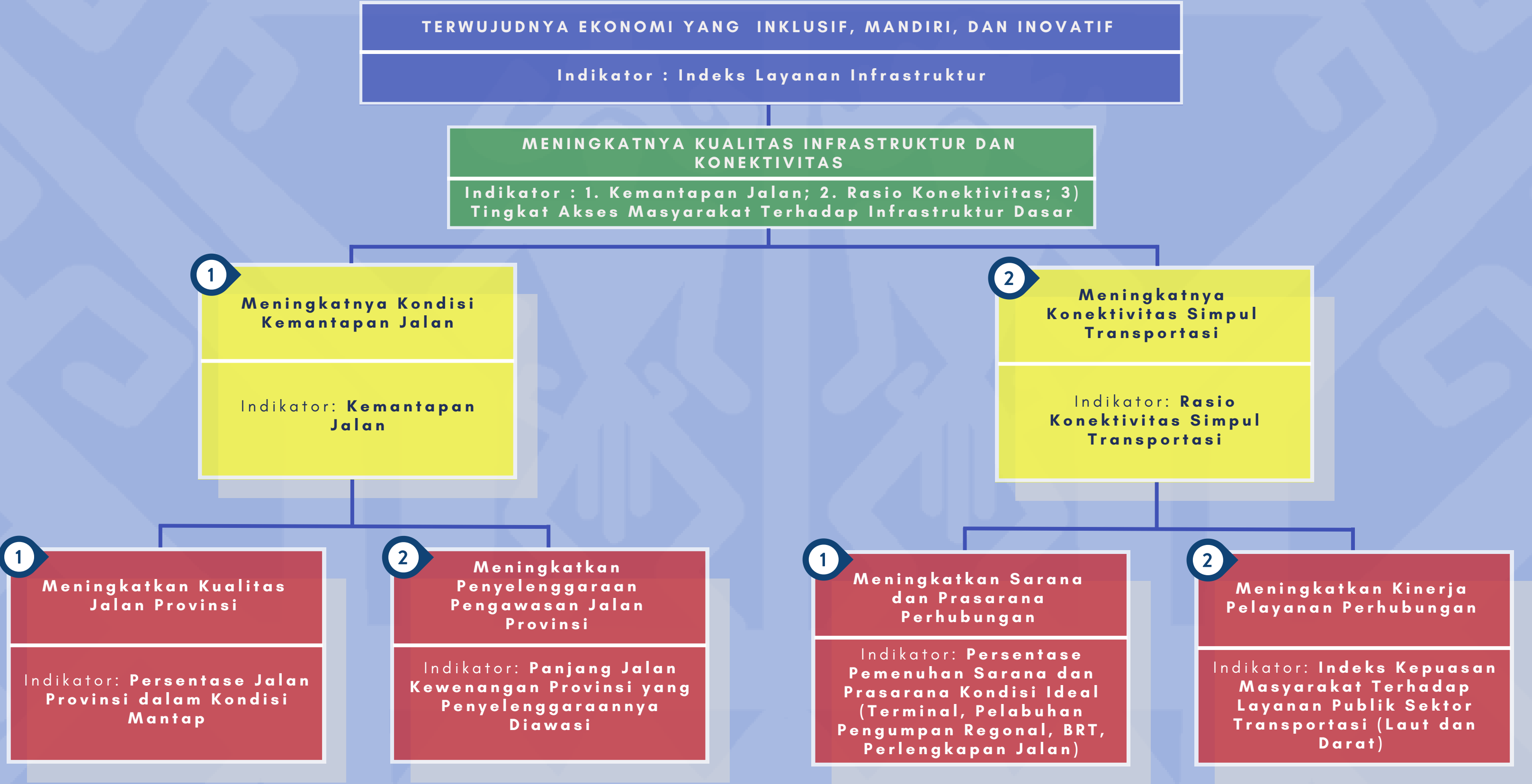


Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors

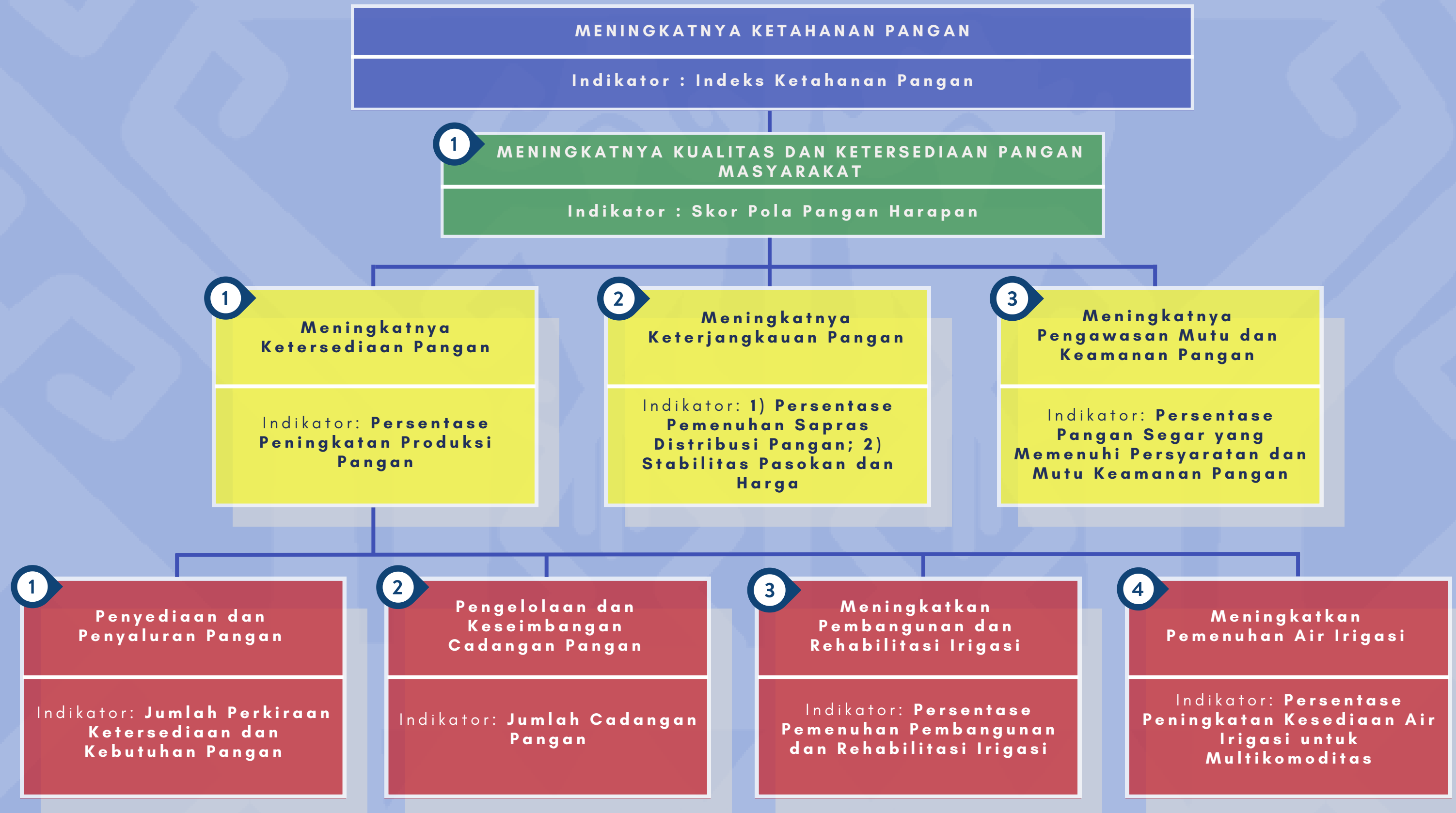




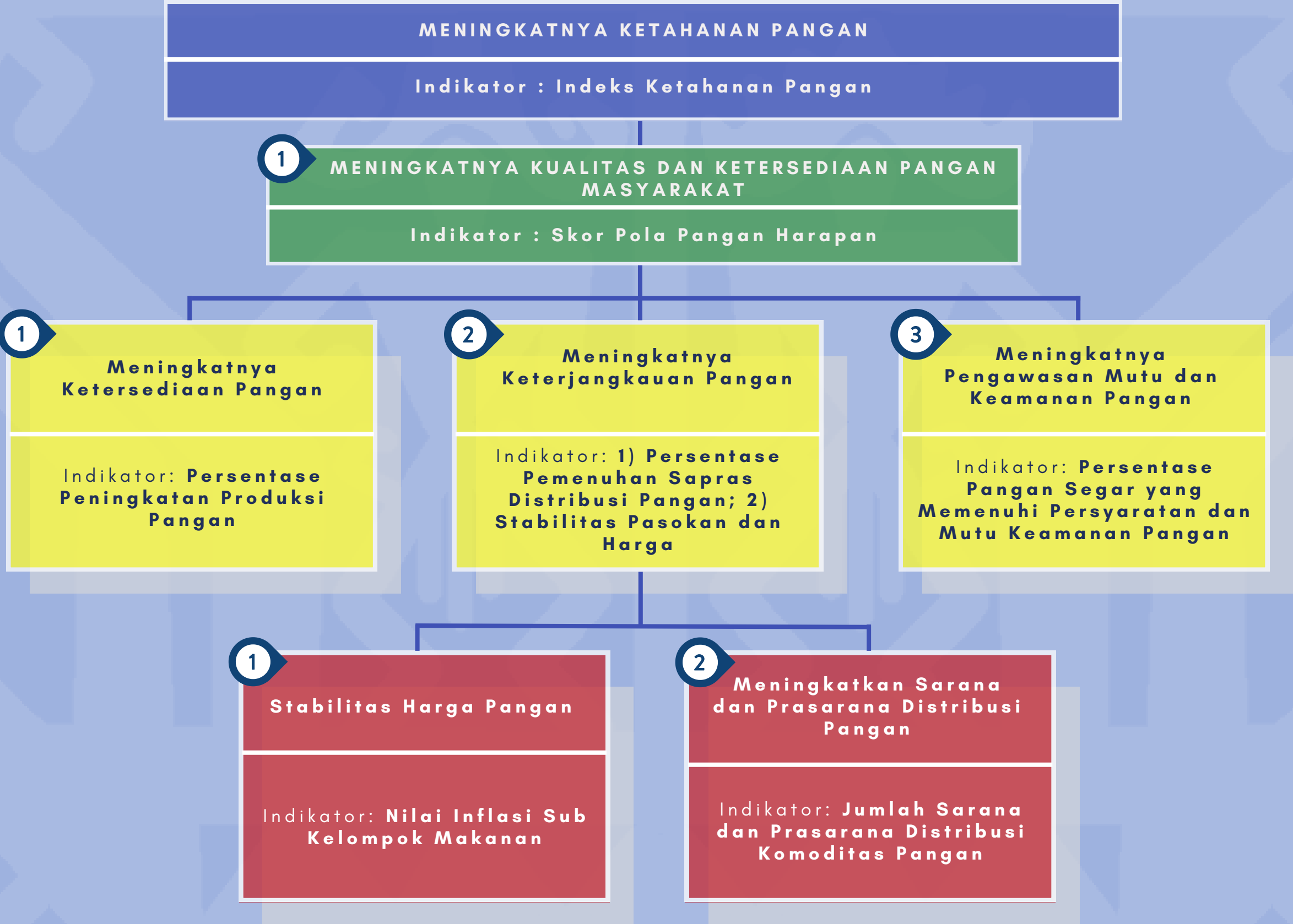
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021

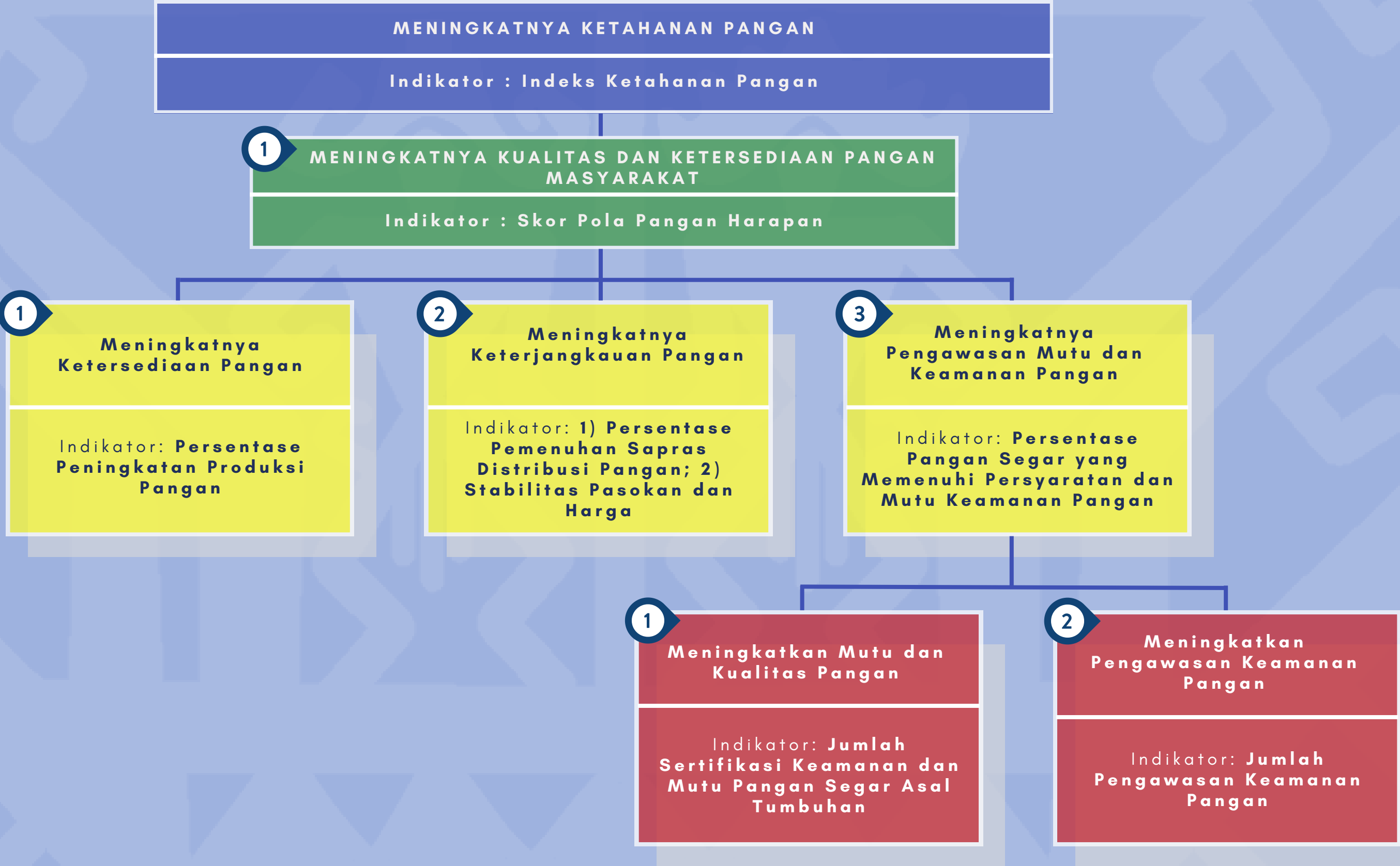


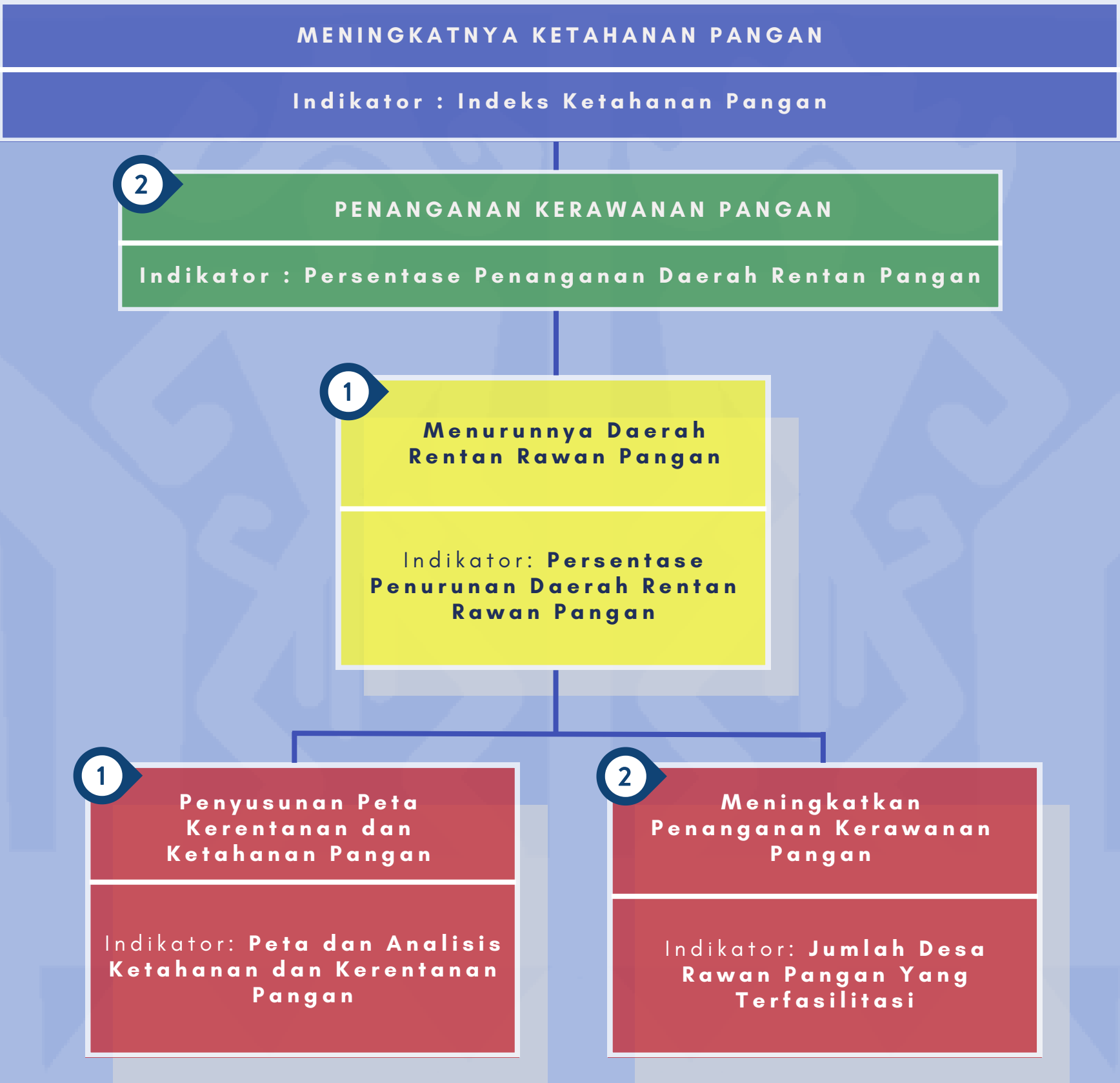
MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



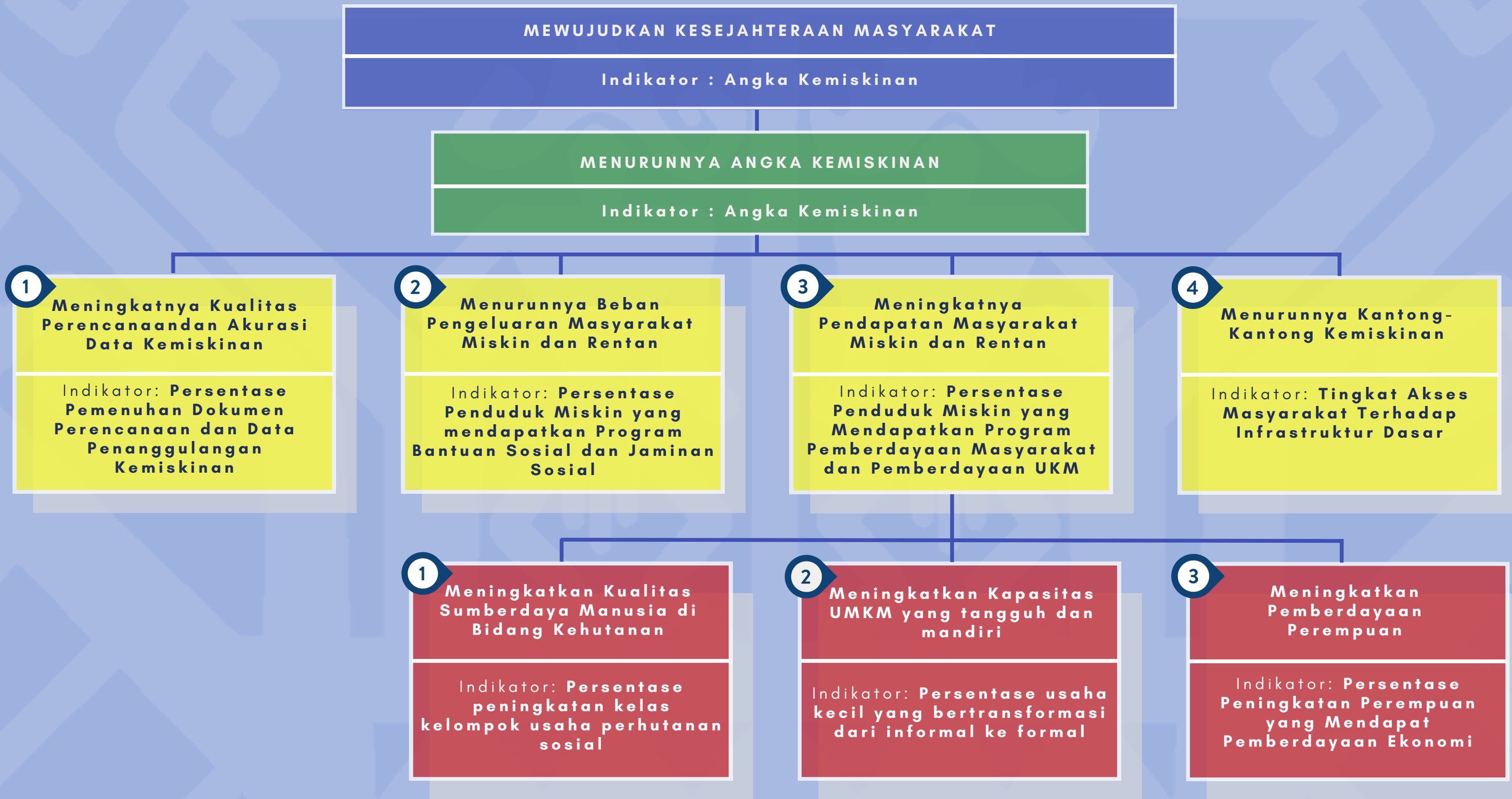






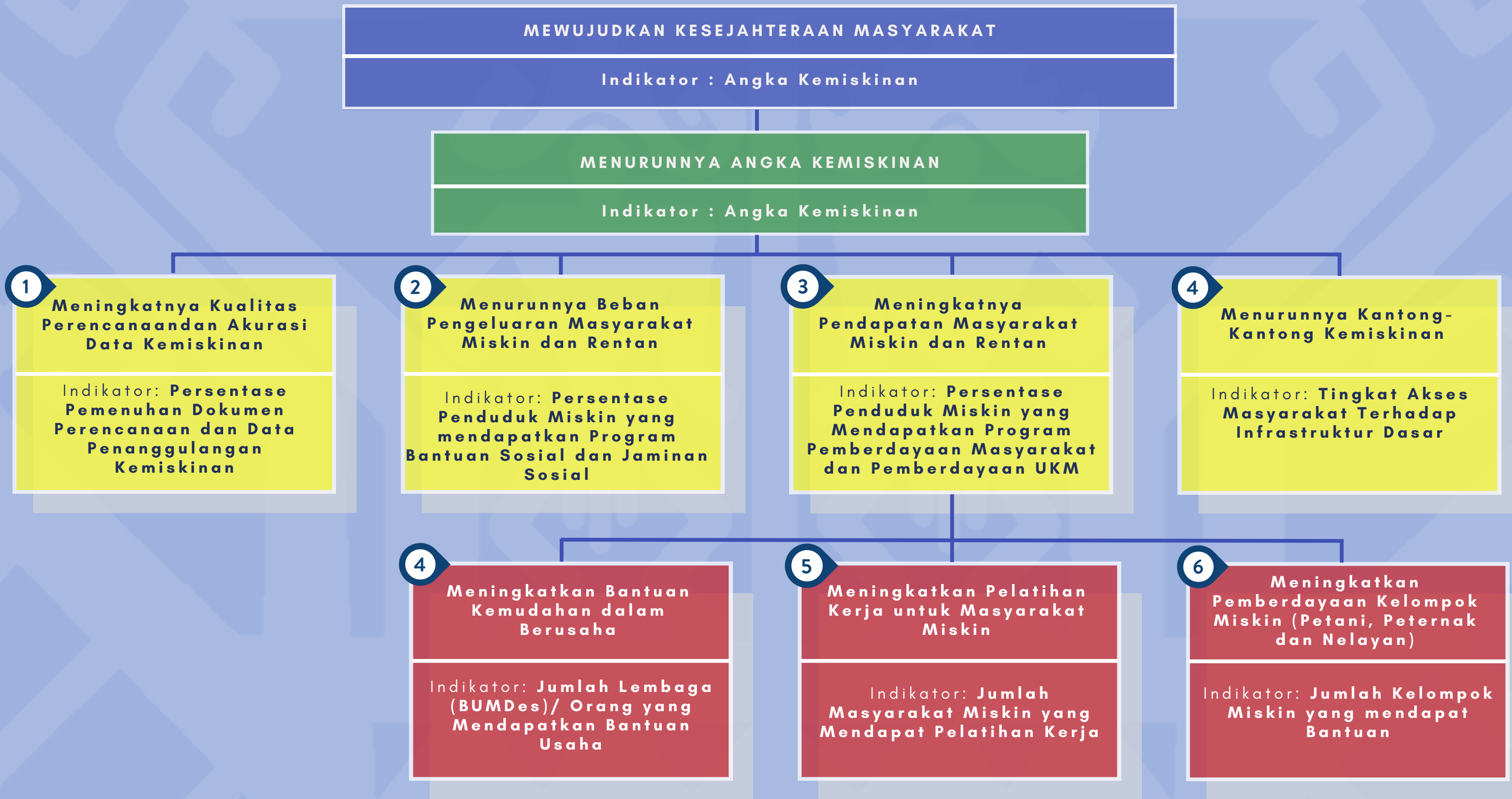
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



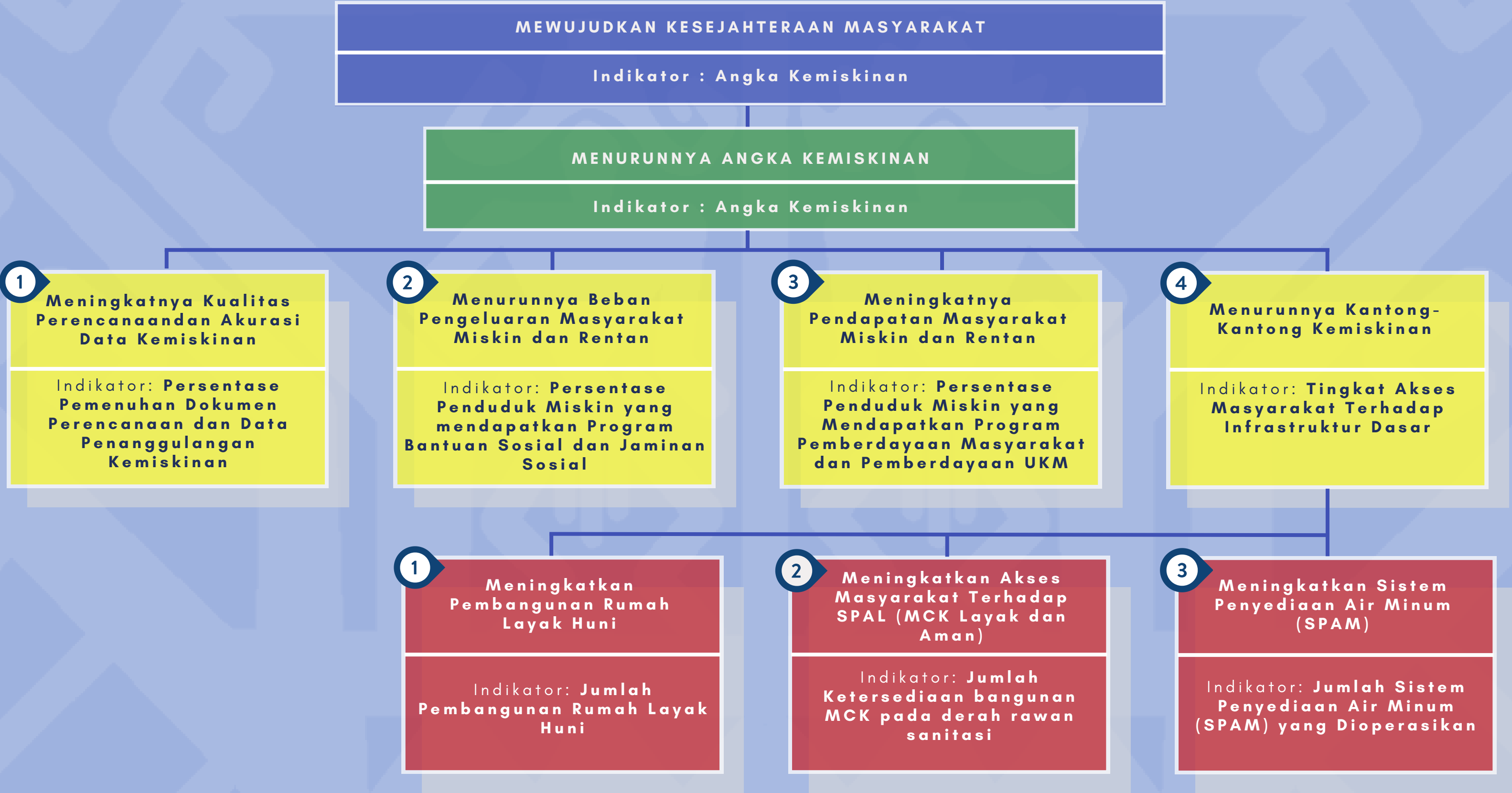




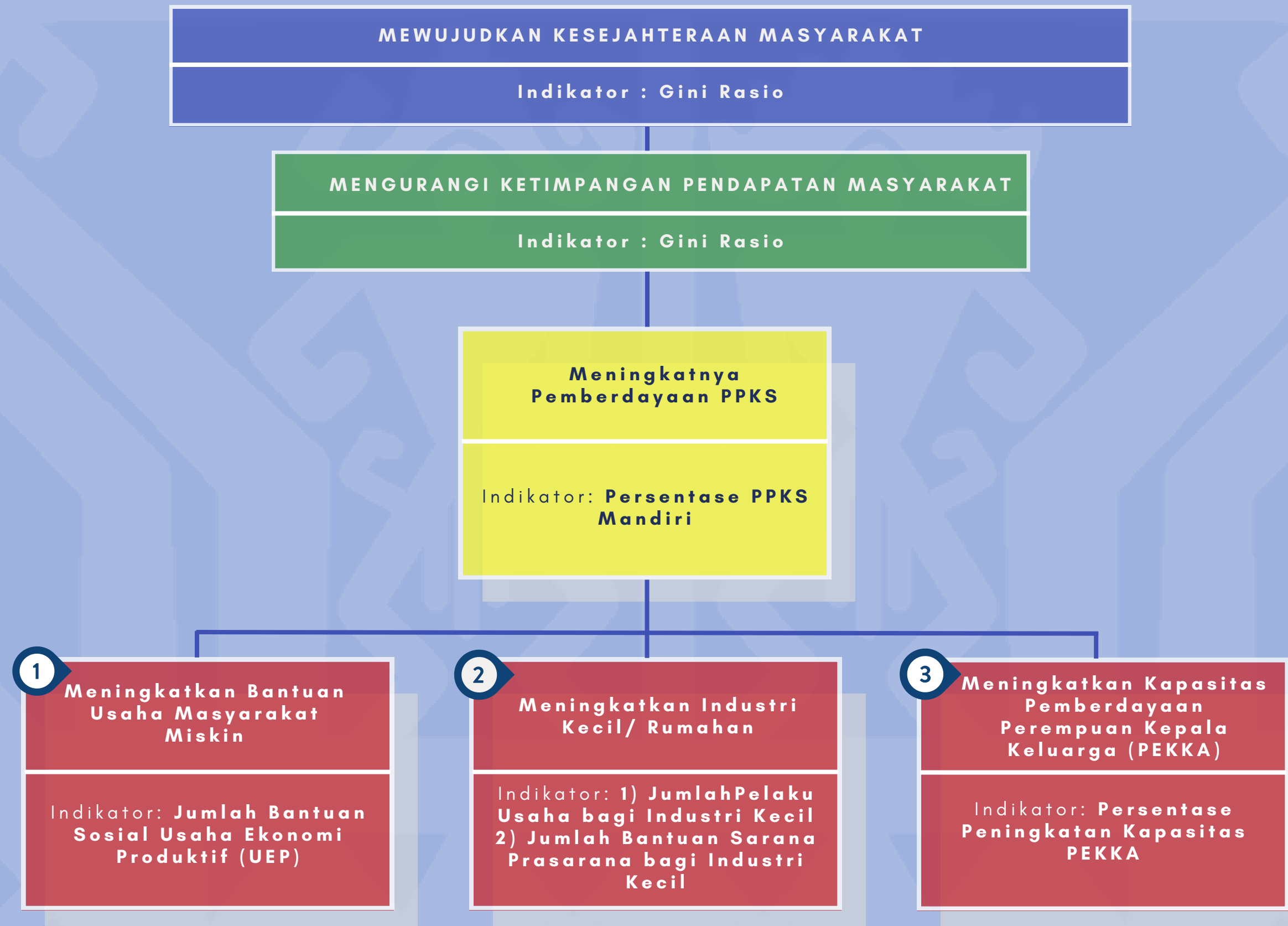
MISI 01 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors

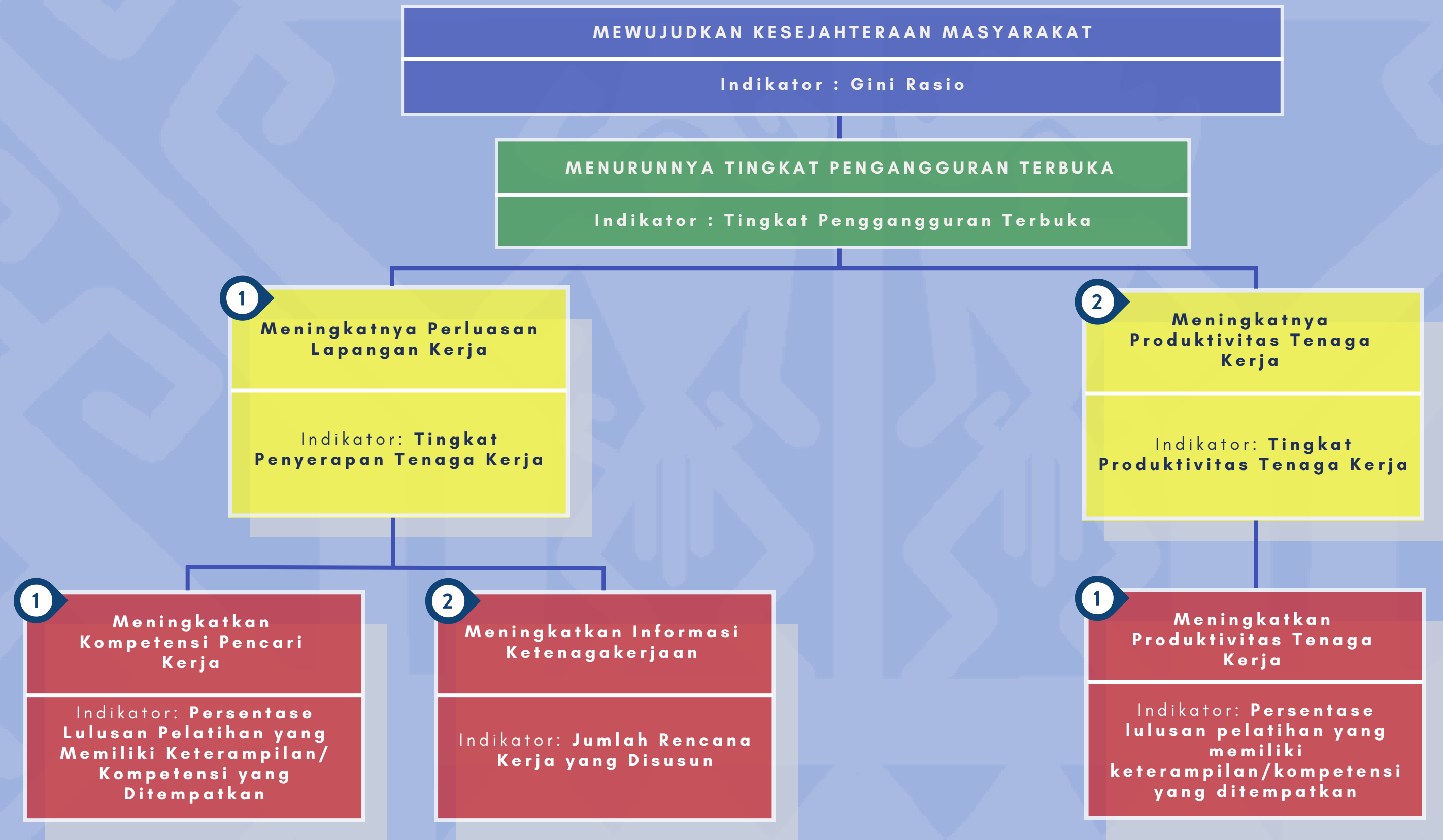


Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021









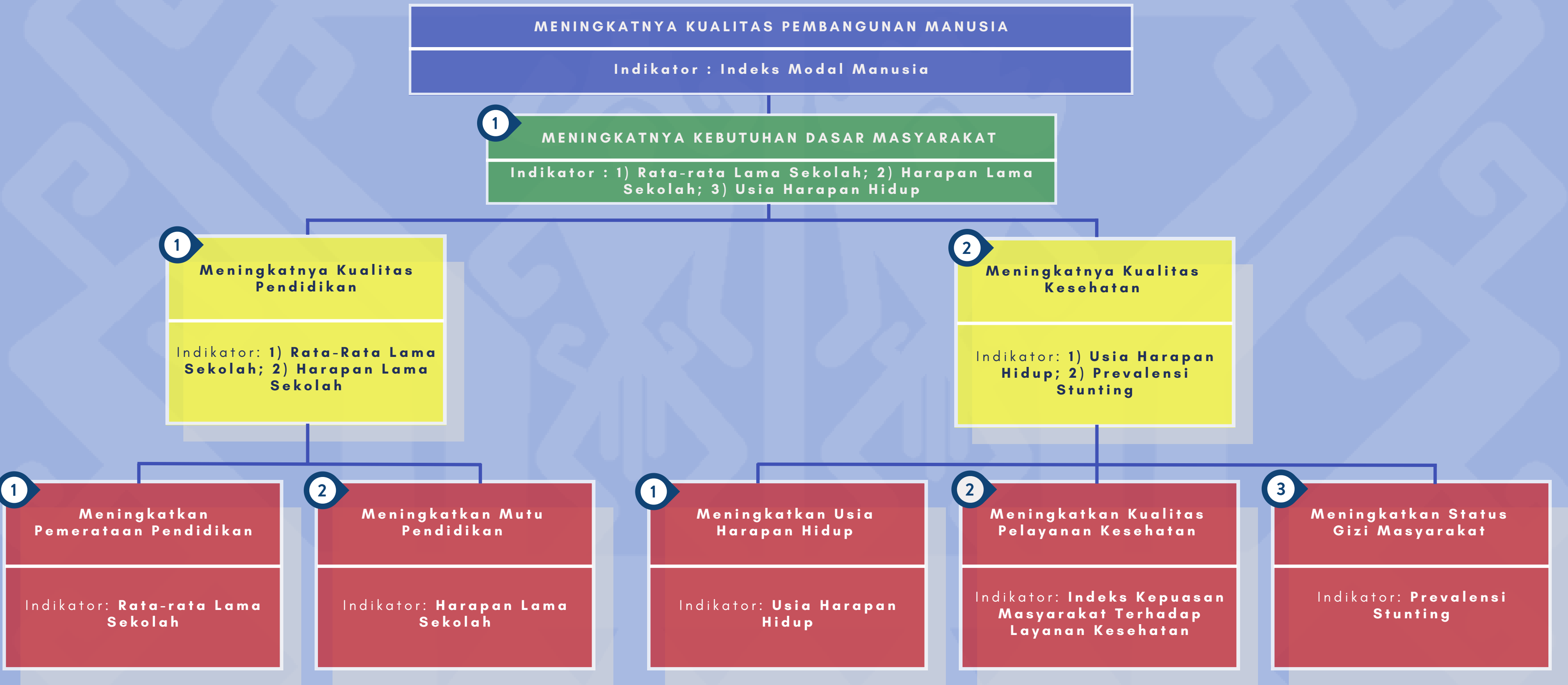


CITA KE - 2

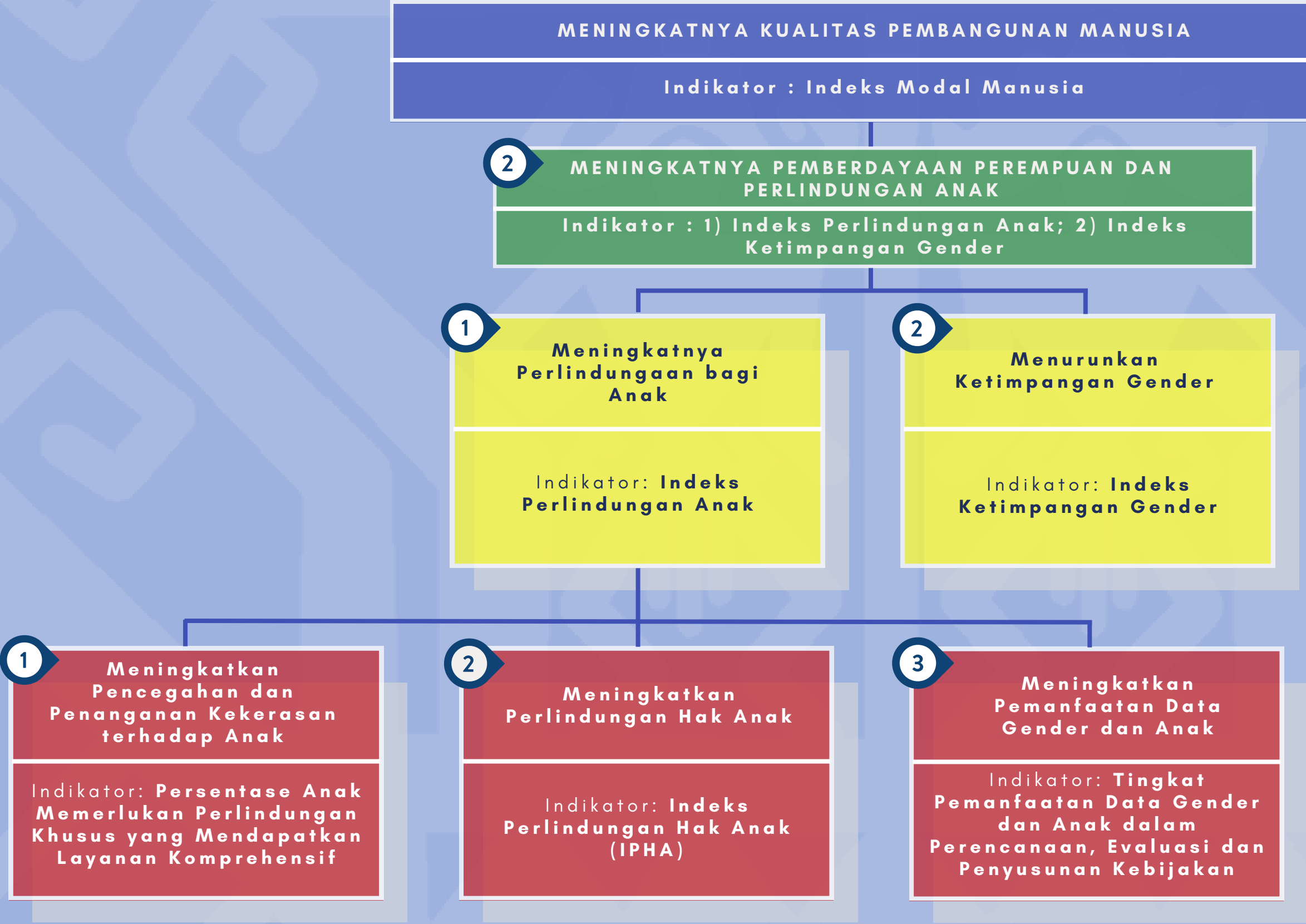
02

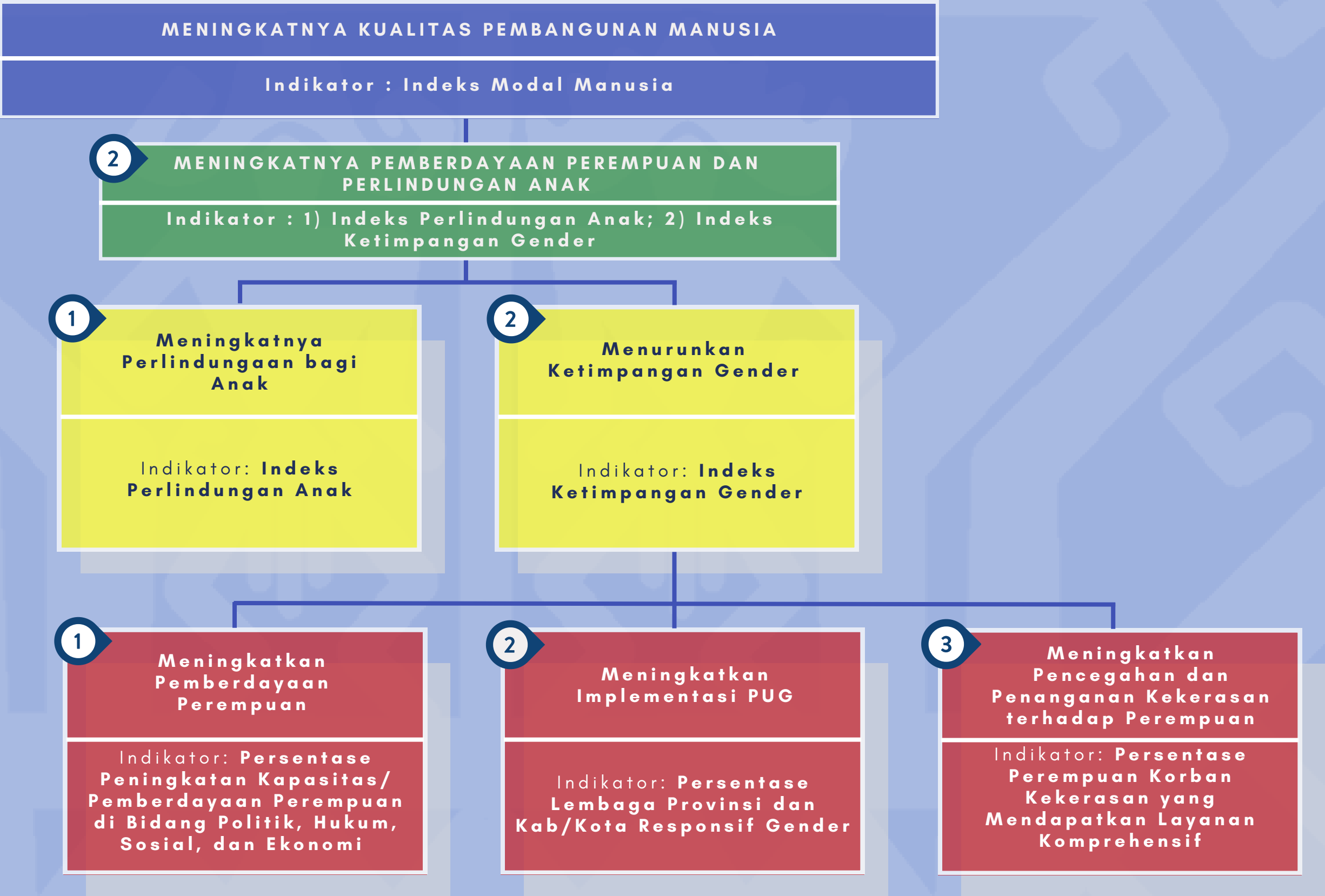
MEMPERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF

Fokus misi ini adalah memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui komitmen dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan inovatif, meningkatkan layanan kesehatan yang komprehensif, mendukung kegiatan olahraga, mendorong kemajuan dalam sains dan teknologi serta penguatan peran perempuan, generasi muda dan penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, misi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang berkualitas, sehat dan produktif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi dan ikut serta merasakan hasil pembangunan daerah.



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021





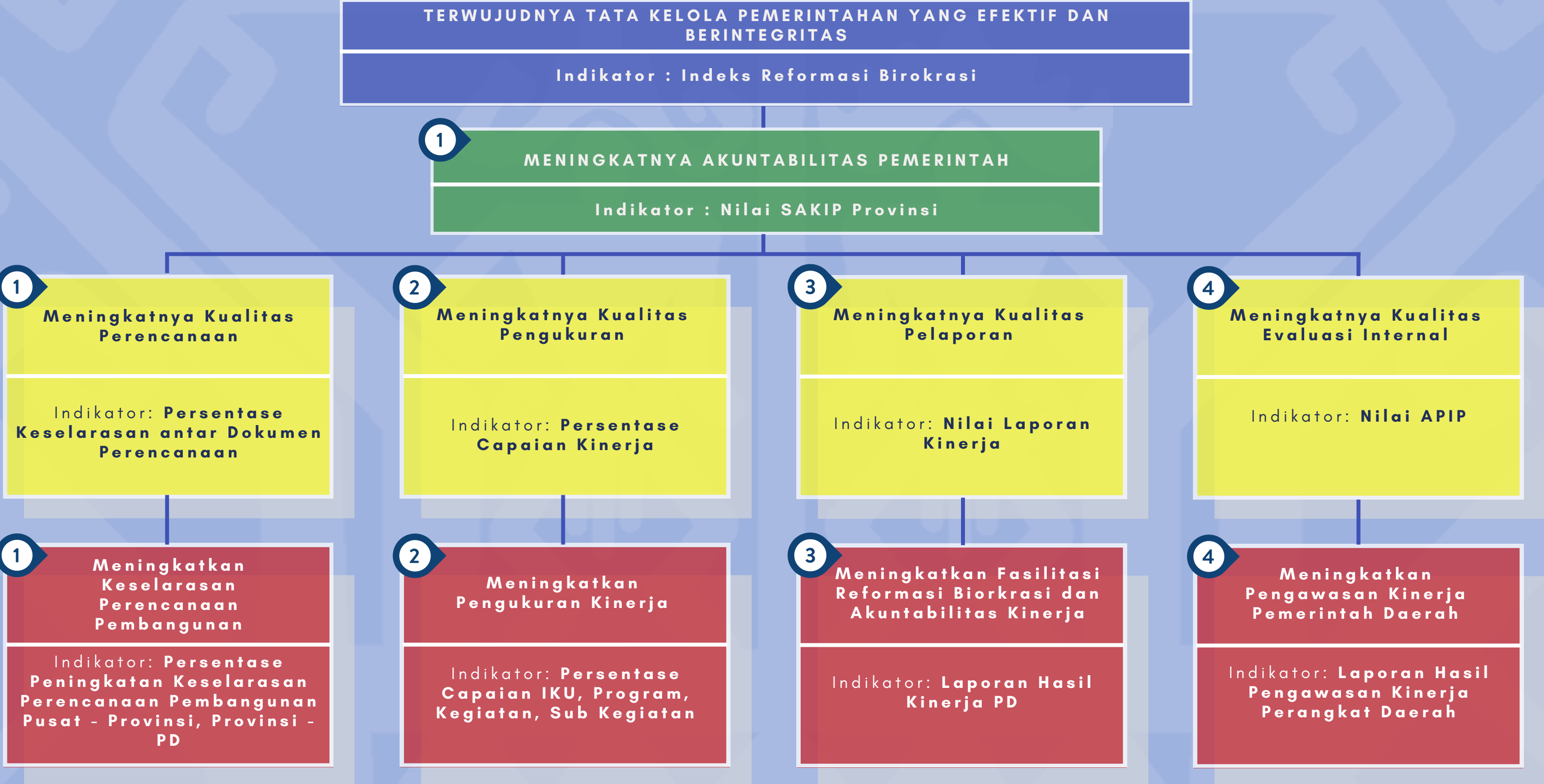


CITA KE - 3

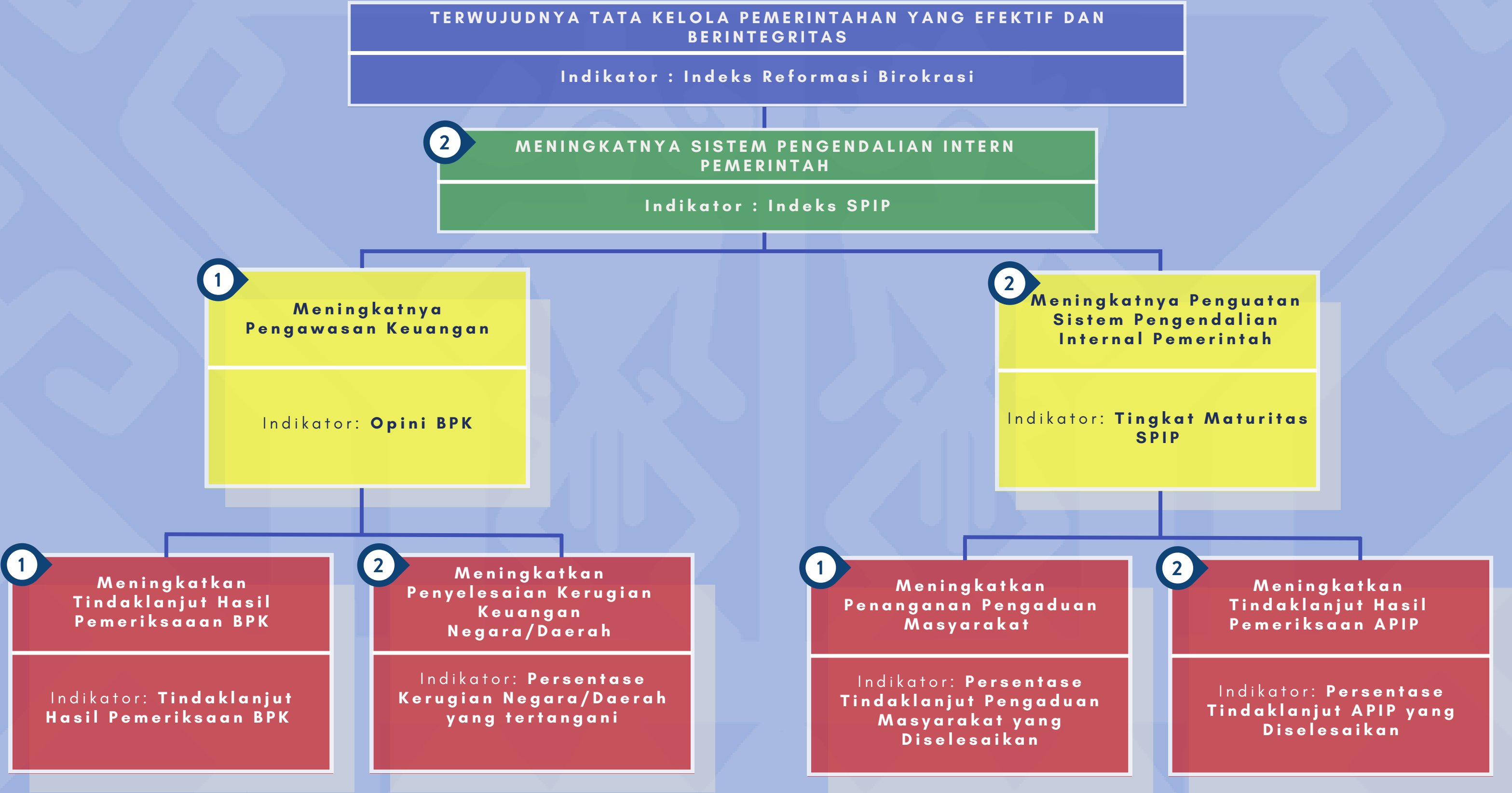
03

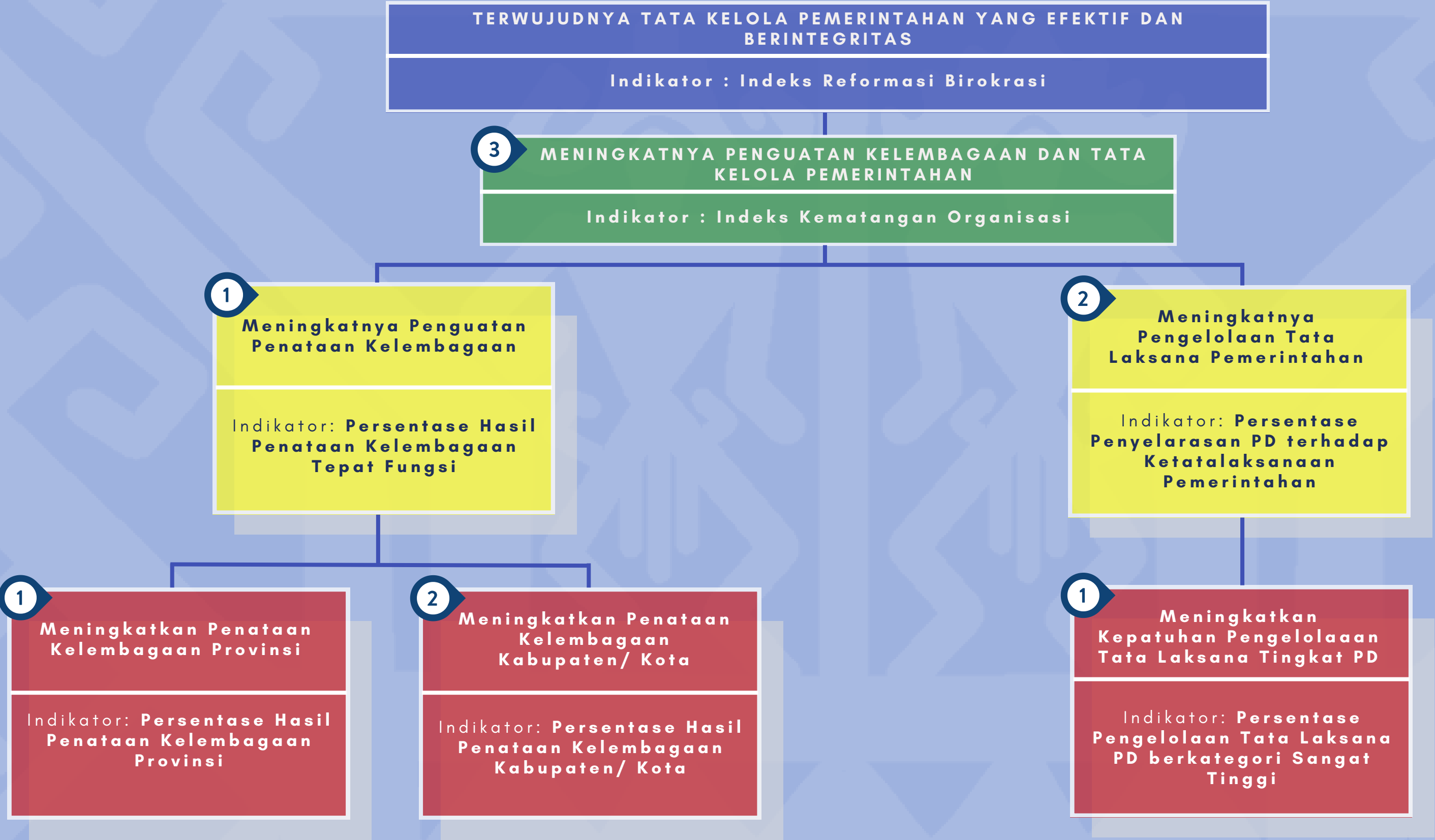
MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERADAB, BERKEADILAN, DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS

Untuk menciptakan masyarakat Provinsi Lampung yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, strategi yang diusulkan berfokus pada harmonisasi antara lingkungan alam, budaya, dan layanan publik. Pendekatan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang merangkul keberagaman seni dan budaya melalui penyelenggaraan festival dan *workshop*, serta revitalisasi lembaga kebudayaan untuk memperkuat identitas Lampung. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, lansia, disabilitas, serta kelompok terlanjur juga menjadi prioritas. Upaya peningkatan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan regulasi yang mendukung kesetaraan di tempat kerja juga diintegrasikan.



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021





Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

4

MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

1

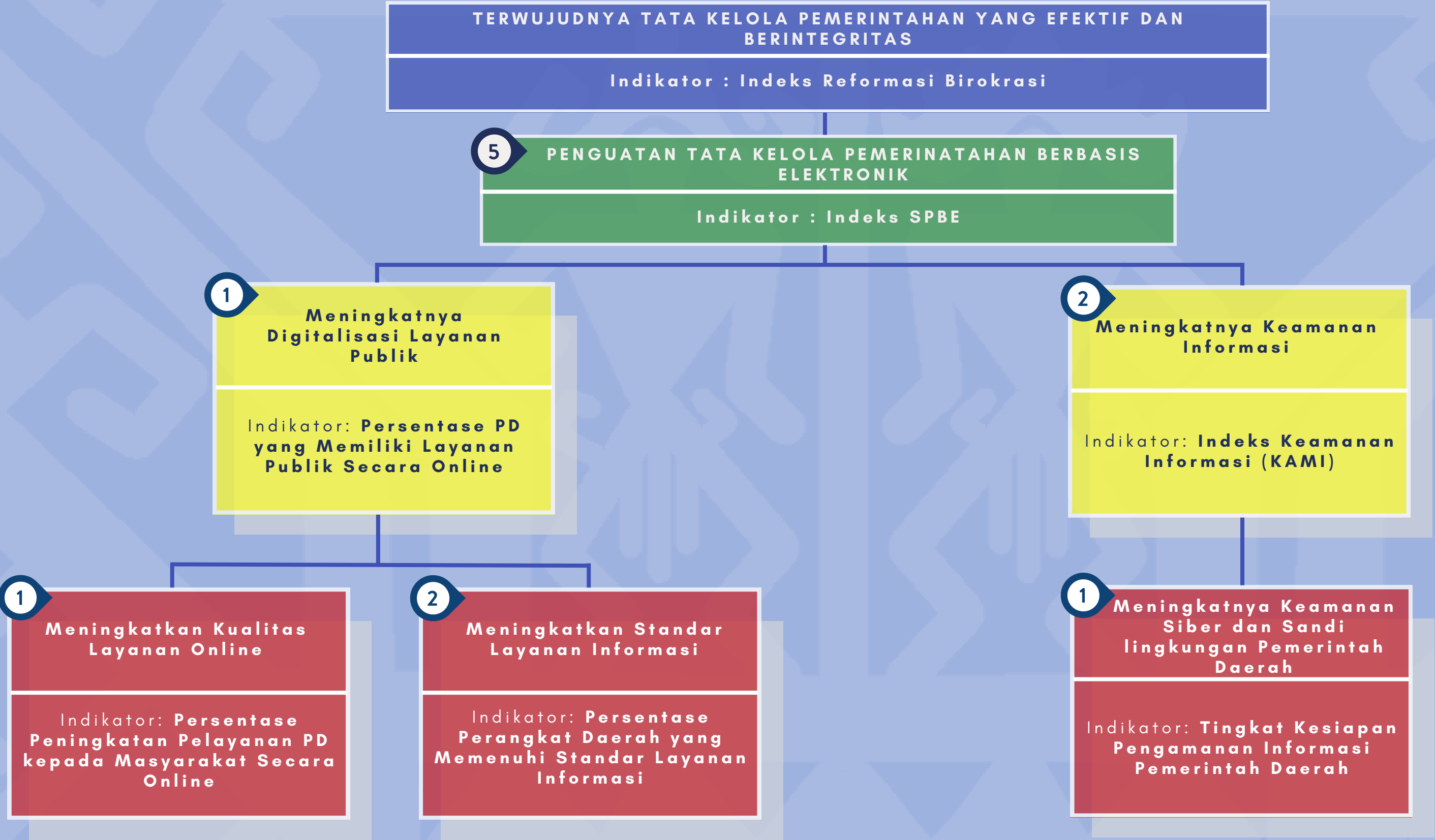
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator: Persentase Pelayanan Publik dengan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kategori Baik

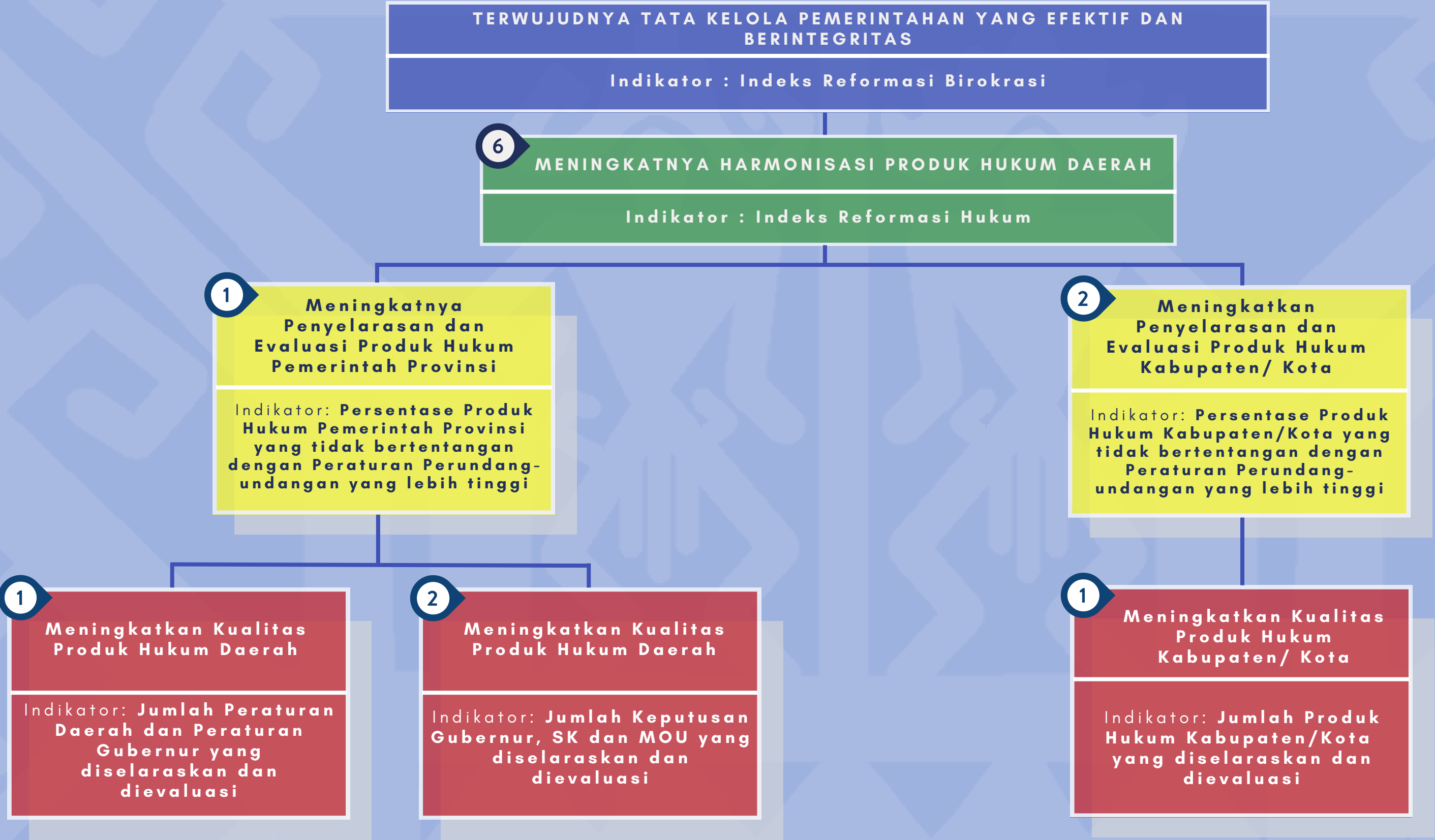
1

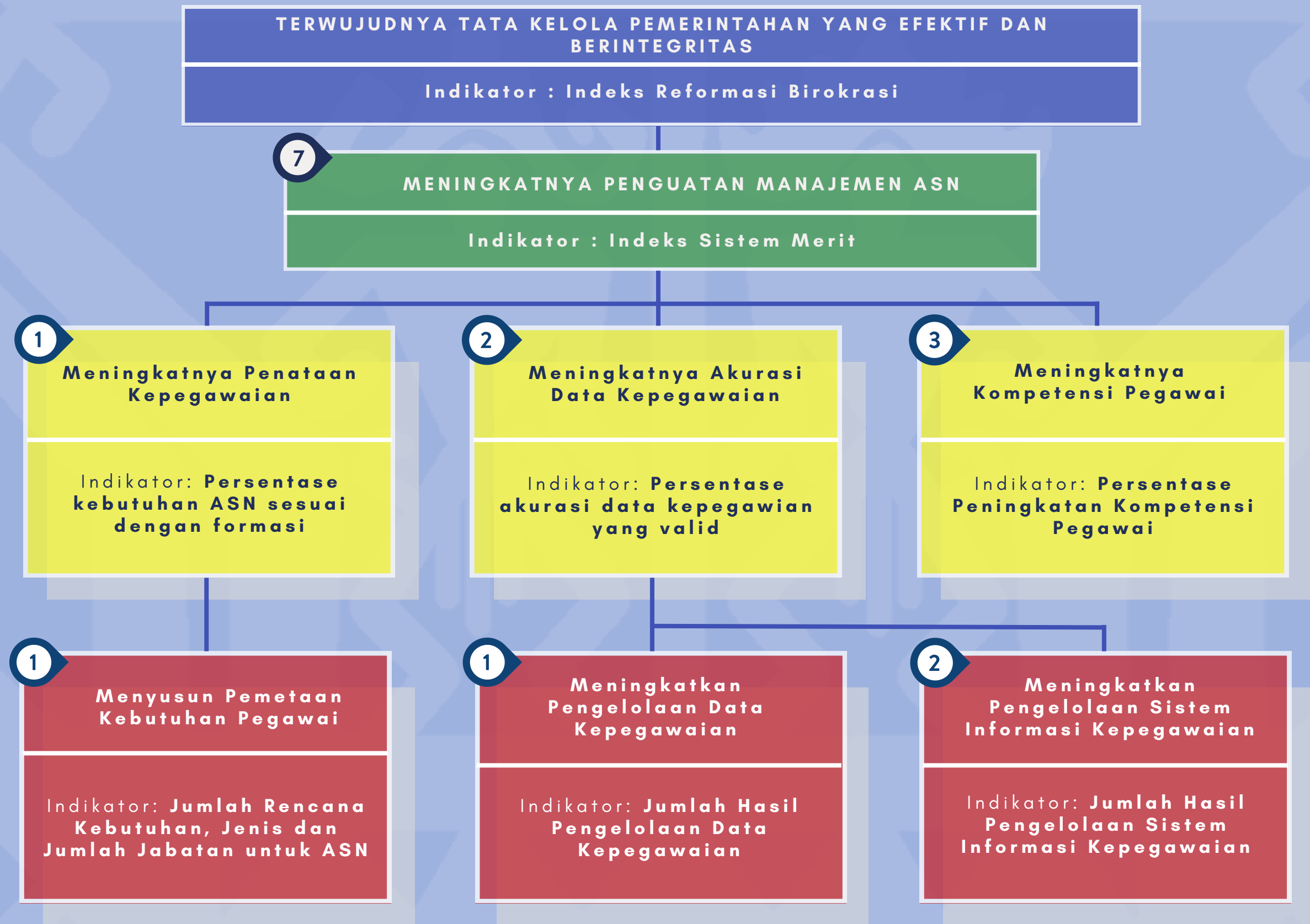
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Indikator: Persentase Peningkatan Pelayanan Publik



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021

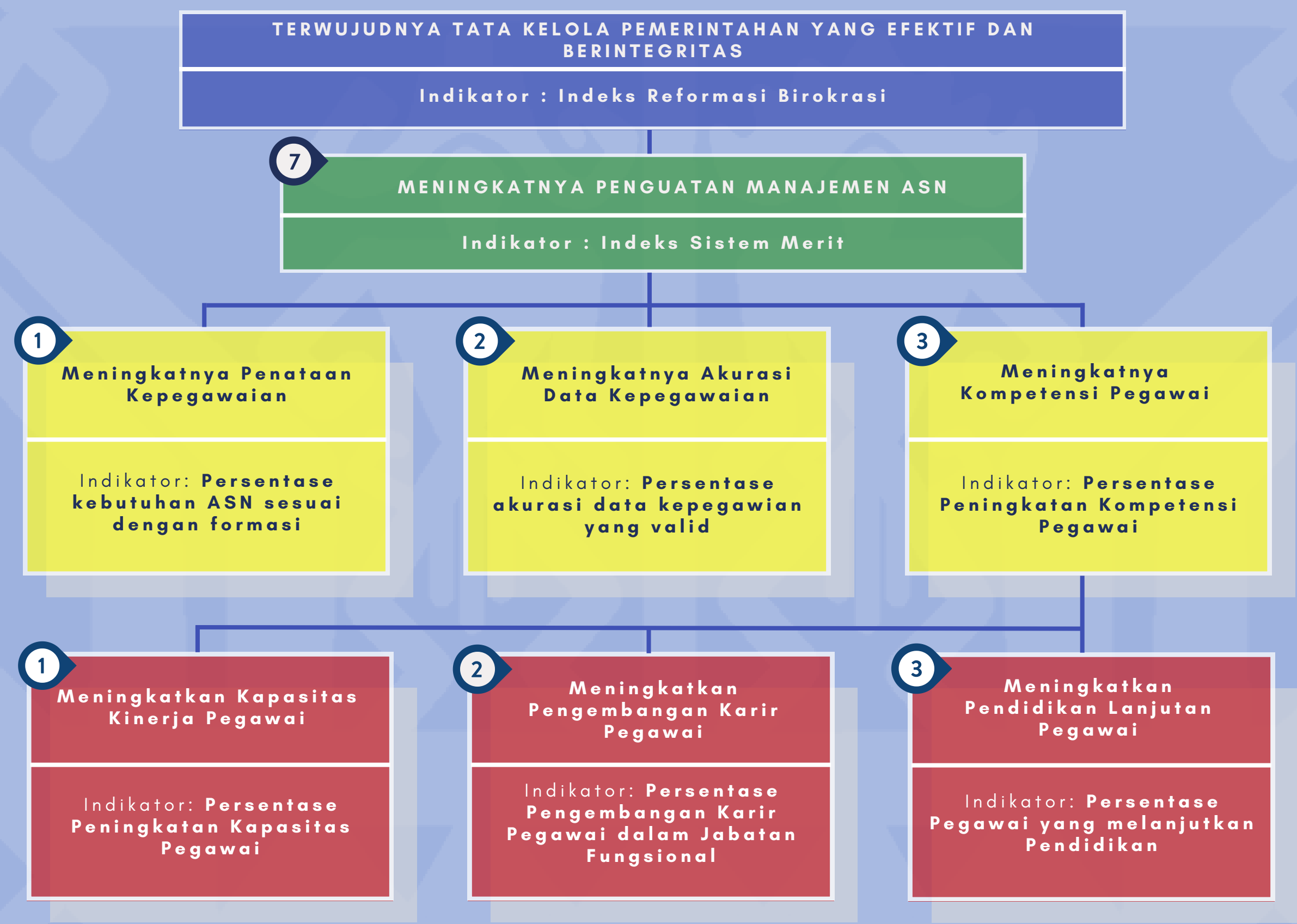




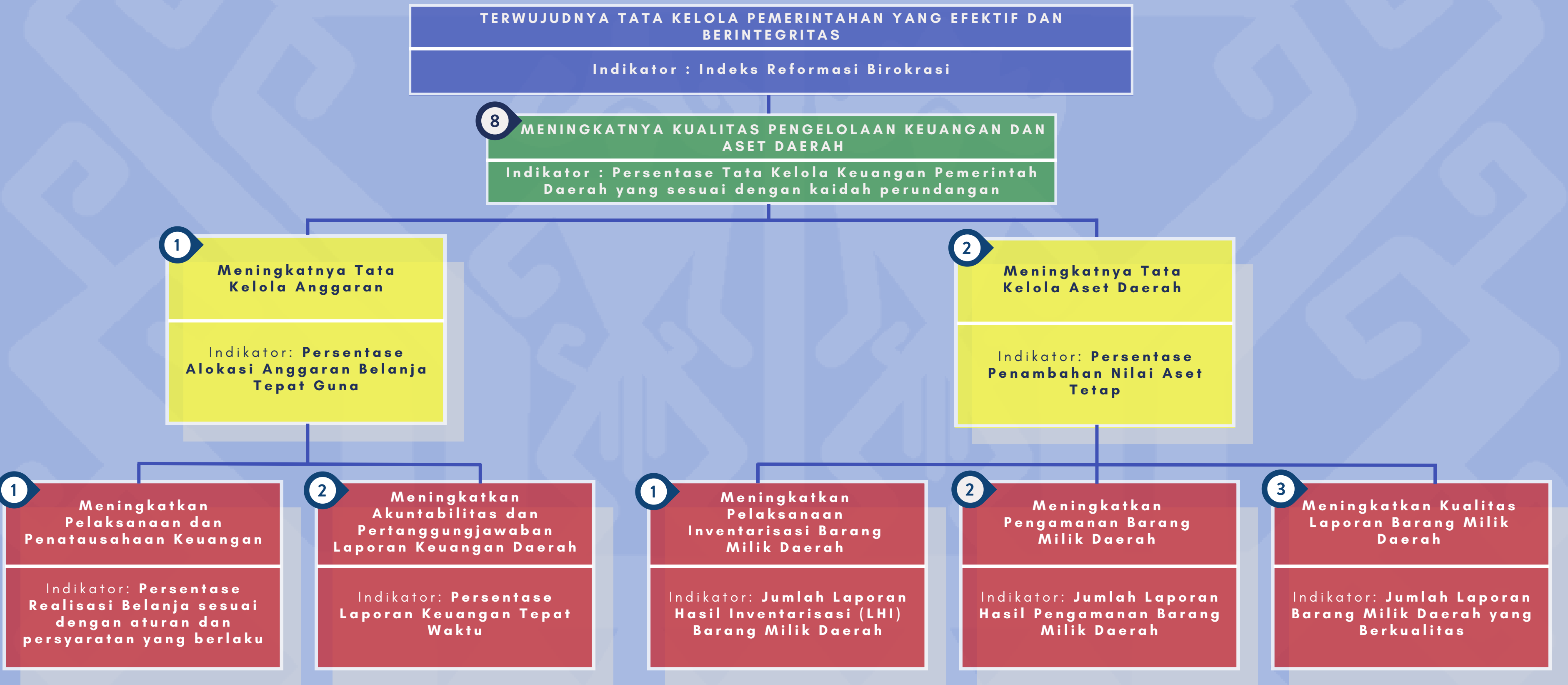
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



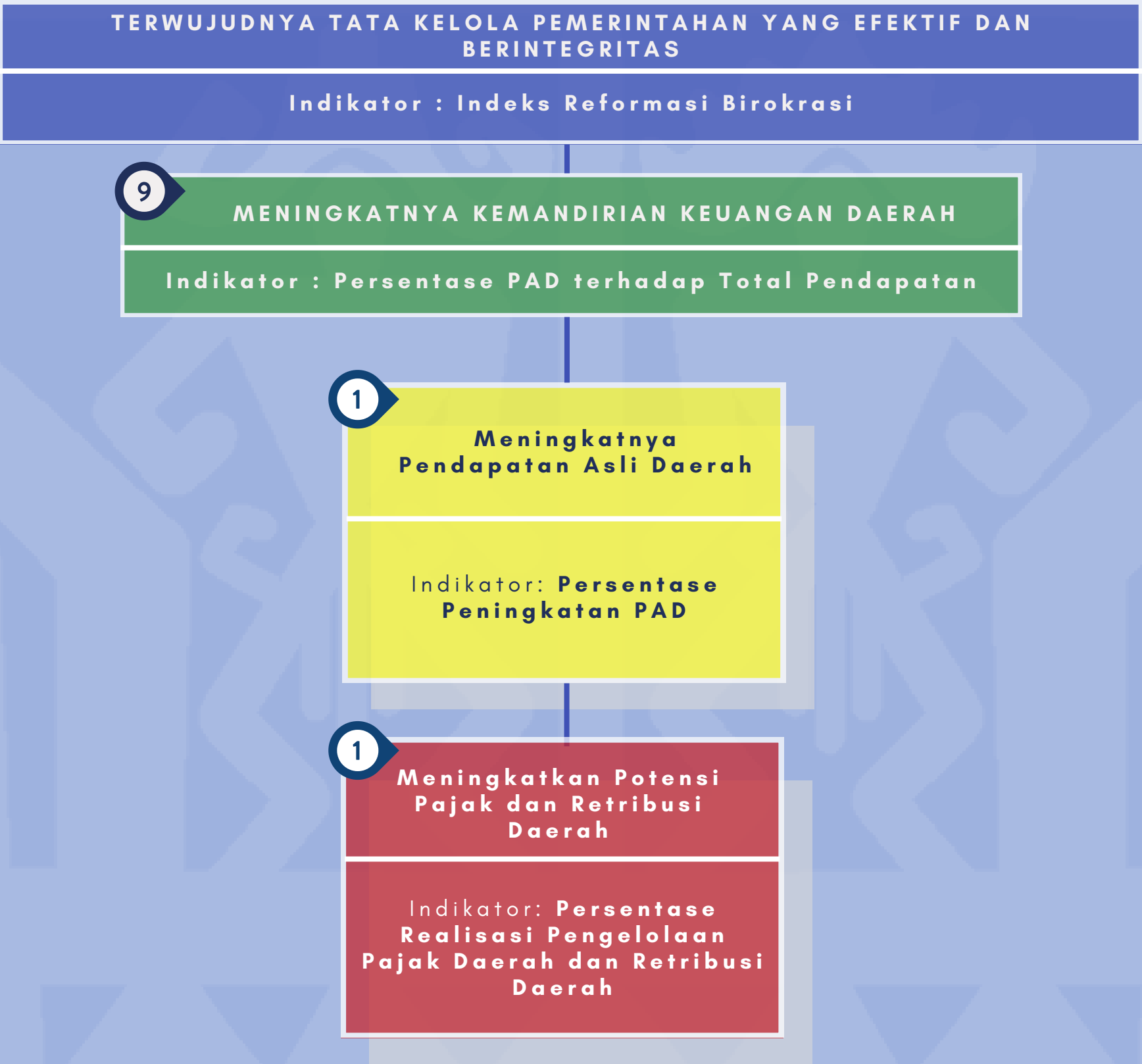
MISI 03 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors

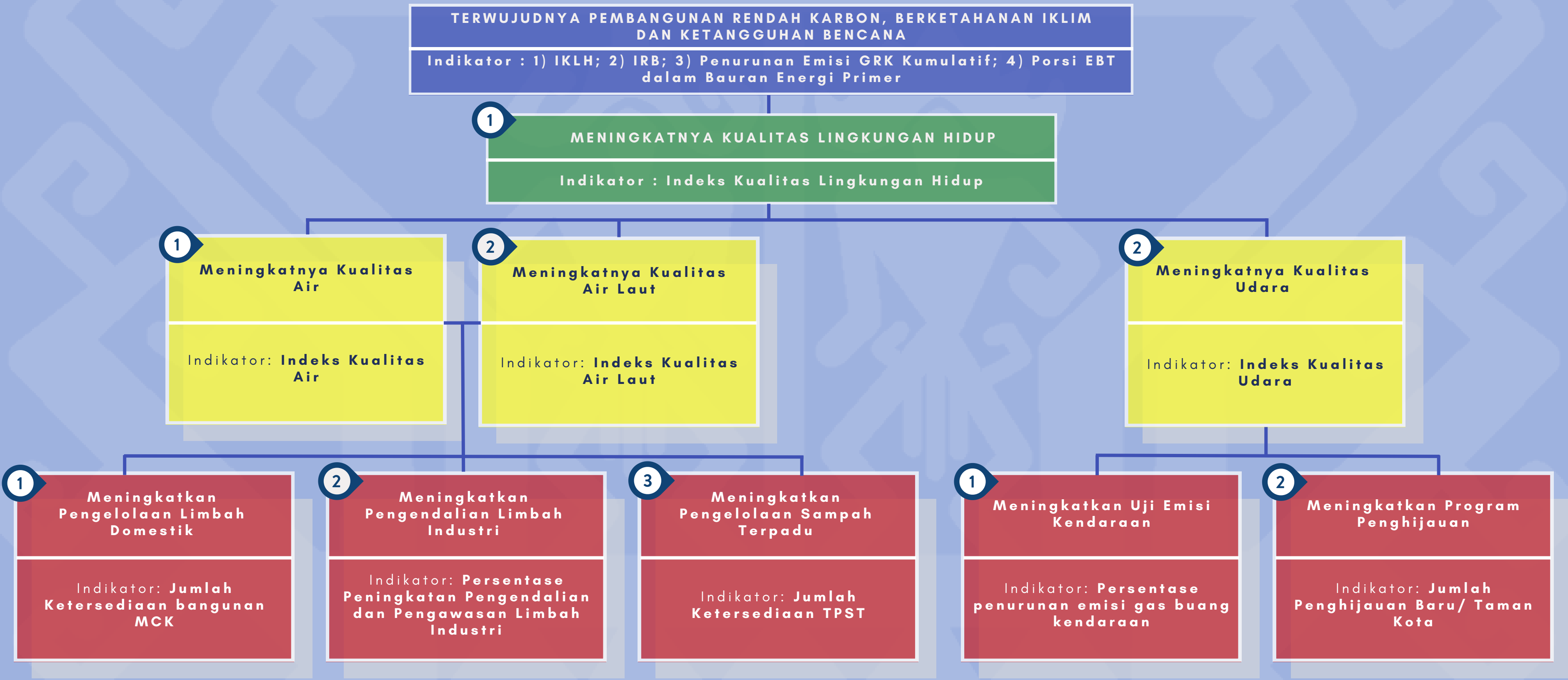


Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021

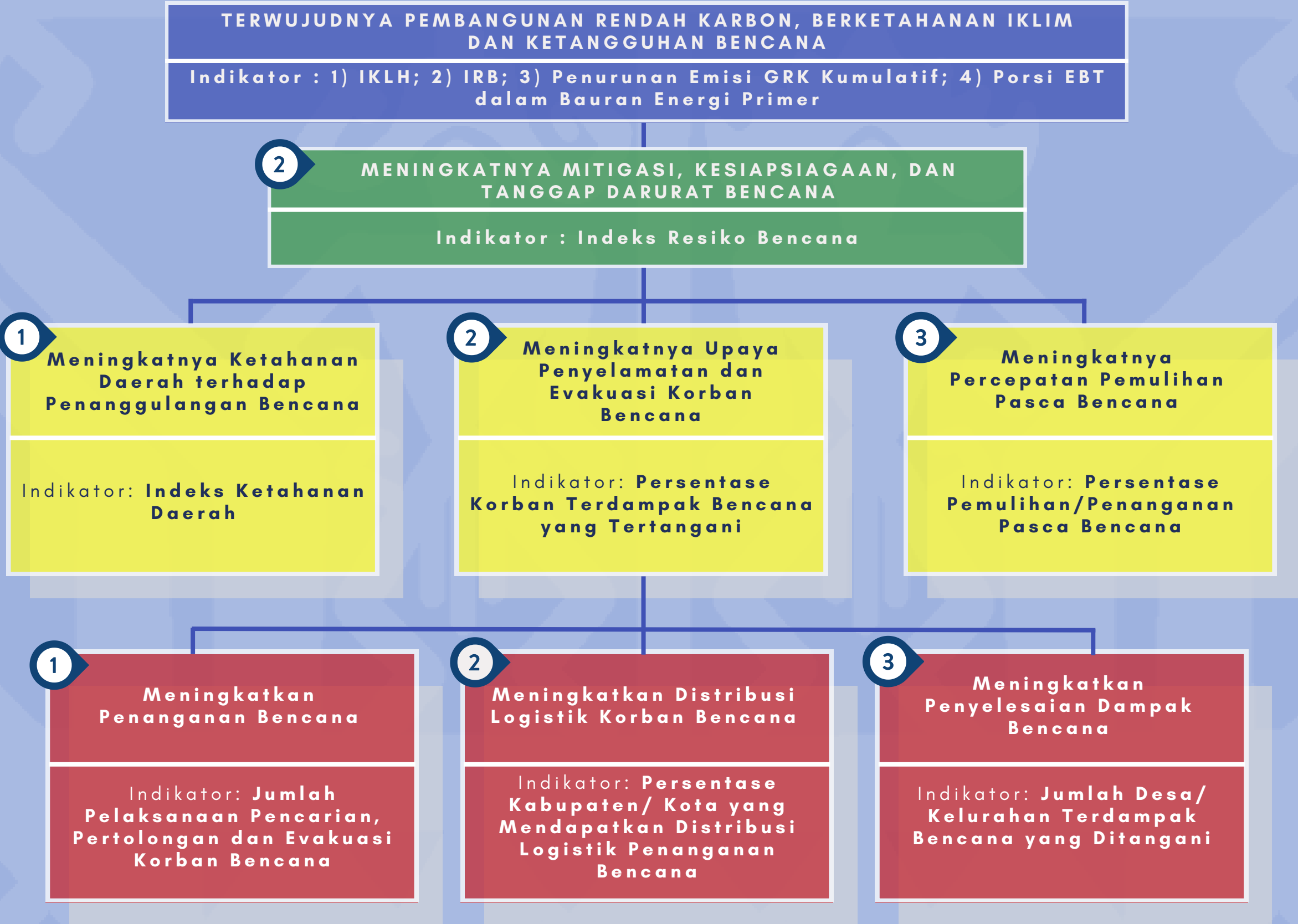




Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



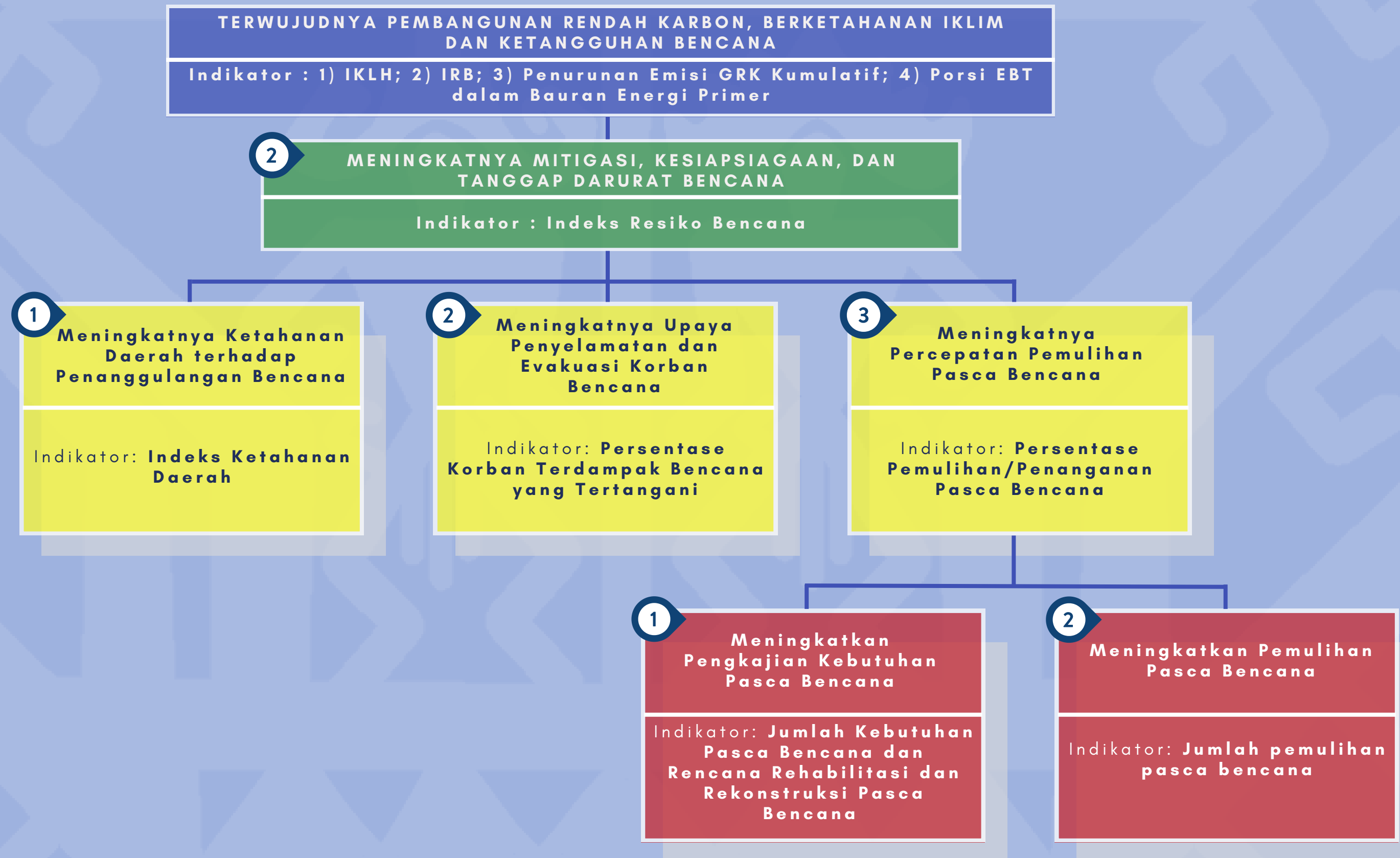
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



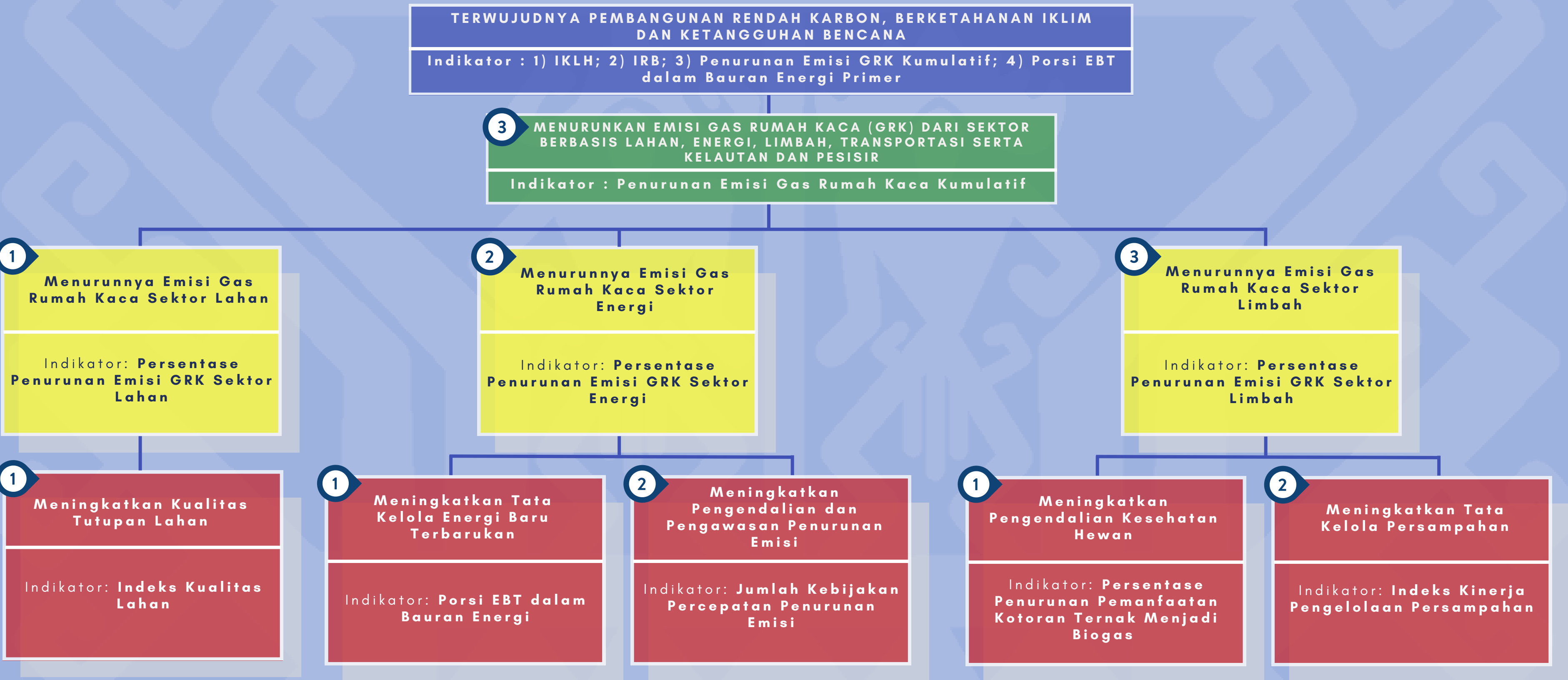
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



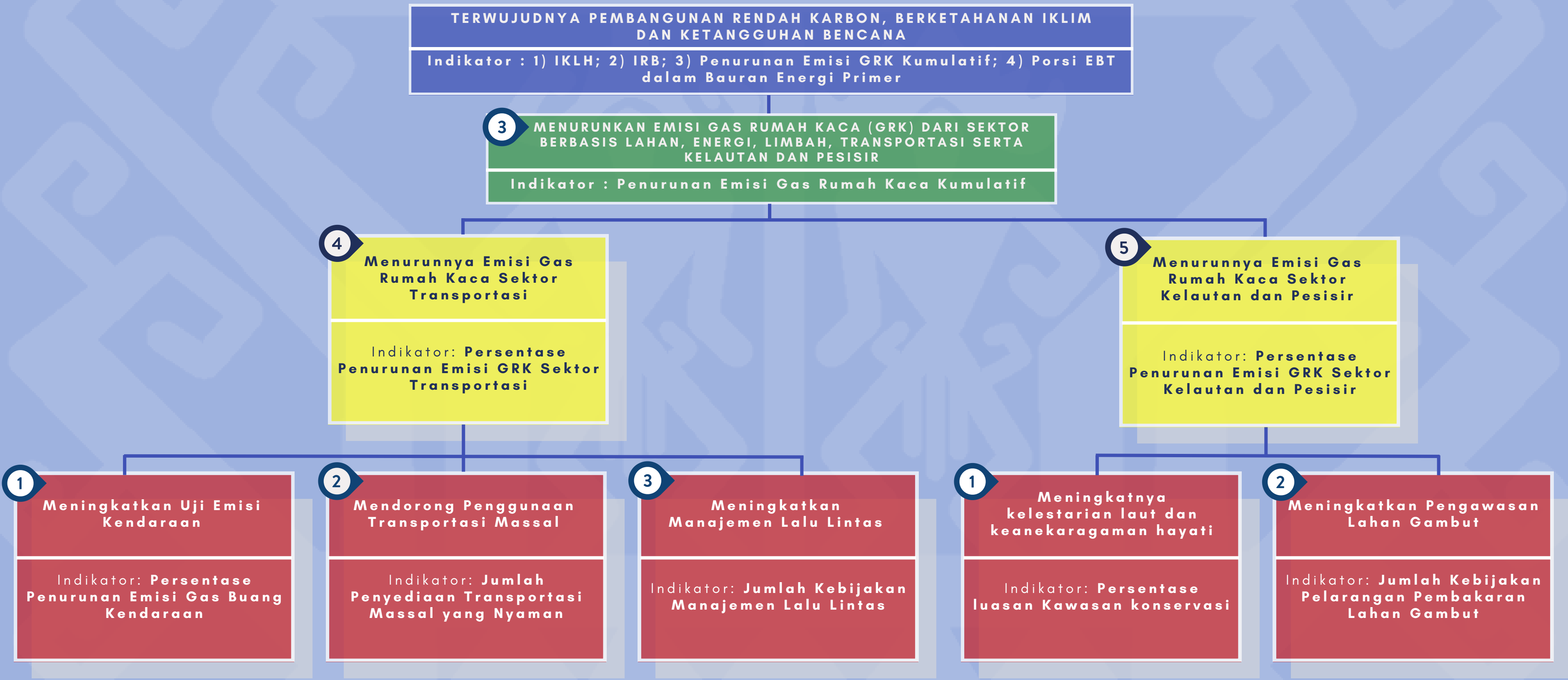
MISI 03 – Tujuan RPJMD – Critical Success Factors



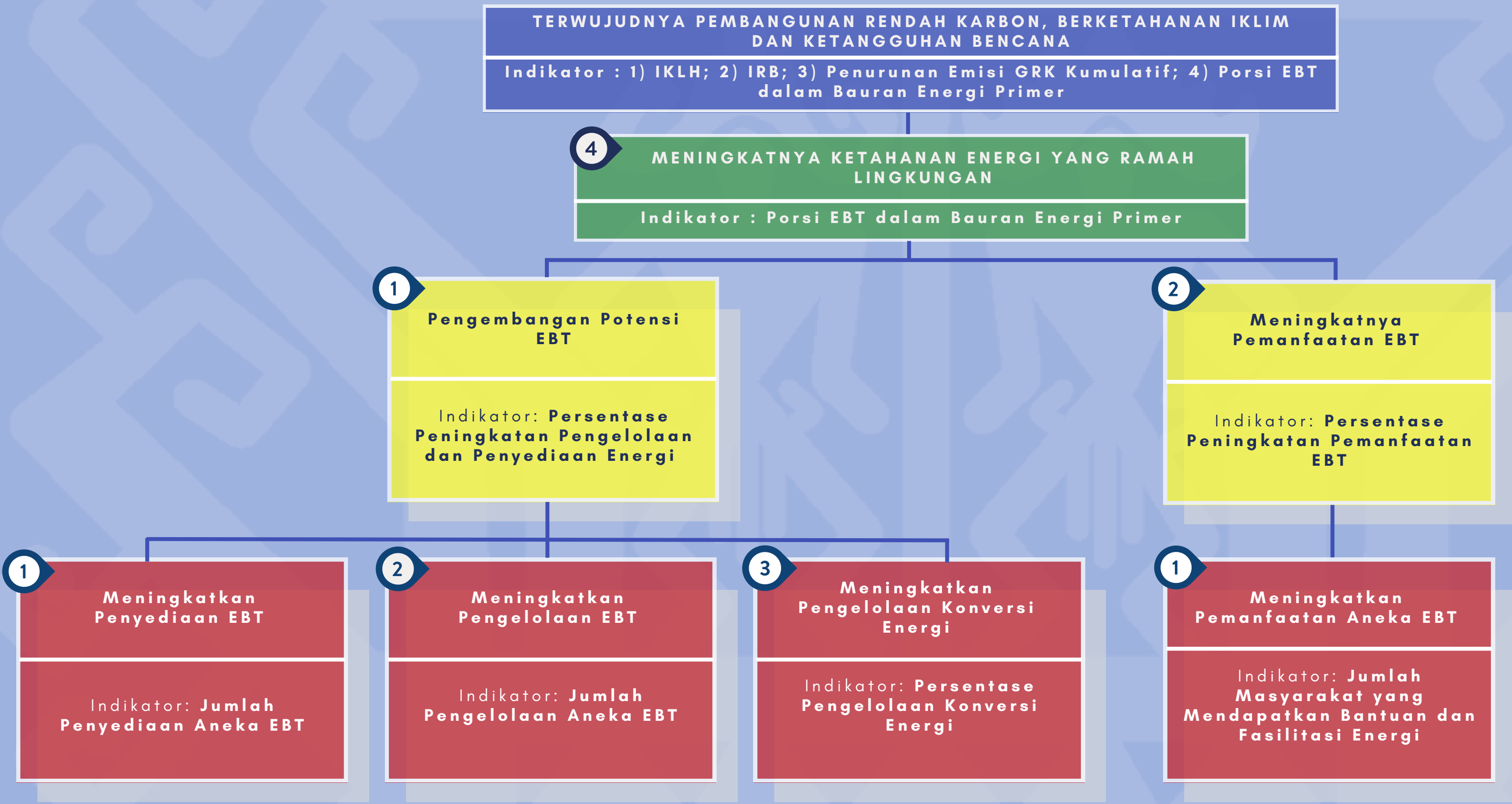
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021



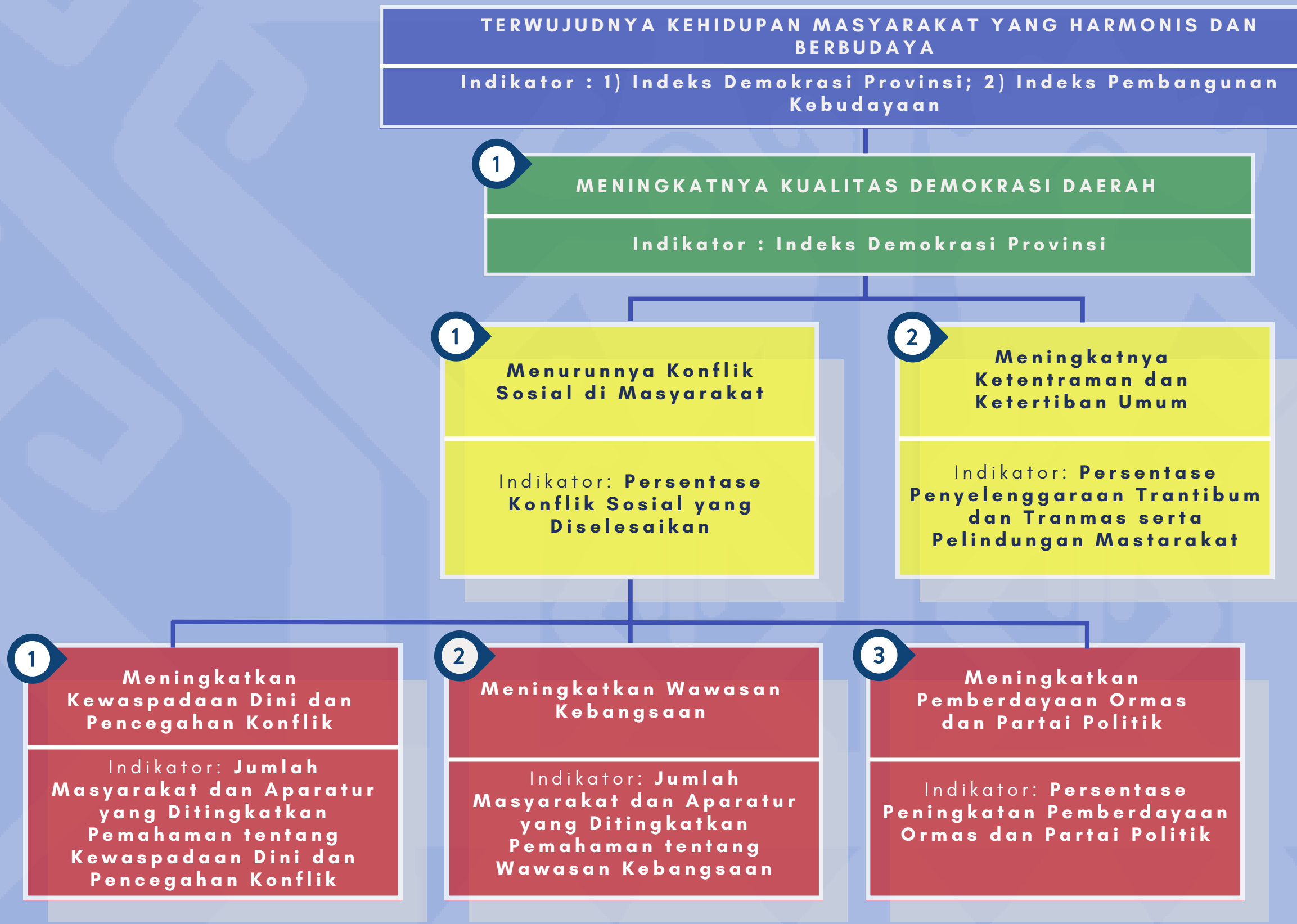
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021

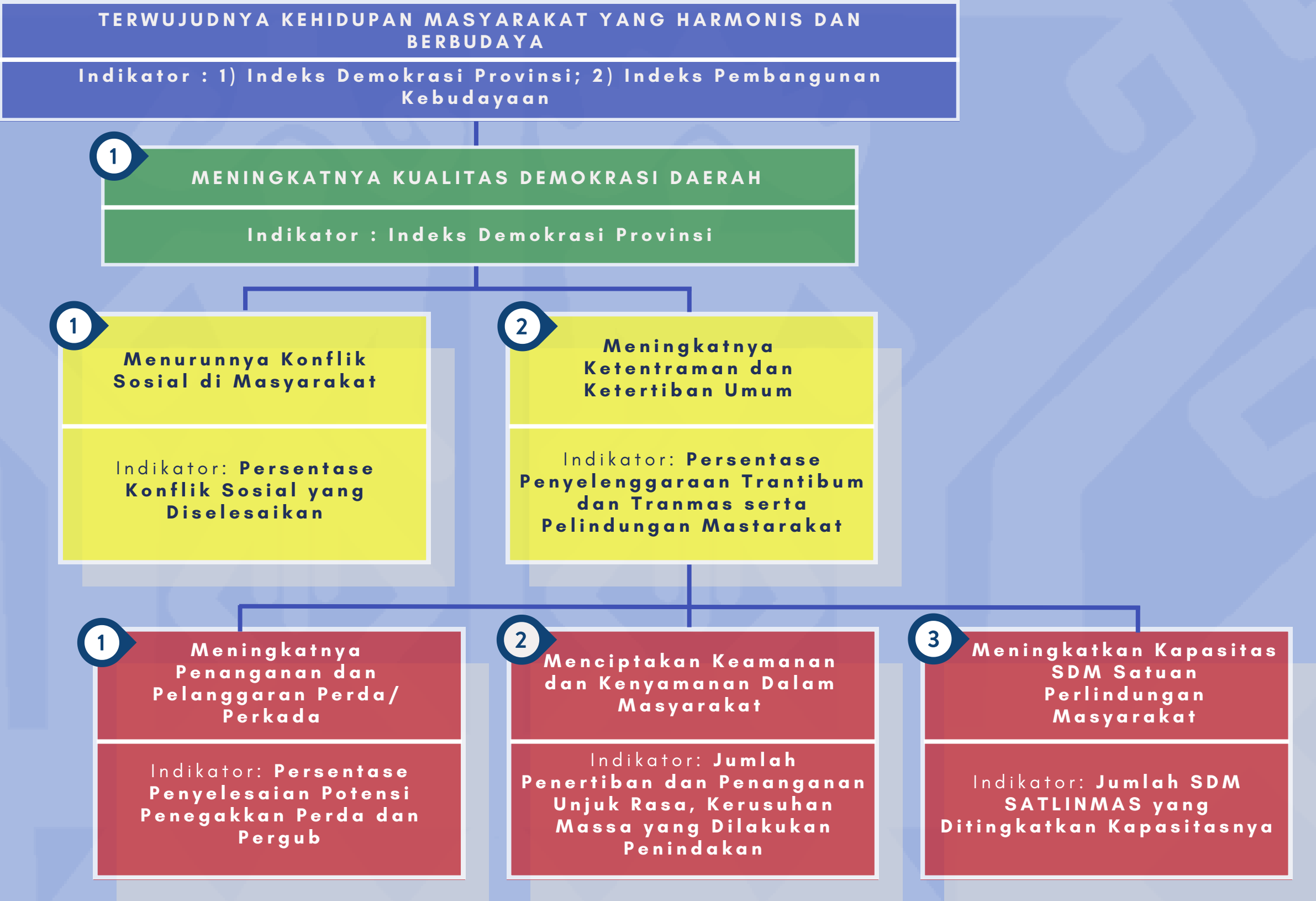


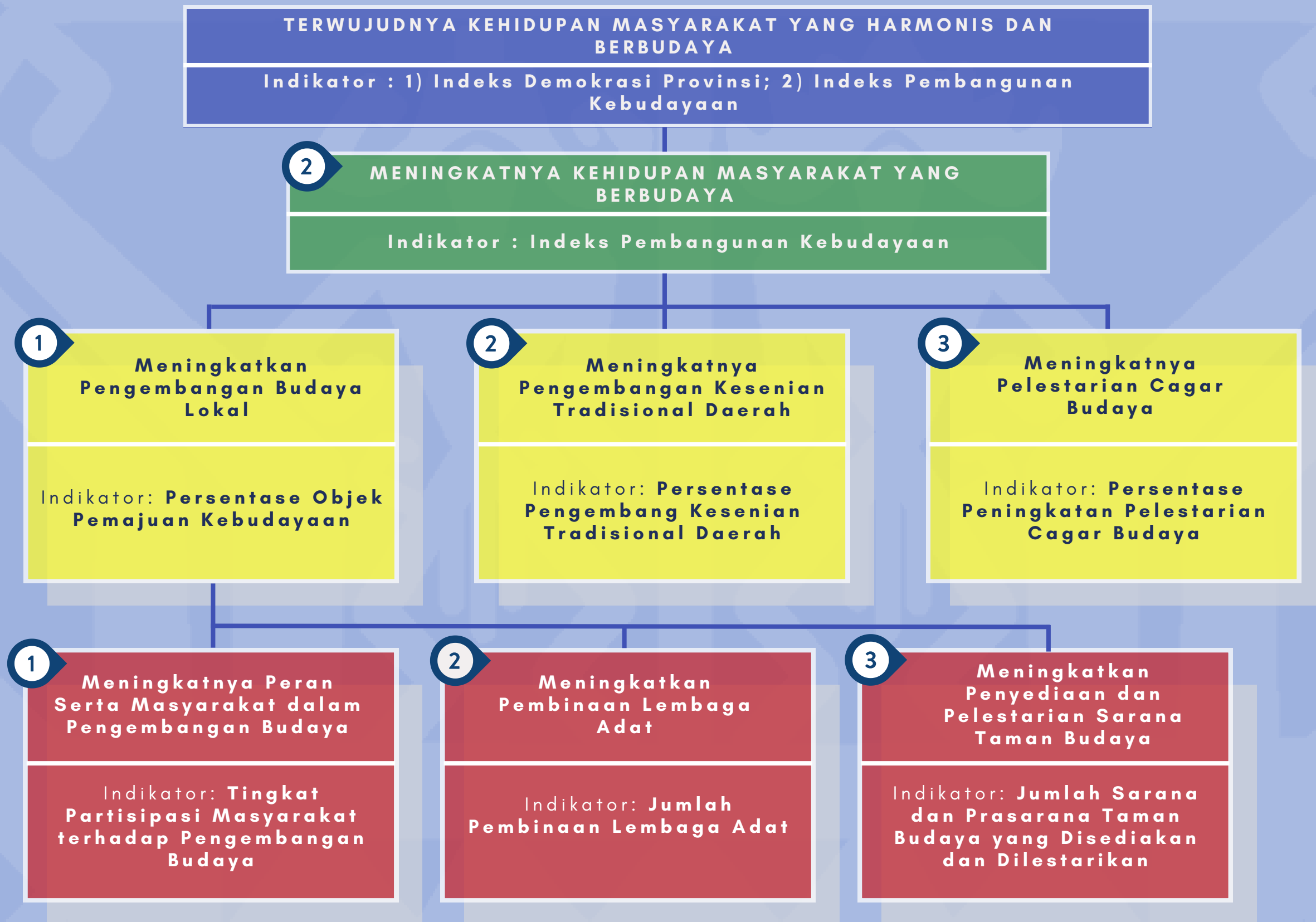
Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021

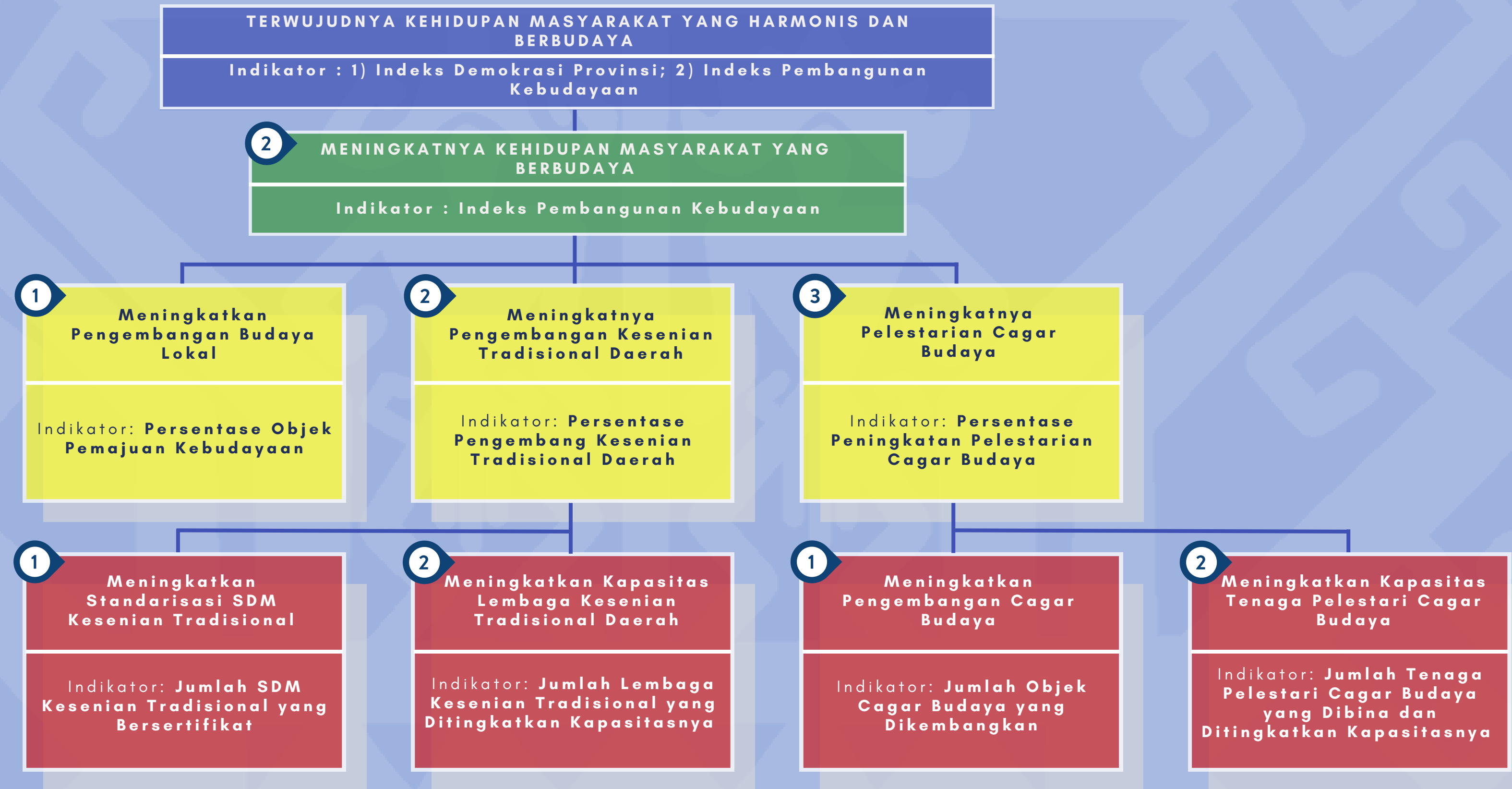


Berdasarkan Permen PANRB NO 89 TAHUN 2021









Terima Kasih

شكرا جزيلا

*Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
Indonesia*